





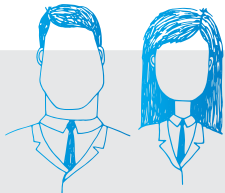
TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

04

Business Support Review



Sumber Daya Manusia Human Capital



Keberadaan Sumber Daya Manusia yang unggul, kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi merupakan sebuah tujuan dan komitmen luhur yang tak luput dari perhatian serta fokus pengembangan WIKALABETON.

Having an excellent, competent, professional, and highly competitive Human Capital (HC) is one of the principal objectives and commitment that is always being observed unequivocally by WIKALABETON in its business development.

Keberadaan Sumber Daya Manusia yang unggul, kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi merupakan sebuah tujuan dan komitmen luhur yang tak luput dari perhatian serta fokus pengembangan WIKALABETON. Upaya dan komitmen tersebut dilatarbelakangi pemahaman serta keyakinan akan peran SDM sebagai katalisator utama penggerak keberhasilan bisnis dan pencapaian visi dan misi Perseroan. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka Perseroan senantiasa merancang dan menerapkan strategi pengembangan SDM yang tepat dan terukur demi mengimbangi serta mengakomodasi tercapainya rencana strategis pertumbuhan bisnis Perseroan secara komprehensif.

Having an excellent, competent, professional, and highly competitive Human Capital (HC) is one of the principal objectives and commitment that is always being observed unequivocally by WIKALABETON in its business development. The Company's efforts and commitment concerning its HC are centered on the belief that HC is the key catalyst for success and achievement of the Company's vision and mission. Embarking from this understanding, the Company consistently designs and implements effective and measured HC development strategies in order to accommodate the realization of its strategic plans for comprehensive business growth.

Pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan maupun Perusahaan Anak menjunjung prinsip *right man in the right place* serta didukung oleh perangkat kebijakan dan program yang komprehensif. Selain itu, prinsip kesetaraan dan bebas diskriminasi suku, ras, agama, ataupun gender turut melandasi implementasi pengembangan SDM yang dijalankan WIKA BETON, khususnya dalam mendukung pengembangan karier dan kompetensi, penilaian kinerja, serta kebebasan berserikat. Melalui pengelolaan SDM yang komprehensif serta iklim kerja yang kondusif, Perseroan bertujuan untuk mencetak SDM unggul dan berproduktivitas tinggi sehingga pada gilirannya mampu merespons tantangan serta kebutuhan industri beton yang dinamis.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM WIKA BETON

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan SDM yang dirancang dan diimplementasikan Perseroan telah disesuaikan dengan rencana strategis Perseroan yang menargetkan adanya pertumbuhan usaha, regenerasi karyawan yang akan pensiun, dan berbagai aspek lainnya sebagaimana tertuang di dalam Rencana Jangka Panjang (RJP), antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan.
2. Meningkatkan produktivitas pegawai dengan optimalisasi jumlah pegawai.
3. Mempersiapkan karyawan bertalenta yang sesuai dengan rencana suksesi.
4. Menyelenggarakan pelatihan pegawai serta memberikan pendidikan lanjutan S2 dan S3 untuk pegawai yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan usaha.
5. Mempersiapkan tenaga-tenaga profesional sesuai dengan rencana usaha Perseroan.
6. Mendesain *Human Capital information System* secara bertahap.
7. Meningkatkan rasa keterikatan karyawan kepada Perseroan (*engagement level*) secara bertahap.
8. Meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas serta purnabakti pegawai secara bertahap.
9. Melakukan pembinaan dan internalisasi budaya perusahaan kepada pegawai baru sesuai perkembangan dan pertumbuhan Perseroan.

STRUKTUR DAN PROFIL PEJABAT BIRO HC



HC management within both the Company and its Subsidiaries upholds the principle of 'right man in the right place' and is supported by wide-ranging policies and programs. Furthermore, the principle of equality and non-discrimination of ethnicity, race, religion, and gender are among the foundations upon which WIKA BETON's HC development is implemented, especially in supporting career and competency improvement, performance evaluation, and freedom to create a union. Through inclusive HC management and conducive work climate, the Company aims to create excellent HC with high productivity in order to be able to respond to the dynamic challenges and needs of concrete industry.

HC MANAGEMENT POLICY OF WIKA BETON

The HC development and management policies designed and implemented by the Company have been tailored to its strategic plans and targets for business growth, regeneration of employees entering retirement age, and other various aspects as stipulated in the Long-Term Plan, which include:

1. Improvement of employee's competency based on Job Competency Standards.
2. Improvement of employee's productivity by optimizing the number of employees
3. Preparation of employees with the right talents according to the succession plan.
4. Implementation of training programs for employees as well as provision of scholarship for Master and Doctorate program according to the business development.
5. Preparation of professional staff according to the Company's business plans.
6. Preparation of Human Capital Information System in stages.
7. Improvement of employee's level of engagement to the Company in stages.
8. Improvement of welfare, health facilities, and retirement plans for employees in stages.
9. Implementation of corporate culture development and internalization to new employees according to the Company's growth.

STRUCTURE AND PROFILE OF HC BUREAU OFFICERS

Pengelolaan SDM WIKA BETON berada di bawah wewenang Biro Human Capital, yang kemudian membawahi 3 (tiga) bagian yaitu, Bagian Rekrutmen dan Penempatan, Bagian Pengembangan dan Talent, dan Bagian Pengharkatan.

HC management at WIKA BETON is under the authority of Human Capital Bureau, which supervises 3 (three) departments, namely Recruitment and Placement, Talent and Development, and Remuneration.

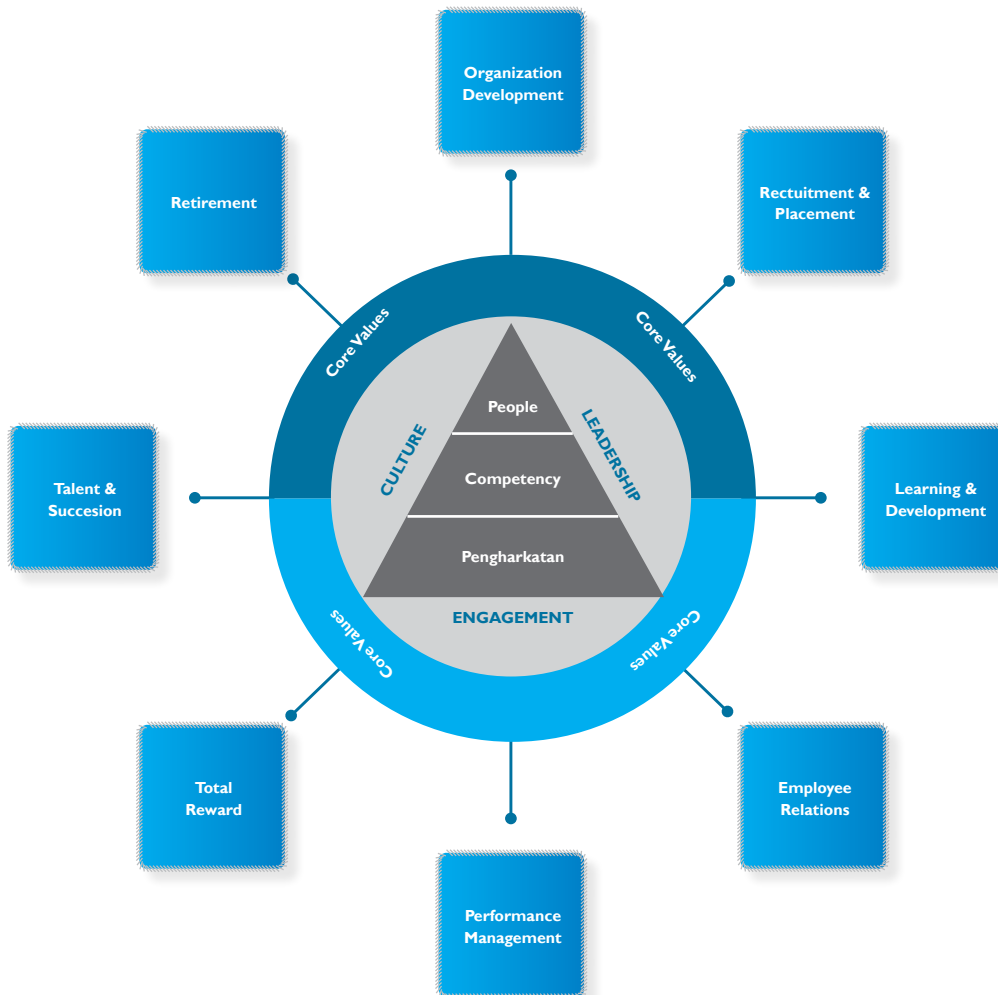
Profil Pejabat Human Capital

Profile of Human Capital Officers

<p>Agung Damiar Manajer Biro Human Capital dan PS Manajer Bagian Rekrutmen dan Penempatan / Manager of Human Capital Bureau and Interim Manager of Recruitment and Placement</p>	<p>Menjabat sejak 20 Desember 2017 dan mulai bergabung di WIKA BETON sejak 20 Januari 1989. Memperoleh gelar SI Teknik Industri dari Universitas Muhammadiyah Cirebon pada tahun 2008 dan pernah menduduki jabatan sebagai Manajer Pabrik di Pabrik Produk Beton Bogor. / He joined WIKA BETON on January 20, 1989 and has been serving as the Manager of Human Capital Bureau and Interim Manager of Recruitment and Placement since December 20, 2017. He earned his Bachelor's degree in Industrial Engineering from Universitas Muhammadiyah Cirebon in 2008. Previously, he served as the Manager of Concrete Product Plant of Bogor.</p>
<p>Ahmad Zainudin Manajer Bagian Pengharkatan / Manager of Remuneration</p>	<p>Menjabat sejak 1 Juni 2020 dan mulai bergabung di WIKA BETON sejak 20 Juli 1995. Memperoleh gelar SI Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1994 dan pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Keuangan dan SDM di Pabrik Produk Beton Pasuruan. / He joined WIKA BETON on July 20, 1995 and has been serving as the Manager of Remuneration since June 1, 2020. He earned his Bachelor's degree in Economics from Universitas Islam Indonesia Yogyakarta in 1994. Previously, he served as the Head of Finance and HC Section at Pasuruan Concrete Product Plant.</p>
<p>Rifiyal Huda Manajer Bagian Pengembangan & Talent / Manager of Development and Talent</p>	<p>Menjabat sejak 1 Februari 2020 dan mulai bergabung di WIKA BETON sejak 1 Mei 2014. Memperoleh gelar SI Psikologi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2012 dan pernah menduduki jabatan sebagai Manajer Bagian Rekrutmen dan Penempatan di Biro Human Capital Kantor Pusat. / He joined WIKA BETON on May 1, 2014 and has been serving as the Manager of Development and Talent since February 1, 2020. He earned his Bachelor's degree in Psychology from Padjadjaran University in 2012. Previously, he served as the Manager of Recruitment and Placement at the Human Capital Bureau of the Head Office.</p>

MODEL PENGEMBANGAN DAN FUNGSI HUMAN CAPITAL

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT MODEL AND FUNCTIONS



Biro *Human Capital* Perseroan memiliki sejumlah fungsi dan peranan penting terutama dalam hal pengelolaan pegawai, antara lain:

1. Menyusun rencana strategis Pengembangan Organisasi (*Organization Development*) termasuk di dalamnya penetapan strategis mengenai *Human Capital* dan struktur organisasi Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Melakukan pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Perseroan, baik melalui proses rekrutmen eksternal maupun mutasi pegawai internal.
3. Meningkatkan daya saing Perseroan dengan mengadakan sejumlah kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang berkesinambungan.
4. Menentukan kebijakan-kebijakan hubungan industrial agar tercipta hubungan yang harmonis baik di antara pegawai maupun antara pegawai dan Perseroan.
5. Menyusun kebijakan remunerasi karyawan serta operasionalnya di mana sistem remunerasi menjadi salah satu komponen yang menarik dan kompetitif di pasar tenaga kerja sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Perseroan.
6. Mempersiapkan calon generasi penerus Perseroan sedini mungkin melalui berbagai program percepatan agar kualitas pemimpin Perseroan di masa depan senantiasa sesuai dengan persyaratan dan tuntutan Perseroan.
7. Mempersiapkan pegawai yang akan mengakhiri masa produktifnya di Perseroan.

FOKUS PENGELOLAAN SDM WIKA BETON TAHUN 2020

Manajemen Perseroan berupaya mengimplementasikan kebijakan pengelolaan *Human Capital* yang komprehensif sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis Perseroan dalam satu integrasi tujuan, yakni visi, misi, target yang ditetapkan, serta keberlangsungan usaha jangka panjang. Untuk itu, Perseroan memaknai pentingnya peran manajemen dalam menghasilkan talenta terbaik dan profesional melalui kebijakan, inisiatif, dan program pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam menetapkan arah pengembangan *Human Capital*, Perseroan senantiasa menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan, inisiatif, dan program yang telah ada dengan perkembangan bisnis perusahaan. Dalam hal ini, Biro *Human Capital* bertanggung jawab dalam merencanakan, mengendalikan, serta memastikan bahwa pengelolaan dan penetapan strategi *Human Capital* terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sejalan dengan koridor pertumbuhan bisnis Perseroan.

Sepanjang tahun 2020, Biro *Human Capital* Perseroan telah menjalankan sejumlah strategi manajemen SDM yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawainya agar mampu bersaing di industri beton, baik pada skala nasional maupun skala internasional, di antaranya:

1. **Organization Development**, program penerapan dan review struktur organisasi.

The Company's Human Capital Bureau has a number of strategic functions and roles, especially in terms of employee management, namely:

1. Preparing Organization Development strategic plans, which include the strategic determination of Human Capital and Company's organization structure, both short-term and long-term.
2. Meeting the Company's needs for employees, both through external recruitment and internal transfer of employees.
3. Improving the Company's competitiveness by organizing various employee competency development programs in a sustainable manner.
4. Determining policies on industrial relations so as to create harmonious relationship among employees and between employees and the Company.
5. Preparing employee remuneration policies and their implementation, which need to be one of the main focuses of the Company, so as to become one of the attractive and competitive components in the labor market.
6. Preparing the Company's succession plan as early as possible through various acceleration programs so that the quality of the Company's leadership in the future always aligns with its requirements and demands.
7. Preparing the Company's employees who will enter their retirement age.

HC MANAGEMENT FOCUS OF WIKA BETON IN 2020

The Company's management strives to implement comprehensive Human Capital management policies as an inseparable part of the Company's business strategies within the context of integration of its objective, namely the vision, mission, targets, and business sustainability in the long run. Hence, the Company highly regards the role of the management in creating the best, professional talents through sustainable policies, initiatives, and development programs.

In determining the direction of its Human Capital development, the Company always adjusts and improves the existing policies, initiatives, and programs, with its business growth. In this case, the Human Capital Bureau is responsible for planning, controlling, and ensuring the management and implementation of Human Capital strategies so as to be in line with the established plans and within the corridor of Company's business growth.

Over the course of 2020, the Human Capital Bureau has implemented a number of HC management strategies aimed at improving the competencies of all employees to be more competitive within the concrete industry, both nationally and globally. These strategies include:

1. **Organization Development**, which is a program for organization structure implementation and review

2. **Program Peningkatan Komunikasi Internal dan Engagement Pegawai** yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesepahaman antar generasi sehingga proses kaderisasi dan suksesi berjalan dengan baik. Selain itu, program CMC (*Coaching, Mentoring, and Counseling*) yang sudah masuk ke dalam salah satu indikator penilaian dalam KPI Individu Tahun 2020.
3. **Program Pengembangan Pegawai dan Talent Management**, terbagi menjadi:
 - a. Program peningkatan dan pemenuhan *gap* kompetensi pegawai melalui asesmen dan penugasan yang variatif.
 - b. Pelaksanaan Program Pengembangan Kepribadian pegawai berdasarkan nilai-nilai Perusahaan.
 - c. Penyiapan regenerasi/suksesi dilakukan kepada pegawai-pegawai yang mempunyai prestasi yang baik, dengan cara pelatihan program pengembangan berdasarkan kluster jabatan dan *Job Assignment*.
 - d. Pengembangan pegawai dilakukan melalui pendidikan lanjutan dari Program Magister (S2) dan Doktorat (S3) dalam negeri.
4. **Pembangunan sistem Human Capital Information System** yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data pegawai dan menampilkan *dashboard* pegawai yang dapat mempermudah *employee mapping* dan menjadi dasar pengambilan keputusan perusahaan mengenai kepegawaian.
5. **Standarisasi jumlah pegawai di unit kerja** dalam rangka mengefektifkan jumlah pegawai di setiap unit kerja sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas pegawai.

2. **Internal Communication and Employee Engagement Improvement Program**, which aims to improve productivity and understanding inter-generation so that leadership regeneration and succession process can run well. It also includes the CMC (*Coaching, Mentoring, and Counseling*) program which is also one of the evaluation indicators in the 2020 Individual KPI.
3. **Employee Development and Talent Management Program**, which consists of:
 - a. Employee competency improvement and gap fulfillment through varied assignments and assessments.
 - b. Personality Development Program for employees based on the Corporate values.
 - c. Preparation of leadership regeneration/succession plan for employees with positive achievement, carried out through development program and training based on position cluster and *Job Assignment*.
 - d. Employee development carried out through advanced education system in the form of Master and Doctorate Program in the country.
4. **Development of Human Capital system Information System**, which aims to integrate all employee's data and display dashboard that can facilitate employee mapping and become the basis for decision-making regarding employment for the Company.
5. **Standardization of the number of employees at work units** in order to streamline the amount of employees at each work unit as an effort to drive employee productivity.

KOMPOSISI DAN DEMOGRAFI KARYAWAN

Sepanjang tahun 2020, jumlah karyawan Perseroan dan perusahaan anak tercatat sebanyak 1.444 orang, menurun 3,22% dari tahun sebelumnya sebanyak 1.492 orang. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya penambahan karyawan di tahun 2020 dan juga karena adanya karyawan yang pensiun di tahun tersebut. Informasi mengenai komposisi karyawan dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, status kepegawaian, kompetensi, kelompok usia, dan jenis kelamin tercantum pada tabel-tabel di bawah ini.

EMPLOYEE COMPOSITION AND DEMOGRAPHICS

Total employees of the Company and subsidiaries in 2020 reached 1,444 employees, decreased by 3.22% from 1,492 employees recorded in the previous year. This decrease was due to the absence of recruitment in 2020 and retired employees in the same year. Information on employee composition in the last 2 (two) years based on organization level, education, employment status, competence, age group, and gender is described in the following tables.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan / Education Level	2020				2019			
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%
Perseroan / Company								
Strata 2 / Master's Degree	27	3	30	2,08%	28	3	31	2,08%
Strata 1 / Bachelor's Degree	404	55	459	31,79%	423	58	481	32,24%
Diploma	99	12	111	7,69%	76	10	86	5,76%
SMA dan Sederajat / Senior High School and Equivalent	746	5	751	52,01%	788	5	793	53,15%

Employee Composition by Education Level

Tingkat Pendidikan / Education Level	2020				2019			
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%
Di bawah SMA / Below Senior High School Level	57	-	57	3,94%	66	-	66	4,42%
Sub-jumlah Perseroan / Sub-total	1.333	75	1.408	97,51%	1.381	76	1.457	97,65%
Perusahaan anak / Subsidiaries								
Strata 2 / Master's Degree	6	-	6	0,42%	6	-	6	0,40%
Strata 1 / Bachelor's Degree	16	-	16	1,11%	18	-	18	1,21%
Diploma	7	-	7	0,48%	5	-	5	0,34%
SMA dan Sederajat / Senior High School and Equivalent	5	-	5	0,35%	5	-	5	0,34%
Di bawah SMA / Below Senior High School Level	2	-	2	0,13%	1	-	1	0,07%
Sub-jumlah Perseroan / Sub-total	36	-	36	2,49%	35	-	35	2,35%
Jumlah / Total	1.369	75	1.444	100,00%	1.416	76	1.492	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Employee Composition by Organization Level

Level Organisasi / Organization Level	2020				2019			
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%
Perseroan / Company								
Manajer Biro / Bureau Manager	15	1	16	1,11%	14	1	15	1,01%
Manajer Wilayah Penjualan & Pabrik, Staf Ahli Direksi / Regional Sales Manager and Plant Manager, Expert Staff to the Board of Directors	23	-	23	1,59%	25	-	25	1,67%
Asisten Manajer Biro/Tenaga Ahli / Bureau Assistant Manager/Expert Staff	-	-	-	0,00%	3	-	3	0,20%
Manajer Bagian / Division Manager	41	-	41	2,84%	39	-	39	2,61%
Manajer Seksi / Section Manager	130	6	136	9,42%	119	2	121	8,11%
Asisten Manajer Seksi / Section Assistant Manager	155	29	184	12,74%	179	33	212	14,21%
Staf / Staff	969	39	1.008	69,81%	1.005	40	1.045	70,04%
Sub-jumlah Perseroan / Sub-total	1.333	75	1.408	97,51%	1.381	76	1.457	97,65%
Perusahaan anak / Subsidiaries								
Manajer Biro / Bureau Manager	5	-	5	0,35%	6	-	6	0,40%
Manajer Wilayah Penjualan & Pabrik, Staf Ahli Direksi / Regional Sales Manager and Plant Manager, Expert Staff to the Board of Directors	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%

Level Organisasi / Organization Level	2020				2019			
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%
Asisten Manajer Biro/Tenaga Ahli / Bureau Assistant Manager/Expert Staff	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Manajer Bagian / Division Manager	6	-	6	0,41%	6	-	6	0,40%
Manajer Seksi / Section Manager	14	-	14	0,97%	8	-	8	0,54%
Asisten Manajer Seksi / Section Assistant Manager	5	-	5	0,35%	8	-	8	0,54%
Staf / Staff	6	-	6	0,41%	7	-	7	0,47%
Sub-jumlah Perseroan / Sub-total	36	-	36	2,49%	35	-	35	2,35%
Jumlah / Total	1.369	75	1.444	100,00%	1.416	76	1.492	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Composition by Employment Status

Status Kepegawaian / Employment Status	2020				2019			
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%
Perseroan / Company								
Karyawan Organik / Organic Employee	294	32	326	22,58%	307	33	340	22,79%
Karyawan Terampil / Skilled Employee	1.039	43	1082	74,93%	1.074	43	1.117	74,87%
Karyawan Honoror / Temporary Employee	-	-	-	0,00%	3	-	3	2,34%
Sub-jumlah Perseroan / Sub-total	1.333	75	1.408	97,51%	1.381	76	1.457	100,00%
Perusahaan anak / Subsidiaries								
Pengurus (Masih Karyawan Perseroan) / Management (Considered as Company's Employee)	5	-	5	0,35%	6	-	6	0,40%
Karyawan Organik / Organic Employee	20	-	20	1,38%	18	-	18	1,21%
Karyawan Terampil / Skilled Employee	11	-	11	0,76%	11	-	11	0,74%
Sub-jumlah Perseroan / Sub-total	36	-	36	2,49%	35	-	35	2,35%
Jumlah / Total	1.369	75	1.444	100,00%	1.416	76	1.492	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kompetensi
Employee Composition by Competence

Kompetensi / Competence	2020				2019			
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%
Perseroan / Company								
Teknik / Technical	394	18	412	28,53%	405	18	423	28,35%
Non-Teknik / Non-Technical	939	57	996	68,98%	976	58	1.034	69,30%

Kompetensi / Competence	2020				2019			
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%
Sub-jumlah Perseroan / Sub-total	1.333	75	1.408	97,51%	1.381	76	1.457	100,00%
Perusahaan anak / Subsidiaries								
Teknik / Technical	19	-	19	1,31%	18	-	18	1,21%
Non-Teknik / Non-Technical	17	-	17	1,18%	17	-	17	1,14%
Sub-jumlah Perseroan / Sub-total	36	-	36	2,49%	35	-	35	2,35%
Jumlah / Total	1.369	75	1.444	100,00%	1.416	76	1.492	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia

Employee Composition by Age Group

Kelompok Usia / Age Group	2020				2019			
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%
Perseroan / Company								
> 55 tahun / > 55 years old	27	-	27	1,87%	15	-	15	1,01%
51 – 55 tahun / 51-55 years old	184	-	184	12,74%	190	-	190	12,73%
46 – 50 tahun / 46-50 years old	223	8	231	16,00%	224	6	230	15,42%
41-45 tahun / 41-45 years old	120	2	122	8,45%	111	3	114	7,62%
36 – 40 tahun / 36-40 years old	166	5	171	11,84%	177	5	182	12,20%
31 – 35 tahun / 31-35 years old	267	12	279	19,33%	275	10	285	19,10%
25 – 30 tahun / 25-30 years old	301	44	345	23,89%	317	41	358	23,99%
< 25 tahun / < 25 years old	45	4	49	3,39%	72	11	83	5,56%
Sub-jumlah Perseroan / Sub-total	1.333	75	1.408	97,51%	1.381	76	1.457	97,65%
Perusahaan anak / Subsidiaries								
> 55 tahun / > 55 years old	1	-	1	0,07%	3	-	3	0,20%
51 – 55 tahun / 51-55 years old	9	-	9	0,62%	7	-	7	0,47%
46 – 50 tahun / 46-50 years old	6	-	6	0,42%	3	-	3	0,20%
41-45 tahun / 41-45 years old	5	-	5	0,35%	5	-	5	0,33%
36 – 40 tahun / 36-40 years old	2	-	2	0,14%	3	-	3	0,20%
31 – 35 tahun / 31-35 years old	6	-	6	0,41%	5	-	5	0,34%
25 – 30 tahun / 25-30 years old	7	-	7	0,47%	9	-	9	0,60%
< 25 tahun / < 25 years old	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Sub-jumlah Perseroan / Sub-total	36	-	36	2,49%	35	-	35	2,35%
Jumlah / Total	1.369	75	1.444	100,00%	1.416	76	1.492	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Keterangan / Description	2020		2020	
	Jumlah / Total	%	Jumlah / Total	%
Laki-laki / Male				
Perseroan / Company	1.333	92,31%	1.381	92,59%
Perusahaan anak / Subsidiaries	36	2,49%	35	2,34%
Sub Jumlah / Sub-total	1.369	94,80%	1.416	94,92%
Wanita / Female				
Perseroan / Company	75	5,20%	76	5,08%
Perusahaan anak / Subsidiaries	-	0%	-	0,00%
Sub Jumlah / Sub-total	75	5,20%	76	5,08%
Jumlah / Total	1.444	100,00%	1.492	100,00%

Secara keseluruhan, demografi karyawan Perseroan beserta perusahaan anak untuk periode 2019 – 2020 adalah sebagai berikut:

Overall, the employee demographics of the Company and its subsidiaries for the period of 2019-2020 are as follows:

Keterangan / Description	2020				2019			
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total	%
Perseroan / Company								
PT Wijaya Karya Beton Tbk	1.333	75	1.408	97,51%	1.381	76	1.457	97,66%
Perusahaan anak / Subsidiaries								
PT Wijaya Karya Komponen Beton	8	-	8	0,55%	5	-	5	0,33%
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	6	-	6	0,42%	8	-	8	0,53%
PT Citra Lautan Teduh	15	-	15	1,03%	15	-	15	1,00%
PT Wika Pracetak Gedung (Entitas Asosiasi)	7	-	7	0,49%	7	-	7	0,47%
Sub-jumlah Perseroan / Sub-Total	36	-	36	2,49%	35	-	35	0,47%
Jumlah / Total	1.369	75	1.444	100,00%	1.416	76	1.492	100,00%

STRUKTUR DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

Secara berkala, Perseroan melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengembangan organisasi yang memadai dan sesuai dengan arah perkembangan bisnis Perseroan. Pada tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* di level manajemen dalam rangka pengembangan organisasi Perseroan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan restrukturisasi organisasi yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan bisnis yang disertai dengan perubahan-perubahan besar, di antaranya:

1. Mengubah Struktur Organisasi Induk menjadi 5 Direktorat yaitu Direktorat Pemasaran & Pengembangan, Direktorat Operasi & *Supply Chain Management*, Direktorat Keuangan, *Human Capital* & Manajemen Risiko, serta Direktorat Teknik dan Produksi.
2. Mengubah Unit Postension & Instalasi menjadi Unit Penunjang Konstruksi dalam Divisi Operasi.

ORGANIZATION STRUCTURE AND DEVELOPMENT

The Company periodically evaluates its organization plan and development so as to be adequate and in line with the direction of its business development. In 2020, the Company held *Focus Group Discussion (FGD)* activities at management level in the context of organization development. Regarding this, the Company also further restructured its organization tailored to the development of business demands as well as several major changes, such as:

1. Restructured the Parent Organization into 5 Directorates, namely Marketing and Development Directorate; Operations and Supply Chain Management Directorate; Finance, Human Capital, and Risk Management Directorate; and Engineering and Production Directorate.
2. Changed the Postension and Installation Unit into Construction Supporting Unit within the Operations Division.

3. Unit *Trackwork* menjadi bagian Unit Proyek dalam Divisi Operasi.
4. Membentuk Unit *Mobile Concrete* 1, 2, 3, dan 4 dalam Divisi Pengelolaan Material.

REKRUTMEN DAN SELEKSI

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan proses rekrutmen dan seleksi secara prosedural dan komprehensif sebagai upaya dalam memenuhi talenta-talenta kompeten, unggul, andal, dan tangguh dengan memerhatikan kualifikasi yang dibutuhkan oleh setiap jabatan serta struktur organisasi Perseroan maupun Perusahaan anak.

Proses rekrutmen pegawai di Perseroan dimulai dari tahapan pengumpulan *sourcing* kandidat melalui *jobfair* di beberapa universitas atau pengiklanan lowongan di situs web karier. Selanjutnya, manajemen melakukan seleksi administrasi pemilihan pegawai yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan Perseroan. Para kandidat yang lolos di tahapan administratif ini berhak mengikuti seleksi psikologi yang dilakukan oleh pihak eksternal. Apabila yang bersangkutan lolos dari tes psikologi maka kandidat tersebut berhak mengikuti tahapan wawancara teknis oleh *user* dan wawancara *personality* oleh Bagian Rekrutmen dan Penempatan. Kemudian kandidat terpilih dari tahapan tersebut berhak mengikuti Tes Kesehatan yang dijalankan dan apabila lolos maka yang bersangkutan berhak mengikuti tahapan tes terakhir yaitu wawancara oleh Direksi yang membawahi bidang Human Capital ataupun Direksi terkait. Pada akhirnya, seluruh kandidat yang berhasil selanjutnya menandatangani kontrak Program Pelatihan Calon Pegawai (PPCP) yang berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Selama periode PPCP, semua calon pegawai akan diikutkan pada berbagai program pelatihan, di antaranya pemberian materi *indoor*, *outbond*, serta *On the Job Training*. Sebagai bentuk evaluasi terhadap calon pegawai, maka diadakan *Half Check* dan *Final Check*. Pada kegiatan *final check*, setiap calon pegawai diharuskan melakukan presentasi yang berisi usulan improvisasi yang berkaitan dengan biaya, mutu dan waktu guna memberikan nilai tambah terhadap Perseroan. Pada prinsipnya, Biro *Human Capital* memiliki ketentuan mengenai aspek apa saja yang akan dinilai beserta bobotnya. Apabila nilai calon pegawai memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perseroan, calon pegawai berhak diangkat sebagai pegawai.

3. Moved the *Trackwork* Unit as a part of Project Unit within the Operations Division.
4. Established the *Mobile Concrete* Unit 1, 2, 3, and 4 within the Material Management Division.

RECRUITMENT AND SELECTION

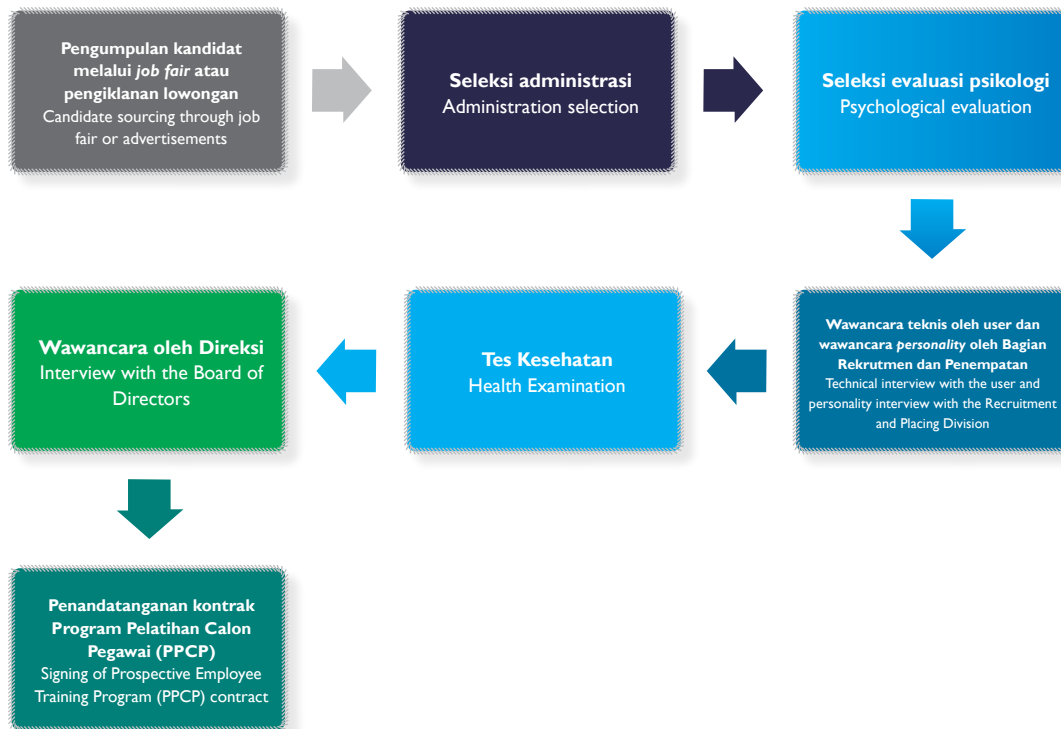
The Company and its Subsidiaries carried out recruitment and selection processes comprehensively according to the proper procedure as an effort to meet the demand for competent, excellent, reliable, and tough talents. These are done by taking into account the required qualifications in each position and organization structure.

Employee recruitment process within the Company starts from candidate sourcing through job fairs in various universities as well as job vacancy advertisements in career websites. Then, the management shall perform an employee selection administration in accordance with the Company's qualifications and requirements. After passing the administration stage, the candidates are eligible for participating in a psychological test which shall be carried out by an external party. If the candidates pass the psychological test, then they shall be invited to the technical interview with the user and personality interview with the Recruitment and Placement Division. Candidates from that stage shall also need to undergo a Health Examination and if they pass, then they shall be eligible for participating in the final test stage, which is an interview with the Director of Human Capital or the related Director. After passing all the stages, the candidates shall sign the contract for Prospective Employee Training Program (PPCP) of the Company that runs for 6 (six) months.

During the PPCP period, the prospective employee shall take part in various training programs and be provided with a number of indoor materials, as well as outbound activities and on-the-job training. To evaluate the prospective employee, the Company conducts Half Check and Final Check. At the final check, all prospective employees must do a presentation containing improvisation recommendation related to cost, quality, and time in order to add value to the Company. The Human Capital Bureau as the assessor has stipulations regarding which aspects to be evaluated along with the score. If the prospective employee's score meets the Company's requirements, the prospective employee shall be appointed as the Company's employee.

Tahapan Rekrutmen Pegawai WIKA BETON

Employee Recruitment Stages at WIKA BETON



Sebagai usaha untuk menjaga kestabilan perusahaan sebagai efek pandemi Covid-19, Perseroan mengambil kebijakan untuk tidak melaksanakan rekrutmen pada tahun 2020. Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak melakukan penambahan jumlah pegawai.

Program Magang

Perseroan membuka kesempatan bagi siswa/i dan mahasiswa/i dalam mengembangkan kompetensi dan pengalaman secara profesional di WIKA BETON dengan latar belakang jurusan yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan Perseroan. Program ini merupakan salah satu bentuk kerja sama dan kepedulian Perseroan di bidang pendidikan. Program Magang dapat diajukan 1-2 bulan sebelum tanggal pelaksanaan dengan durasi magang yang diberikan oleh Perseroan paling lama adalah 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan menerima 36 (tiga puluh enam) siswa/i dan mahasiswa/i magang dengan berbagai latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan bidang yang dibutuhkan organisasi Perseroan.

As an effort to sustain the Company's stability affected by the Covid-19 pandemic, the Company took a policy to halt the recruitment activity in 2020. Up to December 31, 2020, there has been no addition to the number of Company's employees.

Internship Program

WIKALABETON provides an opportunity for students of high schools or universities to develop their professional competence and experience, in accordance with their majors as well as the fields required by the Company. This program is a part of Company's collaboration program as well as the Company's awareness of the education sector. The internship program may be proposed in 1-2 months before the implementation date with internship duration of 3 (three) months at maximum.

In 2020, the Company received 36 (thirty-six) students from various educational majors for the internship program, tailored to the fields required within the Company's organization.

Kebijakan Pengembangan Karier

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menjunjung nilai kesetaraan dalam organisasi, Perseroan membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada setiap pegawai untuk mengembangkan potensi dan karier masing-masing sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Perseroan juga terus memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh pegawai baru untuk selalu berpikir terbuka dan positif, serta mempersiapkan seluruh pegawai baru dengan sebaik-baiknya agar mereka dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai langkah awal dalam bekerja dan berkontribusi di Perseroan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerapkan sistem pengembangan karier yang dijalankan secara terstruktur, yaitu sistem penilaian kinerja berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) & *Key Behaviour Indicator* (KBI) serta Evaluasi Kompetensi (EK) & Penilaian Karya (PK). Selain itu, Perseroan juga memberikan penilaian secara periodik kepada seluruh pegawai untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dan bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menentukan promosi jabatan ataupun kenaikan gaji setiap pegawai.

Pada prinsipnya, Perseroan selalu memberikan dukungan kepada seluruh pegawainya agar mereka dapat mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki. Hal tersebut ditunjukkan Perseroan dengan secara aktif mengadakan berbagai program pelatihan dan pengembangan internal, misalnya menggelar acara *sharing experience/sharing knowledge* dengan para ahli dan insinyur yang berpengalaman dari berbagai disiplin keilmuan yang dapat mendukung bisnis utama Perseroan.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Dalam memastikan terciptanya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan perusahaan maupun industri, Perseroan menyusun program pengembangan kompetensi yang berfokus pada kebutuhan pengembangan individu berdasarkan standar kompetensi jabatan. Untuk itu, Perseroan telah menyelenggarakan sejumlah program pelatihan dan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan visi organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan keahlian serta keterampilan setiap pegawai di bidangnya masing-masing agar karier mereka dapat

Career Development Policy

As part of its commitment to uphold the value of equality within the organization, the Company provides the same opportunity for all employees to develop their potentials and career in accordance with their respective competence. The Company also provides constant support and encouragement for all new employees to always have an open and positive mindset while preparing them optimally so that they can understand their duties and responsibilities as the preliminary stage in carrying out their job and in delivering contributions to the Company.

Regarding this, the Company has implemented a structured career development system, namely a performance evaluation system based on Key Performance Indicator (KPI) and Key Behavior Indicator (KBI), as well as Competence Evaluation (EK) and Work Evaluation (PK). The Company also conducts periodical evaluation on all employees that will serve as a basis and consideration for the management in determining promotion and salary increment for each employee.

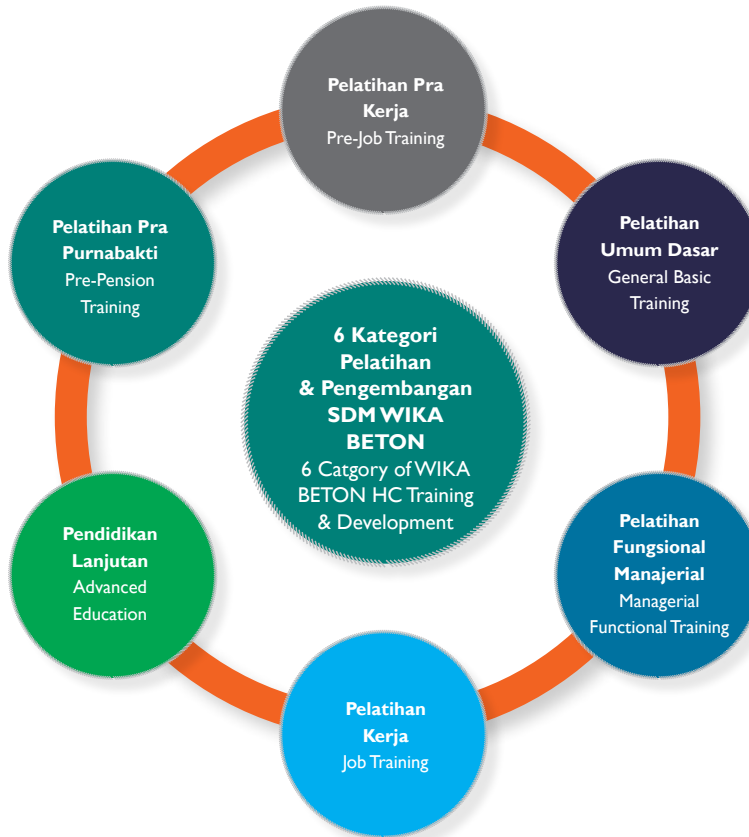
In essence, the Company continuously supports its employees in their endeavor to develop their potentials and talents. This is shown by the Company by actively holding various internal training and development programs, such as sharing experience/knowledge with experts and experienced engineers from various fields of studies that can support the Company's core business.

COMPETENCY DEVELOPMENT POLICY

To ensure the availability of competent HC in accordance with the development of its business and industry, the Company prepares a competency development program, named designed training, which focuses on the needs for individual development per standards for position level. For that purpose, the Company has held various Human Capital training and development programs that have been aligned with the organizational vision and have the purpose to improve on the skills and expertise of every employee in their respective field so that they can develop

berkembang dan target bisnis Perseroan dapat terealisasi. Pada implementasinya, kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM di Perseroan dibagi ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu:

their career and the Company can achieve its business targets. In its implementation, the Human Capital training and development in the Company is divided into 6 (six) categories, which are:



1. Pelatihan Pra-Kerja

Sebelum mulai bekerja, setiap pegawai baru akan dibekali dengan pengetahuan umum mengenai proses bisnis, cara kerja, perangkat organisasi, nilai-nilai dan norma kerja yang berlaku di lingkungan Perseroan, termasuk mendapat penjelasan mengenai isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

2. Pelatihan Umum Dasar

Merupakan jenis pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dasar dan/atau teknik dasar pegawai, sekaligus untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan budaya Perseroan.

3. Pelatihan Fungsional Manajerial

Merupakan jenis pelatihan fungsional/manajerial yang bertujuan untuk meningkatkan Pelatihan Kerja dan Pelatihan Lanjutan serta kemampuan pegawai dalam suatu bidang pekerjaan sesuai dengan jabatannya.

4. Pelatihan Kerja

Merupakan jenis pelatihan yang ditujukan bagi pegawai baru maupun pegawai lama yang baru dirotasi dan/atau dipromosikan ke pekerjaan/jabatan baru, melalui praktik langsung yang dilakukan sambil bekerja dengan sistem mentor.

1. Pre-Job Training

Before starting their job, all new employees will be provided with the general knowledge on the business process, procedure, organizational device, and applicable values work norms within the Company, including receiving explanation on the content of the Collective Labor Agreement (PKB).

2. Basic General Training

This training aims to improve the basic skills and/or techniques of the employees, while forming the proper attitude and behavior according to the Company's culture.

3. Managerial Functional Training

This training aims to further elevate both Job Training and Advanced Training, as well as the employee's ability in certain field of work according to their position.

4. Job Training

This training is aimed for new and existing employees that have been rotated and/or promoted to a new job/position, through direct practices done while working with the mentorship system.

5. Pendidikan Lanjutan

Merupakan jenis pelatihan berupa fasilitas pendidikan untuk menunjang bidang pekerjaan pegawai.

6. Pelatihan Pra Purna Bakti

Merupakan jenis pelatihan yang ditujukan bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

5. Advanced Education

This is a type of training provided in the form of educational facility to support the employee's field of work.

6. Pre-Pension Training

This training is aimed for employees that will soon enter their retirement age.

Sepanjang tahun 2020, WIKA BETON telah melaksanakan program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi insan WIKA BETON dengan sasaran pengembangan disesuaikan dengan level jabatan yang dimiliki. Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan Perseroan selama tahun buku adalah sebagai berikut.

Over the course of 2020, WIKA BETON has carried out several programs and activities to improve and develop the competence of its personnel with the development target adjusted to the position level of each employee. Information regarding competency development conducted by the Company during the fiscal year is described below.

Level Jabatan / Position Level	Sasaran Program Pengembangan / Target of Development Program	Jumlah Peserta / Total Participants
Direksi / Board of Directors	Business Sustainable	3
Manajer Biro / Bureau Manager	Fostering Transformation	14
Manajer PPU / PPU Manager	Integrating Value Chain	24
Manajer Bagian / Division Manager	Aligning Execution	36
Manajer Seksi / Section Manager	Optimizing Resources	120
Staf / Staff	Excellence Performance	129

Secara rinci, kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM yang telah diselenggarakan Perseroan sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

In detail, the Human Capital training and development activities conducted by the Company throughout 2020 can be seen in the following table:

Jenis Program Pelatihan / Types of Training Program	Jumlah Peserta / Total Participants		Jumlah / Total	Biaya (Rp) / Fee (Rp)
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female		
Kursus Manajemen / Management Course	41	5	46	71.315.521
Kursus Penunjang / Supporting Course	150	25	175	41.812.000
Kursus Teknis / Technical Course	96	6	102	54.530.000
Seminar	81	15	96	73.665.936
Pelatihan Dasar / Basic Training	139	7	146	122.711.185
Pendidikan Lanjutan / Advanced Education	6	0	6	414.558.372
Jumlah / Total	513	58	571	778.593.014

Investasi Pengembangan Kompetensi SDM

Perseroan memaknai program pengembangan SDM sebagai sebuah investasi masa depan yang mampu mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Komitmen dan keseriusan Perseroan dalam mencetak SDM unggul senantiasa tercermin dari nilai investasi biaya pelatihan dan pengembangan SDM yang cenderung menunjukkan pertumbuhan tiap tahunnya. Akibat dari pandemi Virus Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, Perseroan telah menginvestasikan dana untuk pelatihan dan pengembangan SDM sebesar Rp778.593.014 atau menurun 77,36% dari tahun 2019 sebesar Rp3.439.221.129. Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun sebesar Rp872.989.337 atau 89,19% dari target yang ditetapkan.

Investment in Human Capital Competency Development

The Company defines HC development program as an investment for the future that can support business growth in a sustainable manner. The Company's commitment to creating excellent HC is always reflected on the investment value of HC training and development cost which shows an upward trend every year. During 2020, the Company has invested Rp778,593,014 for HC training and development activities, a decrease of 77.36% from Rp3,439,221,129 recorded in 2019, due to the Covid-19 pandemic. This amount is the realization of the budget set at the beginning of the year at Rp872,989,337 or 89.19% of the target.

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Perseroan memberlakukan kebijakan dan sistem penilaian kinerja pegawai secara berkala dengan menimbang capaian indikator-indikator kinerja maupun sikap kerja yang dimiliki tiap individu. Hasil penilaian kinerja akan menjadi dasar bagi manajemen untuk menentukan promosi jabatan, pengembangan karier dan kompetensi, hingga kenaikan skala dan *grading* pegawai sampai dengan kenaikan pendapatan. Pemberlakuan sistem penilaian menjadi bentuk upaya Perseroan dalam mendorong kinerja terbaik setiap insan Perseroan sekaligus mendorong produktivitas serta peran terbaik tiap pegawai terhadap pengembangan usaha Perseroan.

Adapun evaluasi kinerja pegawai yang berlaku di WILAJA BETON berdasarkan indikatornya meliputi:

1. Key Performance Indicator (KPI) dan Key Behaviour Indicator (KBI)

Dalam melakukan pengukuran kinerja setiap pegawai organik serta pegawai terampil eselon V dan VI, Perseroan telah menerapkan sistem penilaian dengan menggunakan *Key Performance Indicator (KPI)* dan *Key Behaviour Indicator (KBI)*. KPI dan KBI memungkinkan setiap pegawai Perseroan mendapatkan penilaian yang benar-benar objektif dan relevan. KBI memiliki indikator yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan untuk menunjang relevansi dan objektivitas penilaian.

Hasil dari penilaian KPI dan KBI ini dijadikan sebagai acuan oleh Perseroan dalam menentukan imbalan dan bonus bagi masing-masing pegawai. Penilaian berbasis KPI dan KBI ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mendorong produktivitas dan motivasi setiap pegawai.

2. Evaluasi Kompetensi dan Penilaian Karyawan

Dalam memberikan penilaian kepada pegawai terampil eselon VII sampai dengan eselon X, Perseroan telah menerapkan Sistem Penilaian Karya (PK) yang selanjutnya akan dilengkapi dengan Evaluasi Kompetensi (EK) dan akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebijakan Perseroan. Selanjutnya, hasil penilaian karya dan evaluasi kompetensi ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan promosi jabatan, pengembangan karier, hingga kenaikan skala dan golongan pendapatan setiap pegawai serta bahan evaluasi dalam menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan SDM. Guna mengoptimalkan produktivitas dan kontribusi setiap pegawai terhadap Perseroan.

3. Penilaian Lainnya

Perseroan melakukan *assessments of competency* secara berkala kepada pegawai dalam rangka melakukan penilaian terhadap kompetensi pegawai yang didasari oleh Kamus Kompetensi dan standar kompetensi jabatan (SKJ) yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan pengembangan dan karier pegawai.

EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION

The Company implements a regular employee performance evaluation system and policy by taking into account the performance indicators and work behavior of every individual. The result of performance evaluation becomes the basis for the management to determine promotion, career and competency development, and raise in employee's scale and grading as well as income. The implementation of performance evaluation is one of the Company's efforts to encourage the best performance from every personnel while driving productivity and role of all employees in the context of Company's business development.

Based on the indicators, the employee performance evaluation applicable at WILAJA BETON includes:

1. Key Performance Indicator (KPI) and Key Behavior Indicator (KBI)

In measuring the performance of each organic employee and echelon V and VI skilled employees, the Company has implemented an evaluation system using *Key Performance Indicator (KPI)* and *Key Behavior Indicator (KBI)*. Both KPI and KBI enable each employee to receive a truly objective and relevant evaluation. This assessment using KPI and KBI has different indicators according to the duties and responsibilities of each employee to support the relevance and objectivity of the evaluation.

The results of the KPI and KBI evaluations are used as a reference by the Company to determine the rewards and bonuses for each employee. KPI and KBI evaluations can also be used as a reference to boost the productivity and motivation of each employee.

2. Employee Competency Evaluation

In evaluating skilled employees of echelon VII to echelon X, the Company implements the Work Evaluation (PK) System which is complemented with the Competency Evaluation (EK) System in a regular manner according to the applicable policies. The results of both work and competency evaluations are used as the basis to determine promotion, career development, and income raise for every employee. Furthermore, the Company uses the evaluation results as the basis and material for implementing HC coaching and development programs in order to optimize employee's productivity and contribution.

3. Other Evaluation

The Company implements periodical assessments of competency for its employees which are based on the Competence Dictionary and Position Competence Standard (SKJ). The results will serve as the basis for determining employee's development and career.

FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Dalam memenuhi kewajiban Perseroan kepada pegawai, Perseroan menyusun dan mempersiapkan kebijakan remunerasi dan fasilitas dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku (khususnya yang mengatur mengenai pengupahan minimum Provinsi/Kabupaten/Kota yang berlaku di wilayah masing-masing unit kerja), bobot kerja dan jabatan yang dimiliki, serta perbandingan/benchmark dengan industri sejenis.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan seperangkat kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas pegawai guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas setiap pegawai, seperti:

- Jaminan kesehatan bahwa setiap pegawai telah diikutsertakan di dalam program BPJS Kesehatan terhitung mulai 1 Januari 2015 dan asuransi komersial dengan fasilitas perawatan kesehatan meliputi rawat inap, rawat jalan, kacamata, gigi, serta melahirkan
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja/BPJS Ketenagakerjaan
- *Medical check up* secara berkala
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan
- Imbalan pasca kerja/pesangon (PSAK 24) bagi pegawai yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2013
- Program Dana Pensiun
- Asuransi kematian dan catat total tetap
- Tunjangan pendidikan
- Tunjangan lokasi kerja
- Tunjangan detasir
- Tunjangan tempat tinggal
- Tunjangan *grading*
- Tunjangan kehadiran
- Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR)
- Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH 21)
- Tunjangan transportasi
- Sumbangan sosial, seperti pernikahan pegawai
- Fasilitas biaya komunikasi
- Fasilitas pakaian seragam kerja
- Rekreasi bersama (*family gathering*)
- Jasa produksi
- Insentif sisa hasil usaha
- Cuti tahunan dan cuti besar 5 (lima) tahunan
- Uang cuti tahunan dan cuti besar 5 (lima) tahunan
- Fasilitas makan siang
- Penghargaan masa kerja untuk pegawai yang telah mengabdikan selama 10, 15, 20, 25, 30, dan 35 tahun di Perseroan.

Program Pensiun

Kebijakan dan program pensiun yang berlaku di Perseroan telah mengatur mengenai batas usia aktif pegawai atau masa kerja pegawai berstatus aktif bekerja di Perseroan sampai dengan pegawai tersebut memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Adapun masa aktif pegawai WIKABETON ditetapkan sampai dengan usia 57 tahun (bagi pegawai dengan level BOD-1 sampai

EMPLOYEE FACILITIES AND WELFARE

In fulfilling its obligation to all employees, the Company prepares remuneration policies and work facilities in accordance with the prevailing laws and regulations (specifically those that regulate minimum wage for provinces/regencies/cities applicable in every work unit area), work load and position of each employee, as well as the benchmark value with similar industry.

The Company also stipulates a set of welfare programs and facilities to improve upon the welfare and productivity of each employee, namely:

- Health benefit insurance that every employee has been included in the BPJS Kesehatan program, starting from January 1, 2015, and commercial insurance with healthcare facilities covering inpatient and outpatient services, eyeglasses, dental, as well as maternity services
- Social Security (BPJS Ketenagakerjaan)
- Periodic medical check-up
- Training and development facilities
- Post-employment reward/severance (PSAK 24) employees that are appointed until December 31, 2013
- Pension Fund Program
- Life and disability insurance
- Education benefit
- Work location benefit
- Detachment benefit
- House Loan
- Grading benefit
- Attendance benefit
- Religious holiday allowance (THR)
- Income Tax benefit (PPH 21)
- Transportation benefit
- Social donation, such as for employee's wedding
- Communication fee facility
- Work uniform facility
- Family gathering
- Production service
- Residual profit incentive
- Yearly leave and sabbatical every 5 (five) year
- Payment for yearly leave and sabbatical every 5 (five) year
- Lunch facility
- Tenure appreciation for employees that have served for 10, 15, 20, 25, 30, and 35 years in the Company

Pension Program

The pension policies and programs applicable in the Company have regulated the active age limit for employees or the working period of employees with active status at the Company until they enter the Retirement Preparation Period (MPP). The active period of WIKABETON's employees is set until the age of 57 (for employees of the BOD-1 to BOD-3 levels) and 56 (for

BOD-3) dan usia 56 tahun (bagi pegawai dengan level BOD-4 ke bawah), dengan memperoleh penawaran untuk perpanjangan masa aktif apabila dibutuhkan Perseroan dan apabila pegawai tersebut bersedia untuk diperpanjang masa aktif kerjanya.

Pengelolaan *Human Capital* di lingkungan Perseroan secara komprehensif turut mengatur mengenai kesejahteraan pegawai yang akan memasuki masa purnabakti. Perseroan memberikan pembekalan dan pelatihan khusus terkait program persiapan pensiun guna mempersiapkan mental dan keahlian sehingga mereka tetap produktif walau tidak lagi menjadi pegawai aktif di Perseroan.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan masa purnabakti kepada 9 (sembilan) orang pegawai organik/manajemen dengan alokasi biaya investasi sebesar Rp45.000.000. Selain benefit dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, Perseroan juga memiliki kebijakan *benefit* pensiun sebagai bentuk apresiasi Perseroan kepada seluruh pegawai atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama mengabdikan diri di Perseroan.

Hubungan Industrial

Perseroan memiliki komitmen untuk membina hubungan industrial yang harmonis, sehat, dan adil demi terciptanya iklim kerja yang kondusif, terbuka, positif, dan progresif. Komitmen ini diwujudkan melalui pendirian Serikat Pekerja bernama Perhimpunan Pegawai WIKAJA BETON (PPWB) pada tahun 1999 sebagai upaya dalam menjamin hak dan kebebasan berserikat seluruh pegawai. PPWB telah terdaftar di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Timur, dan terakhir tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan nomor bukti pencatatan 560/Reg.05/PUK/FSPIB/HIJS/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.

Pemeliharaan komitmen dan upaya dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dibangun atas dasar pemahaman bahwa Perseroan dan pegawai telah menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing dengan menjunjung tinggi sikap saling menghormati, saling percaya, dan tekad untuk saling bekerja sama, sehingga keberlangsungan usaha Perseroan dan perbaikan kesejahteraan pegawai dapat terjamin dan berkesinambungan.

Visi PPWB:

- Menjadi organisasi yang berperan aktif bagi peningkatan produktivitas sehingga dapat memengaruhi Perseroan dalam memberikan penghargaan yang sesuai dengan prestasi pegawai.
- Menjadi organisasi yang berperan aktif bagi peningkatan pemahaman pegawai terhadap peraturan ketenagakerjaan dan peraturan Perseroan.
- Menjadi organisasi yang berperan aktif mendorong keikutsertaan pegawai dalam kepemilikan saham Perseroan.

employees of the BOD-4 level and below), by obtaining an offer to extend the active period if needed by the Company and if the employees are willing to extend their active working period.

Comprehensively, the Human Capital management within the Company also regulates the welfare of employees who will enter their retirement period. The Company provides coaching and special training activities related to the retirement preparation program in order to prepare employees' mental and skills so that they can remain productive even though they are no longer active employees in the Company.

Throughout 2020, the Company has conducted coaching and training activities for retirement for 9 (nine) organic employees/management with an investment cost allocation of Rp45,000,000. In addition to the benefits from BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan, the Company establishes a pension benefit policy as a form of appreciation to all employees for their contributions to the Company while working there.

Industrial Relations

The Company is committed to fostering a harmonious, healthy, and fair industrial relationship for the sake of conducive, open, positive, and progressive work climate. This commitment is realized through the establishment of Perhimpunan Pegawai WIKAJA BETON (PPWB) or WIKAJA BETON Employee Association in 1999 as an effort to ensure union rights and freedom of all employee. The PPWB has been registered with the Manpower Department Office of East Jakarta Municipality, with the most recent registration with the Manpower Department Office of Bekasi City under registration number 560/Reg.05/PUK/FSPIB/HIJS/III/2014 dated March 24, 2014.

The Company's commitment and effort to build a harmonious industrial relationship is set upon the basis of understanding that the Company and its employees have delivered their respective rights, obligations, and responsibilities, by upholding the principle of mutual respect and determination to collaborate. Therefore, both the Company's business and employee's welfare can be guaranteed sustainably.

Vision of PPWB:

- To be an organization with an active role in productivity improvement so it can influence the Company in providing the appropriate award for an employee's achievement.
- To be an organization with an active role in the improvement of employee understanding on labor regulations and Company regulations.
- To be an organization with an active role in supporting employee participation in Company share ownership.

Misi PPWB:

Memperjuangkan terciptanya kesejahteraan, ketenangan, keadilan dan keamanan bekerja bagi setiap anggotanya melalui peran serta anggota dalam upaya meningkatkan daya saing Perseroan serta memiliki andil dalam pembangunan bangsa dan negara.

Per 31 Desember 2020, jumlah pegawai Perseroan yang terdaftar sebagai anggota PPWB adalah sebanyak 1.444 orang atau menurun 0,97% dari tahun sebelumnya sebanyak 1.492 orang. Pengurangan jumlah PPWB ini berbanding lurus dengan penyesuaian jumlah pegawai Perseroan di tahun 2020, di mana persentase jumlah anggota PPWB dibandingkan pegawai Perseroan untuk tahun 2019 dan 2020 mencapai 100%.

Survei Keterikatan Pegawai

Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawainya agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hal tersebut, Perseroan secara rutin mengadakan survei keterikatan pegawai dengan tujuan agar dapat mengukur sudah sejauh mana tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai terhadap Perseroan. Pada tahun 2020, Perseroan bekerja sama dengan konsultan AON Hewitt untuk kembali mengadakan survei keterikatan pegawai dengan hasil *response rate* 99% (1.448 dari 1.449 pegawai) dan skor *engagement* sebesar 85,1% atau menurun 0,98% dari tahun 2019. Survei ini dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Semakin tinggi tingkat kepuasan dan keterikatan seorang pegawai terhadap Perseroan maka akan semakin positif respons dan sikapnya atas pekerjaan yang sedang dijalankan. Namun sebaliknya, ketidakpuasan pegawai terhadap Perseroan akan menunjukkan sikap yang kontraproduktif terhadap pekerjaannya.

FOKUS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2021

Sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan yang dinamis, Perseroan berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan *Human Capital* secara berkelanjutan. Perseroan telah merencanakan pengembangan SDM untuk tahun 2021, antara lain:

1. Penerapan standarisasi jumlah pegawai di Unit Kerja maupun Kantor Pusat.
2. Program pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan arah bisnis Perseroan.
3. Penerapan Sistem *Grading* Pegawai Terampil.
4. Pengembangan *Human Capital Information System*.

Mission of PPWB:

Fighting for the creation of welfare, peace, justice, and work safety for all its members through the roles as well as membership in an effort to improve the Company's competitiveness as well as having the role in developing the nation.

As of December 31, 2020, total Company's employees registered as PPWB members were 1,444 people, declined by 0.97% from 1,492 people recorded in the previous year. This decline was directly proportional with the number of Company's employees in 2020 in which the percentage of PPWB members compared to the Company's employees for 2019 and 2020 reached 100%.

Employee Engagement Survey

The Company continuously pays attention to the welfare of all its employees in order to synergize with each other to achieve optimum work productivity. In this regard, The Company regularly conducts an employee engagement survey which aims to measure the level of employee's satisfaction and loyalty to the Company. In 2020, the Company cooperated with AON Hewitt consultant to conduct an employee engagement survey with the resulting response rate of 99% (1,448 from 1,449 employees) and engagement score of 85.1%, or a decrease of 0.98% compared to 2019. This survey is conducted biannually.

The higher the satisfaction and loyalty level of an employee to the company, the more positive their response and attitude towards the progress of their work. On the other hand, employees' dissatisfaction towards the Company will manifest in a counterproductive attitude towards their work.

HC MANAGEMENT AND DEVELOPMENT FOCUS IN 2021

In line with its dynamic business development, the Company strives to elevate the quality of its Human Capital management in a sustainable manner. The Company has prepared a HC development plan for 2021 as follows:

1. Standardization of the number of employees at Work Units and Head Office.
2. Training programs and improvement of employee's competencies in accordance with the Company's business direction.
3. Implementation of Skilled Employee Grading System.
4. Development of Human Capital Information System.

Teknologi Informasi Information Technology



“**Teknologi Informasi memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas, efisiensi, dan kapabilitas dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.**

The IT aspect plays a strategic role in supporting the effectiveness, efficiency, and capability in decision making and problem solving activities.

Perkembangan bisnis WIKALABETON yang dinamis dalam merespons perkembangan industri di era Revolusi Industri 4.0 serta kebutuhan yang ada menuntut Perseroan untuk memanfaatkan dan menyempurnakan fungsi-fungsi strategis yang dimiliki, salah satunya aspek Teknologi Informasi (TI). Dalam hal ini, Teknologi Informasi memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas, efisiensi, dan kapabilitas dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pemanfaatan TI juga menunjang Perseroan dalam beradaptasi dengan perubahan serta memenuhi kebutuhan operasi yang pada gilirannya mampu meningkatkan keunggulan, daya saing, serta nilai tambah secara berkesinambungan.

The progressive growth of WIKALABETON's business in responding to the development of industry in this Industrial Revolution 4.0 era, along with the rising demand, drive the Company to take advantage of and improve its strategic functions, among which is the Information Technology (IT) aspect. In this regard, the IT aspect plays a strategic role in supporting the effectiveness, efficiency, and capability in decision making and problem solving activities. The utilization of IT also supports the Company in adjusting quickly to the changes and fulfilling operational needs, which in turn will enable the Company to improve its excellence, competitiveness, and added values in a sustainable manner.

Sejalan dengan perkembangan TI saat ini, Perseroan turut menaruh perhatian pada pengembangan kompetensi SDM-nya, khususnya SDM di bidang TI, sehingga optimalisasi fungsi digital dapat dijalankan dengan baik. Melalui berbagai sosialisasi dan pelatihan, Perseroan bertujuan untuk membangun budaya sadar IT (*IT Culture*) pada setiap insan WIKABETON agar transformasi digital yang diusung mampu menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

ROAD MAP PENGEMBANGAN TI WIKABETON

Guna memastikan pengembangan TI berjalan secara berkesinambungan namun tetap terarah dengan perencanaan yang matang, Perseroan telah menetapkan *roadmap* pengembangan TI secara komprehensif. Perjalanan digitalisasi WIKABETON telah dimulai sejak tahun 2006 di mana Perseroan mulai merintis implementasi ERP (*Enterprise Resource Planning*) yang terdiri dari OS, *Finance*, dan HRMS. Sistem ERP ini menandai awal mula digitalisasi proses bisnis WIKABETON, baik dari pekerjaan administrasi yang semula dilakukan secara manual/analog menjadi berbasis TI. Hingga saat ini, sistem ERP tetap dimanfaatkan dengan pengembangan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Tim IT Perseroan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab khusus dalam menjalankan program dan inisiatif pengembangan TI juga telah membangun sistem *Wide Area Network* (WAN) berbasis *private cloud* yang menghubungkan seluruh unit kerja dalam rangka peningkatan efisiensi, optimasi produksi, dan simplikasi proses bisnis perusahaan.

In line with the current IT development, the Company also pays attention to the competency development of its HC, especially those in IT field; hence, the optimization of digital function can be carried out properly. Through various socialization and training activities, the Company expects to be able to build an awareness of IT culture within each personnel of WIKABETON so that the digital transformation campaign can bring optimum result according to the projected objectives.

IT DEVELOPMENT ROADMAP

To ensure the continuous development of IT that is always directed and planned strategically, the Company has established a comprehensive IT development roadmap. WIKABETON's digitalization journey began in 2006 through the pioneering of ERP (*Enterprise Resource Planning*) implementation consisting of OS, *Finance*, and HRMS. The ERP system marked the beginning of the Company's business process digitalization, including the transformation of administration work from manual/analog to IT-based. To date, the ERP system remains in use with continuous development adjusted to the Company's needs.

As a work unit with specific responsibility in carrying out IT development programs and initiatives, the Company's IT team has built a *Wide Area Network* (WAN) system with a private cloud basis that connects all work units in the effort to improve efficiency, optimize production, and simplify business process of the Company.

Road map pengembangan TI WIKA BETON berfokus pada 5 (lima) aspek utama, yaitu *IT Facility*, *Integrated App*, *Cloud Base DRC*, *Cloud Base DC*, dan *Manufacturing App*, dengan rincian pengembangan termuat dalam bagan berikut:

WIKA BETON's IT development roadmap focuses on 5 (five) key aspects, namely IT Facility, Integrated App, Cloud Base DRC, Cloud Base DC, and Manufacturing App, with details as follows:



Sebagai wujud konsistensi dan semangat Perseroan dalam meningkatkan sistem IT, Perseroan telah mengambil beberapa langkah strategis, antara lain penyusunan Rencana Jangka Panjang (RKP) IT 2010 – 2014, yang dilanjutkan melalui RJP 2014 – 2018 dan sebagai wujud sinergitas antara WIKA BETON dengan WIKA Group maka Perseroan telah menerbitkan *Roadmap Digitalisasi IT Perseroan 2018 – 2023* yang telah disesuaikan dengan *Roadmap Korporat*. Seiring dengan peran IT yang semakin dominan dalam operasional perusahaan, Biro Sistem Informasi telah memfokuskan program kerjanya kepada implementasi digitalisasi dan pengembangan sejumlah aplikasi, antara lain *WTON Mobile*, Aplikasi *WTON Audit*, Aplikasi *KBI* (penilaian pegawai 360 derajat), Aplikasi *GCG*, *digital marketing*, dan lainnya. Pada tahun 2020, Perseroan juga telah mengembangkan aplikasi *WTON Visitor*, sebuah aplikasi untuk memfasilitasi pengunjung eksternal kantor WIKA BETON untuk menerapkan protokol COVID-19 sebelum diizinkan untuk masuk ke lingkungan WIKA BETON.

As a form of its commitment and spirit in developing the IT system, the Company has taken a number of strategic steps, among others, by preparing the IT Long-Term Plan (RKP) for 2010-2014 which is continued in the 2014-2018 RJP. Furthermore, to realize the synergy between WIKA BETON and WIKA Group, the Company has established the IT Digitalization Roadmap for 2018-2023 which has been adjusted to the corporate roadmap. In line with the growing roles of IT within the Company's operations, the Information System Bureau shall continue focusing its work programs on the implementation of digitalization and development of a number of applications, including the *WTON Mobile*, *WTON Audit Application*, *KBI Application* (a 360-degree employee assessment), *GCG Application*, digital marketing activities, and so on. In 2020, the Company was able to develop the *WTON Visitor*, an application that facilitates the external visitors to WIKA BETON's office in the effort of driving the implementation of COVID-19 prevention protocol prior to their arrival to the Company's environment.

UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TI WIKA BETON

Perseroan membentuk Biro Sistem Informasi sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola program kerja digitalisasi pada lingkup operasional WIKA BETON, termasuk dalam pengembangan infrastruktur sistem TI di dalamnya. Biro Sistem Informasi membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian *Network & Support*, Bagian *Teknologi Informasi*, dan Bagian *Supply Chain Information System*.

Struktur Organisasi Biro Sistem Informasi



IT DEVELOPMENT MANAGEMENT UNIT

The Company establishes the Information System Bureau as a work unit responsible for developing, implementing, and managing the digitalization work programs within the scope of operations of WIKA BETON, including the development of IT system infrastructure. The Information System Bureau oversees 3 (three) divisions, namely *Network and Support*, *Information Technology*, and *Supply Chain Information System*.

Organization Structure of Information System Bureau

Profil Manajer Biro Sistem Informasi

Dedi Indra
Manajer Biro Sistem Informasi /
Manager of Information System
Bureau

Profil Bapak Dedi Indra telah disajikan pada bab Profil Perusahaan, bagian Pejabat Eksekutif per 31 Desember 2020. / Mr. Indra's profile is available in the Company Profile chapter under the Executive Officers sub-chapter.

Profile of Information System Bureau Manager

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN INFORMASI

Direksi bertanggung jawab dalam hal pengelolaan sistem informasi internal yang di dalamnya termasuk aktivitas pengendalian terhadap proses klarifikasi dan pengungkapan informasi kepada pihak lain yang secara teknis dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan berupaya mengimplementasi tata kelola TI dengan berbasis pada praktik terbaik (*best practices*) yang sesuai dengan karakteristik operasional TI yang dijalankan. Tata kelola TI Perseroan diukur dengan menggunakan kriteria tata kelola standar COBIT, baik dalam hal perencanaan, pengembangan, dan operasional TI tanpa mengabaikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RESPONSIBILITY OF INFORMATION MANAGEMENT

The Board of Directors is responsible for managing the internal information system. This includes the control of information clarification and disclosure processes to other parties that are technically carried out by the Corporate Secretary.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

The Company implements IT governance based on the best practices tailored to the characteristics of IT operations carried out. IT governance at the Company is measured using the governance criteria of COBIT standards, in terms of IT planning, development, and operations, without prejudice to the provisions stipulated in the prevailing laws and regulations.

Selain mengacu pada standar tata kelola yang digunakan, Perseroan secara berkala dan berkesinambungan melakukan pembaruan dan pengembangan atas sistem dan infrastruktur TI sesuai dengan perkembangan yang ada serta kebutuhan operasional TI Perseroan. Upaya ini sejalan dengan tujuan Perseroan untuk memanfaatkan TI sebagai fungsi strategis yang mampu meningkatkan keunggulan dan daya saing Perseroan. Seiring dengan perubahan dinamis tersebut, Perseroan senantiasa mengembangkan aplikasi berbasis *mobile platform* baik dalam kegiatan operasional maupun kebutuhan perusahaan lainnya.

Pokok-Pokok Kebijakan dan Kerahasiaan Informasi

Isi dari Kebijakan Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi yang harus dipatuhi oleh seluruh insan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan menguasai semua bentuk ciptaan dalam bentuk kepemilikan secara intelektual.
2. Selama periode bisnisnya, Perseroan mungkin berkecimpung dengan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga yang harus dijaga kerahasiaannya oleh Perseroan. Perseroan akan membatasi keterbukaan Informasi Rahasia tersebut dengan dasar “need to know”. Seluruh insan Perseroan wajib menjaga kerahasiaan kepemilikan Informasi ataupun Informasi Rahasia yang dipelajari dan disampaikan selama masa kerjanya. Dengan kepercayaan yang terbatas, seluruh insan Perseroan harus terus menerus berusaha menghindari keterbukaan yang disengaja maupun tidak disengaja.
3. Sebagaimana diatur di dalam *Code of Conduct* Perseroan, bahwa setiap insan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi perusahaan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut, insan Perseroan bertanggung jawab untuk:
 - a. Melindungi informasi rahasia Perseroan baik saat masih aktif bekerja maupun pada saat sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerja sama dengan Perseroan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menggunakan informasi perusahaan baik yang bersifat umum dan khusus hanya untuk kepentingan Perseroan.
 - c. Penyebaran informasi yang bersifat rahasia baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain berupa perorangan, perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Perseroan.

Aside from referring to the applicable governance standards, the Company updates and improves its IT system and infrastructure in a regular and sustainable manner according to the most recent development as well as the needs of its IT operations. This effort is in line with the Company’s objectives to utilize IT as a strategic function that can elevate its excellence and competitiveness. Along with these dynamic changes, the Company continues the development of applications on mobile platform basis, either for operational activities or other needs of the Company.

Principals of Information Policies and Confidentiality

The contents of policies on information ownership and disclosure that must be adhered to by all personnel of the company are as follows:

1. The Company controls all forms of creation in the form of intellectual property.
2. During the course of its business, the Company may dabble with certain Confidential Information to a third party of which the secrecy must be maintained. The Company will limit the disclosure of such confidential information on the “need to know” basis. All personnel of the Company are obliged to maintain the secrecy of information ownership or the confidential information learned and delivered during their tenure. With this limit, all Company’s personnel must constantly try to avoid deliberate and unintentional disclosure.
3. As set out in the Company’s Code of Conduct, every personnel of the Company, in accordance with their respective authority and scope of work, have access to the Company’s information, whether public or confidential. To that end, every WIKALABETON personnel is responsible for:
 - a. The protection of the Company’s confidential information either while they still actively work or have not worked at the Company, or have no cooperative ties with the Company, in accordance with the prevailing laws and regulations.
 - b. The use of the Company’s information, either general or specific, only for the interests of the Company.
 - c. The distribution of confidential information, either verbally or in writing, to other parties, whether individuals, corporations, associations, or other legal entities, which shall be conducted by the officials appointed by the Company.

Audit TI

Penerapan program kerja TI Perseroan senantiasa disertai dengan upaya pengukuran dan evaluasi secara komprehensif terhadap kualitas implementasi TI yang dijalankan. Audit dan evaluasi efektivitas TI dilakukan secara berkala oleh Biro Sistem Informasi dengan mempertimbangkan capaian efektivitas dan efisiensi tiap program kerja TI.

Selain audit TI, pengelolaan TI juga mengatur mengenai sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan, khususnya terkait ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi. Perseroan memanfaatkan mekanisme *Whistleblowing System* sebagai sarana bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan laporan pelanggaran dan penyalahgunaan informasi di lingkungan WIKA BETON. Informasi lebih lanjut mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) telah dimuat pada Laporan Tahunan 2020, bagian Tata Kelola Perusahaan.

PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG TI

Pengembangan inisiatif dan program digitalisasi Perseroan senantiasa diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM, khususnya SDM di bidang TI, agar implementasi program yang dijalankan mampu memberikan hasil optimal bagi Perseroan. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui pemberian dan penyediaan pelatihan internal dan eksternal, baik terkait aspek teknis maupun non-teknis. Selain itu, Perseroan juga telah menjalin kerja sama dengan salah satu mitra strategis untuk menyediakan pelatihan yang tepat sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perspektif baru pada aspek sistem informasi. Dengan memahami integrasi proses bisnis yang ada, seluruh personil yang membawahi bidang TI diharapkan mampu merancang perencanaan strategis serta mengimplementasikannya demi mendukung simplifikasi proses bisnis sesuai dengan *roadmap* yang telah ditetapkan.

Informasi mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM di bidang TI yang dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Judul Pelatihan / Name of Training	Tanggal Pelatihan / Date	Jumlah Personil TI (orang) / Total IT Personnel (people)
<i>Challenge and Strategis in Leading Virtual Team</i>	24 Agustus 2020 / August 24, 2020	1
<i>Insight from Best Practice for Continuous Improvement of Supply Chain Implementation</i>	13 November 2020 / November 13, 2020	4
<i>Focus Group Discussion Supply Chain Management</i>	26-27 November 2020 / November 26-27, 2020	5

IT Audit

The implementation of IT work programs at the Company is always accompanied with a comprehensive measurement and evaluation of the running IT system. Audit and evaluation on the effectiveness of IT are carried out periodically by the Information System Bureau by taking into account the effectiveness and efficiency achieved by every IT work program.

Other than IT audit, the IT management regulates sanctions given to violations that take place, especially those related to the non-compliance with Information Ownership and Confidentiality Policies. The Company utilizes the mechanism of Whistleblowing System as a facility for the stakeholders to report violation or abuse of information within WIKA BETON. Further information about the Company's Whistleblowing System is available under the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

HC DEVELOPMENT IN IT

The development of digitalization initiatives and programs of the Company is continuously supported with the improvement of capabilities and competencies of its HC, especially those in the field of IT, so that the programs implemented may bring optimum results for the Company. Competency development is carried out through the provision of internal and external training, both related to technical and non-technical aspects. In addition, the Company cooperates with a strategic partner to provide effective training activities in accordance with the knowledge and new perspective in information system. By understanding the integration of all business processes, the Company's IT personnel are expected to be able to design a strategic plan and implement it to support the simplification of business process in accordance with the pre-determined roadmap.

Information about training and competency development for HC in IT field carried out during 2020 is detailed below.

EVALUASI KINERJA TI TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan sejumlah inisiatif dan program kerja TI sesuai dengan *roadmap* yang telah ditetapkan. Adapun program dan inisiatif tersebut antara lain sebagai berikut:

Nama Inisiatif/Program / Name of Initiatives/Programs	Deskripsi / Description
Absensi Online / Online Attendance	Penerapan <i>logbook system</i> dengan sistem <i>check in</i> dan <i>check ouut</i> bagi pegawai yang menjalankan kerja secara <i>work from home</i> (WFH) dengan platform WTON Mobile. / Implementation of logbook system with check-in and check-out systems in the WTON Mobile platform for employees working from home (WFH).
Aplikasi WTON Visitor / WTON Visitor Application	Aplikasi yang memfasilitas kunjungan bagi tamu untuk mengakses kantor atau pun unit kerja PT Wijaya Karya Beton Tbk di seluruh Indonesia dengan menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 melalui penyertaan biodata dan hasil <i>rapid test</i> sebagai syarat utama. / An application to facilitate guest visits to the offices or work units of PT Wijaya Karya Beton Tbk in Indonesia that is run by enforcing the Covid-19 health protocols through the submission of guests' data and rapid test result as one of the key requirements.
Aplikasi <i>Self Assessment Covid-19</i> kepada seluruh pegawai PT Wijaya Karya Beton Tbk / Covid-19 Self-Assessment Application for all employees of PT Wijaya Karya Beton Tbk	Aplikasi ini merupakan upaya perusahaan dalam mengidentifikasi dini dan membatasi kemungkinan penyebaran Covid-19 di lingkungan perusahaan. / This application is the realization of Company's efforts in performing early identification of Covid-19 and limiting the probability of Covid-19 virus spread within the Company.
Aplikasi EES (<i>Employee Engagement Survey</i>) / EES (<i>Employee Engagement Survey</i>) Application	Aplikasi ini memfasilitas Biro Human Capital dalam penyelenggaraan Survei Kepuasan Pegawai setiap tahunnya. Aplikasi ini dikembangkan dengan berbasis <i>mobile platform</i> dan menjangkau seluruh pegawai perusahaan yang tersebar di seluruh unit kerja. / This application facilitates the Human Capital Bureau in conducting the annual Employee Engagement Survey. It is developed on the basis of mobile platform and can reach all employees spread in various work units.
<i>Improvement System</i>	Sistem ini merupakan bentuk dukungan dan kolaborasi dengan Biro SCM dalam mengembangkan aplikasi ERP tahap II yang meliputi seluruh proses bisnis perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif organisasi. Pengembangan ini memuat modul mengenai Info Pasar, RKAP, ERP wilayah penjualan, RAB, <i>Procurement</i> , ERP produksi, Distribusi, dan <i>Dashboard</i> . / This system is a form of support and collaboration with the SCM Bureau in the development of ERP application phase II which covers all business processes of the Company to reach organizational competitive advantages. This development includes modules on Market Information, RKAP, ERP of sales area, RAB, Procurement, ERP production, Distribution, and Dashboard.

IT PERFORMANCE EVALUATION IN 2020

Over the course of 2020, the Company has implemented a number of IT initiatives and work programs according to the prepared roadmap. Those programs and initiatives are as follows:

INVESTASI PENGEMBANGAN TI TAHUN 2020

Rangkaian pelaksanaan inisiatif dan program kerja TI selama tahun 2020 menjadi investasi yang mampu mendorong terciptanya proses bisnis yang lebih ringkas, efektif, efisien dan memiliki daya hasil optimal. Oleh karena itu, investasi pengembangan TI menjadi salah satu kebutuhan yang direncanakan setiap tahunnya. Investasi di tahun 2020 sebagian besar difokuskan pada *upgrade* lisensi perangkat di DC (*Data Center*) dan DRC (*Disaster Recovery Site*).

INVESTMENT IN IT DEVELOPMENT IN 2020

A series of IT initiatives and work programs during 2020 is an investment that can encourage the creation of business processes that are more concise, effective, efficient, and have optimal results. Therefore, investment in IT development is one of the needs that is planned every year. Investments in 2020 were mostly focused on upgrading device licenses at DC (*Data Center*) and DRC (*Disaster Recovery Site*).

RENCANA PENGEMBANGAN TI TAHUN 2021

Penetapan rencana pengembangan TI di tahun 2021 mengacu pada Rencana Jangka Panjang Strategis Sistem Informasi yang diatur dalam *Roadmap* Sistem Informasi Perseroan 2018 – 2023. Rencana pengembangan TI di tahun 2021 disesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Strategis Sistem Informasi, yang tertuang dalam *Roadmap* Sistem Informasi Perusahaan, antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur Pabrik dan implementasi CCMS pada area produksi.
2. Pengembangan Sistem Informasi Divisi dan Anak Usaha.
3. Implementasi *Supply Chain Management (SCM)* tahap II pada Aplikasi ERP, sebagai *tools re-engineering* pada proses bisnis perusahaan.
4. *Dashboard SCM* berbasis *mobile platform*.
5. Aplikasi portofolio HCIS.
6. Implementasi *Service Desk*.

Penetapan dan penyusunan rencana tersebut telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan di masa pandemi COVID-19.

IT DEVELOPMENT PLANS IN 2021

The determination of IT development plan for 2021 refers to the Strategic Long-Term Plan of Information System stipulated in the Company's Information System Roadmap of 2018-2023. The 2021 IT development plan is adjusted to the Strategic Long-Term Plan of Information System stipulated in the Company's Information System Roadmap, which covers:

1. Development of plant infrastructure and implementation of CCMS at production area.
2. Development of information system at divisions and subsidiaries.
3. Implementation of Supply Chain Management (SCM) phase II in the ERP Application as a re-engineering tool for Company's business process.
4. Preparation of SCM dashboard based on mobile platform.
5. Implementation of HCIS portfolio application.
6. Implementation of Service Desk.

The preparation and determination of this plan has considered and complemented the Company's condition during the Covid-19 pandemic era.

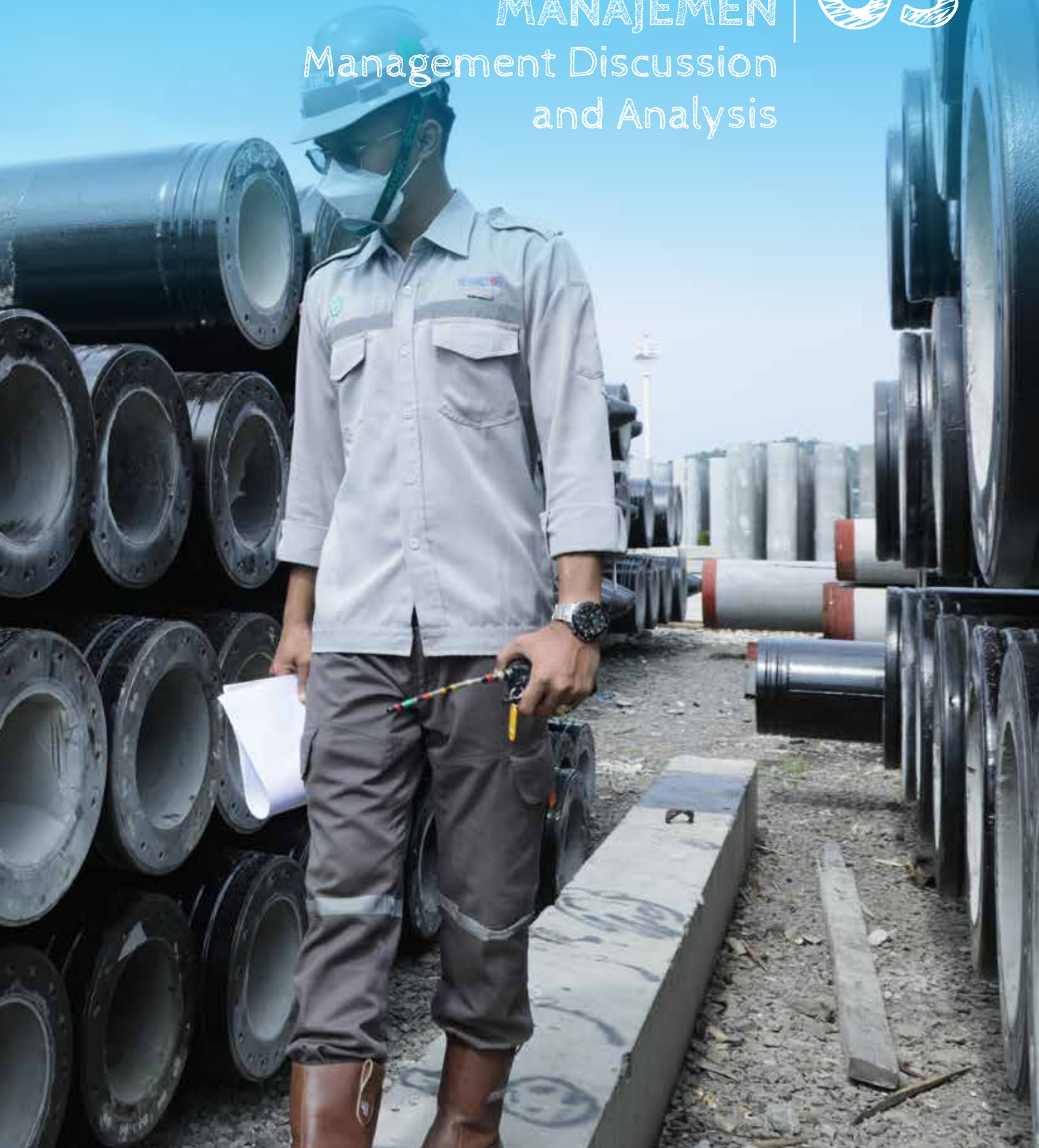




ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

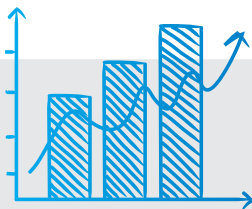
05

Management Discussion
and Analysis



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



“Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kepercayaan seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan dengan terus mencatat kinerja positif dan berkelanjutan melalui integrasi proposional di seluruh aspek Engineering, Produksi dan Instalasi yang dikelola untuk memberikan kinerja yang maksimal.

The Company is committed to continuously increasing the trust of shareholders and stakeholders by recording positive and continuous performance through proportional integration in all aspect of Engineering, Production, and Installation to provide maximum performance.

TINJAUAN UMUM TINJAUAN MAKROEKONOMI GLOBAL

Perekonomian global di tahun 2020 diterpa oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan ekonomi secara menyeluruh di seluruh negara untuk menekan laju penyebaran virus tersebut. Dalam laporannya yang berjudul *World Economic Outlook Update* edisi Januari 2021, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020, diestimasikan terkontraksi sebesar -3,5% bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 2,8%.

GENERAL OVERVIEW GLOBAL MACROECONOMIC OVERVIEW

The global economy in 2020 suffered from the Covid-19 pandemic, causing a wide-ranging restriction of economic activity in all countries, an effort that was implemented to reduce the outbreak rate of the virus. In the *World Economic Outlook Update* of January 2021 edition, global economic growth in 2020 was estimated to contract by -3.5% compared to the 2019 economic growth of 2.8%.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2019 - 2021 (dalam satuan %) /
Global Economic Growth Projection for 2019 - 2021 (in %)

Uraian / Description	2019	2020e
Global	2,8	-3,5
Negara Maju / Developed Countries	1,6	-4,9
Negara Berkembang / Developing Countries	3,6	-2,4

Sumber: World Economic Outlook Update, IMF, Januari 2021 /

Source: World Economic Outlook Update, IMF, January 2021

Keterangan: e: estimasi / Note: e: estimation

Penurunan ekonomi terdalam berasal dari kumpulan negara maju yang berkontraksi sebesar -4,9%. Dari kumpulan negara maju, penurunan ekonomi terburuk dialami oleh Uni Eropa sebesar -7,2% dan Inggris sebesar -10,0%. Kumpulan negara berkembang juga turut terkena dampak negatif pandemi Covid-19 dengan kontraksi ekonomi diestimasi sebesar -2,4%. Pertumbuhan ekonomi pada kumpulan negara maju memasuki zona negatif dikarenakan pemberlakuan karantina wilayah secara luas dan menyeluruh guna menekan laju penyebaran virus Covid-19.

Pemberlakuan karantina wilayah juga dilakukan oleh kumpulan negara berkembang di tahun 2020 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut secara kumulatif berkontraksi sebesar -2,4%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terdalam dialami oleh Meksiko sebesar -8,5% dan disusul oleh India sebesar -8,0% dan Afrika Selatan sebesar -7,5%.

Berkurangnya aktivitas ekonomi di tahun 2020 berdampak buruk pada tingkat pertumbuhan volume perdagangan dunia yang berkontraksi sebesar -9,6%. Selain itu, harga minyak bumi juga mencatatkan penurunan yang cukup dalam yaitu sebesar -32,7% di tahun 2020 berdasarkan data yang dihimpun oleh IMF.

Bank Sentral AS, *the Fed*, menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif sepanjang tahun 2020 dengan menurunkan suku bunga acuan, *Fed Fund Rate (FFR)* di kisaran 0% - 0,25% sampai dengan akhir tahun 2020. Pelonggaran kebijakan moneter tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif pada laju pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS) yang terkena dampak dari pandemi Covid-19.

TINJAUAN MAKROEKONOMI NASIONAL

Tahun 2020 merupakan periode yang menantang bagi perekonomian Indonesia. Pembatasan aktivitas ekonomi yang secara masif yang dilakukan pada tahun 2020 guna memperlambat laju penyebaran pandemi Covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi menurun.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,07% (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.432,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau USD3.911,7.

The lowest economic decline came from the developed countries group which contracted by -4.9%. From this group, the worst economic decline was experienced by the European Union at -7.2% and the UK at -10.0%. The developing countries group was also negatively affected by the Covid-19 pandemic with an estimated economic contraction of -2.4%. Economic growth of the developed countries group entered a negative zone due to the implementation of extensive and comprehensive regional quarantines to reduce the spread of the Covid-19 virus.

The implementation of regional quarantine was also carried out by the developing countries group in 2020 which caused economic growth in these countries to cumulatively contract by -2.4%. The deepest contraction in economic growth was experienced by Mexico at -8.5%, followed by India at -8.0%, and South Africa at -7.5%.

The declining economic activity in 2020 had a negative impact on the growth rate of world trade volume which contracted by -9.6%. In addition, the price of petroleum also recorded a relatively deep decline of -32.7% in 2020 based on data compiled by the IMF.

The US Central Bank, the Fed, implemented accommodative monetary policy throughout 2020 by lowering its benchmark interest rate, the Fed Fund Rate (FFR), in the range of 0% - 0.25% by the end of 2020. This monetary policy easing was expected to have a positive effect on the rate of economic growth in the United States (US) which was affected by the Covid-19 pandemic.

NATIONAL MACROECONOMIC OVERVIEW

2020 was a challenging period for the Indonesian economy. Massive restrictions on economic activity carried out in 2020 to slow the spread of the Covid-19 pandemic contributed to the decline in national economic growth.

Based on data compiled by the Statistics Indonesia (BPS), the Indonesian economy in 2020 experienced a growth contraction of -2.07% (c-to-c) compared to the growth of 2019. Indonesia's economy in 2020 as measured by Gross Domestic Product (GDP) on the basis of current prices reached Rp15,432.2 trillion while GDP per capita reached Rp56.9 million or USD 3,911.7.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2014 – 2020 / Growth of Gross Domestic Product (GDP) in 2014-2020	
Tahun / Year	Pertumbuhan PDB / GDP Growth
2020	-2,07%
2019	5,02%
2018	5,17%
2017	5,07%
2016	5,03%

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2014 – 2020 / Growth of Gross Domestic Product (GDP) in 2014-2020

Tahun / Year	Pertumbuhan PDB / GDP Growth
2015	4,88%
2014	5,01%

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

(Source: Statistics Indonesia)

Selama 4 (empat) kuartal berturut-turut di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi. Secara tahunan, realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 merupakan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang pertama kali dialami sejak tahun 2014.

For 4 (four) consecutive quarters in 2020, the national economic growth contracted. Annually, the realization of economic growth in 2020 was the first contraction in economic growth since 2014.

Di sisi lain, kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 masih lebih baik dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada beberapa mitra dagang utamanya, seperti Uni Eropa sebesar -6,4%, Hongkong sebesar -6,1% dan Singapura sebesar -5,8%.

On the other hand, the contraction in national economic growth in 2020 was still better than the contraction in economic growth in several major trading partners, such as the European Union at -6.4%, Hong Kong at -6.1%, and Singapore at -5.8%.

Kontraksi Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 / GDP Growth Contraction by Business Fields in 2020

Lapangan Usaha / Business Field	Kontraksi Pertumbuhan PDB / GDP Growth Contraction
Industri Pengolahan / Manufacturing Industry	-2,93%
Perdagangan / Trading	-3,72%
Konstruksi / Construction	-3,26%
Pertambangan & Penggalian / Mining and Excavation	-1,95%
Transportasi & Pergudangan / Transportation and Warehousing	-15,04%
Administrasi Pemerintahan / Government Administration	-0,03%
Akomodasi & Makan Minum / Accommodation and Food and Beverages	-10,22%
Jasa Lainnya / Other Services	-4,10%
Jasa Perusahaan / Corporate Services	-5,44%
Pengadaan Listrik & Gas / Electricity and Gas Procurement	-2,34%

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

(Source: Statistics Indonesia)

Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam di tahun 2020 terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -15,04% yang disebabkan oleh masih terbatasnya pergerakan atau mobilitas sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Sumber kontraksi pertumbuhan lainnya berasal dari Akomodasi & Makan Minum yang berkontraksi sebesar -10,22% disebabkan oleh Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel yang turun, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkurang drastis, serta tutupnya sejumlah hotel dan restoran selama masa pandemi Covid-19.

In terms of production, the deepest growth contraction in 2020 occurred in the Transportation and Warehousing Business Field at -15.04% due to limit on mobility as an effort to prevent the spread of the Covid-19 virus. Another source of contraction in growth came from Accommodation & Food and Drink Business Field, which contracted by -10.22% due to the drop in Hotel Room Occupancy Rate (TPK), the drastic decline in the number of foreign tourist visits, and the closure of a number of hotels and restaurants during the Covid-19 pandemic.

Di tahun 2020, seluruh komponen pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran tumbuh negatif kecuali konsumsi pemerintah. Komponen Investasi berkontraksi sebesar -4,95% dikarenakan menurunnya penjualan semen domestik, berkurangnya volume penjualan kendaraan untuk barang modal dan disertai kontraksi nilai impor barang-barang modal. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berkontraksi sebesar -2,63% yang mencerminkan rendahnya daya beli masyarakat.

In 2020, all components of economic growth by to expenditure grew negatively, except for government consumption. The investment component contracted by -4.95% due to lower domestic cement sales, lower vehicle sales volume for capital goods, and a contraction in the import value of capital goods. Meanwhile, Household Consumption Expenditure contracted by -2.63%, which reflected the low purchasing power of the people.

Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Kelompok provinsi Sumatera juga turut memberikan kontribusi PDB yang signifikan sebesar 21,36% dan diikuti oleh kelompok provinsi Kalimantan dengan kontribusi sebesar 7,94%.

Inflasi nasional tahun 2020 tercatat sebesar 1,68%, lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%. Laju inflasi tahun 2020 sebagian besar berasal dari makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,19%, dan diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,35% dari tingkat inflasi keseluruhan. BPS juga mencatatkan faktor-faktor penyumbang deflasi yang berasal dari transportasi, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Di tengah penurunan aktivitas ekonomi, Bank Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan aktivitas perbankan melalui pemangkasan suku bunga acuan yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali hingga mencapai level 3,75%. Penurunan tingkat suku bunga tersebut dibuat melihat tingkat inflasi yang sangat rendah dan diikuti oleh kondisi neraca pembayaran dan aliran modal yang belum kondusif.

TINJAUAN INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL

Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa memberikan prioritas bagi pembangunan dan berfungsinya infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Spatially, the structure of the Indonesian economy in 2020 was still dominated by the group of provinces in Java Island which contributed 58.75% to the nation's GDP. The Sumatra provinces group also contributed significantly to GDP at 21.36%, followed by the Kalimantan provinces group with a contribution of 7.94%.

National inflation rate in 2020 was recorded at 1.68%, lower than the 2019 inflation rate of 2.72%. The inflation rate in 2020 mostly came from food, beverages, and tobacco with a share of 0.19%. This was followed by personal care and other services group with a share of 0.35% of the overall inflation rate. BPS also listed factors contributing to deflation originating from transportation, the information group, communication, and financial services.

Amid the decline in economic activity, Bank Indonesia made various efforts to increase banking activity by cutting its benchmark interest rate 5 (five) times to reach the level of 3.75%. The decrease in interest rates was made due to the extremely low inflation rate as well as the unfavorable conditions of balance of payments and capital flows.

NATIONAL CONSTRUCTION INDUSTRY OVERVIEW

The acceleration of infrastructure development is an integral part of national economic growth. The government has carried out various efforts to provide quality infrastructure facilities and services through rehabilitation and improvement of capacity of damaged infrastructure facilities, as well as new construction. Therefore, the government always gives priority to the development and improvement of infrastructure in order to support economic growth.

Anggaran Infrastruktur (dalam triliun Rupiah) / Infrastructure Budget (in trillions of Rupiah)		
Tahun / Year	Anggaran Infrastruktur / Budget for Infrastructure	Pertumbuhan yoy (%) / Growth yoy (%)
2020	281,1	-28,7%
2019	394,1	0,0%
2018	394,0	3,4%
2017	381,2	41,6%
2016	269,1	5,1%

(Sumber: APBN 2021)

(Source: 2021 State Budget)

Keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur nasional dapat dilihat dari porsi anggaran belanja infrastruktur yang kian meningkat. Berdasarkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2020, pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp423,3 triliun, naik sebesar 7,4% dibandingkan anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebesar Rp394,1 triliun.

The government's full commitment to the development of national infrastructure is reflected in the increasing portion of the infrastructure spending budget. Based on the 2020 State Budget (APBN), the government has allocated a budget for infrastructure development of Rp423.3 trillion, an increase of 7.4% compared to the budget allocation of 2019 of Rp394.1 trillion.

Namun di tengah penanganan pandemi Covid-19 yang semakin membutuhkan dana, pada akhirnya pemerintah mengalokasikan sebagian besar dari anggaran infrastruktur di tahun 2020 untuk meningkatkan kapasitas medis dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Sehingga pada tahun 2020, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur turun menjadi Rp281,1 triliun, lebih rendah 28,7% dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp394,1 triliun.

Proyek prioritas pemerintah dalam membangun infrastruktur tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, pertanian dan perikanan. Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga akan ditujukan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020, 11 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp135,2 triliun telah berhasil dirampungkan. Selain itu, KPPIP juga telah berhasil mendorong 6 (enam) proyek untuk melewati tahap penyiapan, diantaranya Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan penambahan lingkup Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo.

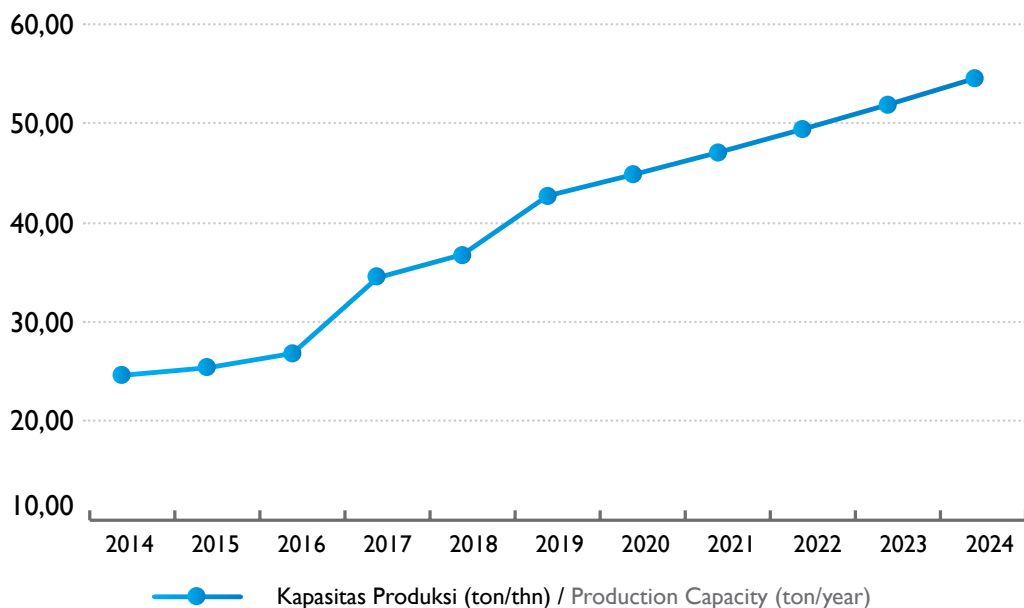
Pandemi Covid-19 yang semakin memburuk tidak dapat dipungkiri memberikan dampak perlambatan pada pembangunan infrastruktur nasional, salah satunya kesehatan dan keselamatan pekerja. Selain itu, keterlambatan dan penundaan *supply* bahan bangunan dan peralatan konstruksi serta sulitnya pendanaan proyek konstruksi menjadi faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pembangunan infrastruktur di tahun yang akan datang.

However, amid the management of the Covid-19 pandemic, which was increasingly in need of funds, the government ultimately allocated a large part of the infrastructure budget in 2020 to increase medical capacity and social protection for the community. So that in 2020, the total budget allocated for infrastructure development decreased to Rp281.1 trillion, 28.7% lower than the 2019 budget of Rp394.1 trillion.

The government's priority projects in infrastructure development are contained in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) of 2020-2024. Within a period of 5 (five) years, infrastructure development will be prioritized to improve connectivity to small industrial areas, special economic zones, tourism areas, and agriculture and fisheries industries. In addition, infrastructure development will be aimed at developing the nation's human resources (HR), especially in the education and health sectors.

The government through the Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery (KPPIP) stated that, throughout 2020, 11 National Strategic Projects (PSN) worth Rp135.2 trillion have been successfully completed. In addition, KPPIP has succeeded in encouraging 6 (six) projects to pass the preparation stage, including the Yogyakarta-Bawen Toll Road and the addition of the Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Toll Road section.

The worsening Covid-19 pandemic undeniably has an adverse effect in the slowing down of national infrastructure development, one of which is in terms of health and safety of workers. Delays in the supply of building materials and construction equipment, as well as difficulty in funding construction projects, become the main factors that are taken into consideration in determining the steps for infrastructure development in the coming year.



(Sumber: AP3I)

(Source: AP3I)

Walaupun sempat terhambat oleh dampak pandemi Covid-19, industri beton pracetak tetap menunjukkan perkembangan di tahun 2020. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I), kapasitas produksi beton pracetak dengan kondisi eksisting mencapai 44.813.642 ton dengan jumlah pabrik sebanyak 86 pabrik. Tren peningkatan kapasitas produksi dan jumlah pabrik telah berjalan sejak tahun 2014 seiring dengan semakin meningkatnya anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur nasional.

KONTRIBUSI WILABETON TERHADAP INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL

Seluruh kegiatan operasional Perseroan ditunjukkan untuk memenuhi Visi, Misi dan Nilai-Nilai perusahaan sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Surat Keputusan No. SK.01.01/WB-0A.339/2017 tanggal 1 Oktober 2017 tentang Perubahan Visi, Misi, Moto, Budaya dan Paradigma PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Perseroan memiliki Visi untuk Menjadi Perusahaan Terkemuka dalam Bidang *Engineering, Production, Installation* (EPI) Industri Beton di Asia Tenggara. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kepercayaan seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan dengan terus mencatat kinerja positif dan berkelanjutan melalui integrasi proposional di seluruh aspek *Engineering, Produksi dan Instalasi* yang dikelola untuk memberikan kinerja yang maksimal. Sejalan dengan posisi Perseroan sebagai salah satu pemain unggul di industri beton melalui kegiatan fabrikasi beton pracetak maupun non-pracetak.

Disamping itu, Perseroan juga memiliki misi-misi yang dapat mendukung tercapainya visi yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Menyediakan produk dan jasa yang berdaya saing dan memenuhi harapan Pelanggan;
2. Memberikan nilai lebih melalui proses bisnis yang sesuai dengan persyaratan dan harapan pemangku kepentingan;
3. Menjalankan sistem manajemen dan teknologi yang tepat guna meningkatkan efisiensi, konsistensi mutu, keselamatan dan kesehatan kerja yang berwawasan lingkungan;
4. Tumbuh dan berkembang bersama mitra kerja secara sehat dan berkesinambungan; dan
5. Mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan.

Dalam optimalisasi pangsa pasar, Perseroan telah membagi area pemasaran dan penjualannya ke 7 (tujuh) Wilayah Penjualan (WVP), yaitu:

1. Wilayah Penjualan I

Cakupan area: Berdasarkan SK No. SK.01.01/WB-0A.370/2017 tanggal 20 Desember 2017 Tentang SK Amandemen Pembentukan Wilayah I, ditetapkan bahwa Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menjadi Wilayah Operasi PT Citra Lautan Teduh, sehingga Cakupan Area WP I adalah:

Even though it was hampered by the impact of the Covid-19 pandemic, the precast concrete industry continuously showed progress in 2020. Based on data compiled by Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I), the production capacity of precast concrete with existing conditions reached 44,813,642 tons with 86 plants in total. The growing trend of production capacity and the number of plants has been maintained since 2014 in line with the increasing spending budget issued by the government to build national infrastructure.

CONTRIBUTION OF WILABETON TO NATIONAL CONSTRUCTION INDUSTRY

All of the Company's operational activities are aimed at the achievement of its Vision, Mission, and Values as approved by the Board of Commissioners and Board of Directors through Decree No. SK.01.01/WB-0A.339/2017 dated October 1, 2017, regarding Changes in Vision, Mission, Motto, Culture, and Paradigm of PT Wijaya Karya Beton Tbk.

The Company has a vision to be a leading company engaged in the business of providing engineering, production, installation (EPI) in concrete industry in Southeast Asia. To that end, the Company is committed to continuously increasing the trust of all shareholders and stakeholders by continuing to record positive and sustainable performance through proportional integration in all aspects of Engineering, Production, and Installation that are managed to provide maximum performance, in line with its position as one of the leading players in the concrete industry through precast and non-precast concrete fabrication activities.

In addition, the Company has missions that can support the achievement of the established vision, namely:

1. Providing competitive products and services, and meeting customer expectations;
2. Providing added value through business processes that meet and fulfill the requirements and expectations of stakeholders;
3. Carrying out appropriate management and technology systems to improve the efficiency, consistency of quality, occupational safety and health with environmentally conscious;
4. Growing and developing together with working partners in a sound and sustainable manner; and
5. Developing competence and welfare of employees.

In optimizing its market share, the Company has divided its marketing and sales regions into 7 (seven) Sales Areas (WP), namely:

1. Sales Area I

Area coverage: Based on the Decree No. SK.01.01/WB-0A.370/2017 dated December 20, 2017, regarding Decree of Amendment of Area I Establishment, it is determined that Riau and Riau Islands Provinces are included in the Operational Area of PT Citra Lautan Teduh; making the

Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

2. Wilayah Penjualan II

Cakupan area: Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.

3. Wilayah Penjualan III

Cakupan area: DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

4. Wilayah Penjualan IV

Cakupan area: Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

5. Wilayah Penjualan V

Cakupan Area: Jawa Timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

6. Wilayah Penjualan VI

Cakupan area: Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

7. Wilayah Penjualan VII

Cakupan area: Pulau Kalimantan

Sampai dengan tahun 2020, Perseroan telah memberikan kontribusi terhadap industri konstruksi nasional melalui kegiatan usaha utama dan penunjangnya. Adapun kegiatan usaha utama Perseroan meliputi:

1. Perencanaan, Produksi, Penjualan, Pemasangan dan Pelaksanaan Konstruksi produk-produk beton, antara lain: Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk konstruksi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung; Perdagangan Besar berbagai macam material bangunan; dan Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api.
2. Melakukan Usaha Jasa Perencanaan Pelaksanaan, dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha sipil, elektrik dan *Post-Tensioning*.
3. Melakukan Perencanaan, Produksi dan Penjualan Produk/ Komponen Bahan Bangunan.
4. Melakukan kegiatan impor dan ekspor yang terkait kegiatan 1, 2 dan 3 di atas.

Selain melalui kegiatan usaha utamanya, Perseroan juga memiliki kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Sebagai hasilnya, andil Perseroan dalam berbagai proyek pembangunan nasional semakin bertambah. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh konsultan eksternal pada tahun 2018, Perseroan berhasil menguasai pasar produk beton pracetak sebesar 19% dari total kapasitas nasional 17,2 juta ton. Pencapaian pangsa pasar tersebut merupakan yang komposisi pangsa pasar terbesar yang dimiliki oleh perusahaan konstruksi beton pracetak di tanah air, seperti perusahaan beton pracetak baik yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya

coverage of Sales Area I be Special Region of Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatra, and West Sumatra Provinces.

2. Sales Area II

Area coverage: South Sumatra, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, and Lampung.

3. Sales Area III

Area coverage: DKI Jakarta, Banten, and West Java.

4. Sales Area IV

Area coverage: Central Java and Special Region of Yogyakarta.

5. Sales Area V

Area coverage: East Java, Madura, Bali, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara.

6. Sales Area VI

Area coverage: Sulawesi and Maluku Islands, as well as Papua Region.

7. Sales Area VII

Area coverage: Kalimantan Island.

Until 2020, the Company has contributed to the national construction industry through its core and supporting business activities. The core business activities of the Company include:

1. Planning, Production, Sales, Installation, and Construction of concrete products, including: Manufacture of Cement and Lime Products for construction; Installation of Foundations and Piles; Offshore Building and Floating Building Industry; Wholesale of various kinds of building materials; and Fire-Resistant Brick, Mortar, Cement, and Similar Products.
2. Construction Planning, Implementation, and Supervision Services in the civil, electrical and post-tensioning business sectors.
3. Planning, Production, and Sales of Building Material Products/ Components.
4. Import and export activities related to activities 1, 2, and 3 above.

Apart from its core business activities, the Company carries out supporting business activities in order to optimize the utilization of its resources. As a result, the Company's share in various national development projects has increased. Based on a survey conducted by an external consultant in 2018, the Company managed to dominate the precast concrete product market by 19% of the total national capacity of 17.2 million tons. This market share achievement is the largest market share owned by a precast concrete construction company in the country, either of State-Owned Enterprises or of other private companies.

STRATEGI BISNIS TAHUN 2020

Untuk memenuhi tuntutan pemegang saham sebagai perusahaan terbuka yang mana setiap tahunnya harus tumbuh, maka ditahun 2020 Perseroan mengembangkan bisnis *non precast* yang masih berkaitan dengan *core* bisnis melalui dibentuknya Divisi Operasi dan Divisi Pengelolaan Material yang diharapkan dapat mendukung perolehan omset kontrak maupun omset penjualan.

Dalam menangkap peluang proyek-proyek infrastruktur baru di tahun 2020, Perseroan telah menyiapkan pabrik baru guna meningkatkan kapasitas produksi dari 4,1 juta ton per tahun menjadi 4,4 juta ton per tahun sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan apabila diperlukan maka kapasitas masih dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan lahan pabrik yang tersedia untuk penambahan jalur produksi baru.

Langkah-langkah strategis yang diambil Perseroan untuk mencapai target, adalah:

1. Memperkuat sinergi pemasaran beton pracetak gedung dengan induk Perseroan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan anak perusahaan lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
2. Mengokohkan pertumbuhan organik Perseroan melalui pembentukan Divisi Operasi dan Divisi Pengelolaan Material.
3. Membentuk struktur organisasi berfundamental kuat dan sejalan dengan bisnis usaha Perseroan yang didasari hasil tinjauan Bisnis Proses.
4. Menjalinkan hubungan kerja sama dengan mitra strategis untuk mengembangkan kemampuan *operational excellence* dan kompetensi SDM.
5. Melakukan reposisi unit kerja dan SDM sebagai bagian dari program efisiensi biaya di WIKABETON Group.
6. Memperketat proses penyeleksian investasi dengan mengutamakan investasi yang memberikan dampak langsung terhadap penjualan dan keuntungan Perseroan.
7. Meningkatkan daya saing Perseroan melalui penerapan *Supply Change Management (SCM)* untuk memberikan solusi yang lebih efisien terhadap rantai pasok.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko tetap menjadi pegangan manajemen dalam menjalankan roda usaha Perseroan, disamping Sistem Manajemen Mutu WIKABETON yang telah melekat pada proses kerja dan proses produksi secara konsisten diterapkan di seluruh jajaran Perseroan.

2020 BUSINESS STRATEGIES

As a public company that has to meet the demand of shareholders for continuous growth every year, in 2020, the Company developed a non-precast business that was still related to its core business through the establishment of Operations Division and Material Management Division. Both divisions are expected to support the acquisition of contract turnover and sales turnover.

In capturing opportunities for new infrastructure projects in 2020, the Company prepared a new plant to increase production capacity from 4.1 million tons per year to 4.4 million tons per year in accordance with the Company's Long-Term Plan and if required, such capacity can be improved by optimizing the available land at plants for the addition of new production lines.

The following are strategic steps taken by the Company to achieve its targets:

1. Strengthening the marketing synergy of precast concrete buildings with the parent company, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, and other subsidiaries to optimize the use of available resources.
2. Strengthening the Company's organic growth through the establishment of the Operations Division and Material Management Division.
3. Establishing an organizational structure with strong fundamentals in line with the Company's business, based on the results of the Business Process review.
4. Establishing cooperative relationships with strategic partners to develop operational excellence and HR competencies.
5. Repositioning work units and human resources as part of the cost efficiency program at WIKABETON Group.
6. Tightening the investment selection process by prioritizing investments that have a direct impact on Company's sales and profits.
7. Increasing the Company's competitiveness through the implementation of Supply Change Management (SCM) to provide more efficient solutions to the supply chain.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, prudent principle, and Risk Management remains the management guide in running the Company's business, in addition to the WIKABETON Quality Management System which has been attached to the work and production processes consistently applied at all Company's levels.

Key Performance Indicator (KPI) menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan Perseroan untuk terus berkembang tercermin dari pencapaian yang disepakati seluruh jajaran Direksi dengan arahan dan pengawasan Dewan Komisaris serta dukungan dari seluruh Pemegang Saham, mitra kerja, pemangku kepentingan maupun segenap karyawan untuk bersama-sama secara sinergi berupaya mencapai sasaran Perseroan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020, disamping kepedulian sosial terhadap lingkungan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR), sehingga dapat menjamin kelangsungan usaha Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak.

KINERJA OPERASI PER SEGMENT USAHA

Perseroan memiliki 3 (tiga) segmen usaha dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu: Segmen Beton, Segmen *Quarry* dan Segmen Jasa. Segmen Beton merupakan bisnis inti Perseroan yang dilakukan melalui produksi beton baik pracetak maupun *Ready Mix*. Saat ini Perseroan telah dikenal sebagai produsen beton pracetak yang telah berpengalaman selama 40 tahun dan telah memiliki pengembangan teknologi terdepan di Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan turut didukung oleh Segmen *Quarry* yang merupakan bagian dari strategi *backward* proses produksi beton yang dilakukan Perseroan meliputi kegiatan penambangan dan produksi material *split*, *screen*, dan lainnya, melalui 3 (tiga) *Crushing Plant* yang dimiliki Perseroan. Sedangkan Segmen Jasa merupakan layanan yang dikembangkan Perseroan sejalan dengan strategi *forward* yang telah dilakukan Perseroan.

Dalam menyusun laporan keuangan, Perseroan menerapkan PSAK 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. Informasi pelaporan segmen operasi disajikan untuk menunjukkan hasil usaha Perseroan yang berasal dari tiap segmen berdasarkan bidang usaha. Selain itu, Perseroan juga memiliki informasi segmen geografis yang disusun untuk menunjukkan aset dan hasil usaha setiap grup wilayah geografis.

The Key Performance Indicators (KPIs) serve as a benchmark for the success of the Company's management to continue to grow, reflected in the achievements set for the entire Board of Directors with the direction and supervision of the Board of Commissioners as well as the support of all Shareholders, work partners, stakeholders, and all employees. All these elements worked together in synergy to strive for the achievement of the Company's goals as determined in the 2020 Work Plan and Budget, in addition to realize social and environmental awareness in the Corporate Social Responsibility (CSR) program, so as to ensure the continuity of the Company's business and provide added value for all parties.

OPERATIONAL PERFORMANCE PER BUSINESS SEGMENT

The Company has 3 (three) business segments in carrying out its operational activities, namely Concrete Segment, Quarry Segment, and Service Segment. The Concrete segment is the Company's core business, which is carried out through the production of both precast and ready-mix concrete products. Currently, the Company is known as a precast concrete manufacturer with 40 years of experience and has had the leading technology development in Indonesia.

The Company's business activities are also supported by the Quarry Segment which is part of its strategy of backward concrete production process. This segment includes mining activities and production of split, screen, and other materials, through 3 (three) Crushing Plants owned by the Company. Meanwhile, the Service Segment is a service developed by the Company in line with its forward strategy that has been implemented.

In preparing the financial statements, the Company applies PSAK 5 (2015 Improvement) regarding Operating Segments, prepared by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. Information and report on operating segment are provided to show the Company's results of operations from each segment based on the line of business. In addition, the Company has geographic segment information that is compiled to show the assets and results of operations of each geographic area group.

SEGMENT USAHA

Masing-masing dari 3 (tiga) segmen usaha Perseroan, yaitu Segmen Beton, Segmen Quarry dan Segmen Jasa, memiliki aktivitas usaha dalam memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban dari hasil operasinya. Kinerja masing-masing segmen secara berkala dikaji ulang oleh pengambil keputusan untuk mencapai alokasi sumber daya yang optimal. Berikut adalah uraian mengenai aspek produksi yang memuat informasi terkait proses, kapasitas dan perkembangannya, pendapatan dan profitabilitas masing-masing segmen usaha Perseroan di tahun 2020.

Segmen Usaha Beton

Aspek Produksi Segmen Usaha Beton Tahun 2020

Perseroan memiliki 2 (dua) kegiatan produksi utama Segmen Usaha Beton yang terdiri dari Beton Pracetak dan Beton Ready Mix. Berikut adalah penjelasan terkait kegiatan produksi dari kedua produk beton Perseroan.

Proses Produksi Beton Pracetak

Perseroan menjalankan 2 (dua) kegiatan produksi yang meliputi proses produksi beton putar dan proses produksi beton non putar untuk memproduksi Beton Pracetak yang berkualitas. Proses produksi beton pracetak putar melalui tahapan proses persiapan cetakan, penulangan, pengecoran, *stressing*, pemadatan dengan sistem putar (*spinning*). Sedangkan, proses produksi beton non-putar dilakukan melalui tahapan persiapan cetakan, penulangan, pengecoran, pemadatan dengan cara vibrasi (*vibrator* eksternal atau internal).

Beton Pracetak Putar

Untuk memproduksi beton pracetak putar, Perseroan menggunakan metode pemadatan beton yakni sistem putaran mesin spinning. Produk beton pracetak yang diproduksi melalui sistem putar pada jalur adalah sebagai berikut:

- Tiang Beton, meliputi tiang listrik distribusi, tiang listrik transmisi, tiang telepon, tiang listrik jalan rel, dan tiang lampu.
- Tiang Pancang meliputi, tiang pancang bulat berongga, dan tiang pancang kotak berongga, dan *cylinder pile*.
- Produk pipa beton (*hydro structure concrete product*), meliputi pre-stressed concrete pipes (*core type*).

BUSINESS SEGMENTS

Each of the 3 (three) business segments of the Company, namely the Concrete Segment, the Quarry Segment and the Service Segment, has business activities to generate revenue and incur expenses from its operations. The performance of each segment is regularly reviewed by the decision-maker to achieve optimal resource allocation. The following is a description of the production aspects that contain information related to the process, capacity and development, revenue, and profitability of each of the Company's business segments in 2020.

Concrete Business Segment

Production Aspect of Concrete Business Segment in 2020

The Company's Concrete Business Segment has 2 (two) main production activities, namely Precast Concrete and Ready-Mix Concrete products. The following are description of production activities of both products.

Production Process of Precast Concrete

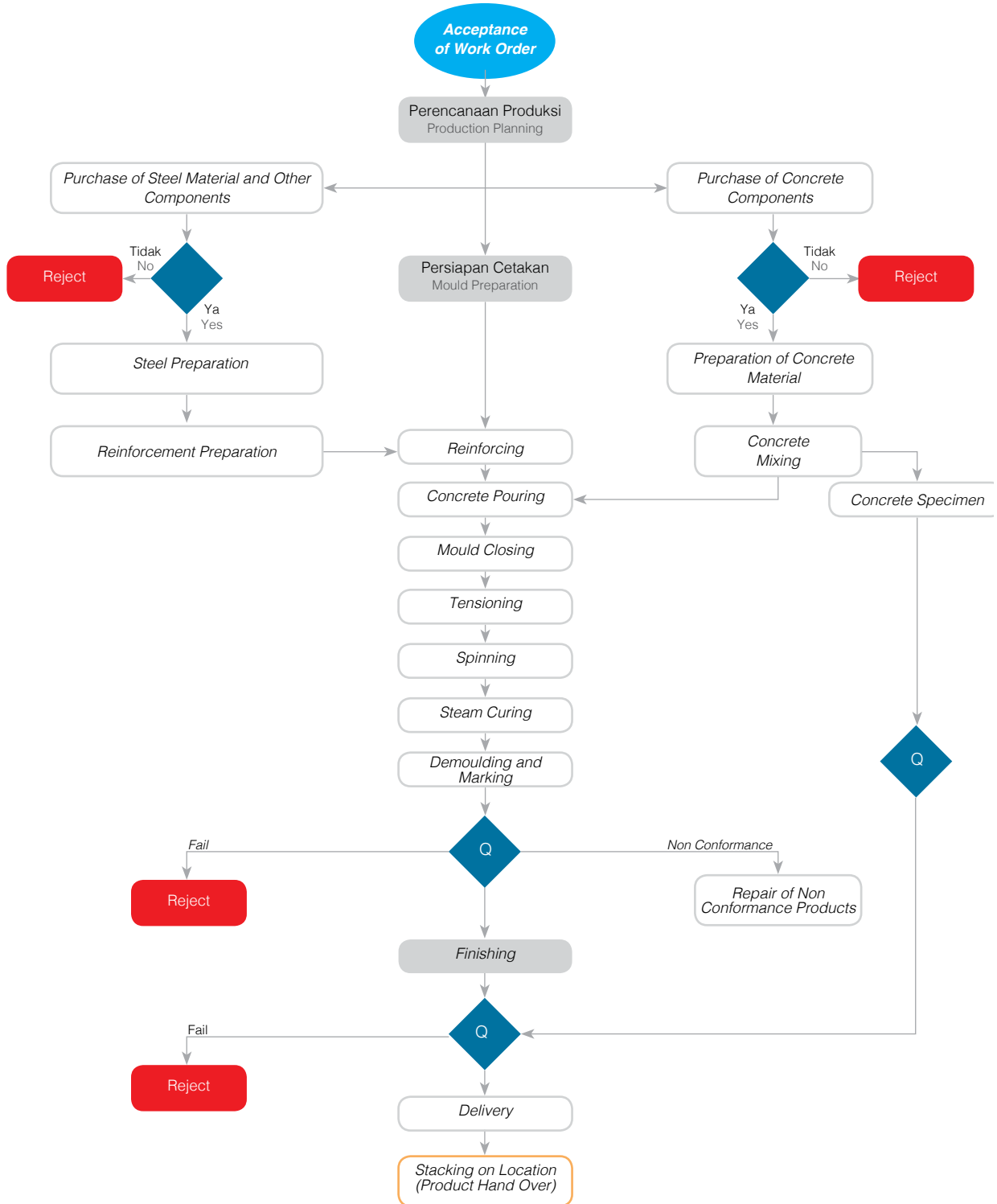
The Company operates 2 (two) production activities, namely centrifugal and non-centrifugal concrete production processes, to produce precast concrete products with excellent quality. The production process of centrifugal precast concrete goes through the stages of mold preparation, reinforcement, casting, *stressing*, to compaction with a spinning system. Meanwhile, the production process of non-centrifugal concrete is carried out through the stages of mold preparation, reinforcement, casting, to compaction by vibration (external or internal vibrator).

Centrifugal Precast Concrete

To produce the centrifugal precast concrete, the Company uses concrete solidification method, which is a rotation system by a spinning machine. Precast concrete products manufactured through a spin system on lanes are as follows:

- Concrete poles, covering electricity distribution poles, electricity transmission poles, telephone poles, power poles for rail roads, and lampposts.
- Piles, covering hollow round poles, hollow box poles, and cylinder piles.
- Concrete pipe products (*hydro structure concrete product*), covering pre-stressed concrete pipes of core type.

Alur Proses Produksi Beton Pracetak Putar
Plot Production of Centrifugal Concrete Processes



Beton Pracetak Non-Putar

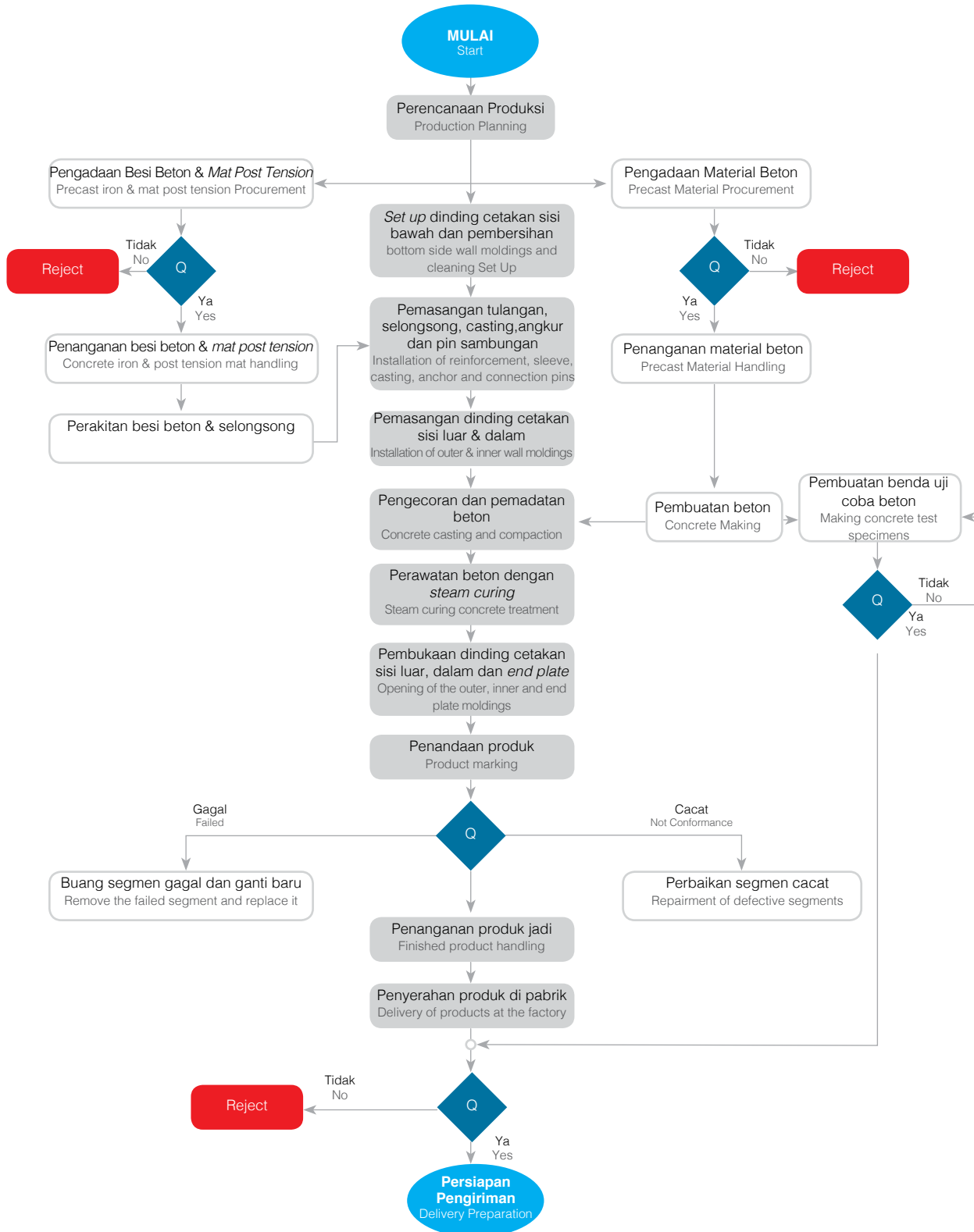
Proses produksi beton Pracetak non-putar dilakukan melalui proses pemadatan beton dengan menggunakan sistem penggetaran/vibrasi baik secara internal, eksternal ataupun kombinasi keduanya. Produk-produk Perseroan yang dihasilkan melalui proses produksi beton pracetak non-putar adalah sebagai berikut:

Non-Centrifugal Precast Concrete

The production process of non-centrifugal precast concrete is carried out through concrete solidification process using vibration system, either internally or externally, or in a combination of both. The Company's products manufactured through the non-centrifugal precast concrete production process are as follows:

Tiang Pancang / PC Piles	<ul style="list-style-type: none"> - Tiang Pancang Segi Empat Masif / PC Square Pile - Tiang Pancang Segitiga / PC Triangular Pile
Bantalan Jalan Rel / Railway Concrete Product	<ul style="list-style-type: none"> - Bantalan Jalan Rel / PC Sleepers - Bantalan Wessel / PC Turnout Sleepers - Bantalan Jalan Lori / Lorry PC Sleepers
Balok Jembatan / Bridge Concrete Product	<ul style="list-style-type: none"> - Girder (I Girder, U Girder, Bulb Tee Girder, dan Box Girder) - Voided Slab - Double Tee - Full Depth Slab - Half Slab
Dinding Penahan Tanah / Wall Retainer Concrete Product	<ul style="list-style-type: none"> - Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) - Flat Prestressed Concrete Sheet Pile (FCSP) - Flat Reinforced Concrete Sheet Pile (FRC Sheet Pile)
Produk Beton Maritim / Maritime Concrete Product	<ul style="list-style-type: none"> - Breakwater (Tetrapod, A-Jack) - Komponen Dermaga / Dock Components
Hydro Concrete Product	RC Pipes
Produk Beton Bangunan Gedung / Building Construction Concrete Product	<ul style="list-style-type: none"> - Dinding Pracetak / Precast Wall - Hollow Core Slab - Concrete Slab, Kolom, Balok, Tangga / Concrete Slab, Column, Beams Ladders - Precast Wall - Hollow Core Slab - Concrete Slab, Column, Beams, Ladders

Alur Proses Produksi Beton Pracetak Non-Putar Plot Production of Non-Centrifugal Precast Concrete



Kegiatan Produksi Beton Ready Mix

Selain beton pracetak, Perseroan juga memproduksi *Ready Mix Concrete* yang merupakan bagian dari unit bisnis Perseroan. Keberadaan unit bisnis ini bertujuan untuk mendukung produk Pracetak Beton melalui metode *mobile plant* seperti *mobile plant tetrapod* atau *block beton*, sehingga dapat menjadi alternatif selain metode *stationary plant* yang telah berkembang selama ini. Di samping itu, *Ready Mix Concrete* dapat menunjang proyek pembangunan infrastruktur jalan ataupun gedung, dan masih banyak lainnya.

Perseroan melakukan pengembangan produk *Ready Mix* dengan dukungan tenaga kerja yang profesional dan alat produksi dengan teknologi terbaru. Agar dapat menjangkau beragam kebutuhan di seluruh Indonesia, produk *Ready Mix* ditawarkan dengan harga yang kompetitif.

Sasaran Mutu Produksi Beton

Perseroan berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk beton pracetak yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan bersama dengan pelanggan. Oleh karena itu, Perseroan tidak menoleransi adanya produk yang tidak lolos kendali mutu (*reject*). Apabila ditemukan produk *reject*, maka akan ditempatkan dan diidentifikasi di lokasi tertentu sesuai prosedur untuk selanjutnya dimusnahkan.

Adapun sasaran mutu produksi beton berkualitas yang ditetapkan oleh Perseroan meliputi:

- Tingkat cacat produk beton dalam setahun tidak lebih dari 0,5%.
- Tingkat gagal produk beton dalam setahun tidak lebih dari 0,2%.
- Biaya kegagalan internal dan eksternal terhadap nilai produksi dalam setahun tidak boleh lebih dari 0,13%.
- Jumlah keluhan pelanggan berulang dalam setahun tidak lebih dari 5 keluhan.
- Nilai indeks kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index*) berdasarkan hasil survei dalam setahun tidak boleh kurang dari angka 4 atau nilai BAIK dari pelanggan.
- Score QMSL (*Quality Management System Level*) tidak boleh kurang dari 820.
- Score QPASS (*Quality Product Assessment*) tidak boleh kurang dari 95%.

Manajemen Bahan Baku

Perseroan memproduksi beton sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP) yang mengacu pada standar ISO 9001/2015 untuk menjamin kesesuaian mutu dan harga yang optimal.

Ready-Mix Concrete Production Process

Ready Mix Concrete which is part of the Company's business unit. The existence of this business unit is intended to support Precast Concrete products through mobile plant methods such as mobile plant tetrapod or block concrete, so it can be an alternative to the method of a stationary plant that has grown so far. In addition, *Ready Mix Concrete* can support the construction of road or building infrastructure projects and many others.

The Company develops *Ready Mix* products with the support of a professional workforce and equipment production with the latest technology. In order to serve the needs throughout Indonesia, *Ready Mix* products are offered at competitive prices.

Target Quality of Concrete Production

The Company is committed to produce quality precast concrete products in accordance with the specifications and standards set with the customers. Therefore, the Company will not tolerate any rejected products. If a rejected product is found, it will be placed and identified in a particular location according to the procedure and subsequently destroyed.

The quality concrete production targets which set by the Company include:

- The defect rate of concrete products in a year is not more than 0.5%.
- The level of failed concrete products in a year is not more than 0.2%.
- The cost of internal and external failure of the production value in a year should not exceed than 0.13%.
- Number of recurring customer complaints within a year of no more than 5 complaints.
- The value of Customer Satisfaction Index (CSI) based on the survey results within a year should not be less than the number 4 or GOOD value.
- QMSL (*Quality Management System Level*) Score is not less than 820
- QPASS (*Quality Product Assessment*) Score is not less than 95%

Raw Material Management

The Company produces concrete according to the Standard Operating Procedure (SOP) which refers to ISO 9001/2015 standard to ensure optimal quality and price conformity.

Dalam rangka menjamin ketersediaan produk yang bermutu tinggi, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip *prudent* dalam melakukan pemilihan dan pengadaan bahan baku serta elemen pendukung produksi beton. Bagi Perseroan, kebijakan penyediaan stok bahan baku minimum harus tersedia di setiap pabrik yang dimiliki. Penyimpanan bahan baku diatur dalam Standar Operasi Prosedur sesuai dengan tingkat keawetan, keamanan, dan sifat bahan baku tersebut.

Terkait dengan kerja sama dengan vendor, Perseroan memiliki beberapa tahapan penyeleksian yang disertai pertimbangan atas kinerja, mutu, dan konsistensi dalam pengiriman bahan baku ke pabrik Perseroan. Selama ini Perseroan tidak tergantung pada satu pemasok tertentu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku. Jika Perseroan membutuhkan bahan baku yang dapat dipenuhi oleh WIKA Group, maka kebutuhan tersebut akan dipenuhi dari WIKA Group dengan memperhatikan kewajaran transaksi.

Tabel di bawah ini memuat persyaratan teknis bahan baku utama yang digunakan Perseroan dalam proses produksi:

In order to ensure the availability of high-quality products, the Company has always applied prudent principles in the selection and procurement of raw materials and supporting elements of concrete production. For the Company, the policy of providing minimum raw material stock must be available in every factory owned. Storage of raw materials is set in Standard Operating Procedures in accordance with the level of durability, safety, and nature of the raw materials.

In terms of cooperation with vendors, the Company has several stages of selection accompanied by consideration of performance, quality, and consistency in the delivery of raw materials to the Company's factory. So far, the Company does not depend on one particular supplier in meeting the needs of raw materials. If the Company's required raw materials can be fulfilled by WIKA Group, then the requirement will be fulfilled by taking into account the fairness of the transaction.

The table below contains the main technical requirements of raw materials used by the Company in the production process:

Hal / Subject	Referensi / Reference	Deskripsi / Description	Spesifikasi / Specification
Aggregate	SNI 8321:2016	Standard Specification for Concrete Aggregates	-
Cement	SNI 2049:2015 SNI 7064:2014	Portland Cement Portland Cement Composite	Standard Product Type I Special Order: Type II or V
Admixture	ASTM C494 / C494M-99a	Standard Specification for Chemical Admixture for Concrete	Type F: High Range Water Reducing Admixture
Concrete	SNI 2834:2000 SNI 2493:2011	Concrete Mix Design Making and Curing Concrete Sample	-
PC Strand	ASTMA 416/A 416M-99 SNI 1154:2016	Standard Specification for Steel Strand Uncoated Seven-Wire for Prestressed Concrete	KBjP-P7 RB
PC Wire	JIS G 3536:2014 SNI 1155:2011	Uncoated Stress-Relieved Steel Wires and Strands for Prestressed Concrete	SWPD I (deformed wire type) KBjP-N
PC Bar	JIS G 3137:2008 SNI 7701:2016	Small Size-Deformed Steel Bars for Prestressed Concrete	Grade D - class I - SBPD 1275/1420 KBjP-Q NI
Rebar	SNI 2052:2017	Reinforcement Steel for Concrete	Steel class: BjTS 420 A/B (deformed) Steel class: BjTP 280 (round)
Spiral Wire	JIS G 3532:2011	Low Carbon Steel Wires	SWM-P (round type coldreduced steel wire for the reinforcement of concrete and the manufacture of welded fabric)
Joint Plate	JIS G 3101:2004	Rolled Steels for General Structure	SS400 (tensile strength 400 N/mm ²) Applicable steel product for steel plates and sheets, steel strip in coil, sections, flats and bars
Welding	ANSI/AWS D1.1:2015	Structural Welding Code Steel	AW A5.1/e6013 nikko steel rb 26/rd 260, lion 26, or equivalent

Di tahun 2020, berdasarkan hasil audit TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang dilakukan oleh pihak ketiga, untuk *Break Water Concrete Product* mencapai 94,81%, *Hollow Core Slab, L-shape, Flat Concrete Sheet Pile, PC Wall, dan PC Spun Square Pile* berada di atas 80%, sedangkan untuk produk lainnya rata-rata di atas 70%.

In 2020, based on the result of audit of TKDN (Local Content Level) carried out by a third party, the Company's Break Water Concrete Product reached 94.81%, Hollow Core Slab, L-shape, Flat Concrete Sheet Pile, PC Wall, and PC Spun Square Pile were above 80%, and other products were at 70% in average.

Kapasitas dan Perkembangan Produksi Segmen Usaha Beton

Production Capacity and Development of Concrete Business Segment

Kapasitas Produksi Segmen Beton 2016 - 2020 (dalam satuan ton) / Production Capacity of Concrete Segment in 2016-2020 (in tonnage)

Kapasitas Produksi / Production Capacity	2020	2019	2018	2017	2016
Beton Pracetak / Precast Concrete	4.422.500	4.051.000	3.644.000	3.065.000	2.540.000
Beton Ready Mix / Ready-Mix Concrete	3.108.674	2.791.874	2.029.301	-	-
Jumlah / Total	7.531.174	6.842.874	5.673.301	3.065.000	2.540.000

Di tahun 2020, Segmen Beton mencatatkan jumlah produksi sebesar 7.531.174 ton, naik 688.300 ton atau 10,06% dibandingkan tahun 2019 sebesar 6.842.874 ton. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan produksi Beton Pracetak sebesar 371.500 ton atau 9,17% dan peningkatan produksi Beton Ready Mix sebesar 316.800 ton atau 11,35%.

In 2020, the Concrete Segment recorded total production of 7,531,174 tons, an increase of 688,300 tons or 10.06% from 6,842,874 tons recorded in 2019. This increase came from an increase in Precast Concrete production by 371,500 tons or 9.17% and in Ready-Mix Concrete production by 316,800 tons or 11.35%.

Dari segi komposisi, produksi Segmen Beton pada tahun 2020 didominasi oleh Beton Pracetak dengan kontribusi sebesar 58,72%, sedangkan Beton Ready Mix memberikan kontribusi sebesar 41,28%.

In terms of composition, the production of the Concrete Segment in 2020 was dominated by Precast Concrete with a contribution of 58.72%, while Ready-Mix Concrete contributed 41.28%.

Kapasitas produksi Beton Pracetak di tahun 2020 tercatat sebesar 4.422.500 ton, naik 371.500 ton atau 9,17% dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.051.000 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Penambahan Jalur 10 PSR, MP Bangkinang, Jalur BJR Khusus HSR di Majalengka & peningkatan produktivitas jalur eksisting

Precast Concrete production capacity in 2020 was recorded at 4,422,500 tons, an increase of 371,500 tons or 9.17% from 4,051,000 tons recorded in 2019. The increase was due to the addition of 10 PSR Lines, MP Bangkinang, BJR Special HSR Lines in Majalengka, as well as an increase in the productivity of existing lines.

Kapasitas produksi Beton readymix di tahun 2020 tercatat sebesar 3.108.674 ton, naik 316.800 ton atau 11,35% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.791.874 ton. Peningkatan tersebut seiring dengan perolehan beberapa proyek portofolio yang produktifitasnya meningkat dan menjadi proyek strategis nasional yaitu proyek Jakarta International Stadium, Proyek High Speed Railway Jakarta-Bandung, Proyek Jalan Tol Pekanbaru – Padang Ruas Bangkinang-Pangkalan.

Readymix production capacity in 2020 was recorded at 3,108,674 tons, an increase of 316,800 tons or 11.35% from 2,791,874 tons recorded in 2019. This increase was in line with the acquisition of several portfolio projects whose productivity had increased and become national strategic projects, namely the Jakarta International Stadium project, the Jakarta-Bandung High Speed Railway Project, the Pekanbaru-Padang Toll Road Project, and the Bangkinang-Pangkalan Toll Road Project.

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kapasitas produksi yang terus meningkat setiap tahunnya dihasilkan oleh proses kegiatan produksi yang dijalankan oleh Perseroan melalui pabrik-pabrik yang berada di 14 lokasi sebagai berikut:

The Company's ability to increase production capacity every year is generated by the process of production activities carried out by the Company through plants located in 14 locations as follows:

1. PPB Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
2. PPB Lampung di Natar, Kabupaten Pesawaran, Lampung;
3. PPB Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan;
4. PPB Bogor di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
5. PPB Karawang, Jawa Barat;
6. PPB Subang, Jawa Barat;
7. PPB Majalengka di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
8. PPB Boyolali di Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
9. PPB Pasuruan I di Kejapanan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
10. PPB Pasuruan II di Kejapanan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;

11. PPB Sulawesi Selatan I di Makassar, Sulawesi Selatan;
12. PPB Sulawesi Selatan II di Makassar, Sulawesi Selatan;
13. PT Wijaya Karya Komponen Beton di Karawang, Jawa Barat;
14. PT Citra Lautan Teduh di Batam

11. PPB South Sulawesi I in Makassar, South Sulawesi;
12. PPB South Sulawesi II in Makassar, South Sulawesi;
13. PT Wijaya Karya Concrete Components in Karawang, West Java;
14. PT Citra Lautan Teduh in Batam

Di tahun 2020, Segmen Beton menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan produktivitas kinerja produksinya, antara lain:

- Menghasilkan produk tiang pancang berwawasan lingkungan (produksi sistem non limbah) dengan cara menyesuaikan waktu dan tahapan *spinning*.
- Melakukan modernisasi *plant* lama secara bertahap.
- Modifikasi cetakan Tiang Pancang Putar untuk meningkatkan produktivitas
- Menjalin kerjasama unit readymix, serta kerja sama *quarry* yang nantinya akan menyediakan raw material sebagai bahan baku utama produksi beton *readymix*.
- Menjajaki kerja sama dengan mitra lokal, sehingga kualitas dan biaya raw material untuk memproduksi beton *readymix* lebih kompetitif dan terjamin.

In 2020, the Concrete Segment implemented various strategic policies to increase its productivity performance, including:

- Manufacturing environmentally-friendly pile products (non-waste production system) by adjusting the time and spinning stages.
- Gradually modernizing the old plant.
- Modifying Spun Pile molds to increase productivity.
- Cooperating with ready-mix unit and quarry which would provide raw materials as the main material for the production of ready-mix concrete.
- Exploring cooperation with local partners, so that the quality and cost of raw materials to produce ready-mix concrete would be more competitive and guaranteed.

Kinerja Pendapatan Segmen Usaha Beton Tahun 2020

Revenues of Concrete Business Segment in 2020

Kinerja Pendapatan Segmen Beton Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Revenues of Concrete Segment in 2019-2020 (in millions of Rupiah)						
Segmen Operasi Beton / Concrete Segment	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)	
	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Nominal	%
Beton / Concrete	4.040.796	84,12%	6.015.554	84,92%	(1.974.758)	-32,83%

Pendapatan Segmen Beton di tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.040,80 miliar, turun Rp1.974,76 miliar atau 32,83% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp6.015,55 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang tertunda.

The revenues of Concrete Segment in 2020 amounted to Rp4,040.80 billion, decreased by Rp1,974.76 billion or 32.83% from Rp6,015.55 billion recorded in 2019. This was due to Covid-19 pandemic, causing infrastructure projects to be postponed.

Kontribusi Pendapatan Segmen Beton terhadap jumlah Pendapatan Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar 84,12%, naik dibandingkan kontribusi Pendapatan pada tahun 2019 sebesar 84,92%.

The contribution of Concrete Segment revenues to the Company's total revenues in 2020 reached 84.12%, an increase compared to that of 2019 recorded at 84.92%.

Kinerja Profitabilitas Segmen Usaha Beton Tahun 2020

Profitability of Concrete Business Segment in 2020

Kinerja Profitabilitas Segmen Beton Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Profitability of Concrete Segment in 2019-2020 (in millions of Rupiah)						
Segmen Operasi Beton / Concrete Segment	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)	
	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Nominal	%
Beton / Concrete	102.080	82,89%	438.302	85,82%	(336.222)	-76,71%

Laba Tahun Berjalan Segmen Beton ditahun 2020 tercatat sebesar Rp102,08 miliar, turun Rp336,22 miliar atau 76,71% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp438,30 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan secara keseluruhan.

Profit for the Year 2020 of Concrete Segment amounted to Rp102.8 billion, decreased by Rp336.22 billion or 76.71% from Rp438.30 billion recorded in 2019. This was due to decline in overall revenues.

Kontribusi Laba Tahun Berjalan Segmen Beton terhadap jumlah Laba Tahun Berjalan Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar 82,89%, turun dibandingkan kontribusi Laba Tahun Berjalan pada tahun 2019 sebesar 85,82%.

The contribution of profit for the year of Concrete Segment to the Company's profit for the year 2020 was recorded at 82.89%, a decrease compared to the contribution in 2019 which reached 85.82%.

Segmen Usaha Quarry

Aspek Produksi Segmen Usaha Quarry Tahun 2020

Proses Produksi Segmen Usaha Quarry

Segmen Usaha Quarry merupakan bagian dari proses produksi beton yang meliputi kegiatan penambangan dan produksi material split, screen, dan sebagainya, yang dilakukan di 3 (tiga) Crushing Plant yang dimiliki Perseroan:

- *Crushing Plant* Bogor,
- *Crushing Plant* Lampung Selatan, dan
- *Crushing Plant* Donggala.

Quarry Business Segment

Production Aspect of Quarry Business Segment in 2020

Production Process of Quarry Business Segment

Quarry Business Segment is part of the Company's concrete production process that consist of mining activities and production of a split, screen, etc, which are done in 3 (three) Crushing Plant owned by the Company:

- *Crushing Plant* Bogor,
- *Crushing Plant* Lampung Selatan, and
- *Crushing Plant* Donggala.

Crushing Plant merupakan lini unit bisnis baru Perseroan di bidang hulu industri Pracetak Beton maupun konstruksi untuk memasok kebutuhan material alam. Produk yang dihasilkan berupa batu mineral alam yang dipecah menjadi batu split (ukuran 1-2 dan 2-3) cm, batu screen, abu batu, dan material untuk kebutuhan pondasi jalan raya seperti agregat (kelas A dan kelas B). *Crushing Plant* Perseroan dapat menghasilkan produk yang kubikal dan seragam.

Crushing Plant is a line of the new business unit of the Company in the upstream industry of Precast Concrete and construction for the supply of natural material needs. The produced product in the form of natural mineral rocks that are broken down into a split stone (size 1-2 cm and 2-3 cm), screen stone, stone ash, and material for road foundation needs such as aggregate (class A and class B). The Company's *Crushing Plant* is able to produce the product which is cubical and identical.

Crushing Plant tidak hanya mendukung pasokan material untuk pabrik Perseroan yang telah beroperasi, namun juga pasokan kebutuhan material alam untuk proyek pembangunan infrastruktur. Dengan adanya dukungan tenaga kerja dan penjualan yang profesional, Perseroan juga menambah fasilitas laboratorium agregat dan pelabuhan seperti di *Crushing Plant* Lampung Selatan agar dapat memberikan layanan di berbagai pulau di seluruh Indonesia.

The Crushing Plant is not only to support the material supply to the Company factories operated but also the supply of natural materials for road infrastructure development projects. Supported by professional workforce and sales, the Company also added the aggregate laboratory and port facilities such as *Crushing Plant* South Lampung in order to serve the needs of various islands in Indonesia.

SIKLUS TIME MOTION PROSES PRODUKSI CRUSHING PLANT



Keterangan:

1. *Drilling*: proses pengeboran pada batuan untuk membentuk lubang bahan peledak.
2. *Pengangkutan Bahan Peledak*: proses pengangkutan bahan peledak yang telah ditentukan jumlah dan kebutuhannya, dari gudang penyimpanan menuju lokasi peledakan (*blasting*) sesuai prosedur yang terjamin keamanannya.
3. *Perakitan Rangkaian Bahan Peledak*: proses merangkai bahan peledak yang telah dimasukkan ke dalam lubang bor menggunakan kabel dan detonator.
4. *Blasting*: proses peledakan batuan dengan rangkaian bahan peledak pada area yang telah ditentukan untuk memecah dan mengurai batuan berukuran masif menjadi *raw material* berukuran lebih kecil.
5. *Loading*: proses pengangkutan *raw material* hasil *blasting* dengan menggunakan excavator ke dalam kendaraan angkut (*dumptruck*).
6. *Hauling*: proses pengangkutan *raw material* dengan menggunakan kendaraan angkut (*dumptruck*) dari lokasi loading menuju lokasi *crusher*.
7. *Loading Hopper*: proses penumpukan *raw material* ke dalam hopper untuk persiapan *crushing* material.

Description:

1. *Drilling*: the process of drilling the rock to form an explosive hole.
2. *Transport of Explosives*: the process of transporting explosives whose quantity and needs have been determined, from the storage warehouse to the location of the blasting according to procedures with guaranteed safety.
3. *Explosives Assembly*: the process of assembling the explosives that have been inserted into the borehole using a cable and a detonator.
4. *Blasting*: the process of blasting rocks with a series of explosives in a predetermined area to break down massive-sized rocks into smaller raw materials.
5. *Loading*: the process of transporting the blasted raw materials using an excavator into a dumptruck.
6. *Hauling*: the process of transporting raw materials using a dumptruck from the loading location to the crusher location.
7. *Loading Hopper*: the process of stacking raw materials into the hopper for the preparation of crushing material.

8. Proses *Primary Jaw Crusher*: proses *crushing material* pertama kali menggunakan *primary jaw crusher*. Proses ini menghasilkan produk gudang batu dan sirdam.
9. Proses *Secondary Cone Crusher*: proses *crushing material* dari produk gudang batu.
10. Proses *Tertiary Cone Crusher*: proses *crushing material* dari produk *secondary cone crusher*. Proses ini menghasilkan produk *split, screening* dan abubatu.

8. Primary Jaw Crusher Process: the process of crushing material for the first time using the primary jaw crusher. This process produces stone warehouse and sirdam products.
9. Secondary Cone Crusher Process: the process of crushing material from stone warehouse products.
10. Tertiary Cone Crusher Process: the process of crushing material from secondary cone crusher products. This process results in split, screening, and stone products.

Kapasitas dan Perkembangan Produksi Segmen Usaha Quarry

Production Capacity and Development of Quarry Business Segment

Kapasitas Produksi Segmen Quarry 2016 - 2020 (dalam satuan m3) / Production Capacity of Quarry Segment in 2019-2020 (in m3)					
Kapasitas Produksi / Production Capacity	2020	2019	2018	2017	2016
Segmen Quarry / Quarry Segment	1.259.429	962.457	626.150	552.606	274.653

Di tahun 2020, Segmen *Quarry* mencatatkan jumlah produksi sebesar 1.259.429 m³, naik 296.972 m³ atau 30,86% dibandingkan tahun 2019 sebesar 962.457 m³. Secara keseluruhan, sejak tahun 2016 kapasitas produksi Segmen *Quarry* mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh investasi dan kerja sama dalam Segmen *Quarry*.

In 2020, the Quarry Segment recorded total production of 1,259,429 m³, an increase of 296,972 m³ or 30.86% from 962,457 m³ recorded in 2019. Broadly speaking, the production capacity of Quarry Segment continues to increase since 2016. This was due to proper investment and cooperation in the Quarry Segment.

Di tahun 2020, Segmen *Quarry* menerapkan kebijakan strategis untuk meningkatkan produktivitas kinerja produksinya, yaitu menjalin kerja sama dengan pemilik lahan *Quarry* di Sumedang dan Pasuruan.

In 2020, the Quarry Segment implemented strategic policies to increase its productivity performance by cooperating with Quarry land owners in Sumedang and Pasuruan.

Kinerja Pendapatan Segmen Usaha Quarry Tahun 2020

Revenues of Quarry Business Segment in 2020

Kinerja Pendapatan Segmen Quarry Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Revenues of Quarry Segment in 2019-2020 (in millions of Rupiah)						
Segmen Operasi Quarry / Quarry Segment	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)	
	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Nominal	%
Quarry / Quarry	30.311	0,63%	75.346	1,06%	(45.036)	-59,77%

Pada tahun 2020, Segmen *Quarry* mencatatkan nilai Pendapatan sebesar Rp30,31 miliar, turun Rp45,04 miliar atau 59,77% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp75,35 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh karena penurunan perolehan kontrak terutama terkait jalan tol.

The revenues of Quarry Segment in 2020 amounted to Rp30.31 billion, decreased by Rp45.04 billion or 59.77% from Rp75.35 billion recorded in 2019. This was due to declined book order, mainly related to toll road.

Kontribusi Pendapatan Segmen *Quarry* terhadap jumlah Pendapatan Konsolidasian di tahun 2020 tercatat sebesar 0,63%, turun dibandingkan kontribusi Pendapatan pada tahun 2019 sebesar 1,06%.

The contribution of Quarry Segment revenues to the Company's total Consolidated revenues in 2020 reached 0.63%, a decrease compared to that of 2019 recorded at 1.06%.

Kinerja Profitabilitas Segmen Usaha Quarry Tahun 2020 Profitability of Quarry Business Segment in 2020
Kinerja Profitabilitas Segmen Quarry Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Profitability of Quarry Segment in 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Segmen Operasi Quarry / Quarry Segment	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)	
	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Laba Tahun Berjalan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Profit for the Year	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Laba Tahun Berjalan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Profit for the Year	Nominal	%
Quarry / Quarry	668	0,54%	7.865	1,54%	(7.198)	-91,51%

Pada tahun 2020, Segmen Quarry mencatatkan nilai Laba Tahun Berjalan sebesar Rp668 juta, turun Rp7,20 miliar atau 91,51% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp7,87 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan oleh penurunan pendapatan segmen quarry di tahun 2020. , yang terutama berasal dari penurunan jumlah perolehan kontrak khususnya proyek Jalan Tol.

Kontribusi Laba Tahun Berjalan Segmen Quarry terhadap jumlah Laba Tahun Berjalan Konsolidasian di tahun 2020 tercatat sebesar 0,54%, turun dibandingkan kontribusi Laba Tahun Berjalan pada tahun 2019 sebesar 1,54%.

Segmen Usaha Jasa
Aspek Produksi Segmen Usaha Jasa Tahun 2020
Proses Produksi Segmen Usaha Jasa

Segmen Bisnis Operasi Jasa merupakan salah satu lini inti bisnis EPI (*Engineering, Production & Installation*) perseroan yang memiliki spesialisasi dalam kegiatan instalasi penunjang produk pracetak beton serta proyek pekerjaan sipil.

Pengembangan bisnis perseroan ini menjawab tantangan pasar konstruksi di Indonesia yang menuntut solusi secara integrasi serta kemudahan dan kecepatan bagi pelanggan. hal ini membuat perseroan bertransformasi menjadi korporat yang proaktif untuk memberikan layanan yang terbaik dimulai dari *Engineering, Produksi dan Distribusi* serta Instalasi terpasang juga layanan *aftersales* produk sehingga customer memiliki keyakinan atas jaminan terhadap produk dan jasa korporat.

Unit Jasa Pemancangan

Unit Jasa Pemancangan merupakan unit yang dibentuk untuk menunjang instalasi produk tiang pancang pracetak beton. Unit ini memiliki metode yang diadopsi dari jepang untuk instalasi produk tiang pancang yang ramah lingkungan. ialah Sistem Metode *Innerbore* dan *EASE (Earth Auger Slurry Excavation) Prebore* yang menjadi inovasi andalan serta menjadi perseroan pertama di Indonesia yang memiliki lisensi ini.

Profit for the Year 2020 of Quarry Segment amounted to Rp668 million, decreased by Rp7.20 billion or 91.51% from Rp7.87 billion recorded in 2019. This was in line with declined revenues from quarry segment in 2020 which was caused by decreased book order, particularly on toll road project.

The contribution of profit for the year of Quarry Segment to the Company's profit for the year 2020 was recorded at 0.54%, a decrease compared to the contribution in 2019 which reached 1.54%.

Service Business Segment
Production Aspect of Service Business Segment in 2020
Production Process of Service Business Segment

Service Business Segment is a line of EPI core business (*Engineering, Production & Installation*) of the Company that has specification in supporting concrete installation of precast product and civil work projects.

This Company's business development answers the construction market challenges in Indonesia that requires us to find an integrated, effective and quick solution for the customers. This case boost us transforming into proactive Company to provide the best services of *Engineering, Production, Distribution and Installation* as well as *aftersales* product, thus the customers have confidence in guarantees for the products and services of the Company.

Piling Service Unit

Piling service unit is a unit established to assist the installation of precast pile concrete product. This unit has a method adopted from Japan's installation of environmental-friendly pile products. *Innerbore* and *EASE Prebore* method system becomes advanced innovation and to be a first company whose holds that license.

Metode *Inner Bore System* adalah metode instalasi tiang pancang beton berdiameter besar dengan hanya satu tahapan simultan antara penggalian dan penetrasi tiang pancang (*one step simultaneous*) yang diikuti dengan proses solidifikasi atau pembentukan soket di ujung bawah tiang pancang dengan injeksi material cement milk sehingga didapatkan daya dukung ujung tiang pondasi yang besar.

Sedangkan metode EASE Prebore adalah alternatif pengembangan metode instalasi tiang pancang dengan memanfaatkan alat *Crane Pancang (Driving Rig)* yang sama dengan metode *Inner Bore* namun hanya mengganti *attachment* alat galinya saja. Metode ini secara prinsip merupakan hibrida antara metode perbaikan tanah DCM (*Deep Cement Mixing*) dan pondasi tiang pancang (*Spun Pile*). Dengan metode ini diharapkan daya dukung pondasi tiang pancang menjadi maksimal.

Unit Penunjang Konstruksi (Posttension, Heavy Lifting, SHMS)

Unit Penunjang Konstruksi adalah unit yang memiliki spesialisasi dalam mengaplikasikan sistem prestress pasca-tegang pada struktur pracetak beton maupun struktur bangunan sipil. Selain itu unit ini juga menyediakan jasa pemasangan produk komponen jembatan berupa girder pracetak beton. Dengan personil ahli yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, unit ini telah berpengalaman menyediakan jasa tersebut dengan tepat waktu dan mampu melayani daerah operasi Perseroan di Indonesia.

Pada semester kedua tahun 2020, unit ini mulai memasuki bisnis instalasi monitoring kesehatan struktur atau yang dikenal dengan SHMS (*Structural Health Monitoring System*), yang pada aplikasinya nanti dapat diterapkan pada seluruh struktur bangunan sipil, baik jembatan, terowongan, bendungan dan gedung.

Unit-unit Proyek

Unit-unit Proyek terdiri atas beberapa organisasi yang bertugas dalam cakupan daerah operasi Perseroan untuk menangani proyek bangunan sipil dengan komponen pracetak beton yang memiliki beberapa kompleksitas atau spesialisasi. Unit ini diharapkan menjadi core bisnis yang mampu melayani cakupan seluruh bidang konstruksi meliputi infrastruktur jalan layang dan non-layang, bangunan gedung, dermaga serta tanggul laut maupun industri dan pembangkit.

Kapasitas dan Perkembangan Produksi Segmen Usaha Jasa

Inner Bore Method System is a method of installing large diameter concrete piles with only one simultaneous step between excavation and penetration of piles (*one step simultaneous*) followed by solidification or socket formation process at the lower end of the pile by material injection of cement milk so that have the carrying capacity of an end-large foundation pole.

Whereas the EASE Prebore method is an alternative for the pile installation development method by utilizing the *Crane Piling (Driving Rig)* tool which is as same as the *Inner Bore* method, but only replaces the attachment of the rig tools. This method is principally as a hybrid between DCM (*Deep Cement Mixing*) soil improvement methods and *Spun Pile* foundations. Through this method, it is expected that the carrying capacity of the pile foundation will be optimal.

Construction Support Unit (Post-tension, Heavy Lifting, SHMS)

The Construction Support Unit specializes in applying pre-stress post-tension systems to precast concrete and civil building structures. In addition, this unit provides installation services for bridge component products in the form of precast concrete girders. With expert personnel spread across several major cities in Indonesia, this unit has experience in providing the aforementioned services in a timely manner and is able to serve the Company's operational areas in Indonesia.

In the second semester of 2020, this unit began to enter the business of installing structural health monitoring system (SHMS), which can be applied to all structures of civil construction in the future, including bridges, tunnels, dams, and buildings.

Project Units

The Project Units consist of several organizations that work within the scope of the Company's operating area to handle civil construction projects with precast concrete components having certain complexity of specialization. This unit is expected to become a core business capable of serving the entire construction sector, including elevated and non-elevated road infrastructure, buildings, docks as well as sea and industrial embankments, and power generators.

Production Capacity and Development of Service Business Segment

Kapasitas Produksi Segmen Jasa 2016 - 2020 (dalam satuan proyek) / Production Capacity of Service Segment in 2016-2020 (in project units)					
Kapasitas Produksi / Production Capacity	2020	2019	2018	2017	2016
Pemancangan / Innerbore	17	6	3	3	4
Instalasi / Installation	268	252	239	224	166
Proyek / Project	7	5	4	4	4
Jumlah / Total	292	263	246	231	174

Di tahun 2020, Segmen Jasa mencatatkan jumlah proyek yang dikerjakan sebanyak 292 proyek, naik 29 proyek atau 11,11% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 263 proyek. Peningkatan tersebut merupakan kontribusi dari unit Jasa Pemancangan dan Unit Penunjang Konstruksi.

Di tahun 2020, Segmen Jasa menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan produktivitas kinerja produksinya, antara lain: memperluas lini bisnis dengan menasar proyek-proyek yang berpotensi menerapkan SHMS serta memprioritaskan sasaran proyek dengan sumber dana Swasta daripada proyek dengan sumber dana Pemerintah, sebagai strategi di masa Pandemi Covid-19 mengingat beberapa proyek pemerintah mengalami penundaan pelaksanaan.

In 2020, the Service Segment recorded total projects undertaken of 292 projects, an increase of 29 projects or 11.11% from 263 projects recorded in 2019. This increase was contributed by the Piling Service Unit and Construction Support Unit.

In 2020, the Service Segment implemented strategic policies to increase its productivity performance, among others, by expanding business lines by targeting projects that have the potential to implement SHMS and prioritizing project targets with private funding sources rather than projects with government funding sources, as a strategy during the Covid-19 Pandemic considering that several government projects experienced delays in implementation.

Kinerja Pendapatan Segmen Usaha Jasa Tahun 2020

Revenues of Service Business Segment in 2020

Kinerja Pendapatan Segmen Jasa Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
 Revenues of Service Segment in 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Segmen Operasi Jasa / Service Segment	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)	
	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Nominal	%
Jasa / Services	732.252	15,24%	992.484	14,01%	(260.231)	-26,22%

Pendapatan Segmen Jasa ditahun 2020 tercatat sebesar Rp732,25 miliar, turun Rp260,23 miliar atau 26,22% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp992,48 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan proses pengerjaan proyek jalan tol A.P.Pettarani (yang merupakan proyek utama WILAJA BETON di segmen jasa) sudah memasuki tahap akhir.

The revenues of Service Segment in 2020 amounted to Rp732.25 billion, decreased by Rp260.23 billion or 26.22% from Rp992.48 billion recorded in 2019. This was due to the work of A.P.Pettarani toll road project (which is the main project of WILAJA BETON in service segment) that has entered the final stage.

Kontribusi Pendapatan Segmen Jasa terhadap jumlah Pendapatan Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar 15,24%, naik dibandingkan kontribusi Pendapatan pada tahun 2019 sebesar 14,01%.

The contribution of Service Segment revenues to the Company's total revenues in 2020 reached 15.24%, increased compared to that of 2019 at 14.01%.

Kinerja Profitabilitas Segmen Usaha Jasa Tahun 2020

Profitability of Service Business Segment in 2020

Kinerja Profitabilitas Segmen Jasa Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
 Profitability of Service Segment in 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Segmen Operasi Jasa / Service Segment	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)	
	Jumlah	Kontribusi Terhadap Jumlah Laba Tahun Berjalan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Profit for the Year	Jumlah	Kontribusi Terhadap Jumlah Laba Tahun Berjalan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Profit for the Year	Nominal	%
Jasa / Services	20.399	16,57%	64.544	12,64%	(44.145)	-68,39%

Laba Tahun Berjalan Segmen Jasa ditahun 2020 tercatat sebesar Rp20,40 miliar, turun Rp44,15 miliar atau 68,39% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp64,54 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penundaan beberapa proyek pada akhir tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Kontribusi Laba Tahun Berjalan Segmen Jasa terhadap jumlah Laba Tahun Berjalan Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar 16,57%, naik dibandingkan kontribusi Laba Tahun Berjalan pada tahun 2019 sebesar 12,64%.

Segmen Geografis

Selain pengelompokan berdasarkan 3 (tiga) segmen operasi seperti yang telah diuraikan di atas, Perseroan juga melakukan pengelompokan berdasarkan segmen geografis yang terbagi atas Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa untuk mengukur persebaran penyerapan pasar dan kinerja operasi serta usaha Perseroan.

Tabel berikut menggambarkan komposisi Pendapatan Usaha dan Laba Bersih berdasarkan segmen geografis. Untuk Pendapatan Usaha didominasi dari wilayah Jawa. Sebaliknya, Laba Bersih justru lebih besar diperoleh dari wilayah Luar Jawa, hal ini dikarenakan pangsa pasar di Luar Jawa masih di kuasai oleh Perseroan.

Profit for the Year 2020 of Service Segment amounted to Rp20.40 billion, decreased by Rp44.15 billion or 68.39% from Rp64.54 billion recorded in 2019. This was caused by postponement of several projects at the end of 2020 due to Covid-19 pandemic.

The contribution of profit for the year of Service Segment to the Company's profit for the year 2020 was recorded at 16.57%, an increase compared to the contribution in 2019 which reached 12.64%.

Geographical Segment

In addition to categorization based on 3 (three) operating segments as described above, the Company also conducts groupings based on geographical segments which are divided into Java and Outside Java to measure the distribution of market absorption and operating performance as well as the Company's business.

The following table illustrates the composition of Revenue and Net Profit based on geographical segment. Specifically for Revenue, it is dominated by the Java region. On the other hand, Net Profit is dominated by the Outside Java due to the market share of the Outside Java is still controlled by the Company.

Kinerja Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Revenues and Profitability of Geographical Segment in 2019-2020 (in millions of Rupiah)						
Segmen Geografis / Geographical Segment	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)	
	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Nominal	%
Pendapatan Usaha / Revenues						
Jawa / Java	2.280.794	47,48%	3.918.497	55,32%	(1.637.704)	-41,79%
Luar Jawa / Outside Java	2.522.566	52,52%	3.164.887	44,68%	(642.321)	-20,30%
Jumlah / Total	4.803.359	100,00%	7.083.384	100,00%	(2.280.025)	-32,19%
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year						
Jawa / Java	36.752	29,84%	206.526	40,44%	(169.773)	-82,20%
Luar Jawa / Outside Java	86.395	70,16%	304.186	59,56%	(217.791)	-71,60%
Jumlah / Total	123.147	100,00%	510.712	100,00%	(387.565)	-75,89%

Kinerja Pendapatan Segmen Geografis Tahun 2020

Pada tahun 2020, Segmen Geografis mencatatkan nilai Pendapatan Usaha sebesar Rp4.803,36 miliar, turun Rp2.280,03 miliar atau 32,19% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp7.083,38 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari Jawa dengan penurunan Pendapatan Usaha sebesar Rp1.637,70 miliar atau 41,79% dan diiringi dengan penurunan Pendapatan Usaha dari Luar Jawa sebesar Rp642,32 miliar atau 20,30%.

Revenues of Geographical Segment in 2020

The revenues of Geographical Segment in 2020 amounted to Rp4,803.36 billion, decreased by Rp2,280.03 billion or 32.19% from Rp7,083.38 billion recorded in 2019. This decrease was mainly contributed by Java with a decrease of revenues of Rp1,637.70 billion or 41.79%, followed by Outside Java with a decrease of revenues of Rp642.32 billion or 20.30%.

Pendapatan Segmen Geografis dari Pulau Jawa

Pendapatan Usaha dari Pulau Jawa di tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.280,79 miliar, turun Rp1.637,70 miliar atau 41,79% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.918,50 miliar. Jumlah Pendapatan Usaha dari Pulau Jawa terdiri dari Wilayah Penjualan III – DKI Jakarta, Wilayah Penjualan IV – Jawa Tengah, dan Wilayah Penjualan V – Jawa Timur. Turunnya Pendapatan Segmen Geografis dari Pulau Jawa di tahun 2020 terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan pencapaian kinerja, terutama pada perolehan omzet kontrak baru, penjualan dan laba yang menurun di tahun tersebut. Berikut adalah uraian terkait kinerja Pendapatan Segmen Geografis dari Pulau Jawa di tahun 2020.

Penurunan Pendapatan terbesar berasal dari Wilayah Penjualan III – DKI Jakarta, khususnya pada Penjualan Produk Beton dan Pendapatan Jasa. Di tahun 2020, jumlah Penjualan Produk Beton Wilayah III – DKI Jakarta tercatat sebesar Rp1.273,19 miliar, turun Rp1.026,04 miliar atau 44,63% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.299,23 miliar. Selain itu, Pendapatan Jasa Wilayah III – DKI Jakarta di tahun 2020 tercatat sebesar Rp87,39 miliar, turun Rp65,89 miliar atau 42,98% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp153,28 miliar. Di sisi lain, Wilayah Penjualan III berhasil membukukan Pendapatan Konstruksi untuk Jakarta Internasional Stadium sebesar Rp16,69 miliar di tahun 2020.

Pendapatan Usaha Produk Beton yang berasal dari Wilayah Penjualan IV – Jawa Tengah di tahun 2020 tercatat sebesar Rp385,22 miliar, turun Rp68,40 miliar atau 15,08% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp453,62 miliar. Selain itu, Pendapatan Jasa yang berasal dari Wilayah Penjualan IV – Jawa Tengah juga tercatat menurun menjadi Rp21,90 miliar, turun Rp9,29 miliar atau 29,77% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp31,19 miliar.

Pendapatan Usaha yang berasal dari Wilayah Penjualan V – Jawa Timur di tahun 2020 turut memberikan kontribusi terhadap penurunan Penjualan Segmen Geografis Pulau Jawa. Di tahun 2020, Penjualan Produk Beton Wilayah Penjualan V – Jawa Timur tercatat sebesar Rp390,82 miliar, turun Rp469,64 miliar atau 54,58% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp860,46 miliar. Pendapatan Jasa Wilayah Penjualan V – Jawa Timur di tahun 2020 tercatat sebesar Rp11,81 miliar, turun Rp11,80 miliar atau 49,99% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp23,61 miliar.

Kontribusi nilai Pendapatan Usaha yang berasal dari Pulau Jawa tercatat sebesar 47,48% terhadap jumlah Pendapatan Usaha Perusahaan di tahun 2020, turun dibandingkan kontribusi pada tahun 2019 sebesar 55,32%.

Revenue from Geographic Segment from Java

Revenue from Java in 2020 amounted to Rp2,280.79 billion, down Rp1,637.70 billion or 41.79% compared to that of 2019 at Rp3,918.50 billion. Total Revenues from Java consist of Sales Area III - DKI Jakarta, Sales Area IV - Central Java, and Sales Area V - East Java. The decline in Geographical Segment Revenue from Java in 2020 was mainly due to the Covid-19 pandemic which led to performance achievements, especially in the acquisition of new contract turnover, sales and profits, decreased in that year. The following is a description regarding the performance of Geographical Segment Revenue from Java in 2020.

The largest decrease in revenue came from Sales Area III - DKI Jakarta, particularly in the Sales of Concrete Products and Service Revenues. In 2020, the total sales of Concrete Products Region III - DKI Jakarta amounted to Rp1,273.19 billion, a decrease of Rp1,026.04 billion or 44.63% compared to that of 2019 at Rp2,299.23 billion. In addition, Region III - DKI Jakarta Service Revenues in 2020 were recorded at Rp87.39 billion, a decrease of Rp65.89 billion or 42.98% compared to that of 2019 at Rp153.28 billion. On the other hand, Sales Region III managed to record Construction Revenues for Jakarta International Stadium of Rp16.69 billion in 2020.

Concrete Product Revenues from Sales Region IV - Central Java in 2020 amounted to Rp385.22 billion, decreased by Rp68.40 billion or 15.08% compared to that of 2019 at Rp453.62 billion. In addition, Service Revenues originating from Sales Region IV - Central Java also recorded a decline to Rp21.90 billion, down Rp9.29 billion or 29.77% compared to that of 2019 at Rp31.19 billion.

Revenues from Sales Region V - East Java in 2020 also contributed to the decline in Java Geographical Segment Sales. In 2020, Sales of Concrete Products in Sales Region V - East Java were recorded at Rp390.82 billion, decreased by Rp469.64 billion or 54.58% compared to that of 2019 at Rp860.46 billion. Sales Region V - East Java Service Revenue in 2020 was recorded at Rp11.81 billion, decreased by Rp11.80 billion or 49.99% compared to that of 2019 at Rp23.61 billion.

The contribution of Revenues from Java was recorded at 47.48% to the total Company Revenues in 2020, a decrease compared to the contribution in 2019 at 55.32%.

Pendapatan Segmen Geografis dari Luar Pulau Jawa

Pendapatan Usaha dari Luar Jawa di tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.522,57 miliar, turun Rp642,32 miliar atau 20,30% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.164,89 miliar. Jumlah Pendapatan Usaha dari Luar Pulau Jawa terdiri dari Wilayah Penjualan I – Sumatera Utara, Wilayah Penjualan II – Sumatera Selatan, Wilayah Penjualan VI – Sulawesi Selatan, dan Wilayah Penjualan VII – Kalimantan. Penurunan Pendapatan Segmen Geografis dari Luar Pulau Jawa di tahun 2020 tersebut disebabkan oleh turunnya Penjualan Produk Beton pada Wilayah Penjualan I, II, VI, dan VII, serta diiringi dengan turunnya Pendapatan Jasa pada Wilayah Penjualan II, VII dan berkurangnya Pendapatan Konstruksi pada Wilayah Penjualan VI. Penurunan Pendapatan Usaha yang cukup signifikan di tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan perolehan omzet kontrak baru berkurang. Berikut adalah uraian terkait kinerja Pendapatan Segmen Geografis dari Luar Pulau Jawa di tahun 2020.

Wilayah I – Sumatera Utara mencatatkan Penjualan Produk Beton di tahun 2020 sebesar Rp312,33 miliar, turun Rp405,60 miliar atau 56,50% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp717,93 miliar. Namun di sisi lain, Pendapatan Jasa Wilayah I mencatatkan kenaikan di tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp54,21 miliar, naik Rp42,12 miliar atau 348,18% dibandingkan tahun 2019 sebesar 348,18%.

Wilayah II – Sumatera Selatan mencatatkan Penjualan Produk Beton di tahun 2020 sebesar Rp238,42 miliar, turun Rp102,61 atau 30,09% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp341,03 miliar. Tren penurunan juga ditunjukkan oleh Pendapatan Jasa Wilayah II yang tercatat sebesar Rp11,86 miliar di tahun 2020, turun Rp1,19 miliar atau 9,14% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp13,05 miliar.

Wilayah VI – Sulawesi Selatan mencatatkan Penjualan Produk Beton di tahun 2020 sebesar Rp411,02 miliar, turun Rp66,06 miliar atau 13,85% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp477,08 miliar. Pendapatan Jasa Wilayah VI pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp58,98 miliar, naik Rp38,51 miliar atau 188,10% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp20,47 miliar. Sedangkan Pendapatan Konstruksi Wilayah VI di tahun 2020 tercatat menurun dengan realisasi sebesar Rp620,94 miliar, turun Rp108,62 miliar atau 14,89% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp729,56 miliar.

Wilayah VII – Kalimantan mencatatkan Penjualan Produk Beton di tahun 2020 sebesar Rp243,80 miliar, turun Rp159,79 miliar atau 39,59% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp403,58 miliar. Tren penurunan juga dicatatkan oleh Pendapatan Jasa Wilayah VII yang terealisasi sebesar Rp714 juta, turun Rp6,11 miliar atau 89,54% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp6,82 miliar.

Revenue from Geographic Segment from Non-Java

Revenues from Non-Java in 2020 amounted to Rp2,522.57 billion, decreased by Rp642.32 billion or 20.30% compared to that of 2019 at Rp3,164.89 billion. The total revenue from non-Java consists of Sales Area I - North Sumatra, Sales Area II - South Sumatra, Sales Area VI - South Sulawesi, and Sales Area VII - Kalimantan. The decrease in Geographical Segment Revenue from Non-Java Island in 2020 was due to the decrease in Sales of Concrete Products in Sales Regions I, II, VI, and VII, and was accompanied by a decrease in Service Revenues in Sales Areas II, VII and a decrease in Construction Revenues in Sales Region VI.. The significant decrease in Revenue in 2020 was the impact of the Covid-19 pandemic which has caused the acquisition of new contract turnover to decrease. The following is a description of the performance of Geographical Segment Revenue from Non-Java in 2020.

Region I - North Sumatra recorded Concrete Product Sales in 2020 of Rp312.33 billion, decreased by Rp405.60 billion or 56.50% compared to that of 2019 at Rp717.93 billion. On the other hand, Region I Service Revenues recorded an increase in 2020 with the realization of Rp54.21 billion, an increase of Rp42.12 billion or 348.18% compared to that of 2019 at 348.18%.

Region II - South Sumatra recorded Concrete Product Sales in 2020 of Rp238.42 billion, decreased by Rp102.61 billion or 30.09% compared to that of 2019 at Rp341.03 billion. The downward trend is also shown by Region II Service Revenues which were recorded at Rp11.86 billion in 2020, down by Rp1.19 billion or 9.14% compared to that of 2019 at Rp13.05 billion.

Region VI - South Sulawesi recorded Concrete Product Sales in 2020 of Rp411.02 billion, decreased by Rp66.06 billion or 13.85% compared to that of 2019 at Rp477.08 billion. Region VI Service Revenue in 2020 was recorded at Rp58.98 billion, an increase of Rp38.51 billion or 188.10% compared to that of 2019 at Rp20.47 billion. Meanwhile, Region VI Construction Revenue in 2020 was realized at Rp620.94 billion, a decrease of Rp108.62 billion or 14.89% compared to that of 2019 at Rp729.56 billion.

Region VII - Kalimantan recorded Concrete Product Sales in 2020 of Rp243.80 billion, decreased by Rp159.79 billion or 39.59% compared to that of 2019 at Rp403.58 billion. The downward trend was also recorded by Region VII Service Revenue which was realized at Rp714 million, down Rp6.11 billion or 89.54% compared to that of 2019 at Rp6.82 billion.

Kontribusi nilai Pendapatan Usaha yang berasal dari Luar Jawa tercatat sebesar 52,52% terhadap jumlah Pendapatan Usaha Perusahaan di tahun 2020, naik dibandingkan kontribusi pada tahun 2019 sebesar 44,68%.

Kinerja Profitabilitas Segmen Geografis Tahun 2020

Pada tahun 2020, Segmen Geografis mencatatkan nilai Laba Tahun Berjalan sebesar Rp123,15 miliar, turun Rp387,57 miliar atau 75,89% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp510,71 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari Luar Jawa dengan penurunan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp217,79 miliar atau 71,60% dan diiringi dengan penurunan Laba Tahun Berjalan dari Pulau Jawa sebesar Rp169,77 miliar atau 82,20%.

Profitabilitas Segmen Geografis dari Pulau Jawa

Labanya Tahun Berjalan Pulau Jawa di tahun 2020 tercatat sebesar Rp36,75 miliar, turun Rp169,77 miliar atau 82,20% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp206,53 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pada Penjualan Produk Beton dan Pendapatan Jasa di tahun 2020 yang merupakan dampak negatif dari pandemi Covid-19. Kontribusi nilai Laba Tahun Berjalan yang berasal dari Pulau Jawa tercatat sebesar 29,84% terhadap jumlah Laba Tahun Berjalan Perusahaan di tahun 2020 turun dibandingkan kontribusi pada tahun 2019 sebesar 40,44%.

Profitabilitas Segmen Geografis dari Luar Pulau Jawa

Labanya Tahun Berjalan Luar Jawa tahun 2020 tercatat sebesar Rp86,40 miliar, turun Rp217,79 miliar atau 71,60% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp304,19 miliar. Penurunan tersebut berasal dari penurunan Penjualan Produk Beton, Pendapatan Jasa, dan Pendapatan Konstruksi pada Wilayah I, II, VI dan VII yang disebabkan oleh dampak negatif dari pandemi Covid-19. Kontribusi nilai Laba Tahun Berjalan yang berasal dari Luar Jawa tercatat sebesar 70,16% terhadap jumlah Laba Tahun Berjalan Perusahaan di tahun 2020 naik dibandingkan kontribusi pada tahun 2019 sebesar 59,56%.

TINJAUAN KEUANGAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai kinerja keuangan disusun berdasarkan data-data keuangan yang disajikan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia. Pembahasan dan analisis berikut mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (*a member of the RSM Network*) dalam laporannya tertanggal 18 Februari 2021 dengan opini bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The contribution of revenues from Outside Java to the Company's total revenues in 2020 reached 52.52%, an increase compared to that of 2019 recorded at 44.68%.

Profitability of Geographical Segment in 2020

Profit for the Year 2020 of Geographical Segment amounted to Rp123.15 billion, decreased by Rp387.57 billion or 75.89% from Rp510.71 billion recorded in 2019. This decrease was mainly contributed by Outside Java which recorded Rp217.79 billion decrease or 71.60% in profit for the year, followed by Java which recorded Rp169.77 billion decrease or 82.20%.

Profitability of Geographic Segment from Java

Profit for the Year of Java in 2020 amounted to Rp36.75 billion, decreased by Rp169.77 billion or 82.20% compared to that of 2019 at Rp206.53 billion. The decline was due to a decline in Concrete Product Sales and Service Revenue in 2020 which was the negative impact of the Covid-19 pandemic. The contribution of the Profit for the Year from Java was recorded at 29.84% of the Company's total Profit for the Year in 2020, a decrease compared to the contribution in 2019 of 40.44%.

Profitability of Geographical Segments from Non-Java

Profit for the Year of Non-Java in 2020 was recorded at Rp86.40 billion, a decrease of Rp217.79 billion or 71.60% compared to that of 2019 at Rp304.19 billion. The decline came from a decrease in Concrete Product Sales, Service Revenue, and Construction Revenue in Region I, II, VI and VII due to the Covid-19 pandemic. The contribution to the value of Profit for the Year from Non-Java was recorded at 70.16% of the Company's total Profit for the Year in 2020, an increase compared to the contribution in 2019 of 59.56%.

FINANCIAL OVERVIEW

The Management Discussion and Analysis on financial performance are prepared based on the financial data presented in accordance with the provisions of the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"). The following discussion and analysis refer to the Company's Financial Statements for the years ended on December 31, 2019 and 2020, which have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (*a member of the RSM Network*), with an opinion that the Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Wijaya Karya Beton Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards in their report dated February 18, 2021.

Bahasan kinerja keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk dan Perusahaan anaknya disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Discussion on the financial performance of PT Wijaya Karya Beton Tbk and its subsidiaries is submitted by taking into account the explanation on Notes to the Consolidated Financial Statements, which are an integral part of this Annual Report.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Consolidated Statements of Financial Position as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Aset / Assets	8.509.017	10.337.895	(1.828.878)	-17,69%
Aset Lancar / Current Assets	5.248.208	7.168.913	(1.920.704)	-26,79%
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	3.260.809	3.168.983	91.826	2,90%
Liabilitas / Liabilities	5.118.444	6.829.449	(1.711.005)	-25,05%
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	4.706.621	6.195.055	(1.488.434)	-24,03%
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	411.824	634.394	(222.570)	-35,08%
Ekuitas / Equity	3.390.573	3.508.446	(117.873)	-3,36%

Sampai dengan akhir tahun 2020, Perseroan mencatatkan penurunan Aset sebesar Rp1.828,88 miliar atau 17,69% menjadi Rp8.509,02 miliar. Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5.118,44 miliar, turun Rp1.711,01 miliar atau 25,05% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp6.829,45 miliar. Perubahan pada nilai Aset dan Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 tersebut menyebabkan nilai Ekuitas menurun sebesar Rp117,87 miliar atau 3,36% menjadi Rp3.390,57 miliar di akhir tahun 2020 bila dibandingkan dengan Rp3.508,45 miliar di tahun 2019.

ASET

Pada akhir tahun 2020, jumlah Aset Konsolidasian Perseroan tercatat sebesar Rp8.509,02 miliar. Nilai jumlah Aset ini menurun Rp1.828,88 miliar atau 17,69% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp10.337,90 miliar. Penurunan Aset tersebut terutama berasal dari berkurangnya jumlah Aset Lancar yang mencapai Rp1.920,70 miliar atau setara dengan 26,79%. Penurunan Aset Lancar tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah Piutang Usaha dan Pendapatan akan Diterima sampai dengan 31 Desember 2020. Penurunan pada jumlah Aset konsolidasian di tahun 2020 secara keseluruhan tidak memberikan dampak yang signifikan karena diiringi dengan penurunan Liabilitas sebesar 25,05%, sehingga tidak terlalu mempengaruhi likuiditas Perseroan di tahun tersebut.

Up to the end of 2020, the Company recorded a decline in Assets amounting to Rp1,828.88 billion or 17.69% to Rp8,509.02 billion. The Company's Liabilities as of December 31, 2020, were recorded at Rp5,118.44 billion, a decline of Rp1,711.01 billion or 25.05% from Rp6,829.45 billion recorded in 2019. The changes in the Company's Assets and Liabilities as of December 31, 2020 caused the Company's Equity to decline by Rp117.87 billion or 3.36% to Rp3,390.57 billion compared to the Company's Equity recorded on December 31, 2019 at Rp3,508.45 billion.

ASSETS

At the end of 2020, the Company's Consolidated Total Assets reached Rp8,509.02 billion, a decline of Rp1,828.88 billion or 17.69% from Rp10,337.90 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease of Rp1,920.70 billion or 26.79% in Total Current Assets as the result of a decrease in the Company's Trade Receivables and Accrued Income up to December 31, 2020. Overall, the decrease in Consolidated Total Assets in 2020 did not have a significant impact on the Company's liquidity in the current year since it was accompanied by a decrease of 25.05% in the Company's Liabilities.

Aset Lancar
Current Assets
Aset Lancar per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Current Assets as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	1.542.217	1.602.281	(60.064)	-3,75%
Piutang Usaha - Bersih / Trade Receivables - Net	632.738	1.270.049	(637.311)	-50,18%
Piutang Retensi- Bersih / Retention Receivables - Net	85.383	39.484	45.899	116,25%
Pendapatan akan Diterima - Bersih / Accrued Income - Net	1.306.974	1.822.894	(515.920)	-28,30%
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Bersih / Gross Amount Due From Customer - Net	198.459	461.167	(262.708)	-56,97%
Piutang Lain-lain / Other Receivables	18.740	21.459	(2.719)	-12,67%
Pajak Dibayar di Muka Dimuka / Prepaid Taxes	422.765	408.574	14.191	3,47%
Persediaan / Inventories	793.744	1.148.379	(354.635)	-30,88%
Uang Muka / Advances	7.770	38.473	(30.703)	-79,80%
Biaya Dibayar di Muka Dimuka / Prepaid Expenses	176.042	304.145	(128.103)	-42,12%
Proyek dalam Pelaksanaan / Project on Progress	63.376	52.008	11.368	21,86%
Jumlah / Total	5.248.208	7.168.913	(1.920.704)	-26,79%

Per 31 Desember 2020, Perseroan berhasil mencatatkan jumlah Aset Lancar sebesar Rp5.248,21 miliar, turun Rp1.920,70 miliar atau 26,79% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.168,91 miliar. Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha – Bersih, Tagihan Bruto Pemberi Kerja – Bersih, Persediaan, Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka. Sumber penurunan terbesar Aset Lancar berasal dari Piutang Usaha – Bersih yang berkurang sebesar Rp637,31 miliar atau 50,18% dan diikuti dengan penurunan Persediaan sebesar Rp354,64 miliar atau 30,88%. Penurunan Aset Lancar di tahun 2020 memberikan dampak penurunan terhadap kekuatan Likuiditas Perseroan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang kondusif di tahun tersebut. Namun di sisi lain, Perseroan juga telah mengimbangi penurunan Aset Lancar tersebut dengan penurunan Liabilitas Jangka Pendek yang cukup dalam sehingga hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

The Company's Total Current Assets as of December 31, 2020, amounted to Rp5,240.21 billion, declined by Rp1,920.70 billion or 26.79% from Rp7,168.91 billion recorded in 2019. This was due to the decline in Cash and Cash Equivalents, Trade Receivables - Net, Gross Amount Due From Customer - Net, Inventories, Advances, and Prepaid Expenses. The largest contributor to the decline in Current Assets was the post of Trade Receivables - Net which recorded a decline of Rp637.31 billion or 50.18%. This was followed by the post of Inventories which recorded a decline of Rp354.64 billion or 30.88%. The decline in Current Assets in 2020 contributed to a decline in the Company's liquidity due to unfavorable economic conditions in the current year. On the other hand, the Company managed to offset the decrease in Current Assets with a relatively steep decline in Current Liabilities; hence, it would not have a significant impact on the Company's business continuity in the future.

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
 Cash and Cash Equivalents as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Kas / Cash	938	531	407	76,80%
Bank	1.009.279	606.748	402.531	66,34%
Deposito / Deposit	532.000	995.002	(463.002)	-46,53%
Jumlah / Total	1.542.217	1.602.281	(60.064)	-3,75%

Kas dan Setara Kas sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.542,22 miliar, turun Rp60,06 miliar atau 3,75% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.602,28 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya nilai Deposito sebesar Rp463,00 miliar atau 46,53% yang berasal dari Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga. Penempatan Deposito berupa *Deposito On Call* (DOC) dan Deposito Berjangka sampai dengan 1 bulan, dengan tingkat bunga 2,25%-7,50% dan 6,50%-7,50% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Dampak pada penurunan current ratio/rasio lancar Perseroan.

Up to December 31, 2020, the Company's Cash and Cash Equivalents were recorded at Rp1,542.22 billion, decreased by Rp60.06 billion or 3.75% from Rp1,602.28 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in Deposit value amounting to Rp463.00 billion or 46.53% obtained from both the Related Parties and Third Parties. Placement of deposits in the form of Deposit On Call (DOC) and Time Deposits up to 1 month had an interest rate of 2.25% to 7.50% and 6.50% to 7.50% for the year ended on December 31, 2020 and 2019, respectively. The impact decreased the Company's current ratio.

Piutang Usaha - Bersih

Trade Receivables - Net

Piutang Usaha - Bersih per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Trade Receivables - Net as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Piutang Usaha Pihak Berelasi / Trade Receivables Related Parties	445.471	740.071	(294.600)	-39,81%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	(32.413)	(1.466)	(30.947)	2111,09%
Piutang Usaha Pihak Berelasi - Bersih / Trade Receivables Related Parties - Net	413.058	738.605	(325.547)	-44,08%
Piutang Usaha Pihak Ketiga / Trade Receivables Third Parties	371.148	561.864	(190.716)	-33,94%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	(151.468)	(30.420)	(121.048)	397,93%
Piutang Usaha Pihak Ketiga - Bersih / Trade Receivables Third Parties - Net	219.680	531.444	(311.764)	-58,66%
Jumlah / Total	632.738	1.270.049	(637.311)	-50,18%

Piutang Usaha - Bersih sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp632,74 miliar, turun Rp637,31 miliar atau 50,18% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.270,05 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya Piutang Usaha dari Pihak Berelasi – Bersih sebesar Rp325,55 miliar atau 44,08% dan penurunan Piutang Usaha Pihak Ketiga – Bersih sebesar Rp 311,76 miliar atau 58,66%. Penurunan nilai Piutang Usaha – Bersih yang cukup signifikan tersebut memberikan dampak penurunan pada penerimaan kas dari aktivitas operasional di masa yang akan datang.

Up to December 31, 2020, the Company's Trade Receivables - Net were recorded at Rp632.74 billion, decreased by Rp637.31 billion or 50.18% from Rp1,270.05 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in Trade Receivables Related Parties - Net amounting to Rp325.55 billion or 44.08% and a decrease in Trade Receivables Third Parties - Net amounting to Rp311.76 billion or 58.66%. Such relatively significant decrease would contribute to a decrease in cash received from operating activities in the future.

Perseroan mencatatkan Piutang Usaha Pihak Berelasi – Bersih sebesar Rp413,06 miliar per 31 Desember 2020, turun Rp325,55 miliar atau 44,08% bila dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp738,61 miliar. Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya Piutang Usaha Pihak Berelasi dari PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Waskita – Gorip KSO, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Haka Aston, High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) – Team WIKA, Penta Ocean Toa Rinkai PP, WIKA Consortium dan lain-lain dibawah Rp5 miliar. Di samping itu, Perseroan juga menambahkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp30,95 miliar atau 2111,09% bila dibandingkan dengan akhir tahun 2019. Manajemen berkeyakinan bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

The Company recorded Trade Receivables Related Parties - Net amounting to Rp413.06 billion as of December 31, 2020, a decrease of Rp325.55 billion or 44.08% from Rp738.61 billion recorded in 2019. This was attributable to a decrease in Trade Receivables from Related Parties: PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Waskita – Gorip KSO, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Haka Aston, High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) – Team WIKA, Penta Ocean Toa Rinkai PP, WIKA Consortium, and others below Rp5 billion. In addition, the Company added an Allowance for Impairment Losses amounting to Rp30.95 billion or 2,111.09% compared to the value recorded at the end of 2019. The Management believes that the Allowance for Impairment Losses has been adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables.

Perseroan mencatatkan Piutang Usaha Pihak Ketiga – Bersih sebesar Rp219,68 miliar per 31 Desember 2020, turun Rp311,76 miliar atau 58,66% bila dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp531,44 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya Piutang Usaha Pihak Ketiga dari Prasasti – Tiara – Ayunda, KSO, Maskar Abadi – Tanjung Raya, KSO, PT Dharma Leksana, PT Pandji Pratama Indonesia, dan lain-lain di bawah Rp 5 miliar. Selain itu, Perseroan juga secara signifikan meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp121,05 miliar atau 397,93% sehingga menjadi Rp151,47 miliar di akhir tahun 2020. Manajemen berkeyakinan bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. Peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Usaha dari Pihak Ketiga yang cukup besar di tahun 2020 tersebut disebabkan oleh penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

The Company recorded Trade Receivables Third Parties - Net amounting to Rp219.68 billion as of December 31, 2020, a decrease of Rp311.76 billion or 58.66% from Rp531.44 billion recorded in 2019. This was attributable to a decrease in Trade Receivables from Third Parties: Prasasti – Tiara – Ayunda, KSO, Maskar Abadi – Tanjung Raya, KSO, PT Dharma Leksana, PT Pandji Pratama Indonesia, and others below Rp5 billion. In addition, the Company substantially increased its Allowance for Impairment Losses amounting to Rp121.05 billion or 397.93%, so that the value was at Rp151.47 billion at the end of 2020. The Management believes that the Allowance for Impairment Losses has been adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. This relatively significant increase in Allowance for Impairment Losses on Trade Receivable from Third Parties in 2020 was due to the PSAK 71: Financial Instrument which was effectively implemented on January 1, 2020.

Piutang Retensi - Bersih

Retention Receivables - Net

Piutang Retensi - Bersih per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Retention Receivables - Net as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Piutang Retensi Pihak Berelasi / Retention Receivables Related Parties	3.834	-	3.834	-
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	(4)	-	(4)	-
Piutang Retensi Pihak Berelasi - Bersih / Retention Receivables Related Parties - Net	3.830	-	3.830	-
Piutang Retensi Pihak Ketiga / Retention Receivables Third Parties	88.807	39.484	49.323	124,92%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	(7.254)	-	(7.254)	-
Piutang Retensi Pihak Ketiga - Bersih / Retention Receivables Third Parties - Net	81.553	39.484	42.069	106,55%
Jumlah / Total	85.383	39.484	45.899	116,25%

Piutang Retensi - Bersih sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp85,38 miliar, naik Rp45,90 miliar atau 116,25% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp39,48 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada Piutang Retensi Pihak Ketiga – Bersih yang naik sebesar Rp42,07 miliar atau 106,55% di tahun 2020 yang berasal dari PT Bosowa Marga Nusantara dan MITSUI Eng & Shipbuilding Co. Ltd. Manajemen menilai bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk Piutang Retensi sebesar Rp7,26 miliar telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang retensi.

Up to December 31, 2020, the Company's Retention Receivables - Net were recorded at Rp85.38 billion, increased by Rp45.90 billion or 116.25 from Rp39.48 billion recorded in 2019. This was mainly due to an increase in Retention Receivables Third Parties - Net amounting to Rp42.07 billion or 106.55% in 2020 from PT Bosowa Marga Nusantara and MITSUI Eng & Shipbuilding Co. Ltd. The Management assesses that the Allowance for Impairment Losses of Retention Receivables amounting to Rp7.26 billion has been adequate to cover possible losses on uncollectible retention receivables.

Pendapatan akan Diterima – Bersih

Accrued Income - Net

Pendapatan akan Diterima - Bersih per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Accrued Income – Net as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pihak Berelasi / Related Parties	1.026.502	1.544.882	(518.380)	-33,55%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	(4.908)	-	(4.908)	-
Pihak Berelasi - Bersih / Related Parties - Net	1.021.594	1.544.882	(523.288)	-33,87%
Pihak Ketiga / Third Parties	290.138	278.012	12.126	4,36%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	(4.758)	-	(4.758)	-
Pihak Ketiga - Bersih / Third Parties - Net	285.379	278.012	7.367	2,65%
Jumlah / Total	1.306.974	1.822.894	(515.920)	-28,30%

Pendapatan akan Diterima – Bersih sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.306,97 miliar, turun Rp515,92 miliar atau 28,30% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.822,89 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan akan Diterima dari Pihak Berelasi yang turun sebesar Rp518,38 miliar atau 33,55% yang berasal dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan lain-lain di bawah Rp5 miliar. Disamping itu, Perseroan juga mencatatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Pendapatan akan Diterima dari Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga sebesar Rp9,67 miliar di tahun 2020 dan nihil di tahun 2019. Berdasarkan hasil penelaahan keadaan Pendapatan akan Diterima masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, Manajemen berkeyakinan bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya Piutang Usaha. Berkurangnya Pendapatan akan Diterima pada tahun buku 2020 memberikan dampak positif terhadap penambahan arus kas dari aktivitas operasional.

Up to December 31, 2020, the Company's Accrued Income - Net was recorded at Rp1,306.97 billion, decreased by Rp515.92 billion or 28.30% from Rp1,822.89 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in Accrued Income from Related Parties amounting to Rp518.38 billion or 33.55% obtained from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, and others below Rp5 billion. In addition, the Company recorded Allowance for Impairment Losses for Accrued Income Related Parties and Third Parties amounting to Rp9.67 billion in 2020 and zero in 2019. Based on a review of individual achievement of Accrued Income at the end of reporting period, the Management believes that the Allowance for Impairment Losses has been adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. The decrease in Accrued Income in 2020 fiscal year impacted positively on the increase in cash flows from operating activities.

Tagihan Bruto Pemberi Kerja – Bersih

Gross Amount Due From Customer - Net

Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Bersih per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Gross Amount Due From Customer – Net as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Biaya Konstruksi Kumulatif / Accumulated Construction Costs	1.589.158	916.193	672.965	73,45%
Laba yang Diakui Kumulatif / Recognized Accumulated Profit	243.493	139.290	104.203	74,81%
Sub Jumlah / Sub-Total	1.832.651	1.055.483	777.168	73,63%
Penagihan / Progress Billing	(1.632.338)	(594.316)	(1.038.022)	174,66%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	(1.854)	-	(1.854)	-
Jumlah / Total	198.459	461.167	(262.708)	-56,97%

Tagihan Bruto Pemberi Kerja – Bersih sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp198,46 miliar, turun Rp262,71 miliar atau 56,97% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp461,17 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai Penagihan sebesar Rp1.038,02 miliar atau 174,66% sampai dengan akhir tahun 2020. Di samping itu, Manajemen juga mencatatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp1,85 miliar. Penurunan Tagihan Bruto Pemberi Kerja di tahun 2020 memberikan dampak positif pada arus kas dari aktivitas operasional di tahun tersebut.

Up to December 31, 2020, the Company's Gross Amount Due From Customer - Net was recorded at Rp198.46 billion, decreased by Rp262.71 billion or 56.97% from Rp461.17 billion recorded in 2019. This was mainly due to an increase in Progress Billing amounting to Rp1,038.02 billion or 174.66% up to the end of the year. In addition, the Management recorded Allowance for Impairment Losses amounting to Rp1.85 billion. The decrease in Gross Amount Due From Customer in 2020 impacted positively on the cash flows from operating activities in the current year.

Piutang Lain-lain

Other Receivables

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
 Other Receivables as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pihak Berelasi / Related Parties	13.503	15.776	(2.273)	-14,41%
Pihak Ketiga / Third Parties	5.237	5.683	(446)	-7,85%
Jumlah / Total	18.740	21.459	(2.719)	-12,67%

Piutang Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp18,74 miliar, turun Rp2,72 miliar atau 12,67% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp21,46 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi sebesar Rp2,27 miliar atau 14,41% dan dari Pihak Ketiga sebesar Rp446 juta atau 7,85%. Berdasarkan hasil penelaahan keadaan Piutang Lain-lain pada akhir periode pelaporan tahun 2020, Manajemen berkeyakinan tidak ada peningkatan risiko kredit secara signifikan. Penurunan Piutang Lain-lain di tahun 2020 memberikan dampak pada penurunan potensi penerimaan dari transaksi non operasi yang berasal dari WIKA Grup atas sewa kantor dan transaksi lainnya.

Up to December 31, 2020, the Company's Other Receivables were recorded at Rp18.74 billion, decreased by Rp2.72 billion or 12.67% from Rp21.46 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in Other Receivables Related Parties amounting to Rp2.27 billion or 14.41% and Other Receivables Third Parties amounting to Rp446 million or 7.85%. Based on a review of individual achievement of Other Receivables at the end of reporting period, the Management believes that there is no significant increase in credit risk. The decrease in Other Receivables in 2020 impacted on decrease in potential revenue from non-operating transactions from WIKA Group for office leases and other transactions.

Pajak Dibayar di Muka

Prepaid Taxes

Pajak Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
 Prepaid Taxes as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Perusahaan / Company				
PPh 28a / Income Tax Article 28a	38.409	-	38.409	-
PPh Pasal 4(2) / Income Tax Article 4(2)	118	3.410	(3.292)	-96,55%
Pajak Pertambahan Nilai / Value Added Tax	350.525	373.535	(23.010)	-6,16%
Subjumlah / Sub-total	389.052	376.945	12.107	3,21%
Entitas Anak / Subsidiaries				
PPh Pasal 22 / Income Tax Article 22	3.328	1.778	1.549	87,11%
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	5	4	1	26,11%
PPH Pasal 28a / Income Tax Article 28a	5.641	-	5.641	-
Pajak Pertambahan Nilai / Value Added Tax	24.740	29.847	(5.107)	-17,11%
Subjumlah / Sub-total	33.714	31.629	2.085	6,59%
Jumlah / Total	422.766	408.574	14.192	3,47%

Pajak Dibayar di Muka sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp422,77 miliar, naik Rp14,19 miliar atau 3,47% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp408,57 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan Pajak Dibayar di Muka PPh 28a dari Perusahaan Induk sebesar Rp38,41 miliar di tahun 2020. Peningkatan Pajak Dibayar di Muka di tahun 2020 memberikan dampak pada pengurangan pembayaran PPh di tahun 2021 akibat dari kompensasi kerugian fiskal di tahun 2020.

Up to December 31, 2020, the Company's Prepaid Taxes were recorded at Rp422.77 billion, increased by Rp14.19 billion or 3.47% from Rp408.57 billion recorded in 2019. This was mainly due to a recording of Prepaid Taxes of Income Tax Article 28a of Parent Company amounting to Rp38.41 billion in 2020. The increase in Prepaid Taxes in 2020 impacted on decreased income tax payments in 2021 due to the compensation for fiscal losses in 2020.

Persediaan

Inventories

Persediaan per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Inventories as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Persediaan Barang Jadi di Gudang / Finished Goods in Warehouse	493.401	617.143	(123.742)	-20,05%
Persediaan Bahan Baku / Raw Materials	242.700	346.104	(103.404)	-29,88%
Persediaan Barang Jadi di Lapangan / Finished Goods in the Field	30.486	154.135	(123.649)	-80,22%
Persediaan Suku Cadang / Spare Parts Inventory	24.605	26.672	(2.067)	-7,75%
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas / Supplies of Fuel Oil and Lubricant	2.536	3.670	(1.134)	-30,91%
Persediaan Bahan Baku Dalam Pengiriman / Raw Materials on Delivery	17	655	(639)	-97,48%
Jumlah / Total	793.745	1.148.379	(354.634)	-30,88%

Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp793,74 miliar, turun Rp354,64 miliar atau 30,88% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.148,38 miliar. Penurunan Persediaan pada tahun 2020 terjadi pada seluruh komponen, antara lain Persediaan Barang Jadi di Gudang, Persediaan Bahan Baku, Persediaan Barang Jadi di Lapangan, Persediaan Suku Cadang, Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas, dan Persediaan Bahan Baku Dalam Pengiriman. Penurunan Persediaan terbesar berasal dari berkurang Persediaan Barang Jadi di Gudang sebesar Rp123,74 miliar atau 20,05% dan penurunan Persediaan Barang Jadi di Lapangan sebesar Rp123,65 miliar atau 80,22%. Perusahaan tidak mengasuransikan dan tidak melakukan penyisihan penurunan nilai atas persediaan karena berdasarkan sifat produk yang tidak mudah rusak dan tidak mudah hilang sehingga Perseroan tidak akan menanggung biaya atas kerusakan, kehilangan dan penurunan nilai. Berkurangnya jumlah Persediaan merupakan bentuk dari kebijakan Manajemen untuk menyesuaikan produksi dengan penjualan yang tercatat menurun di tahun 2020. Adapun dampak dari penurunan Persediaan di tahun 2020 yaitu dapat menurunkan modal kerja yang digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan operasi.

Up to December 31, 2020, the Company's Inventories were recorded at Rp793.74 billion, decreased by Rp354.64 billion or 30.88% from Rp1,148.38 billion recorded in 2019. All components of Inventories, namely Finished Goods in Warehouse, Raw Materials, Finished Goods in the Field, Spare Parts Inventory, Supplies of Fuel Oil and Lubricant, and Raw Materials on Delivery, experienced a decrease in 2020. The most substantial decrease occurred in the post of Finished Goods in Warehouse at Rp123.74 billion or 20.05%, followed by the post of Finished Goods in the Field at Rp123.65 billion or 80.22%. The Company did not insure and did not provide allowance for impairment on inventories based on the nature of the product that is not easily damaged and lost; hence, the Company believed it will not bear the cost of any damage, loss, and impairment. The reduction in the amount of Inventories is a form of policy of the Management to adjust production with sales that recorded a decline in 2020. The decrease in Inventories in 2020 impacted on decreased working capital used by the Company for operational activities.

Uang Muka

Advances

Uang Muka per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Advances as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pemasok/ Suppliers	3.956	17.499	(13.543)	-77,39%
Persekot Pekerjaan / Advance the work	3.809	4.332	(524)	-12,09%
Subkontraktor / Subcontractors	5	16.641	(16.636)	-99,97%
Jumlah / Total	7.770	38.473	(30.703)	-79,80%

Uang Muka sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp7,77 miliar, turun Rp30,70 miliar atau 79,80% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp38,47 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya Uang Muka kepada Pemasok sebesar Rp13,54 miliar atau 77,39% dan penurunan Uang Muka kepada Subkontraktor sebesar Rp16,64 miliar atau 99,97%. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya pengadaan bahan baku, pelaksanaan pekerjaan distribusi dan pemasangan produk di tahun 2020. Penurunan Uang Muka memberikan dampak pada peningkatan pembayaran dari progress pekerjaan.

Up to December 31, 2020, the Company's Advances were recorded at Rp7.77 billion, decreased by Rp30.70 billion or 79.80% from Rp38.47 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in Advances paid to Suppliers amounting to Rp13.54 billion or 77.39% and a decrease in Advances paid to Subcontractors amounting to Rp16.64 billion or 99.97%, as the result of reduced procurement of raw materials, implementation of distribution work, and product installation in 2020. The decrease in Advances in 2020 impacted on payment from work progress.

Biaya Dibayar Di Muka

Prepaid Expenses

Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Prepaid Expenses as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Biaya Pelaksanaan Proyek / Project Implementation Cost	105.680	184.204	(78.525)	-42,63%
Biaya Produksi / Production Cost	67.082	115.907	(48.826)	-42,12%
Sewa Dibayar di Muka / Prepaid Rent	3.281	4.033	(753)	-18,66%
Jumlah / Total	176.042	304.145	(128.103)	-42,12%

Biaya Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp176,04 miliar, turun Rp128,10 miliar atau 42,12% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp304,15 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Biaya Dibayar di Muka pada Biaya Pelaksanaan Proyek sebesar Rp78,53 miliar atau 42,63% dan Biaya Produksi sebesar Rp48,83 miliar atau 42,12%. Dampak dari penurunan Biaya Dibayar di Muka adalah lebih rendahnya beban dan harga pokok yang akan diakui pada saat pengakuan pendapatan atau pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) telah ditandatangani.

Up to December 31, 2020, the Company's Prepaid Expenses were recorded at Rp176.04 billion, decreased by Rp128.10 billion or 42.12% from Rp304.15 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in Prepaid Expenses for Project Implementation Cost amounting to Rp78.53 billion or 42.63% and for Production Cost amounting to Rp48.83 billion or 42.12%. The decrease in Prepaid Expenses in 2020 impacted on the low amount of expenses or cost of goods sold to be recognized at the time the revenue is recognized or the Handover (BAST) is signed.

Proyek dalam Pelaksanaan

Project in Progress

Proyek dalam Pelaksanaan per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Project in Progress as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pihak Berelasi / Related Parties	19.789	17.675	2.114	11,96%
Pihak Ketiga / Third Parties	43.588	34.333	9.255	26,96%
Jumlah / Total	63.377	52.008	11.369	21,86%

Proyek dalam Pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp63,38 miliar, naik Rp11,37 miliar atau 21,86% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp52,01 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari komponen Pihak Ketiga dengan kenaikan sebesar Rp9,26 miliar atau 26,96% dan Pihak Berelasi sebesar Rp2,11 miliar atau 11,96%. Kenaikan jumlah Proyek dalam Pelaksanaan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja pendapatan yang akan diakui pada masa yang akan datang saat proyek-proyek tersebut telah difinalisasi.

Up to December 31, 2020, the Company's Project in Progress were recorded at Rp63.38 billion, increased by Rp11.37 billion or 21.86% from Rp52.01 billion recorded in 2019. This was mainly due to an increase in Project in Progress of Third Parties amounting to Rp9.26 billion or 26.96% and of Related Parties amounting to Rp2.11 billion or 11.96%. The increase in the number of Project in Progress in 2020 would impact positively on the revenue performance to be recognized in the future when the projects would have been finalized.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Non-Current Assets as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets	26.834	3.911	22.923	586,11%
Investasi Entitas Asosiasi / Investment in Associates	33.391	30.323	3.068	10,12%
Investasi Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures	12.065	21.847	(9.781)	-44,77%
Properti Investasi / Investment Property	81.544	79.408	2.136	2,69%
Aset Hak Guna - Bersih / Right-of-Use Assets - Net	145.329	-	145.329	-
Aset Tetap - Bersih / Fixed Assets - Net	2.952.493	3.012.075	(59.583)	-1,98%
Investasi Jangka Panjang Lainnya / Other Long-Term Investment	9.153	21.419	(12.266)	-57,27%
Jumlah / Total	3.260.809	3.168.983	91.826	2,90%

Per 31 Desember 2020, Perseroan berhasil mencatatkan jumlah Aset Tidak Lancar sebesar Rp3.260,81 miliar, naik Rp91,83 miliar atau 2,90% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.168,98 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan Aset Hak Guna – Bersih sebesar Rp145,33 miliar dan diikuti dengan kenaikan pada Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp22,92 miliar atau 586,11%. Kenaikan Aset Tidak Lancar di tahun 2020 memberikan dampak positif terhadap kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya.

The Company's Total Non-Current Assets as of December 31, 2020, amounted to Rp3,260.81 billion, grew by Rp91.83 billion or 2.90% from Rp3,168.98 billion recorded in 2019. This was mainly due to the recording of Right-of-Use Assets - Net amounting to Rp145.33 billion, followed by an increase in the post of Deferred Tax Assets amounting to Rp22.92 billion or 586.11%. The growth of Non-Current Assets in 2020 contributed positively to the Company's capability to settle all of its liabilities.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp26,83 miliar, naik Rp22,92 miliar atau 586,11% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp3,91 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Dampak Penerapan PSAK 71 sebesar Rp59,17 miliar atas Penyisihan Piutang dan Rugi Fiskal yang Dibebankan ke Laba Rugi sebesar Rp40,96 miliar. Peningkatan Aset Pajak Tangguhan di tahun 2020 memberikan dampak pada peningkatan beban pajak tangguhan dikemudian hari.

Deferred Tax Assets

Up to December 31, 2020, the Company's Deferred Tax Assets were recorded at Rp26.83 billion, increased by Rp22.92 billion or 586.11% from Rp3.91 billion recorded in 2019. This was mainly due to the Impact of Implementation of PSAK 71 amounting to Rp59.17 billion on Allowance for Receivables and Fiscal Loss Charged to Profit or Loss amounting to Rp40.96 billion. The increase in Deferred Tax Assets in 2020 impacted on increase in deferred tax expense in the future.

Investasi Entitas Asosiasi

Investasi Entitas Asosiasi sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp33,39 miliar, naik Rp3,07 miliar atau 10,12% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp30,32 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada nilai Aset Lancar, Aset Tidak Lancar dan Pendapatan terhadap investasi Perseroan pada PT Wijaya Karya Pracetak

Investment in Associates

Up to December 31, 2020, the Company's Investment in Associates was recorded at Rp33.39 billion, increased by Rp3.07 billion or 10.12% from Rp30.32 billion recorded in 2019. This was mainly due to an increase in the values of Current Assets, Non-Current Assets, and Revenues in the Company's investment in PT Wijaya Karya Pracetak Gedung with ownership percentage

Gedung dengan persentase kepemilikan sebesar 49% di tahun 2019 dan 2020. Peningkatan tersebut memberikan dampak positif berupa kenaikan pembayaran imbal hasil dari investasi dari entitas asosiasi tersebut.

of 49% in 2019 and 2020. This increase gave a positive impact in the form of increase in payment of return on investment from the associate entity.

Investasi Ventura Bersama

Investment in Joint Ventures

Investasi Ventura Bersama per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Investment in Joint Ventures as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Wijaya Karya Beton - Semen Indogreen Sentosa KSO	19	3.519	(3.501)	-99,47%
Wijaya Karya Beton - Emrail KSO	12.047	14.471	(2.424)	-16,75%
Wijaya Karya Beton - PT Pandji Pratama Indonesia	-	3.856	(3.856)	-100,00%
Jumlah / Total	12.066	21.846	(9.780)	-44,77%

Investasi Ventura Bersama sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp12,07 miliar, turun Rp9,78 miliar atau 44,77% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp21,85 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh nihilnya saldo Investasi pada Ventura Bersama di akhir tahun 2020 pada Wijaya Karya Beton – PT Pandji Pratama Indonesia untuk Pembangunan Pengaman Pantai Jakarta Tahap 3 Paket 2. Selain itu, nilai Investasi Ventura Bersama pada Wijaya Karya Beton – Semen Indogreen Sentosa KSO untuk produksi Ready Mix Apartemen Podomoro View Cimanggis dan Wijaya Karya Beton – Emrail KSO untuk pembangunan Jakarta Light Rapid Transit Koridor I Kelapa Gading – Velodrome juga mencatatkan penurunan. Penurunan Investasi Ventura Bersama di tahun 2020 memberikan dampak pada penurunan potensi pendapatan dari aktivitas ventura bersama.

Up to December 31, 2020, the Company's Investment in Joint Ventures was recorded at Rp12.07 billion, decreased by Rp9.78 billion or 44.77% from Rp21.85 billion recorded in 2019. This was mainly due to the zero recording of balance on Investment in Joint Venture of Wijaya Karya Beton – PT Pandji Pratama Indonesia at the end of 2020 for the Development of Jakarta Shore Guard Phase 3 Package 2. In addition, there was a decline in the value of Investments in Joint Venture of Wijaya Karya Beton – Semen Indogreen Sentosa KSO for the production of Ready-Mix for Podomoro View Cimanggis Apartment and Joint Venture of Wijaya Karya Beton – Emrail KSO for the Development of Light Rapid Transit Corridor I Kelapa Gading-Velodrome. The decrease in Investment in Joint Ventures in 2020 impacted on decreased revenue from joint ventures.

Properti Investasi

Properti Investasi sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp81,54 miliar, naik Rp2,14 miliar atau 2,69% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp79,41 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan Properti Investasi di tahun 2020 berupa hasil konversi piutang Perseroan di PT Asria Jaya dengan Tanah Bangunan Rumah Tinggal yang berlokasi di Jl. Hibrida 2, Gang Mesjid Al-Fattah/Gang 1, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Nilai Properti Investasi di akhir tahun 2020 telah diukur berdasarkan nilai wajarnya berdasarkan laporan penilai independen, Kantor Jasa Penilai Publik Toha, Okky, Heru dan Rekan tertanggal 19 Januari 2021. Peningkatan Properti Investasi di tahun 2020 memberikan dampak terhadap bertambahnya aset yang dapat dijual dikemudian hari.

Investment Property

Up to December 31, 2020, the Company's Investment Property was recorded at Rp81.54 billion, increased by Rp2.14 billion or 2.69% from Rp79.41 billion recorded in 2019. This was due to the addition of investment in property made in 2020 in the form of set-off of the Company's receivables to PT Asria Jaya for a residential building located at Jl. Hibrida 2, Gang Mesjid Al-Fattah/ Gang 1, Bengkulu City, Bengkulu Province. The value of Investment Property at the end of 2020 was measured at fair value based on the independent appraiser's valuation report of Public Appraiser Toha, Okky, Heru dan Rekan, dated January 19, 2021. The increase in Investment Property in 2020 impacted on additional assets that can be sold in the future.

Aset Hak Guna - Bersih

Aset Hak Guna – Bersih sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp145,33 miliar, sedangkan nilai per 31 Desember 2019 tercatat nihil. Pencatatan Aset Hak Guna tersebut merupakan dampak dari penerapan PSAK 73 dengan nilai penambahan Aset Hak Guna berupa Peralatan dan Bangunan

Right-of-Use Assets - Net

Up to December 31, 2020, the Company's Right-of-Use Assets - Net were recorded at Rp145.33 billion, while the value of the same post at the end of 2019 was zero. The recording of Right-of-Use Assets was the impact of the implementation of PSAK 73 with an additional value of Right-of-Use Assets in the form

sebesar Rp163,58 miliar setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Selain itu, Perseroan juga mencatatkan penambahan Aset Hak Guna berupa Bangunan atas ruang kantor yang berada di WIKA Tower dan Wilayah Penjualan I di Sumatera Utara selama 2 tahun efektif pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021. Pencatatan Aset Hak Guna - Bersih di tahun 2020 memberikan dampak terhadap pengakuan beban dikemudian hari atas aktivitas sewa dan leasing mengikuti PSAK 73.

Aset Tetap - Bersih

Aset Tetap - Bersih sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.952,49 miliar, turun Rp59,58 miliar atau 1,98% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.012,08 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Akumulasi Penyusutan. Adapun dampak dari penurunan Aset Tetap - Bersih di tahun 2020 yaitu dapat meningkatkan potensi *fixed asset turnover* sepanjang peningkatan utilisasi aset tersebut terhadap peningkatan penjualan.

Investasi Jangka Panjang Lainnya

Investasi Jangka Panjang Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp9,15 miliar, turun Rp12,27 miliar atau 57,27% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp21,42 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai pasar atas saham seri C pada PT Istaka Karya (Persero) yang diukur dengan menggunakan pendekatan nilai pasar seperti yang tertuang dalam laporan penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputri, Dewi Apriyanti dan Rekan tertanggal 16 Januari 2021. Saham seri C tersebut berasal dari konversi piutang dengan PT Istaka Karya (Persero) dengan persentase kepemilikan sebesar 3,28% pada tahun 2019 dan 2020. Penurunan Investasi Jangka Panjang Lainnya di tahun 2020 memberikan dampak terhadap potensi penurunan pada penerimaan atas transaksi kepada PT Istaka Karya (Persero) dikemudian hari.

LIABILITAS

Pada akhir tahun 2020, jumlah Liabilitas Konsolidasian Perseroan tercatat sebesar Rp5.118,44 miliar. Nilai Liabilitas ini menurun Rp1.711,01 miliar atau 25,05% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp6.829,45 miliar. Penurunan Liabilitas tersebut terutama berasal dari Liabilitas Jangka Pendek yang turun sebesar Rp1.488,43 miliar atau 24,03% dan diikuti dengan penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp222,57 miliar atau 35,08%. Penurunan Liabilitas Jangka Pendek yang cukup dalam tersebut terutama berasal dari berkurangnya Beban Akrua sebesar Rp811,50 miliar atau 39,29% yang berasal dari berkurangnya Beban Pelaksanaan Proyek, Utang Dalam Proses, Beban Usaha dan Beban Proyek. Berkurangnya jumlah Liabilitas Konsolidasian di tahun 2020 memberikan dampak positif terhadap posisi likuiditas Perseroan, terutama dengan adanya penurunan jumlah Aset yang signifikan di tahun tersebut.

of Plant Equipment and Buildings amounting to Rp163.58 billion after deducting the accumulated depreciation. In addition, the Company recorded additional Right-of-Use Assets Building for the use of office space located at WIKA Tower and Regional Sales Office I in North Sumatra for 2 years effective on January 1, 2019 until December 31, 2021. The recording of Right-of-Use Assets - Net in 2020 impacted on recognition of expenses in the future on rental and leasing activities as stated in PSAK 73.

Fixed Assets - Net

Up to December 31, 2020, the Company's Fixed Assets - Net were recorded at Rp2,952.49 billion, decreased by Rp59.58 billion or 1.98% from Rp3,012.08 billion recorded in 2019. This was due to an increase in Accumulated Depreciation. The decrease in Fixed Assets - Net in 2020 may increase the potential for fixed asset turnover as long as the increased utilization of these assets leads to increased sales.

Other Long-Term Investment

Up to December 31, 2020, the Company's Other Long-Term Investment was recorded at Rp9.15 billion, decreased by Rp12.27 billion or 57.27% from Rp21.42 billion recorded in 2019. This was mainly due to the decrease in market value of series C shares of PT Istaka Karya (Persero), which were measured using market value approach as stated in the independent appraiser's valuation report of Public Appraiser Nirboyo Adiputri, Dewi Apriyanti dan Rekan, dated January 16, 2021. The series C shares originated from the conversion of receivables from PT Istaka Karya (Persero) with percentage of ownership of 3.28% in 2019 and 2020. The decrease in Other Long-Term Investment in 2020 impacted on potential decline in the receipt of transactions to PT Istaka Karya (Persero) in the future.

LIABILITIES

At the end of 2020, the Company's Consolidated Total Liabilities reached Rp5,118.44 billion, a decline of Rp1,711.01 billion or 25.05% from Rp6,829.45 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease of Rp1,488.43 billion or 24.03% in Total Current Liabilities, followed by a decrease of Rp222.57 billion or 35.08% in Total Non-Current Liabilities. The relatively steep decrease in Current Liabilities was mainly contributed by the decrease in Accrued Expenses amounting to Rp811.50 billion or 39.29% as the result of declining Project Implementation Expenses, Liabilities in Process, Operating Expenses, and Project Expenses. Overall, the decrease in Consolidated Total Liabilities in 2020 impacted positively on the Company's liquidity, especially with a significant decline in total Assets in the current year.

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Current Liabilities as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pinjaman Jangka Pendek / Short-Term Loan	2.363.381	2.035.685	327.697	16,10%
Utang Usaha / Trade Payables	718.174	898.547	(180.373)	-20,07%
Utang Pajak / Taxes Payables	50.618	116.230	(65.612)	-56,45%
Uang Muka dari Pelanggan / Advances from Customer	181.622	413.498	(231.876)	-56,08%
Pendapatan Diterima Dimuka / Unearned Revenue	90.193	296.705	(206.512)	-69,60%
Beban Akrua / Accrued Expenses	1.254.006	2.065.505	(811.498)	-39,29%
Utang Lain-lain / Other Payables	4.433	40.937	(36.504)	-89,17%
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang / Current Portion of Long-Term Debt	44.194	327.948	(283.754)	-86,52%
Jumlah / Total	4.706.621	6.195.055	(1.488.434)	-24,03%

Per 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan jumlah Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp4.706,62 miliar, turun Rp1.488,43 miliar atau 24,03% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.195,06 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Beban Akrua sebesar Rp811,50 miliar atau 39,29% dan penurunan Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang sebesar Rp283,75 miliar. Disamping itu, Utang Usaha, Utang Pajak, Uang Muka dari Pelanggan, Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Lain-lain juga turut mencatatkan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020. Berkurangnya jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tahun buku 2020 memberikan dampak positif terhadap kekuatan likuiditasnya di masa yang akan datang dan juga menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya di tahun tersebut tetap bertambah meskipun diliputi ketidakpastian ekonomi.

The Company's Total Current Liabilities as of December 31, 2020, amounted to Rp4,706.62 billion, declined by Rp1,488.43 billion or 24.03% from Rp6,195.06 billion recorded in 2019. This was mainly due to the decline in Accrued Expenses amounting to Rp811.50 billion or 39.29% and in Current Portion of Long-Term Debt amounting to Rp283.75 billion. In addition, the posts of Trade Payables, Taxes Payables, Advances from Customer, Unearned Revenue, and Other Payables recorded a relatively significant decline in 2020. The decline in the Company's Current Liabilities in the 2020 fiscal year would impact positively on its liquidity in the future as well as demonstrating the Company's capability in meeting its liabilities in the year concerned despite being in an unfavorable economic condition.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.363,38 miliar, naik Rp327,70 miliar atau 16,10% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.035,69 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada Pinjaman Jangka Pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank DKI, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Peningkatan Pinjaman Jangka Pendek di tahun 2020 memberikan dampak pada potensi peningkatan beban bunga dikemudian hari.

Short-Term Loan

Up to December 31, 2020, the Company's Short-Term Loan was recorded at Rp2,363.38 billion, increased by Rp327.70 billion or 16.10% from Rp2,035.69 billion recorded in 2019. This was mainly due to an increase in Short-Term Loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank DKI, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, and PT Bank CIMB Niaga Tbk. The increase in Short-Term Loan in 2020 impacted on potential of interest expense increase in the future.

Utang Usaha
Trade Payables
Utang Usaha per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Trade Payables as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Utang Pemasok / Supplier Payables	461.405	410.088	51.317	12,51%
Utang Subkontraktor / Subcontractor Payables	239.667	463.551	(223.884)	-48,30%
Utang Investasi / Investment Payables	17.101	24.908	(7.807)	-31,34%
Jumlah / Total	718.173	898.547	(180.374)	-20,07%

Utang Usaha sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp718,17 miliar, turun Rp180,37 miliar atau 20,07% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp898,55 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Utang Subkontraktor sebesar Rp223,88 miliar atau 48,30% yang mencerminkan penurunan utang kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang disubkontraktorkan, seperti pekerjaan stressing, pemasangan, biaya angkut, penurunan beam, biaya pematokan dan lain-lain. Selain itu, Utang Investasi turut mencatatkan penurunan sebesar Rp7,81 miliar atau 31,34% yang merupakan utang atas pembelian bahan baku untuk pelaksanaan pekerjaan/proyek, seperti pembelian semen, pasir, besi, plat sambung dan lain-lain. Adapun dampak penurunan Utang Usaha di tahun 2020 adalah terjadi peningkatan pada rasio lancar/current ratio Perseroan.

Up to December 31, 2020, the Company's Trade Payables were recorded at Rp718.17 billion, decreased by Rp180.37 billion or 20.07% from Rp898.55 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in Subcontractor Payables amounting to Rp223.88 billion or 48.30% which showed a decrease in payables to third parties for work at subcontractor, such as stressing, installation, freight costs, reduction in beam, and peg the cost of others. In addition, Investment Payables recorded a decline of Rp7.81 billion or 31.34%, constituting payables on the purchase of raw materials for the execution of the work/project, such as the purchase of cement, sand, iron, connecting plate, and so on. The decrease in Trade Payables in 2020 impacted on increase in current ratio of the Company.

Utang Pajak

Taxes Payables

Utang Pajak per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Taxes Payables as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Perusahaan / Company				
PPh Pasal 4(2) / Income Tax Article 4(2)	5.937	16.757	(10.820)	-64,57%
PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21	6.740	10.902	(4.162)	-38,18%
PPh Pasal 22 / Income Tax Article 22	2.844	3.888	(1.044)	-26,84%
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	1.922	2.706	(784)	-28,97%
PPh pasal 26 / Income Tax Article 26	55	322	(267)	-82,94%
PPh Pasal 29 / Income Tax Article 29	-	29.664	(29.664)	-100,00%
Pajak Pertambahan Nilai / Value Added tax	32.379	45.900	(13.520)	-29,46%
Subjumlah / Sub-total	49.877	110.139	(60.262)	-54,71%
Entitas Anak / Subsidiaries				
PPh Pasal 4(2) / Income Tax Article 4(2)	27	19	8	41,98%
PPh Pasal 15 / Income Tax Article 15	-	4	(4)	-100,00%
PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21	248	633	(385)	-60,88%
PPh Pasal 22 / Income Tax Article 22	13	50	(37)	-73,63%
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	322	224	99	44,08%
PPh Pasal 29 / Income Tax Article 29	-	1.476	(1.476)	-100,00%
Pajak Pertambahan Nilai / Value Added tax	130	2.618	(2.488)	-95,03%
Utang Pajak Lain-lain / Other Taxes Payable	-	1.068	(1.068)	-100,00%
Subjumlah / Sub-total	740	6.092	(5.352)	-87,85%
Jumlah / Total	50.617	116.231	(65.614)	-56,45%

Utang Pajak sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp50,62 miliar, turun Rp65,61 miliar atau 56,45% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp116,23 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Utang Pajak dari Perusahaan Induk sebesar Rp60,26 miliar atau 54,71% yang berasal dari Utang Pajak PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, Utang Pajak yang berasal dari Entitas Anak juga turut mencatatkan penurunan sebesar Rp5,35 miliar atau 87,85% berupa PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 29,

Up to December 31, 2020, the Company's Taxes Payables were recorded at Rp50.62 billion, decreased by Rp65.61 billion or 56.45% from Rp116.23 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in Taxes Payables of the Parent Company amounting to Rp60.26 billion or 54.71% from Taxes Payables of Income Tax Article 4(2), Income Tax Article 21, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, Income Tax Article 26, Income Tax Article 29, and Value Added Tax. In addition, Taxes Payables of the Subsidiaries recorded a decline of Rp5.35 billion or 87.85%, constituting Income Tax Article 15, Income Tax Article 21, Income

Pajak Pertambahan Nilai dan Utang Pajak Lain-lain. Penurunan Utang Pajak di tahun 2020 memberikan dampak pada penurunan pembayaran pajak dikemudian hari akibat penurunan dari aktivitas operasi perseroan.

Tax Article 22, Income Tax Article 29, Value Added Tax, and Other Tax Payable. The decrease in Taxes Payables in 2020 impacted on lowered tax payments in the future due to a decrease in the Company's operating activities.

Uang Muka dari Pelanggan

Advances from Customer

Uang Muka dari Pelanggan per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Advances from Customer as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pihak Berelasi / Related Parties	62.923	133.446	(70.523)	-52,85%
Pihak Ketiga / Third Parties	118.698	280.052	(161.353)	-57,62%
Jumlah / Total	181.621	413.498	(231.877)	-56,08%

Uang Muka dari Pelanggan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp181,62 miliar, turun Rp231,88 miliar atau 56,08% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp413,50 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Uang Muka dari Pelanggan Pihak Ketiga sebesar Rp161,35 miliar atau 57,62%. Pengurangan tersebut terutama bersumber dari PT Bosowa Marga Nusantara dan Lain-lain di bawah Rp1 miliar. Selain itu, Uang Muka dari Pelanggan Pihak Berelasi juga mencatatkan penurunan sebesar Rp70,52 miliar atau 52,85% yang terutama berasal dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, High Speed Railway Contractor Consortium dan Lain-lain di bawah Rp1 miliar. Penurunan Uang Muka dari Pelanggan Pihak Ketiga di tahun 2020 memberikan dampak terhadap peningkatan pembayaran dari progress pekerjaan.

Up to December 31, 2020, the Company's Advances from Customer were recorded at Rp181.62 billion, decreased by Rp231.88 billion or 56.08% from Rp413.50 billion recorded in 2019. This was due to a decrease in Advances from Customer – Third Parties amounting to Rp161.35 billion or 57.62%, mainly from PT Bosowa Marga Nusantara and Others below Rp1 billion. In addition, Advances from Customer – Related Parties recorded a decrease of Rp70.52 billion or 52.85%, mainly from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, High Speed Railway Contractor Consortium, and Others below Rp1 billion. The decrease in Advances from Customer – Third Parties in 2020 impacted on increased payment from work progress.

Pendapatan Diterima Di Muka

Unearned Revenue

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Unearned Revenue as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pihak Berelasi / Related Party	13.261	160.997	(147.735)	-91,76%
Pihak Ketiga / Third Party	76.932	135.709	(58.778)	-43,31%
Jumlah / Total	90.193	296.706	(206.513)	-69,60%

Pendapatan Diterima di Muka sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp90,19 miliar, turun Rp206,51 miliar atau 69,60% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp296,71 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Diterima di Muka dari Pihak Berelasi sebesar Rp147,74 miliar atau 91,76% yang berasal dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan lain-lain dibawah Rp2 miliar. Selain itu, Pendapatan Diterima di Muka dari Pihak Ketiga juga menunjukkan penurunan sebesar Rp58,78 miliar atau 43,31% yang berasal dari Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya, Bumi Karsa – Harfia Graha Perkasa, KSO dan lain-lain dibawah Rp2 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa

Up to December 31, 2020, the Company's Unearned Revenue was recorded at Rp90.19 billion, decreased by Rp206.51 billion or 69.60% from Rp296.71 billion recorded in 2019. This was due to a decrease in Unearned Revenue from Related Parties amounting to Rp147.74 billion or 91.76%, from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, and Others below Rp2 billion. Unearned Revenue from Third Parties also recorded a decrease amounting to Rp58.78 billion or 43.31%, from Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya, Bumi Karsa – Harfia Graha Perkasa, KSO, and Others below Rp2 billion. This showed that there was a decline in delivery order performance obligations in connection with bills to customers that had been

di tahun 2020 telah terjadi penurunan kewajiban pengiriman pesanan yang harus dipenuhi sehubungan dengan tagihan kepada pelanggan yang telah dilaksanakan namun belum memenuhi kriteria pengakuan penjualan. Adapun dampak dari penurunan Pendapatan Diterima Dimuka pada tahun 2020 adalah terjadi penurunan tagihan atas penerimaan kas dari pelanggan atas produksi barang yang belum diserahkan.

implemented and had not yet met the criteria for recognition of sales. The impact of the decrease in Unearned Revenues in 2020 is a decrease in invoices for cash receipts from customers for the production of goods that have not been delivered.

Beban AkruaI

Accrued Expenses

Beban AkruaI per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Accrued Expenses as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Beban Pelaksanaan Proyek / Project Implementation Expenses	914.492	1.465.230	(550.738)	-37,59%
Utang dalam Proses / Liabilities in Process	206.912	299.189	(92.277)	-30,84%
Beban Usaha / Operating Expenses	58.733	131.034	(72.300)	-55,18%
Beban Produksi / Production Expenses	59.076	24.658	34.418	139,58%
Beban Proyek / Project Expenses	14.793	145.394	(130.602)	-89,83%
Jumlah / Total	1.254.006	2.065.505	(811.499)	-39,29%

Beban AkruaI sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.254,01 miliar, turun Rp811,50 miliar atau 39,29% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.065,51 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Beban Pelaksanaan Proyek sebesar Rp550,74 miliar atau 37,59% berupa beban material, subkontraktor dan upah. Beban Proyek yang masih harus dibayar juga mencatatkan penurunan sebesar Rp130,60 miliar atau 89,83%. Selain itu, Utang dalam Proses dan Beban Usaha juga menunjukkan penurunan di tahun 2020. Hal tersebut memberikan dampak positif untuk mengurangi kewajiban yang harus dibayarkan Perseroan pada tahun yang akan datang.

Up to December 31, 2020, the Company's Accrued Expenses were recorded at Rp1,254.01 billion, decreased by Rp811.50 billion or 39.29% from Rp2,065.51 billion recorded in 2019. This was due to a decrease in Project Implementation Expenses amounting to Rp550.74 billion or 37.59% in the form of expenses for materials, subcontractors, distribution facilities, and labor. Accrued expenses of project also recorded a decrease of Rp130.60 billion or 89.83%. There was also a decline in Liabilities in Process and Operating Expenses. Nonetheless, this provided a positive impact on the Company to reduce its liabilities to be paid in the future.

Utang Lain-lain

Other Payables

Utang Lain-lain per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Other Payables as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pihak Berelasi / Related Parties	-	14.432	(14.432)	-100,00%
Pihak Ketiga / Third Parties	4.433	26.505	(22.072)	-83,28%
Jumlah / Total	4.433	40.937	(36.504)	-89,17%

Utang Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4,43 miliar, turun Rp36,50 miliar atau 89,17% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp40,94 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Utang Lain-lain pada Pihak Ketiga sebesar Rp22,07 miliar atau 83,28% berupa penurunan pada Utang Pensiun Hari Tua, Utang Lain-lain pada PT Wiratama Karya Usaha, dan lain-lain. Selain itu, Utang Lain-lain pada Pihak Berelasi juga turun sebesar Rp14,43 miliar atau 100,00% dibandingkan tahun sebelumnya yang seluruhnya berasal

Up to December 31, 2020, the Company's Other Payables were recorded at Rp4.43 billion, decreased by Rp36.50 billion or 89.17% from Rp40.94 billion recorded in 2019. This was due to a decrease in Other Payables of Third Parties amounting to Rp22.07 billion or 83.28%, namely a decrease in Retirement Payable, Other Payable with PT Wiratama Karya usaha, and Others. In addition, the Company recorded a decrease in Other Payables of Related Parties amounting to Rp14.43 billion or 100.00% compared to the previous year, which were entirely

dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dampak dari penurunan Utang Lain-lain di tahun 2020 adalah adanya penurunan pada alokasi beban bunga dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atas transaksi intra grup.

derived from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. The decrease in Other Payables in 2020 impacted on decrease in the allocation of interest expense from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for intra-group transactions.

Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang

Current Portion of Long-Term Debt

Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Current Portion of Long-Term Debt as of December 31 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pinjaman Bank/ Bank Loan	-	250.000	(250.000)	-100,00%
Liabilitas Sewa / Lease Liabilities	44.194	77.948	(33.754)	-43,30%
Jumlah / Total	44.194	327.948	(283.754)	-86,52%

Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp44,19 miliar, turun Rp283,75 miliar atau 86,52% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp327,95 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan Pinjaman Bank sebesar Rp250,00 miliar dan berkurangnya Liabilitas Sewa sebesar Rp33,75 miliar atau 43,30%. Penurunan Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang di tahun 2020 adalah terjadi penurunan pada pembayaran utang jangka panjang selama 1 (satu) tahun ke depan.

Up to December 31, 2020, the Company's Current Portion of Long-Term Debt was recorded at Rp44.19 billion, decreased by Rp283.75 billion or 86.52% from Rp327.95 billion recorded in 2019. This was mainly due to the settlement of Bank Loan amounting to Rp250.00 billion and a decline in Lease Liabilities amounting to Rp33.75 billion or 43.30%. The decrease in Current Portion of Long-Term Debt in 2020 impacted on reduction in long-term debt payments for the next 1 (one) year.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Non-Current Liabilities as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek / Long-Term Debt, Net of Current Portion	380.712	534.212	(153.500)	-28,73%
Imbalan Pascakerja / Post-Employment Benefits	23.637	70.514	(46.877)	-66,48%
Utang kepada Ventura Bersama / Debt to Joint Ventures	7.474	-	7.474	-
Liabilitas Pajak Tangguhan / Deferred Tax Liabilities	-	29.668	(29.668)	-100,00%
Jumlah / Total	411.823	634.394	(222.571)	-35,08%

Per 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan jumlah Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp411,82 miliar, turun Rp222,57 miliar atau 35,08% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp634,39 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek sebesar Rp153,50 miliar atau 28,73%. Selain itu, Imbalan Pascakerja juga mencatatkan penurunan sebesar Rp46,88 miliar atau 66,48% dan diikuti dengan pelunasan Liabilitas Pajak Tangguhan dengan pembayaran sebesar Rp29,67 miliar sampai dengan akhir tahun 2020. Berkurangnya Liabilitas Jangka Panjang di tahun 2020 memberikan dampak positif terhadap pengurangan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Perseroan di masa yang akan datang.

The Company's Total Non-Current Liabilities as of December 31, 2020, amounted to Rp411.82 billion, declined by Rp222.57 billion or 35.08% from Rp634.39 billion recorded in 2019. This was mainly due to the decline in Long-Term Debt, Net of Current Portion amounting to Rp153.50 billion or 28.73%. Furthermore, Post-Employment Benefits recorded a decline of Rp46.88 billion or 66.48%, followed by the payment of Deferred Tax Liabilities of Rp29.67 billion up to the end of 2020. The decline in the Company's Non-Current Liabilities in 2020 would impact positively on the declining liabilities to be paid by the Company in the future.

Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek / Long-Term Debt, Net of Current Portion

Utang Jangka Panjang, Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Long-Term Debt, Net of Current Portion as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pinjaman Bank / Bank Loan	380.000	500.000	(120.000)	-24,00%
Liabilitas Sewa / Lease Liabilities	712	34.212	(33.500)	-97,92%
Jumlah / Total	380.712	534.212	(153.500)	-28,73%

Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp380,71 miliar, turun Rp153,50 miliar atau 28,73% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp534,21 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Pinjaman Bank sebesar Rp120,00 miliar atau 24,00% dan penurunan Liabilitas Sewa sebesar Rp33,50 miliar atau 97,92% sampai dengan akhir tahun 2020. Adapun dampak dari penurunan Utang Jangka Panjang di tahun 2020 tersebut adalah adanya peningkatan *gearing ratio* dan juga dapat mengurangi *leverage* Perseroan.

Imbalan Pascakerja

Imbalan Pascakerja sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp23,64 miliar, turun Rp46,88 miliar atau 66,48% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp70,51 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan Perjanjian Kerja Bersama dengan aktuaris, sehingga menyebabkan perhitungan yang berbeda dari periode sebelumnya.

Utang kepada Ventura Bersama

Utang kepada Ventura Bersama sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp7,47 miliar, sedangkan nilai per 31 Desember 2019 tercatat nihil. Seluruh nilai Utang kepada Ventura Bersama yang tercatat di tahun 2020 berasal dari Wijaya Karya Beton – PT Pandji Pratama Indonesia yang digunakan untuk Pembangunan Pengaman Pantai Jakarta Tahap 3 Paket 2 dengan persentase kepemilikan sebesar 60%. Dampak dari pencatatan Utang kepada Ventura Bersama di tahun 2020 adalah dapat meningkatkan potensi pembayaran kepada *supplier* dan vendor di kemudian hari.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Pajak Tangguhan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar nihil, turun 100% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp29,67 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan yang berlaku efektif 1 Januari 2020.

Up to December 31, 2020, the Company's Long-Term Debt, Net of Current Portion was recorded at Rp380.71 billion, decreased by Rp153.50 billion or 28.73% from Rp534.21 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in Bank Loan amounting to Rp120.00 billion or 24.00% and in Lease Liabilities amounting to Rp33.50 billion or 97.92% until the end of 2020. The decrease in Long-Term Debt, Net of Current Portion in 2020 impacted on increase in gearing ratio and may also reduce the Company's leverage.

Post-Employment Benefits

Up to December 31, 2020, the Company's Post-Employment Benefits were recorded at Rp23.64 billion, decreased by Rp46.88 billion or 66.48% from Rp70.51 billion recorded in 2019. The decrease was mainly due to changes in the Collective Bargaining Agreement with actuaries, which resulted in a different calculation from the previous period.

Debt to Joint Ventures

Up to December 31, 2020, the Company's Debt to Joint Ventures was recorded at Rp7.47 billion, while the amount of Debt to Joint Ventures in 2019 was zero. The entire amount of Debt to Joint Ventures recorded in 2020 was derived from Wijaya Karya Beton – PT Pandji Pratama Indonesia, and used for the Development of Jakarta Shore Guard Phase 3 Package 2, with Company's ownership percentage of 60%. The recording of Debt to Joint Ventures in 2020 impacted on increased potential of payment to suppliers and vendors in the future.

Deferred Tax Liabilities

Up to December 31, 2020, the Company's Deferred Tax Liabilities were recorded at zero, while the amount of Deferred Tax Liabilities in 2019 reached Rp29.67 billion. This was mainly due to the implementation of PSAK 71: Financial Instrument which was effective on January 1, 2020.

EKUITAS
EQUITY
Ekuitas Tahun per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Equity as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Modal Saham / Capital Stock	871.547	871.547	-	0,00%
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	988.634	973.194	15.440	1,59%
Saham Diperoleh Kembali / Treasury Stock	-	(58.246)	58.246	-100,00%
Saldo Laba / Retained Earnings				
Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	344.817	242.298	102.519	42,31%
Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated	1.119.716	1.408.926	(289.210)	-20,53%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	3.324.714	3.437.719	(113.005)	-3,29%
Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interest	65.859	70.728	(4.869)	-6,88%
Jumlah / Total	3.390.573	3.508.447	(117.874)	-3,36%

Pada akhir tahun 2020, jumlah Ekuitas Konsolidasian Perseroan tercatat sebesar Rp3.390,57 miliar. Nilai Ekuitas ini menurun Rp117,87 miliar atau 3,36% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.508,45 miliar. Penurunan Ekuitas tersebut disebabkan oleh penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan dan PSAK 73: Sewa. Berkurangnya jumlah Ekuitas tersebut memberikan dampak penurunan terhadap kemampuan Perseroan dalam menghasilkan keuntungan dengan memakai modal yang tersedia. Namun secara keseluruhan, penurunan Ekuitas di tahun 2020 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.

At the end of 2020, the Company's Consolidated Total Equity reached Rp3,390.57 billion, a decline of Rp117.87 billion or 3.36% from Rp3,508.45 billion recorded in 2019. This was mainly due to the implementation of PSAK 71: Financial Instrument and PSAK 73: Leases. The decline in Equity would impact on the Company's capability to generate profit using the available capital. Overall, the decrease in Total Equity in 2020 did not provide a significant impact on the Company's performance.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Usaha / Revenues	4.803.359	7.083.384	(2.280.025)	-32,19%
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	(4.493.836)	(6.132.667)	1.638.831	-26,72%
Labu Bruto / Gross Profit	309.523	950.717	(641.194)	-67,44%
Beban Usaha / Operating Expenses				
Beban Umum dan Administrasi / General and Administrative Expenses	(120.348)	(145.368)	25.020	-17,21%
Beban Pengembangan Bisnis / Business Development Expenses	(3.995)	(8.219)	4.224	-51,39%
Beban Pemasaran / Marketing Expenses	(783)	(1.724)	941	-54,57%
Jumlah Beban Usaha / Total Operating Expenses	(125.126)	(155.311)	30.185	-19,44%
Labu Usaha / Operating Income	184.397	795.406	(611.009)	-76,82%
Penghasilan (Beban) Lain-lain / Other Income (Expenses)				
Pendapatan Bunga / Interest Income	23.981	8.329	15.652	187,91%
Beban Bunga / Interest Expenses	(113.196)	(146.014)	32.818	-22,48%
(Beban) Pemulihan Penurunan Nilai Instrumen Keuangan / Gain (Loss) Impairment of Financial Instruments	63.313	(9.756)	73.069	-748,99%
Labu (Rugi) Selisih Kurs / Gain (Loss) on Foreign Exchange	(2.988)	1.379	(4.367)	-316,75%
Beban Pajak Final / Final Income Tax	(44.569)	(44.579)	10	-0,02%
Labu Bersih Entitas Asosiasi / Share in Profit from Associates	3.069	4.709	(1.640)	-34,83%
Labu (Rugi) Bersih pada Ventura Bersama / Share in Profit (Loss) from Joint Ventures	(11.705)	2.050	(13.755)	-670,92%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Perubahan Nilai Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi / Changes in the Value of Financial Assets Measured at Fair Value through Profit and Loss	(12.266)	-	(12.266)	-
Lain-lain - bersih / Others - Net	40.469	14.747	25.722	174,42%
Jumlah Beban Lain-lain / Total Other Expenses	(53.892)	(169.135)	115.243	-68,14%
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	130.505	626.271	(495.766)	-79,16%
Beban Pajak Penghasilan - Bersih / Income Tax Expense - Net	(7.358)	(115.559)	108.201	-93,63%
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	123.147	510.712	(387.565)	-75,89%
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income				
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: / Items that will not be Reclassified Subsequently to Profit or Loss:				
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti / Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities	(2.936)	9.095	(12.031)	-132,29%
Pajak Penghasilan Terkait / Related Tax	779	(2.235)	3.014	-134,88%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak / Total Other Comprehensive Income for the Year Net of Tax	(2.157)	6.860	(9.017)	-131,44%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	120.990	517.572	(396.581)	-76,62%
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: / Income for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk / Owners of the Parent Entity	128.052	512.347	(384.294)	-75,01%
Kepentingan Nonpengendali / Non-Controlling Interest	(4.905)	(1.635)	(3.270)	200,03%
Jumlah / Total	123.147	510.712	(387.565)	-75,89%
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: / Total Comprehensive Income Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk / Owners of the Parent Entity	125.738	519.156	(393.418)	-75,78%
Kepentingan Nonpengendali / Non-Controlling Interest	(4.748)	(1.584)	(3.164)	199,66%
Jumlah / Total	120.990	517.572	(396.581)	-76,62%
Laba Bersih per Saham Dasar (Rupiah penuh) / Basic Earning per Share (in full amount of Rupiah)	14,69	58,79	(44,10)	-75,01%

Pendapatan Usaha Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.803,36 miliar, turun Rp2.280,03 miliar atau 32,19% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp7.083,38 miliar. Penurunan Pendapatan Usaha Perseroan di tahun 2020 tersebut diiringi dengan penurunan Beban Pokok Pendapatan yang tercatat sebesar Rp4.493,84 miliar, turun Rp1.638,83 miliar atau 26,72% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp6.132,67 miliar. Perubahan tersebut menyebabkan Laba Bruto Perseroan di tahun 2020 juga berkurang menjadi sebesar Rp309,52 miliar. Secara keseluruhan, Laba Tahun Berjalan Perseroan di tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar Rp387,57 miliar atau 75,89% menjadi Rp123,15 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp510,71 miliar.

The Company's Revenues in 2020 amounted to Rp4,803.36 billion, declined by Rp2,280.03 billion or 32.19% from Rp7,083.38 billion in 2019. The decline in Company's Revenues in 2020 was in line with the decline in Cost of Revenues at Rp4,493.84 billion, decreased by Rp1,638.83 billion or 26.72% compared to that of 2019 at Rp6,132.67 billion. Such changes caused Gross Profit in 2020 to decrease by Rp309.52 billion. Overall, the Company's Profit for the Year 2020 demonstrated a decline of Rp387.57 billion or 75.89%, from Rp510.71 billion recorded in 2019 to Rp123.15 billion in 2020.

Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) Revenues in 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Produk Putar / Spun Concrete	1.719.619	3.074.904	(1.355.285)	-44,08%
Produk Non Putar / Precast Concrete	2.163.760	3.017.840	(854.080)	-28,30%
Sub Jumlah / Sub-Total	3.883.379	6.092.744	(2.209.365)	-36,26%
Jasa / Services	282.356	261.084	21.272	8,15%
Konstruksi / Construction	637.624	729.556	(91.932)	-12,60%
Jumlah / Total	4.803.359	7.083.384	(2.280.025)	-32,19%

Selama tahun 2020, Perseroan berhasil membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp4.803,36 miliar, turun Rp2.280,03 miliar atau 32,19% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp7.083,38 miliar. Pendapatan Usaha tersebut berasal dari 3 (tiga) Satuan Bisnis Unit (SBU), yaitu Penjualan Produk Beton, Jasa dan Konstruksi. Kontribusi masing-masing segmen terhadap Pendapatan Usaha Perseroan di tahun 2020 adalah Penjualan Beton sebesar 80,85%, Jasa sebesar 5,88%, dan Konstruksi sebesar 13,27%. Berikut adalah uraian mengenai kinerja masing-masing Satuan Bisnis Unit di tahun 2020. Adapun dampak dari penurunan Pendapatan Usaha di tahun 2020 adalah menyebabkan penurunan pada laba usaha serta potensi penurunan dividen.

Penjualan Produk Beton

Penjualan Produk Beton di tahun 2020 tercatat sebesar Rp3.883,38 miliar, turun Rp2.209,36 miliar atau 36,26% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp6.092,74 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari Penjualan Produk Putar yang turun sebesar Rp1.355,29 miliar atau 44,08% dan diikuti dengan penurunan Penjualan Produk Non Putar sebesar Rp854,08 miliar atau 28,30%. Komposisi Penjualan Produk Beton di tahun 2020 terdiri dari 44,28% Produk Putar dan 55,72% Produk Non Putar. Berkurangnya Penjualan Produk Beton di tahun 2020 memberikan dampak negatif terhadap kinerja profitabilitas Perseroan di tahun 2020.

Berikut adalah rincian Penjualan Produk Beton berdasarkan wilayah operasi untuk tahun 2020.

Penjualan Produk Beton Berdasarkan Wilayah Operasi Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
 Sales of Concrete Products Based on Operational Area in 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Wilayah Penjualan I - Sumatera Utara / Sales Area I - North Sumatra	312.331	717.928	(405.597)	-56,50%
Wilayah Penjualan II - Sumatera Selatan / Sales Area II - South Sumatra	238.419	341.026	(102.608)	-30,09%
Wilayah Penjualan III - DKI Jakarta / Sales Area III - DKI Jakarta	1.273.192	2.299.232	(1.026.040)	-44,63%
Wilayah Penjualan IV - Jawa Tengah / Sales Area IV - Central Java	385.221	453.623	(68.402)	-15,08%
Wilayah Penjualan V - Jawa Timur / Sales Area V - East Java	390.821	860.458	(469.637)	-54,58%
Wilayah Penjualan VI - Sulawesi Selatan / Sales Area VI - South Sulawesi	411.024	477.083	(66.059)	-13,85%
Wilayah Penjualan VII - Kalimantan / Sales Area VII - Kalimantan	243.795	403.581	(159.786)	-39,59%

Up to the end of 2020, the Company recorded Revenues amounting to Rp4,803.36 billion, a decline of Rp2,280.03 billion or 32.19% from Rp7,083.38 billion recorded in 2019. The Company's Revenues constitute 3 (three) Business Units (SBU), namely the Sales of Concrete Products, Services, and Construction. The contributions of each segment to the Company's Revenues in 2020 were as follows: Concrete Sales at 80.85%, Services at 5.88%, and Construction at 13.27%. The following is a discussion on performance of each Business Unit in 2020. The impact of a decline in Revenues on the Company in 2020 was a decrease in operating income as well as a potential reduction in dividends.

Sales of Concrete Products

The Sales of Concrete Product in 2020 reached Rp3,883.38 billion, decreased by Rp2,209.36 billion or 36.26% from Rp6,092.74 billion recorded in 2019. This was mainly caused by the Sales of Spun Products that decreased by Rp1,355.29 billion or 44.08%, followed by a decrease in sales of Precast Products by Rp854.08 billion or 28.30%. The composition of sales of concrete products in 2020 consists of 44.28% of Spun Products and 55.72% of Precast Products. The decline in Sales of Concrete Products in 2020 this impacted negatively on the Company's profitability performance throughout 2020.

The following table describes the Sales of Concrete Products based on operational area in 2020.

Penjualan Produk Beton Berdasarkan Wilayah Operasi Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Sales of Concrete Products Based on Operational Area in 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Divisi Operasi / Operations Division	3.491	-	3.491	-
Divisi Pengelolaan Material / Material Management Division	317.863	35.853	282.010	786,56%
Jumlah Penjualan Perusahaan Induk / Total Sales of Parent Company	3.576.157	5.588.784	(2.012.627)	-36,01%
PT Citra Lautan Teduh	244.002	406.849	(162.848)	-40,03%
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	36.634	63.648	(27.014)	-42,44%
PT Wijaya Karya Komponen Beton	26.587	25.380	1.207	4,76%
PT Wijaya Karya Beton - Wika Kraton KSO	-	8.083	(8.083)	-100,00%
Jumlah Penjualan Entitas Anak / Total Sales of Subsidiaries	307.223	503.960	(196.737)	-39,04%
Jumlah / Total	3.883.379	6.092.744	(2.209.364)	-36,26%

Jumlah Penjualan Produk Beton yang berasal dari Perusahaan Induk di tahun 2020 tercatat sebesar Rp3.576,16 miliar, turun Rp2.012,63 miliar atau 36,01% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp5.588,78 miliar. Wilayah Penjualan I – Sumatera Utara mencatatkan penurunan nilai penjualan di tahun 2020 sebesar Rp405,60 miliar atau 56,50%. Wilayah Penjualan II – Sumatera Selatan turut mencatatkan penurunan penjualan produk beton di tahun 2020 sebesar Rp102,61 miliar atau 30,09%. Wilayah Penjualan III – DKI Jakarta yang mencatatkan penurunan Penjualan sebesar Rp1.026,04 miliar atau 44,63% di tahun 2020.

Wilayah Penjualan IV – Jawa Tengah turut mencatatkan penurunan penjualan produk beton di tahun 2020 sebesar Rp68,40 miliar atau 15,08%. Wilayah Penjualan V – Jawa Timur mencatatkan penurunan sebesar Rp469,64 miliar atau 54,58%. Wilayah Penjualan VI – Sulawesi Selatan mencatatkan penurunan sebesar Rp66,06 miliar atau 13,85%. Wilayah Penjualan VII – Kalimantan turut mencatatkan penurunan sebesar Rp159,79 miliar atau 39,59%.

Penurunan penjualan yang terjadi di Wilayah Penjualan terutama disebabkan karena adanya penurunan atas perolehan omset kontrak di tahun berjalan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Dari segi komposisi, Penjualan Produk Beton dari Perseroan di tahun 2020 didominasi oleh Wilayah Penjualan III – DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 35,60% dan diikuti oleh Wilayah Penjualan VI – Sulawesi Selatan dan Wilayah Penjualan V – Jawa Timur dengan masing-masing komposisi kontribusi sebesar 11,49% dan 10,93%.

Kinerja Penjualan Produk Beton dari Entitas Anak di tahun 2020 tercatat sebesar 307,22 miliar, turun Rp196,74 miliar atau 39,04% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp503,96 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari PT Citra Lautan Teduh yang mencatatkan penurunan penjualan produk beton sebesar Rp162,85 miliar atau 40,03% di tahun 2020. Selain itu, PT Wijaya Karya Krakatau Beton dan PT Wijaya Karya Beton – Wika Kraton KSO juga turut mencatatkan penurunan penjualan di tahun 2020.

Total sales of Concrete Products of the Parent Company in 2020 were recorded at Rp3,576.16 billion, decreased by Rp2,012.63 billion or 36.01% from Rp5,588.78 billion recorded in 2019. Sales of Sales Area I - North Sumatera decreased in 2020 by Rp405.60 billion or 56.50%. Sales of concrete product of Sales Area II - South Sumatera in 2020 decreased by Rp102.61 billion or 30.09%. Sales of Sales Area III - DKI Jakarta also decreased by Rp1,026.04 billion or 44.63% in 2020.

Sales of concrete product of Sales Area IV - Central Java in 2020 decreased by Rp68.40 billion or 15.08%. Sales Area V - East Java also decreased by Rp469.64 billion or 54.58%. Sales Area VI - South Sulawesi declined by Rp66.06 billion or 13.85%. Sales Area VII - Kalimantan also declined by Rp159.79 billion or 39.59%.

Decline in sales in Sales Area was also caused by decreased contract acquisition in the current year as the result of Covid-19 pandemic.

In terms of composition, the Sales of Concrete Products of the Company in 2020 were dominated by Sales Area III - DKI Jakarta with a contribution of 35.60%, followed by Sales Area VI - South Sulawesi and Sales Area V - East Java with each contribution amounting to 11.49% and 10.93%.

The Sales of Concrete Products from Subsidiaries in 2020 were recorded at 307.22 billion, decreased by Rp196.74 billion or 39.04% from Rp503.96 billion recorded in 2019. This was mainly contributed by PT Citra Lautan Teduh, which recorded a decrease in sales of concrete products of Rp162.85 billion or 40.03% in 2020. PT Wijaya Karya Krakatau Beton and PT Wijaya Karya Beton - Wika Kraton KSO also recorded a decline in sales in 2020.

Jasa
Services
Pendapatan Jasa Berdasarkan Wilayah Operasi Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Revenues from Services Business Unit Based on Operational Area in 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Wilayah Penjualan I - Sumatera Utara / Sales Area I - North Sumatra	54.211	12.096	42.115	348,18%
Wilayah Penjualan II - Sumatera Selatan / Sales Area II - South Sumatra	11.858	13.051	(1.193)	-9,14%
Wilayah Penjualan III - DKI Jakarta / Sales Area III - DKI Jakarta	87.391	153.277	(65.886)	-42,98%
Wilayah Penjualan IV - Jawa Tengah / Sales Area IV - Central Java	21.900	31.185	(9.285)	-29,77%
Wilayah Penjualan V - Jawa Timur / Sales Area V - East Java	11.808	23.612	(11.804)	-49,99%
Wilayah Penjualan VI - Sulawesi Selatan / Sales Area VI -South Sulawesi	58.981	20.473	38.509	188,10%
Wilayah Penjualan VII - Kalimantan / Sales Area VII -Kalimantan	714	6.824	(6.110)	-89,54%
Divisi Operasi / Operations Division	27.062	-	27.062	-
Divisi Pengelolaan Material / Material Management Division	45	-	45	-
Jumlah Penjualan Perusahaan Induk / Total Sales of Parent Company	273.970	260.518	13.452	5,16%
PT Citra Lautan Teduh	8.386	566	7.820	1380,44%
Jumlah Pendapatan Entitas Anak / Total Revenues of Subsidiaries	8.386	566	7.820	1380,44%
Jumlah / Total	282.356	261.084	21.272	8,15%

Pendapatan Jasa Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp282,36 miliar, naik Rp21,27 miliar atau 8,15% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp261,08 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal dari Wilayah Penjualan I – Sumatera Utara yang mencatatkan kenaikan Pendapatan Jasa sebesar Rp42,12 miliar atau 348,18% disebabkan oleh peningkatan pendapatan pada proyek instalasi

Wilayah Penjualan VI – Sulawesi Selatan juga turut mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar Rp38,51 miliar atau 188,10% di tahun 2020 disebabkan oleh adanya penambahan pekerjaan proyek jalan tol layang A.P Pettarani.

Disamping itu, Divisi Operasi dan Divisi Pengelolaan Material memberikan kontribusi peningkatan pada nilai penjualannya sebesar Rp27,06 miliar dan Rp45 juta di tahun 2020.

Pendapatan Jasa yang berasal dari Entitas Anak, yaitu PT Citra Lautan Teduh, juga mencatatkan kenaikan sebesar Rp7,82 miliar atau 1380,44% di tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yg berasal dari proyek pemancangan dan proyek instalasi yaitu Proyek Pembangunan Pabrik Roti dan Proyek Jalan Lingkar Luar Tanjung Pinang - Kawasan Gurindam 12.

Dari segi komposisi Pendapatan Jasa yang dibukukan oleh Perusahaan Induk, 3 (tiga) Wilayah Penjualan dengan kontribusi pendapatan terbesar berasal dari Wilayah Penjualan III – DKI Jakarta sebesar 31,90%, Wilayah Penjualan VI – Sulawesi Selatan sebesar 21,53% dan Wilayah Penjualan I – Sumatera Utara sebesar 19,79% di tahun 2020.

The Company's Total Revenues from Services in 2020 were recorded at Rp282.36 billion, an increase of Rp21.27 billion or 8.15% from Rp261.08 billion recorded in 2019. This was mainly contributed by Sales Area I - North Sumatra, which recorded an increase in Revenues from Services of Rp42.12 billion or 348.18% due to increase in revenue from installation project.

Sales Area VI - South Sulawesi also recorded an increase amounting to Rp38.51 billion or 188.10% in 2020 due to additional A.P Pettarani elevated toll road project.

In addition, the Operations Division and Material Management Division contributed to an increase with their sales which reached Rp27.06 billion and Rp45 million, respectively, in 2020.

Revenues from Services of the Subsidiary, namely PT Citra Lautan Teduh, also recorded an increase amounting to Rp7.82 billion or 1,380.44% in 2020 due to an increase in revenue from piling and installation projects, namely the Bread Factory Construction Project and the Tanjung Pinang Outer Ring Road Project - Gurindam Area 12.

In terms of composition of Revenues from Services of the Parent Company, 3 (three) Sales Areas with the largest revenue contribution were Sales Area III - DKI Jakarta at 31.90%, Sales Area VI - South Sulawesi at 21.53% and Sales Area I - North Sumatra 19.79% in 2020.

Konstruksi

Construction

Pendapatan Konstruksi Berdasarkan Wilayah Operasi Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Revenues from Construction Business Unit Based on Operational Area in 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Wilayah Penjualan VI - Sulawesi Selatan / Sales Area VI - South Sulawesi	620.937	729.557	(108.620)	-14,89%
Jakarta International Stadium	16.687	-	16.687	-
Jumlah / Total	637.624	729.557	(91.933)	-12,60%

Pendapatan Konstruksi di tahun 2020 tercatat sebesar Rp637,62 miliar, turun Rp91,93 miliar atau 12,60% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp729,56 miliar. Penurunan tersebut berasal dari Pendapatan Konstruksi pada Wilayah Penjualan VI – Sulawesi Selatan dengan penurunan sebesar Rp108,62 miliar atau 14,89% yang disebabkan oleh proyek Jalan Tol A.P. Pettarani, yang merupakan proyek terbesar di jasa konstruksi, telah memasuki tahap akhir penyelesaian.

The Company's Revenues from Construction in 2020 were recorded at Rp637.62 billion, a decrease of Rp91.93 billion or 12.60% from Rp729.56 billion recorded in 2019. This was mainly contributed by Sales Area VI – South Sulawesi, which recorded a decrease of Rp108.62 billion or 14.89% due to the A.P. Pettarani Toll Road, which is the largest project of construction service, has entered the final stage of completion.

Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenues

Beban Pokok Pendapatan Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Cost of Revenues in 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Persediaan Barang Jadi Awal / Finished good at the Beginning	771.278	528.887	242.391	45,83%
Produksi Barang Jadi / Finished Good Production	2.215.960	3.422.401	(1.206.441)	-35,25%
Persediaan Barang Jadi Akhir / Finished Good at the Ending	(523.887)	(771.278)	247.391	-32,08%
Subjumlah / Sub-Total	2.463.351	3.180.010	(716.659)	-22,54%
Biaya Langsung Produksi / Direct Cost of Production				
Biaya Pelaksanaan Proyek / Project Implementation Cost	604.646	954.910	(350.264)	-36,68%
Biaya Material / Materials Cost	448.556	898.779	(414.223)	-46,09%
Biaya Operasional Proyek / Operational Project Cost	120.896	73.446	47.450	64,61%
Biaya Upah Tenaga Kerja / Labor Cost	16.536	12.027	4.509	37,49%
Subjumlah / Sub-Total	1.226.634	1.939.162	(712.528)	-36,74%
Biaya Tidak Langsung Produksi / Indirect Cost of Production				
Biaya Penyusutan / Depreciation Cost	236.729	248.651	(11.922)	-4,79%
Biaya Administrasi dan Umum / Administrative and General Cost	116.990	140.755	(23.765)	-16,88%
Biaya Pemasaran dan Penjualan / Marketing and Sales Cost	1.301	1.173	128	10,88%
Biaya Penelitian dan Pengembangan / Research and Development Cost	1.284	1.074	210	19,59%
Subjumlah / Sub-Total	356.304	391.653	(35.349)	-9,03%
Jumlah / Total	4.046.289	5.510.825	(1.464.536)	-26,58%
Jasa Konstruksi / Construction				
Biaya Material / Materials Cost	144.604	274.499	(129.895)	-47,32%
Subkontraktor / Subcontractor	194.684	181.145	13.539	7,47%
Biaya Upah / Labor Cost	44.305	41.323	2.982	7,22%
Biaya Tidak Langsung / Overhead Cost	35.916	30.951	4.965	16,04%
Biaya Peralatan / Equipment Cost	28.039	93.925	(65.886)	-70,15%
Subjumlah / Sub-Total	447.548	621.843	(174.295)	-28,03%
Jumlah / Total	4.493.836	6.132.668	(1.638.831)	-26,72%

Beban Pokok Pendapatan tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.493,84 miliar turun Rp1.638,83 miliar atau 26,72% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.132,67 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan produktivitas pabrik.

Disamping itu, Biaya Langsung Produksi di tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.226,63 miliar, turun Rp712,53 miliar atau 36,74% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.939,16 miliar. Hal tersebut berasal dari penurunan pada Biaya Material sebesar Rp414,22 miliar atau 46,09% dan penurunan pada Biaya Pelaksanaan Proyek sebesar Rp350,26 miliar atau 36,68%. Hal tersebut sejalan dengan penurunan perolehan Pendapatan Usaha.

Biaya Tidak Langsung Produksi di tahun 2020 tercatat sebesar Rp356,30 miliar, turun Rp35,35 miliar atau 9,03% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp391,65 miliar. Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya Biaya Administrasi dan Umum sebesar Rp23,77 miliar atau 16,88% dan penurunan pada Biaya Penyusutan sebesar Rp11,92 miliar atau 4,79%. Hal tersebut disebabkan penurunan Pendapatan Usaha yang berdampak pada penurunan biaya secara keseluruhan.

Biaya Jasa Konstruksi di tahun 2020 tercatat sebesar Rp447,55 miliar, turun Rp174,30 miliar atau 28,03% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp621,84 miliar. Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya Biaya Material sebesar Rp129,90 miliar atau 47,32% dan penurunan pada Biaya Peralatan sebesar Rp65,89 miliar atau 70,15%. Hal tersebut disebabkan berkurangnya beban akibat proyek Jalan Tol A.P. Pettarani yang telah memasuki tahap akhir penyelesaian.

Lab a Bruto

Perseroan mencatatkan Laba Bruto sebesar Rp309,52 miliar di tahun 2020, turun sebesar Rp641,19 miliar atau 67,44% dari tahun 2019 sebesar Rp950,72 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan pada Pendapatan Usaha sebesar Rp2.280,03 miliar atau 32,19% di tahun 2020. Penurunan Laba Bruto di tahun 2020 memberikan dampak negatif terhadap penurunan pada profitabilitas Perseroan di tahun tersebut.

Cost of Revenues in 2020 amounted to Rp4,493.84 billion, a decline of Rp1,638.83 billion or 26.72% from Rp6,132.67 billion recorded in 2019. This was mainly due to declined plant productivity.

In addition, Direct Cost of Production in 2020 was recorded at Rp1,226.63 billion, decreased by Rp712.53 billion or 36.74% from Rp1,939.16 billion recorded in 2019. This was contributed by a decrease in Materials Cost amounting to Rp414.22 billion or 46.09% and in Project Implementation Cost amounting to Rp350.26 billion or 36.68%, in line with declined Revenues.

Indirect Cost of Production in 2020 was recorded at Rp356.30 billion, decreased by Rp35.35 billion or 9.03% from Rp391.65 billion. This was contributed by a decrease in Administrative and General Cost of Rp23.77 billion or 16.88%, and in Depreciation Cost of Rp11.92 billion or 4.79% due to declined Revenues which decreased costs overall.

Construction Cost in 2020 was recorded at Rp447.55 billion, decreased by Rp174.30 billion or 28.03% from Rp621.84 billion recorded in 2019. This was contributed by a decrease in Materials Cost of Rp129.90 billion or 47.32% and in Equipment Cost of Rp65.89 billion or 70.15% due to reduced expenses due to the A.P. Pettarani Toll Road project which has entered the final stage of completion.

Gross Profit

Up to the end of 2020, the Company recorded Gross Profit amounting to Rp309.52 billion, a decline of Rp641.19 billion or 67.44% from Rp950.72 billion recorded in 2019. This was mainly contributed by a decrease in Revenues of Rp2,280.03 billion or 32.19% in 2020. The decline in Gross Profit in 2020 impacted negatively on the low profitability of the Company in the current year.

Beban Usaha

Operating Expenses

Beban Usaha Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Operating Expenses in 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Beban Umum dan Administrasi / General and Administrative Expenses	120.348	145.368	(25.020)	-17,21%
Beban Pengembangan Bisnis / Business Development Expenses	3.995	8.219	(4.224)	-51,39%
Beban Pemasaran / Marketing Expenses	783	1.724	(941)	-54,57%
Jumlah / Total	125.126	155.311	(30.185)	-19,44%

Beban Usaha di tahun 2020 tercatat sebesar Rp125,13 miliar, turun Rp30,19 miliar atau 19,44% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp155,31 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari Beban Umum dan Administrasi yang berkurang sebesar Rp25,02 miliar atau 17,21% disebabkan oleh berkurangnya Beban Personalia, Beban Fasilitas Kantor dan Beban Informasi dan Teknologi. Selain itu, Beban Pengembangan Bisnis dan Beban Pemasaran juga mencatatkan penurunan di tahun 2020 masing-masing sebesar Rp4,22 miliar atau 51,39% dan Rp941 juta atau 54,57%. Adapun dampak dari penurunan Beban Usaha di tahun 2020 adalah peningkatan laba usaha di tahun 2020 dan perbaikan pada arus kas operasi Perseroan.

Laba Usaha

Laba Usaha di tahun 2020 tercatat sebesar Rp184,40 miliar, turun Rp611,01 miliar atau 76,82% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp795,41 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Usaha yang cukup signifikan di tahun 2020. Penurunan Laba Usaha di tahun 2020 tersebut memberikan dampak pada penurunan *debt service coverage Ratio* Perseroan.

Beban Lain-lain

Penghasilan (Beban) Lain-lain Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Other (Income) Expenses in 2019-2020 (in millions of Rupiah)				
Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Bunga / Interest Income	23.981	8.329	15.652	187,91%
Beban Bunga / Interest Expenses	(113.196)	(146.014)	32.818	-22,48%
(Beban) Pemulihan Penurunan Nilai Instrumen Keuangan / Gain (Loss) Impairment of Financial Instruments	63.313	(9.756)	73.069	-748,99%
Laba (Rugi) Selisih Kurs / Gain (Loss) on Foreign Exchange	(2.988)	1.378	(4.366)	-316,75%
Beban Pajak Final / Final Income Tax	(44.569)	(44.579)	10	-0,02%
Laba Bersih Entitas Asosiasi / Share in Profit from Associates	3.068	4.709	(1.641)	-34,83%
Laba (Rugi) Bersih pada Ventura Bersama / Share in Profit (Loss) from Joint Ventures	(11.705)	2.050	(13.755)	-670,92%
Perubahan Nilai Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi / Changes on Financial Assets Measured at Fair Value through Profit or Loss	(12.266)	-	(12.266)	-
Lain-lain - bersih / Others - net	40.469	14.747	25.722	174,42%
Jumlah / Total	(53.893)	(169.136)	115.243	-68,14%

Beban Lain-lain di tahun 2020 tercatat sebesar Rp53,89 miliar, turun Rp115,24 miliar atau 68,14% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp169,14 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan Pemulihan Penurunan Nilai Instrumen Keuangan sebesar Rp63,31 miliar dan disertai dengan berkurangnya Beban Bunga sebesar Rp32,82 miliar atau 22,48%. Disamping itu, Pendapatan Bunga dan Lain-lain juga turut mencatatkan peningkatan di tahun 2020. Penurunan Beban Lain-lain di tahun 2020 memberikan dampak atas potensi kenaikan laba sebelum pajak.

Up to the end of 2020, the Company recorded Operating Expenses amounting to Rp125.13 billion, a decline of Rp30.19 billion or 19.44% from Rp155.31 billion recorded in 2019. This was mainly contributed by a decrease in General and Administrative Expenses of Rp25.02 billion or 17.21% in 2020 as the result of a decrease in Personnel Expenses, Office Facilities Expenses, and Information and Technology Expenses. In addition, Business Development Expenses and Marketing Expenses recorded a decline in 2020 each amounting to Rp4.22 billion or 51.39% and Rp941 million or 54.57%. The impact of a decline in Operating Expenses on the Company in 2020 was increase in operating income in 2020 and improvement in operational cash flows.

Operating Income

Up to the end of 2020, the Company recorded Operating Income amounting to Rp184.40 billion, a decline of Rp611.01 billion or 76.82% from Rp795.41 billion recorded in 2019. This was mainly contributed by a relatively significant decline in Revenues in 2020. The impact of a decline in Operating Income on the Company in 2020 was decreased debt service coverage ratio of the Company.

Other Expenses

Up to the end of 2020, the Company recorded Other Expenses amounting to Rp53.89 billion, a decline of Rp115.24 billion or 68.14% from Rp169.14 billion recorded in 2019. This was mainly contributed by a recording of Gain Impairment of Financial Instruments amounting to Rp63.31 billion, as well as a decrease in Interest Expenses amounting to Rp32.82 billion or 22.48%. Interest Income and Others recorded an increase in 2020. The impact of a decline in Other Expenses on the Company in 2020 was potential increase of profit before tax.

Beban Pajak Penghasilan - Bersih

Beban Pajak Penghasilan - Bersih di tahun 2020 tercatat sebesar Rp7,36 miliar; turun Rp108,20 miliar atau 93,63% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp115,56 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Laba Sebelum Pajak di tahun 2020. Penurunan Beban Pajak Penghasilan - Bersih di tahun 2020 memberikan dampak pada penurunan pembayaran pajak badan tahun 2020.

Labanya Tahun Berjalan

Labanya Tahun Berjalan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp123,15 miliar, turun Rp387,57 miliar atau 75,89% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp510,71 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Penjualan Usaha di tahun 2020. Realisasi Labanya Tahun Berjalan yang lebih rendah tersebut berdampak terhadap penurunan Saldo Labanya. Oleh karena itu, Manajemen telah mempersiapkan rangkaian strategi yang dapat diterapkan pada tahun yang akan datang guna mendorong pertumbuhan Labanya Tahun Berjalan dengan tetap memperhatikan risiko yang ada.

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak

Kerugian Komprehensif Lain di tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,16 miliar, sedangkan pada tahun 2019 Penghasilan Komprehensif Lain tercatat sebesar Rp6,860 miliar. Kerugian Komprehensif Lain di tahun 2020 berasal dari Kerugian Aktuarial atas Liabilitas Imbalan pasti yang tercatat sebesar Rp2,94 miliar. Adapun dampak dari pencatatan Kerugian Komprehensif Lain Tahun Berjalan di tahun 2020 adalah kenaikan pada cadangan Imbalan Paska Kerja.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp120,99 miliar, turun Rp396,58 miliar atau 76,62% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp517,57 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Labanya Tahun Berjalan sebesar 75,89% dan diiringi dengan pencatatan Kerugian Komprehensif Lain sebesar Rp2,16 miliar di tahun 2020. Adapun dampak dari penurunan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 2020 adalah peningkatan pada beban cadangan Imbalan Paska Kerja.

Labanya Bersih per Saham Dasar

Labanya Bersih per Saham Dasar di tahun 2020 tercatat sebesar Rp14,69, turun Rp44,10 atau 75,01% bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp58,79. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Labanya Tahun Berjalan di tahun 2020. Adapun dampak dari penurunan Labanya Bersih per Saham Dasar di tahun 2020 adalah penurunan pada kenaikan nilai buku saham Perseroan.

Income Tax Expense - Net

Up to the end of 2020, the Company recorded Income Tax Expense - Net amounting to Rp7.36 billion, a decline of Rp108.20 billion or 93.63% from Rp115.56 billion recorded in 2019. This was mainly contributed by a decrease in Profit Before Tax in 2020. The impact of a decline in Income Tax Expense - Net on the Company in 2020 was decreased payment of corporate tax in 2020.

Profit for the Year

Up to the end of 2020, the Company recorded Profit for the Year amounting to Rp123.15 billion, a decline of Rp387.57 billion or 75.89% from Rp510.71 billion recorded in 2019. This was mainly contributed by a decrease in Sales in 2020. The low realization of Profit for the Year decreased the Retained Earnings. Hence, the Management has prepared a series of strategies to be applied in the coming year in order to encourage the growth of Profit for the Year while still paying attention to existing risks.

Other Comprehensive Income (Loss) for the Year Net of Tax

Up to the end of 2020, the Company recorded Other Comprehensive Loss amounting to Rp2.16 billion, while in 2019, the Company recorded Other Comprehensive Income amounting to Rp6.860 billion. Other Comprehensive Loss in 2020 was contributed by Actuarial Loss from Defined Benefit Liabilities which was recorded at Rp2.94 billion. The impact of a recording of Other Comprehensive Loss for the Year 2020 was increase of reserves for Post-Employment Benefits.

Comprehensive Income for the Year

Up to the end of 2020, the Company recorded Comprehensive Income for the Year amounting to Rp120.99 billion, a decline of Rp396.58 billion or 76.62% from Rp517.57 billion recorded in 2019. This was mainly contributed by a 75.89% decrease in Profit for the Year and a recording of Other Comprehensive Loss of Rp2.16 billion. The impact of a decline in Comprehensive Income for the Year 2020 on the Company was increase in Post-Employment Benefits expense.

Basic Earning per Share

Up to the end of 2020, the Company recorded Basic Earning per Share amounting to Rp14.69, a decline of Rp44.10 or 75.01% from Rp58.79 recorded in 2019. This was mainly contributed by a decrease in Profit for the Year 2020. The impact of a decline in Basic Earning per Share on the Company in 2020 was decrease in increase in share book value.

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENTS OF CASH FLOWS

Laporan Arus Kas Konsolidasian Per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Consolidated Statements of Cash Flows as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Flows Provided by Operating Activities	803.264	1.265.495	(462.231)	-36,53%
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Flows Used for Investing Activities	(281.519)	(370.108)	88.589	-23,94%
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows Used for Financing Activities	(581.410)	(158.004)	(423.406)	267,97%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents	(59.665)	737.383	(797.048)	-108,09%
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun / Effect of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalent at End of Year	(399)	(119)	(280)	235,84%
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun / Beginning Balance of Cash and Cash Equivalents	1.602.281	865.017	737.264	85,23%
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun / Ending Balance of Cash and Cash Equivalents	1.542.217	1.602.281	(60.064)	-3,75%

Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.542,22 miliar, turun Rp60,06 miliar atau 3,75% dibandingkan Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2019 sebesar Rp1.602,28 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi sebesar Rp462,23 miliar atau 36,53% dan diikuti dengan peningkatan Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp423,41 miliar atau 267,97%. Penurunan Kas dan Setara Kas di tahun 2020 memberikan dampak pelemahan terhadap likuiditas Perseroan.

Cash and Cash Equivalents at the end of 2020 reached Rp1,542.22 billion, declined by Rp60.06 billion or 3.75% from Rp1,602.28 billion recorded at the end of 2019. This was mainly due to the decrease in Net Cash Flows Provided by Operating Activities amounting to Rp462.23 billion or 36.53%, followed by an increase in Net Cash Flows Used for Financing Activities amounting to Rp423.41 billion or 267.97%. The decline in Cash and Cash Equivalents in 2020 impacted on the weakening of Company's liquidity.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Cash Flows from Operating Activities as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Penerimaan Kas dari Pelanggan / Cash Received from Customers	6.000.517	6.733.691	(733.174)	-10,89%
Pembayaran Kepada Pemasok / Payment to Suppliers	(4.206.959)	(4.329.992)	123.033	-2,84%
Pembayaran Kepada Direksi dan Karyawan / Payment for Director and Employee	(318.943)	(340.373)	21.430	-6,30%
Penerimaan Restitusi / Receipt of Taxes	68.991	-	68.991	-
Pembayaran Pajak-Pajak / Payment of Taxes	(526.678)	(559.573)	32.895	-5,88%
Pembayaran Operasi Lainnya / Payment of Other Operating Activities	(213.664)	(238.258)	24.594	-10,32%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Flows Provided by Operating Activities	803.264	1.265.495	(462.231)	-36,53%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp803,26 miliar, turun Rp462,23 miliar atau 36,53% bila dibandingkan nilai pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.265,50 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya Penerimaan Kas dari Pelanggan sebesar Rp733,17 miliar atau 10,89%. Hal tersebut sejalan dengan penurunan Penjualan di tahun 2020. Penurunan Arus Kas dari Aktivitas Operasi di tahun 2020 memberikan dampak pada penurunan saldo kas dan setara kas di akhir tahun 2020.

Up to December 31, 2020, the Company's Cash Flows from Operating Activities were recorded at Rp803.26 billion, decreased by Rp462.23 billion or 36.53% from Rp1,265.50 billion recorded in 2019. This was caused by a decrease in Cash Received from Customers amounting to Rp733.17 billion or 10.89%, which was in line with the decrease of Sales in 2020. The decrease in Cash Flows from Operating Activities in 2020 decreased ending balance of cash and cash equivalents.

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI
CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITIES

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
 Cash Flows for Investing Activities as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pembelian Aset Tetap dan Aset Hak Guna / Acquisition of Fixed Assets and Right-of-Use-asset	(316.806)	(391.440)	74.634	-19,07%
Penjualan Aset Tetap / Disposal of Fixed Assets	-	148	(148)	-100,00%
Penerimaan Bunga / Interest Received	29.736	9.184	20.552	223,78%
Penyertaan pada Ventura Bersama / Investment in Joint Venture	(450)	-	(450)	-
Penerimaan dari Investasi Ventura Bersama / Receipt of Investment in Joint Venture	6.001	12.000	(5.999)	-49,99%
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Flows Used for Investing Activities	(281.519)	(370.108)	88.589	-23,94%

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp281,52 miliar, turun Rp88,59 miliar atau 23,94% bila dibandingkan nilai pada 31 Desember 2019 sebesar Rp370,11 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Kas dan Setara Kas yang digunakan untuk Pembelian Aset Tetap dan Aset Hak Guna sebesar Rp74,63 miliar atau 19,07%. Selain itu, Perseroan juga mencatatkan kenaikan atas Penerimaan Bunga sebesar Rp20,55 miliar atau 223,78%. Penurunan Arus Kas untuk Aktivitas Investasi di tahun 2020 memberikan dampak pada kenaikan saldo kas dan setara kas di akhir tahun 2020.

Up to December 31, 2020, the Company's Cash Flows for Investing Activities were recorded at Rp281.52 billion, decreased by Rp88.59 billion or 23.94% from Rp370.11 billion recorded in 2019. This was caused by a decrease in Cash and cash Equivalents used for Acquisition of Fixed Assets and Right-of-Use-asset amounting to Rp74.63 billion or 19.07%, and an increase in Interest Received amounting to Rp20.55 billion or 223.78%. The decrease in Cash Flows for Investing Activities in 2020 increased the ending balance of cash and cash equivalents in 2020.

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN
CASH FLOWS FOR FINANCING ACTIVITIES

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
 Cash Flows for Financing Activities as of December 31, 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Penerimaan Pinjaman Bank / Receipt of Bank Loans	1.707.013	2.549.710	(842.697)	-33,05%
Pembayaran Pinjaman Bank / Payment of Bank Loans	(1.667.711)	(2.727.752)	1.060.041	-38,86%
Penerimaan Pinjaman dari Pihak Berelasi / Loans Received from Related Parties	23.609	-	23.609	-
Pembayaran Pinjaman pada Pihak Berelasi / Loans Payment to Related Parties	(35.609)	(30.000)	(5.609)	18,70%
Pembayaran Bunga / Interest Paid	(110.698)	(148.626)	37.928	-25,52%
Pembayaran Liabilitas Sewa / Payment of Lease Liabilities	(76.096)	(55.398)	(20.698)	37,36%
Penerimaan dari Penjualan Saham Treasuri / Receipt of Sales Treasury Stock	76.186	-	76.186	-
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang / Receipt of Long-Term Bank Loans	-	700.000	(700.000)	-100,00%
Pelunasan Pinjaman Bank Jangka Panjang / Payment of Long-Term Bank Loans	(370.000)	(300.000)	(70.000)	23,33%
Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham / Payment of Dividend to the Company's Shareholders	(128.076)	(145.920)	17.844	-12,23%
Pembayaran Dividen kepada Kepentingan Nonpengendali / Payment of Dividend to Non-Controlling Interest	(28)	(18)	(10)	58,17%
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows Used for Financing Activities	(581.410)	(158.004)	(423.406)	267,97%

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp581,41 miliar, naik Rp423,41 miliar atau 267,97% bila dibandingkan nilai pada 31 Desember 2019 sebesar Rp158,00 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Penerimaan Pinjaman Bank sebesar Rp842,70 miliar atau 33,05% dan diikuti dengan nihilnya Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang di tahun 2020. Peningkatan Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan di tahun 2020 memberikan dampak pengurangan beban bunga di tahun selanjutnya.

KINERJA PERUSAHAAN ANAK

Perseroan memiliki sejumlah Perusahaan anak yang bergerak di berbagai bidang pendukung usaha, yaitu: PT Citra Lautan Teduh (CLT), PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE) dan PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA KRATON). Berikut adalah uraian mengenai deskripsi usaha, aktivitas usaha dan kinerja usaha Perusahaan anak Perseroan di tahun 2020.

PT CITRA LAUTAN TEDUH (CLT)

Deskripsi Usaha PT Citra Lautan Teduh

PT Citra Lautan Teduh ("CLT") merupakan perusahaan anak Perseroan yang didirikan di Batam pada tanggal 23 Agustus 1990. Dalam perjalanan bisnisnya, Perseroan resmi mengakuisisi 90% saham CLT pada 12 September 2014 dan dilanjutkan pada 5 Desember 2014, sehingga kepemilikan saham CLT oleh Perseroan meningkat tipis menjadi sebesar 99,50%. CLT merupakan perusahaan anak Perseroan yang bergerak di bidang usaha pabrikasi (*manufacturing*) tiang pancang beton putar pra-tekan atau *Pre-Tensioned Centrifugal Precast Concrete Piles*. Produk tiang pancang beton putar pra-tekan merupakan salah satu material tiang pancang yang digunakan untuk konstruksi pondasi alam (*depth foundation*) yang digunakan untuk berbagai macam bangunan seperti gedung, pelabuhan, jembatan, tangki minyak, dan bangunan lainnya.

Hingga akhir tahun 2020, kepemilikan saham Perseroan atas CLT adalah sebesar 99,50%, sementara sisanya yang hanya sebesar 0,50% dimiliki oleh Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya.

Aktivitas Usaha PT Citra Lautan Teduh

Pada tahun 2020, CLT telah menjalankan aktivitas usahanya dengan baik, antara lain:

1. Menyediakan produk *Full Slab*, Tiang Pancang, hingga Jasa Pemasangan Produk pada Proyek Pembangunan Jembatan Gurindam 12, Kepulauan Riau.
2. Menyediakan produk tiang pancang untuk berbagai proyek, antara lain Pembangunan Pabrik, Pondasi Baru dan Overhaul Tanki Pertamina, Pembangunan Jalan Lintas Anambas, dan lainnya.
3. Menyediakan produk-produk beton pracetak lainnya untuk kebutuhan proyek-proyek Daerah maupun Nasional.

Up to December 31, 2020, the Company's Cash Flows for Financing Activities were recorded at Rp581.41 billion, increased by Rp423.41 billion or 267.97% from Rp158.00 billion recorded in 2019. This was caused by a decrease in Receipt of Bank Loans amounting to Rp842.70 billion or 33.05%, followed by zero Receipt of Long-Term Bank Loans in 2020. The increase in Cash Flows for Financing Activities in 2020 decreased interest expense in the following year.

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES

The Company has several Subsidiaries engaging in various businesses that support the Company's operations, namely PT Citra Lautan Teduh (CLT), PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKA KOBE), and PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA KRATON). The following is a description on the Subsidiaries' business, activities, and performance in 2020.

PT CITRA LAUTAN TEDUH (CLT)

Business Description

PT Citra Lautan Teduh ("CLT") was established in Batam on August 23, 1990. Observing CLT's business journey, on September 12, 2014, the Company acquired 90% of CLT's shares with follow-up of share acquisition on December 5, 2014; thus, making the Company's share ownership of CLT reaching 99.50%. CLT then becomes the Company's subsidiary that is engaged in the manufacturing business of pre-tension centrifugal precast concrete piles. The pre-tension centrifugal precast concrete pile product is one of the pile materials used in the construction of natural foundation (depth foundation), which is applicable for various types of building construction, such as buildings, seaports, bridges, oil tanks, and other buildings.

Up to the end of 2020, the Company's share ownership of CLT is 99.50% while the remaining 0.50% is owned by Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya.

Business Activities

In 2020, CLT carried out the following business activities:

1. Provided Full Slab and Piles products, as well as Product Installation Services for the Gurindam 12 Bridge Construction Project in Riau Islands.
2. Provided piles products for various projects, including construction of factory, new foundation, and tank overhaul for Pertamina, Anambas road construction of, and others.
3. Provided other precast concrete products for regional and national projects.

Kinerja PT Citra Lautan Teduh
Performance of PT Citra Lautan Teduh
**Kinerja PT Citra Lautan Teduh Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
 Performance of PT Citra Lautan Teduh in 2019-2020 (in millions of Rupiah)**

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
(Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income (Loss) for the Year	9.871	22.011	(12.140)	-55,15%
Aset / Assets	513.885	619.868	(105.983)	-17,10%
Liabilitas / Liabilities	184.755	288.765	(104.010)	-36,02%
Ekuitas / Equity	329.130	331.103	(1.973)	-0,60%

Laba Komprehensif Tahun Berjalan CLT di tahun 2020 tercatat sebesar Rp9,87 miliar, turun Rp12,14 miliar atau 55,15% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp22,01 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh dampak dari pandemi covid 19 yang mengakibatkan menurunnya penjualan serta diikuti dengan penurunan laba.

Aset CLT di tahun 2020 tercatat sebesar Rp513,89 miliar, turun Rp105,98 miliar atau 17,10% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp619,87 miliar. Penurunan aset disebabkan karena pembayaran piutang jatuh tempo oleh pelanggan dan berbanding lurus dengan pembayaran utang mitra kerja.

Liabilitas CLT di tahun 2020 tercatat sebesar Rp184,76 miliar, turun Rp104,01 miliar atau 36,02% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp288,77 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pembayaran utang jatuh tempo kepada mitra kerja, utang leasing jangka panjang dan penurunan pada utang prestasi.

Ekuitas CLT di tahun 2020 tercatat sebesar Rp329,13 miliar, turun Rp1,97 miliar atau 0,60% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp331,10 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh dampak penerapan PSAK 71 dan pembagian dividen kepada pemegang saham.

PT WIJAYA KARYA KOMPONEN BETON (WIKA KOBE)
Deskripsi Usaha PT Wijaya Karya Komponen Beton

PT Wijaya Karya Komponen Beton ("WIKA KOBE") merupakan perusahaan anak Perseroan yang didirikan pada tanggal 10 Mei 2012 sebagai hasil kerjasama antara Perseroan dan PT Komponindo Betonjaya ("KOBE"). Sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar WIKA KOBE, Perseroan ini didirikan untuk mengantisipasi permintaan atas produk-produk beton dari berbagai proyek yang didanai oleh Pemerintah Jepang, seperti proyek pembangunan MRT di Jakarta.

Hingga akhir tahun 2020, kepemilikan saham Perseroan atas WIKA KOBE adalah sebesar 51,00%, sementara kepemilikan saham sisanya sebesar 49,00% dipegang oleh PT Komponen Beton Jaya.

CLT's Comprehensive Income for the Year 2020 were recorded at Rp9.87 billion, decreased by Rp12.14 billion or 55.15% from Rp22.01 billion recorded in 2019. This was caused by the Covid-19 pandemic which resulted in decreased sales and was followed by a decrease in profits.

CLT's Assets in 2020 were recorded at Rp513.89 billion, decreased by Rp105.98 billion or 17.10% from Rp619.87 billion recorded in 2019. The decrease was due to the payment of due receivables by customers and was directly proportional to the payment of payables from business partners.

CLT's Liabilities in 2020 were recorded at Rp184.76 billion, decreased by Rp104.01 billion or 36.02% from Rp288.77 billion recorded in 2019. The decrease was due to the payment of due payables to partners, long-term lease debt, and a decrease in performance debt.

CLT's Equity in 2020 were recorded at Rp329.13 billion, decreased by Rp1.97 billion or 0.60% from Rp331.10 billion recorded in 2019. This was caused by the implementation of PSAK 71 and dividend distribution to shareholders.

PT WIJAYA KARYA KOMPONEN BETON (WIKA KOBE)
Business Description

PT Wijaya Karya Komponen Beton ("WIKA KOBE") is a subsidiary of the Company which was established on May 10, 2012, as the result of cooperation between the Company and PT Komponindo Betonjaya ("KOBE"). As stated in the Articles of Association of WIKA KOBE, the establishment of this company aims to anticipate the demands for concrete products from various projects funded by the Japanese government, such as MRT construction project in Jakarta.

Up to the end of 2020, the Company's share ownership of WIKA KOBE is 51.00% while the remaining 49.00% is owned by PT Komponen Beton Jaya.

Aktivitas Usaha PT Wijaya Karya Komponen Beton

Pada tahun 2020, PT WIKA KOBE telah menjalankan aktivitas usahanya dengan baik, antara lain:

1. Menyediakan produk *precast* jembatan dan jasa *stressing* dan *erection* pada Proyek Jembatan Cipeucang, Tangerang Selatan.
2. Melakukan pemancangan *Sheetpile* pada Proyek Kali Cikarinjing, Kawasan Industri Mitra Karawang.
3. Memasok *Precast Tunnel Segment* pada Proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta (MRT Jakarta) Phase 2 (I) CP-201, Jakarta.
4. Memasok *Precast Concrete Hollow Girder* pada Proyek Dermaga Patimbangan Paket 3, Subang.
5. Menyediakan produk-produk lainnya untuk berbagai proyek baik Daerah maupun Nasional.

Business Activities

In 2020, WIKA KOBE carried out the following business activities:

1. Provided bridge precast products and stressing and erection services at the Cipeucang Bridge Project, South Tangerang.
2. Conducted Sheetpile erection at Kali Cikarinjing Project, Mitra Karawang Industrial Area.
3. Supplied Precast Tunnel Segment for the Jakarta Mass Rapid Transit Project (MRT Jakarta) Phase 2 (I) CP-201, Jakarta.
4. Supplied Precast Concrete Hollow Girder at the Patimbangan Pier Project, Package 3, Subang.
5. Provided other products for regional and national projects.

Kinerja PT Wijaya Karya Komponen Beton

Performance of PT Wijaya Karya Komponen Beton

Kinerja PT Wijaya Karya Komponen Beton Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
Performance of PT Wijaya Karya Komponen Beton in 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
(Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income (Loss) for the Year	(6.096)	(4.253)	(1.843)	43,33%
Aset / Assets	170.124	132.700	37.424	28,20%
Liabilitas / Liabilities	79.076	35.556	43.520	122,40%
Ekuitas / Equity	91.048	97.144	(6.096)	-6,28%

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan WIKA KOBE di tahun 2020 tercatat sebesar Rp6,10 miliar, naik Rp1,84 miliar atau 43,33% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp4,25 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada biaya produksi atas perolehan kontrak yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

WIKA KOBE's Comprehensive Loss for the Year 2020 were recorded at Rp6.10 billion, increased by Rp1.84 billion or 43.33% from Rp4.25 billion recorded in 2019. This was caused by increase in production costs for the acquisition of contracts that were not previously calculated.

Aset WIKA KOBE di tahun 2020 tercatat sebesar Rp170,12 miliar, naik Rp37,42 miliar atau 28,20% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp132,70 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh diterimanya uang muka yang cukup besar atas proyek MRT Tahap 2.

WIKA KOBE's Assets in 2020 were recorded at Rp170.12 billion, increased by Rp37.42 billion or 28.20% from Rp132.70 billion recorded in 2019. This was caused by the receipt of a fairly large advances for the MRT Phase 2 project.

Liabilitas WIKA KOBE di tahun 2020 tercatat sebesar Rp79,08 miliar, naik Rp43,52 miliar atau 122,40% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp35,56 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh diterimanya uang muka yang cukup besar atas proyek MRT Tahap 2.

WIKA KOBE's Liabilities in 2020 were recorded at Rp79.08 billion, increased by Rp43.52 billion or 122.40% from Rp35.56 billion recorded in 2019. This was caused by the receipt of a fairly large advances for the MRT Phase 2 project.

Ekuitas WIKA KOBE di tahun 2020 tercatat sebesar Rp91,05 miliar, turun Rp6,10 miliar atau 6,28% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp97,14 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh kerugian yang terjadi di tahun berjalan.

WIKA KOBE's Equity in 2020 were recorded at Rp91.05 billion, increased by Rp6.10 billion or 6.28% from Rp97.14 billion recorded in 2019. This was caused by loss in the current year.

PT WIJAYA KARYA KRAKATAU BETON (WIKA KRATON)

Deskripsi Usaha PT Wijaya Karya Krakatau Beton

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (“WIKA KRATON”) merupakan perusahaan anak Perseroan yang didirikan pada tanggal 16 Desember 2013 sebagai hasil Joint Venture antara Perseroan, PT Krakatau Engineering (bagian dari Krakatau Steel Group) dan entitas induk Perseroan yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau “WIKA”. Pendirian WIKA KRATON dimaksudkan untuk memenuhi permintaan Krakatau Group yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang industri beton pracetak.

Hingga akhir tahun 2020, kepemilikan saham Perseroan atas WIKA KRATON adalah sebesar 60,00%, sementara kepemilikan saham sisanya yaitu sebesar 30% dimiliki oleh PT Krakatau Engineering dan sebesar 10,00% dimiliki oleh WIKA.

Aktivitas Usaha PT Wijaya Karya Krakatau Beton

Pada tahun 2020, WIKA KRATON telah menjalankan aktivitas usahanya dengan baik, antara lain:

1. Menyediakan produk *Ready Mix* untuk mendukung Proyek Tol Serang – Panimbang.
2. Menyediakan produk *Precast Sheetpile* untuk Proyek Labuan, Banten.
3. Mendukung Proyek Gedung Puspitek, Tangerang dengan menyediakan produk-produk beton.
4. Menyediakan produk-produk lainnya untuk berbagai proyek baik Daerah maupun Nasional.

Kinerja PT Wijaya Karya Krakatau Beton

Kinerja PT Wijaya Karya Krakatau Beton Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) /
 Performance of PT Wijaya Karya Krakatau Beton in 2019-2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
(Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income (Loss) for the Year	(4.529)	972	(5.501)	-565,95%
Aset / Assets	115.528	108.100	7.428	6,87%
Liabilitas / Liabilities	65.850	53.893	11.957	22,19%
Ekuitas / Equity	49.678	54.207	(4.529)	-8,36%

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan WIKA KRATON di tahun 2020 tercatat sebesar Rp4,53 miliar, sedangkan pada tahun 2019 PT WIKA KRATON mencatatkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp972 juta. Perubahan tersebut disebabkan oleh lesunya ekonomi makro akibat dari pandemi Covid-19.

Aset WIKA KRATON di tahun 2020 tercatat sebesar Rp115,53 miliar, naik Rp7,43 miliar atau 6,87% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp108,10 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya transaksi kepada Wajib Pajak Wajib Pungut (WP WAPU) sehingga nilai pajak dibayar dimuka meningkat signifikan.

PT WIJAYA KARYA KRAKATAU BETON (WIKA KRATON)

Business Description

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (“WIKA KRATON”) is a subsidiary of the Company which was established on December 16, 2013, as a Joint Venture between the Company, PT Krakatau Engineering (part of Krakatau Steel Group), and the Company’s parent entity – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk or WIKA. The establishment of WIKA KRATON aims to meet the needs of Krakatau Group, a State-Owned Enterprise (SOE), for precast concrete industry.

Up to the end of 2020, the Company’s share ownership of WIKA KRATON is 60.00% while the remaining 30.00% and 10.00% is owned by PT Krakatau Engineering and WIKA, respectively.

Business Activities

In 2020, WIKA KRATON carried out the following business activities:

1. Provided Ready-Mix products to support the Serang - Panimbang Toll Road project.
2. Provided Precast Sheetpile products for the Labuan Project, Banten.
3. Supported the Puspitek Building Project, Tangerang through the provision of concrete products.
4. Provided other products for regional and national projects.

Performance of PT Wijaya Karya Krakatau Beton

WIKA KRATON’s Comprehensive Loss for the Year 2020 were recorded at Rp4.53 billion; while in 2019, WIKA KRATON recorded Comprehensive Income for the Year amounting to Rp972 million. This was caused by the sluggish macro economy due to Covid-19 pandemic.

WIKA KRATON’s Assets in 2020 were recorded at Rp115.53 billion, increased by Rp7.43 billion or 6.87% from Rp108.10 billion recorded in 2019. The increase was due to an increase in transactions to taxpayers (WP WAPU) so that the value of prepaid taxes increased significantly.

Liabilitas WIKA KRATON di tahun 2020 tercatat sebesar Rp65,85 miliar, naik Rp11,96 miliar atau 22,19% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp53,89 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pinjaman modal kerja kepada perbankan melalui induk perusahaan.

WIKA KRATON's Liabilities in 2020 were recorded at Rp65.85 billion, increased by Rp11.96 billion or 22.19% from Rp53.89 billion recorded in 2019. The increase was due to working capital loans to banks through the parent company.

Ekuitas WIKA KRATON di tahun 2020 tercatat sebesar Rp49,68 miliar, turun Rp4,53 miliar atau 8,36% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp54,21 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh kerugian di tahun 2020 sebesar Rp4,53 miliar

WIKA KRATON's Equity in 2020 were recorded at Rp49.68 billion, decreased by Rp4.53 billion or 8.36% from Rp54.21 billion recorded in 2019. This was caused by loss in 2020 by Rp4.53 billion.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perseroan untuk membayar utang dapat dilihat melalui Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Rasio Likuiditas dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka pendek, sedangkan Rasio Solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan Perseroan dalam melunasi seluruh utangnya dengan menggunakan seluruh aset atau modal Perseroan.

SOLVENCY

The Company's capability to pay its debts can be seen using the Liquidity Ratio and Solvability Ratio. The Liquidity Ratio can serve as a benchmark to determine the Company's ability to pay short-term debt, while the Solvability Ratio is used to assess the Company's ability to settle all of its debts using all of its assets or capital.

Perseroan melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga saldo kecukupan kas dan surat berharga dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Perseroan juga mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang andal. Tanggal jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan seperti utang usaha, biaya masih harus dibayar, utang lain-lain dan pinjaman bank jangka pendek adalah kurang dari satu tahun, kecuali untuk liabilitas keuangan seperti utang obligasi dan pinjaman investasi.

The Company manages its liquidity risk by monitoring the profile of loan maturities and sources of funding, maintaining adequate cash and securities balances, and ensuring readiness to maintain market position. The Company also maintains its ability to finance its loans by seeking various sources of binding financing facilities from reliable lenders. The contractual maturity date of financial liabilities, such as trade payables, accrued expenses, other payables, and short-term bank loans, is less than one year, except for financial liabilities, such as bonds payable and investment loans.

Berikut adalah uraian terkait kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka pendek dan jangka panjang di tahun 2020.

The following table describes the Company's capability to pay short-term and long-term debt in 2020.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Short-Term Debt Solvability

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek Tahun 2019-2020 / Short-Term Debt Solvability in 2019-2020			
Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio	Unit	2020	2019
Rasio Kas / Cash Ratio	%	32,77%	25,86%
Rasio Cepat / Quick Ratio	%	94,64%	97,18%
Rasio Lancar / Current Ratio	%	111,51%	115,72%

Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio Kas Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar 32,77%, naik dibandingkan tahun 2019 sebanyak 25,86%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan Kas dan Setara Kas di tahun 2020 diiringi dengan penurunan yang lebih dalam atas Liabilitas Jangka Pendek di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2020 telah terjadi peningkatan kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

Cash Ratio

The Company's Cash Ratio in 2020 was recorded at 32.77%, an increase compared to 25.86% ratio recorded in 2019. This was due to a decrease in Cash and Cash Equivalents as well as a steeper decrease in Current Liabilities in 2020. This shows that there was an improvement in the Company's capability to settle its short-term obligations in 2020.

Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio Cepat Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar 94,64%, turun secara tidak signifikan dibandingkan tahun 2019 sebanyak 97,18%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan Aset Lancar, selain Persediaan, yang lebih dalam dibandingkan penurunan Liabilitas Jangka Pendek. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya terbilang stabil di tahun 2020.

Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio Lancar Perseroan di tahun 2020 tercatat sebanyak 111,51%, turun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 115,72%. Penurunan tidak signifikan tersebut disebabkan oleh penurunan Liabilitas Jangka Pendek yang diimbangi dengan penurunan Aset Lancar di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban lancarnya tetap terjaga di tahun 2020.

Quick Ratio

The Company's Quick Ratio in 2020 was recorded at 94.64%, a relatively insignificant decrease compared to 97.18% ratio recorded in 2019. This was caused by a decrease in Current Assets, other than Inventories, which were steeper than the decrease in Current Liabilities. This shows that the Company's capability to settle its short-term obligations is fairly stable in 2020.

Current Ratio

The Company's Current Ratio in 2020 was recorded at 111.51%, a decrease compared to 115.72% ratio recorded in 2019. This relatively insignificant decrease was caused by a decrease in Current Liabilities which were offset by a decrease in Current Assets in 2020. This shows that the Company's capability to settle its short-term obligations was maintained in 2020.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Long-Term Debt Solvability

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang Tahun 2019-2020 / Long-Term Debt Solvability in 2019-2020

Rasio Solvabilitas / Solvability Ratio	Unit	2020	2019
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) / Debt to Equity Ratio (DER)	%	150,96%	194,66%
Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) / Debt to Assets Ratio (DAR)	%	60,15%	66,06%

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar 150,96%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 194,66%. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya jumlah Liabilitas di tahun 2020 secara signifikan, yaitu 25,05% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbaikan atas kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajibannya di tahun 2020.

Debt to Equity Ratio (DER)

The Debt to Equity Ratio (DER) until the end of 2020 was recorded at 150.96%, a decrease compared to 194.66% ratio recorded in 2019. This of the Company was due to a significant decrease in Total Liabilities in 2020, reaching 25.05% compared to 2019. This shows that there was an improvement in the Company's capability to settle its obligations in 2020.

Rasio Liabilitas terhadap Aset

Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar 60,15%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 66,06%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah Liabilitas yang signifikan di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan telah berhasil meningkatkan kemampuannya untuk melunasi seluruh kewajiban dengan menggunakan aktiva yang tersedia.

Debt to Assets Ratio

The Debt to Assets Ratio (DAR) until the end of 2020 was recorded at 60.15%, a decrease compared to 66.06% ratio recorded in 2019. This was due to a significant decrease in Total Liabilities in 2020. This shows that the Company managed to improve its capability to settle all obligations using available assets.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

Kolektibilitas Piutang Tahun 2019-2020 / Receivables Collectability in 2019-2020

Rasio Solvabilitas / Solvability Ratio	Unit	2020	2019
Rata-rata Pengumpulan Piutang (Collection Period) / Average Collection Period	hari / days	54,57	67,48

Rata-rata pengumpulan piutang (collection period) Perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar 54,57 hari, lebih rendah 12,91 hari atau 19,13% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 67,48 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas piutang Perseroan pada tahun 2020 telah meningkat.

The average collection period of the Company's receivables in 2020 was 54.57 days, lower 12.91 days or 19.13% compared to 67.48 days recorded in 2019. This shows that the collectability level of the Company's receivables in 2020 increased.

Rincian analisis umur piutang usaha dihitung sejak tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of analysis of trade receivables age calculated from the maturity date are as follows:

Analisis Umur Piutang Tahun 2019-2020 / Analysis of Receivables Maturity in 2019-2020				
Analisis Umur Piutang / Analysis of Receivables Maturity	2020	%	2019	%
Belum Jatuh Tempo / Not yet Due	310.532	38,03%	187.798	14,42%
> 0-3 bulan / > 0-3 months	131.903	16,15%	603.549	46,36%
> 3-6 bulan / > 3-6 months	41.741	5,11%	175.218	13,46%
> 6-9 bulan / > 6-9 months	59.910	7,34%	114.414	8,79%
> 9-12 bulan / > 9-12 months	35.869	4,39%	33.434	2,57%
Di di atas 12 bulan / above 12 months	236.664	28,98%	187.521	14,40%
Jumlah / Total	816.619	100,00%	1.301.934	100,00%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	(183.881)		(31.885)	
Neto / Net	632.738		1.270.049	

Pada tahun 2020, 38,03% Piutang Usaha Perseroan tercatat Belum Jatuh Tempo atau sebesar Rp310,53 miliar dan 16,15% berumur diantara 0-3 bulan atau setara dengan Rp131,90 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas piutang Perseroan masih dalam kategori lancar sehingga dapat mendukung perputaran modal kerja.

In 2020, 38.03% of the Company's Trade Receivables, or amounting to Rp310.53 billion, were recorded as Not yet Due and 16.15%, or equal to Rp131.90 billion, were between 0-3 months old. This shows that the collectability level of the Company's receivables is still in the category of 'current' so that it can support working capital turnover.

RASIO KEUANGAN LAINNYA

OTHER FINANCIAL RATIOS

Rasio Keuangan Lainnya Tahun 2019-2020 / Other Financial Ratios in 2019-2020				
Rasio Keuangan Lainnya / Other Financial Ratio	Unit	2020	2019	
Rasio Aktivitas / Activity Ratio				
Periode Pengumpulan / Collecting Period	hari / days	54,57	67,48	
Perputaran Persediaan / Inventory Turnover	x (kali) / x (times)	60,32	59,17	
Perputaran Piutang / Receivables Turnover	x (kali) / x (times)	7,59	5,41	
Perputaran Aset Lancar / Current Assets Turnover	x (kali) / x (times)	0,92	0,99	
Perputaran Aset Tetap / Fixed Assets Turnover	x (kali) / x (times)	1,63	2,35	
Perputaran Total Aset / Total Assets Turnover	x (kali) / x (times)	58,37	69,85	
Perputaran Modal Kerja / Working Capital Turnover	x (kali) / x (times)	8,87s	7,27	
Rasio Leverage / Leverage Ratio				
Rasio Total Utang terhadap Aset / Total Debt to Assets Ratio	%	60,15	66,06	
Rasio Kemampuan Membayar Bunga / Interest Payment Capability Ratio	%	246,28	554,86	
Rasio Rentabilitas / Rentability Ratio				
Margin Laba Kotor / Gross Profit Margin	%	6,44%	13,42%	
EBITDA Margin	%	8,73%	14,21%	
Rasio Produksi / Production Ratio	%	96,16%	88,77	
Margin Laba Bersih / Net Profit Margin	%	2,67%	7,23%	
Rasio Pengembalian atas Investasi (ROI) / Return on Investment (ROI)	%	5,31%	9,91%	
Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE) / Return on Equity (ROE)	%	4,35%	18,63%	
Rasio Pengembalian atas Aset (ROA) / Return on Assets (ROA)	%	1,45%	4,94%	

Analisis Rasio Aktivitas

Periode Pengumpulan di tahun 2020 tercatat selama 54,57 hari, turun bila dibandingkan tahun 2019 selama 67,48 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu memperoleh pencairan piutangnya lebih cepat.

Perputaran Persediaan di tahun 2020 tercatat sebesar 60,32x, naik bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 59,17x. Hal tersebut menunjukkan bahwa persediaan membutuhkan waktu lebih lama 1,15 hari untuk bisa terjual.

Perputaran Piutang di tahun 2020 tercatat sebesar 7,59x, naik bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,41x. Hal tersebut menunjukkan bahwa Piutang Perseroan mampu diterima kas dari pelanggan lebih cepat.

Perputaran Aset Lancar di tahun 2020 tercatat sebesar 0,92x, turun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,99x. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan Perseroan memperoleh penjualan lebih kecil di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019 jika melihat proporsi aset lancarnya.

Perputaran Aset Tetap di tahun 2020 tercatat sebesar 1,63x, turun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,35x. Hal tersebut menunjukkan bahwa utilitas Perseroan menurun dibandingkan dengan tahun 2019.

Perputaran Total Aset di tahun 2020 tercatat sebesar 58,37x, turun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 69,85x. Hal tersebut menunjukkan bahwa utilitas Perseroan dalam modal kerja dan aset tetap menurun dibandingkan dengan tahun 2019.

Perputaran Modal Kerja di tahun 2020 tercatat sebesar 8,87x, naik bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 7,27x. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan lebih efektif dalam menggunakan sumber dana pembiayaan jangka pendeknya.

Analisis Rasio Leverage

Rasio Kemampuan Membayar Bunga di tahun 2020 tercatat sebesar 246,28%, turun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 554,86%. Hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas Perseroan menurun sehingga kemampuan membayar bunga menurun dibandingkan dengan tahun lalu.

Analisis Rasio Rentabilitas

Secara keseluruhan, seluruh komponen Rasio Rentabilitas di tahun 2020 menunjukkan tren penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Berikut adalah uraian terkait kinerja Rasio Rentabilitas di tahun 2020.

Margin Laba Kotor di tahun 2020 tercatat sebesar 6,44%, turun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 13,42%. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan keuntungan bruto yang didapatkan Perseroan dari pendapatan yang dihasilkan.

Analysis of Activity Ratio

The collection period in 2020 was recorded at 54.57 days, a decrease compared to that of 2019 at 67.48 days. This shows that the Company was able to obtain its receivables more quickly.

Inventory Turnover in 2020 was recorded at 60.32x, an increase compared to that of 2019 at 59.17x. This shows that inventory took 1.15 days longer to sell.

Receivable Turnover in 2020 was recorded at 7.59x, an increase compared to that of 2019 at 5.41x. This shows that the Company's receivables were able to receive cash from customers more quickly.

Current Assets Turnover in 2020 was recorded at 0.92x, a decrease compared to that of 2019 at 0.99x. This shows that Company obtained lower sales in 2020 compared to that of 2019 based on the proportion of its current assets.

Fixed Asset Turnover in 2020 was recorded at 1.63x, a decrease compared to that of 2019 at 2.35x. This shows that the Company's utility decreased compared to that of 2019.

Total Asset Turnover in 2020 was recorded at 58.37x, a decrease compared to that of 2019 at 69.85x. This shows that the Company's utility in working capital and fixed assets decreased compared to that of 2019.

Working Capital Turnover in 2020 was recorded at 8.87x, an increase compared to that of 2019 at 7.27x. This shows that the Company is more effective in using its short-term funding sources.

Leverage Ratio Analysis

The ratio of the ability to pay interest in 2020 was recorded at 246.28%, a decrease compared to that of 2019 at 554.86%. This shows that the Company's profitability has decreased so that the ability to pay interest has decreased compared to last year.

Rentability Ratio Analysis

In general, all components of the Rentability Ratio in 2020 showed a downward trend when compared to 2019. The following is a description of the performance of the Rentability Ratio in 2020.

Gross Profit Margin in 2020 reached 6.44%, a decrease compared to 13.42% recorded in 2019. This shows that there was a decrease in the gross profit obtained by the Company from the revenue generated.

EBITDA margin di tahun 2020 tercatat sebesar 8,73%, turun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 14,21%. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penghematan biaya yang dilakukan oleh Perseroan telah menurun di tahun 2020.

EBITDA margin in 2020 reached 8.73%, a decrease compared to 14.21% recorded in 2019. This shows that the effectiveness of cost savings made by the Company decreased in 2020.

Rasio Produksi di tahun 2020 tercatat sebesar 96,16%, naik bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 88,77%. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi Perseroan lebih tinggi sebagai dampak dari utilitas Perseroan yang rendah.

The Production Ratio in 2020 was recorded at 96.16%, an increase compared to that of 2019 which was 88.77%. This shows that the Company's production costs are higher as a result of the Company's low utility.

Margin Laba Bersih di tahun 2020 tercatat sebesar 2,67%, turun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 7,23%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bersih di tahun 2020 telah menurun.

Net Profit Margin in 2020 reached 2.67%, a decrease compared to 7.23% recorded in 2019. This shows that the Company's capability to generate net profit in 2020 decreased.

Rasio Pengembalian atas Investasi (ROI) di tahun 2020 tercatat sebesar 5,31%, turun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 9,91%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampulabaan Perseroan menurun sebagai dampak dari utilitas Perseroan yang rendah.

Return on Investment (ROI) ratio in 2020 was recorded at 5.31%, a decrease compared to that of 2019 which was 9.91%. This shows that the profitability of the Company decreased as a result of the Company's low utility.

Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE) di tahun 2020 tercatat sebesar 4,35%, turun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 18,63%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri telah menurun di tahun 2020.

Return on Equity (ROE) in 2020 reached 4.35%, a decrease compared to 18.63% recorded in 2019. This shows that the Company's capability to generate profits using its own capital decreased in 2020.

Rasio Pengembalian atas Aset di tahun 2020 tercatat sebesar 1,45%, turun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan aset yang tersedia telah menurun di tahun 2020.

Return on Assets (ROA) in 2020 reached 1.45%, a decrease compared to 4.94% recorded in 2019. This shows that the Company's capability to generate profits using its available assets decreased in 2020.

STRUKTUR MODAL

Rincian Struktur Modal

Struktur Modal Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Capital Structure in 2019-2020 (in millions of Rupiah)						
Uraian / Description	2020		2019		Perubahan / Change	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Liabilitas / Liabilities	5.118.444	60,15%	6.829.449	66,06%	(1.711.005)	-25,05%
Ekuitas / Equity	3.390.573	39,85%	3.508.446	33,94%	(117.873)	-3,36%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	8.509.017	100,00%	10.337.895	100,00%	(1.828.878)	-17,69%

Komposisi struktur modal Perseroan pada tahun 2020 terdiri dari 60,15% Liabilitas dan 39,85% berupa Ekuitas. Komposisi pada tahun 2020 tersebut mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Struktur Modal tahun 2019 yang terdiri dari 66,06% Liabilitas dan 33,94% Ekuitas. Struktur Modal Perseroan di tahun 2020 yang berupa Liabilitas menurun sebesar 25,05%, diikuti oleh komponen Ekuitas yang juga turun sebesar 3,36% bila dibandingkan dengan nilai pada tahun 2019.

CAPITAL STRUCTURE

Details of Capital Structure

The Company's capital structure in 2020 consisted of 60.15% Liabilities and 39.85% Equity. There was a change in capital structure composition of the Company in 2020 compared to the 2019 Capital Structure, which consisted 66.06% Liabilities and 33.94% Equity. The Company's Capital Structure in 2020 in the form of Liabilities decreased by 25.05%, while the Equity component decreased by 3.36% when compared to the value in 2019.

Kebijakan Manajemen dan Dasar Penentuan Kebijakan Atas Struktur Modal

Perseroan memiliki kebijakan untuk menitikberatkan penggunaan Liabilitas sebagai sumber modalnya. Sampai dengan 2020, struktur Modal Perseroan masih didominasi oleh Liabilitas. Dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha tahun 2020, Perseroan melakukan kebijakan struktur modal dengan pengurangan Liabilitas sebesar Rp1.711,01 miliar dan pengurangan Ekuitas sebesar Rp117,87 miliar.

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas. Selain itu, Perseroan juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipertimbangkan oleh Perseroan serta telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Perseroan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi total pinjaman berdampak bunga dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran rasio pengungkit Perseroan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Termasuk dalam total pinjaman berdampak bunga adalah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang, utang lain-lain dan utang sewa pembiayaan.

Rasio pengungkit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) / (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Pinjaman Jangka Pendek / Short-Term Loans	492.236	894.634	(402.398)	-44,98%
Pinjaman Jangka Panjang / Long-Term Loans	424.343	784.212	(359.869)	-45,89%
Jumlah / Total	916.579	1.678.846	(762.267)	-45,40%

Management Policy and Basis of Determination of Policy on Capital Structure

The Company has a policy to emphasize the use of liabilities as a source of capital. As of 2020, the Company's capital structure continued to be dominated by liabilities. In order to manage business activities in 2020, the Company implemented a capital structure policy with a reduction in Liabilities of Rp1,711.01 billion and a reduction in Equity of Rp117.87 billion.

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that the Company can maintain healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company is required under their respective loan agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement has been complied with by the relevant entities. In addition, the Company is required by the Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, effective August 16, 2007, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. Such externally imposed capital requirements are considered by the Company and decided at the General Meeting of shareholders (GMS).

The Company manages their capital structure and makes adjustments to it, if necessary, based on changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares, or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies, or processes during the years ended on December 31, 2020 and 2019.

The Company monitors its capital using gearing ratio, by dividing interest-bearing loan to total equity attributable to equity holders of the parent entity. The Company's policy is to maintain its gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in Indonesia in order to secure access to financing at a reasonable cost. Including in interest-bearing loan are short-term bank loans and long-term bank loans, other payables, and finance lease payable.

The gearing ratios as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

(dalam jutaan Rupiah) / (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal	%
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Total Equity Attributable to Owner of the Parent Entity	3.324.714	3.437.718	(113.004)	-3,29%
Gearing Ratio	27,57%	48,84%		

*) Pada tahun 2020, diluar Pinjaman Kredit Mitra Usaha

*) Exclude Supply-Chain Financing in 2020

*) Pada tahun 2019, termasuk Pinjaman Kredit Mitra Usaha

*) Include Supply-Chain Financing in 2019

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Dalam rangka mendukung kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki ikatan material untuk investasi barang modal yang dilakukan pada tahun 2020 dan yang masih berlangsung sejak periode sebelumnya. Berikut adalah uraian mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan yang meliputi: pihak yang melakukan ikatan material dengan Perseroan, tujuan ikatan, jangka waktu, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah yang direncanakan Perseroan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

In order to support its operational activities, the Company has entered into material commitments for capital goods investments during 2020, which have been ongoing since the previous period. The following is a description of the material commitments for investment in capital goods with their explanation: parties having material commitments with the Company, purpose of commitments, period, source of funds expected to fulfill the commitments, denominating currency, and steps planned by the Company to protect its business against the risk from related foreign currency positions.

Ikatan material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Goods Investment

Pihak 1 / 1st Party	Pihak 2 / 2nd Party	Tujuan Ikatan / Purpose of Commitment	Jangka Waktu / Time Period	Sumber Dana / Source of Fund	Mata Uang / Currency	Proteksi Risiko Mata Uang Asing / Risk Protection of Foreign Currency
PT Wijaya Karya Beton Tbk	PT Sumiden Serasi Wire Product	Jual beli PC Strand, PC Wire dan PC Bar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku utama / Sale and purchase of PC Strand, PC Wire, and PC Bar to meet the needs for main raw materials.	Perjanjian dibuat 14 Agustus 2020 s/d 14 Januari 2021, atau sampai dengan adanya perubahan atas kesepakatan para pihak, total harga di luar PPN / The agreement was made on August 14, 2020 and is valid until January 14, 2021, or until there are changes as agreed by the parties, total price excludes the VAT.	Kas Internal Perseroan / Company's internal cash.	Rupiah	Perseroan tidak menerapkan proteksi mata uang asing, karena Transaksi dilakukan dalam bentuk Rupiah / The Company did not apply foreign currency protection because the transaction was made in Rupiah.
PT Wijaya Karya Beton Tbk.	PT Kingdom Indah	Jual beli Spiral Wire, PC Wire, PC Strand, PC Bar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku utama / Sale and purchase of Spiral Wire, PC Wire, PC Strand, and PC Bar to meet the needs for main raw materials.	Perjanjian dibuat, 22 Oktober 2020 s/d 22 Januari 2021 (untuk PC Bar), 25 Nopember 2020 s/d 28 Februari 2021 (untuk PC Strand dan Wire) dan 07 September 2020 s/d 07 Desember 2020 (untuk Spiral Wire), atau sampai dengan adanya perubahan atas kesepakatan kedua belah pihak, total harga di luar PPN / The agreement is valid from October 22, 2020 until January 22, 2020 (for PC Bar), from November 25, 2020 until February 28, 2021 (for PC Strand and Wire), and from September 7, 2020 until Desember 7, 2020 (for Spiral Wire), or until there are changes as agreed by the parties, total price excludes the VAT.	Kas Internal Perseroan / Company's internal cash.	Rupiah	Perseroan tidak Menerapkan proteksi mata uang asing, karena transaksi dilakukan dalam bentuk Rupiah / The Company did not apply foreign currency protection because the transaction was made in Rupiah.
PT Wijaya Karya Beton Tbk.	PT Intiroda Makmur	Jual beli Spiral Wire, PC Bar, PC Wire, PC Strand untuk memenuhi kebutuhan bahan baku utama / Sale and purchase of Spiral Wire, PC Bar, PC Wire, and PC Strand to meet the needs for main raw materials.	Perjanjian dibuat 29 Desember 2020 s/d 28 Februari 2021 (untuk PC Strand, Bar dan Wire) dan 11 Desember 2020 (untuk Spiral Wire) atau sampai dengan adanya perubahan atas kesepakatan kedua belah pihak, total harga di luar PPN / The agreement is valid from Desember 29, 2020 until February 28, 2021 (for PC Strand, Bar, and Wire) and from Desember 11, 2020 (for Spiral Wire), or until there are changes as agreed by the parties, total price excludes the VAT.	Kas Internal Perseroan / Company's internal cash.	Rupiah	Perseroan tidak menerapkan proteksi mata uang asing, karena transaksi dilakukan dalam bentuk Rupiah / The Company did not apply foreign currency protection because the transaction was made in Rupiah.

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi Barang Modal merupakan salah satu aktivitas yang berperan penting dalam pengembangan Perseroan, dimana investasi barang modal adalah aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah Aset atau Investasi yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

CAPITAL GOODS INVESTMENT

Capital goods investment is one of the activities having an important role in the Company's development, in which investment in capital goods is the activity of spending funds used to purchase a number of assets or to make an investment expected to provide future benefit value.

Di tahun 2020, Perseroan merealisasikan Investasi Barang Modal sebesar Rp317,84 miliar yang terdiri dari tanah, tambang, prasarana, bangunan, perlengkapan kantor, peralatan dan cetakan. Berikut adalah uraian terkait jenis, nilai dan tujuan dari Investasi Barang Modal pada tahun 2020.

In 2020, the Company realized capital goods investment of Rp317.84 billion consisting of land, mines, infrastructure, buildings, office equipment, plant equipment, and molds. The following is a description of the types, values, and objectives of investment in capital goods in 2020.

Investasi Barang Modal Tahun 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Capital Goods Investment in 2020 (in millions of Rupiah)		
Jenis Investasi Barang Modal / Types of Capital Goods Investment	Tujuan / Purpose	Nilai / Value
Tanah / Land	Perluasan pabrik untuk produk baru / Expansion of plant for new product	202.509
Tambang / Mine	Penambahan sarana di quarry / Additional facilities at the quarry	267
Prasarana / Infrastructure	Pengembangan prasarana di pabrik / Infrastructure development at plants	9.691
Bangunan / Building	Pembangunan plant baru / Construction of new plants	1.348
Perlengkapan Kantor / Office Equipment	Pengembangan perlengkapan kantor, IT / Office equipment expansion, IT	190
Peralatan / Plant Equipment	Pembelian alat / Purchase of equipment	75.080
Cetakan / Mold	Menunjang produksi / Supporting production	28.759
Jumlah / Total		317.844

Investasi Barang Modal pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp317,84 miliar, turun Rp46,90 miliar atau 12,86% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp364,74 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan oleh berkurangnya investasi barang modal pada prasarana, bangunan, perlengkapan kantor, cetakan dan nihilnya nilai Aset Sewa Pembiayaan di tahun 2020.

Capital goods investment in 2020 was recorded at Rp317.84 billion, decreased by Rp46.90 billion or 12.86% from Rp364.74 billion recorded in 2019. This was due to reduced investment in capital goods in infrastructure, buildings, office equipment, and molds, and zero value of Assets Under Financial Lease in 2020.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

MATERIAL INFORMATION AND FACT SUBSEQUENT TO BALANCE SHEET DATE

There was no material information and fact subsequent to balance sheet date.

PENINGKATAN ATAU PENURUNAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN

MATERIAL INCREASE OR DECREASE FROM SALES OR REVENUE

Kinerja Pendapatan Tahun 2019 - 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Revenue Performance in 2019-2020 (in millions of Rupiah)						
Segmen Operasi / Operating Segment	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)	
	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Jumlah / Total	Kontribusi Terhadap jumlah Pendapatan Konsolidasian / Contribution to Total Consolidated Revenues	Nominal	%
Beton / Concrete	4.040.796	84,12%	6.015.554	84,92%	(1.974.758)	-32,83%
Quarry	30.311	0,63%	75.346	1,06%	(45.036)	-59,77%
Jasa / Services	732.252	15,24%	992.484	14,01%	(260.231)	-26,22%
Jumlah Pendapatan / Total Revenues	4.803.359	100,00%	7.083.384	100,00%	(2.280.025)	-32,19%

Pendapatan Usaha Perseroan di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Perseroan mencatatkan Pendapatan Usaha tahun 2020 sebesar Rp4.803,36 miliar, turun Rp2.280,03 miliar atau 32,19% dari tahun 2019 sebesar Rp7.083,38 miliar. Penurunan tersebut berasal dari seluruh komponen Pendapatan

The Company's Revenues in 2020 decreased significantly. The Company recorded Revenues in 2020 of Rp4,803.36 billion, decreased by Rp2,280.03 billion or 32.19% from Rp7,083.38 billion recorded in 2019. The decrease originated from all components of Revenues, especially the Concrete Products

Usaha, terutama Segmen Beton dan Jasa. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menekan laju aktivitas ekonomi di Indonesia sehingga menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek-proyek yang dijalankan Perseroan. Walaupun menurun secara signifikan, namun Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat kembali ke jalur pertumbuhan yang positif di tahun 2021 seiring dengan semakin menurunnya kasus Covid-19.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN

Sepanjang tahun 2020, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat melemah 1,33% yang disebabkan oleh peningkatan permintaan dolar AS sebagai respon ketidakpastian perekonomian global yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Hal tersebut berdampak terhadap biaya produksi Perseroan dikarenakan adanya sejumlah material utama, seperti besi dan baja yang mengacu kepada harga internasional. Penguatan nilai Dolar terhadap Rupiah ini mengakibatkan naiknya HPP, namun hal ini tidak berpengaruh kepada Pendapatan yang diterima oleh Perseroan.

DAMPAK NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas dimasa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perseroan. Eksposur Perseroan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang pengadaan barang dan jasa dalam mata uang USD dan SGD.

Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 5% perubahan kurs nilai mata uang asing terhadap laba sebelum pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

(dalam jutaan Rupiah) / (in millions of Rupiah)

	2020	2019
Kenaikan 5% / 5% Increase	60.152.504	(266.609.235)
Penurunan 5% / 5% Decrease	(60.152.504)	266.609.235

PROSPEK USAHA

Manajemen menilai bahwa prospek usaha Perseroan di tahun 2021 masih terjaga dengan baik. Analisa tersebut tidak terlepas dari kekuatan transformasi Perseroan yang diarahkan untuk menjaga kelangsungan usahanya melalui rangkaian kebijakan strategis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nasional, serta prospek usaha industri konstruksi nasional.

Prospek pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 diproyeksikan menguat terbatas. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporannya yang berjudul *World Economic Outlook Update* (edisi Januari 2021) pertumbuhan

and Services Segments, due to the Covid-19 pandemic which suppressed the pace of economic activity in Indonesia and caused delays in the implementation of projects of the Company. Even though there was a significant decrease, the Management believes that the Company will be able to return to a positive growth track in 2021 in line with the decline in the Covid-19 case.

IMPACT OF PRICE CHANGE ON REVENUES

Throughout the year, Rupiah exchange rate against the United States Dollar weakened 1.33% due to increased demand for US Dollars in response to global economic uncertainty affected by the Covid-19 pandemic. This situation had an impact on the Company's production costs due to a number of main materials, such as iron and steel, referred to international prices. The strengthening of USD Dollar against the Rupiah resulted in an increase in COGS; however, this did not affect the revenue received by the Company.

IMPACT OF FOREIGN EXCHANGE RATES

Foreign exchange rate risk is the risk of changes in the fair value of future cash flows from a financial instrument that fluctuates due to changes in exchange rates of a foreign currency used by the Company. The Company's exposure to exchange rate fluctuations comes primarily from the debt for procurement of goods and services denominated in USD and SGD.

The following is a sensitivity analysis of the effect of 5% changes in foreign currency exchange rates on profit before tax with all other variables considered constant:

BUSINESS OUTLOOK

The Management considers that the Company's business outlook in 2021 is still well maintained. This analysis is inseparable from the strength of the Company's transformation, which is directed at maintaining its business continuity through a series of strategic policies taking into account global and national economic conditions, as well as the business prospects of the national construction industry.

The prospect of global economic growth in 2021 is projected to strengthen in a limited manner. Based on data compiled by the International Monetary Fund (IMF) in its report entitled *World Economic Outlook Update* (January 2021 edition) global

ekonomi global di tahun 2021 diproyeksikan mencapai 5,5%, naik bila dibandingkan proyeksi tahun 2020 sebesar -3,5%. Hal tersebut didasari oleh semakin meningkatnya aktivitas ekonomi dunia setelah pintu perekonomian di berbagai negara kembali dibuka sejalan dengan menurunnya kasus Covid-19. Perbaikan ekonomi diestimasikan akan dialami oleh kumpulan negara maju dengan pertumbuhan sebesar 4,3% di tahun 2021, naik bila dibandingkan proyeksi tahun 2020 sebesar -4,9%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada kumpulan negara berkembang di tahun 2021 diproyeksikan mencapai 6,3%, membaik dibandingkan proyeksi tahun 2020 sebesar -2,4%.

Seiring dengan meningkatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi nasional turut diprediksikan akan semakin pulih di tahun mendatang.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang bertemakan “Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan masih berada dalam kisaran target pertumbuhan jangka menengah, meskipun masih diliputi ketidakpastian.

economic growth in 2021 is projected to reach 5.5%, up from the 2020 projection of -3.5%. This is based on the increasing global economic activity after economic doors in various countries are reopened in line with the decline in the Covid-19 case. Developed countries will experience economic improvement with a growth of 4.3% in 2021, an increase compared to the 2020 projection of -4.9%. Meanwhile, economic growth of developing countries group in 2021 is projected to reach 6.3%, an improvement compared to the 2020 projection of -2.4%.

In line with the increasing projection of global economic growth for 2021, national economic growth is also predicted to continue to recover in the upcoming year.

Based on the 2021 State Budget (APBN) themed “Supporting the Acceleration of Economic Recovery and Strengthening of Reformation”, Indonesia’s economic growth is projected to remain within the range of the medium-term growth target, although still shrouded in uncertainty.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2021 / Macroeconomic Basic Assumption for 2021 State Budget

Indikator Ekonomi / Economic Indicator	Proyeksi APBN 2021 / Projection for 2021 State Budget
Pertumbuhan Ekonomi / Economic Growth	5,0%
Inflasi / Inflation	3,0%
Nilai Tukar Rupiah / Rupiah Exchange Rate	Rp14.600/USD
Tingkat Bunga SBN 10 Tahun / 10-year Government Bonds Interest Rate	7,29%
Harga Minyak / Oil Price	USD45/barel / USD45/barrel
Lifting Minyak / Oil Lifting	750 ribu barel/hari / 750 thousand barrels/day
Lifting Gas / Gas Lifting	1.007 ribu barel setara minyak/hari / 1,007 thousand barrels of oil equivalent/day

(Sumber: APBN 2021) / (Source: 2021 State Budget)

Dalam APBN 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi untuk dapat mencapai 5,0%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -2,07%. Target pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat tercapai melalui penanganan Covid-19 yang semakin membaik, dukungan stimulus fiskal untuk melanjutkan program PEN dalam rangka pemulihan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan membaik di tahun 2021.

Tingkat inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 3,0%, lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi tahun 2020 sebesar 1,68%. Penetapan target inflasi tersebut dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun faktor ekonomi lainnya yang diproyeksikan dapat tercapai di tahun 2021 adalah nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebesar Rp14.600/USD seiring dengan pulihnya ekonomi domestik di tahun 2021. Tingkat Bunga SBN 10 Tahun diproyeksikan sebesar 7,29% yang dipengaruhi oleh risiko

In the 2021 State Budget, the government is targeting economic growth to reach 5.0%, higher than the realization of economic growth in 2020 of -2.07%. This economic growth target is expected to be achieved through the improved handling of Covid-19, fiscal stimulus support to continue the PEN program in the context of economic recovery, and global economic growth which is projected to improve in 2021.

The inflation rate is projected to be in the range of 3.0%, higher than the 2020 inflation rate of 1.68%. The inflation target is determined by the recovery in private consumption activities and national economic growth.

Another economic factor projected to be achieved in 2021 is the Rupiah exchange rate against the US dollar of Rp14,600/ USD as the domestic economy recovers in 2021. The 10-year Government Bonds interest rate is projected at 7.29% as it may be affected by the risk of uncertainty in global financial

ketidakpastian pasar keuangan global dan prospek membaiknya perekonomian Indonesia. Sedangkan harga minyak yang dipengaruhi oleh peluang perbaikan kondisi perekonomian global diprediksikan berada di level USD45/barrel.

Guna mencapai target makroekonomi yang telah ditetapkan untuk tahun 2021, pemerintah memproyeksikan Pendapatan Negara sebesar Rp1,743,6 triliun yang berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.444,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp298,2 triliun dan Hibah sebesar Rp0,9 triliun. Sedangkan, Belanja Negara untuk tahun 2021 diharapkan dapat mencapai Rp2.750,0 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.954,5 triliun dan Transfer ke Daerah & Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun. Proyeksi jumlah Belanja Negara yang melebihi Pendapatan Negara di tahun 2021 akan menyebabkan defisit sebesar Rp1.006,4 triliun atau setara dengan 5,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sejalan dengan membaiknya prospek perekonomian nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan industri konstruksi nasional untuk dapat bertumbuh di kisaran 5,2% sampai dengan 6,7% di tahun 2021. Proyeksi tersebut didukung oleh komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang akan diarahkan untuk penyediaan layanan dasar dan peningkatan konektivitas di tahun 2021. Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur tahun 2021 sebesar Rp417,4 triliun, tertinggi sejak 5 (lima) tahun terakhir.

markets and prospects for recovery in the Indonesian economy. Meanwhile, oil prices, which are affected by the opportunity for improvement in global economic conditions, are predicted to be at the level of USD45/barrel.

In order to achieve the macroeconomic targets set for 2021, the government is projecting State Revenue of Rp1,743.6 trillion from Tax Revenues of Rp1,444.5 trillion, Non-Tax State Revenues of Rp298.2 trillion, and Grants of Rp0.9 trillion. Meanwhile, State Expenditures for 2021 are expected to reach Rp2,750.0 trillion, consisting of Central Government Expenditures of Rp1,954.5 trillion and Transfers to Regions & Village Funds of Rp795.5 trillion. The projection of the amount of State Expenditure that exceeds State Revenue in 2021 will cause a deficit of Rp1,006.4 trillion or equal to 5.7% of Gross Domestic Product (GDP).

In line with the improving prospects for the national economy, the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (PPN/Bappenas) estimates the national construction industry to grow in the range of 5.2% to 6.7% in 2021. This projection is supported by the government's commitment to infrastructure development, which will be directed at providing basic services and improving connectivity in 2021. The government sets the infrastructure budget for 2021 at Rp417.4 trillion, the highest since the last 5 (five) years.

Alokasi Anggaran Infrastruktur Tahun 2016 – 2021 (dalam triliun Rupiah) / Infrastructure Budget Allocation in 2016-2021 (in trillions of Rupiah)	
Tahun / Year	Anggaran Infrastruktur / Infrastructure Budget
2021	417,4
2020	281,1
2019	394,1
2018	394,0
2017	381,2
2016	269,1

(Sumber: APBN 2021) / (Source: 2021 State Budget)

Arah kebijakan anggaran infrastruktur tahun 2021 adalah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur pascapandemi Covid-19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, dan pemukiman merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Selain itu pembangunan infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata dan penyelesaian kegiatan prioritas tahun 2020 yang tertunda juga merupakan arah kebijakan utama pemerintah di tahun 2021.

The direction of infrastructure budget policy for 2021 is to continue the infrastructure development after the Covid-19 pandemic by strengthening digital infrastructure and encouraging logistical efficiency and connectivity. The development of public health facilities and the provision of basic necessities, such as water, sanitation, and housing, are some of the government's efforts to support the strengthening of the national health system. In addition, the development of labor-intensive infrastructure that supports industrial and tourism areas and the completion of pending 2020 priority activities are also the main policy directions for the government in 2021.

Berikut adalah rencana pencapaian di bidang infrastruktur yang terdiri dari Pelayanan Dasar, Konektivitas dan Energi dan Ketenagalistrikan.

The following table is an achievement plan in the infrastructure sector consisting of Basic Services, Connectivity, and Energy and Electricity.

Rencana Pencapaian di Bidang Infrastruktur / Achievement Plan in Infrastructure Sector	
Pelayanan Dasar / Basic Services	Rumah Susun & Rumah Khusus - 10.706 unit / Flats and Special Homes - 10,706 units
	Bendungan - 53 unit (43 on going & 10 baru) / Dams - 53 units (43 ongoing projects and 10 new projects)
	Jaringan Irigasi - Pembangunan 600 km dan Rehabilitasi 3.900 km / Irrigation network - 600-km construction and 3,900-km of rehabilitation
Konektivitas / Connectivity	Pembangunan Jalan - 965,4 km / Road constructions - 965.4 km
	Jembatan - 26,9 km / Bridges - 26.9 km
	Jalur KA - 446,56 km/sp / Railroads - 446.56 km'sp
Energi Ketenagalistrikan / Electrical Energy	Bandara - 10 unit/lokasi / Airports - 10 units/location
	Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga - 120.776 SR / Natural Gas for Household - 120,776 SR
	PLTS Rooftop dan PLTS Cold Storage - 11,8 MWp / Rooftop Solar Power Generator and Cold Storage Solar Power Generator – 11.8 MWp

(Sumber: APBN 2021) / (Source: 2021 State Budget)

Dengan semakin membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi global, ekonomi nasional dan tingginya komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur nasional melalui alokasi anggaran yang semakin meningkat, Manajemen berkeyakinan bahwa prospek usaha Perseroan untuk tahun yang akan datang masih sangat cerah.

With the increasingly improving prospects for global economic growth and the national economy, as well as the high commitment of the government to national infrastructure development through increasing budget allocations, the Management believes that the Company's business outlook for the coming year shall remain bright.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020

Perseroan menetapkan target pencapaian kinerja setiap tahunnya dengan tetap melakukan evaluasi dalam setiap pencapaiannya. Berikut adalah uraian mengenai hasil kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2020 Revisi yang meliputi Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian, Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, Struktur Modal, Pembagian Dividen, Kapasitas Produksi Segmen Usaha dan Pendapatan Segmen Usaha.

COMPARISON BETWEEN 2020 TARGETS AND REALIZATION

The Company sets targets of performance achievement each year by continuing to evaluate each of its previous achievements. The following is a description of the results of 2020 performance compared to the targets set in the Revised 2020 RKAP, which include Consolidated Statements of Profit (Loss), Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Statements of Cash Flows, Capital Structure, Dividend Distribution, Production Capacity of Business Segments, and Revenues of Business Segment.

Perbandingan antara Target dan Realisasi atas Kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2020

Comparison between Targets and Realization on Performance of Consolidated Statements of Financial Position in 2020

Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Comparison between Targets and Realization of Consolidated Statements of Financial Position in 2020 (in millions of Rupiah)			
Uraian / Description	RKAP 2020 Revisi / Revised 2020 RKAP	Realisasi 2020 / Realization in 2020	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Aset / Assets	8.845.211	8.509.017	96,20%
Aset Lancar / Current Assets	5.689.103	5.248.208	92,25%
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	3.156.108	3.260.809	103,32%
Liabilitas / Liabilities	5.544.012	5.118.444	92,32%
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	5.030.288	4.706.621	93,57%
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	513.725	411.824	80,16%
Ekuitas / Equity	3.301.199	3.390.573	102,71%

Realisasi Aset di tahun 2020 mencapai 96,20% dari target RKAP 2020 Revisi. Belum tercapainya target yang ditetapkan dikarenakan pencapaian Aset Lancar yang belum maksimal, yaitu sebesar 92,25% dari target RKAP 2020 Revisi. Sedangkan Aset Tidak Lancar berhasil membukukan pencapaian yang melebihi target yaitu sebesar 103,32%. Hal tersebut disebabkan oleh Saldo Piutang dan Pendapatan akan diterima yang berhasil ditekankan.

The realization of Assets in 2020 reached 96.20% of the target set in the Revised 2020 RKAP. This failure in achieving the target was due to inoptimum achievement of Current Asset, i.e. 92.25% of the Revised 2020 RKAP target. Meanwhile, Non-Current Assets managed to book achievement exceeding the target at 103.32%. This was due to suppressed Accounts Receivable and Accrued Income.

Realisasi Liabilitas di tahun 2020 mencapai 92,32% dari target RKAP 2020. Belum optimalnya pencapaian tersebut dikarenakan pencapaian Liabilitas Jangka Pendek sebesar 93,57% dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar 80,16% dari nilai RKAP 2020. Hal tersebut disebabkan oleh Saldo utang usaha yang berhasil ditekankan.

The realization of Liabilities in 2020 reached 93.32% of the target set in the 2020 RKAP. This failure in achieving the target was due to the achievements of Current Liabilities and Non-Current Liabilities of 93.57% and 80.16%, respectively, of the 2020 RKAP target. This was due to the suppressed trade payables.

Di sisi lain, pencapaian Ekuitas di tahun 2020 melebihi target RKAP yang ditetapkan yaitu sebesar 102,71%.

On the other hand, Equity of the Company in 2020 exceeded the 2020 RKAP target at 102.71%.

Perbandingan antara Target dan Realisasi atas Kinerja Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Tahun 2020

Comparison between Targets and Realization on Performance of Consolidated Statements of Profit or Loss in 2020

Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Tahun 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Comparison between Targets and Realization of Consolidated Statements of Profit or Loss in 2020 (in millions of Rupiah)			
Uraian / Description	RKAP 2020 Revisi / Revised 2020 RKAP	Realisasi 2020 / Realization in 2020	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Kontrak Baru / New Contracts	5.256.940	4.274.660	81,31%
Pendapatan Usaha / Revenues	4.985.647	4.803.359	96,34%
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	(4.708.357)	(4.493.836)	95,44%
Laba Bruto / Gross Profit	277.290	309.523	111,62%
Beban Usaha / Operating Expenses	(118.878)	(125.126)	105,26%
Laba Usaha / Operating Income	158.412	184.397	116,40%
Penghasilan (Beban) Lain-lain / Other Income (Expenses)	(30.480)	(53.892)	176,81%
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	127.932	130.505	102,01%
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	107.099	123.147	114,98%
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income		(2.157)	
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year		120.990	

Pendapatan Usaha Perseroan di tahun 2020 mencapai 96,34% dari target RKAP 2020 yang disebabkan oleh mundurnya pelaksanaan beberapa proyek. Di sisi lain, realisasi Laba Bruto dan Laba Tahun Berjalan di tahun 2020 telah melebihi target RKAP 2020 yang telah ditetapkan, masing-masing sebesar 111,62% dan 114,98%. Hal tersebut disebabkan oleh rangkaian strategi yang dilakukan Manajemen dalam mempertahankan profitabilitasnya di tahun 2020, antara lain langkah efisiensi dan *cost reduction* di segala bidang.

The Company's Revenues in 2020 reached 96.34% of the 2020 RKAP target due to the delay of several projects. On the other hand, the realization of Gross Profit and Profit for the Year 2020 exceeded the set RKAP 2020 target, at 111.62% and 114.98%, respectively. This was due to a series of strategies implemented by the Management to maintain its profitability in 2020, among others through efficiency and cost reduction in every aspect.

Perbandingan antara Target dan Realisasi atas Kinerja Laporan Arus Kas Konsolidasian Tahun 2020

Comparison between Targets and Realization on Performance of Consolidated Statements of Cash Flows in 2020

Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Arus Kas Konsolidasian Tahun 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Comparison between Targets and Realization of Consolidated Statements of Cash Flows in 2020 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	RKAP 2020 Revisi / Revised 2020 RKAP	Realisasi 2020 / Realization in 2020	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Flows Provided by Operating Activities	120.081	803.264	668,94%
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Flows Used for Investing Activities	(240.714)	(281.518)	116,95%
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows Used for Financing Activities	(681.590)	(581.410)	85,30%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents	(802.223)	(59.665)	7,44%
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun / Effect of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalent at End of Year	(369)	(399)	108,14%
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun / Beginning Balance of Cash and Cash Equivalents	1.602.281	1.602.281	100,00%
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun / Ending Balance of Cash and Cash Equivalents	799.689	1.542.217	192,85%

Realisasi Arus Kas Konsolidasian Perseroan tahun 2020 sebagian besar mencatat pencapaian di atas target RKAP 2020 Revisi. Arus Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2020 mencatat pencapaian hingga 668,94% terhadap target RKAP 2020. Pencapaian yang melebihi target juga dapat dilihat pada Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang mencapai 116,95%. Secara keseluruhan pencapaian komponen Arus Kas yang optimal di tahun 2020 lebih memberikan hasil Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun 2020 yang mencapai 192,85% dari target RKAP. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan.

The realization of Company's Consolidated Cash Flow in 2020 mostly recorded achievements above the Revised 2020 RKAP target. Cash Flows from Operating Activities in 2020 recorded an achievement of up to 668.94% of the 2020 RKAP target. Achievements that exceeded the target can also be seen in Cash Flows from Investing Activities which reached 116.95%. Overall, the achievement of the optimal cash flow component in 2020 will provide more cash and cash equivalents at the end of 2020 which reached 192.85% of the RKAP target. This was caused by increase in cash received from customers.

Perbandingan antara Target dan Realisasi atas Indikator Keuangan Tahun 2020

Comparison between Targets and Realization on Financial Indicators in 2020

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Keuangan Tahun 2020 / Comparison between Targets and Realization on Financial Indicators in 2020

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization in 2020	Pencapaian (%) / Achievement (%)
ROI (%)	6,77%	5,31%	78,43%
ROE (%)	3,55%	4,35%	122,54%
Cash Ratio (%)	15,90%	32,77%	206,08%
Current Ratio (%)	113,10%	111,51%	98,59%
Collection Period (hari)	92,80	48,08	51,81%
Perputaran Persediaan (hari) / Inventory Turnover (days)	85,61	60,32	70,46%
Perputaran Total Aset (%) / Total Assets Turnover (%)	57,52%	58,37%	101,48%
Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (%) / Total Equity to Total Assets (%)	37,32%	39,07%	104,69%

Perseroan mencatatkan pencapaian yang tinggi pada realisasi *Current Ratio* di tahun 2020 sebesar 206,08% terhadap RKAP 2020 Revisi. Selain itu, *Current Ratio* juga turut mencatatkan pencapaian sebesar 98,59% terhadap target yang telah ditetapkan. Namun disisi lain, penggunaan Ekuitas untuk menghasilkan Laba Tahun Berjalan dengan menggunakan acuan ROE di tahun 2020 hanya mampu mencapai 53,65% dari target RKAP 2020 Revisi. Hal tersebut disebabkan oleh produktivitas pabrik yang tidak tercapai sesuai dengan RKAP.

The Company recorded a high achievement in the realization of the *Current Ratio* in 2020 amounting to 206.08% against the Revised 2020 RKAP. In addition, the *Current Ratio* recorded an achievement of 98.59% against the set target. However, the use of Equity to generate Profit for the Year using the ROE reference in 2020 was only able to reach 53.65% of the Revised 2020 RKAP target. This was due to by plant productivity that is not achieved in accordance with the RKAP.

Perbandingan antara Target dan Realisasi atas Struktur Modal Tahun 2020

Comparison between Targets and Realization on Capital Structure in 2020

Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal Tahun 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Comparison between Targets and Realization on Capital Structure in 2020 (in millions of Rupiah)						
Uraian / Description	RKAP 2020		Realisasi 2020 / Realization in 2020		Pencapaian (%) / Achievement (%)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Liabilitas / Liabilities	5.544.012	62,68%	5.118.444	60,15%	92,32%	95,97%
Ekuitas / Equity	3.301.199	37,32%	3.390.573	39,85%	102,71%	106,77%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	8.845.211	100,00%	8.509.017	100,00%	96,20%	100,00%

Perseroan berhasil mencapai target struktur modal yang telah ditetapkan dalam RKAP 2020 Revisi pada jumlah Ekuitas dengan pencapaian target sebesar 102,71%. Realisasi Liabilitas juga berhasil mencatatkan pencapaian target yang cukup tinggi yaitu sebesar 92,32%. Secara keseluruhan, Jumlah Liabilitas dan Ekuitas yang telah direalisasikan berhasil mencapai target sebesar 96,20% dari jumlah RKAP 2020 Revisi.

The Company succeeded in achieving the capital structure target set in the Revised 2020 RKAP on the amount of Equity with a target achievement of 102.71%. Realization of Liabilities also managed to achieve a relatively high target of 92.32%. Overall, the total realized Liabilities and Equity managed to reach the target of 96.20% of the total Revised 2020 RKAP.

Perbandingan antara Target dan Realisasi atas Pembagian Dividen Tahun 2020

Comparison between Targets and Realization on Dividend Distribution in 2020

Perbandingan Target dan Realisasi Pembagian Dividen Tahun 2020 (dalam jutaan Rupiah) / Comparison between Targets and Realization on Dividend Distribution in 2020 (in millions of Rupiah)			
Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization in 2020	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Dividen Kas yang Dibagikan / Cash Dividend Distributed	128.076	128.076	100,00%
Dividen per Lembar Saham / Dividend per Share			
Rasio Pembagian Dividen Terhadap Laba Bersih / Dividend Distribution Ratio to Net Income		25,00%	

Realisasi Dividen Kas yang Dibagikan di tahun 2020 berhasil mencapai 100% dari target RKAP 2020 Revisi.

Realization of Cash Dividends Distributed in 2020 succeeded in reaching 100% of the Revised 2020 RKAP target.

Perbandingan antara Target dan Realisasi atas Kinerja Pendapatan Segmen Usaha Tahun 2020

Comparison between Targets and Realization on Business Segment Revenue Performance in 2020

Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Segmen Usaha Tahun 2020 (dalam satuan proyek) / Comparison between Targets and Realization on Business Segment Revenue Performance in 2020 (in project unit)			
Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization in 2020	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Segmen Beton / Concrete Segment	3.950.563	4.040.796	102,28%
Segmen Quarry / Quarry Segment	45.000	30.311	67,36%
Segmen Jasa / Service Segment	990.084	732.252	73,96%
Jumlah / Total	4.985.647	4.803.359	96,34%

Realisasi Pendapatan segmen usaha tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.803,36 miliar atau mencapai 96,34% dari target RKAP 2020 Revisi sebesar Rp4.985,65 miliar. Pencapaian tersebut terutama didukung oleh Segmen Beton yang mencapai 102,28% dari target RKAP 2020 Revisi. Namun di sisi lain, pencapaian Pendapatan Segmen Quarry dan Jasa hanya mencapai masing-masing sebesar 67,36% dan 73,96% dari RKAP 2020 disebabkan oleh adanya penurunan prolehan kontrak terutama terkait jalan tol di segmen Quarry dan pengerjaan Proyek Jalan Tol Layang A.P. Pettarani yang sudah mencapai tahap akhir di segmen Jasa.

Revenue realization for the business segment in 2020 was recorded at Rp4,803.36 billion or 96.34% of the Revised 2020 RKAP target at Rp4,985.65 billion. Such achievement was mainly supported by the Concrete Segment which reached 102.28% of the Revised 2020 RKAP target. On the other hand, the Quarry and Service Segment Revenues only achieved 67.36% and 73.96% respectively of the 2020 RKAP which was caused by decrease in order book, mainly related toll road in Quarry segment and A.P. Pettarani Toll Road Project that is entering the last stage of work.

PROYEKSI TAHUN 2021

Sesuai dengan program pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh Pemerintah serta tertuang dalam APBN 2021, serta dampak Covid-19 terhadap iklim ekonomi Indonesia pada tahun 2021, maka Manajemen menyusun RKAP 2021 berdasarkan alokasi anggaran infrastruktur tersebut ditambah dengan rencana investasi pihak swasta dalam negeri dan penanaman modal asing.

Dalam menentukan target kinerja untuk tahun 2021, Manajemen akan tetap bersikap hati-hati dalam menyiasati perkembangan infrastruktur nasional berdasarkan atas asumsi-asumsi berikut:

Tabel Asumsi Makroekonomi Tahun 2021 (dalam jutaan Rupiah) / Table of 2021 Macroeconomic Assumptions (in millions of Rupiah)

Indikator / Indicator	Asumsi Makroekonomi Tahun 2021 / 2021 Macroeconomic Assumptions
Pertumbuhan Ekonomi / Economic Growth	5,0%
Tingkat Inflasi / Inflation Rate	3,0%
Kurs Rupiah per USD / Rupiah Exchange Rate per USD	14.600
Tingkat Bunga SBN 10 Tahun / 10-Year SBN Interest Rate	7,29%
Harga Minyak Mentah / Crude Oil Price	USD45/barel / USD45/barrel

(Sumber: APBN 2021) / (Source: 2021 State Budget)

Berikut adalah target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2021 yang meliputi Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian, Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, Struktur Modal, Pembagian Dividen, Kapasitas Produksi Segmen Usaha dan Pendapatan Segmen Usaha.

PROJECTIONS FOR 2021

In accordance with the infrastructure development program launched by the government and contained in the 2021 State Budget, as well as the impact of Covid-19 on the Indonesian economic climate in 2021, the Management prepares the 2021 RKAP based on the infrastructure budget allocation and the plans for domestic private investment and foreign investment.

In determining performance targets for 2021, the Management will remain prudent in dealing with national infrastructure developments based on the following assumptions:

The following are targets set in the 2021 RKAP which include Consolidated Statements of Profit or Loss, Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Statements of Cash Flows, Capital Structure, Dividend Distribution, Production Capacity for Business Segments, and Revenue for Business Segments.

Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2021

Projection for Consolidated Statements of Financial Position in 2021

Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2021 (dalam jutaan Rupiah) / Projection for Consolidated Statements of Financial Position in 2021 (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	Proyeksi 2021 / Projection for 2021
Aset / Assets	9.789.289
Aset Lancar / Current Assets	6.165.145
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	3.624.145
Liabilitas / Liabilities	6.068.876
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	5.317.783
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	751.093
Ekuitas / Equity	3.720.413

Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Tahun 2021

Projection for Consolidated Statements of Profit or Loss in 2021

Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Tahun 2021 (dalam jutaan Rupiah) / Projection for Consolidated Statements of Profit or Loss in 2021 (in millions of Rupiah)	
Uraian / Description	Proyeksi 2021 / Projection for 2021
Kontrak Baru / New Contracts	12.829.428
Pendapatan Usaha / Revenues	7.387.415
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	(6.646.168)
Laba Bruto / Gross Profit	741.247
Beban Usaha / Operating Expenses	(136.317)
Laba Usaha / Operating Income	604.930
Penghasilan (Beban) Lain-lain / Other Income (Expenses)	(136.043)
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	468.887
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	370.952
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	370.952

Proyeksi Laporan Arus Kas Konsolidasian Tahun 2021

Projection for Consolidated Statements of Cash Flows in 2021

Proyeksi Laporan Arus Kas Konsolidasian Tahun 2021 (dalam jutaan Rupiah) / Projection for Consolidated Statements of Cash Flows in 2021 (in millions of Rupiah)	
Uraian / Description	Proyeksi 2021 / Projection for 2021
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi / Net Cash Flows Provided by (Used for) Operating Activities	405.807
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi / Net Cash Flows Provided by (Used for) Investing Activities	(396.440)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows Provided by (Used for) Financing Activities	(187.702)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents	(178.335)
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun / Effect of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalents at End of Year	(312)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun / Beginning Balance of Cash and Cash Equivalents	1.421.352
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun / Ending Balance of Cash and Cash Equivalents	1.242.705

Proyeksi Indikator Keuangan Tahun 2021

Projection for Financial Indicators in 2021

Proyeksi Indikator Keuangan Tahun 2021 / Projection for Financial Indicators in 2021	
Uraian / Description	Proyeksi 2021 / Projection for 2021
ROI (%)	7,85%
ROE (%)	11,69%
Cash Ratio (%)	23,37%
Current Ratio (%)	115,93%
Collection Period (hari) / (days)	56,28
Perputaran Persediaan (hari) / Inventory Turnover (days)	59,19
Perputaran Total Aset (%) / Total Assets Turnover (%)	76,85%
Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (%) / Total Equity to Total Assets (%)	38,00%

Proyeksi Struktur Modal Tahun 2021

Projection for Capital Structure in 2021

Proyeksi Struktur Modal Tahun 2021 (dalam jutaan Rupiah) / Projection for Capital Structure in 2021 (in millions of Rupiah)		
Uraian / Description	Proyeksi 2021 / Projection for 2021	
	Nominal	%
Liabilitas / Liabilities	6.068.876	62,00%
Ekuitas / Equity	3.720.413	38,00%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	9.789.289	100,00%

Proyeksi Pembagian Dividen Tahun 2021

Projection for Dividend Distribution in 2021

Proyeksi Pembagian Dividen Tahun 2021 (dalam jutaan Rupiah) / Projection for Dividend Distribution in 2021 (in millions of Rupiah)	
Uraian / Description	Proyeksi 2021 / Projection for 2021
Dividen Kas yang Dibagikan / Cash Dividend Distributed	128.104
Dividen per Lembar Saham / Dividend per Share	
Rasio Pembagian Dividen Terhadap Laba Bersih / Dividend Distribution Ratio to Net Income	34,53%

ASPEK PEMASARAN STRATEGI PEMASARAN

Di tengah persaingan yang semakin ketat di industri beton pracetak, Manajemen telah melaksanakan langkah-langkah pemasaran yang strategis dan tepat untuk mempertahankan pangsa pasar domestik, serta meningkatkan penjualan ke luar negeri. Rangkaian strategi pemasaran yang telah diterapkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi pemasaran dengan menggunakan daya saing WIKA sebagai induk untuk memenangkan tender.
2. Meningkatkan sinergi bisnis *backward forward integration* antara induk dan anak.
3. Digitalisasi informasi pasar melalui persiapan pasar dini, serta penargetan potensi dan sasaran secara digital menggunakan informasi terkini.
4. Melaksanakan *bundling system* dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
5. *Digital Marketing* melalui perencanaan dengan konsep CRM-SCI *integrated*.
6. Menciptakan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki WIKA BETON, antara lain variasi produk, sebaran pabrik, kapasitas produksi yang besar, kualitas produk dan sebaran wilayah penjualan.

PANGSA PASAR

Dalam melakukan pemetaan pangsa pasar industri beton pracetak di Indonesia, Perseroan dibantu konsultan independen. Pangsa pasar diambil dari aktual produksi yang teridentifikasi oleh konsultan independen yang ditunjuk. Berikut adalah hasil market share nasional 2018.

Pada survei yang dilakukan pada tahun 2018, terdapat 67 produsen beton pracetak dengan kapasitas total produksi beton pracetak sebanyak 17,2 juta ton. Di tahun 2018, Perseroan menguasai 19% pasar beton pracetak Indonesia, 46% merupakan produsen beton pracetak anak perusahaan BUMN, dan 54% merupakan produsen beton pracetak swasta lainnya.

MARKETING ASPECT MARKETING STRATEGY

Amid the increasingly fierce competition in the precast concrete industry, the Management has implemented various strategic and appropriate marketing measures to maintain domestic market share and increase overseas sales. The marketing strategies implemented by the Company in 2020 are as follows:

1. Improving marketing synergy by taking advantage of the competitiveness of WIKA, as the parent company, to win tenders.
2. Improving the backward-forward integration business synergy between parent company and subsidiaries.
3. Digitalizing market information through early market preparation, as well as digitally targeting potentials and targets using the latest information.
4. Implementing a bundling system by utilizing existing resources.
5. Conducting digital marketing activity through planning with the integrated CRM-SCI concept.
6. Creating business opportunities by utilizing the potentials of WIKA BETON, including product variations, plant distribution, large production capacity, product quality, and sales areas distribution.

MARKET SHARE

In mapping the market share of the precast concrete industry in Indonesia, the Company is assisted by an independent consultant. The market share of the Company is taken from the actual production identified by the appointed independent consultant. The following are the results of the 2018 national market share.

In a survey conducted in 2018, there were 67 precast concrete producers with a total production capacity of 17.2 million tons of precast concrete. In 2018, the Company controlled 19% of the Indonesian precast concrete market, of which 46% were precast concrete producers of state-owned enterprises' subsidiaries, and 54% were other private precast concrete producers.

Berbekal pengalaman di industri beton pracetak sampai dengan saat ini, telah memberikan banyak pelajaran bagi Perseroan dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar. Berbagai penghargaan nasional maupun internasional telah diperoleh sebagai apresiasi kinerja Perseroan. Untuk mempertahankan pangsa pasarnya, pada tahun 2020 Perseroan melakukan sejumlah langkah strategis usaha sebagai berikut:

1. Meluncurkan *Supply Chain Management (SCM)* sebagai solusi rantai pasok dan meningkatkan daya saing perseroan.
2. Pembentukan Divisi Operasi dan Divisi Pengelolaan Material sebagai salah satu peningkatan penjualan dan laba korporasi.
3. Pengembangan dan penguasaan material alam di beberapa lokasi yang potensial untuk meningkatkan daya saing industri *Ready-mix* dan *Quarry*.
4. Produksi *Slab Track* proyek kereta cepat Jakarta – Bandung.
5. Pembangunan jalur pipa untuk mendukung WIKA Group dalam proyek SPAM.
6. Menjadi kontraktor spesialis di *Trackwork* dan *Railway Crossing*.
7. Memasuki bisnis *Structural Health Monitoring System (SHMS)* untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
8. Penetrasi pasar perumahan melalui desain rumah tapak dan rumah susun pracetak tahan gempa untuk memenuhi *backlog* penyediaan perumahan nasional.
9. Penjajagan bisnis *admixture* sebagai solusi pemenuhan kebutuhan *admixture*.
10. Sistem modular *precast* sebagai solusi yang kompetitif dan efisien untuk pembangunan *sabo dam*.
11. Kerja sama dengan perusahaan spesialis penunjang konstruksi untuk meningkatkan daya saing Perseroan.
12. Penjajakan bisnis *repairing* dan *retrofitting* untuk bersinergi dengan bisnis SHMS.
13. Pembentukan unit *mobile concrete* di lokasi proyek sebagai solusi persaingan harga yang kompetitif.
14. Melakukan program *cost reduction* di WIKA BETON Group melalui reposisi unit kerja dan SDM.
15. Implementasi IT di semua lini bisnis.
16. Melaksanakan investasi secara selektif dan berdampak langsung pada penjualan dan laba korporasi.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan memiliki kebijakan untuk memberikan hak seluruh pemegang saham untuk membagikan dividen sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Besaran dividen senantiasa mempertimbangkan laba bersih yang didapat, kondisi keuangan, tingkat kesehatan Perseroan, tingkat pertumbuhan usaha ke depan dan rencana pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company's experience in the precast concrete industry to date has provided a number of valuable lessons to elevate its efforts to meet the needs of the market. Various national and international awards have been obtained as an appreciation for the Company's performance. To maintain its market share, the Company took a number of strategic business steps in 2020 as follows:

1. Launching of *Supply Chain Management (SCM)* as a supply chain solution and means to leverage the Company's competitiveness.
2. Establishment of the Operations Division and the Material Management Division as one of the ways to increase sales and corporate profits.
3. Development and control of natural materials in several potential locations to leverage the competitiveness of the Ready-Mix and Quarry industries.
4. Production of *Slab Track* for the Jakarta-Bandung fast train project.
5. Construction of a pipeline to support WIKA Group in the SPAM project.
6. Becoming a specialist contractor in *Trackwork* and *Railway Crossing*.
7. Entering into the *Structural Health Monitoring System (SHMS)* business to leverage the Company's competitiveness.
8. Penetration into housing market through the design of earthquake-resistant landed houses and precast flats to meet the backlog of national housing supply.
9. Exploration of the *admixture* business as a solution to meeting *admixture* needs.
10. Establishment of a modular *precast* system as a competitive and efficient solution for the construction of *sabo dam*.
11. Cooperation with specialist construction support companies to leverage the Company's competitiveness.
12. Exploration of the *repairing* and *retrofitting* businesses to synergize with the SHMS business.
13. Establishment of *mobile concrete* units at the project sites as a competitive price solution.
14. Implementation of a *cost reduction* program at WIKA BETON Group through repositioning of work units and human resources.
15. Implementation of IT in all lines of business.
16. Implementation of selective investments with a direct impact on sales and corporate profits.

DIVIDEND POLICY

The Company has a policy to realize the rights of all shareholders for dividend distribution, at least once a year. The amount of dividends always takes into account the net profit earned, financial condition, the soundness of the Company, future business growth rates, and business development plans, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders (GMS) to determine otherwise in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association as well as the prevailing laws and regulations.

Perseroan dapat mengumumkan pembagian dividen pada tahun dimana Perseroan membukukan laba ditahan yang positif. Sebelum berakhirnya tahun buku, dividen interim dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor serta memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini, Direksi menentukan pembagian dividen interim setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah akhir tahun buku tersebut Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara renteng jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan. Penentuan waktu, jumlah dan bentuk pembayaran dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi. Namun demikian, tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan dapat membayarkan dividen pada tahun-tahun mendatang.

Keputusan Direksi Perseroan dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada:

- Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan.
- Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan.
- Prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang.
- Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya.
- Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya.
- Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait.

Setelah keputusan untuk membayar dividen dihasilkan, selanjutnya dividen tersebut akan dibayar dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan (*withholding tax*) yang berlaku di Indonesia.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana saat ini sebesar 20%. Pemegang saham baru mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang modal sahamnya telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen. Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak tertentu yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu (*negative covenant*) yang dapat merugikan pemegang saham publik.

The Company may announce the distribution of dividends in the year in which the Company records positive retained earnings. Prior to the end of the fiscal year, interim dividends can be distributed as long as they are permitted by the Company's Articles of Association and if the distribution of the interim dividends does not cause the Company's net assets to be less than the total issued and paid-up capital, taking into account the provision for mandatory reserves as stipulated in the Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.

In this case, the Board of Directors shall determine the distribution of interim dividends after obtaining approval from the Board of Commissioners. If, after the end of the fiscal year, the Company suffers a loss, then the interim dividends that have been distributed must be returned by the shareholders to the Company. The Board of Directors and Board of Commissioners will be jointly responsible if the interim dividends are not returned to the Company. Determination of the time, amount, and form of dividend payment will depend on recommendations from the Board of Directors. However, there is no certainty that the Company will be able to pay dividends in the coming years.

The decision of the Company's Board of Directors to recommend dividend payment depends on:

- Results of the Company's business activities and cash flow.
- Estimations of the Company's financial performance and working capital requirements.
- Future business prospects of the Company.
- Capital expenditures and other investment plans of the Company.
- Investment planning and other growth.
- General economic and business conditions, along with other factors deemed relevant by the Company's Board of Directors, as well as the limitation provisions regarding dividend payment based on the related agreement.

After the decision to pay dividends is made, the dividends will then be paid in Indonesian Rupiah. Shareholders at the current date of listing are entitled to the full amount of dividends approved, which may be subject to income tax (*withholding tax*) in effect in Indonesia.

Dividends received by foreign shareholders will be subject to income tax in accordance with the prevailing taxation regulations in Indonesia, which is currently at 20%. New shareholders have the same and equal rights in all respects with other shareholders whose share capital has been issued and fully paid in the Company, including the right for dividend distribution. The Company does not have any obligations to certain parties that bind the Company with certain conditions (*negative covenant*) which may harm the public shareholders.

Kebijakan dividen dari Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan pada kebijaksanaan Direksi.

Sejak melakukan Penawaran Umum Perdana, Perseroan tidak pernah absen dalam membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya.

Pembagian Dividen Tahun Buku 31 Desember 2019

Berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat Umum Tahunan Pemegang saham Tanggal 26 Maret 2020 No.32 telah menetapkan pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2019 sebesar Rp128.076.420.849.

Pembagian Dividen Tahun Buku 31 Desember 2018

Berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Tanggal 27 Maret 2019 No. 58 telah menetapkan pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp145.920.401.358.

Uraian mengenai jumlah dividen kas yang dibagikan, dividen per lembar saham, rasio pembagian dividen terhadap laba bersih, tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The Company's dividend policy is a statement of its current intent and is not legally binding because the policy is subject to changes depending on the policies of the Board of Directors.

Since the execution of its Initial Public Offering, the Company has never been absent in distributing dividends to its shareholders.

Dividend Distribution for the Fiscal Year Ended on December 31, 2019

Based on the copy of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 32 dated March 26, 2020, it has been determined that the distribution of the Company's dividends for the fiscal year ended on December 31, 2019, shall amount to Rp128,076,420,849.

Dividend Distribution for the Fiscal Year Ended on December 31, 2018

Based on the copy of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 58 dated March 27, 2019, it has been determined that the distribution of the Company's dividends for the fiscal year ended on December 31, 2018, shall amount to Rp145,920,401,358.

Description on the amount of cash dividends distributed, dividends per share, ratio of dividends to net profit, announcement date, and payment date for the fiscal years ended on December 31, 2018 and 2019 can be seen in the table below.

Pembagian Dividen Tahun Buku 2018 dan 2019 / Dividend Distribution in 2018 and 2019 Fiscal Years		
Uraian / Description	Tahun Buku 2019 / 2019 Fiscal Year	Tahun Buku 2018 / 2018 Fiscal Year
Dividen Kas yang Dibagikan / Cash Dividend Distributed	Rp128.076.420.849	Rp145.920.401.358
Dividen per Lembar Saham / Dividend per Share	Rp15,36	Rp17,50
Rasio Pembagian Dividen Terhadap Laba Bersih / Dividend Distribution to Net Profit Ratio	25,00%	30,00%
Tanggal Pengumuman / Announcement Date	26 Maret 2020 / March 26, 2020	27 Maret 2019 / March 27, 2020
Tanggal Pembayaran / Payment Date	29 April 2020 / April 29, 2020	26 April 2019 / April 26, 2019

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Tabel berikut memberikan informasi terkait program MESOP yang telah dilaksanakan Perseroan sehubungan dengan tanggal, surat keputusan yang mendasari program MESOP, mekanisme pembagian, jumlah saham MESOP dan jangka waktu, realisasi, persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak, serta harga exercise.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN (ESOP/MSOP)

The following table provides information related to the MESOP program that has been implemented by the Company in relation to the date, the decree underlying the MESOP program, the distribution mechanism, the number of MESOP shares, and the period of time, realization, requirements for Eligible Employees and/or Management, as well as the exercise price.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (MESOP) / Management and/or Employee Stock Option Program (MESOP)

Tanggal / Date	Surat Keputusan / Decree	Mekanisme / Mechanism	Jumlah Saham MESOP dan Jangka Waktu / Total MESOP Shares and Period	Realisasi / Realization	Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak / Requirements for Eligible Employees and/or Management	Harga Exercise / Exercise Price
5 Maret 2014 / March 5, 2014	Surat Keputusan No. SK.01.01/A.DIR.0294/2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Program Kepemilikan Unit Penyertaan Saham pada Perusahaan Anak untuk Pegawai dan Pengurus sebagaimana telah diubah sesuai SK No. SK.01.01/A. DIR.1744/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Amandemen Program Pemilikan Unit Penyertaan Saham. / Decree No. SK.01.01/A.DIR.0294/2004 dated June 16, 2004, regarding Stock Option Plan in Subsidiaries for Employees and Management, as amended in accordance with the Decree No. SK.01.01/A. DIR.1744/2014 dated March 5, 2014, regarding Amendment to Stock Option Plan.	Pelaksanaan Program MESOP pertama kalinya dilakukan melalui Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS). / The MESOP Program was implemented for the first time through Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS).	20% atau setara dengan 121.043.500 lembar saham dengan harga Rp120 per saham per Unit Penyertaan Saham. Unit Penyertaan Saham MESOP terdiri dari: a) Unit Penyertaan Saham Seri A akan tetap dikelola oleh KKMS dan b) Unit Penyertaan Saham Seri B dapat dialihkan oleh Peserta MESOP setelah 3 (tiga) tahun dan telah melunasi pembayaran investasi atas Penyerthaannya di KKMS. / 20% or equal to 121,043,500 shares at a price of Rp120 per share of Participation Unit. The MESOP Share Participation Units consist of: a) Series A Share Participation Units, which will continue to be managed by KKMS, and b) Series B Share Participation Units which can be transferred by MESOP Participants after 3 (three) years provided that they have paid the investment payment for their Participation in KKMS.	50% Unit Penyertaan Saham dalam bentuk Seri A memiliki lock up period sampai dengan 11 Februari 2014 / 50% of Share Participation Units in the form of Series A have a lock up period until February 11, 2014	Peserta MESOP adalah Pengurus dan Pegawai yang tercatat dalam daftar Pengurus dan Pegawai WIKA dan WTON pada tanggal 1 Juni 2004 / The participants of MESOP are Managers and Employees registered in the list of WIKA and WTON Managers and Employees as of June 1, 2004.	Rp120/ lembar / Rp120/share
11 Februari 2014 / February 11, 2014	Surat Keputusan No. SK.01.01/WB-0A.019/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang program Employee Stock Allocation (ESA) berupa pemberian saham penghargaan dan saham jatah pasti pegawai. / Decree No. SK.01.01/WB-0A.019/2014 dated February 11, 2014, regarding Employee Stock Allocation (ESA) program in the form of awarding shares and employees' defined share.	Pada saat Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan melaksanakan Program MESOP untuk kedua kalinya berupa Employee Stock Allocation (ESA) melalui PT Mandiri Sekuritas / At the time of Initial Public Offering, the Company implemented the MESOP Program for the second time in the form of Employee Stock Allocation (ESA) through PT Mandiri Sekuritas	Saham program ESA terdiri dari: a) Saham penghargaan sebesar 20% atau setara dengan 12.230.400 lembar saham dengan periode lock up selama 24 bulan dan b) saham jatah pasti sebesar 80% atau setara dengan 49.133.600 lembar saham dengan periode lock up 8 (delapan) bulan / The shares in ESA program consist of: a) reward shares of 20% or equal to 12,230,400 shares with a lock-up period of 24 months, and b) shares with a fixed allotment of 80% or equal to 49,133,600 shares with a lock-up period of 8 (eight) months.	Untuk 20% memiliki lock up period selama 24 bulan; dan untuk 80% memiliki lock up period selama 8 bulan / For 20%, they have a lock up period of 24 months; and 80% have a lock up period of 8 months	Peserta program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang berstatus pegawai organik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Yang ditempatkan di Perseroan dan Pegawai organik, terampil, honorer Perseroan dan tercatat sebagai pegawai pada tanggal 31 Desember 2013 / The participants of ESA program are all employees of the Company who are organic employees of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, those placed in the Company, and organic, skilled, honorary employees of the Company, which are registered as employees as of December 31, 2013.	Rp590/ lembar / Rp590/share

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (MESOP) / Management and/or Employee Stock Option Program (MESOP)

Tanggal / Date	Surat Keputusan / Decree	Mekanisme / Mechanism	Jumlah Saham MESOP dan Jangka Waktu / Total MESOP Shares and Period	Realisasi / Realization	Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak / Requirements for Eligible Employees and/or Management	Harga Exercise / Exercise Price
26 Maret 2020 / March 26, 2020	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 / Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2019 Fiscal Year	Pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada 8 April 2014, Perseroan mempunyai saham treasuri sebesar 377/157,951 saham atau sebesar 4,33% dari total keseluruhan kepemilikan saham Perseroan. Pelaksanaan Program MESOP dilakukan sebagai upaya dalam pengalihan saham treasuri tersebut yang telah jatuh tempo dan juga telah mencapatakan persetujuan untuk perpanjangan waktu pengalihannya dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengalihan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengalihan atas saham treasuri ini sudah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 pada tanggal 26 Maret 2020 dalam mata acara rapat kelima. / When the Company conducted an Initial Public Offering of Shares on April 8, 2014, the Company had treasury shares amounting to 377/157,951 shares or 4.33% of the total share ownership of the Company. The MESOP Program was carried out as an effort to transfer these treasury shares which were due and had also obtained approval for an extension of the transfer period from the Financial Services Authority. Transfer from the Financial Services Authority. The transfer of treasury shares has been approved through the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated March 26, 2020 in the fifth meeting agenda.	377.157.951 saham atau sebesar 4,33% dari total keseluruhan kepemilikan saham Perseroan dengan periode lock up 8 (delapan) bulan / 377,157,951 shares or 4.33% of the total share ownership of the Company with a lock up period of 8 (eight) months	Pengalihan saham treasuri Perseroan melalui program MESOP telah dilaksanakan sejak tanggal 17 Juni 2020 melalui PT BNI Sekuritas dan telah dialihkan secara keseluruhan kepada 1.201 rekening efek peserta MESOP sesuai dengan Laporan Realisasi pengalihan saham treasuri Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 Juni 2020 / The transfer of the Company's treasury shares through the MESOP program has been carried out since June 17, 2020 through PT BNI Sekuritas and has been transferred in its entirety to 1,201 securities accounts of MESOP participants in accordance with the Report on Realization of the transfer of the Company's treasury shares to the Financial Services Authority on June 17, 2020	Peserta dari Program MESOP merupakan Manajemen dan pegawai Perseroan dan perusahaan Terkendali perseroan, yaitu Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), Direksi, pegawai Organik WIKA BETON dan Anak Perusahaan, Pegawai Organik WIKA yang ditempatkan di WIKA BETON dan Pegawai terampil WIKA BETON. / Participants of the MESOP Program are Management and employees of the Company and the company's Controlled Companies, namely the Board of Commissioners (except for Independent Commissioners), Board of Directors, Organic employees of WIKA BETON and Subsidiaries, Organic Staff of WIKA who are assigned to WIKA BETON and skilled employees of WIKA BETON.	Rp202/ lembar / Rp202/share

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak lagi melakukan pelaporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum mengingat dana hasil penawaran umum sebesar Rp1,17 triliun telah terserap seluruhnya untuk kegiatan operasional dan usaha Perseroan pada tahun 2017. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terakhir disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No.KU.01.03/WB- 0A.2036/2017 tanggal 7 Juli 2017.

PEMBAYARAN PAJAK

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak melalui pembayaran pajak secara tepat waktu. Berikut adalah rincian pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Perseroan kepada negara sepanjang tahun 2020.

Pembayaran Pajak Tahun 2019-2020 (dalam satuan Rupiah) / Tax Payment in 2019-2020 (in Rupiah)		
Uraian / Description	2020	2019
PPH	417.334.865.457	407.765.691.290
PPN	109.343.542.480	157.884.212.249
Jumlah / Total	526.678.407.937	565.649.903.539

Di tahun 2020, Perseroan melakukan pembayaran pajak sebesar Rp526,68 miliar, turun Rp38,97 miliar atau 6,89% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp565,65 miliar. Di tahun 2019 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada tahun 2020, Perseroan tidak memiliki informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi dan restrukturisasi utang/modal.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No.7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Perseroan jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Perseroan,

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

In 2020, the Company did not submit a report on the realization of use of proceeds from the public offering since the proceeds from the public offering amounting to Rp1.17 trillion had been completely absorbed for the Company's operations and business activities in 2017. The report on the realization of use of proceeds from the last public offering was submitted to the OJK and the Indonesia Stock Exchange through Letter No. KU.01.03/WB-0A.2036/2017 dated July 7, 2017.

TAX PAYMENT

The Company is committed to exercising its rights and obligations as a taxpayer through timely tax payments. The following is a breakdown of tax payments paid by the Company to the state throughout 2020.

In 2020, the Company made tax payments of Rp.526.68 billion, a decrease of Rp.38.97 billion or 6.89% compared to 2019 amounting to Rp565.65 billion. In 2019 and 2020, the Company has fulfilled all of its tax obligations.

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND CAPITAL/DEBT RESTRUCTURING

There is no material information on investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, and capital/debt restructuring to be reported in 2020.

MATERIAL INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH AFFILIATES AND TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

Over the course of 2020, the Company has entered into transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 regarding "Related Party Disclosures". A related party is a person or entity that is related to the reporting entity:

- (1) A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:
 - (i) has control or joint control over the Company,

- | | |
|---|---|
| <p>(ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan, atau</p> <p>(iii) merupakan personil manajemen kunci dari Perseroan ataupun entitas induk.</p> <p>(2) Sedangkan suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:</p> <p>(i) entitas tersebut dan Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perseroan (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha tersebut),</p> <p>(ii) entitas tersebut dan Perseroan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,</p> <p>(iii) satu entitas yang merupakan ventura bersama dari Perseroan dan entitas lain yang merupakan entitas asosiasi dari Perseroan,</p> <p>(iv) merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan. Jika Perseroan adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perseroan,</p> <p>(v) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (i) di atas,</p> <p>(vi) orang yang diidentifikasi dalam angka (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas).</p> <p>(vii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.</p> | <p>(ii) has a significant influence upon the Company, or</p> <p>(iii) is a member of key management personnel of the Company or of the parent entity.</p> <p>(2) Meanwhile, an entity is related to the Company if any of the following conditions applies:</p> <p>(i) the entity and the Company are members of the same group, the entity is an associate entity or joint venture of the Company (or that the associate entity or joint venture are the members of a group in which the Company is a member),</p> <p>(ii) the entity and the Company are joint ventures of the same third party,</p> <p>(iii) the entity is a joint venture of the Company and other entity which is an associate entity of the Company,</p> <p>(iv) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company. If the Company is the provider itself, the sponsoring employers are also related to the Company,</p> <p>(v) both entities are controlled or jointly controlled by a person/party identified in number (i) above,</p> <p>(vi) a person identified in number (i) has a significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity)</p> <p>(vii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.</p> |
|---|---|

Pihak, Sifat Hubungan dan Jenis Transaksi dengan Pihak Berelasi, serta Rincian transaksi dengan pihak berelasi tahun 2020 dan 2019.

Party, Nature of Relationship, and Type of Transaction with Related Parties and Detailed Transactions with Related Parties in 2020 and 2019

Sifat berelasi yang terjadi pada Grup adalah sebagai berikut:

The nature of related parties of the Group are as follows:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh menteri negara BUMN merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan induk. Oleh karena itu secara tidak langsung Perusahaan memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia. 2. Grup memiliki dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank pemerintah atau bank-bank yang dimiliki oleh BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana berlaku pada pihak ketiga. 3. Grup mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perusahaan dengan BUMN-BUMN lain maupun anak perusahaan serta lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang. | <ol style="list-style-type: none"> 1. The Government of the Republic of Indonesia, represented by the Minister of State-Owned Enterprise, is the majority shareholder of the parent company. Therefore the Company has indirect affiliation through the inclusion of capital of the Government of Republic of Indonesia. 2. The Group has funds and loans in government's Banks or state-owned Banks with normal requirements and interest rate as applicable at any third party. 3. The Group enters into agreements for the purpose of business with other State-Owned Enterprises and subsidiaries and the institutions of government authorities. |
|---|--|

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut.

Details of the nature and type of material transactions with related parties are as follows:

Pihak Berelasi / Related Party	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Jenis Transaksi / Type of Transaction
Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening dan Pinjaman / Placement of Accounts and Loans
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening, Pinjaman dan Deposito / Placement of Accounts, Loans, and Deposits
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening dan Pinjaman / Placement of Accounts and Loans
PT BNI Syariah	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening / Placement of Accounts
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening dan Pinjaman / Placement of Accounts and Loans
PT Bank Syariah Mandiri	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening dan Pinjaman / Placement of Accounts and Loans
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Pinjaman / Placement of Loans
Piutang/Utang Usaha		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Pemegang Saham / Shareholder	Penjualan Beton dan Utang Lain-lain / Concrete Product Sales and Other payable
PT Wijaya Karya Komponen Beton	Kepemilikan Saham / Share Ownership	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Kepemilikan Saham / Share Ownership	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Citra Lautan Teduh	Kepemilikan Saham / Share Ownership	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	Asosiasi / Associate	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
WIKA BETON - Emrail KSO	Ventura Bersama / Joint Venture	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Wijaya Karya Gedung Tbk	Entitas Sepengendali / Entity under Common Control	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Wijaya Karya Realty	Entitas Sepengendali / Entity under Common Control	Piutang Lain-lain / Other Receivables
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas Sepengendali / Entity under Common Control	Piutang Lain-lain / Other Receivables
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Entitas Sepengendali / Entity under Common Control	Piutang Lain-lain / Other Receivables
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Entitas Sepengendali / Entity under Common Control	Piutang Lain-lain / Other Receivables
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Perusahaan Listrik Negara	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Brantas Adipraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Utama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali / Entity under Common Control	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Wijaya Karya Tbk. - Bahagia KSO	Pengendalian Tidak Langsung Pemegang Saham / Indirect Control Shareholder	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Wijaya Karya Tbk. - MCM KSO	Pengendalian Tidak Langsung Pemegang Saham / Indirect Control Shareholder	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Wijaya Karya Tbk. - Bahagia Bangun Nusa, KSO	Pengendalian Tidak Langsung Pemegang Saham / Indirect Control Shareholder	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Haka Aston	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia / Indirect Control the Indonesian Government	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Utama Karya Infrastruktur	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia / Indirect Control the Indonesian Government	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Waskita Beton Precast Tbk.	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia / Indirect Control the Indonesian Government	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Indirect Control ny the Indonesian Government	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC)	Entitas Sepengendali / Entity under Common Control	Penjualan Produk Beton / Concrete Product Sales
PT Bhandha Ghara Rekasa	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Subkontraktor / Sub-contractor
PT Pindad (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Subkontraktor / Sub-contractor

Pihak Berelasi / Related Party	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Jenis Transaksi / Type of Transaction
PT Semen Tonasa	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia / Indirect Control of the Government of Republic Indonesia	Pemasok Material / Material Supplier
PT Semen Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia / Controlled by the Government of the Republic Indonesia	Pemasok Material / Material Supplier
PT Semen Indonesia Beton	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia / Indirect Control of the Government of Republic Indonesia	Pemasok Material / Material Supplier
PT Semen Padang	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia / Indirect Control of the Government of the Republic Indonesia	Pemasok Material / Material Supplier

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut

Details of balances and transactions balances with parties are related as follows:

(dalam jutaan Rupiah) / (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2020		Perubahan	
	Rp	%	Rp	%
Aset / Assets				
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	102.110	66,28%	1.154.103	72,03%
Piutang Usaha - Bersih / Trade Receivables - Net	413.058	65,28%	738.605	55,06%
Piutang Retensi— Bersih / Retention Receivables - Net	3.830	4,49%	-	0,00%
Piutang Lain-lain / Other Receivable	13.503	72,05%	15.776	73,52%
Pendapatan akan Diterima - Bersih / Accrued Income - Net	1.021.594	78,16%	1.544.882	84,75%
Tagihan Bruto - Bersih / Gross Amount Due From Customer - net	12.498	6,30%	-	0,00%
Proyek dalam pelaksanaan / Project on Progress	19.789	31,22%	17.675	33,98%
Liabilitas / Liabilities				
Utang Pemasok / Supplier Payable	81.580	17,68%	36.321	8,86%
Utang Subkontraktor / Sub-contractor Payable	13.291	5,55%	3.132	0,68%
Utang Bank Jangka Pendek / Short-Term Bank Loans	1.489.912	63,04%	1.080.989	53,10%
Uang Muka dari Pelanggan / Advances from Customers	62.923	34,65%	133.446	24,01%
Pendapatan Diterima di Muka / Unearned Revenue	13.261	14,70%	160.997	54,26%
Utang Bank Jangka Panjang / Long-Term Bank Loans	380.000	100,00%	750.000	100,00%
Utang Lain-lain / Other Payables	-	0,00%	14.432	35,26%
Pendapatan / Revenues				
Pendapatan Usaha / Revenues	3.107.423	64,69%	4.354.651	61,48%

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Penjelasan mengenai kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan dengan Pihak-pihak Berelasi/ Berafiliasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan persyaratan, tingkat harga, dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Description on Transaction Fairness

Description on the fairness of all transactions conducted by the Company with Related/Affiliated Parties has been disclosed in the financial statements, and is in accordance with the standards of PSAK 7 (revised 2014) regarding "Related Party Disclosures". All transactions with related parties are carried out on normal terms, price levels, and conditions, as those carried out with third parties and have been disclosed in the financial statements.



Alasan Dilakukannya Transaksi

Perseroan melakukan transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perseroan. Transaksi untuk Pihak-pihak Berelasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- Transaksi perbankan yang meliputi penempatan rekening, pinjaman, dan deposito.
- Transaksi penjualan produk dan pembelian bahan baku yang tercatat sebagai piutang dan/atau utang.

Kebijakan Perseroan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Dewan Komisaris dan Komite Audit menjalankan mekanisme review atas transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi melalui proses audit, khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, dimana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 (revisi 2014) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Pemenuhan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 (revisi 2014) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” dalam laporan keuangan Perseroan tahun 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Perseroan tidak memiliki informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi pada tahun 2020.

Reasons for Conducting Transactions

The Company conducts transactions with related parties and with third parties in line with the Company’s operational and business development needs. Transactions with Related Parties can be classified into two types, namely:

- Banking transactions, which include placement of account, loans, and deposits.
- Sales of products and purchases of raw materials, which are recorded as receivables and/or payables.

Company’s Policy on Mechanisms for Reviewing Transactions

The Board of Commissioners and the Audit Committee carry out a review mechanism on transactions with related parties through the audit process, particularly audits carried out by public accountants and published, in which this mechanism is contained in PSAK 7 (revised 2014) regarding “Related Party Disclosures”.

Fulfillment of Related Provisions

Fulfillment of related regulations and provisions, namely the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), is carried out through the disclosure of PSAK 7 (revised 2014) regarding “Related Party Disclosures” in the Company’s 2019 financial statements audited by a Public Accountant.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY EVENTS

The Company does not have any financial information containing extraordinary events in 2020.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS

Perubahan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 / Amendments to the Laws and Regulations in 2020

No	Nama Peraturan / Name of Regulation	Perihal / About	Dampak terhadap Perseroan / Impact on the Company
1.	Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00089/BEI/10-2020 Tahun 2020 / Decree of Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00089/BEI/10-2020 of 2020	Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan / Relaxation of Deadline for Submitting Financial Statements and Annual Reports	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud. / The Company is subject to the Financial Services Authority Regulation as referred to.
2.	Surat Edaran Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00003/BEI/05-2020 Tahun 2020 / Circular of Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. SE-00003/BEI/05-2020 of 2020	Tata Cara Pelaksanaan <i>Public Expose</i> Secara Elektronik / Procedures for Electronic Public Expose	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan telah menyelenggarakan <i>Public Expose</i> secara elektronik sebagai upaya untuk membantu mengurangi penyebaran virus Covid -19. / The Company has held an electronic Public Expose as an effort to help reduce the spread of the Covid-19 virus.
3.	Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00039/BEI/05-2020 Tahun 2020 / Decree of Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00039/BEI/05-2020 of 2020	Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Harian dan Laporan Bulanan Anggota Bursa Efek / Relaxation of Deadline for Submitting Daily Reports and Monthly Reports of Securities Exchange Members	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud. / The Company is subject to the Financial Services Authority Regulation as referred to.
4.	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-49/PM.22/2020 Tahun 2020 / Circular of Financial Services Authority No. S-49/PM.22/2020 of 2020	Penyampaian Laporan dan Keterbukaan Informasi Melalui SPE / Submission of Reports and Information Disclosure through SPE	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud. / The Company is subject to the Financial Services Authority Regulation as referred to.
5.	Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0016/DIR/KSEI/0420 Tahun 2020 / Decree of Board of Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 of 2020	Pemberlakuan Fasilitas <i>Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)</i> Sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa Secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS Bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI / Implementation of KSEI's Electronic General Meeting System Facility (Easy.KSEI) as an Electronic Authorization Mechanism in the GMS Convention Process for Public Company Securities Issuers whose Shares are Kept in KSEI Collective Custody	Perseroan menerapkan pemberlakuan fasilitas <i>Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)</i> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI. / The Company applies the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility as a mechanism for electronic power of attorney in the process of convening the GMS for Public Company Securities Issuers whose shares are kept in KSEI Collective Custody.
6.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2020 Tahun 2020 / Regulation of Financial Services Authority No. 24/POJK.04/2020 of 2020	Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi / Guidelines for Preparation of Management Statements in Accounting	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud. / The Company is subject to the Financial Services Authority Regulation as referred to.
7.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 Tahun 2020 / Regulation of Financial Services Authority No. 52/POJK.04/2020 of 2020	Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan / Maintenance and Reporting of Net Adjusted Working Capital	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud. / The Company is subject to the Financial Services Authority Regulation as referred to.
8.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 / Regulation of Financial Services Authority No. 42/POJK.04/2020 of 2020	Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan / Affiliated Transactions and Transactions Containing Conflict of Interest	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan telah memiliki kebijakan yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku. / The Company has adequate policies to ensure that Affiliated Transactions are carried out in accordance with the prevailing business practices.
9.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 / Regulation of Financial Services Authority No. 17/POJK.04/2020 of 2020	Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha / Material Transactions and Changes in Business Activities	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud. / The Company is subject to the Financial Services Authority Regulation as referred to.
10.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2020 / Regulation of Minister of Trade No. 25 of 2020	Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan / Companies Annual Financial Statements	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud. / The Company is subject to the Financial Services Authority Regulation as referred to.
11.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tahun 2020 / Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/06/2020 of 2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/Mbu/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara / Amendment to the Regulation of State Minister of State-Owned Enterprises No. Per-03/Mbu/2012 regarding Guidelines for Appointment of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan memperhatikan penyesuaian ketentuan Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. / The Company pays attention to the adjustment of provisions of the Guidelines for Appointment of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 / Amendments to the Laws and Regulations in 2020

No	Nama Peraturan / Name of Regulation	Perihal / About	Dampak terhadap Perseroan / Impact on the Company
12.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Tahun 2020 / Regulation of Minister of Environment and Forestry No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 of 2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Amendments to the Regulation of Minister of Environment and Forestry No. P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 regarding Norms, Standards, Procedures, and Criteria for Electronically Integrated Licensing Services Scope of the Ministry of Environment and Forestry	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud. / The Company is subject to the Minister of Environment and Forestry Regulation as referred to.
13.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 Tahun 2020 / Regulation of Minister of Environment and Forestry No. P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 of 2020	Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun / Utilization of Hazardous and Toxic Waste Materials	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud. Perseroan memanfaatkan limbah B3 sebagai salah satu komponen dalam pembuatan produk beton. / The Company is subject to the Minister of Environment and Forestry Regulation as referred to. The Company utilizes B3 waste as a component in manufacturing concrete products.
14.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 Tahun 2020 / Regulation of Minister of Environment and Forestry No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 of 2020	Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun / Procedures for Characteristics Testing and Determination of Hazardous and Toxic Waste Status	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud. Perseroan memanfaatkan limbah B3 sebagai salah satu komponen dalam pembuatan produk beton. / The Company is subject to the Minister of Environment and Forestry Regulation as referred to. The Company utilizes B3 waste as a component in manufacturing concrete products.
15.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Tahun 2020 / Regulation of Minister of Environment and Forestry No. P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 of 2020	Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun / Transportation of Hazardous and Toxic Waste Materials	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud. Perseroan memanfaatkan limbah B3 sebagai salah satu komponen dalam pembuatan produk beton. / The Company is subject to the Minister of Environment and Forestry Regulation as referred to. The Company utilizes B3 waste as a component in manufacturing concrete products.
16.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1986 Tahun 2020 / Decision of Head of Manpower, Transmigration, and Energy Department of DKI Jakarta No. 1986 of 2020	Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Tempat Kerja / Protocol for the Prevention and Control of Covid-19 in Private Offices, State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Workplaces	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan kerja. / The company implements Covid-19 prevention and control protocols in the work environment.
17.	Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/2020 Tahun 2020 / Circular of Minister of Manpower No. M/8/HK.04/2020 of 2020	Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) / Protection of Workers in the Work Accident Security Program in Cases of Work-Related Diseases Due to Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Perseroan melaksanakan dan tunduk terhadap surat edaran terkait perlindungan pegawainya dengan jalan melaksanakan pemeriksaan rapid test secara berkala dan menjamin biaya pengobatan pekerjanya yang terpapar Covid-19. / The Company implements and complies with the circular letter related to employee protection by carrying out regular rapid test and examination, and guaranteeing the medical costs for workers exposed to Covid-19.
18.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tahun 2020 / Decree of Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/328/2020 of 2020	Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi / Guidelines for the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Office and Industrial Workplaces in Supporting Business Continuity in Pandemic Situations	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan menerapkan panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. / The Company implements Covid-19 Prevention and Control guidelines in Office and Industrial Workplaces to Support Business Continuity in Pandemic Situations.
19.	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 / Decree of Governor of DKI Jakarta No. 10 of 2020	Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2020 / Provincial Minimum Wage in 2020	Perseroan menerapkan panduan pengupahan sesuai dengan undang-undang. / The Company implements wage guidelines pursuant to the prevailing laws.
20.	Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 Tahun 2020 / Circular of Minister of Manpower No. M/7/AS.02.02/V/2020 of 2020	Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan / Business Continuity Plan in Facing the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and the Covid-19 Transmission Prevention Protocol in Companies	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan menerapkan ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud, guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Perseroan. / The Company applies the provisions of the Circular of Minister of Manpower as referred to in order to prevent the spread of Covid-19 in the Company's environment.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 / Amendments to the Laws and Regulations in 2020

No	Nama Peraturan / Name of Regulation	Perihal / About	Dampak terhadap Perseroan / Impact on the Company
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 / Government Regulation No. 49 of 2020	Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-Alam Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> / Adjustment of Manpower Social Security Program Contribution during Non-Natural Disaster of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Perseroan melaksanakan penyesuaian terhadap iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2020. / The Company makes adjustments to the Manpower Social Security Program contributions in accordance with the Government Regulation No. 49 of 2020.
22.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 / Law/ No 11 of 2020	Cipta Kerja / Job Creation	Perseroan telah meninjau Perjanjian Kerja Bersama dan menyesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2020. / The Company has reviewed the Collective Bargaining Agreement and adjusted it to the Law no. 11 of 2020.
23.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 / Law No. 3 of 2020	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara / Amendment to Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud. / The Company is subject to the Law No. 3 of 2020 as referred to.
24.	Surat Menteri Perindustrian Nomor B/312/M-IND/IV/2020 Tahun 2020 / Letter of Minister of Industry No. B/312/M-IND/IV/2020 of 2020	Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Masa Tanggap Darurat Pandemi Covid-19 / Implementation of Industrial Activities during the Covid-19 Pandemic Emergency Response Period	Perseroan melaksanakan kegiatan industri sesuai dengan Surat Menteri sebagaimana dimaksud. 1. Menghimbau untuk tidak melakukan pembatasan aktivitas industri termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan gerak karyawan atau jalur distribusi sebelum adanya penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan; / Requesting not to restrict industrial activities, including, but not limited to, restricting the movement of employees or distribution channels prior to the determination of the status of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which has been approved by the Ministry of Health; 2. Pada saat PSBB, Perseroan menetapkan jadwal kerja seefektif mungkin dengan menerapkan sistem WFH/WFO. / At the time of the PSBB, the Company has established a work schedule as effectively as possible by implementing the WFH/WFO system.
25.	Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2020 Tahun 2020 / Circular of Minister of Public Works and Public Housing No. 18/SE/M/2020 of 2020	Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (<i>New Normal</i>) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi / Implementation of New Habits Order and Adaptation (<i>New Normal</i>) in the Implementation of Construction Services	Perseroan menyesuaikan protokol umum kesehatan di tempat kerja, penyelenggaraan jasa konstruksi, protokol pemilihan penyedia, protokol pelaksanaan pekerjaan, dan protokol penyesuaian kontrak. / The Company adapts general health protocols in the workplace, construction service administration, provider selection protocols, work implementation protocols, and contract adjustment protocols.
26.	Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/SE/M/2020 Tahun 2020 / Circular of Minister of Public Works and Public Housing No. 17/SE/M/2020 of 2020	Penambahan Persyaratan dalam Pelaksanaan Paket Tender Pada Satu Kesatuan Pekerjaan / Addition of Requirements in the Implementation of Tender Package in One Work Unit	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Surat Edaran Menteri tersebut termasuk namun tidak terbatas pada penambahan persyaratan dalam pelaksanaan paket tender pada satu kesatuan pekerjaan. / The Company is subject to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation as referred to, including, but not limited to, adding requirements in the implementation of a tender package for a single work unit.
27.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 / Regulation of Minister of Public Works and Public Housing No. 14 of 2020	Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia / Standards and Guidelines for Procurement of Construction Services Through Providers	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan tersebut. / The Company is subject to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation as referred to.
28.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 / Government Regulation No. 22 of 2020	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi / Implementing Regulations for Law No. 2 of 2017 regarding Construction Services	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Pemerintah tersebut. UU No 2 Tahun 2017 beserta aturan turunannya (PP dan Permen) berlaku pada pekerjaan konstruksi di Indonesia, baik sektor pemerintah, badan usaha (swasta dan BUMN) maupun usaha perorangan. / The Company is subject to the Government Regulation as referred to. The Law No. 2 of 2017, along with its derivative regulations (PP and Ministerial Regulation), applies to construction work in Indonesia, namely in the government sector, business entities (private and BUMN), and individual businesses.
29.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2020 / Regulation of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency No. 13 of 2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi / Amendment to the Regulation of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency No. 17 of 2019 regarding Location Permits	Tidak Signifikan. / Not Significant. Perseroan tunduk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut. / The Company is subject to the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation as referred to.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 / Amendments to the Laws and Regulations in 2020

No	Nama Peraturan / Name of Regulation	Perihal / About	Dampak terhadap Perseroan / Impact on the Company
30.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 / Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 2020	Bea Materai / Stamp Duty	Perseroan menyesuaikan penggunaan meterai sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi: / The Company adjusts the use of the stamp duty in accordance with the applicable regulations, including: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyetaraan pengenaan pajak atas dokumen. / Equalization of taxation on documents. 2. Penyesuaian tarif dan batasan nilai dokumen yang dikenai bea meterai menggunakan single tarif, yaitu sebesar Rp10.000. / Adjustments of tariffs and document value limits subject to stamp duty shall use a single tariff, namely Rp10,000. 3. Pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai atas dokumen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan penanganan bencana alam. / Provision of facilities for exemption from imposing stamp duty on certain documents required for natural disaster management activities.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The following table describes revisions, amendments, and adjustments to the Financial Accounting Standards (SAK) as well as interpretations of SAK which are effective for the fiscal year starting on or after January 1, 2020.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Tahun 2020 / Changes in Accounting Policies in 2020

Perubahan Kebijakan Akuntansi / Change in Accounting Policy	Alasan Perubahan / Reason for Change	Dampak Kuantitatif terhadap Laporan Keuangan / Quantitative Impact on Financial Statements
PSAK 71 "Instrumen Keuangan" / PSAK 71 "Financial Instruments"	PSAK 71 "Instrumen Keuangan" menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk pelaporan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. PSAK ini merupakan adopsi dari Amandemen IFRS 9. / PSAK 71 "Financial Instruments" replaces PSAK 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduced new arrangements for the reporting of financial assets and financial liabilities that will provide relevant and useful information for users of financial statements to assess the amount, timing, and uncertainty of the entity's future cash flows. This PSAK is an adoption of the IFRS 9 Amendments.	Sesuai dengan persyaratan transisi dari PSAK 71, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Dampak kuantitatif atas penerapan PSAK 71 ini yaitu penyesuaian atas saldo tahun lalu sebesar Rp184.258.207.821 pada aset lancar dan ekuitas. / In accordance with the transitional requirements on PSAK 71, the Company chose to apply retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information. The quantitative impact on the implementation of PSAK 71 is an adjustment to the balance for the previous year amounting to Rp184,258,207,821 to current assets and equity.
PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" / PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers"	PSAK 72 menggantikan PSAK 23: "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi) PSAK ini mengadopsi dari IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. / PSAK 72 replaces PSAK 23: "Revenue" and introduces 5 (five)-step model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied). This PSAK adopts the IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.	Perseroan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Perseroan terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu pada 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020. / The Company applies PSAK 72 retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information. Based on the review that the Company has conducted on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages in PSAK 72, there is no significant impact on the financial statements so it does not require adjustments in the opening balance on January 1, 2020.
PSAK 73 "Sewa" / PSAK 73 "Leases"	PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Perseroan sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah. PSAK ini mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 16 / PSAK 73 replace PSAK 30: "Leases", which requires the Company as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases with low-value assets. This PSAK adopts all regulations in IFRS 16.	Pada tanggal penerapan awal, Perusahaan menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut: / At the initial adoption date, the Company adopted the following practical policies: <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa; / Using a single discount rate on lease portfolios with fairly similar characteristics; - Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020; / Relying on previous assessments of whether leases are onerous as an alternative to undertaking an impairment review, that there are no aggravating contracts as of January 1, 2020; - Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal. / Preferring not to apply the requirement for leases whose leases expire within 12 months from the date of initial application. Record these leases in the same manner as short-term leases and include the costs associated with those leases in the disclosure of short-term lease expenses in the annual reporting period covering the date of initial application. Dampak penerapan awal PSAK 73: Sewa terhadap saldo awal 1 Januari 2020 adalah pengakuan aset hak guna bangunan sebesar Rp55.246.209.260, penambahan liabilitas sewa sebesar Rp5.059.907.831 dan penyesuaian saldo laba sebesar Rp187.001.429. / The impact of the initial implementation of PSAK 73: Leases on the opening balance on January 1, 2020 is the recognition of building rights assets amounting to Rp55,246,209,260, additional lease liabilities amounting to Rp5,059,907,831 and adjustment to retained earnings amounting to Rp187,001,429.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Tahun 2020 / Changes in Accounting Policies in 2020

Perubahan Kebijakan Akuntansi / Change in Accounting Policy	Alasan Perubahan / Reason for Change	Dampak Kuantitatif terhadap Laporan Keuangan / Quantitative Impact on Financial Statements
PSAK 62 (Amendemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi / PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract		Implementasi dan standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya. / The implementation of these standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact on the financial statements in the current year or the previous year.
PSAK 15 (Amendemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. / PSAK 15 (Amendment 2017): Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures		
PSAK 71 (Amendemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif / PSAK 71 (Amendment 2018): Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation		
ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba." / ISAK 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements"	ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (ii) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. ISAK 35 dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ISAK 35. / ISAK 35 deals with the presentation of the financial statements of non-profit oriented entities. ISAK 35 issued by DSAK IAI is an interpretation of PSAK 1: Presentation of Financial Statements paragraph 05 which provides examples of how a non-profit oriented entity makes good adjustments: (i) adjustments to the descriptions used for certain items in the financial statements; and (ii) adjustments to the descriptions used for the financial statements themselves. ISAK 35 is equipped with illustrative examples and basis for conclusions that are not part of ISAK 35	
PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan / PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements	Amendemen PSAK 1 merupakan penyesuaian beberapa paragraf dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan yang sebelumnya tidak diadopsi dari IAS 1 <i>Presentation of Financial Statements</i> menjadi diadopsi. Amendemen ini membuka opsi yang memperkenankan entitas menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1. / The amendment to PSAK 1 is an adjustment to several paragraphs in PSAK 1: Presentation of Financial Statements which was not previously adopted from IAS 1 <i>Presentation of Financial Statements</i> to be adopted. This amendment opens an option that allows entities to use report titles other than those used in PSAK 1.	

Perubahan Kebijakan Akuntansi Tahun 2020 / Changes in Accounting Policies in 2020

Perubahan Kebijakan Akuntansi / Change in Accounting Policy	Alasan Perubahan / Reason for Change	Dampak Kuantitatif terhadap Laporan Keuangan / Quantitative Impact on Financial Statements
PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. / PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors	PSAK 25 mengklarifikasi definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan. Selain itu Amendemen tersebut juga memberikan panduan yang lebih jelas terkait definisi material dalam konteks mengurangi over disclosure karena perubahan ambang batas (thresholds) dari definisi material tersebut. Secara garis besar, Amendemen PSAK 25: / PSAK 25 clarifies the definition of material in order to harmonize the definitions used in the conceptual framework and several relevant PSAKs. In addition, the amendments also provide clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the thresholds of the material definition. Broadly speaking, the amendment to PSAK 25: a. menambahkan istilah "obscuring" (pengaburan), penjelasan dan contoh mengenai istilah tersebut; / adds the term "obscuring", as well as the explanation and examples of the term; b. mengubah istilah "dapat mempengaruhi" menjadi "diperkirakan cukup dapat mempengaruhi" dalam konteks pengambilan keputusan oleh pengguna utama; / changes the term "could affect" to "expected to be sufficiently influential" in the context of decision making by the primary user; c. mengubah istilah "pengguna" menjadi "pengguna utama" dalam konteks pengguna laporan keuangan dan terdapat penambahan penjelasan terkait pengguna utama tersebut. / changes the term "user" to "primary user" in the context of users of financial statements and there is an additional explanation regarding that primary user.	
PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah / PSAK 102 (Revised 2019): Accounting for Murabahah		
ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan. / ISAK 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership	ISAK 101 akan menjadi acuan bagi entitas yang menerapkan 'metode pendapatan efektif' yang sebelumnya mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. / ISAK 101 will be a reference for entities applying the "effective income method" which previously referred to PSAK 50, PSAK 55 and PSAK 60.	
ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah / ISAK 102: Impairment on Murabahah Receivable	PSAK 102 (2019) merevisi acuan 'pengakuan pendapatan murabahah tangguh bagi penjual tidak memiliki risiko persediaan yang signifikan' kepada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. PSAK 102 (2019) juga mencakup penambahan istilah, perubahan ruang lingkup dan beberapa pengaturan lain yang tidak signifikan. SAK 102 terkait 'penurunan nilai piutang murabahah' merupakan bridging standard yang sampai dengan keluarnya PSAK penurunan nilai aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. ISAK 102 mensyaratkan entitas untuk melanjutkan kebijakan akuntansi saat ini untuk penurunan nilai piutang murabahah, seperti incurred loss, regulatory provisioning, atau pendekatan lain. / PSAK 102 (2019) revises the reference for 'recognition of tough murabahah income for sellers not having significant inventory risk' to ISAK 101. Previously, this transaction referred to PSAK 50, PSAK 55 and PSAK 60. PSAK 102 (2019) also includes the addition of the term, scope changes and some other insignificant settings. SAK 102 related to "impairment of murabahah receivables" is a bridging standard up to the issuance of PSAK for impairment of assets originating from sharia-based transactions. ISAK 102 requires an entity to continue with its current accounting policies for impairment of murabahah receivables, such as incurred loss, regulatory provisioning, or other approaches.	
ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa / ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases		
PSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Laporan Keuangan Entitas Nirlaba. / PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Nonprofit Entity Financial Reporting		
Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga / Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform		

Berikut adalah tabel nilai tercatat aset keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 55 dan PSAK 71, serta penyesuaian saldo laba pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020:

The following is a table of the carrying values of financial assets based on the provisions of PSAK 55 and PSAK 71, as well as adjustments to retained earnings on the initial application date of January 1, 2020:

(dalam jutaan Rupiah) / (in millions of Rupiah)

Uraian / Description	Berdasarkan PSAK 55 / Based on PSAK 55	Penyesuaian Saldo Laba / Adjustment of Profit Balance	Berdasarkan PSAK 71 / Based on PSAK 71
ASET LANCAR / CURRENT ASSETS			
Piutang Usaha - Bersih / Trade Receivables - Net			
Pihak Berelasi / Related Parties	738.605	(98.846)	639.759
Pihak Ketiga / Third Parties	570.928	(44.461)	526.467
Pendapatan akan Diterima / Accrued Income	1.822.894	(76.300)	1.746.594
Tagihan Bruto Pemberi Kerja / Gross Amount Due from Customer	461.167	(23.820)	437.347
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	7.589	59.169	66.758
Jumlah/ Total	3.601.183	(184.258)	3.416.925
EKUITAS / EQUITY			
Saldo Laba / Retained Earning	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated	1.408.926	(184.165)	1.224.761
Keperluan Nonpengendali / Non-controlling Interest	70.728	(93)	70.635
Jumlah / Total	1.479.654	(184.258)	1.295.396

Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif.

New Accounting Standards and Interpretation of Standards which Have Been Approved but Not Yet Effective.

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2020.

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments, and improvement to standards and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2020.

Amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Amendments to standard effective for periods beginning on or after June 1, 2020, with early adoption permitted are:

- PSAK 73 (amendemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

- PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Rent Concessions related to Covid-19.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

New standards and amendments to standards which are effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption permitted, are as follows:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2.

- PSAK 112: Accounting for Endowments;
- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2.

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perseroan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Di awal tahun 2020, telah terjadi kejadian luar biasa berupa pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan. Penurunan aktivitas ekonomi tersebut terjadi dikarenakan program dari pemerintah dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menekan pergerakan manusia dalam menjalankan roda perekonomian nasional dengan tujuan mulia untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menahan laju angka kematian. Namun seiring pelonggaran *lockdown* di beberapa negara secara perlahan-lahan telah memberikan jalan bagi proses pemulihan ekonomi ke depan dengan upaya kebijakan fiskal, moneter dan pemberlakuan *new normal*. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tersebut dianggap dapat mengganggu jalannya kinerja operasional Perseroan.

Secara langsung dan tidak langsung, pandemi Covid-19 ini tentunya juga akan mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan pada beberapa bulan mendatang. Sehingga beberapa proyek/ penjualan baru mengalami penundaan untuk sementara waktu.

Dampak signifikan terhadap kinerja operasional Perseroan tahun 2020 dibandingkan dengan kinerja operasional Perusahaan tahun 2019 sebagai berikut:

1. Realisasi Kontrak baru 51,58% dari *Audited* Tahun 2019.
2. Realisasi Penjualan 67,81% dari *Audited* Tahun 2019.
3. Realisasi Laba bersih (sebelum minoritas) 23,96% dari *Audited* Tahun 2019.

Amendments to standards which are effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption permitted, are as follows:

- Amendment PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks; and
- Amendment PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs.

New standards which are effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract.

Until the date of the financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards, and interpretations of these standards.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

MATTERS WITH A POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY INFLUENCE THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY

At the beginning of 2020, there was an extraordinary event in the form of Covid-19 pandemic which resulted in a significant reduction in economic activity. The decline in economic activity occurred due to the government's program of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which suppressed human movement in running the wheels of the national economy with the noble goal of preventing the spread of Covid-19 and holding back the death rate. However, the easing of lockdowns in several countries has gradually provided a way for the economic recovery process to go forward with fiscal and monetary policy measures as well as implementation of the *new normal* concept. The slowdown in economic growth caused by the Covid-19 pandemic is considered to be able to disrupt the Company's operational performance.

Both directly and indirectly, the Covid-19 pandemic will certainly affect the Company's operational activities in the coming months. Hence, some new projects/sales will have been delayed for a while.

The significant impact on the Company's operational performance in 2020 compared to the operational performance in 2019 is as follows:

1. Contract realization reaching 51.58% of the 2019 Audited.
2. Sales realization reaching 67.81% of the 2019 Audited.
3. Net Profit realization (before minority) reaching 23.96% of the 2019 Audited.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Walalupun laju pertumbuhan ekonomi yang melambat di tahun 2020 turut memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan, namun Manajemen menganalisa bahwa hambatan tersebut tidak akan mengganggu kinerjanya dalam jangka panjang.

Di tahun 2020, Perseroan telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dampak Covid-19, antara lain:

1. Efisiensi biaya usaha sebesar minimal 20% dari rencana awal khususnya pada anggaran yang tidak mandatori, seperti misalnya pengurangan biaya perjalanan dinas, pengurangan biaya pelatihan, pemotongan gaji karyawan serta tidak ada karyawan baru.
2. Efisiensi biaya bunga.
3. Mempercepat pencairan piutang, terutama piutang-piutang yang sudah alam. Setiap unit kerja harus mengupayakan percepatan pemulihan atas *impairment*.
4. Sangat selektif dalam melaksanakan investasi.

Disamping itu, dengan mempertimbangkan peluang, tantangan dan potensi proyek di RPJMN IV tahun 2020-2024 serta ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada resesi di tahun 2020, Perseroan telah melakukan strategi korporasi dan strategi operasi. Portofolio bisnis Perseroan terdiri dari empat lini bisnis, yaitu Produk *Precast*, Jasa Operasi, *Ready Mix* dan *Quarry* serta Bisnis Baru. Perseroan terus melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar yang telah dimiliki.

Dinamika perubahan di era VUCAD (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity and Disruption*) tidak dapat dihindari. Hal tersebut menjadi tantangan dan peluang untuk memperkuat bisnis Perseroan sebagai pemimpin pasar beton pracetak di Indonesia dan Asia Tenggara, sesuai dengan visi Perseroan yaitu menjadi perusahaan terkemuka di bidang EPI (*Engineering, Production, Instalation*) industri beton pracetak di Kawasan Asia Tenggara.

Dalam rangka mengantisipasi tuntutan pasar di tahun mendatang, aksi korporasi masih terus dilakukan dengan mempertimbangkan likuiditas Perseroan agar tidak mengganggu jalannya kegiatan operasional.

Keberhasilan Perseroan dalam membangun bisnis yang berpijak pada pengintegrasian *core business, backward, forward integration* dan penerapan *Engineering Production and Installation (EPI)* penerapannya haruslah mampu menyesuaikan tuntutan dan perubahan lingkungan bisnis yang akan terjadi. *Sustainable Growth* haruslah menjadi dasar dalam penyusunan sasaran usaha, dan memiliki dasar asumsi yang kuat dalam mencapainya.

MANAGEMENT ASSESSMENT ON MATTERS WITH A SIGNIFICANT INFLUENCE ON THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY

Although the slowing rate of economic growth in 2020 also had a negative impact on the Company's performance, the Management analyzes that these obstacles will not interfere with the Company's performance in the long term.

In 2020, the Company issued several policies to address the impact of Covid-19, including:

1. Efficiency of business costs of at least 20% from the initial plan, especially on non-mandatory budgets, such as reduction of cost of official travel and training, salary cut, and no recruitment activity.
2. Efficiency of interest expenses.
3. Acceleration of disbursement of accounts receivable, especially receivables that are natural. Each work unit must strive to accelerate recovery for impairments.
4. Highly selective in investing.

In addition, by taking into account the opportunities, challenges, and project potentials in RPJMN IV for 2020-2024, as well as the threat of slowing economic growth leading to a recession in 2020, the Company has implemented a number of corporate strategies and operational strategies. The Company's business portfolio consists of four business lines, namely *Precast Products, Operational Services, Ready-Mix and Quarry*, as well as *New Business*. The Company continues to make efforts to maintain and develop its existing market share.

The dynamics in the VUCAD (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity and Disruption*) era cannot be avoided. This is both a challenge and an opportunity for the Company to strengthen its business as a leader in the precast concrete market in Indonesia and Southeast Asia, in accordance with its vision of becoming a leading company in the EPI (*Engineering, Production, Installation*) field of the precast concrete industry in the Southeast Asia Region.

In order to anticipate market demands in the coming year, corporate actions will continue to be carried out by taking into account the Company's liquidity so as not to disrupt operational activities.

The success of the Company in building a business that is based on the integration of *core business, backward-forward integration, and Engineering, Production, and Installation (EPI)*, the application must be able to adapt to the demands and changes in the business environment that may occur. *Sustainable Growth* must be the basis for setting business goals, with a strong assumption base in achieving them.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang mendasari asumsi Manajemen dalam memutuskan bahwa kelangsungan usaha Perseroan masih sangat terjaga adalah melalui penjelasan analisa SWOT dan penilaian atas Tingkat Kesehatan Perusahaan di tahun 2020 yang diuraikan sebagai berikut.

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Manajemen menggunakan analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) sebagai tolak ukur pemetaan posisi Perseroan yang dilihat dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. Analisa tersebut kemudian akan menjadi acuan dalam membuat keputusan dan perencanaan strategis yang akan diterapkan guna membangun kekuatan atas kelangsungan usaha Perseroan. Berikut adalah uraian mengenai analisa SWOT yang dimiliki oleh Perseroan.

Kondisi Eksternal Berdasarkan Peluang dan Ancaman

Peluang Usaha yang masih terjaga dengan baik turut didukung oleh kekuatan Perseroan sebagai salah satu pemain utama dalam industri konstruksi nasional yang dibekali dengan posisi Perseroan sebagai *market leader* di industri beton pracetak di Indonesia. Perseroan diproyeksikan memiliki banyak proyek pembangunan yang terutama untuk bidang konektivitas, seperti : pembangunan jalan sepanjang 678,0 km, pembangunan jalur kereta api sepanjang 378,0 km^{sp}, pembangunan jembatan sepanjang 13,1 km dan pembangunan 10 bandara baru. Selain itu, juga terdapat pembangunan bidang pelayanan dasar, yaitu : rumah susun dan rumah khusus 11.650 unit, akses sanitasi dan persampahan 1.037.010 KK, bendungan 47 unit (43 *on-going*/4 unit baru), dan pembangunan jaringan irigasi 20.000 Ha.

Namun di awal tahun 2020, Pandemi Covid-19, yang merupakan bencana nasional maupun internasional, telah melumpuhkan aktivitas perekonomian di seluruh dunia. Sepanjang tahun 2020, banyak sekali aktivitas produksi dan operasi yang menurun drastis, sehingga utilitas pabrik maupun proyek sangat kecil. Isu global yang tidak kalah penting yang menjadi efek domino adalah hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok yang berpengaruh terhadap perdagangan tingkat global serta investasi luar negeri. Selain itu adanya *precaster* asing di Indonesia menjadi ancaman bagi perusahaan *precaster* lokal. Langkah antisipasi pemerintah dalam hal ini adanya program pemulihan nasional (PEN) untuk mendanai sebagian proyek strategis. Langkah antisipasi perusahaan berupa langkah skala internal dan skala eksternal. Skala Internal, yaitu meningkatkan penjualan, perusahaan menggunakan produk dan jasa yang ada dengan memperluas jangkuan pemasaran, dalam arti mendirikan kantor perwakilan atau representatif atau mobile concrete, untuk mendekati diri dengan pelanggan. Skala External, yaitu meningkatkan penjualan dengan menggunakan produk dan jasa yang belum ada di perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan produk baru di pasar eksisting maupun di pasar yang baru.

ASSUMPTIONS USED BY THE MANAGEMENT IN CONDUCTING ASSESSMENT

Several factors are taken into consideration that underlie the management's assumptions in deciding that the Company's business continuity is still very well maintained, through the explanation of the SWOT analysis and assessment of the Company's Soundness Level in 2020 which are described as follows.

ANALYSIS ON INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT

Management uses a SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) analysis as a benchmark for mapping the Company's position in terms of strengths, weaknesses, opportunities and challenges that come from internal and external sources. The analysis will then serves as a reference in making strategic decisions and plans that will be applied in order to build strength for the Company's business continuity. The following is a description of the SWOT analysis owned by the Company.

External Condition Based on Opportunities and Threats

Business opportunities that are still well preserved are also supported by the Company's strength as one of the main players in the national construction industry which is equipped with the Company's position as the market leader in the precast concrete industry in Indonesia. The Company is projected to have many development projects especially in the field of connectivity, such as: road construction of 678.0 km, construction of 378.0 km of railway lines, construction of 13.1 km of bridges, and construction of 10 new airports. In addition, there is also the development of basic services, namely: 11,650 units of flats and special houses, access to sanitation and garbage disposal of 1,037,010 households, 47 units of dams (43 *on-going*/4 new units), and construction of a 20,000 hectares irrigation network.

However, in early 2020, the Covid-19 Pandemic, which was a national and international disaster, has paralyzed economic activity around the world. Throughout 2020, there were a lot of production and operating activities that drastically decreased, so that the utility of factories and projects was very low. A global issue that is no less important that becomes a domino effect is the relationship between the United States and China which affects global trade and foreign investment. In addition, the presence of foreign precasters in Indonesia is a threat to local precaster companies. The government's anticipatory steps, in this case the national recovery program (PEN), are to fund some strategic projects. Anticipation measures for the Company are in the form of internal scale steps and external scale steps. Internal scale, namely increasing sales, the Company using existing products and services by expanding their marketing reach, in the sense of establishing a representative office or mobile concrete, to get closer to customers. External Scale, which is increasing sales by using products and services that do not yet exist in the Company. This can be done by creating new products in existing markets as well as in new markets.

Kondisi Internal Berdasarkan Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk yang saat ini mempunyai portofolio yang lengkap dari mulai *precast, readymix, quarry*, jasa instalasi dan konstruksi. Sesuai visi perusahaan yang memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan EPI diperlukan kapasitas dan kapabilitas SDM di industri beton yang handal dan memiliki kemampuan berinovasi di semua lini bisnisnya. Wika Beton juga memiliki 3 anak perusahaan, yaitu : PT Citra Lautan Teduh (CLT), Wijaya Karya Komponen Beton (WIKAKOBE), Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKAKRATON), serta 1 (satu) perusahaan asosiasi yaitu Wika Pracetak Gedung (WPG). Namun kinerjanya masih belum optimal dikarenakan masih terjadi ketersinggungan bisnis dengan induknya.

Wika Beton mempunyai pabrik, kantor wilayah penjualan, *quarry* dan *mobile concrete* yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka menangkap peluang pasar untuk mendapatkan *competitive advantage*. Oleh karena itu diperlukan investasi yang cukup besar. Namun di era pandemi Covid-19 saat ini, kebijakan investasi hanya dibatasi pada kegiatan yang langsung berdampak pada penjualan dan laba. Hal tersebut merupakan antisipasi dari perusahaan untuk menjaga keseimbangan *Cash Flow* agar perusahaan tetap berkinerja baik. Selain fokus di pasar lokal, Wika Beton juga melakukan penetrasi ke pasar luar negeri khususnya Asia Tenggara dengan bersinergi bersama induknya. Digitaisasi juga merupakan aspek penting bagi perusahaan dimana saat ini menjadi tuntutan di era globalisasi yang sangat kompetitif dan *uncertainly*. Namun saat ini, belum sepenuhnya diterapkan sistem IT yang terintegrasi di semua lini bisnis.

Secara keseluruhan, kekuatan dan peluang usaha yang dimiliki Perseroan masih melebihi kelemahan dan ancaman yang ada. Namun Manajemen tetap mengambil langkah strategis yang terukur untuk memitigasi potensi risiko internal dan eksternal yang dapat timbul guna menjaga keberlangsungan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Selain menggunakan analisa SWOT sebagai acuan analisa atas kekuatan kelangsungan usahanya, Perseroan juga menganalisa realisasi tingkat kesehatan Perseroan tahun 2020 perhitungannya berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 yang diuraikan sebagai berikut.

Tingkat Kesehatan Tahun 2020 / 2020 Health Index				
Uraian / Description	RKAP 2020		Realisasi 2020 / 2020 Realization	
	Nilai / Value	Skor / Sore	Nilai / Value	Skor / Sore
Aspek Keuangan / Financial Aspect				
Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) / Return on Equity (ROE)	3,55%	5,50	4,35%	7,00
Imbalan Investasi (ROI) / Return on Investment (ROI)	6,77%	5,00	5,31%	5,00
Rasio Kas / Cash Ratio	15,90%	3,00	32,77%	4,00

Internal Condition Based on Strengths and Weaknesses

The Company is one of the companies owned by PT Wijaya Karya Persero Tbk which currently has a complete portfolio from precast, readymix, quarry, installation, and construction services. In accordance with the Company's vision, which aims to become an EPI company, it requires the capacity and capability of human resources in the concrete industry who are reliable and have the ability to innovate in all lines of business. Wika Beton also has 3 subsidiaries, namely: PT Citra Lautan Teduh (CLT), Wijaya Karya Komponen Beton (WIKAKOBE), Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKAKRATON), and 1 (one) associates, namely Wika Pracetak Gedung (WPG). However, its performance is still not optimal because there are business conflicts with its parent.

Wika Beton has factories, regional sales offices, quarry and mobile concrete spread throughout Indonesia in order to seize market opportunities to gain competitive advantage. Therefore, a large investment is required. However, in the current era of the Covid-19 pandemic, investment policy is only limited to activities that directly impact sales and profits. This is an anticipation from the Company to maintain a balance of cash flow so that the Company continues to perform well. In addition to focusing on the local market, Wika Beton also penetrates overseas markets, especially Southeast Asia by synergizing with its parent company. Digitization is also an important aspect for a company which is currently becoming a demand in an era of globalization that is highly competitive and uncertain. However, currently, an integrated IT system has not been fully implemented in all lines of business.

Overall, the Company's strengths and business opportunities still exceed the existing weaknesses and threats. However, Management continues to take measured strategic steps to mitigate potential internal and external risks that may arise in order to maintain the Company's business continuity in the future.

COMPANY HEALTH INDEX

Apart from using the SWOT analysis as a reference for analysis of the strength of its business continuity, the Company also analyzes the realization of the Company's health level in 2020, the calculation is based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No: 100/MBU/2002 dated June 4, 2002 which is described as follows.

Tingkat Kesehatan Tahun 2020 / 2020 Health Index				
Uraian / Description	RKAP 2020		Realisasi 2020 / 2020 Realization	
	Nilai / Value	Skor / Score	Nilai / Value	Skor / Score
Rasio Lancar / Current Ratio	113,10%	4,00	111,51%	4,00
Collection Period (hari) / (day)	92,80	4,00	48,08	5,00
Perputaran Persediaan (hari) / Inventory Turnover (day)	85,61	4,50	60,32	4,50
Perputaran Total Aset (TATO) / Total Assets Turnover (TATO)	57,52%	3,00	58,37%	2,50
Total Modal Sendiri terhadap Total Aset / Total Equity to Total Assets	37,32%	10,00	39,07%	10,00
Jumlah Aspek Keuangan / Total Financial Aspect		39,00		42,00
Aspek Operasional / Operational Aspect				
Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction		5,00	100,71%	5,00
Peningkatan Kualitas SDM / Human Capital Quality Improvement		5,00	100,08%	5,00
Produktivitas atas Penjualan / Sales Productivity		5,00	100,00%	5,00
Jumlah Aspek Operasional / Total Operational Aspect		15,00		15,00
Aspek Administrasi / Administration Aspect				
Laporan Audit / Audit Report		5,00	≤ bulan 4	5,0
RKAP		5,00	≥ 2 bulan	5,0
Keterlambatan Laporan Periodik / Delay in Periodic Reports		5,00	0	5,0
Jumlah Aspek Administrasi / Total Administration Aspect		15,00		15,00
Total Skor / Total Score		69,00		72,00
Kualifikasi / Qualification		A		A
Tingkat Kesehatan / Health Index		SEHAT / HEALTHY		SEHAT / HEALTHY

Secara keseluruhan realisasi skor tingkat kesehatan Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar 72,00 dengan kualifikasi A dan SEHAT. Realisasi tersebut sudah mencapai target RKAP 2020 dengan total skor sebesar 69,00, serta kualifikasi dan tingkat kesehatan masing-masing A dan SEHAT. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan usaha Perseroan berdasarkan penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi di tahun 2020 dinilai masih stabil dan terjaga.

STRATEGI BISNIS TAHUN 2021

Memasuki tahun 2021, Perseroan akan semakin giat melakukan penajaman strategi dengan tetap memperhatikan perubahan pada iklim ekonomi di tanah air dan kemampuan internal Perseroan. Strategi tahun 2021 akan diarahkan untuk menjaga kelangsungan usahanya melalui peningkatan hasil proses bisnis yang optimal. Beberapa pokok strategi Perseroan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjalin hubungan yang erat dengan investor, *project owner*, konsultan serta tenaga ahli dalam menciptakan peluang & proyek baru.
2. Bekerjasama dengan perusahaan spesialis penunjang konstruksi untuk meningkatkan daya saing Perseroan.
3. Penanaman investasi secara selektif dengan mengutamakan investasi yang memberikan keuntungan langsung terhadap penjualan dan laba Perseroan.

Overall, the realization of the Company's health level score in 2020 is 72.00 with A and SOUND qualifications. The realization has reached the 2020 RKAP target with a total score of 69.00, as well as the qualifications and health levels of A and HEALTHY, respectively. This shows that the Company's business continuity based on the assessment of Financial Aspects, Operational Aspects, and Administrative Aspects in 2020 is considered to be stable and maintained.

BUSINESS STRATEGIES FOR 2021

Entering 2021, the Company will be more active in honing its strategies while still taking into account the changes in the economic climate in the country and the Company's internal capabilities. The strategies for 2021 will be directed at maintaining business continuity by increasing the results of optimal business processes. Some of the main points of the Company's strategies for 2021 are as follows:

1. Maintain close relationships with investors, project owners, consultants and experts in creating new opportunities and projects.
2. Cooperate with construction support specialist companies to improve the Company's competitiveness.
3. Conduct selective investment by prioritizing investments that can provide direct benefits to the Company's sales and profits.

4. Menjadi kontraktor spesialis di *Trackwork* dan *Signaling*.
5. Pengembangan dan penguasaan material alam di beberapa lokasi yang potensial untuk meningkatkan daya saing industri *Ready-mix* dan *Quarry*.
6. Komersialisasi rumah *precast*, *SHMS* dan *trackwork*.
7. Pengembangan bisnis *repairing* dan *retrofitting* untuk meningkatkan kompetensi perusahaan.
8. Pemberdayaan anak perusahaan melalui proses restukturisasi bisnis.
9. Mempercepat pencairan termin pembayaran untuk meningkatkan kesehatan arus kas Perseroan.
10. Penerapan *Supply Change Management (SCM)* untuk menekan biaya dan meningkatkan keuntungan.
11. Mengembangkan bisnis *admixture* sebagai solusi pemenuhan kebutuhan *admixture*.
12. Menggencarkan pemasaran di luar negeri dengan fokus utama ke negara Singapura, Malaysia dan Filipina.

STRATEGI BISNIS JANGKA PANJANG

Di tengah kondisi pasar yang dinamis dan penuh tantangan, Perseroan menyadari pentingnya perencanaan kebijakan usaha yang adaptif dan strategis guna menangkap peluang usaha yang tersedia. Strategi bisnis yang telah disusun oleh Manajemen merupakan hasil bauran dari kondisi pasar eksternal yang mencakup perkembangan ekonomi nasional, global dan industri konstruksi nasional, serta disesuaikan dengan posisi Perseroan sebagai bagian dari Wijaya Karya Group yang merupakan perusahaan pelopor di industri konstruksi dalam negeri. Berikut adalah kebijakan strategi bisnis jangka panjang:

1. Memanfaatkan sinergi pemasaran Wijaya Karya Group dalam memenangkan persaingan untuk mendapatkan proyek strategis di dalam dan luar negeri.
2. Meningkatkan penjualan dan keuntungan Perseroan melalui pembentukan Divisi Operasi dan Divisi Pengelolaan Material.
3. Pengembangan organisasi yang disesuaikan dengan hasil tinjauan Bisnis Proses yang telah dikembangkan sejalan dengan pengembangan bisnis usaha Perseroan.
4. Bekerjasama dengan mitra strategis untuk meningkatkan kemampuan *operational excellence* dan kompetensi SDM serta keberhasilan program suksesi.
5. Menerapkan program efisiensi biaya yang terukur melalui reposisi unit kerja dan SDM.
6. Mengutamakan investasi yang memberikan dampak langsung terhadap penjualan dan laba Perseroan.
7. Penerapan proses *Supply Change Management (SCM)* yang akan menuntaskan masalah rantai pasok guna meningkatkan daya saing Perseroan.

LONG-TERM BUSINESS STRATEGY

Amid the dynamic and challenging market conditions, the Company realizes the importance of planning an adaptive and strategic business policy in order to seize available business opportunities. The business strategy prepared by the Management is the result of a mix of external market conditions, which include national, global and national construction industry developments, and is adjusted to the Company's position as part of the Wijaya Karya Group, namely the pioneering company in the domestic construction industry. The following are the long-term business strategy policies of the Company:

1. Take advantage of the Wijaya Karya Group's marketing synergy to win the competition for strategic projects at home and overseas.
2. Increase the Company's sales and profits through the establishment of Operations Division and Material Management Division.
3. Develop organization in line with the results of Business Process review prepared in line with the development of the Company's business.
4. Cooperate with strategic partners to improve operational excellence and HR competence as well as the success of the succession program.
5. Implement a measurable cost efficiency program through repositioning of work units and human resources.
6. Prioritize investments that have a direct impact on the Company's sales and profits.
7. Implement the Supply Change Management (SCM) process which will resolve supply chain problems in order to increase the Company's competitiveness.





TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance

06



Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance



Perseroan telah menetapkan *road map* tata kelola 2019 - 2023 sebagai arah implementasi dan pengembangan GCG serta memberikan panduan bagi seluruh insan WILKA BETON dalam menerapkan prinsip dan praktik GCG pada aktivitas bisnis yang dijalankan.

The Company has established a 2019 - 2023 road map for GCG implementation and development and provides guidance for all WILKA BETON employees in applying the principles and practices of GCG in their business activities.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam mewujudkan penerapan praktik terbaik (*best practice*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG"), WILKA BETON senantiasa memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disertai upaya dalam menumbuhkan budaya sadar GCG di seluruh lapisan manajemen. Perseroan meyakini bahwa penerapan asas dan prinsip GCG mampu mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi keberlangsungan usaha Perseroan.

Integritas Perseroan dalam menerapkan praktik terbaik GCG senantiasa mengacu pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

In realizing the implementation of the best practices of Good Corporate Governance ("GCG"), WILKA BETON always pays attention to the prevailing laws and regulations along with efforts to foster a culture of GCG awareness at all levels of management. The Company believes that the implementation of GCG principles is able to encourage the creation of a favorable and responsible work climate as well as providing added value in a sustainable manner for the sustainability of the Company's business.

The integrity of the Company in implementing GCG best practices always refers to the prevailing laws and regulations, including:

1. Undang-Undang:
 - Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Menteri
 - Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 - Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/06/2016 Jo. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;
 - Salinan Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/212 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
3. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, di antaranya:
 - Peraturan No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
 - Peraturan No. IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 - Peraturan No. X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Laporan Tahunan;
 - Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BI/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-346/BI/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan;

1. Laws:
 - Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 - Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market;
 - Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruptions;
 - Law No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure;
 - Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes;
 - Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Amendments on Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
2. Ministerial Regulations:
 - Regulation of The Ministry of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 concerning Implementation of Good Corporate Governance by State-Owned Enterprises;
 - Regulation of The Ministry of SOE No. PER-2/MBU/06/2016 Jo. PER-04/MBU/2014 concerning Guidance in Determining Remuneration for the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOE;
 - Copy of the Secretary's Decision to the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Assessment and Evaluation Indicators/Parameters on the Implementation of GCG by SOE.
3. The laws and regulations the Capital Market;
 - Regulation No. X.K.4, Attachment to Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-27/PM/2003 dated July 17, 2003 concerning Report on Realization of Use of Proceeds from Public Offering;
 - Regulation No. IX.I.5, Attachment to Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-29/PM/2004 dated September 24, 2004 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee;
 - Regulation No. X.K.6, Attachment to Decree of the Chairman of Bapepam LK No. Kep-431/BL/2012 dated August 1, 2012 concerning Submission of Annual Reports of Issuers or Public Companies, namely Annual Reports;
 - Regulation No. IX.J.1, Attachment to the Chairman of Bapepam LK No. Kep-179/BI/2008 dated May 14, 2008 concerning the Principles of Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies;
 - Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam LK No. Kep-346/BI/2011 dated July 5, 2011 concerning Obligations to Submit Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies, namely Annual Financial Statements and Semi-Annual Financial Statements;



- Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 - Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 - Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
 5. *Principles of Corporate Governance* (OECD, 2004);
 6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.01.01/WB.0A.037/2019 tentang *Board Manual* PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 18 Oktober 2019;
 7. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.01.01/WB-0A/036/2019 tentang *Code of Corporate Governance* dan *Code of Conduct* PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 18 Oktober 2019;
 8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, seperti:
 - a. Pokok-pokok *Whistle Blower*;
 - b. Pokok-Pokok Kebijakan Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor;
 - c. Pokok-Pokok Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi;
 - d. Pokok-Pokok Manajemen Risiko;
 - e. Pokok-Pokok Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi;
 - f. Pokok-Pokok Kebijakan *Insider Trading*;
 - g. Pokok-Pokok Kebijakan Sistem Informasi dan Komunikasi;
 - h. Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Kreditur.
- OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies jo. Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies;
 - OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
 - OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
 - OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
 - OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Website of Issuers or Public Companies;
 - OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies;
 - OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies;
 - OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies;
 - OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies;
 - OJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.
4. General principles of Good Corporate Governance from National Committee on Governance Policy (KNKG);
 5. Principles of Corporate Governance (OECD, 2004);
 6. Joint Agreement of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No: SK.01.01/WB-0A.037/2019 concerning Board Manual of PT Wijaya Karya Beton Tbk dated October 18, 2019;
 7. Joint Agreement of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No: SK.01.01/WB-0A.036/2019 concerning Code of Conduct of PT Wijaya Karya Beton Tbk dated October 18, 2019;
 8. Company good corporate governance policies such as:
 - a. Points on Whistleblower;
 - b. Points on selection policy and quality development of Suppliers/Vendor;
 - c. Points on Information and Confidentiality Ownership;
 - d. Points on Risk Management;
 - e. Points on Business Ethics, Anti-Corruption and Donation;
 - f. Points on Insider Trading Policy;
 - g. Points on Information and Communication System Policy;
 - h. Compliance policy of Creditor's right.

PRINSIP-PRINSIP GCG

Penerapan GCG di lingkungan WIKA BETON senantiasa memperhatikan kepatuhan pada peraturan dan regulasi yang berlaku serta menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaannya. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, penerapan tata kelola Perseroan berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

GCG PRINCIPLES

The implementation of GCG in WIKA BETON always pays attention to compliance with applicable rules and regulations and upholds best practices in its implementation. Referring to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Governance in SOEs, the implementation of corporate governance adheres to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Prinsip GCG / GCG Principles	Definisi / Definition	Implementasi / Implementation
Transparansi / Transparency	<p>Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material yang relevan, akurat, dan tepat waktu guna menjamin pemenuhan hak seluruh pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh Perseroan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. / The openness in implementing the decision-making process and openness in disclosing relevant, accurate, and timely material information to ensure fulfilment of rights of stakeholders. Transparent disclosure of information is carried out by the Company in compliance with applicable laws and regulations and in accordance with GCG principles.</p> <p>Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk dan aktivitas operasional Perseroan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan. / Transparency also includes matters relevant to the information required by the public in relation to the Company's products and operational activities that potentially influence stakeholder behavior.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan; / Creation and Explanation of the Company's Annual Budgeting (RKAP); Pembuatan Laporan Tahunan; / Annual Report preparation; Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, semester, dan triwulan; / Regular Financial Report (annual, half year, and quarterly); Laporan keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) atas setiap aksi korporasi ataupun fakta material tentang Perseroan; / Information Disclosure Report, submitted to Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (IDX) for each decisions in corporate level or other materials facts regarding the Company; Pembuatan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report); / Sustainability Report preparation; Optimalisasi keberadaan situs web (www.wika-beton.co.id), media cetak, atau media elektronik seperti aplikasi WTON Mobile, WTON Magazine, dan lainnya sebagai platform untuk menyampaikan informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana telah dimandatkan di dalam POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. / Optimization of website (www.wikabeton.co.id), print media or electronic media such as WTON Mobile App, WTON Magazine and other media used as the platforms to publish the information for our Shareholders or other Stakeholders, which was regulated in POJK No.8/POJK.04/2015 concerning Website of Issuers or Public Company.
Akuntabilitas / Accountability	<p>Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. / The clarity of functions, implementation and accountability of the Company's Organs which enable the Company's management effectively implemented.</p> <p>Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki Organ Perusahaan dan pegawai secara jelas sesuai dengan visi, misi, sasaran dan strategi Perseroan. / Accountability is related to the implementation of the duties, authority and responsibilities of the Company's Organs and employees clearly in accordance with the vision, mission, goals and strategies of the Company.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pembagian tugas yang jelas untuk masing-masing organ Perseroan, termasuk dalam hal rincian tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta kinerjanya baik secara kolegal maupun individual. / Clear job distribution to all components, including job desk on General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Board of Directors, etc. (both collegially or individually). Menerapkan check and balance system. / Implementing check and balance system. Memiliki standar kinerja untuk semua jajaran/level organisasi yang telah disepakati bersama, konsisten terhadap implementasi nilai-nilai Perseroan (corporate values), sasaran usaha, dan strategi Perseroan, serta memiliki sistem reward and punishment. / Having standard of performance for all organizational level that has been agreed upon, consistent to the implementation of corporate values, targets and strategy, with reward and punishment system. Memiliki sistem pelaporan berkala dan senantiasa mengevaluasi pencapaian serta kinerja Perseroan. / Having a regular reporting system and always evaluate achievement and performance of the Company.
Pertanggungjawaban / Responsibility	<p>Kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. / Conformity in the management of the Company with the prevailing laws and regulations and the principles of sound corporations.</p> <p>Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya kewajiban Perseroan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan bidang usaha korporasi, antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta persaingan usaha. / The responsibility is realized by fulfilling the Company's obligations in carrying out the applicable laws and regulations of the Central and Regional Governments related to the field of corporate business, including provisions relating to employment, taxation, occupational health and safety, and business competition.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya di bidang pasar modal, industri, konstruksi, dan lingkungan yang relevan bagi Perseroan. / Complying with the Articles of Association and other applicable laws and regulations issued by regulators concerning capital market, industry, construction, and environment. Melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk melakukan wajib pungut dengan baik dan tepat waktu. / Fulfilling tax obligation, including compulsory levies in a proper and timely manner. Menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). / Performing corporate social responsibilities. Menjalankan kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI. / Conducting obligation of information disclosure based on regulations set by Financial Services Authority and Indonesian Stock Exchange.

Prinsip GCG / GCG Principles	Definisi / Definition	Implementasi / Implementation
Kemandirian / Independency	<p>Keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. / The state in which the Company is professionally managed without conflict of interest and influence/pressure from any party that is inconsistent with the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, kemandirian dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ. / In its implementation, independency can be realized by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities, as well as the authority of each organ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Saling menghormati, hak, kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan. / Mutually respect the rights, obligations, duties, authorities and responsibilities among the Company's organs. Baik pemegang saham maupun Dewan Komisaris Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengintervensi dalam hal kepemimpinan Perseroan. / Shareholders and the Board of Commissioners do not intervene the Company's management. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan di dalam setiap proses pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas. / The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees continuously avoid the conflict of interest in every decision-making process by signing an integrity pact. Menerapkan kebijakan dan sistem yang dapat meminimalkan terjadinya benturan kepentingan. / Implementation of policy and system, which minimizes the potential of conflict of interest.
Kewajaran / Fairness	<p>Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising under the applicable laws and regulations.</p> <p>Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. / Fairness can be reflected in providing opportunities to parties concerned in providing input, suggestions and opinions for the interests of the Company, while equality can be realized by giving awards and rewards in accordance with their performance without differentiating ethnicity, religion, race, and gender.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara di dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan. / Shareholders are entitled to attend and cast their votes in GMS based on applicable regulations and the Company's Articles of Association. Perseroan memperlakukan seluruh rekanan secara adil dan transparan. / The Company treats all partners fairly and transparently. Perseroan berupaya untuk menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh karyawan sebagaimana telah tertuang di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya. / The Company creates favorable working environment to all employees based on the Collective Labor Agreement, and applicable laws and regulations.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), tujuan penerapan GCG antara lain:

- Mengoptimalkan nilai-nilai Perseroan agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan posisinya di pasar serta dapat mencatat pertumbuhan yang berkelanjutan demi merealisasikan visi, misi, dan tujuan Perseroan.
- Mampu mewujudkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif dan efisien, serta dapat memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan.
- Mendorong setiap organ Perseroan untuk membuat keputusan dan menjalankan tindakan agar berlandaskan pada nilai-nilai moral yang tinggi, menjunjung tinggi etika bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.
- Meningkatkan kontribusi Perseroan di dalam perekonomian nasional.
- Mendukung Pemerintah untuk meningkatkan iklim bisnis yang kondusif terhadap perkembangan investasi nasional.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

As regulated in the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance, the objectives of implementing GCG include:

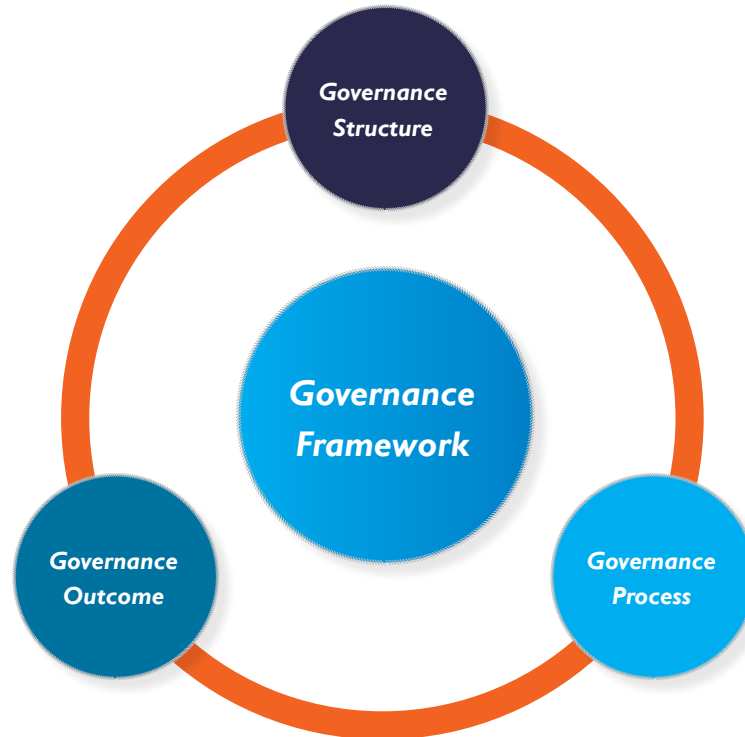
- Optimizing corporate values to have strong competitive edge, both nationally and internationally, to maintain its position in the market and gain a sustainable growth so as to realize its vision, mission, and goals.
- Encouraging professional, effective, and efficient management of the Company as well as empowering function and increasing independence of the Company's organs.
- Encouraging the Company's organs in upholding business ethics and moral values in every decision made, also complying every action with prevailing regulations and awareness on corporate social responsibility toward stakeholders and environmental preservation around the Company.
- Improving the Company's contribution for the national economy.
- Supporting the government to improve business climate for the development of national investment.

KERANGKA KERJA GCG (GCG FRAMEWORK)

Perseroan menerapkan 3 (tiga) aspek utama dalam kerangka penerapan GCG, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

GCG FRAMEWORK

The Company implements 3 (three) main aspects in the GCG framework, namely *governance structure*, *governance processes*, and *governance outcomes*.



Governance Structure

Governance structure berkaitan dengan kecukupan struktur dan infrastruktur GCG sehingga proses penerapan prinsip GCG mampu menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Struktur tata kelola Perseroan meliputi Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite, dan satuan kerja. Sementara, *soft structure* dan perangkat kebijakan yang dimiliki antara lain *Board Manual*, *Code of Conduct*, Anggaran Dasar, dan perangkat kebijakan tata kelola lainnya.

Governance Process

Governance process merupakan prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis dalam menggerakkan struktur tata kelola yang dimiliki ke arah penerapan tata kelola yang dituju, antara lain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, pelaksanaan aktivitas usaha dan strategi perusahaan, pengelolaan SDM, dan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Governance Outcome

Integrasi komitmen pelaksanaan *governance structure* dan *governance outcome* kemudian menghasilkan *governance outcome* atau hasil yang diperoleh atas pemanfaatan struktur tata kelola dan pelaksanaan proses tata kelola. *Outcome* yang diperoleh antara lain kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola, transparansi

Governance Structure

Governance structure is related to the adequacy of the GCG structure and infrastructure so that the process of implementing GCG principles is able to produce outcomes in accordance with stakeholder expectations. The corporate governance structure includes the Board of Commissioners, the Board of Directors, committees, and work units. Meanwhile, soft structure and policy instruments include the Board Manual, Code of Conduct, Articles of Association, and other governance policy instruments.

Governance Process

Governance process is a structured and systematic procedure and mechanism in mobilizing the existing governance structure towards the intended implementation of governance, including the implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS), implementation of functions, duties, authorities and responsibilities, implementation of business activities, and corporate strategy, human resource management, and corporate social responsibility activities.

Governance Outcome

The integration of the commitment to implementing governance structures and governance outcomes then results in governance outcomes or results obtained from the use of governance structures and the implementation of governance processes. The outcomes obtained include the adequacy of governance

laporan, kepatuhan Perseroan, terhindarnya Perseroan dari pelanggaran (*fraud*), dan perolehan penghargaan dan pengakuan eksternal.

structure and infrastructure, transparency of reports, compliance of the Company, prevention of the Company from fraud, and the acquisition of awards and external recognition.

Adapun integrasi dan keterkaitan antara ketiga kerangka tata kelola tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

The integration and engagement between the three governance frameworks is described in the following table.

Struktur Tata Kelola / Governance Structure	Proses Tata Kelola / Governance Process	Hasil Tata Kelola / Governance Results
<p>1. Infrastruktur GCG: / GCG Infrastructure:</p> <p>a. Organ Utama: / Main Organ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RUPS / GMS • Dewan Komisaris / Board of Commissioners • Direksi / Board of Directors <p>b. Organ Penunjang: / Supporting Organ: Sekretaris Perusahaan, Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris, dan lainnya. / Corporate Secretary, Committees under the Board of Commissioners, etc.</p> <p>2. Soft Structure GCG: / GCG Soft Structure: Kebijakan tata kelola perusahaan senantiasa dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di Perseroan. / The Company's governance policy is the guidelines in implementing GCG principles in the Company.</p>	<p>1. Senantiasa menjamin pemenuhan hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. / Always guarantee the fulfillment of rights of shareholders and other stakeholders.</p> <p>2. Senantiasa memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. / Always equally treat all shareholders and other stakeholders.</p> <p>3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. / Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</p> <p>4. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Perseroan. / Transparency of the Company's financial and non-financial conditions.</p>	<p>Perseroan berhasil meraih penghargaan di bidang tata kelola sebagai pengakuan eksternal atas penerapan dan keterbukaan <i>governance</i> selama tahun buku. Penghargaan tersebut adalah Peringkat Keterbukaan <i>Governance</i> Emiten Sektor Industri Dasar Terbaik dari ajang <i>Environmental, Social & Governance (ESG) Awards 2020</i> dari Bumi Global Karbon Foundation (BGKF) dan Majalah Investor Berita Satu. Hal tersebut didukung dengan skor <i>assessment</i> GCG Perseroan yang selalu mengalami peningkatan sebagai berikut: / The Company successfully won awards in the field of governance as an external recognition for the implementation and transparency of governance during the fiscal year. The award was the Best Issuer Governance Transparency for Basic Industry from the 2020 Environmental, Social & Governance (ESG) Awards from Bumi Global Karbon Foundation (BGKF) and Investor Magazine Berita Satu. This is supported by the Company's GCG assessment score which always increases as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Assessment</i> GCG oleh BPKP tahun 2015 memperoleh skor 87,16 dengan predikat "Sangat Baik". / 2015 GCG assessment by BPKP with score of 87.16 with the "Excellent" predicate. 2. <i>Self Assessment</i> GCG oleh Tim Assessment WIKA Group pada tahun 2016 dengan skor 87,16 dengan predikat "Sangat Baik". / GCG Self-Assessment by the WIKA Group Assessment Team in 2016 with score of 87.16 with "Excellent" predicate. 3. <i>Assessment</i> GCG oleh BPKP tahun 2017 memperoleh skor 88,46 dengan predikat "Sangat Baik". / 2017 GCG assessment by BPKP with score of 88.46 with "Excellent" predicate. 4. <i>Assessment</i> GCG oleh Tim Assessment WIKA Grup tahun 2018 memperoleh skor 88,46 dengan predikat "Sangat Baik". / GCG Assessment by the WIKA Group Assessment Team in 2018 with score of 88.46 with "Excellent" predicate. 5. <i>Assessment</i> GCG oleh BPKP tahun 2019 memperoleh skor 88,936 dengan predikat "Sangat Baik". / 2019 GCG assessment by BPKP with score of 88.936 with "Excellent" predicate.

PEMENUHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN GCG PADA PERUSAHAAN TERBUKA

Penilaian atas penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan dilakukan sekali setahun atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Secara prinsip, Perseroan senantiasa mempertimbangkan seluruh hasil penilaian atas penerapan GCG sebagai bentuk *feedback* guna mengoptimalkan kinerja dan menjaga keberlangsungan bisnis Perseroan di masa depan. Di bawah ini dapat dilihat hasil penerapan aspek, prinsip, dan rekomendasi di dalam Perseroan selama tahun 2020:

COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATIONS ON GCG IMPLEMENTATION IN PUBLIC COMPANIES

Assessment of the implementation of GCG principles in the Company is conducted once a year or can be done at any time if needed. This is in accordance with the provisions of POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Governance Guidelines for Public Companies. In principle, the Company always considers all the results of the assessment of the implementation of GCG as a form of feedback to optimize performance and maintain the sustainability of the Company's business in the future. Below can be seen the results of the implementation of aspects, principles and recommendations within the Company throughout 2020:

No.	Prinsip dan Rekomendasi / Principles and Recommendations	Penjelasan / Explanation	Status Penerapan / Implementation Status	Bentuk Penerapan di Perseroan / Form of Implementation in the Company
I. HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM /				
II. RELATIONS OF PUBLIC COMPANY WITH SHAREHOLDERS IN ASSURING RIGHTS OF SHAREHOLDERS				
I. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) /				
Improving the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation				
a.	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun terbuka yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. / Publicly listed companies have technical voting methods or procedures that prioritize independence and shareholder interests.	<ul style="list-style-type: none"> Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). / Each share with voting rights issued has one vote (<i>one share one vote</i>). Shareholders can exercise their voting rights when making decisions, especially in making decisions by means of voting. 	√	<p>Perseroan telah memiliki ketentuan mengenai prosedur teknis pengambilan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup di dalam RUPST dan RUPSLB, yaitu: / The Company has provisions regarding voting procedures, both openly and privately at the AGMS and EGMS, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis; / Voting is conducted after all the questions have been answered and/or the question and answer time is up; Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya; / Each share gives the holder the right to cast 1 (one) vote. If a Shareholder owns more than 1 (one) share, then the concerned person is only required to vote 1 (one) time and the vote represents all shares he/she owns or represents; Pemungutan suara dapat dilakukan secara lisan dengan "Mengangkat Tangan". / Voting can be done verbally by "Raising Hands".
b.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. / All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company attend the Annual GMS.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. / The presence of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuer aims to ensure that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners can pay attention to, explain, and directly answer problems that occur or questions raised by shareholders regarding the agenda of the GMS.	√	Sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan kepada Para Pemegang Saham, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selalu hadir di dalam RUPS, termasuk di dalam RUPST dan RUPSLB tahun buku 2020. / As a form of the Company's responsibility to the Shareholders, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company are always present at the GMS, including at the AGMS and EGMS for the 2020 fiscal year.
c.	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Emiten paling sedikit selama 1 (satu) tahun. / A summary of GMS minutes is available on the Issuer's Website for at least 1 (one) year.	Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten, Emiten wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui situs web Emiten. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Emiten memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web Emiten dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. / Based on the Article 34 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Issuers, Issuers are required to prepare a summary of the GMS minutes in Indonesian and foreign languages (at least in English), and announced 2 (two) working days after the GMS is held to the public, one of which is through the Issuer's website. The availability of a summary of the GMS minutes on the Issuer's website provides an opportunity for absent shareholders to obtain important information in organizing a GMS easily and quickly. Therefore, the provisions regarding the minimum period for availability of summary minutes of the GMS on the Issuer's Website are intended to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.	√	Dalam website Perseroan telah tercantum risalah RUPS, mulai dari RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 sampai dengan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019. / The Company's website contains minutes of the GMS, starting from the Annual GMS for the 2015 Fiscal Year to the Annual GMS for the 2019 Fiscal Year.



No.	Prinsip dan Rekomendasi / Principles and Recommendations	Penjelasan / Explanation	Status Penerapan / Implementation Status	Bentuk Penerapan di Perseroan / Form of Implementation in the Company
2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor / Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors				
a.	Emiten atau Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. / Issuers or Public Companies have a communication policy with shareholders or investors.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komunikasi antara Emiten dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Emiten. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Emiten. / The communication between the Issuers and shareholders or investors is intended so that shareholders or investors gain a clearer understanding of the information that has been published to the public, such as periodic reports, disclosure of information, business conditions or prospects and performance, as well as the implementation of Issuer governance. In addition, shareholders or investors can also submit input and opinions to the Issuer's management. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Emiten dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. / The communication policy with shareholders or investors shows the Issuer's commitment to communicating with shareholders or investors. The policy may include strategies, programs, and timing of communications, as well as guidelines that support shareholders or investors to participate in these communications. 	√	Perseroan telah memiliki kebijakan penyampaian informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap pemenuhan hak-hak Pemegang Saham dan Investor sebagaimana diatur dalam Prosedur Nomor WB-CPR-PS-05 tanggal 3 September 2018 tentang Komunikasi Perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi kebijakan komunikasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham atau investor melalui penyampaian laporan berkala ke BEI, dan OJK, kegiatan <i>Investor Meeting</i> , <i>Analyst Meeting</i> , <i>Public Expose</i> , <i>Media Visit</i> , <i>Factory & Project Visit</i> . / The Company has a policy of delivering information as a form of disclosure of information regarding the fulfillment of Shareholders and Investors' rights as stipulated in Procedure No. WB-CPR-PS-05 dated September 3, 2018 concerning Corporate Communications. This is done as a form of communication policy implementation between the Company and Shareholders or investors through the submission of periodic reports to the IDX and OJK, Investor Meetings, Analyst Meetings, Public Expose, Media Visit, Factory & Project Visit.
b.	Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web. / The public company discloses the communication policy of the public company with shareholders or investors on the website.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Emiten dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Emiten. / The disclosure of the communication policy is a form of transparency on the Issuer's commitment to providing equality to all shareholders or investors in implementing communications. The disclosure of information also aims to increase the participation and role of shareholders or investors in implementing the Issuer's communication program.	√	Perseroan telah mengungkapkan seluruh informasi yang berkaitan dengan kebijakan komunikasi perusahaan melalui situs web resmi Perseroan: www.wika-beton.co.id . / The Company has disclosed all information relating to the company's communication policy through the Company's official website: www.wika-beton.co.id .
III.FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS / FUNCTIONS AND ROLES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS				
3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris / Strengthening Membership and Composition of the Board of Commissioners				
a.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka. / Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the conditions of the public company.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Emiten wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Emiten yang antara lain meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda di antara Emiten. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah ideal anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berdasarkan prinsip GCG sebaiknya berjumlah sama agar tercipta fungsi <i>check and balances</i> yang baik dan seimbang. / The number of members of the Board of Commissioners can affect the effectiveness of the implementation of the duties of the Board of Commissioners. Determination of the number of members of the Issuer's Board of Commissioners must refer to the provisions of the applicable laws and regulations, consisting of at least 2 (two) persons based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider the condition of the Issuer, which includes the characteristics, capacity and size, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among Issuers. Another thing that needs to be considered is the ideal number of members of the Board of Commissioners and Board of Directors based on the GCG principles should be the same in order to create a good check and balance function.	√	Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan yang berstatus sebagai perusahaan terbuka. Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tercatat sebanyak 5 (lima) orang di mana 2 (dua) di antaranya merupakan Komisaris Independen. / The number of members of the Board of Commissioners of the Company has fulfilled the mandate of the prevailing laws and regulations for a Company that is a public company. As of the end of 2020, the number of members of the Company's Board of Commissioners is 5 (five), of which 2 (two) are Independent Commissioners.
b.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. / Determination of the composition of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Emiten. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Emiten. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Emiten merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. / The composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the organs of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners, according to the needs of the Issuer. These characteristics can be reflected in the determination of the expertise, knowledge and experience required in the implementation of supervisory duties and providing advice by the Issuer's Board of Commissioners. Composition that has taken into account the needs of the Issuer is a positive thing, especially in relation to decision making in the context of implementing the supervisory function which is carried out by considering a wider range of aspects.	√	Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan sudah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman sebagaimana telah diatur di dalam Piagam Dewan Komisaris. Hal ini telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, khususnya bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. / The composition of the members of the Board of Commissioners of the Company has taken into account the diversity of expertise, knowledge and experience as stipulated in the Charter of the Board of Commissioners. This has been disclosed in the Corporate Governance Chapter, in the Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors section.

No.	Prinsip dan Rekomendasi / Principles and Recommendations	Penjelasan / Explanation	Status Penerapan / Implementation Status	Bentuk Penerapan di Perseroan / Form of Implementation in the Company
4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris / Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners				
a.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. / The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan kinerja Dewan Komisaris secara kolejal. <i>Self Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolejal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self-assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. / The Board of Commissioners' self-assessment policy is a guideline used collegially by the Board of Commissioners' performance. Self-assessment is carried out by each member to assess the performance of the Board of Commissioners collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With this self-assessment, it is hoped that each member of the Board of Commissioners can contribute to improving the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Emiten, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. / The policy may include assessment activities carried out along with the aims and objectives, periodic implementation time, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Issuer, where these functions are mandatory in the Services Authority Regulation. Finance No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. 	√	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam <i>Charter</i> Dewan Komisaris. Untuk Tahun 2020, Kebijakan <i>Self-Assessment</i> Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang setiap awal tahun ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu, <i>self-assessment</i> Dewan Komisaris juga didasarkan pada Kontrak Manajemen yang ditandatangani bersama Direksi di awal tahun, di mana kontrak ini berisi rencana-rencana pencapaian kerja disertai dengan <i>Key Performance Indikator</i> (KPI). / The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners listed in the Board of Commissioners Charter. For 2020, the Board of Commissioners' Self-Assessment Policy was carried out based on the Work Plan of the Board of Commissioners and the Supporting Organ of the Board of Commissioners which is signed at the beginning of each year by the Company's Board of Commissioners. In addition, the self-assessment of the Board of Commissioners is also based on the Management Contract signed with the Board of Directors at the beginning of the year, in which this contract contains work achievement plans accompanied by Key Performance Indicators (KPI).
b.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Emiten. / The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Issuer's Annual Report.	Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut, pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris. / The disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence in particular to shareholders or investors in improving the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors know the check and balance mechanism on the performance of the Board of Commissioners.	√	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan, sub bagian Dewan Komisaris. / The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Company's Annual Report in the Good Corporate Governance section, the Board of Commissioners sub-chapter.
c.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. / The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Commissioners if involved in a financial crime.	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Emiten, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Emiten. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. / The resignation policy of members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes is a policy that may increase the trust of stakeholders in the Issuer, so that the integrity of the Company will be maintained. This policy is needed to assist the smooth running of the legal process and so that the legal process does not interfere with business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Issuer. This policy can be included in the Guidelines or Code of Ethics that apply to the Board of Commissioners. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. / Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is the status of being convicted of a member of the Board of Commissioners from an authorized party. These financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as the Criminal Act of Money Laundering as referred to in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. 	√	Anggaran Dasar dan <i>Board Manual</i> Perseroan telah mengatur kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris apabila yang bersangkutan terlibat dalam tindak kejahatan keuangan. / The Articles of Association and Board Manual of the Company have set the resignation policy of the Board of Commissioners if the person concerned is involved in a financial crime.

No.	Prinsip dan Rekomendasi / Principles and Recommendations	Penjelasan / Explanation	Status Penerapan / Implementation Status	Bentuk Penerapan di Perseroan / Form of Implementation in the Company
d.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. / The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function formulates a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors.	Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di Perseroan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan. / Based on the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the committee that carries out the nomination function has the duty to formulate policies and criteria required in the nomination process for candidate members of the Board of Directors. One of the policies that can support the nomination process as referred to is the succession policy for members of the Board of Directors. The succession policy aims to maintain the continuity of the regeneration or leadership regeneration process in the Company to maintain business sustainability and the Company's long-term goals.	√	Perseroan telah memiliki kebijakan suksesi yang tidak hanya terbatas pada Anggota Direksi tetapi juga memiliki rencana suksesi untuk setiap level jabatan sebagaimana tertuang di dalam <i>Board Manual</i> , CoCG, serta Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai Kebijakan Suksesi Direksi telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan. / The Company has a succession policy that is not only limited to members of the Board of Directors but also has a succession plan for each level of position as stated in the Board Manual, CoCG, and the Nomination and Remuneration Committee Charter. Further explanation regarding the Board of Directors Succession Policy has been disclosed in the Corporate Governance Chapter.
IV.FUNGSI DAN PERAN DEWAN DIREKSI / FUNCTIONS AND ROLES OF THE BOARD OF DIRECTORS				
5. Meningkatkan Keanggotaan dan Komposisi Direksi / Improving the Membership and Composition of the Board of Directors				
a.	Penentuan jumlah anggota Direksi memperhatikan kondisi Emiten, serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. / Determining the number of members of the Board of Directors takes into account the Issuer's condition, as well as the effectiveness in making decisions.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Emiten. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Emiten dan disesuaikan dengan kondisi Emiten yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Emiten serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. / As a corporate organ authorized in managing the company, the determination of the number of Directors greatly affects the performance of the Issuer. Thus, the determination of the number of members of the Board of Directors must be carried out through careful consideration and must refer to the applicable regulations, which is based on the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies consisting of at least 2 (two persons). In addition, determining the number of Directors must be based on the need to achieve the Issuer's goals and objectives and adjusted to the Issuer's condition, which includes the characteristics, capacity and size of the Issuer and how effective the Board of Directors decision making is to be achieved.	√	Jumlah anggota Direksi Perseroan telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait lainnya yang berlaku bagi Perseroan yang berstatus sebagai perusahaan terbuka. Pada akhir 2020, jumlah anggota Direksi tercatat sebanyak 5 (lima) orang. Penentuan jumlah Anggota Direksi tersebut mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan bisnis Perseroan. Penentuan jumlah dan anggota Direksi menjadi wewenang Pemegang Saham Mayoritas dengan terlebih dahulu meminta persetujuan/rekomendasi Kementerian BUMN. / The number of members of the Board of Directors of the Company has fulfilled the mandate of laws and regulations as well as other related regulations that apply to Companies that have the status as a public company. At the end of 2020, the number of members of the Board of Directors was recorded at 5 (five) people. The determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the characteristics and business needs of the Company. The determination of the number and members of the Board of Directors is the authority of the Majority Shareholders by first seeking approval/recommendation from The Ministry of SOE.
b.	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. / Determining the composition of the members of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Emiten. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Emiten. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi baik secara individual ataupun secara kolegal. / Similar to the Board of Commissioners, the diversity of the members of the Board of Directors is a combination of desired characteristics, both in terms of the organs of the Board of Directors and individual members of the Board of Directors, according to the needs of the Issuer. This combination is determined by taking into account the expertise, knowledge and experience in accordance with the division of duties and functions of the Board of Directors in achieving the objectives of the Issuer. Thus, the consideration of the combination of characteristics referred to will have an impact on the accuracy of the process of nominating and appointing individual members of the Board of Directors, either individually or collegially.	√	Komposisi anggota Direksi Perseroan sudah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman sebagaimana telah diatur di dalam Piagam Direksi. Hal ini telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, khususnya bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. / The composition of the members of the Board of Directors of the Company has taken into account the diversity of expertise, knowledge and experience as stipulated in the Charter of the Board of Directors. This has been disclosed in the Corporate Governance Chapter, particularly in the Diversity of the Board of Commissioners and Directors Composition section.

No.	Prinsip dan Rekomendasi / Principles and Recommendations	Penjelasan / Explanation	Status Penerapan / Implementation Status	Bentuk Penerapan di Perseroan / Form of Implementation in the Company
c.	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. / Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Emiten, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. / The Financial Statements is a management accountability report on the management of resources owned by the Issuer, which must be prepared and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia and also related OJK regulations, including laws and regulations in the Capital Market sector that govern presentation, and disclosure of Issuer Financial Statements. Based on the laws and regulations in the Capital Market sector which govern the responsibilities of the Board of Directors for Financial Statements, the Board of Directors are jointly and severally responsible for the Financial Statements, which are signed by the President Director and members of the Board of Directors in charge of accounting or finance. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat bergantung pada keahlian dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Emiten dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait. / Thus, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will greatly depend on the expertise and/or knowledge of the Board of Directors, particularly members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance. Having the qualifications of expertise and/or knowledge in accounting that at least the members of the Board of Directors possess can provide confidence in the preparation of Financial Statements, so that these Financial Statements can be relied on by stakeholders as a basis for making economic decisions regarding the Issuer. Such expertise and/or knowledge can be proven by educational background, training certification, and/or related work experience. 	√	<p>Perseroan memiliki anggota Direksi yang membawahi bidang keuangan serta memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang Akuntansi dan Keuangan, yaitu Imam Sudiyono yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital & Manajemen Risiko</i>. Profil beliau telah tercantum pada Bab Profil Perusahaan, khususnya bagian Profil Direksi. / The Company has members of the Board of Directors who are in charge of finance and have expertise and knowledge in the fields of Accounting and Finance, namely Imam Sudiyono who currently serves as Director of Finance, Human Capital & Risk Management. His profile has been disclosed in the Company Profile Chapter, specifically in the Profile of the Board of Directors section.</p>
<p>6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi / Increasing the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors</p>				
a.	<p>Direksi memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. / The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self-assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self-assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. / Similar to the Board of Commissioners, the Board of Directors' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for collegial evaluation of the Board of Directors' performance. Self-assessment is carried out by each member of the Board of Directors to assess the performance implementation collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Directors. With this self-assessment, it is hoped that each member of the Board of Directors can contribute to improving the performance of the Board of Directors on an ongoing basis. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Emiten, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. / This policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, periodic implementation time, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Issuer, where the formation of these functions is mandatory in the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. 	√	<p>Kebijakan <i>self-assessment</i> Direksi diterjemahkan melalui Kontrak Manajemen yang ditandatangani bersama Dewan Komisaris di awal tahun bersamaan dengan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Kontrak Manajemen berisi target kinerja masing-masing Direktorat beserta dengan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang dijadikan sebagai acuan kinerja yang harus dicapai di tahun berjalan. / The Board of Directors self-assessment policy is translated into a Management Contract signed with the Board of Commissioners at the beginning of the year along with the signing of the Corporate Budget Work Plan (RKAP). The Management Contract contains performance targets for each Directorate along with Key Performance Indicators (KPIs) which are used as performance references that must be achieved in the current year.</p>



No.	Prinsip dan Rekomendasi / Principles and Recommendations	Penjelasan / Explanation	Status Penerapan / Implementation Status	Bentuk Penerapan di Perseroan / Form of Implementation in the Company
b.	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka. / The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the annual report of a public company.</p>	<p>Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Emiten. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut, pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi. / The disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide important information on efforts to improve the management of the Issuer. This information is very useful to provide assurance to shareholders or investors that there is assurance that the company's management continues in a better direction. With this disclosure, shareholders or investors are aware of the check and balance mechanism on the performance of the Board of Directors.</p>	√	<p>Direksi Perseroan bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas rencana dan pencapaian kerja Perseroan selama tahun buku melalui Laporan Tahunan Perseroan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan. Pertanggungjawaban Perseroan kepada Para Pemegang Saham juga disampaikan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris melalui RUPST yang rutin dilaksanakan paling lambat 6 (<i>enam</i>) bulan setelah tahun buku berakhir. / The Board of Directors of the Company together with the Board of Commissioners submit accountability reports for the plans and achievements of the Company's work during the fiscal year through the Company's Annual Report which can be accessed through the Company's website. The Company's accountability to the Shareholders is also conveyed by the Board of Directors together with the Board of Commissioners through an AGMS which is regularly held no later than 6 (<i>six</i>) months after the end of the fiscal year.</p>
c.	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. / The Board of Directors has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Directors if involved in a financial crime.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Emiten, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Emiten. Kebijakan tersebut dapat tercapuk dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. / The resignation policy of members of the Board of Directors who are involved in financial crimes is a policy that can increase the trust of stakeholders in the Issuer, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to assist the smooth running of the legal process and so that the legal process does not interfere with business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Issuer. This policy can be included in the Guidelines or Code of Ethics that apply to the Board of Directors. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. / Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is the status of being convicted of a member of the Board of Directors from an authorized party. These financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as the Criminal Act of Money Laundering as referred to in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. 	√	<p>Anggaran Dasar dan <i>Board Manual</i> Perseroan telah mengatur kebijakan pengunduran diri Direksi apabila yang bersangkutan terlibat dalam tindak kejahatan keuangan. Hal ini telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan. / The Articles of Association and Board Manual of the Company have set the policy for the resignation of the Board of Directors if the person concerned is involved in a financial crime. This has been disclosed in the Corporate Governance Chapter.</p>
V. PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN / STAKEHOLDER ENGAGEMENT				
7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan / Improving Corporate Governance Aspect through Stakeholder Engagement				
a.	<p>Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>. / Public companies have a policy to prevent insider trading.</p>	<p>Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Emiten dapat meminimalkan terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. / A person who has inside information is prohibited from conducting Securities transactions using inside information as referred to in the Capital Market Law. Issuers can minimize the occurrence of insider trading through preventive policies, for example by strictly separating data and/or information that is confidential and public in nature, as well as dividing duties and responsibilities for managing the information in a proportional and efficient manner.</p>	√	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang pemisahan informasi bersifat rahasia dan bersifat terbuka untuk publik guna mencegah terjadinya aktivitas <i>insider trading</i>. Kebijakan tersebut diatur di dalam <i>Code of Conduct</i> Perseroan dan dapat diakses juga melalui situs web Perseroan pada bagian <i>Good Corporate Governance</i>. Pengungkapan lebih lanjut mengenai <i>insider trading</i> telah dimuat pada Bab Tata Kelola Perusahaan. / The Company has a policy that regulates the separation of confidential and public information in order to prevent insider trading activities. This policy is regulated in the Company's Code of Conduct and can also be accessed through the Company's website in the Good Corporate Governance section. Disclosures in the Good Corporate Governance section. Further disclosure regarding insider trading has been published in the Corporate Governance Chapter.</p>

No.	Prinsip dan Rekomendasi / Principles and Recommendations	Penjelasan / Explanation	Status Penerapan / Implementation Status	Bentuk Penerapan di Perseroan / Form of Implementation in the Company
b.	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan anti-fraud. / Public companies have anti-corruption and anti-fraud policies.	Kebijakan anti-korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Emiten dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Emiten terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain. / The anti-corruption policy is useful to ensure that the Issuer's business activities are carried out legally, prudently and in accordance with the principles of good governance. The policy can be part of a code of ethics, or in a separate form. This policy may include, among others, programs and procedures to be implemented in dealing with corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in Issuers. The scope of the policy must describe the Issuer's prevention against all corrupt practices, whether giving or receiving from other parties.	√	Kebijakan Perseroan terkait antikorupsi dan anti-fraud telah diatur di dalam Code of Conduct Perseroan serta telah dipublikasikan di situs web Perseroan pada Bagian Good Corporate Governance. Pengungkapan lebih lanjut mengenai kebijakan anti-korupsi dan anti-fraud sudah dilakukan pada Bab Tata Kelola Perusahaan. / The Company's policies related to anti-corruption and anti-fraud have been regulated in the Company's Code of Conduct and have been published on the Company's website in the Good Corporate Governance section. Further disclosure regarding the anti-corruption and anti-fraud policies has been made in the Corporate Governance Chapter.
c.	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. / The public company has a policy regarding the selection and improvement of supplier or vendor capabilities.	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Emiten memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. / The policy on supplier or vendor selection is useful to ensure that the Issuer obtains the required goods or services at a competitive price and good quality. Meanwhile, the policy of increasing the ability of suppliers or vendors is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill goods or services needed by the company will affect the quality of the company's output. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Emiten. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. / Thus, the implementation of these policies can ensure continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by the Issuer. The scope of this policy includes criteria in selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the ability of suppliers or vendors, and fulfillment of rights related to suppliers or vendors. 	√	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang seleksi pemasok sebagaimana diatur di dalam Code of Conduct Perseroan serta disediakan melalui situs web Perseroan pada Bagian Good Corporate Governance. / The Company has a policy regarding supplier selection as stipulated in the Company's Code of Conduct as well as made available through the Company's website in the Good Corporate Governance section.
d.	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. / The public company has a policy regarding the fulfillment of creditor rights.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Emiten. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Emiten kepada kreditur. / Policies regarding the fulfillment of creditors' rights are used as guidelines in making loans to creditors. The objective of this policy is to maintain the fulfillment of rights and to maintain creditors' trust in the Issuer. The policy includes consideration in entering into agreements, as well as follow-up actions in fulfilling Issuer obligations to creditors.	√	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur sebagaimana diatur di dalam Code of Conduct Perseroan serta disediakan melalui situs web Perseroan pada Bagian Good Corporate Governance. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pemenuhan Hak Hak Kreditur telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan. / The Company has a policy regarding the fulfillment of creditors' rights as stipulated in the Company's Code of Conduct and made available through the Company's website in the Good Corporate Governance section. Further explanation regarding the Fulfillment of Creditors' Rights is disclosed in the Corporate Governance Chapter.
e.	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. / The public company has a whistleblowing system policy.	Kebijakan sistem whistleblowing yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Emiten. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem whistleblowing, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. / A well-developed whistleblowing system policy will provide assurance of protection to witnesses or reporters for indications of violations committed by Issuer employees or management. The application of this system policy will have an impact on the establishment of a culture of good corporate governance. The whistleblowing system policy covers, among others, the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, how to complain, protect and guarantee the confidentiality of the reporter, the handling of complaints, the party who manages the complaint, and the results of the handling and follow-up of complaints.	√	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait Whistleblowing System sebagaimana diatur di dalam Code of Conduct Perseroan serta telah dipublikasikan pada situs web Perseroan di Bagian Good Corporate Governance. Penjelasan lebih lanjut mengenai Whistleblowing System telah diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan. / The Company has policies related to the Whistleblowing System as stipulated in the Company's Code of Conduct and has been published on the Company's website in the Good Corporate Governance section. Further explanation regarding the Whistleblowing System has been disclosed in the Corporate Governance Chapter.



No.	Prinsip dan Rekomendasi / Principles and Recommendations	Penjelasan / Explanation	Status Penerapan / Implementation Status	Bentuk Penerapan di Perseroan / Form of Implementation in the Company
f.	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. / Public companies have a policy of providing long-term incentives to Directors and employees.	<ul style="list-style-type: none"> Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. / Long-term incentives are incentives based on the achievement of long-term performance. Long-term incentive plans have the premise that the company's long-term performance is reflected by the growth in value of the company's stock or other long-term targets. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and provide motivation to Directors and employees to improve their performance or productivity which will have an impact on improving the company's performance in the long term. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Emiten untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Emiten. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Emiten dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Emiten yang ada. / The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Issuer to encourage the implementation of long-term incentives for Directors and Employees with terms, procedures and forms that are tailored to the Issuer's long-term goals. Such policies may include, among others, the aims and objectives of providing long-term incentives, terms and procedures for providing incentives, and conditions and risks that must be taken into account by Issuers in providing incentives. This policy may also be included in the Issuer's existing remuneration policies. 	√	Kebijakan pemberian insentif jangka panjang telah dimuat di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Adapun pemberian insentif jangka panjang yang berlaku di Perseroan dilakukan 1 kali setiap tahun, dimana pemberiannya senantiasa mempertimbangkan pencapaian kinerja dan kemampuan finansial Perseroan. / The policy for providing long-term incentives has been included in the Collective Labor Agreement (PKB). The provision of long-term incentives that apply in the Company is carried out once a year, where the provision always considers the achievement of the Company's performance and financial capability.

VI. KETERBUKAAN INFORMASI / INFORMATION DISCLOSURE

8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi / Improving the Implementation of Information Disclosure

a.	Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. / Public companies take advantage of the wider use of information technology besides the website as a medium for information disclosure.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Emiten yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. / The use of information technology can be useful as a medium for information disclosure. The disclosure of information that is carried out is not only disclosure of information that has been regulated in statutory regulations, but also other information related to the Issuer which is deemed useful to be known by shareholders or investors. With the wider use of information technology in addition to the Web site, it is hoped that the company can increase the effectiveness of the company's information dissemination. Nonetheless, the use of information technology should still pay attention to the benefits and costs of the company.	√	Perseroan senantiasa memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk diketahui Pemegang Saham atau investor baik melalui email blast, press release, hingga sosial media, seperti Instagram, Facebook, aplikasi WTON Mobile, WTON Magazine dan Linked-in. / The Company continuously takes advantage of the use of information technology to be known by shareholders or investors through email blasts, press releases, to social media, such as Instagram, Facebook, the WTON Mobile application, WTON Magazine and Linked-in.
b.	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali. / The Annual Report of the Issuer or Public Company discloses the ultimate beneficial owner in the share ownership of the public company of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the share ownership of the public company through the Majority and Controlling Shareholders.	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Emiten paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. / The laws and regulations in the Capital Market sector that govern the submission of the Issuer's annual report have stipulated the obligation to disclose information regarding shareholders who hold 5% (five percent) or more of the Issuer's shares, as well as the obligation to disclose information regarding the Issuer's major and controlling shareholders, either directly or directly to the ultimate beneficial owner in ownership of the shares. In this Governance Guidelines, it is recommended to disclose the ultimate beneficial owner of the Issuer's share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosing the ultimate beneficial owner of share ownership by the major and controlling shareholders.	√	Perseroan sudah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen) dalam Laporan Tahunan. / The Company has disclosed the ultimate beneficial owner in ownership of the Company's shares of at least 5% (five percent) in the Annual Report.

ROADMAP PENGEMBANGAN GCG WIKA BETON

Perseroan telah menetapkan *road map* tata kelola 2019 – 2023 sebagai arah implementasi dan pengembangan GCG serta memberikan panduan bagi seluruh insan WIKA BETON dalam menerapkan prinsip dan praktik GCG pada aktivitas bisnis yang dijalankan. Penetapan arah implementasi GCG disertai dengan sasaran spesifik setiap tahun, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai Perseroan sebagai *good corporate citizen*.

2019	2020	2021	2022	2023
GCG Managed	GCG Governed	GCG Sustainability	Good Corporate Company	Good Corporate Citizen
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Infrastruktur dan Sistem / Infrastructure and System Improvement Pengembangan dan update informasi GCG di Situs Web / Development and update of GCG on website 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Mekanisme Penerapan GCG / Strengthening GCG Implementation Mechanism Peningkatan Konten GCG di Situs Web dan Media Lainnya / GCG Content Improvement on Website and Other Media 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan GCG sebagai Budaya / Making GCG as a culture 	<ul style="list-style-type: none"> GCG mengendalikan operasi bisnis terutama aspek risiko usaha secara efektif / GCG controlling the business operation, especially the risk aspect effectively 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang beretika dan bertanggung jawab / Become ethical and responsible industrial and social citizen ASEAN CG Scorecard Champion
<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi GCG di Induk, Anak, dan Unit Usaha / GCG Dissemination in Parent, Subsidiary, and Business Units Pengembangan Struktur GCG / GCG Structure Development Pemutakhiran Board Manual, Code of Conduct, dan Code of Corporate Governance / Updates on Board Manual, Code of Conduct, and Code of Corporate Kualifikasi & Kompetensi SDM / HC Qualification & Competence Skor Asesmen SK-16/S. MBU/2012 / SK-16/S. MBU/2012 Assessment Score 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi GCG di Induk, Anak, dan Unit Usaha / GCG Dissemination in Parent, Subsidiary, and Business Unit Pengembangan Struktur GCG / GCG Structure Development Peningkatan Kompetensi SDM / HC Competence Improvement Penyusunan Subsidiary Governance / Subsidiary Governance Preparation Skor Asesmen SK-16/S. MBU/2012 / SK-16/S. MBU/2012 Assessment Score Penyusunan struktur ASEAN CG Scorecard / ASEAN CG Scorecard structure preparation Kebijakan Sustainability / Sustainability policy 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan GCG Champion / GCG Champion Development Sosialisasi Subsidiary Governance / Subsidiary Governance Dissemination Kebijakan Sustainability / Sustainability Policy Asia Sustainability Reporting Rating Champion Pemenuhan ASEAN CG Scorecard / ASEAN CG Scorecard Fulfillment Skor Asesmen SK-16/S. MBU/2012 / SK-16/S. MBU/2012 Assessment Score 	<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran Board Manual, Code of Conduct, dan Code of Corporate Governance / Updates on Board Manual, Code of Conduct, and Code of Corporate Governance IT Governance Penerapan berkelanjutan ASEAN CG Scorecard / Sustainable Implementation of ASEAN CG Scorecard Skor Asesmen SK-16/S. MBU/2012 / SK-16/S. MBU/2012 Assessment Score 	<ul style="list-style-type: none"> Transparansi dan Akuntabilitas / Transparency and Accountability External Stakeholder Engagement Skor Asesmen SK-16/S. MBU/2012 / SK-16/S. MBU/2012 Assessment Score

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG ASSESSMENT)

Komitmen Perseroan terhadap kualitas penerapan tata kelola diwujudkan melalui penilaian implementasi GCG secara berkala demi memastikan *check and balance* telah terpenuhi serta menilai efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan dan perusahaan anak. Dengan diterapkannya penilaian ini, Perseroan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai are atau fokus pengembangan aspek GCG yang perlu diperhatikan setiap tahunnya. Guna memastikan keakuratannya, penilaian GCG dilakukan secara mandiri oleh internal Perseroan (*self-assessment*) dan menunjuk pihak independen (*external assessment*). Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan senantiasa bersikap terbuka terhadap setiap masukan yang dinilai dapat mendorong kualitas implementasi GCG ke depannya. Selain itu, Perseroan juga selalu bersikap transparan untuk memberikan informasi serta penjelasan atas hal apa pun yang relevan dengan Perseroan apabila sewaktu-waktu ditanyakan oleh *stakeholders* atau regulator.

WIKA BETON GCG DEVELOPMENT ROADMAP

The Company has established a 2019 - 2023 road map for GCG implementation and development and provides guidance for all WIKA BETON employees in applying the principles and practices of GCG in their business activities. The determination of the direction of GCG implementation is accompanied by specific goals every year, which ultimately aims to achieve the Company's WIKA as a good corporate citizen.

GCG ASSESSMENT

The Company's commitment to the quality of the implementation of governance is manifested through periodic GCG assessment to ensure checks and balances have been fulfilled as well as assessing the effectiveness of the implementation of GCG principles within the Company and its subsidiaries. With the implementation of this assessment, the Company obtains a more comprehensive picture of the areas or focus of developing GCG aspects that need to be considered every year. In order to ensure its accuracy, GCG assessment is carried out independently by the Company's internal (*self-assessment*) and appoints an independent party (*external assessment*). In this regard, the Company is always open to any input considered to be able to encourage the quality of GCG implementation in the future. In addition, the Company is always transparent in providing information and explanations for any matters relevant to the Company if at any time it is asked by *stakeholders* or regulators.

Kriteria dan Indikator Penilaian yang Digunakan

Penilaian implementasi GCG (GCG assessment) mengacu pada kriteria yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN yang terdiri dari 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG, 43 (empat puluh tiga) Indikator, dan 153 (seratus lima puluh tiga) Parameter, serta Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) Faktor Uji Kesesuaian (FUK). Keenam Faktor/Aspek Penerapan GCG yang dinilai meliputi:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek Lainnya

Hasil Penilaian GCG Tahun 2020

Pada tahun 2020, pelaksanaan assessment GCG Perseroan menunjukkan hasil dengan predikat "Sangat Baik" dengan capaian skor sebesar 88,936 Berikut adalah rincian dari hasil penilaian GCG tahun 2020.

Jenis penilaian : Penilaian Internal
 Penilai : Tim Assessment GCG PT Wijaya Karya Beton Tbk
 Periode Penerapan : 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020
 Tahun Ukur : 2020
 Tempat : Kantor Pusat PT Wijaya Karya Beton Tbk
 Waktu Pengukuran : November 2020 – Februari 2021

Assessment Criteria and Indicators Used

GCG assessment refers to the criteria set out in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of GCG Implementation in SOE, which consists of 6 (six) GCG Implementation Factors/Aspects, 43 (forty three) Indicators, and 153 (one hundred and fifty three) Parameters, as well as 568 (five hundred and sixty eight) Conformity Test Factors (FUK). The six factors/aspects of GCG implementation that are assessed include:

1. Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance;
2. Shareholders and GMS/ Capital Owners;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency; and
6. Other Aspects

Results of the 2020 GCG Assessment

In 2020, the implementation of the Company's GCG assessment showed results with "Excellent" predicate with a score of 88,936. Below are details of the results of the 2020 GCG assessment.

Type of Assessment : Internal Assessment
 Assessor : PT Wijaya Karya Beton Tbk's GCG Assessment Team
 Implementation Period : January 1, 2020 - December 31, 2020
 Year of Assessment : 2020
 Place : Head Office of PT Wijaya Karya Beton Tbk
 Time of Assessment : November 2020 - February 2021

Ringkasan Hasil Assessment GCG WILAJA BETON Tahun 2020

Summary of the 2020 WILAJA BETON GCG Assessment Results

No.	Aspek/Indikator/Parameter Pengujian / Aspects/Indicators/Parameter of Assessment	Bobot / Value	Capaian Tahun 2020 / Achievement in 2020		Penjelasan / Explanation
			Skor / Score	Persentase / Percentage	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan / Commitment to Sustainable GCG Implementation	7,000	6,169	88%	Sangat Baik / Excellent
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/Capital Owners	9,000	8,143	90%	Sangat Baik / Excellent
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	31,623	90%	Sangat Baik / Excellent
4	Direksi / Board of Directors	35,000	32,634	93%	Sangat Baik / Excellent
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency	9,000	7,867	87%	Sangat Baik / Excellent
6	Aspek Lainnya / Other Aspects	5,000	2,500	50%	Sangat Baik / Excellent
Skor Keseluruhan / Total Score		100,00	88,936	89%	Sangat Baik / Excellent

Meninjau hasil *assessment* yang diperoleh, WIKA BETON berhasil menunjukkan pencapaian GCG yang positif, terlihat dari perolehan skor GCG yang cukup stabil. Skor GCG tahun 2020 adalah sebesar 88,936, mempertahankan skor GCG tahun 2019 dengan perolehan skor yang sama. Capaian skor GCG yang baik semakin memperkuat komitmen Perseroan dalam mewujudkan kinerja tata kelola yang berkelanjutan demi terpeliharanya kepercayaan dan loyalitas pemangku kepentingan.

Based on the assessment results, WIKA BETON has succeeded in showing positive GCG achievements, which can be seen from the GCG scores which is quite stable. The GCG score in 2020 was 88,936, the same as that of 2019 at 89,936. The achievement of good GCG score further strengthens the Company's commitment to realizing sustainable governance performance for the sake of maintaining the trust and loyalty of stakeholders.

Rekomendasi Hasil Assessment GCG Tahun 2020

2020 GCG Assessment Results Recommendations

No.	Rekomendasi Penilaian / Assessment Recommendations	Tindak Lanjut / Follow-up
Aspek Pemegang Saham / Shareholder Aspect		
1	Menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT Wijaya Karya Beton Tbk secara berkala. / Follow-up the area of improvement resulting from the implementation of Good Corporate Governance assessment at PT Wijaya Karya Beton Tbk. regularly.	Pemegang Saham menyusun rencana dan menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan secara berkala. / Shareholders formulate plans and follow up on areas of improvement resulting from the assessment of the implementation of Good Corporate Governance in the Company on a regular basis.
2	Melakukan penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris dan Direksi secara individual. / Conduct the performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors individually.	Dibuat pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara individual. / An individual performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors has been prepared.
3	Menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. / Determine the receiving reports system on indication of decreased performance from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners/Supervisory Board.	Dipersiapkan penetapan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/ atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. / A system for receiving reports on indications of decline in performance is prepared by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners/Supervisory Board.
Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / Board of Commissioners/Supervisory Board Aspect		
1	Membuat rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham. / Prepare a work plan for the Board of Commissioners regarding monitoring the performance of the Board Directors and reporting to shareholders.	Dibuat rencana kerja Dewan Komisaris tentang pemantauan kinerja Direksi secara berkala. / A work plan for the Board of Commissioners on monitoring the performance of the Board of Directors on a regular basis is prepared.
2	Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaah kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. / Conduct a performance assessment of the Board of Directors based on a review of the criteria, targets and key performance indicators covered by the Board of Directors Management Contract individually with the realization of each achievement.	Dibuat penilaian kinerja Direksi secara individu yang mencakup kinerja direktoratnya sesuai kontrak manajemen. / An individual assessment of the performance of the Board of Directors is made which includes the performance of the directorate in accordance with the management contract.
3	Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris. / Evaluate the performance achievements of each member of the Board of Commissioners and set forth in the minutes of the Board of Commissioners' Meeting.	Dibuat monitoring pencapaian kinerja anggota Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala dalam rapat Dewan Komisaris. / Monitoring the performance achievement of the members of the Board of Commissioners is made periodically in the Board of Commissioners meetings.
5	Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dalam setiap risalah rapat dicantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada). / Assign the Secretary to the Board of Commissioners that in each minutes of the meeting, dissenting opinion are stated with what was decided at the Board of Commissioners' Meeting (if any).	Dibuat risalah rapat Dewan Komisaris atau risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi dengan mencantumkan pendapat yang berbeda (bila ada). / Minutes of the Board of Commissioners meeting or minutes of the Board of Commissioners and Board of Directors meeting are prepared by stating dissenting opinions (if any).
Aspek Direksi / Board of Directors Aspect		
1	Membuat laporan dan memberikan teguran/sanksi bagi Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan. / Prepare reports and give warnings/sanctions for Board of Directors and officials one level below the Board of Directors who have not/do not submit LHKPN in accordance with laws and regulations.	Membuat laporan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Direksi Perseroan. / Making compliance reports on submission of LHKPN by the Company's Board of Directors.
2	Melaporkan pencapaian kinerja masing-masing Direktur secara individu kepada Dewan Komisaris. / Report the performance achievement of each Director individually to the Board of Commissioners.	Dibuat penilaian kinerja Direksi secara individu yang mencakup kinerja direktoratnya sesuai kontrak manajemen dan dilaporkan secara berkala dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi. / An individual assessment of the performance of the Board of Directors is made which includes the performance of the directorate in accordance with the management contract and is reported regularly in the meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

No.	Rekomendasi Penilaian / Assessment Recommendations	Tindak Lanjut / Follow-up
3	Menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan perusahaan patungan antara lain mencakup pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi. / Establish regulatory policies for subsidiary governance and joint ventures, including among others the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors, setting performance targets and performance appraisals as well as incentives for the Board of Commissioners and Board of Directors.	Dilakukan pembahasan atas <i>subsidiary governance</i> yang telah disusun. / Discussions were conducted on subsidiary governance that has been prepared.
4	Melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern. / Carry out a quality assurance program and improvement of the Internal Audit Function, which covers all aspects of the activities of the internal control function.	Menyusun program dan melaksanakan pelatihan bagi Fungsi Audit Internal Perseroan. / Develop programs and carry out training for the Company's Internal Audit Function.

Hasil Penilaian GCG Tahun 2019

Pada tahun 2019, pelaksanaan *assessment* GCG Perseroan menunjukkan hasil dengan predikat "Sangat Baik" dengan capaian skor sebesar 88,936. Berikut adalah rincian dari hasil penilaian GCG tahun 2019.

Jenis penilaian : Penilaian Eksternal
 Penilai : Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP)
 Periode Penerapan : 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019
 Tahun Ukur : 2019
 Tempat : Kantor Pusat PT Wijaya Karya Beton Tbk
 Waktu Pengukuran : November 2019 – Februari 2020

2019 GCG Assessment Results

Results of the Company's GCG assessment in 2019 showed "Excellent" predicate with a score of 88.936. The following is the detail of the results of the 2019 GCG assessment.

Type of Assessment : External Assessment
 Assessor : BPKP
 Implementation Period : January 1, 2019 - December 31, 2019
 Year of Assessment : 2019
 Place : PT Wijaya Karya Beton Tbk. Head Office
 Time of Assessment : November 2019 - February 2020

Ringkasan Hasil Assessment GCG WIKA BETON Tahun 2019

Summary of 2019 WIKA BETON GCG Assessment Results

No.	Aspek/Indikator/Parameter Pengujian / Aspects/Indicators/Parameter of Assessment	Bobot / Value	Capaian Tahun 2020 / 2020 Achievement		Penjelasan / Explanation
			Skor / Score	Persentase / Percentage	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan / Commitment to Sustainable GCG Implementation	7,000	6,169	88%	Sangat Baik / Excellent
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/Capital Owners	9,000	8,143	90%	Sangat Baik / Excellent
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	31,623	90%	Sangat Baik / Excellent
4	Direksi / Board of Directors	35,000	32,634	93%	Sangat Baik / Excellent
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency	9,000	7,867	87%	Sangat Baik / Excellent
6	Aspek Lainnya / Other Aspects	5,000	2,500	50%	Sangat Baik / Excellent
Skor Keseluruhan / Total Score		100,00	88,936		Sangat Baik / Excellent

Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tahun 2019

Follow-up of 2019 Assessment Results

No.	Rekomendasi Penilaian / Assessment Recommendations
Aspek Pemegang Saham / Shareholders Aspect	
1	Menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT Wijaya Karya Beton Tbk secara berkala. / Follow-up areas of improvement resulting from the assessment of the Good Corporate Governance implementation at PT Wijaya Karya Beton Tbk on a regular basis.
2	Melakukan penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris dan Direksi secara individual. / Conduct performance appraisals of the Board of Commissioners and Board of Directors individually.
3	Menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. / Establish a system for receiving reports on indications of decline in performance from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners/Supervisory Board.
4	Menetapkan mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap anggota Direksi, yang paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan tersebut. / Stipulate a mechanism for resignation from a concurrent position as a member of the Board of Directors, no later than 30 days after the dual position occurred.
Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / Board of Commissioners/Supervisory Board Aspect	
1	Membuat rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham. / Prepare a work plan for the Board of Commissioners regarding monitoring of the performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders.
2	Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaah kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. / Assess the performance of the Board of Directors based on a review of the main performance criteria, targets and indicators included in the Management Contract of the Board of Directors individually with the realization of each Director.
3	Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris. / Evaluate the performance achievement of each member of the Board of Commissioners and set forth in the minutes of the Board of Commissioners meeting.
4	Melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan melaporkannya dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. / Assess the performance of the Board of Commissioners and report it in the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners.
5	Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dalam setiap risalah rapat dicantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada). / Assign the Secretary of the Board of Commissioners to include dissenting comments in each minutes of the meeting with what was decided at the Board of Commissioners Meeting (if any).
6	Memuat <i>self-assessment</i> kinerja Komite Dewan Komisaris dalam program kerja tahunan. / Contain self-assessment of the performance of the Board of Commissioners Committees in the annual work program.
Aspek Direksi / Board of Directors Aspect	
1	Membuat laporan dan memberikan teguran/sanksi bagi Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan. / Prepare reports and give warnings/sanctions for Board of Directors and officials one level below the Board of Directors who have not/do not submit LHKPN in accordance with laws and regulations.
2	Melaporkan pencapaian kinerja masing-masing Direktur secara individu kepada Dewan Komisaris. / Report the performance achievement of each Director individually to the Board of Commissioners.
3	Menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan perusahaan patungan antara lain mencakup pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi. / Establish regulatory policies for subsidiary governance and joint ventures, including among others the appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors', setting performance targets and performance appraisals as well as incentives for the Board of Commissioners and Board of Directors.
4	Melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern. / Carry out a quality assurance program and improvement of the Internal Audit Function, which covers all aspects of the activities of the internal control function.
5	Melakukan penilaian/ <i>review (assessment)</i> internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan untuk menilai: / Conduct periodic internal assessments on the quality assurance program and improve the overall Internal Audit Function to assess: <ol style="list-style-type: none"> Kepatuhan terhadap <i>charter</i> audit internal; / Compliance with internal audit charter; Kepatuhan terhadap standar; / Compliance with standards; Kepatuhan terhadap kode etik; / Compliance with code of conduct; Efisiensi dan efektivitas dari Fungsi Audit Internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai <i>stakeholders</i>-nya; / Efficiency and effectiveness of Internal Audit Function in fulfilling needs of its stakeholders; Assessment yang dilakukan oleh <i>assessor</i> independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun; / Assessment carried out by independent assessor at least once in 5 (five) years; Ada tindak lanjut atas hasil <i>review</i>. / Follow-up on review results.

Penilaian GCG berdasarkan Kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard

Perseroan melanjutkan inisiatifnya dalam memperoleh referensi serta acuan dalam melakukan upaya perbaikan terhadap kinerja praktik GCG melalui penilaian pelaksanaan GCG berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance (ASEAN CG) Scorecard oleh pihak eksternal. ASEAN CG Scorecard merupakan standar internasional mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh *The Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan seluruh pemangku kepentingan perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan *listing* di ASEAN.

Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard adalah sebagai berikut:

- Hak-Hak Pemegang Saham;
- Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham;
- Peran Pemangku Kepentingan;
- Pengungkapan dan Transparansi;
- Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Skor Penilaian

Penilaian penerapan tata kelola Perseroan berdasarkan kriteria ASEAN CG Scorecard pada tahun 2020 memperoleh hasil skor 80,41 dengan predikat "Good". Berikut rincian hasil penilaian GCG WILABETON tahun 2020 berdasarkan kriteria ASEAN CG Scorecard.

Penilai : Indonesian Institute Corporate Directorship (IICD)

Periode Penerapan : 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 (tahun buku 2019)

Waktu Pengukuran : 21 Januari 2020

GCG Assessment based on ASEAN Corporate Governance Scorecard Criteria

The Company continues its initiative in obtaining references in improving the performance of GCG practices through assessment of GCG implementation based on the criteria of the ASEAN Corporate Governance (ASEAN CG) Scorecard by external parties. The ASEAN CG Scorecard is an international standard regarding governance principles issued by The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and aims to increase the confidence of investors and all company stakeholders, especially listed companies in ASEAN.

Criteria Used

The appraisal components of the ASEAN Corporate Governance Scorecard are as follows:

- Shareholders' Rights;
- Equal Treatment of Shareholders;
- The Role of Stakeholders;
- Disclosure and Transparency;
- Board of Commissioners Responsibilities.

Assessment Score

Assessment of the implementation of corporate governance based on the ASEAN CG Scorecard criteria in 2020 obtained the score of 80.41 with "Good" predicate. Following are the details of the WILABETON GCG assessment results in 2020 based on the ASEAN CG Scorecard criteria.

Assessor : Indonesian Institute Corporate Directorship (IICD)

Implementation Period : January 1, 2019 - December 31, 2019 (2019 fiscal year)

Time of Assessment : January 21, 2020

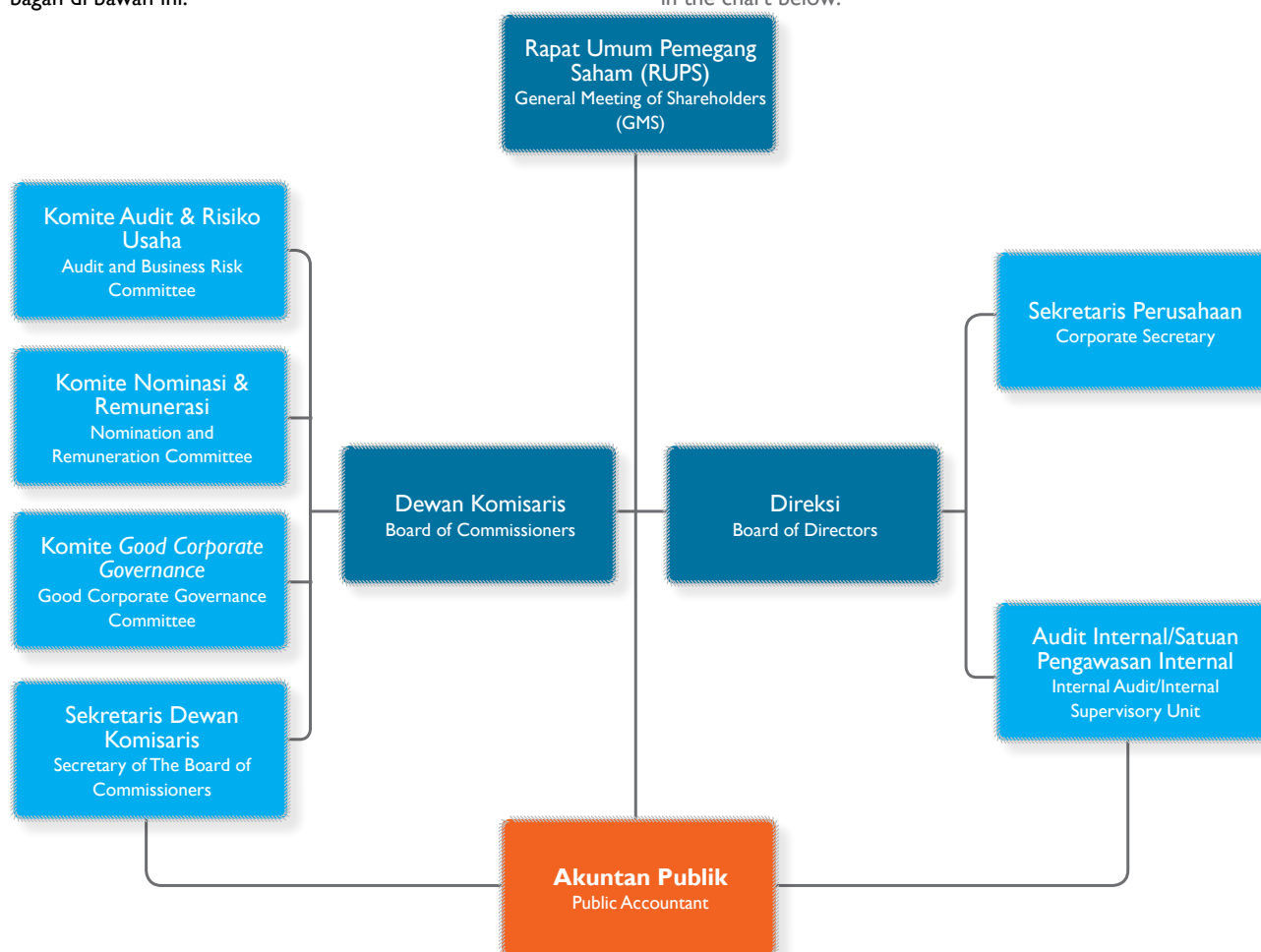
Prinsip / Principles	Jumlah dan Item Penilaian / Total and Item of Assessment	Total Item Penilaian yang Telah Dipenuhi / Total Assessment Items Met	Bobot Penilaian / Assessment Value	Skor / Score
Level I				
A. Hak-hak Pemegang Saham / Shareholders Rights	21	18	10	8,57
B. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham / Equal Treatment to Shareholders	14	9	10	6,43
C. Peran Pemangku Kepentingan / Role of Stakeholders	13	12	15	13,85
D. Pengungkapan dan Transparansi / Disclosure and Transparency	32	28	25	21,88
E. Tanggung Jawab Dewan Komisaris / Board of Commissioners Responsibilities	65	45	40	27,69
Skor Level I / Level I Score				78,41
Skor Level II / Level II Score				2
Jumlah Skor / Total Score				80,41

STRUKTUR TATA KELOLA WIKI BETON

Berpedoman pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sementara itu, struktur kepengurusan Perseroan mengadopsi sistem dua badan (*two boards system*) yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, di mana masing-masing Organ sudah memiliki pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya sebagaimana diamanatkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Selain komponen tersebut, Perseroan juga memiliki organ penting lainnya yang dinilai dapat mengoptimalkan implementasi GCG di Perseroan di antaranya Satuan Pengawasan Internal (SPI), Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Secara sederhana, struktur Organ GCG Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

WIKI BETON GOVERNANCE STRUCTURE

Pursuant to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, the structure of the Company's organs consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. Meanwhile, the management structure of the Company adopts a two-board system consisting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, in which each organ has a clear division of authority and responsibility according to its function as mandated in the Company's Articles of Association and laws and regulations. Apart from these components, the Company also has other key organs that are considered to be able to optimize the implementation of GCG in the Company, including Internal Audit Unit (SPI), Corporate Secretary, Risk Management, Internal Control System and committees under the Board of Commissioners. In simple terms, the structure of the Company's GCG Organs can be seen in the chart below:



PEDOMAN GCG

Dalam rangka mendorong implementasi struktur dan mekanisme GCG, Perseroan telah memiliki sejumlah pedoman tata kelola perusahaan (*Soft Structure GCG*) yang disusun berdasarkan perundang-undangan dan/atau regulasi yang berlaku, visi & misi Perseroan, dan *best practice* lainnya yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, aspek kebijakan GCG yang berlaku di Perseroan, meliputi:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor SK.01.01/WB-0A.036/2019 tentang *Code of Corporate Governance* dan *Code of Conduct* PT Wijaya Karya Beton Tbk.
3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor SK.01.01/WB-0A.037/2019 tentang *Board Manual* PT Wijaya Karya Beton Tbk.
4. Piagam Komite Dewan Komisaris.
5. Kebijakan Manajemen Risiko yang mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha sebagaimana tercantum di dalam *Quality Manual* dan Kebijakan Strategis Perseroan.
6. Kebijakan mengenai hak dan kewajiban karyawan.
7. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, seperti:
 - a. Kebijakan *Whistle Blower*;
 - b. Kebijakan Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi;
 - c. Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor;
 - d. Kebijakan Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok/ Vendor;
 - e. Kebijakan Kepemilikan & Kerahasiaan Informasi;
 - f. Kebijakan Sistem Informasi dan Komunikasi;
 - g. Kebijakan *Insider Trading*
8. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal
9. Kebijakan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai bagian dari pengembangan hubungan Perseroan dan pemangku kepentingan.

SOSIALISASI KEBIJAKAN GCG TAHUN 2020

Selama tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan sosialisasi kebijakan *Good Corporate Governance* kepada pegawai WIKA BETON melalui:

1. Penyampaian materi mengenai *Good Corporate Governance* kepada pegawai Pabrik Produk Beton Boyolali dan Wilayah Penjualan IV di Pabrik Produk Beton Boyolali pada tanggal 31 Januari 2020.
2. Penyampaian materi GCG dengan judul artikel "Assessment Penerapan *Good Corporate Governance* WIKA BETON" di WTON Magazine edisi 05 pada bulan Agustus 2020.
3. Penyampaian materi mengenai *Good Corporate Governance* dalam forum Sales Engineer WIKA BETON melalui daring pada tanggal 14 Oktober 2020.
4. Penyampaian materi GCG dengan judul artikel "Membangun Budaya GCG & Pencanaan *Roadmap* GCG WIKA BETON Tahun 2021" di WTON Magazine edisi 06 pada bulan Desember 2020.

GCG SOFT STRUCTURE

To encourage the implementation of the GCG structure and mechanism, the Company has a number of corporate governance code (GCG Soft Structure) which are formulated based on the prevailing laws and/or regulations, the Company's vision & mission, and other best practices that apply in Indonesia. In this regard, aspects of the GCG policies that apply in the Company include:

1. The Company's Articles of Association;
2. Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. SK.01.01/WB-0A.036/2019 concerning Code of Corporate Governance and Code of Conduct of PT Wijaya Karya Beton Tbk.
3. Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 concerning Board Manual of PT Wijaya Karya Beton Tbk.
4. Charter of the Board of Commissioners' Committees.
5. Risk Management Policy which covers the entire scope of business activities as stated in the Quality Manual and Strategic Policy of the Company.
6. Policies regarding employee rights and obligations.
7. Corporate Governance Policies, such as:
 - a. Whistle Blower Policy;
 - b. Business Ethics Policy, Anti-Corruption and Donation;
 - c. Fulfillment for Creditors' Rights Policy;
 - d. Supplier/Vendor Selection and Capacity Building Policy;
 - e. Information Proprietary & Confidentiality Policy;
 - f. Information and Communication System Policy;
 - g. Insider Trading Policy.
8. Internal Control System Policy
9. Policies on Corporate Social Responsibility as part of developing the relationship between the Company and its stakeholders.

GCG POLICY DISSEMINATION IN 2020

Throughout 2020, the Company has carried out the dissemination of Good Corporate Governance policies to WIKA BETON employees through:

1. Submission of material regarding Good Corporate Governance to employees of the Boyolali Concrete Product Factory and Sales Area IV at the Boyolali Concrete Product Plant on January 31, 2020.
2. Submission of GCG material with the article title "Assessment of the Implementation of WIKA BETON Good Corporate Governance" in WTON Magazine 05 edition in August 2020.
3. Submission of material on Good Corporate Governance in the WIKA BETON Sales Engineer forum online on October 14, 2020.
4. Submission of GCG material with the article title "Building a GCG Culture & The Declaration of the 2021 WIKA BETON GCG Roadmap" in WTON Magazine edition 06 in December 2020.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Perseroan yang berperan sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan. Meski demikian, RUPS tidak dapat mengintervensi tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan atau kepengurusan Perseroan dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan di dalam RUPS senantiasa dilakukan secara wajar dan transparan, serta didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Informasi Pemegang Saham WIKA BETON

Pemegang saham adalah perseorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada sebuah perusahaan dan memiliki sejumlah hak yang harus terpenuhi maupun kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Sampai akhir tahun 2020, Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan masih dipegang oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham atas Perseroan mencapai 60,00%, sementara kepemilikan saham Perseroan sebesar 28,68% dimiliki oleh publik.

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Hak pemegang saham, antara lain:

1. Menghadiri dan memberikan suara di dalam RUPS dengan ketentuan 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
2. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan teratur, agar setiap pemegang saham dapat membuat keputusan investasi yang tepat berdasarkan informasi yang dimilikinya.
3. Menerima bagian keuntungan dari Perseroan dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya.
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
5. Atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri terhadap Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
6. Setiap pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
7. Secara tertulis meminta penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan RUPS Luar Biasa apabila dipandang perlu.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Company that plays a role as decision-making instrument for all of our Shareholders related their capital investment in the Company. Regardless, GMS cannot take a part in the duties, functions and authority of the Board of Commissioners and Board of Directors when running the operational and management of the Company by not neglecting the authority of GMS based on the Company's Article of Association and the prevailing laws and regulations. Decision-making in GMS is always taken in fair and transparent manner, and for the long-term interest of the Company.

WIKA BETON Shareholders

Shareholders is a person or legal agency whose legally own one or more shares in a company and granted a number of rights and responsibilities that carried out in accordance with the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association. As of the end of 2019, the Company's Major/Controlling Shareholders are still held by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. with share reaching at 60.00%, while the rest of the Company's shares ownership amounting to 28.68% is the public.

Shareholders Rights and Responsibilities

Shareholders' rights are:

1. Attending and casting votes on GMS (one vote per share).
2. Gaining material information regarding the Company on time and regularly, so they can make correct investment decisions based on it.
3. Accepting profit from the Company in the format of dividend and other profit-sharing methods.
4. Holding GMS when Directors and/or Board of Commissioners are incompetent of holding GMS or Extraordinary GMS, after given permission by District Court Chairman.
5. Representing the Company, shareholders whose share at least 1/10 (one tenth) of the whole shares are given rights to file a member of the Board of Directors or Commissioners to the local court when his/her fault creates loss to the Company.
6. Every shareholder is entitled to file a case against the Company to the court when they are facing loss due to the Company's acts that is unfair or unreasonable, as part of GMS decision, Board of Directors and/or Board of Commissioners.
7. In a written manner, shareholders may ask for Board of Directors Meeting, Board of Commissioners Meeting or an Extraordinary Shareholders Meeting when it's necessary.

Kewajiban pemegang saham Perseroan, di antaranya:

1. Tidak terlibat di dalam kegiatan pengawasan dan kepengurusan Perseroan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perseroan atau kelompok usahanya dengan semangat dan tata cara yang bertentangan dengan perundang-undangan.
3. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi di dalam RUPS.

Kewenangan RUPS

Sebagai organ tertinggi di dalam struktur GCG Perseroan, RUPS memiliki sejumlah kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Menyetujui Laporan Keuangan Perseroan.
5. Menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan.

Ketentuan Umum & Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Ketentuan penyelenggaraan RUPS Perseroan baik dalam hal pengumuman maupun pemanggilan, senantiasa mengacu pada POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Materi informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan RUPS disampaikan bersamaan dengan pemanggilan RUPS, namun jika materi yang dimaksud belum tersedia pada saat pemanggilan RUPS, maka dapat langsung disampaikan pada saat penyelenggaraan RUPS. Setiap tahunnya, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Ketentuan RUPS Tahunan

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan setiap tahunnya, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Saat RUPS Tahunan berlangsung:

1. Direksi wajib menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari RUPS;
 - b. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari RUPS;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan;
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP);
4. Mengangkat atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Memutuskan hal-hal lain yang diajukan di dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Shareholders' Responsibilities, including:

1. Not getting involved in monitoring or daily execution by Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Not taking personal/familial advantages of the company, including for their own business groups in the spirit and manner that is against the law.
3. Evaluating Board of Commissioners and Board of Directors performance during GMS.

GMS Authorities

As the highest organ in GCG structure of the Company, GMS acquires the following authorities that cannot be imposed to the Board of Commissioners and Board of Directors, which regulated in the laws and the Company's Articles of Association, namely:

1. Appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Evaluate the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors.
3. Approve the amendment of the Company's Articles of Association.
4. Approve the Financial Statements.
5. Determine remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
6. Approve the use of the Company's Profit.

General Rules & Procedures for Organizing GMS

Both in the provision of announcement and summons, the Company always refers to Financial Authority Services Regulation No.32/POJK.04/2014 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders in Public Listed Company. The material information is that of the AGMS implementation submitted together with the summons letter of GMS. If the intended material is not available at the time of GMS summons, however it can be directly conveyed in GMS. In every year, the Company organizes 2 types of GMS namely Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Annual GMS Provisions

Annual GMS is convened annually, no later than 6 months after the closing of fiscal year. During the Annual GMS:

1. The Board of Directors is obliged to submit:
 - a. Annual Report to obtain approval from the GMS;
 - b. Financial statements to be validated during the GMS;
2. Approving the use of net profit;
3. Appointing Public Accounting Firm;
4. Appointing and Dismissing Members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
5. Deciding other proposals accordingly based on the Articles of Association.

Ketentuan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan Perseroan. Ketentuan RUPS Luar Biasa, antara lain:

1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPSLB;
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
3. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan beserta alasannya.
4. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atas permintaan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSLB dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi.
5. Apabila Dewan Komisaris lalai dalam melakukan pemanggilan RUPSLB setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terhitung sejak surat permintaan diterima, maka Pemegang Saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Ketentuan Kuorum

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 *juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Pada tahun 2020, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2020, bertempat di Hotel Best Western Premier The Hive, Lantai 3, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340. Pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat sampai pada RUPST tersebut berlangsung.

Extraordinary GMS Provisions

Extraordinary GMS can be held at any time when needed for the interest of the Company. The provisions of Extraordinary GMS are:

1. Board of Directors or Board of Commissioners is authorized to convene an EGM.
2. The Board of Directors shall invite and hold an EGM on a written request of 1 (one) or more shareholders who altogether represent 1/10 (one-tenth) of all shares with valid voting rights.
3. The written request must be submitted in writing by stating the matters to be discussed with the reasons.
4. Regarding the laws and regulations of Capital Market, with a request from the Shareholders, the Board of Commissioners shall invite and hold an EGM if the Board of Directors fails to conduct the EGM invitation within 15 (fifteen) days after the date of request receipt by the Board of Directors.
5. If the Board of Commissioners fails to conduct the EGM invitation after the expiry of the period as stipulated by the regulations, which is from the date of the request receipt, the concerned Shareholder(s) is/are entitled to summon the Meeting by imposing on the Company's expenses after gaining permission from District Court Chairman whose jurisdiction includes the location of the Company.

Quorum Provision

Based on the provisions of Article 16 paragraph (1) point a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 26 paragraph (1) letter a of the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 in conjunction with Article 86 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, a Meeting may be held if at the Meeting more than ½ (one half) of the total shares with voting rights are present or represented.

Implementation of the 2019 Annual GMS

In 2020, the Company held 1 (one) Annual GMS (AGMS) which was held on March 26, 2020, at the Best Western Premier Hotel, The Hive, 3rd Floor, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340. The implementation of the AGMS for the 2019 Fiscal Year was attended by all the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who served until the AGMS took place.

Mekanisme Pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019
Mechanisms for Implementing the 2019 Fiscal Year AGMS

No.	Kegiatan / Activities	Tanggal Pelaksanaan / Date of Implementation	Ketentuan / Provisions	Keterangan / Description
1	Pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK / GMS Agenda Notification to OJK	11 Februari 2020 / February 11, 2020	Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS. / The notification of the Meeting agenda to the Financial Services Authority shall be made no later than 5 (five) working days prior to the announcement of the GMS.	Pemberitahuan mata acara Rapat telah disampaikan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan. / Notification of the Meeting agenda has been submitted by letter to the Financial Services Authority (OJK) signed by the Corporate Secretary.
2	Pemberitahuan RUPS, setidaknya melalui: / GMS notification, at least via: (i) 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional / 1 (one) Indonesian newspaper with national circulation (ii) Situs web Bursa Efek Indonesia: / IDX website: www.idx.co.id (iii) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling kurang adalah Bahasa Inggris. / The Company's website, in Indonesian and foreign languages, should at least be in English: www.wika-beton.co.id.	18 Februari 2020 / February 18, 2020	Pengumuman RUPS disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS. / Announcement of the GMS shall be submitted no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the summons for the GMS.	Pengumuman RUPS telah disampaikan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Situs Web Perseroan. / The announcement of the GMS has been delivered through advertisements in Bisnis Indonesia daily, the Indonesia Stock Exchange Website, the Financial Services Authority (OJK) Website, and the Company's Website.
3	Tanggal terakhir Daftar Pemegang Saham, pukul 16.00 / Last date of Shareholders Register, 16.00	3 Maret 2020 / March 3, 2020	-	-
4	Pemanggilan RUPS, setidaknya melalui: / GMS summons, at least through: (i) 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional / 1 (one) Indonesian newspaper with national circulation (ii) Situs web Bursa Efek Indonesia: / IDX website: www.idx.co.id (iii) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling kurang adalah Bahasa Inggris: / The Company's website, in Indonesian and foreign languages, should at least be in English: www.wika-beton.co.id.	4 Maret 2020 / March 4, 2020	Pemanggilan RUPS disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS. / Summons to the GMS are submitted no later than 21 (twenty-one) days before the date of the GMS.	Pemanggilan RUPS telah disampaikan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Situs Web Perseroan. / Summons to the GMS have been submitted through advertisements in Bisnis Indonesia newspaper, the Indonesia Stock Exchange website, the Financial Services Authority (OJK) website and the Company's website.
4	Pelaksanaan RUPS / GMS Implementation	26 Maret 2020 / March 26, 2020	Ruang Dorsata 2 – Cerana – Florea, Lantai 3 Hotel Best Western Premier The Hive, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340.	Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.111.824.179 atau sebesar 73,30%. / The meeting was attended by the shareholders or the Company's authorized proxies, amounting to 6,111,824,179 or 73.30%.
5	Pemanggilan RUPS, setidaknya melalui: / GMS summons, at least through: (i) 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional / 1 (one) Indonesian newspaper with national circulation (ii) Situs web Bursa Efek Indonesia: / IDX website: www.idx.co.id (iii) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling kurang adalah Bahasa Inggris: / The Company's website, in Indonesian and foreign languages, should at least be in English: www.wika-beton.co.id.	30 Maret 2020 / March 30, 2020	Ringkasan Risalah RUPS disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS. / The summary of the minutes of the GMS is submitted no later than 2 (two) days after the date of the GMS.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan, Web Perseroan, dan melalui iklan di harian Investor Daily pada tanggal 30 Maret 2020. / Submission of the Summary of the Minutes of the GMS through the Indonesia Stock Exchange Website, the Financial Services Authority Website, the Company's website, and through advertisements in Daily Investor on March 30, 2020.
6	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK dan BEI / Submission of the Minutes of the GMS to the OJK and the IDX	21 April 2020 / April 21, 2020	Risalah/Berita Acara RUPS disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS / Minutes of the GMS are submitted no later than 30 (thirty) days after the date of the GMS	Risalah RUPS telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 21 April 2020. / The minutes of the GMS were submitted to the OJK and the IDX on April 21, 2020.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPST Tahun Buku 2019

Pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan dan dihadiri oleh Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Board of Commissioners and Board of Directors Attendance in AGMS for 2019 Fiscal Year

The implementation of the AGMS for the 2019 Fiscal Year was attended by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors who served until the meeting was held and attended by Capital Market Supporting Institutions & Professionals as listed in the table below.

Nama / Name	Jabatan / Position
Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
Bambang Pramujio	Komisaris Utama / President Commissioner
Yohanes Baptista Priyatmo Hadi	Komisaris / Commissioner
Asfiah Mahdiani	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Yustinus Prastowo	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Direksi / Board of Directors	
Hadian Pramudita	Direktur Utama / President Director
Kuntjara	Direktur Pemasaran / Director of Marketing
Mursyid	Direktur Human Capital & Produksi / Director of Human Capital & Production
Sidiq Purnomo	Direktur Teknik & Pengembangan / Director of Engineering & Development
Imam Sudiyono	Direktur Keuangan / Director of Finance
I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur Operasi / Director of Operation

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam RUPST Tahun Buku 2019, telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.111.824.179 saham atau sebesar 73,30% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Shareholders Attendance Quorum

The AGMS for the 2019 Fiscal Year, was attended by the Shareholders or the legal proxies of the Company's Shareholders totaling 6,111,824,179 shares or 73.30% of all shares that have been issued and fully paid-up in the Company after deducting the shares that have been repurchased by Company.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan Tindak Lanjutnya
Annual GMS Resolutions for 2019 Fiscal Year and the Follow-up

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Results			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management Follow-up
			Setuju / Agreed	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree		
1	<p>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> <p>/ Approval of the Company's 2019 Annual Report including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Validation of the Company's Financial Statements ended on December 31, 2019.</p>	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00037/2.1030/AU.1/0181-2/1/II/2020 tanggal 21 Februari 2020, dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan perusahaan anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". / Approved the Company's Annual Report for the 2019 Fiscal Year including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and validated the Company's Financial Statements for the 2019 Fiscal Year which have been audited by the Public Accounting Office (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan as stated in their report No. 00037/ 2.1030/ AU .1/ 0181-2/ 1/ II/ 2020 dated February 21, 2020, with the opinion "fair in all material respects, the consolidated statements of financial position of PT Wijaya Karya Beton Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2019, as well as its consolidated financial performance and cash flow for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards."</p> <p>2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. / Granted full release and discharge of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions that have been carried out in the Fiscal Year ended on December 31, 2019 as long as these actions are not criminal acts and are reflected in the books and reports of the Company.</p>	<p>6.104.502.179 saham (99,88%) / 6,104,502,179 shares (99.88%)</p>	<p>7.321.900 saham (0,12%) / 7,321,900 shares (0.12%)</p>	<p>100 saham (0,00%) / 100 shares (0.00%)</p>	v	<p>Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 tanggal 26 Maret 2020. / Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 dated March 26, 2020.</p>
2	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019. / Determination of the Use of Net Profit including the distribution of dividends for the 2019 Fiscal Year.</p>	<p>1. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp512.346.720.675,- sebagai berikut: / Approved the determination of the use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year ended on December 31, 2019, amounting to Rp512,346,720,675 as follows:</p> <p>a. Sebesar 25% dari Laba Bersih atau senilai Rp128.076.420.849,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp15.36,- per saham. / 25% of the Net Profit or Rp128,076,420,849 was determined as Cash Dividend to the Shareholders or Rp15.36 per share.</p> <p>b. Sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp102.469.344.135,- ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT. / 20% of the Net Profit or Rp102,469,344,135 was determined as a mandatory reserve in order to comply with the Limited Liability Company Law.</p> <p>c. Sebesar 55% dari Laba Bersih atau senilai Rp281.800.955.691,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya. / 55% of the net profit or Rp281,800,955,691 was designated as other reserves.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham. / Authorized the Board of Directors with substitution rights to further regulate the procedure and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable regulations, including making rounds up for the payment of dividends per share.</p>	<p>6.111.823.979 saham (99,99%) / 6,111,823,979 shares (99.99%)</p>	<p>100 saham (0,00%) / 100 shares (0.00%)</p>	<p>100 saham (0,00%) / 100 shares (0.00%)</p>	v	<p>Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 tanggal 26 Maret 2020. / Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 dated March 26, 2020.</p>

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Results			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management Follow-up
			Setuju / Agreed	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree		
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. / Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 Fiscal Year.	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko Usaha dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk: / Authorized the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit and Business Risk Committee by first obtaining written approval from the majority shareholder to: 1. Melakukan pengadaan sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2020; / Conduct procurement until the appointment of a KAP that will audit the Financial Statements of PT Wijaya Karya Beton Tbk for the 2020 Fiscal Year; 2. Menetapkan besaran biaya jasa audit dan <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE) serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit; / Determined the amount of audit service fees and <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE) as well as other appointment requirements, taking into account the reasonableness and scope of audit work; 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan, termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran biaya jasa audit dan <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE). / Appointed a replacement Public Accounting Firm and determined the terms and conditions of appointment, if the appointed KAP is unable to carry out its duties to complete the Audit of the Company's Financial Statements for any reason based on the provisions and regulations, including the failure to reach an agreement regarding the amount of audit service fees and <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE).	6.055.481.679 saham (99,08%) / 6.055.481.679 shares (99.08%)	100 saham (0,00%) / 100 shares (0.00%)	56.342.400 saham (0,92%) / 56.342.400 shares (0.92%)	v	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 tanggal 26 Maret 2020. / Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 dated March 26, 2020.
4	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2019, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2020. / Determination of tantiem for the 2019 Fiscal Year, Salary and Other Allowances for Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for 2020.	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2020. / Authorized the Majority Shareholders to determine the amount of tantiem for the 2019 Fiscal Year, as well as determined the honorarium and other allowances for Members of the Board of Commissioners for 2020. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2020. / Authorized the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Majority Shareholders to determine the amount of tantiem for the 2019 Fiscal Year, as well as determining the salary and other allowances for the Board of Directors for 2020.	6.055.481.679 saham (99,08%) / 6.055.481.679 shares (99.08%)	100 saham (0,00%) / 100 shares (0.00%)	56.432.400 saham (0,92%) / 56.432.400 shares (0.92%)	v	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 tanggal 26 Maret 2020. / Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 dated March 26, 2020.

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Results			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management Follow-up
			Setuju / Agreed	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree		
5	Persetujuan Pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP (Management and Employee Stock Option Plan). / Approval of Transfer of Treasury Shares through the MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) Program.	<p>1. Menyetujui pengalihan saham yang masih dalam simpanan atau treasuri, baik sebagian maupun seluruhnya melalui mekanisme MESOP sebanyak-banyaknya 377.157.951 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham dengan harga sebesar Rp202,- per saham. / Approved the transfer of shares that are still in savings or treasury, either partially or completely through the MESOP mechanism for a maximum of 377,157,951 (three hundred and seventy-seven million one hundred and fifty-seven thousand nine hundred and fifty-one) shares at a price of Rp202 per share.</p> <p>2. Menyetujui pelaksanaan Program MESOP diberikan kepada karyawan, Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan. / Approved the implementation of the MESOP Program given to employees, Board of Directors, Board of Commissioners of the Company and/or Company Controlled Companies.</p> <p>3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Pelaksanaan Pengalihan Saham dalam Simpanan sebagaimana yang diputuskan dalam mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menetapkan syarat kepesertaan Program MESOP. / Authorized the Board of Commissioners of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the Implementation of the Transfer of Shares in Deposits as decided in this agenda in accordance with the applicable laws and regulations, including to determine the requirements for participation in the MESOP Program.</p> <p>4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil pelaksanaan keputusan mata acara ini dalam Akta Notaris tersendiri dengan cara menyalin kembali secara lengkap dan memberitahukan dan/atau meminta persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. / Authorized the Board of Commissioners of the Company with the right of substitution to state the results of the implementation of the decisions on this agenda in a separate Notary Deed by copying them completely and notifying and/or requesting approval from the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations.</p>	5.836.837.579 saham (95,50%) / 5.836.837.579 shares (95.50%)	100 saham (0,00%) / 100 shares (0.00%)	274.986.500 saham (4,50%) / 274.986.500 shares (4.50%)	v	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 tanggal 26 Maret 2020. / Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 dated March 26, 2020.
6	Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019") / Approval of the Affirmation of the Regulation of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises ("BUMN Permen 08/2019")	Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa di Perseroan. / Approved the affirmation or validation of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises and its amendments as guidelines for the procurement of goods and services in the Company.	6.111.823.979 saham (99,99%) / 6.111.823.979 shares (99.99%)	100 saham (0,00%) / 100 shares (0.00%)	100 saham (0,00%) / 100 shares (0.00%)	v	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 tanggal 26 Maret 2020. / Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 dated March 26, 2020.

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Results			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management Follow-up
			Setuju / Agreed	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree		
7	Perubahan Pengurus Perseroan / Changes in the Management of the Company	<p>1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: / Honorably dismissed the following names:</p> <p>a. Bambang Pramujo sebagai Komisaris Utama; / Bambang Pramujo as President Commissioner;</p> <p>b. Asfiah Mahdiani sebagai Komisaris Independen; / Asfiah Mahdiani as Independent Commissioner;</p> <p>c. Yustinus Prastowo sebagai Komisaris Independen. / Yustinus Prastowo as Independent Commissioner.</p> <p>Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan pikiran dan tenaga yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan. / As of the closing of this Meeting, with gratitude for the contribution of thoughts and energy given by the concerned parties during their tenure as a Member of the Board of Commissioners of the Company.</p> <p>2. Mengangkat Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. / Appointed Agung Budi Waskito as President Commissioner as of the closing of this General Meeting of Shareholders, for a term of office in accordance with the Articles of Association of the Company.</p> <p>3. Pengangkatan Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama sebagaimana butir 2 di atas, apabila di kemudian hari terdapat keputusan lain sehubungan dengan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan tersebut, maka Pemegang Saham Mayoritas dapat mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. / Regarding the appointment of Agung Budi Waskito as President Commissioner as referred to in point 2 above, if at a later date there is another decision related to the appointment of the President Commissioner of the Company, the Majority Shareholders may propose to the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss the concerned person at any time.</p> <p>4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut: / Appointed the following names as the Management of the Company:</p> <p>a. Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris; / Heru Wisnu Wibowo as Commissioner;</p> <p>b. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen. / Indrieffouny Indra as Independent Commissioner</p> <p>Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. / The appointment of the aforementioned members of the Board of Commissioners, commencing from the closing of this General Meeting of Shareholders, is for a term of office in accordance with the Articles of Association of the Company, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss the concerned person at any time.</p>	5.847.604.179 saham (99,68%) / 5.847.604.179 shares (99.68%)	0 saham (0,00%) / 0 share (0.00%)	264.220.000 saham (4,32%) / 264.220.000 shares (4.32%)	v	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 tanggal 26 Maret 2020. / Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 32 dated March 26, 2020.

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Results			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management Follow-up
			Setuju / Agreed	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree		
		<p>5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: / With the dismissal and appointment of the members of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:</p> <p>Dewan Komisaris: / Board of Commissioners:</p> <ol style="list-style-type: none"> Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama; / Agung Budi Waskito as President Commissioner; Y.B. Priyatno Hadi sebagai Komisaris; / Y.B. Priyatno Hadi as Commissioner; Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris; / Herry Trisaputra Zuna as Commissioner; Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris; / Heru Wisnu Wibowo as Commissioner; Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen; / Priyo Suprobo as Independent Commissioner; Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen. / Indrieffouny Indra as Independent Commissioner. <p>Direksi: / Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; / Hadian Pramudita as President Director; Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran; / Kuntjara as Director of Marketing; Mursyid sebagai Direktur HC dan Produksi; / Mursyid as Director of HC and Production; Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan; / Sidiq Purnomo as Director of Engineering and Development; Imam Sudyono sebagai Direktur Keuangan; / Imam Sudyono as Director of Finance; I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi; / I Ketut Pasek Senjaya Putra as Director of Operation; <p>6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. / Authorized the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the decisions of this agenda in accordance with the applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notary Deed and notify the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Ministry of Law and Human rights in accordance with applicable regulations.</p>					

Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019

Sesuai dengan keputusan Rapat, Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp128.076.420.849,- untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp15,36 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

• Jadwal Pembagian Dividen

No.	Keterangan / Description	Tanggal / Date
I	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividend (<i>Cum Dividen</i>) / End of Share Trade Period with Dividend Right (<i>Cum Dividend</i>) <ul style="list-style-type: none"> Pasar Reguler dan Negosiasi / Regular and Negotiated Markets Pasar Tunai / Cash Market 	3 April 2020 / April 3, 2020 7 April 2020 / April 7, 2020

Schedule and Procedure for Cash Dividend Payment for the 2019 Fiscal Year

In accordance with the resolution of the Meeting, the Company has determined a cash dividend from the Company's Net Profits for the 2019 Fiscal Year of Rp128,076,420,849 to be distributed to Shareholders so that the Cash Dividend to be paid is Rp15.36 per share to be distributed to the Shareholders. The Company's shares with the following schedule and procedure:

• Dividend Distribution Schedule

No.	Keterangan / Description	Tanggal / Date
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) / Beginning of Share Trade Period without Dividend Right (<i>Ex Dividend</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi / Regular and Negotiated Markets • Pasar Tunai / Cash Market	6 April 2020 / April 6, 2020 8 April 2020 / April 8, 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>) / Date of Shareholder List entitled for Dividend (<i>Recording Date</i>)	7 April 2020 / April 7, 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019 / Date of Cash Dividend Payment for 2019 Fiscal Year	29 April 2020 / April 29, 2020

• **Cara Pembayaran Dividen Tunai**

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 7 April 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 7 April 2020.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 April 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggung Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 7 April 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direksi Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekan atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

• **Cash Dividend Payment Method**

- a. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company (“DPS”) or a recording date on April 7, 2020 and/or owners of the Company’s shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at closing of trading on April 7, 2020.
- b. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities companies and/or Custodian Banks on April 29, 2020. Proof of cash dividend payment will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies. and/or the Custodian Bank where the Shareholders open their accounts. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholders’ account.
- c. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of imposed tax will be the responsibility of the concerned Shareholders and deducted from the amount of cash dividends that are the right of the Shareholders concerned.
- d. Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (“NPWP”) are requested to submit their NPWP to KSEI or the Share Registrar PT Datindo Entrycom (“BAE”) at Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 no later than April 7, 2020 at 16.00 WIB. Without the inclusion of the NPWP, cash dividends paid to the Domestic Taxpayer will be subject to Income Tax rate 100% higher than the normal rate.
- e. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (“P3B”) must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval and submitting peer proof documents or DGT/SKD receipts that have been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without the said document, dividends cash paid will be subject to 20% of Income Tax Article 26.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 dan Tindak Lanjutnya

Pada tahun 2019, Perseroan telah melaksanakan I (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2019 bertempat di *Main Hall*, Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai I, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. Pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2018 tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat sampai pada RUPST tersebut berlangsung.

Implementation of Annual GMS for 2018 Fiscal Year and the Follow-Up

In 2019, the Company held I (one) Annual GMS (AGMS) which was held on March 27, 2019 at the Main Hall, Indonesia Stock Exchange Building, 1st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. The implementation of the AGMS for the 2018 Fiscal Year was attended by all Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who served until the AGMS took place.

Mekanisme Pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019

Mechanism for Implementing AGMS for 2019 Fiscal Year

No.	Kegiatan / Activities	Tanggal Pelaksanaan / Date	Ketentuan / Provisions	Keterangan / Description
1	Pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK / GMS agenda notification to OJK	11 Februari 2019 / February 11, 2019	Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS. / The notification of the Meeting agenda to the Financial Services Authority shall be made no later than 5 (five) working days prior to the announcement of the GMS.	Pemberitahuan mata acara Rapat telah disampaikan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan. / Notification of the Meeting agenda has been submitted by letter to the Financial Services Authority (OJK) signed by the Corporate Secretary.
2	Pengumuman RUPS, setidaknya melalui: / GMS announcement, at least through: (i) 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional / 1 (one) Indonesian daily newspaper with national circulation (ii) Situs web Bursa Efek Indonesia: / IDX website: www.idx.co.id (iii) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling kurang adalah Bahasa Inggris. / The Company's website, in Indonesian and foreign languages, at least in English: www.wika-beton.co.id.	18 Februari 2019 / February 18, 2019	Pengumuman RUPS disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS. / Announcement of the GMS shall be submitted no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the summons for the GMS.	Pengumuman RUPS telah disampaikan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Situs Web Perseroan. / The announcement of the GMS has been delivered through advertisements in Bisnis Indonesia newspaper, the Indonesia Stock Exchange Website, the Financial Services Authority (OJK) Website, and the Company's Website.
3	Pemanggilan RUPS, setidaknya melalui: / Summons to the GMS, at least through: (i) 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional / 1 (one) Indonesian daily newspaper with national circulation (ii) Situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id / IDX website: www.idx.co.id (iii) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling kurang adalah Bahasa Inggris. / The Company's website, in Indonesian and foreign languages, at least in English: www.wika-beton.co.id.	5 Maret 2019 / March 5, 2019	Pemanggilan RUPS disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS. / Summons to the GMS are submitted no later than 21 (twenty-one) days before the date of the GMS.	Pemanggilan RUPS telah disampaikan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Situs Web Perseroan. / Summons to the GMS have been submitted through advertisements in Bisnis Indonesia newspaper, the Indonesia Stock Exchange website, the Financial Services Authority (OJK) website and the Company's website.
4	Pelaksanaan RUPS / GMS Implementation	27 Maret 2019 / March 27, 2019	<i>Main Hall</i> , Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt. I, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.	Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.143.321.126 atau sebesar 73,68%. / The meeting was attended by the shareholders or the legal proxies of the Company's Shareholders totaling 6,143,321,126 or 73.68%.
5	Pemanggilan RUPS, setidaknya melalui: / Summons to the GMS, at least through: (i) 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional / 1 (one) Indonesian daily newspaper with national circulation (ii) Situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id / IDX website: www.idx.co.id (iii) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling kurang adalah Bahasa Inggris. / The Company's website, in Indonesian and foreign languages, at least in English: www.wika-beton.co.id.	29 Maret 2019 / March 29, 2019	Ringkasan Risalah RUPS disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS. / The summary of the minutes of the GMS is submitted no later than 2 (two) days after the date of the GMS.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan, Web Perseroan, dan melalui iklan di harian Kontan pada tanggal 29 Maret 2019. / Submission of the Summary of Minutes of the GMS through the Indonesia Stock Exchange Website, the Financial Services Authority Website, the Company's website, and through advertisements in the Kontan newspaper on March 29, 2019.

No.	Kegiatan / Activities	Tanggal Pelaksanaan / Date	Ketentuan / Provisions	Keterangan / Description
6	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK dan BEI / Submission of the Minutes of the GMS to the OJK and the IDX	22 April 2019 / April 22, 2019	Risalah/Berita Acara RUPS disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS / Minutes of the GMS are submitted no later than 30 (thirty) days after the date of the GMS	Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 22 April 2019. / The Minutes of the GMS and the Summary of the Minutes of the GMS were submitted to the OJK and the IDX on April 22, 2019.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 dan Tindak Lanjutnya

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, seluruh keputusan RUPST Tahun Buku 2018, telah seluruhnya dilaksanakan. Penjelasan atas setiap mata acara RUPS Tahun Buku 2018 tercantum dalam tabel di bawah ini.

Resolutions of Annual GMS for 2018 Fiscal Year and the Follow-up

Until this Annual Report was published, all resolutions of the 2018 AGMS have been implemented. The explanation for each agenda item of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders is listed in the table below.

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Results			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management's Follow-up
			Setuju / Agree	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree		
I	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. / Approval of the Company's 2018 Annual Report including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Validation of the Company's Financial Statements ended on December 31, 2018.	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. / Approved the Company's Annual Report as the main points have been submitted by the Board of Directors regarding the condition and operation of the Company for the Fiscal Year ended on December 31, 2018 including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the Fiscal Year ended on December 31, 2018.</p> <p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00018/2.1030/AU.1/04/0181-1/1/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. / Validated the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended on December 31, 2018 which has been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as stated in their report No: 00018/2.1030/AU.1/04/0181-1/1/II/2019 dated February 22, 2019 for the 2018 Financial Statements with a fair opinion in all material respects as well as granting full release and discharge of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions that have been carried out during the Fiscal Year ended December 31, 2018 as long as the act is not a criminal act and is reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.</p>	6.135.655.626 saham (99,875%) / 6,135,655,626 shares (99,875%)	7.665.500 saham (0,125%) / 7,665,500 shares (0,125%)	Nihil / Nil	v	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 31 tanggal 27 Maret 2019. / Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 31 dated March 27, 2019.

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Results			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management's Follow-up
			Setuju / Agree	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree		
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018. / Determination of the Use of Net Profit including the distribution of dividends for the 2018 Fiscal Year.	<p>I. Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp486.353.057.930,- sebagai berikut: / Approved the determination of the use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year ended on December 31, 2018, amounting to Rp486,353,057,930 as follows:</p> <p>a. Sebesar lebih kurang 30% dari Laba Bersih atau senilai Rp145.920.401.358,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp17.50,- per saham. / Approximately 30% of the Net Profit or Rp145,920,401,358 was determined as Cash Dividend to the Shareholders or in the amount of Rp17.50 per share.</p> <p>b. Sebesar lebih kurang 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp97.270.611.586,- ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT. / Approximately 20% of the Net Profit or Rp97,270,611,586 was determined as a mandatory reserve in order to comply with the Limited Liability Company Law.</p> <p>c. Sebesar lebih kurang 50% dari Laba Bersih atau senilai Rp243.162.044.986,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya. / Approximately 50% of the Net Profit or Rp243,162,044,986 was designated as other reserves.</p> <p>d. Memberikan kuasa kepada Direksi mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham sesuai Pasal 34 ayat (1) huruf j juncto Pasal 36 POJK 32/2014. / Authorized the Board of Directors regarding the procedure and implementation of cash dividend distribution including rounding up the payment of dividends per share in accordance with Article 34 paragraph (1) letter j in conjunction with Article 36 POJK 32/2014.</p>	6.143.321.126 saham (100,00%) / 6,143,321,126 shares (100.00%)	Nihil / Nil	Nihil / Nil	v	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 31 tanggal 27 Maret 2019. / Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 31 dated March 27, 2019.
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019. / Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for 2019 Fiscal Year.	<p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko Usaha dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk: / Authorized the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit and Business Risk Committee by first obtaining the approval of the majority shareholder to:</p> <p>a. Melakukan seleksi sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2019; / Conduct selection up to the appointment of a KAP that will audit the Financial Statements of PT Wijaya Karya Beton Tbk for the 2019 Fiscal Year;</p> <p>b. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE) serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit; / Determined the amount of fees for audit services and <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE) as well as other appointment requirements, taking into account the reasonableness and scope of audit work;</p> <p>c. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan, termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit dan <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE). / Appointed a replacement KAP and determined the terms and conditions of appointment, if the appointed KAP is unable to carry out its duties to complete the Audit of the Company's Financial Statements for any reason based on the provisions and regulations, including the failure to reach an agreement regarding the amount of audit service fees and <i>Out of Pocket Expenses</i> (OPE).</p>	6.141.264.026 saham (99,966%) / 6,141,264,026 shares (99.966%)	Nihil / Nil	2.057.100 saham (0,033%) / 2,057,100 shares (0.033%)	v	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 31 tanggal 27 Maret 2019. / Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 31 dated March 27, 2019.

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Results			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management's Follow-up
			Setuju / Agree	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree		
4	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2018, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2019. / Determination of tantiem for the 2018 Fiscal Year, Salary and Other Allowances for Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for 2019.	<p>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2018, gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2019. / Authorized the Majority Shareholders to determine the amount of tantiem for the 2018 Fiscal Year, salaries and other allowances for Members of the Board of Commissioners for 2019.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran tantiem Tahun Buku 2018, gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2019. / Authorized the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Majority Shareholders to determine the amount of tantiem for the 2018 Fiscal Year, salaries and other allowances for the Board of Directors for 2019.</p>	6.143.321.126 saham (100,00%) / 6,143,321,126 shares (100.00%)	Nihil / Nil	Nihil / Nil	v	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk No.31 tanggal 27 Maret 2019. / Has been recorded in the Deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 31 dated March 27, 2019.
5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. / Amendments to the Company's Articles of Association.	<p>1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI dan menambah ketentuan Pasal 3 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait kegiatan usaha penunjang. / Approved changes and/or adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purposes and objectives as well as the Company's business activities in accordance with KBLI and add to the provisions of Article 3 paragraph 3 of the Company's Articles of Association related to supporting business activities.</p> <p>2. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pemungutan Suara Mengenai Diri Orang yang dilakukan secara tertutup. / Agreed to delete the Article 16 paragraph 8 of the Company's Articles of Association regarding Voting concerning Individual which is conducted in private.</p> <p>3. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun, menyatakan kembali dan menandatangani perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut dengan cara menyusun kembali secara lengkap ke dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan, pelaporan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Agreed to grant the authority and/or power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to prepare, restate and sign the amendments and/or adjustments to the Company's Articles of Association by way of completely rewriting them into a Notary deed and then submitting to the Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia and/or authorized agencies to obtain approval, reporting and/or receipt of notification of amendments to the Company's Articles of Association, and to do everything deemed necessary and useful, including to make amendments and/or adjustments to the Articles of Association based on the prevailing laws and regulations.</p>	5.926.902.626 saham (96,477%) / 5,926,902,626 shares (96.477%)	Nihil / Nil	216.418.500 saham (3,522%) / 216,418,500 shares (3.522%)	v	Telah dicatat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 12 April 2019. / Has been recorded in the Deed of Amendment to Articles of Association No. 31 dated April 12, 2019.

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Results			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management's Follow-up
			Setuju / Agree	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree		
6	Perubahan Pengurus Perseroan / Changes in the Company Management	<p>1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan, sebagai berikut: / Honorably dismissed the following names:</p> <p>a. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen; / Priyo Suprobo as Independent Commissioner;</p> <p>b. Agustinus Boediono sebagai Komisaris; / Agustinus Boediono as Commissioner;</p> <p>c. Hari Respati sebagai Direktur; / Hari Respati as Director;</p> <p>d. Mohammad Syafii sebagai Direktur; / Mohammad Syafii as Director;</p> <p>e. Siddik Siregar sebagai Direktur; / Siddik Siregar as Director;</p> <p>Dengan ucapan terima kasih atas pengabdian mereka selama menjabat, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat. / With gratitude for their dedication during their term of office, starting from the closing of this Meeting.</p> <p>2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: / Changed the nomenclature of the positions of the members of the Company's Board of Directors as follows:</p> <p>a. Direktur Utama menjadi Direktur Utama; / President Director to President Director;</p> <p>b. Direktur menjadi Direktur Pemasaran; / Director of Director of Marketing;</p> <p>c. Direktur menjadi Direktur Human Capital dan Produksi; / Director to Director of Human Capital and Production;</p> <p>d. Direktur menjadi Direktur Teknik dan Pengembangan; / Director to Director of Engineering and Development;</p> <p>e. Direktur menjadi Direktur Keuangan; / Director to Director of Finance;</p> <p>f. Direktur menjadi Direktur Operasi; / Director to Director of Operation;</p> <p>3. Mengangkat kembali Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. / Reappointed Priyo Suprobo as Independent Commissioner of the Company which is effective since the closing of this Meeting and ends until the closing of the 5th Annual GMS since the appointment of the concerned person and a maximum of 5 years, with due observance of the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss it at any time.</p>	5,926.902.626 saham (99,477%) / 5,926,902,626 shares (99.477%)	Nihil / Nil	216.418.500 saham (3,522%) / 216,418,500 shares (3.522%)	v	Telah dicatat dalam Akta Perubahan Pengurus No. 21 tanggal 9 April 2019. / Has been recorded in the Deed of Management Change No. 21 dated April 9, 2019.

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2020

Pada tahun 2020, Perseroan melaksanakan I (satu) kali RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 2020, bertempat di Hotel Best Western Premier The Hive, Lantai 3, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340. Pelaksanaan RUPSLB Tahun 2020 tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat sampai pada RUPST tersebut berlangsung.

Implementation of 2020 Extraordinary GMS

In 2020, the Company held I (one) Extraordinary GMS (EGMS) which was held on August 4, 2020, at the Best Western Premier Hotel, The Hive, 3rd Floor, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340. The 2020 EGMS was attended by all the Company's Boards of Commissioners and Board of Directors who served until the AGMS took place.

Mekanisme Pelaksanaan RUPSLB Tahun 2020

Mechanism for Implementing the 2020 EGMS

No.	Kegiatan / Activities	Tanggal Pelaksanaan / Date	Ketentuan / Provisions	Keterangan / Description
1	Pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK / Notification of GMS agenda to OJK	19 Juni 2020 / June 19, 2020	Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS. / The notification of the Meeting agenda to the Financial Services Authority shall be made no later than 5 (five) working days prior to the announcement of the GMS.	Pemberitahuan mata acara Rapat telah disampaikan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan. / Notification of the Meeting agenda has been submitted by letter to the Financial Services Authority (OJK) signed by the Corporate Secretary.
2	Pemberitahuan RUPS, setidaknya melalui: / GMS Notification, at least through: (i) 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional / 1 (one) Indonesian daily newspaper with national circulation (ii) Situs web Bursa Efek Indonesia: / IDX website: www.idx.co.id (iii) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling kurang adalah Bahasa Inggris. / The Company's website, in Indonesian and foreign languages, at least in English: www.wika-beton.co.id.	26 Juni 2020 / June 26, 2020	Pengumuman RUPS disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS. / Announcement of the GMS shall be submitted no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the summons for the GMS.	Pengumuman RUPS telah disampaikan melalui iklan di harian Kontan, Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Situs Web Perseroan. / Announcement of the GMS has been delivered through advertisements in the Kontan newspaper, the Indonesia Stock Exchange Website, the Financial Services Authority (OJK) Website, and the Company's Website.
3	Tanggal terakhir Daftar Pemegang Saham, pukul 16.00 / Last date of Shareholders Register, 16.00	10 Juli 2020 / July 10, 2020	-	-
4	Pemberitahuan RUPS, setidaknya melalui: / GMS Notification, at least through: (i) 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional / 1 (one) Indonesian daily newspaper with national circulation (ii) Situs web Bursa Efek Indonesia: / IDX website: www.idx.co.id (iii) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling kurang adalah Bahasa Inggris. / The Company's website, in Indonesian and foreign languages, at least in English: www.wika-beton.co.id.	13 Juli 2020 / July 13, 2020	Pemanggilan RUPS disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS. / Summons to the GMS are submitted no later than 21 (twenty-one) days before the date of the GMS.	Pemanggilan RUPS telah disampaikan melalui iklan di harian Kontan, Situs web eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Situs Web Perseroan. / Summons to the GMS have been submitted through advertisements in the Kontan newspaper, the eASY.KSEI website, the Indonesia Stock Exchange website, the Financial Services Authority (OJK) website and the Company's website.
4	Pelaksanaan RUPS / GMS implementation	4 Agustus 2020 / August 4, 2020	Hotel Best Western Premier The Hive, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340.	Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.032.542.800 atau sebesar 69,216%. / The meeting was attended by the Shareholders or the Company's legal proxies, totaling to 6,032,542,800 or 69.216%.
5	Pemberitahuan RUPS, setidaknya melalui: / GMS Notification, at least through: (i) 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional / 1 (one) Indonesian daily newspaper with national circulation (ii) Situs web Bursa Efek Indonesia: / IDX website: www.idx.co.id (iii) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, paling kurang adalah Bahasa Inggris. / The Company's website, in Indonesian and foreign languages, at least in English: www.wika-beton.co.id.	6 Agustus 2020 / August 6, 2020	Ringkasan Risalah RUPS disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS. / The summary of the minutes of the GMS is submitted no later than 2 (two) days after the date of the GMS.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Otoritas Jasa Keuangan, Web Perseroan, dan melalui iklan di harian Kontan pada tanggal 6 Agustus 2020 / Submission of the Summary of the Minutes of the GMS through the Indonesia Stock Exchange Website, the Financial Services Authority Website, the Company's website, and through advertisements in the Kontan newspaper on August 6, 2020
6	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK dan BEI / Submission of the Minutes of the GMS to the OJK and the IDX	26 Agustus 2020 / August 26, 2020	Risalah/Berita Acara RUPS disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS / Minutes of the GMS are submitted no later than 30 (thirty) days after the date of the GMS	Risalah RUPS telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 26 Agustus 2020 / The minutes of the GMS were submitted to the OJK and the IDX on August 26, 2020

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPSLB Tahun 2020

Pelaksanaan RUPSLB Tahun 2020 dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan dan dihadiri oleh Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Nama / Name	Jabatan / Position
Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
Agung Budi Waskito	Komisaris Utama / President Commissioner
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris / Commissioner
Heru Wisnu Wibowo	Komisaris / Commissioner
Indrieffouny Indra	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Direksi / Board of Directors	
Hadian Pramudita	Direktur Utama / President Director
Kuntjara	Direktur Pemasaran / Director of Marketing
Sidiq Purnomo	Direktur Teknik & Pengembangan / Director of Engineering & Development
Imam Sudiyono	Direktur Keuangan / Director of Finance
I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur Operasi / Director of Operation

Board of Commissioners and Board of Directors Attendance in 2020 EGMS

The 2020 EGMS was attended by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors who served until the meeting was held and attended by Capital Market Supporting Institutions & Professionals as listed in the table below.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam RUPSLB Tahun 2020, telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.032.542.800 saham atau sebesar 69,216% dari seluruh saham Perseroan.

Shareholders Attendance Quorum

The 2020 EGMS was attended by the Shareholders or the legal proxies of the Company's Shareholders totaling 6,032,542,800 shares or 69.216% of the total shares of the Company.

Hasil Keputusan RUPSLB Tahun 2020 dan Tindak Lanjutnya

Resolution of the 2020 EGMS and its Follow-up

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Result			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management's Follow-up
			Setuju / Agree	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree		
I	Perubahan Pengurus Perseroan. / Changes in the Company's Management	<p>1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: / Honorably dismissed the following names:</p> <p>a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama; / Mr. Agung Budi Waskito as President Commissioner;</p> <p>b. Sdr. Yohanes Baptista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris; / Mr. Yohanes Baptista Priyatmo Hadi as Commissioner;</p> <p>Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan. / Effective as of the closing of this Meeting, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given by the concerned parties during their tenure as Member of the Board of Commissioners of the Company.</p> <p>2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Mursyid sebagai Direktur Human Capital dan Produksi, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 terhitung sejak tanggal 8 Juni 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan. / Confirmed the dismissal with respect Mr. Mursyid as Director of Human Capital and Production, who was appointed based on the Resolution of the 2017 Extraordinary GMS starting from June 8, 2020, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given by him during his tenure as a Member of the Company's Board of Directors.</p>	6.032.542.800 saham (100,00%) / 6,032,542,800 shares (100%)	Nihil / Nil	Nihil / Nil	v	Telah dicatat dalam Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 04 tanggal 4 Agustus 2020 / It has been recorded in the Minutes of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 04 dated August 4, 2020

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Result			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management's Follow-up																							
			Setuju / Agree	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree																									
		<p>3. Mengangkat Sdr.Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada keputusan lain serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. / Appointed Mr.Ade Wahyu as President Commissioner as of the closing of this General Meeting of Shareholders, for a term of office in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, provided that in the future there are other decisions and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.</p> <p>4. Pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (<i>acquit et de charge</i>) kepada nama-nama tersebut di bawah ini: / Granted full release (<i>acquit et de charge</i>) to the following names:</p> <p>a. Sdr.Agung Budi Waskito sebagai Komisaris Utama; / Mr.Agung Budi Waskito as President Commissioner;</p> <p>b. Sdr.Yohanes Babbista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris; / Mr. Yohanes Baptista Priyatmo Hadi as Commissioner;</p> <p>c. Sdr.Mursyid sebagai Direktur <i>Human Capital</i> dan Produksi; / Mr. Mursyid as Director of Human Capital and Production;</p> <p>Akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan. / That will be given at the next Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the term of office of the concerned parties.</p> <p>5. Pengangkatan Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah diperolehnya persetujuan internal Pemegang Saham Mayoritas. / The appointment of the President Commissioner as referred to in number 3 above, can only carry out his duties after obtaining the internal approval of the Majority Shareholders.</p>																												
		<p>6. Mengubah Nomenklatur Jabatan Direksi, dan mengalihkan penugasan Anggota Direksi menjadi sebagai berikut: / Changed the Nomenclature of the Position of the Board of Directors, and transferring the assignment of Members of the Board of Directors to be as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama / Name</th> <th>Semula / From</th> <th>Menjadi / To</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hadian Pramudita</td> <td>Direktur Utama / President Director</td> <td>Direktur Utama / President Director</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kuntjara</td> <td>Direktur Pemasaran / Director of Marketing</td> <td>Direktur Pemasaran dan Pengembangan / Director of Marketing and Development</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sidiq Purnomo</td> <td>Direktur Teknik dan Pengembangan / Director of Engineering and Development</td> <td>Direktur Teknik dan Produksi / Director of Engineering and Production</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Imam Sudyono</td> <td>Direktur Keuangan / Director of Finance</td> <td>Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko / Director of Finance, Human Capital, and Risk Management</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>I Ketut Pasek Senjaya Putra</td> <td>Direktur Operasi / Director of Operation</td> <td>Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i> / Director of Operation and Supply Chain Management</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: / With the dismissal and appointment of the members of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:</p> <p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <p>a. Sdr.Ade Wahyu sebagai Komisaris Utama; / Mr.Ade Wahyu as President Commissioner;</p> <p>b. Sdr. Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris; / Mr. Herry Trisaputra Zuna as Commissioner;</p> <p>c. Sdr. Heru Wisnu Wibowo sebagai Komisaris; / Mr. Heru Wisnu Wibowo as Commissioner;</p> <p>d. Sdr. Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen; / Mr. Priyo Suprobo as Independent Commissioner;</p> <p>e. Sdr. Indrieffouny Indra sebagai Komisaris Independen. / Mr. Indrieffouny Indra as Independent Commissioner.</p>	No.	Nama / Name	Semula / From	Menjadi / To	1	Hadian Pramudita	Direktur Utama / President Director	Direktur Utama / President Director	2	Kuntjara	Direktur Pemasaran / Director of Marketing	Direktur Pemasaran dan Pengembangan / Director of Marketing and Development	3	Sidiq Purnomo	Direktur Teknik dan Pengembangan / Director of Engineering and Development	Direktur Teknik dan Produksi / Director of Engineering and Production	4	Imam Sudyono	Direktur Keuangan / Director of Finance	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko / Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	5	I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur Operasi / Director of Operation	Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i> / Director of Operation and Supply Chain Management				
No.	Nama / Name	Semula / From	Menjadi / To																											
1	Hadian Pramudita	Direktur Utama / President Director	Direktur Utama / President Director																											
2	Kuntjara	Direktur Pemasaran / Director of Marketing	Direktur Pemasaran dan Pengembangan / Director of Marketing and Development																											
3	Sidiq Purnomo	Direktur Teknik dan Pengembangan / Director of Engineering and Development	Direktur Teknik dan Produksi / Director of Engineering and Production																											
4	Imam Sudyono	Direktur Keuangan / Director of Finance	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko / Director of Finance, Human Capital, and Risk Management																											
5	I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur Operasi / Director of Operation	Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i> / Director of Operation and Supply Chain Management																											

No.	Agenda / Agenda	Keputusan / Resolutions	Hasil Pemungutan Suara / Voting Result			Status Pelaksanaan / Implementation Status	Tindak Lanjut Manajemen / Management's Follow-up
			Setuju / Agree	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree		
		<p>Direksi / Board of Directors</p> <p>a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; / Mr. Hadian Pramudita as President Director;</p> <p>b. Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan; / Mr. Kuntjara as Director of Marketing and Development;</p> <p>c. Sdr. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Teknik dan Produksi; / Mr. Sidiq Purnomo as Director of Engineering and Production;</p> <p>d. Sdr. Imam Sudiyo sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko; / Mr. Imam Sudiyo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management;</p> <p>e. Sdr. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i>. / Mr. I Ketut Pasek Senjaya Putra as Director of Operation and Supply Chain Management.</p> <p>7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. / Authorized the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the decisions of this agenda in accordance with applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notary Deed and notify the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations.</p>					

DEWAN KOMISARIS

Perseroan memiliki struktur organ Dewan Komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat perbaikan dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan telah melaksanakan implementasi GCG di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada penerapannya, Dewan Komisaris Perseroan menjalankan 2 (dua) fungsi pengawasan, yaitu:

1. *Level Performance*:
Memberi arahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberi masukan kepada RUPS.
2. *Level Conformance*:
Memastikan bahwa seluruh masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris telah sepenuhnya dijalankan Direksi, serta mengawasi aspek kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya di Perseroan, Dewan Komisaris senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Akta No. 33 tanggal 23 Juli 2020.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is the Company's organ that is assigned and collectively responsible for supervising, providing advice on improvements in carrying out the management of the Company, and providing advice to the Board of Directors, as well as ensuring that the Company has implemented GCG implementation at all levels or levels of the organization in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. In practice, the Board of Commissioners of the Company carries out 2 (two) supervisory functions, namely:

1. *Performance Level*:
Provide directions and advices to the Directors and give feedbacks to GMS.
2. *Conformance Level*:
Ensure all inputs provided by the Board of Commissioners which have been fully implemented by the Board of Directors, and oversee the compliance aspects of the Company on the prevailing laws and the Company's Articles of Association.

In conducting their functions, the Board of Commissioners always upholds on the prevailing laws and regulations, among others:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning The Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. The Company's Articles of Association as specified in Deed No. 33 dated July 23, 2020.

Selanjutnya, hasil pengawasan Dewan Komisaris disampaikan di dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi Perseroan.

Kriteria dan Prosedur Pemilihan Dewan Komisaris

Perseroan sebagai perusahaan anak BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. senantiasa mendasarkan kriteria dan prosedur pemilihan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam proses pengangkatan Dewan Komisaris, seluruh kandidat dinominasikan oleh pemegang saham pengendali, di mana selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan mendiskusikan profil dan kualifikasi dari masing-masing kandidat tersebut di dalam rapat nominasi. Kemudian, kandidat terpilih akan ditetapkan oleh RUPS dengan tetap memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perseroan. Kualifikasi dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi lainnya.

Result of the Board of Commissioners supervision is delivered in GMS as a part of assessment of the Board of Directors performance.

Criteria and Procedures for Board of Commissioners Appointment

The Company as a subsidiary of the state-owned enterprises PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. always base the criteria and procedures for selecting the Board of Commissioners based on the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“PT Law”), POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of issuers or Public Companies and the provisions of the Articles of Association of the Company. During the process, all candidates are nominated by the controlling shareholder, wherein the Nomination and Remuneration Committee will discuss the profile and qualifications of each of these candidates at the nomination meeting. Then, the elected candidates will be determined by the GMS while still paying attention to the vision, mission and strategic plans of the Company. The qualifications and minimum requirements that must be met in order for a person to be elected as a member of the Company’s Board of Commissioners are as follows:

1. Has good attitude, moral and integrity;
2. Is capable to take legal actions;
3. Within 5 (five) years before their appointment and during their services:
 - a. Never been declared bankrupt;
 - b. Never become member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners of a company, which was found guilty and has been declared bankrupt;
 - c. Never been legally punished due to a criminal act, which inflicts the state a financial loss and/or criminal act in financial sector;
 - d. Never been a member of the Board of Commissioners who, during his/her service:
 - Never hold Annual GMS;
 - Whose accountability as member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners has never been accepted by GMS or never give his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to GMS;
 - Has caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority.
4. Does not have any family relation or marital regulation up to three generations, either vertically or horizontally or in laws with other members of the Board of Commissioners and/or Members of the Board of Directors;

5. Tidak boleh memangku jabatan rangkap sebagai:
 - Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan jabatan lain pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kepala daerah, calon/anggota legislatif, pengurus partai politik dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
6. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai dalam rangka menjalankan fungsinya.
7. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
8. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Prosedur Pengangkatan, Pemilihan Ulang, dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Mekanisme pengangkatan, pemilihan ulang, dan pemberhentian Dewan Komisaris Perseroan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut telah dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun pemberhentian Dewan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui RUPS jika melakukan tindakan penyimpangan atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, terdapat indikasi melakukan kecurangan yang dapat merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya, serta alasan lainnya yang mendadak bagi Perseroan untuk memberhentikan anggota tersebut. Baik pengangkatan maupun pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan melalui mekanisme RUPS.

Susunan, Komposisi, dan Periode Jabatan Dewan Komisaris

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Penentuan komposisi dan jumlah Dewan Komisaris juga selalu mengacu pada peraturan yang berlaku yakni POJK No. 33/POJK.04/2014 mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang mana Dewan Komisaris Perusahaan paling kurang terdiri dari dua orang.

Hingga 31 Desember 2020, anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 5 (lima) orang, dengan 2 (dua) di antaranya adalah Komisaris Independen atau 40% dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris. Jumlah ini telah memenuhi ketentuan terkait

5. Cannot take concurrent position as:
 - Member of the Board of Directors, Member of Commissioners and other positions in a State-Owned Enterprises, Regional Government-Owned Enterprises, or private business entity, which may cause a conflict of interests;
 - Other positions, based on the laws and regulations, i.e. regional heads, candidates/members of house of representatives, manager of a political party and other positions which may arise conflict of interests.
6. Is committed to spend adequate time to perform his/her duties;
7. Is committed to comply with the laws and regulations; and
8. Has knowledge and/or skills required by Issuers or Public Listed Companies.

Procedures for Appointment, Reappointment, and Dismissal of the Board of Commissioners

The mechanism for the appointment, reappointment, and dismissal of the Company's Board of Commissioners is subject to the prevailing rules and regulations as stated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The provisions stipulated in the regulation have been contained in the Articles of Association of the Company.

The dismissal of the Board of Commissioners can be carried out at any time through the GMS if a Commissioner conducted acts of deviation or contrary to the Articles of Association, there are indications of fraud that could harm the Company, neglect its obligations, as well as other sudden reasons for the Company to dismiss such members. The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners is carried out through the GMS mechanism.

Structure, Composition, and Tenure of the Board of Commissioners

The composition and number of the Board of Commissioners are determined by the GMS by taking into account the vision, mission and strategic plan of the Company to enable effective, precise and fast decision making, and to act independently. The determination of the composition and number of the Board of Commissioners refers to the applicable regulations, namely POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding the number of members of the Company's Board of Commissioners in which the Company's Board of Commissioners consists of at least two people.

As of December 31, 2020, there are 5 (five) members of the Company's Board of Commissioners, with 2 (two) of whom are Independent Commissioners or 40% of the total number of the Board of Commissioners. This amount has met the provisions

Komisaris Independen yang diwajibkan minimal 30% dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris.

related to the Independent Commissioner which is required to be at least 30% of the total number of the Board of Commissioners.

Secara teknis, masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

Technically, the term of office of the members of the Board of Commissioners of the Company starts from the date determined by the GMS which appointed him/her and ends at the close of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of his/her appointment, without prejudice to the rights and authority of the GMS to dismiss the members of the Board. Commissioners at any time before his/her term of office ends. The composition of the Board of Commissioners of the Company as of December 31, 2020, is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Tenure
Ade Wahyu	Komisaris Utama / President Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 13 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed of Statement of GMS Resolution No. 13 dated August 12, 2020 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.	04 Agustus 2020 – RUPS tahun 2025 / August 04, 2020 – 2025 GMS
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris / Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 24 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed of Statement of GMS Resolution No. 24 dated March 20, 2017 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.	13 Maret 2017 – RUPS tahun 2022 / March 13, 2017 – 2022 GMS
Heru Wisnu Wibowo	Komisaris / Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 19 tanggal 09 April 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed of Statement of GMS Resolution No. 19 dated April 09, 2020 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.	26 Maret 2020 – RUPS tahun 2025 / March 26, 2020 – 2025 GMS
Priyo Suprobo	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 21 tanggal 09 April 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed of Statement of GMS Resolution No. 21 dated April 09, 2019 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.	9 April 2019 – RUPS tahun 2024 / April 9, 2019 – 2024 GMS
Indrieffouny Indra	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 19 tanggal 09 April 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed of Statement of GMS Resolution No. 19 dated April 09, 2020 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.	26 Maret 2020 – RUPS tahun 2025 / March 26, 2020 – 2025 GMS

Pergantian Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2020

Changes in Structure and Composition of Board of Commissioners in 2020

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 26 Maret 2020 menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:

The resolutions of the Annual GMS for the 2019 Fiscal Year dated March 26, 2020 approved the honorably dismissal of the following names as members of the Company's Board of Commissioners:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pemberhentian / Basis of Dismissal
Bambang Pramujio	Komisaris Utama / President Commissioner	Akta No. 19 tanggal 09 April 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta / Deed No. 19 dated April 09, 2020 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta
Asfiah Mahdiani	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta No. 19 tanggal 09 April 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta / Deed No. 19 dated April 09, 2020 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta
Yustinus Prastowo	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta No. 19 tanggal 09 April 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta / Deed No. 19 dated April 09, 2020 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta

Sementara itu, keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Meanwhile, the resolution of the Extraordinary GMS (EGMS) of 2020 dated August 4, 2020 approved the honorably dismissal of the following names as members of the Company's Board of Commissioners:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pemberhentain / Basis of Dismissal
Agung Budi Waskito	Komisaris Utama / President Commissioner	Akta No. 13 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed No. 13 dated August 12, 2020 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta
Yohanes Baptista Priyatmo Hadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta No. 13 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed No. 13 dated August 12, 2020 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal RUPS penetapannya sampai dengan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya. Namun demikian tidak mengurangi hak dan wewenang RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Tenure of the Board of Commissioners

Tenure of the Board of Commissioners commences from the date of the appointment of the GMS until the 5th (fifth) Annual GMS after the date of his/her appointment without prejudice to the rights and authority of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends due to reasons stipulated in the Articles of Association and Board Manual of the Board of Commissioners.

Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

A member of the Board of Commissioners whose term of office has ended can be reappointed for the next 1 (one) term.

Etika Kerja Dewan Komisaris

Perseroan telah melakukan pemutakhiran *Board Manual* sebagaimana Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 Tentang *Board Manual* PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 18 Oktober 2019. Berdasarkan *Board Manual* tersebut, serta dengan memperhatikan pentingnya tujuan penerapan GCG, maka seluruh jajaran manajemen Perseroan berkomitmen kuat untuk selalu menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari. Komitmen tersebut diwujudkan Perseroan dengan senantiasa menyempurnakan Pedoman *Corporate Governance* (*Code of Corporate Governance*) yang digunakan sebagai acuan/pedoman oleh seluruh organ Perseroan (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) dalam menerapkan praktik-praktik GCG di lingkungan Perseroan.

Code of Conduct of the Board of Commissioners

The Company has updated the Board Manual as referred to in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 regarding the Board Manual of PT Wijaya Karya Beton Tbk dated October 18, 2019. Based on this Board Manual, and with due attention to the importance of GCG implementation objectives, all levels of the Company's management are strongly committed to always implementing GCG practices in daily company management. This commitment is manifested by continuously improving the Code of Corporate Governance which is used as a reference/guideline by all organs of the Company (Shareholders/GMS, Board of Commissioners and Board of Directors) in implementing GCG practices in the Company.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 Tentang *Board Manual* PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 18 Oktober 2019, Perseroan telah memiliki Pedoman Kerja (*Board Manual*) Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board Manual of the Board of Commissioners

In accordance with the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 regarding the Board Manual of PT Wijaya Karya Beton Tbk dated October 18, 2019, the Company has a Board Manual for the Board of Commissioners which serves as a guideline for the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Perseroan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, keterbukaan, pembentukan komite dan

The Board Manual of the Board of Commissioners regulates matters relating to the organization, duties and responsibilities, authority, work ethics, transparency, establishment of committees

tata tertib rapat Dewan Komisaris serta Komite di bawah Dewan Komisaris. Pada penerapannya, Pedoman Kerja Dewan Komisaris senantiasa dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala agar senantiasa selaras terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan No. 33 Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan yaitu:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
 - Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya.
5. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
9. Ketentuan Rapat yang disebutkan dalam ayat 8 Pasal 21 mengikuti ketentuan mengenai RUPS dalam Anggaran Dasar.

and the rules of the Board of Commissioners meetings and Committees under the Board of Commissioners. In practice, the Board Manual for the Board of Commissioners are regularly evaluated and updated so that they are always in line with changes in laws and regulations and in accordance with the needs of the Company.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Pursuant to the Articles of Association of the Company No. 33 of 2020 dated July 23, 2020, duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

1. The Board of Commissioners has a supervising function and is responsible to oversee the management policies, the general management process regarding the Company and its business, and give some advices to the Directors.
 - Members of the Board of Commissioners carry out their duties and responsibilities in good manner, with full responsibility and prudence.
2. In certain condition, the Board of Commissioners is responsible to held AGMS and other GMS according to their authority as stated in laws, regulations and Articles of Association.
3. Approving and ratifying the Company's Long-Term and Work Plan and Corporate Budget prepared by the Directors, in accordance with the Articles of Association.
4. The Board of Commissioners, both together or individual at any times during office hours, has the right to get the access into the buildings, offices, and all areas under authority of the Company and to check all of records, documents and assets of the Company in conducting their responsibilities.
5. The Directors must give all of information related to the Company, which is needed by the Board of Commissioners to conduct their responsibilities.
6. The Board of Commissioners' meeting has the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors at any times if the members of the Board of Directors have a contrary action to the Articles of Association and/or legislation in the Capital Market.
7. This temporary dismissal must be notified to those concerned person, attached with the reasons.
8. During a period is no later than 90 (Ninety) days after the date of that temporary dismissal, the Board of Commissioners is required to hold a General Meeting of Shareholders which will decide that the related members of the Board of Directors will be permanently terminated or returned to their original position, on the other side, those members of the Board of Directors are given the self-defense opportunity to present on that meeting.
9. The provisions of the Meeting referred to paragraph 8 of Article 21, which follows the provisions concerning the GMS in the Articles of Association.

- | | |
|--|--|
| <p>10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.</p> <p>11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. <p>12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.</p> <p>13. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS. <p>14. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku. <p>15. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> | <p>10. If the General Meeting of Shareholders is not held around 90 (ninety) days after the temporary termination, the temporary termination shall be null and void by law, and the concerned person has the right to re-assume his original position.</p> <p>11. If all members of the Board of Directors are temporarily terminated or due to any reason there are no members of the Board of Directors at all, the Board of Commissioners is temporarily required to undertake the Company.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In such case, the Board of Commissioners has the right to give their temporary authority to one or more persons between the board as joint responsibility. <p>12. In the event if there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in the Articles of Association, it also applies to him/her.</p> <p>13. The Board of Commissioners can take care of the Company in certain circumstances in a certain period of time.</p> <ul style="list-style-type: none"> • This authority is determined by the Articles of Association or the Decision of GMS. <p>14. In order to support the implementation effectiveness of their duties and responsibilities, the Board of Commissioners must form an Audit Committee and may form other committees needed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Board of Commissioners shall evaluate the performance of the committee that helps the implementation of its duties and responsibilities at the end of the fiscal year. <p>15. Provisions regarding the accountability of the Board of Directors mutatis mutandis, it also applies to the Board of Commissioners.</p> |
|--|--|

Pembagian Tugas Antar Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang dan keahliannya. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya:

Distribution of Duties of the Board of Commissioners

In carrying out their duties, each Board of Commissioners has duties and responsibilities in accordance with their respective fields and expertise. The following are the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in carrying out their duties:

No.	Nama / Name	Posisi / Position	Tugas dan Tanggung Jawab / Duties and Responsibilities
1	Ade Wahyu	Komisaris Utama / President Commissioner	<p>1. Memimpin serta mengkoordinir para Komisaris dalam melaksanakan kegiatan Dewan Komisaris untuk mengawasi tindakan Direksi dalam pengurusan perusahaan. / Lead and coordinate the Commissioners in carrying out the activities of the Board of Commissioners to oversee the actions of the Board of Directors in managing the Company.</p> <p>2. Memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu, demi kepentingan perusahaan. / Provide advice to the Board of Directors if deemed necessary, for the benefit of the Company.</p> <p>3. Memberikan nasihat kepada Direksi yang membawahi Direktorat Keuangan, Human Capital & Manajemen Risiko dalam pengurusan perusahaan. / Provide advice to the Board of Directors in charge of the Directorate of Finance, Human Capital & Risk Management in managing the Company.</p>
2	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris / Commissioner	<p>Memberikan nasihat dan Mengawasi tindakan Direksi yang membawahi Direktorat Pemasaran, dan Direktur yang membawahi Direktorat Teknik dan Produksi dalam pengurusan perusahaan. / Provide advice and supervise the actions of the Board of Directors who oversees the Marketing Directorate, and the Director who oversees the Engineering and Production Directorate in managing the Company.</p>

No.	Nama / Name	Posisi / Position	Tugas dan Tanggung Jawab / Duties and Responsibilities
3	Heru Wisnu Wibowo	Komisaris / Commissioner	Memberikan nasihat dan mengawasi tindakan Direksi yang membawahi Direktorat Pemasaran, Direksi yang membawahi Direktorat Teknik dan Produksi, juga Direksi yang membawahi Direktorat Operasi dan SCM. / Provide advice and supervise the actions of the Board of Directors in charge of the Marketing Directorate, the Board of Directors in charge of the Directorate of Engineering and Production, as well as the Board of Directors in charge of the Operations and SCM Directorate.
4	Priyo Suprobo	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Memberikan nasihat dan mengawasi tindakan Direksi yang membawahi Direktorat Teknik dan Produksi, juga Direksi yang membawahi Direktorat Operasi dan SCM, Direksi yang membawahi Direktorat Keuangan, <i>Human Capital & Manajemen Risiko</i> dalam pengelolaan perusahaan. / Provide advice and supervise the actions of the Board of Directors in the Engineering and Production Directorate, as well as the Board of Directors in charge of the Operations and SCM Directorate, the Board of Directors in charge of the Directorate of Finance, Human Capital & Risk Management in managing the Company.
5	Indrieffouny Indra	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Memberikan nasihat dan mengawasi tindakan Direksi yang membawahi Direktorat Pemasaran, Direksi yang membawahi Direktorat Operasi dan SCM, Direksi yang membawahi Direktorat Keuangan, <i>Human Capital & Manajemen Risiko</i> dalam pengelolaan perusahaan. / Provide advice and supervise the actions of the Board of Directors in charge of the Marketing Directorate, the Board of Directors in charge of the Operations and SCM Directorate, the Board of Directors in charge of the Directorate of Finance, Human Capital & Risk Management in managing the Company.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, Dewan Komisaris berhak untuk:

1. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu, terukur, dan lengkap.
2. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mendapatkan fasilitas dari Perseroan sesuai dengan hasil penetapan RUPS dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perseroan.
4. Menerima Tantiem yang besarnya ditetapkan RUPS apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan atau mengalami peningkatan kinerja.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki sejumlah wewenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang digunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;

Rights and Authorities of the Board of Commissioners

Rights of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and exercising its authorities, and obligations, the Board of Commissioners are entitled to:

1. Gain access to Company information in a timely, measurable and complete manner.
2. Receive honorarium and allowances/facilities including retirement benefits of which the types and amounts are determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations.
3. Obtain facilities from the Company in accordance with the resolution of the GMS by taking into account the conditions and capabilities of the Company.
4. Receive bonuses of which the amount is determined by the GMS if the Company gains profit or experiences an increase in performance.

Authorities of the Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is authorized to:

1. View books, letters and other documents, examine cash for verification purposes and other securities and examine the assets of the Company;
2. Enter the premises, buildings and offices used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
4. Know all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the meeting of the Board of Commissioners;
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary;

7. Memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu;
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Penilaian Kelayakan & Kepatutan (Fit & Proper Test) Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat hingga akhir tahun buku 2020, telah dinyatakan lulus dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru Tahun 2020

Perseroan memberlakukan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru sebagaimana diatur dalam *Board Manual*. Program orientasi atau pengenalan dilakukan untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang bisnis Perusahaan serta kondisi yang dihadapi atau dialami Perusahaan. Dalam program orientasi Dewan Komisaris juga dilakukan pemaparan mengenai gambaran aktivitas bisnis perusahaan, rencana jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, pedoman kerja Dewan Komisaris, *charter* Dewan Komisaris, RKA Dewan Komisaris, *Code of Corporate Governance*, *Code of Conduct*, peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, serta pembagian tugas Dewan Komisaris dan jadwal kunjungan ke unit kerja.

Pada tahun 2020, anggota Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Ade Wahyu, Bapak Heru Wisnu Wibowo, dan Bapak Indrieffouny Indra telah menjalani program orientasi sebagai berikut:

No.	Nama Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Tanggal Orientasi / Orientation Date	Agenda pada Saat / Agenda during
1	Ade Wahyu	28 Agustus 2020 / August 28, 2020	Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting
2	Heru Wisnu Wibowo	27 April 2020 / April 27, 2020	Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting
3	Indrieffouny Indra	27 April 2020 / April 27, 2020	Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting

Fit & Proper Test for the Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners who served until the end of the 2020 fiscal year have passed the Fit & Proper Test conducted by the majority shareholders as stipulated in the Articles of Association, the principles of good governance, and the prevailing laws and regulations.

Orientation Program for the Board of Commissioners in 2020

The Company implements an orientation program for new members of the Board of Commissioners as stipulated in the Board Manual. Orientation or introduction program is conducted to provide additional knowledge about the Company's business and conditions faced or experienced by the Company. In the orientation program for the Board of Commissioners, a description of the company's business activities, short-term and long-term plans, work guidelines for the Board of Commissioners, Board of Commissioners charter, RKA for the Board of Commissioners, Code of Corporate Governance, Code of Conduct, with the implementation of the duties of the Board of Commissioners, as well as the division of duties of the Board of Commissioners and a schedule of visits to work units.

In 2020, new members of the Board of Commissioners, namely Mr. Ade Wahyu, Mr. Heru Wisnu Wibowo, and Mr. Indrieffouny Indra have participated in the following orientation program:

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis, hubungan keluarga, atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di Perseroan. Selain bertugas dan berfungsi dalam hal pengawasan jalannya kegiatan operasional Perseroan secara umum serta memastikan bahwa seluruh aspek kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku senantiasa terpenuhi, Komisaris Independen juga mempunyai tanggung jawab khusus yaitu mewakili kepentingan pemegang saham minoritas Perseroan. Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan berpedoman pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Hingga akhir tahun 2020, Perseroan memiliki 2 (tiga) orang Komisaris Independen atau lebih dari 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Komisaris Independen Perseroan

Sampai dengan 31 Desember 2020, susunan dan komposisi Komisaris Independen Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Priyo Suprobo	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 21 tanggal 14 Maret 2019 / Deed of GMS Resolutions No. 21 dated March 14, 2019
Indrieffouny Indra	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 19 tanggal 9 April 2020 / Deed of GMS Resolutions No. 19 dated April 9, 2020

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen senantiasa mengacu pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

No.	Kriteria / Criteria	Komisaris Independen / Independent Commissioner	
		Priyo Suprobo	Indrieffouny Indra
1	Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. / Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company for the next period.	√	√
2	Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. / Does not own shares, either directly or indirectly, in the Issuer or Public Company.	√	√
3	Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. / Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Issuer or Public Company.	√	√
4	Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. / Does not have a business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.	√	√

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioners is member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and controlling shareholders, and are free from business relationships, family relationships, or other relationships that may affect their ability to implement GCG principles in the Company. In addition to serving and functioning in terms of supervising the course of the Company's operational activities in general and ensuring that all aspects of the Company's compliance with the prevailing laws and regulations are always fulfilled, Independent Commissioner also has special responsibilities, namely representing the interests of the Company's minority shareholders. The appointment of the Independent Commissioner of the Company is based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. As of the end of 2020, the Company has 2 (three) Independent Commissioners or more than 30% of the total members of the Board of Commissioners.

Composition of Independent Commissioner

Composition of Independent Commissioner of the Company as of December 31, 2020 is as follows:

Criteria for Independent Commissioner

The criteria for determining the Independent Commissioner refers to POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, including:

Pernyataan Independen Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen Perseroan dipastikan adalah pihak independen yang bebas dari benturan kepentingan serta memenuhi kriteria kemampuan dan latar belakangnya sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani surat pernyataan independensinya yang menyatakan bahwa Komisaris Independen:

1. Tidak mempunyai hubungan keluarga baik horizontal, vertikal maupun hubungan semenda (ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan jabatan sehubungan dengan penugasan/jabatan di Perseroan.

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanggal Penandatanganan Pernyataan / Date of Signing
Priyo Suprobo	Komisaris Independen / Independent Commissioner	9 April 2020 / April 9, 2020
Indrieffouny Indra	Komisaris Independen / Independent Commissioner	9 April 2020 / April 9, 2020

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2020

Perseroan memfasilitas Dewan Komisaris dengan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau *workshop* sebagai upaya peningkatan kapabilitas dan pembaruan informasi mengenai perkembangan terkini dari industri dan bisnis Perseroan maupun perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan kompetensi juga ditujukan untuk memberikan persiapan dan antisipasi atas masalah yang mungkin timbul demi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris selama tahun 2020 telah dimuat pada bab 'Profil Perusahaan', bagian 'Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern'.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*, baik melalui pelaksanaan rapat, kunjungan kerja ke lokasi proyek, pemberian saran dan rekomendasi bagi Direksi, hingga penilaian kinerja komite-komite Dewan Komisaris.

Statements of Independence of Independent Commissioner

All Independent Commissioners of the Company are confirmed to be independent parties who are free from conflict of interest and meet the criteria for their abilities and backgrounds as stipulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. All Independent Commissioners of the Company have signed a statement of independence which states that the Independent Commissioners:

1. Do not have a horizontal, vertical or similar relationship (in-laws) with members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Do not have a conflict of interest with the position in connection with the assignment/position in the Company.

Competence Development of the Board of Commissioners in 2020

The Company facilitates the Board of Commissioners with competency development through training, education, seminars, and/or workshops as an effort to increase capabilities and update information regarding the latest developments in the Company's industry and business as well as changes to applicable laws and regulations. Competency development is also aimed at providing preparation and anticipation for problems that may arise for the sustainability and progress of the Company.

Information regarding competency development that the Board of Commissioners participated in throughout 2020 has been published in the 'Company Profile' chapter, 'Education and/or Training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit' section.

Report on Board of Commissioners Duties Implementation

The implementation of the duties of the Board of Commissioners is in accordance with the duties and responsibilities set out in the Articles of Association and the Board Manual, whether through conducting meetings, working visits to project sites, providing suggestions and recommendations to the Board of Directors, to evaluating the performance of the Board of Commissioners' committees.

Berdasarkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan No. 31 tertanggal 12 April 2019, kegiatan yang dilakukan Dewan Komisaris selama tahun 2020 meliputi:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan dan memberi masukan kepada Direksi sehubungan dengan jalannya proses bisnis Perseroan;
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
3. Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
4. Berhak memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban Dewan Komisaris;
5. Berhak menerima keterangan dari Direksi berkenaan dengan Perseroan dalam hal untuk melaksanakan kewajiban Dewan Komisaris;
6. Berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar maupun perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disertai alasan pemberhentiannya;
7. Dewan Komisaris wajib melaksanakan RUPS paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri;
8. Ketentuan RUPS tersebut mengikuti ketentuan mengenai RUPS yang tertuang dalam Anggaran Dasar;
9. Apabila RUPS tidak diadakan dalam waktu 90 hari setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara dianggap batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali pada jabatan semula;
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila disebabkan hal apapun tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama;
11. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini;
12. Dapat melakukan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS;

Based on the duties, responsibilities, authorities and obligations as stipulated in Article 21 of the Company's Articles of Association No. 31 dated April 12, 2019, the activities carried out by the Board of Commissioners throughout 2020 include:

1. Supervising the management policies of the Company and providing input to the Board of Directors in relation to the course of the Company's business processes;
2. Organizing the Annual GMS and other GMS in accordance with the authorities stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association;
3. Approving the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Company Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the Articles of Association;
4. The right to examine records and documents as well as the assets of the Company to carry out the obligations of the Board of Commissioners;
5. The right to receive information from the Board of Directors with respect to the Company in terms of carrying out the obligations of the Board of Commissioners;
6. Has the right to temporarily suspend one or more members of the Board of Directors if the member of the Board of Directors acts contrary to the Articles of Association or the prevailing laws and regulations in the Capital Market along with the reasons for the dismissal;
7. The Board of Commissioners shall hold a GMS no later than 90 days after the date of the temporary dismissal, which will decide whether the member of the Board of Directors is terminated permanently or returned to his/her original position, while the member of the Board of Directors who is temporarily dismissed is given the opportunity to attend to defend himself/herself;
8. Provisions for the GMS follow the provisions concerning the GMS set forth in the Articles of Association;
9. If the GMS is not held within 90 days after the temporary dismissal, then the temporary dismissal is deemed null and void, and the concerned person has the right to return to his/her original position;
10. If all members of the Board of Directors are temporarily suspended or for any reason there are no members of the Board of Directors at all, the Board of Commissioners is temporarily obliged to manage the Company. In such a case, the Board of Commissioners has the right to grant temporary authority to one or more of them on their joint responsibility;
11. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, then all the duties and authorities assigned to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in this Articles of Association;
12. May carry out the management of the Company in certain circumstances for a certain period of time as determined by the Articles of Association or a resolution of the GMS;

13. Wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite tersebut tiap akhir tahun buku;
14. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

13. Shall establish an Audit Committee and may form other committees to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, and shall evaluate the performance of the Committee at the end of each fiscal year;
14. The provisions regarding the accountability of the Board of Directors, mutatis mutandis, apply to the Board of Commissioners.

Kegiatan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

Kegiatan *monitoring* kunjungan kerja ke lapangan dilakukan Dewan Komisaris sebagai bagian dari kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat yang dijalankan Dewan Komisaris. Selama tahun 2020, kegiatan *monitoring* kunjungan lapangan yang dilakukan antara lain:

Working Visits of the Board of Commissioners in 2020

The monitoring activities of work visits to the field are carried out by the Board of Commissioners as part of the monitoring and advisory activities carried out by the Board of Commissioners. Throughout 2020, field visit monitoring activities carried out include:

No.	Kegiatan Kunjungan Kerja / Work Visits	Waktu Pelaksanaan / Date	Tujuan / Objective	Nama Dewan Komisaris yang Melakukan Kunjungan / Commissioners who Visited
1	Pengawasan Dewan Komisaris ke Pabrik Produk Beton / Board of Commissioners Supervision to Concrete Product Plant	28 Januari 2020 / January 28, 2020	Pabrik Produk Beton Boyolali / Boyolali Concrete Product Plant	1. Bambang Pramujo 2. Y.B Priyatmo Hadi 3. Herry Trisaputra Zuna 4. Asfiah Mahdiani 5. Yustinus Prastowo
2	Pengawasan Dewan Komisaris ke Pabrik Produk Beton / Board of Commissioners Supervision to Concrete Product Plant	5-6 Juli 2020 / July 5-6, 2020	Pabrik Produk Beton Majalengkap dan Boyolali / Boyolali and Majalengka Concrete Product Plant	Priyo Suprobo
3	Pengawasan Dewan Komisaris pada Proyek, Wilayah Penjualan dan Pabrik Beton / Board of Commissioners Supervision to Projects, Sales Area, Concrete Plant	23 September 2020 / September 23, 2020	Proyek Jalan Tol A.P. Pettarani Makassar, Wilayah Penjualan VI dan Pabrik Produk Beton Sulawesi Selatan / Makassar A.P. Pettarani Toll Road Project, Sales Area VI, and South Sulawesi Concrete Product Plant	1. Ade Wahyu 2. Heru Wisnu Wibowo 3. Herry Trisaputra Zuna 4. Priyo Suprobo 5. Indrieffouny Indra
4	Pengawasan Dewan Komisaris ke Pabrik Produk Beton / Board of Commissioners Supervision to Concrete Product Plant	19-20 November 2020 / November 19-20, 2020	Pabrik Beton Lampung Selatan dan Pabrik Produk Beton Lampung / South Lampung Concrete Plant and Lampung Concrete Product Plant	1. Ade Wahyu 2. Heru Wisnu Wibowo 3. Indrieffouny Indra

Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menerbitkan surat keputusan Dewan Komisaris antara lain:

Recommendations and Resolutions of Board of Commissioners

Throughout 2020, the Board of Commissioners issued Board of Commissioners Decrees as follows:

No.	Nomor Surat Keputusan / Decree No.	Perihal / Subject
1	SK.01/DK-WB/III/2020	Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan / Appointment of Annual GMS Chairman
2	SK.02/DK-WB/IV/2020	Piagam Komite Audit dan Risiko Usaha / Business Risk and Audit Committee Charter
3	SK.06/DK-WB/IV/2020	Piagam Komite Good Corporate Governance / Good Corporate Governance Committee Charter
4	SK.06A/DK-WB/IV/2020	Piagam Komite Nominasi Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Charter
5	SK.07/DK-WB/V/2020	Pengangkatan Organ Komite Audit dan Risiko Usaha / Appointment of Business Risk and Audit Committee Organ
6	SK.08/DK-WB/V/2020	Pengangkatan Organ Komite Good Corporate Governance / Appointment of Good Corporate Governance Organ
7	SK.09/DK-WB/V/2020	Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi / Appointment of Nomination and Remuneration Committee
8	SK.10/DK-WB/V/2020	Pengalihan Saham Treasuri Melalui Mekanisme MESOP / Treasury Stock Diversion through MESOP Mechanism
9	SK.11/DK-WB/V/2020	Penunjukan Pimpinan RUPSLB / Appointment of EGM Chairman
10	SK.12/DK-WB/VI/2020	Perubahan Pengurus PT WIKA Pracetak Gedung, PT WIKA Krakatau Beton, PT WIKA Komponen Beton / Changes to Management of PT WIKA Pracetak Gedung, PT WIKA Krakatau Beton, PT WIKA Komponen Beton
11	SK.13/DK-WB/VIII/2020	Pemberhentian Baju Wibisono Sebagai Sekretaris Dewan Komisaris WIKA BETON / Dismissal of Baju Wibisono as Secretary of the Board of Commissioners of WIKA BETON
12	SK.14/DK-WB/VIII/2020	Pengangkatan Sumadi Sebagai Sekretaris Dewan Komisaris WIKA BETON / Appointment of Sumadi as Secretary of the Board of Commissioners of WIKA BETON

No.	Nomor Surat Keputusan / Decree No.	Perihal / Subject
13	SK.15/DK-WB/VIII/2020	Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris WIKA BETON / Remuneration of Secretary of the Board of Commissioners of WIKA BETON
14	SK.15A/DK-WB/VIII/2020	Pemberhentian Y.B. Priyatmo Hadi Sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi / Dismissal of Y.B. Priyatmo Hadi as Nomination and Remuneration Committee
15	SK.16/DK-WB/VIII/2020	Pengangkatan Organ Komite Nominasi Dan Remunerasi / Appointment of Nomination and Remuneration Committee Organ
16	SK.17/DK-WB/VIII/2020	Remunerasi bagi Anggota Organ Komite Audit dan Risiko Usaha dan Organ Komite Good Corporate Governance / Remuneration of Members of Risk Business and Audit Committee Organ and Good Corporate Governance Committee Organ

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris Apabila Terlibat dalam Kejahatan Keuangan

Perseroan telah memiliki kebijakan dan komitmen atas tata laksana perusahaan secara konsisten dengan menerapkan GCG secara komprehensif, di antaranya melalui penandatanganan pakta integritas secara berkala setiap awal tahun yang memuat pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan maupun kegiatan-kegiatan yang menimbulkan benturan kepentingan dan merugikan perusahaan.

Pada tahun 2020, pakta integritas Dewan Komisaris secara individual ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2020 setelah yang bersangkutan diangkat menjadi Dewan Komisaris. Ketentuan pengunduran diri Dewan Komisaris diatur juga sesuai mekanisme yang dimuat di dalam *Board Manual* dan Anggaran Dasar Perseroan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

WIKA BETON memberlakukan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris atas kualitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang dijalankan. Sebagai perusahaan anak BUMN, Perseroan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh regulator serta Anggaran Dasar untuk menghasilkan penilaian yang objektif. Adapun metode penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *assessment* penerapan GCG (aspek Dewan Komisaris), serta capaian *Key Performance Indicator* (KPI).

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Mekanisme RUPS

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris tercermin dari keputusan RUPS yang memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap Laporan Keuangan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dijalankan selama tahun buku. Evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan kinerja kolegial berdasarkan kinerja Perseroan yang dituangkan di dalam lembar persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan oleh RUPS. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS menjadi bagian tak terpisahkan dalam penentuan skema remunerasi dan kompensasi Dewan Komisaris

Policy on Resignation of Members of the Board of Commissioners if Involved in Financial Crimes

The Company has a policy and commitment to consistent corporate governance by implementing GCG comprehensively, including through the signing of an integrity pact regularly at the beginning of the year which includes the resignation of a member of the Board of Commissioners if involved in financial crimes or activities that cause conflicts of interest and detrimental to the Company.

In 2020, the integrity pact for the Board of Commissioners was individually signed on March 26, 2020 after the concerned person was appointed as the Board of Commissioners. Provisions for the resignation of the Board of Commissioners are also regulated according to the mechanism contained in the Board Manual and the Company's Articles of Association.

Assessment on the Board of Commissioners Performance

WIKA BETON implements a performance appraisal policy for the Board of Commissioners on the quality of its supervisory and advisory functions. As a subsidiary of SOE, the Company refers to the laws and regulations issued by the regulator as well as the Articles of Association to produce an objective assessment. The method for evaluating the performance of the Board of Commissioners is carried out through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (GMS), assessment of the implementation of GCG (aspects of the Board of Commissioners), as well as the Key Performance Indicators (KPI).

Board of Commissioners Performance Assessment through GMS Mechanism

The assessment of the Board of Commissioners performance is reflected in the GMS resolutions which approve and validate the Financial Statements, including the Board of Commissioners' reports regarding the supervisory and advisory duties carried out during the fiscal year. The evaluation and assessment of Board of Commissioners performance is carried out as a whole based on collegial performance considerations based on the Company's performance as outlined in the approval and validation of the Company's Annual Report by the GMS. The results of the assessment of the Board of Commissioners performance by the GMS are an integral part in determining the remuneration and

ataupun penentuan penunjukan kembali yang bersangkutan berdasarkan persetujuan RUPS.

compensation scheme for the Board of Commissioners or in determining the re-appointment of the concerned person based on the approval of the GMS.

<p>Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS / Board of Commissioners Performance Assessment Procedure by the GMS</p>	<p>Pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun buku dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan untuk kemudian memperoleh pernyataan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) bagi Dewan Komisaris atas tugas pengawasan sampai dengan berakhirnya tahun buku. / The implementation of supervisory duties carried out by the Board of Commissioners during the fiscal year is reported to the Shareholders through the Annual General Meeting of Shareholders to obtain a statement of full release (<i>acquit et de charge</i>) for the Board of Commissioners for their supervisory duties until the end of the fiscal year.</p>
<p>Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS / Criteria for the Assessment of the Board of Commissioners Performance by the GMS</p>	<p>RUPS menilai dan mengevaluasi kinerja pengawasan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan sebagai cerminan atas efektivitas pengawasan Dewan Komisaris secara kolegal. / The GMS assesses and evaluates the supervisory performance of the Board of Commissioners by considering the Company's performance as a reflection of the effectiveness of collegiate supervision of the Board of Commissioners.</p>
<p>Pihak yang Melakukan Assessment / Assessor</p>	<p>Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS dilakukan oleh Pemegang Saham. / The performance evaluation of the Board of Commissioners at the GMS is carried out by the Shareholders.</p>
<p>Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS / Results of the Board of Commissioners Performance Assessment by the GMS</p>	<p>RUPS telah menilai kinerja pengawasan Dewan Komisaris secara kolegal dan menyatakan telah memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang dilakukan hingga akhir tahun buku. / The GMS has assessed the supervisory performance of the Board of Commissioners collegially and stated that it has granted full release (<i>acquit et de charge</i>) to the Board of Commissioners for supervision carried out until the end of the fiscal year.</p>

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Assessment GCG

Komitmen terhadap penerapan prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") telah menjadi bagian yang diatur dalam penilaian kepemimpinan pengelolaan perusahaan dan ditargetkan pada RJPP dan RKAP Perseroan serta disetujui dalam RUPS. Hal ini ditujukan untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap GCG yang diimplementasikan oleh jajaran *top management*. Perseroan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Di sisi lain, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka juga mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Assessment on Board of Commissioners Performance based on GCG Assessment

Commitment to the implementation of the principles and practices of Good Corporate Governance ("GCG") has become a part of what is regulated in the assessment of corporate management leadership and is targeted at the Company's RJPP and RKAP and approved in the GMS. This is aimed at ensuring the Company's compliance with GCG which is implemented by the top management ranks. The Company uses the criteria stipulated in SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. On the other hand, the Company as a Public Company also refers to the Financial Services Authority Circular Letter No: 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies.

<p>Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Assessment GCG / Board of Commissioners Performance Assessment Procedure Based on GCG Assessment</p>	<p>Penilaian implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan oleh penilai eksternal dengan periode penilaian penerapan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. / The assessment of the implementation of Good Corporate Governance is carried out by an external assessor with the implementation assessment period from January 1 to December 31, 2020.</p>
<p>Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Assessment GCG / Performance Assessment Criteria for the Board of Commissioners based on the GCG Assessment</p>	<p>Penilaian GCG mengacu pada kriteria yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN yang terdiri dari 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG, 43 (empat puluh tiga) Indikator, dan 153 (seratus lima puluh tiga) Parameter, serta Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) Faktor Uji Kesesuaian (FUK). / The GCG assessment refers to the criteria set out in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of GCG in SOE, consisting of 6 (six) GCG Implementation Factors/Aspects, 43 (forty three) Indicators, and 153 (one hundred and fifty three) Parameters, as well as 568 (five hundred and sixty eight) Conformity Test Factors (FUK).</p>
<p>Pihak yang Melakukan Assessment / Assessor</p>	<p>Perseroan menunjuk pihak penilai eksternal untuk mengukur penerapan GCG sesuai kriteria yang digunakan. / The Company appoints an external assessor to measure the implementation of GCG according to the criteria used.</p>
<p>Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Assessment GCG / Results of the Board of Commissioners Performance Assessment Based on the GCG Assessment</p>	<p>Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan <i>assessment</i> GCG terlampir pada tabel di bawah ini. / The results of the Board of Commissioners' performance assessment based on the GCG assessment are attached in the table below.</p>

No.	Indikator / Indicators	Bobot Indikator / Indicator Value	Tingkat Capaian % / % Achievement Level
Pemenuhan Penilaian Dewan Komisaris / Fulfillment of Board of Commissioners Assessment			
1	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara keberlanjutan. / The Board of Commissioners/Supervisory Board carries out training/ learning programs on an ongoing basis.	1.348	100
2	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. / The Board of Commissioners/Supervisory Board distributes the duties, authorities and responsibilities clearly and determines the factors needed to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board.	2.127	100
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. / The Board of Commissioners/Supervisory Board approves the RJPP and RKAP drafts submitted by the Board of Directors.	2.904	97
4	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. / The Board of Commissioners/Supervisory Board provides direction to the Board of Directors on the implementation of company plans and policies.	9.593	97
5	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi dan kebijakan perusahaan. / The Board of Commissioners/Supervisory Board supervises the Board of Directors on the implementation and company policies.	6.479	97
6	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. / The Board of Commissioners/Supervisory Board supervises the implementation of policies on the management of subsidiaries/joint ventures.	1.504	100
7	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolejal) dan mengusulkan tantiem sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. / The Board of Commissioners/Supervisory Board plays a role in nominating members of the Board of Directors, evaluating the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and proposing bonuses in accordance with applicable regulations and taking into account the performance of the Board of Directors.	2.437	80
8	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. / The Board of Commissioners/Supervisory Board takes action against potential conflicts of interest that concern themselves.	0.571	100
9	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. / The Board of Commissioners/Supervisory Board monitors and ensures that Good Corporate Governance practices are implemented in an effective and sustainable manner.	1.659	54
10	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. / The Board of Commissioners/Supervisory Board convenes the Board of Commissioners/Supervisory Board meetings in accordance with the provisions and laws.	1.348	84
11	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. / The Board of Commissioners/Supervisory Board has a Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board to support the Secretarial duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board.	2.593	70
12	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif. / The Board of Commissioners/Supervisory Board has an effective Board of Commissioners/Supervisory Board.	2.437	77

Penilaian Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris secara kolektif maupun secara individu dengan menggunakan metode evaluasi yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja anggota Komite tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan atas perpanjangan masa kerja anggota Komite Dewan Komisaris.

Setiap komite penunjang Dewan Komisaris memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) tersendiri sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan target pencapaiannya masing-masing. Pada tahun 2020, telah dilakukan penilaian kinerja atas komite penunjang Dewan Komisaris dengan capaian kerja Komite Audit dan Risiko Usaha sebesar 100%, Komite GCG sebesar 100%, serta Komite Nominasi dan Remunerasi sebesar 100%, adapun rincian penjelasan dari penilaian kinerja masing-masing komite penunjang Dewan Komisaris tercantum dalam Laporan Tahunan ini pada bagian Komite Penunjang Dewan Komisaris.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Perseroan telah menunjuk seorang Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Sekretaris Dewan Komisaris juga berperan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kepatuhan Dewan Komisaris terhadap prinsip-prinsip GCG telah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *best practices* yang berlaku umum.

Assessment on Board of Commissioners Supporting Committee Performance

The Board of Commissioners assesses the performance of committees under the Board of Commissioners collectively or individually using the evaluation method stipulated in the Board of Commissioners decree. Furthermore, the results of the performance evaluation of the Committee members are used as consideration for the extension of the working period of the members of the Committee of the Board of Commissioners.

Each supporting committee of the Board of Commissioners has its own Key Performance Indicator (KPI) according to its respective duties, responsibilities and achievement targets. In 2020, a performance assessment of the supporting committees of the Board of Commissioners has been carried out with the work performance of the Audit and Business Risk Committee of 100%, the GCG Committee of 100%, and the Nomination and Remuneration Committee of 100%. As for the detailed explanation of the performance assessment of each of the supporting committees of the Board of Commissioners are included in this Annual Report in the Board of Commissioners Supporting Committee section.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To support the functions and effectiveness of the role of the Board of Commissioners, the Company has appointed a Secretary to the Board of Commissioners. The Secretary of the Board of Commissioners is in charge of carrying out administrative and secretarial activities within the scope of the supervisory duties of the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners. In carrying out daily duties, the Secretary of the Board of Commissioners also plays a role in ensuring that all aspects of the Board of Commissioners' compliance with GCG principles are carried out properly in accordance with laws and regulations and generally accepted best practices.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2020 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.13/DK-WB/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Baju Wibisono dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. AK.14/DK-WB/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Sumadi sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. Profil lengkap Sekretaris Dewan Komisaris dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

Profile of Secretary of the Board of Commissioners

Secretary of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2020 has changed from the previous year. Referring to the Decree of the Board of Commissioners No. SK.13/DK-WB/VIII/2020 dated August 5, 2020 concerning the Termination of Baju Wibisono and the Decree of the Board of Commissioners No. AK.14/DK-WB/VIII/2020 dated August 5, 2020 concerning the Appointment of Sumadi as Secretary of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk. The complete profile of the Secretary of the Board of Commissioners can be seen below:



Sumadi

Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan	: Indonesia	Nationality	: Indonesian
Tempat & Tanggal Lahir	: Palembang, 18 Agustus 1972	Place & Date of Birth	: Bandung, August 18, 1972
Usia	: Berusia 48 tahun per 31 Desember 2020	Age	: 48 years old as of December 31, 2020
Domisili	: Bogor	Domicile	: Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 5 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.14/DK-WB/VIII/2020.		
Masa Jabatan	Sampai dengan pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris yang baru.		
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana (S1) Manajemen dari Universitas Diponegoro.		
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • GM Akuntansi & Pajak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020 – sekarang) • Manajer Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017 – 2020) • Manajer Keuangan PT Wika Industri & Konstruksi (2015 – 2017) 		
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	Belum ada		
Jabatan Rangkap	General Manajer Akuntansi dan Perpajakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020 – sekarang).		
Hubungan Afiliasi	Tidak Ada		
		Legal Basis of Appointment	Appointed as Secretary of the Board of Commissioners since August 5, 2020 based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK.14/DK-WB/VIII/2020.
		Term of Office	Until the appointment of the new Secretary of the Board of Commissioners.
		Educational Background	Bachelor's Degree in Management from Universitas Diponegoro.
		Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • GM of Accounting & Tax of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2020-present) • Finance Manager of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2017-2020) • Finance Manager of PT Wika Industri & Konstruksi (2015-2017)
		Training and Competence Development	None
		Concurrent Position	General Manager of Accounting and Taxation of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2020-present).
		Affiliations	None

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris senantiasa menggunakan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, di antaranya:

1. Mengkoordinasikan kepengurusan dalam hal komunikasi serta penyelenggaraan kegiatan yang bersifat administratif dan kesekretariatan di lingkup Dewan Komisaris agar senantiasa sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip GCG.
2. Menyiapkan keputusan terhadap usulan pembuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.
3. Menyiapkan materi awal mengenai nasihat yang akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
4. Menyiapkan pendapat dan saran (tanggapan) Dewan Komisaris yang akan disampaikan di dalam RUPS mengenai RJPP dan Laporan Tahunan.
5. Menyiapkan rincian tugas Dewan Komisaris saat menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan ke dalam RKAP.
6. Menyiapkan usulan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai penunjukan Akuntan Publik oleh Perseroan.
7. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyampaikan materi aslinya kepada Perseroan serta menyimpan salinannya.
8. Menyiapkan materi laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku kepada RUPS.
9. Menyiapkan panggilan rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, lalu disampaikan kepada Anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dan/atau dalam periode waktu yang lebih singkat apabila berada dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggap rapat.
10. Membuat risalah rapat yang mencerminkan akuntabilitas setiap peserta rapat, serta penjelasan mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

Laporan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2020

Sekretaris Dewan Komisaris selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dalam hal penyelenggaraan kegiatan di lingkup Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris senantiasa menyusun materi awal terlebih dahulu terkait pemberian nasihat atau rekomendasi yang akan disampaikan oleh Dewan Komisaris. Di dalam penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris ataupun

Duties and Responsibilities of Secretary of the Board of Commissioners

Secretary of the Board of Commissioners refers to the Board Manual in conducting daily duties and responsibilities which, among others are as follow:

1. Coordinating the communication between the board, administrative and secretariat activities over the scope of the Board of Commissioners to always meet the provisions of laws and principles of GCG.
2. Preparing decisions about proposed legal actions by the Board of Directors that requires written approval from the Board of Commissioners.
3. Preparing initial materials concerning advices that Board of Commissioners will give to Board of Directors.
4. Preparing opinions and suggestions (responses) from Board of Commissioners to be presented to the General Meeting of Shareholders concerning the Company's long-term plans (RJPP) and Annual Report.
5. Preparing tasks of the Board of Commissioners in preparing annual work programs to be included in the Company's workplans and budget (RKAP).
6. Preparing Board of Commissioners' proposal to GMS concerning Public accountant that will be hired by the Company.
7. Preparing minutes of Board of Commissioners' meeting and presenting its original copy to the Company and keeping its copy.
8. Preparing report materials concerning supervision carried out by Board of Commissioners during fiscal year to be represented to GMS.
9. Preparing invitation for Board of Commissioners' meeting in writing to be signed by President Commissioner or a member of the Board of Commissioners appointed by President Commissioner and to be presented to Members of the Board of Commissioners within 3 (three) days before the meeting or earlier in case of emergency, excluding date of invitation and date of meeting.
10. Preparing minutes of meeting, which contains meeting progress on every participant's accountability, and evaluating the implementation of decisions made in previous meetings.
11. Performing other obligations assigned by the Board of Commissioners.

Report of Duties of Board of Commissioners Secretary in 2020

Secretary of Board of Commissioners always coordinates and communicates for all activities under the Board of Commissioners scopes of work. Secretary of the Board of Commissioners always arrange the initial material in advance related to giving advice or recommendations to be submitted by the Board of Commissioners. In organizing internal meetings of the Board of

rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris juga bertugas untuk menyiapkan:

1. Panggilan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan/atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama (Undangan).
2. Agenda Rapat yang di dalamnya memuat pendapat atau saran yang akan disampaikan oleh Dewan Komisaris.
3. Membuat risalah rapat yang mencerminkan akuntabilitas setiap peserta rapat.
4. Menyiapkan penjelasan mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.

Sementara itu, terkait kegiatan RUPS, beberapa hal yang telah dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris antara lain:

1. Menyiapkan pendapat dan saran (tanggapan) Dewan Komisaris yang akan disampaikan di dalam RUPS mengenai RJPP dan Laporan Tahunan.
2. Menyiapkan usulan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai penunjukan Akuntan Publik oleh Perseroan.
3. Menyiapkan materi laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku kepada RUPS.

Lalu dalam hal kegiatan pengawasan dan kunjungan ke Lapangan, Sekretaris Dewan Komisaris membuat laporan kunjungan serta mempersiapkan materi, nasihat yang akan disampaikan Dewan Komisaris saat kunjungan.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Struktur dan komponen remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Honorarium
2. Tunjangan
3. Jasa Produksi

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris tidak mengikuti pelatihan, seminar, dan/atau workshop selama tahun 2020.

Commissioners or joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, secretary the Board of Commissioners is also assigned with preparing:

1. Written announcement to be signed by President Commissioner and/or other member of commissioners appointed by the President Commissioner (Invitation).
2. Meeting agenda, which includes opinions and recommendations for the Board of Commissioners.
3. Preparing minutes of meeting that reflects the meeting's participants accountabilities.
4. Explanations about evaluations on the follow-ups from previous decisions.

Moreover, regarding GMS activities, the Board of Commissioners Secretary has prepared several items:

1. Preparing advises and feedbacks of the Board of Commissioners to be delivered on GMS on RJPP and Annual Report.
2. Preparing the Board of Commissioners recommendations on GMS regarding the appointment of Public Accountant by the Company.
3. Preparing report material of the Board of Commissioners' monitoring duties during the whole Fiscal Year to GMS.

In terms of monitoring activities and site visit, the Secretary of Board of Commissioners prepares report and prepare materials and advisories to be delivered by the Board of Commissioners during the visit.

Remuneration for Secretary of the Board of Commissioners

Remuneration for the Secretary of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners with due observance of the Company's capabilities. The structure and components of the remuneration for the Secretary of the Board of Commissioners consists of:

1. Honorarium
2. Allowances
3. Production Services

Competency Development for the Secretary of the Board of Commissioners

Secretary of the Board of Commissioners did not participate in any training, seminar, and workshop throughout 2020.

DIREKSI

Organ Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas jalannya kepengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan pengelolaan bisnis dan operasional sehari-hari, Direksi Perseroan senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 33 tanggal 23 Juli 2020.
4. Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.012/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Tugas dan Wewenang Anggota-Anggota Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Pada pelaksanaannya, masing-masing anggota Direksi Perseroan menjalankan tugas sesuai dengan pembagian bidangnya masing-masing, namun demikian, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama.

Kriteria dan Prosedur Pemilihan Direksi

Kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota Direksi meliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal yang bersifat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan material yang merupakan persyaratan kualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis PT Wijaya Karya Beton Tbk:

1. Persyaratan Formal

- a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- d. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- e. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of the Company are fully authorized and responsible for the management of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company and represent the Company, both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. In carrying out business management and daily operations, the Board of Directors of the Company always refers to the prevailing laws and regulations, namely:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. The Company's Articles of Association as stated in the Deed No. 33 dated July 23, 2020.
4. Decree of the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.012/2020 dated August 12, 2020 concerning the Duties and Authorities of the Members of the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk.

In practice, each member of the Board of Directors of the Company carries out their duties according to their respective division of fields, however, the implementation of duties by each member of the Board of Directors remains a joint responsibility.

Criteria and Procedures for Board of Directors Appointment

The criteria that must be met by members of the Board of Directors include formal requirements and material requirements. General formal requirements in accordance with applicable laws and regulations and material requirements which are quality requirements that are tailored to the needs and business characteristics of PT Wijaya Karya Beton Tbk.

1. Formal Requirements

- a. Capable in carrying out legal action;
- b. Never been declared bankrupt or became a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt within 5 (five) years prior to nomination;
- c. Never been convicted of committing a criminal offense that caused losses to government, SOE, Subsidiaries, the Company, and/or related to the financial sector;
- d. Should not have any affiliation up to the third level, either in a straight line or side line or a relationship of marriage (in-laws) with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
- e. Should not have any concurrent positions, both as a member of the Board of Directors in SOE, Regional Owned Enterprise, and Private Owned Business Entities or other positions which may cause conflicts of interest;

- f. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
- g. Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Persyaratan Material

- a. Mempunyai akhlak yang baik
 - Tidak pernah melakukan perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja.
 - Tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan/atau Pemegang Saham.
 - Tidak pernah melakukan perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja.
 - Tidak pernah melakukan perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja.
 - Tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
- b. Kompetensi teknis/keahlian
 - Pengetahuan yang memadai di bidang usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk.
 - Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk/BUMN/Perusahaan.
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PT Wijaya Karya Beton Tbk.
 - Pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
 - Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
- c. Psikologis bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- d. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

- f. Should not have any concurrent positions, both as structural and functional officials in central government agencies/institutions or regions;
- g. Should not have any concurrent positions which may cause a conflict of interest directly or indirectly with the Company and/or contrary to the provisions of the prevailing laws and regulations.

2. Material Requirements

- a. Have good morals
 - Have never committed any manipulated acts and deviant practices in the management of the SOE/Company/Institution where they work.
 - Never committed an act of default which could be categorized as not fulfilling the commitments agreed upon with the SOE/Company/Institution where the concerned person works and/or the Shareholders.
 - Have never committed an act categorized as giving personal benefits to a candidate for the Board of Directors, employee of the SOE/Company/Institution where the person concerned works.
 - Have never committed an act categorized as giving personal benefits to a candidate for the Board of Directors, employee of the SOE/Company/Institution where the person concerned works.
 - Never committed an act that could be categorized as a violation of the provisions relating to the principles of managing a sound company.
- b. Technical competence/expertise
 - Sufficient knowledge in the field of business of PT Wijaya Karya Beton Tbk.
 - Experience and expertise in the management of PT Wijaya Karya Beton Tbk/SOE/Company.
 - Ability to carry out strategic management in the context of developing PT Wijaya Karya Beton Tbk.
 - Understanding the Company's management issues related to a management function.
 - Dedicate and devote the utmost time to do their job.
- c. Psychologically, the person concerned has an adequate level of intelligence and emotional level to carry out his duties as a member of the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- d. Have a strong will and dedication to advance and develop the Company.

Prosedur Pengangkatan, Pemilihan Ulang, dan Pemberhentian Direksi

Dalam menjalankan prosedur pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi, Perseroan sebagai perusahaan anak BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senantiasa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, penetapan individu yang diangkat sebagai anggota Direksi adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan kriteria sesuai perundang-undangan yang berlaku, baik persyaratan formal maupun material.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan kelima setelah tanggal pengangkatan mereka. Ketentuan tersebut tidak mengurangi wewenang RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali jika disebutkan lain. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Susunan, Komposisi, dan Periode Jabatan Direksi

Direksi dipilih berdasarkan pertimbangan aspek keahlian, kecakapan, dan integritas dari masing-masing calon anggota Direksi agar visi, misi, dan tujuan Perseroan senantiasa dapat terealisasi. Seluruh anggota Direksi diangkat oleh RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masa periode terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai Direksi sampai penutupan RUPS tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan RUPS untuk dapat memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut. Namun demikian, anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 4 Agustus 2020, jumlah dan komposisi Direksi Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Tenure
Hadian Pramudita	Direktur Utama / President Director	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 24 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed of GMS Resolutions No. 24 dated March 20, 2017 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.	13 Maret 2017 – RUPS Tahun 2022 / March 13, 2017 – 2022 GMS

Procedures for Appointment, Reappointment, and Dismissal of the Board of Directors

In carrying out the procedures for the selection, appointment and dismissal of the Board of Directors, the Company as a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk always refers to the Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the Articles of Association of the Company.

As stipulated in the regulation, an individual who is appointed as a member of the Board of Directors is an individual who has met the criteria requirements in accordance with the applicable laws, both formal and material requirements.

Members of the Board of Directors are appointed by the GMS in accordance with the applicable provisions, each for a period starting from the date determined at the GMS that appointed them until the close of the fifth annual GMS after the date of their appointment. This provision does not reduce the authority of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time for certain reasons as stipulated in the applicable regulations. Such termination is effective from the closing of the meeting which decided the termination, unless otherwise stated. A member of the Board of Directors whose term of office has ended may be reappointed by the GMS for one term of office.

Structure, Composition, and Period of Board of Directors

The Board of Directors is selected taking into account the aspects of expertise, skills and integrity of each candidate for the Board of Directors so that the vision, mission and objectives of the Company can always be realized. All members of the Board of Directors are appointed by the GMS in accordance with the applicable provisions for the period from the date of their appointment as Directors until the closing of the 5th annual GMS after the date of their appointment, without prejudice to the rights and authority of the GMS to be able to dismiss them at any time by stating the reasons after the relevant member of the Board of Directors is given the opportunity to defend himself/herself in the GMS. However, a member of the Board of Directors whose term of office has ended may be reappointed by the GMS for 1 (one) term of office.

Based on the resolutions of the GMS dated August 4, 2020, the number and composition of the Board of Directors of the Company as of December 31, 2020 are as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Tenure
Imam Sudiyono	Direktur Keuangan, <i>Human Capital & Manajemen Risiko</i> / Director of Finance, Human Capital & Risk Management	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 21 tanggal 9 April 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed of GMS Resolutions No. 21 dated April 9, 2019 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.	27 Maret 2019 – RUPS Tahun 2024 / March 27, 2019 – 2024 GMS
Kuntjara	Direktur Pemasaran & Pengembangan / Director of Marketing & Development	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 24 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed of GMS Resolutions No. 24 dated March 20, 2017 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.	13 Maret 2017 – RUPS Tahun 2022 / March 13, 2017 – 2022 GMS
I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur Operasi & Supply Chain Management / Director of Operation & Supply Chain Management	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 21 tanggal 9 April 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed of GMS Resolutions No. 21 dated April 9, 2019 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.	27 Maret 2019 – RUPS Tahun 2024 / March 27, 2019 – 2024 GMS
Sidiq Purnomo	Direktur Teknik & Produksi / Director of Engineering & Production	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 03 tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Deed of GMS Resolutions No. 03 dated August 3, 2016 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.	20 Juli 2016 – RUPS Tahun 2021 / July 20, 2016 – 2021 GMS

Pergantian Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2020

Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Mursyid	Direktur <i>Human Capital</i> dan Produksi / Director of Human Capital and Production	Akta Perubahan Pengurus No. 13 tanggal 12 Agustus 2020 / Deed of Management Change No. 13, dated August 12, 2020

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya. Namun demikian tidak mengurangi wewenang RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut jika dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai Direksi atau akibat alasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk menduduki 1 (satu) kali masa jabatan apabila masa jabatan pertama telah berakhir.

Etika Kerja Dewan Komisaris

Perseroan telah melakukan pemutakhiran *Board Manual* sebagaimana Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 Tentang *Board Manual* PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 18 Oktober 2019. Berdasarkan *Board Manual* tersebut, serta dengan memperhatikan pentingnya tujuan penerapan GCG, maka seluruh jajaran manajemen Perseroan berkomitmen kuat untuk selalu menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari. Komitmen tersebut diwujudkan Perseroan dengan senantiasa menyempurnakan Pedoman *Corporate Governance* (Code of

Changes in Structure and Composition of Board of Directors in 2020

The decision of the Extraordinary GMS of 2020 dated 4 August 2020 approved the honorably dismissal of the following names as members of the Company's Board of Directors:

Term of Office of the Board of Directors

The term of office for members of the Board of Directors is 5 (five) years, with a period starting from the date determined by the GMS that appointed him/her and ending at the close of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of his/her appointment. However, it does not reduce the authority of the GMS to dismiss a member of the Board of Directors if he/she is deemed not meeting the criteria as a Board of Directors or due to other reasons stipulated in the prevailing laws and regulations.

Members of the Board of Directors may be reappointed by the GMS to occupy 1 (one) term of office if the first term of office has ended.

Code of Conduct of the Board of Commissioners

The Company has updated the *Board Manual* as referred to in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 regarding the *Board Manual* of PT Wijaya Karya Beton Tbk dated October 18, 2019. Based on this *Board Manual*, and with due attention to the importance of GCG implementation objectives, all levels of the Company's management are strongly committed to always implementing GCG practices in daily company management. This commitment is manifested by the Company by continuously improving the Code of Corporate Governance which is used as a

Corporate Governance) yang digunakan sebagai acuan/pedoman oleh seluruh organ Perseroan (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) dalam menerapkan praktik-praktik GCG di lingkungan Perseroan.

Pedoman Kerja Direksi

Perseroan telah memiliki Pedoman Kerja (*Board Manual*) Direksi yang berfungsi sebagai acuan bagi Direksi dalam mengelola jalannya Perseroan. Pembentukan Pedoman Kerja Direksi mengacu pada Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 tentang *Board Manual* PT Wijaya Karya Beton Tbk. yang isinya memuat hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, keterbukaan, pembentukan komite dan tata tertib rapat Direksi serta Organ Pendukung Direksi, dan SK Direksi No. SK.01.01/WB-0A.012/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Tugas dan Wewenang Anggota-Anggota Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. Pedoman tersebut senantiasa dievaluasi secara berkala agar senantiasa selaras terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi dalam menjalankan operasi Perusahaan selalu berpegang pada tugas dan tanggung jawab Perusahaan yang telah tertera pada Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 33 tanggal 23 Juli 2020 yang berisi antara lain:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam Anggaran Dasar, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sejalan dengan hal-hal dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar serta keputusan RUPS.
2. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite.
 - Dalam hal dibentuk komite, Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

reference/guideline by all organs of the Company (Shareholders/ GMS, Board of Commissioners and Board of Directors) in implementing GCG practices within the Company.

Board Manual of the Board of Directors

The Company has a Board Manual for the Board of Directors which serves as a reference for the Board of Directors in managing the course of the Company. The establishment of the Board Manual for the Board of Directors refers to the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 concerning Board Manual of PT Wijaya Karya Beton Tbk. which contains matters relating to the organization, duties and responsibilities, authority, work ethics, transparency, the establishment of committees and the rules for meetings of the Board of Directors and Supporting Organs of the Board of Directors, and the Decree of the Board of Directors No. SK.01.01/WB-0A.012/2020 dated August 12, 2020 concerning the Duties and Authorities of the Members of the Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk. These guidelines are regularly evaluated so that they are always in line with changes in laws and regulations and in accordance with the needs of the Company.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In carrying out the Company's operations, the Board of Directors always adheres to the duties and responsibilities of the Company as stated in the Company's Articles of Association No. 33 dated July 23, 2020 which contains, among others:

1. The Board of Directors has the duties and to be responsible to manage the Company for the interest of the Company that always in accordance with the Company's aims and objectives in the Articles of Association, and represents for the Company, both inside and outside the court according to the restrictions regulated by the laws and regulations, the Articles of Association and the Decision of GMS.
2. Main Duties of Directors are:
 - a. Leading, managing and controlling the Company based on the Company's objectives and always increasing the Company's efficiency and effectiveness.
 - b. Maintaining and taking care of the Company wealth.
3. Each member of Director should conduct his duties and responsibilities in good manner, full of responsibility and carefully steps by obeying the applicable laws and regulations.
4. In order to support the implementation effectiveness of their duties and responsibilities, the Directors can form the committees.
 - If they established a committee, the Directors must evaluate the performance of its related committee at the end of fiscal year.
5. Each member of the Board of Directors takes full personal responsibility if the concerned person is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company.

6. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.
 7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 8. Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban penuh secara pribadi atau sebagaimana dimaksud ayat (5) atas kerugian Perseroan apabila:
 - a. Dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 9. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
 10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 - a. Melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan;
 - b. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;
 - c. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;
 - e. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali untuk proyek yang tidak bersifat investasi;
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;
6. The Actions taken by a member of Directors outside the Board of Directors' meeting are being a personal responsibility of the concerned person until those actions are approved in the Board of Directors' meeting.
 7. Each member of the Directors has a shared responsible for the loss of the Company caused by mistake and negligent of the members of the Directors in managing their duties.
 8. The members of the Directors could not be held personally liable for their full responsibility or as stated in paragraph (5) about the loss of the Company, if the cases happen as follows:
 - a. Could prove the loss causes, which are not because of his mistake and negligent;
 - b. Has conducted all of management with good and careful manner according to the interest, aims and objectives of the Company;
 - c. Does not have any direct or indirect conflict of interest on their management action that causes some losses;
 - d. Has taken actions to prevent or avoid more losses.
 9. Each member of the Directors is prohibited to taking personal benefits, both directly or indirectly of the Company's activities other than their legal income.
 10. These following actions of the Directors must require the written approval from the Board of Commissioners, as follows:
 - a. Making equity capital with a valuation more than 12% (twelve percent) up to 50% (fifty percent) from total equity of the company, in other companies, subsidiaries and joint ventures;
 - b. Establishing subsidiary and/or joint venture with a valuation more than 50% (fifty percent) from total equity of the Company, in other companies, subsidiaries and joint venture;
 - c. Releasing equity capital with a valuation more than 12% (twelve percent) up to 50% (fifty percent) from total equity of the Company, in other companies, subsidiaries, and joint venture;
 - d. Incorporation, consolidation, acquisition, separation and dissolution of subsidiary and joint venture with a value more than 12% (twelve percent) up to 50% (fifty percent) from total equity of the Company;
 - e. Cooperating with business entity or other parties under some contracts with a value more than 12% (twelve percent) up to 50% (fifty percent) from total equity of the Company, except non-investment project;
 - f. Binding on the Company as a guarantor (*borg* or *avalist*) with a value more than 12% (twelve percent) up to 50% (fifty percent) from total equity of the Company;



- g. Menerima pinjaman jangka panjang menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;
 - h. Memberikan pinjaman jangka pendek/tenengah/panjang yang tidak bersifat operasional;
 - i. Mengadakan *landbank* sebagai persediaan (barang dagangan) atau sebagai aktiva tetap;
 - j. Mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;
 - k. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;
 - l. Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
 - m. Melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
 - n. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.
11. Pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau kerjasama yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender proyek non-investasi dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud butir 10 huruf b dan e.
 12. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 10, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.
 13. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS untuk:
 - a. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas;
 - b. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukkan.
 14. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan:
 - Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku;
 15. Ketentuan lebih lanjut pada butir 14 adalah sebagai berikut:
 - a. Transaksi sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a adalah transaksi mengalihkan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku;
- g. Receiving medium/long-term loans and providing medium/long-term loans with a value more than 12% (twelve percent) up to 50% (fifty percent) from total equity of the Company;
 - h. Providing short/medium/long terms loans which are not non-operational;
 - i. Establishing *landbank* as inventory (merchandise) / or as fixed assets;
 - j. Pledging, exchanging, and releasing the Company's fixed assets with a value more than 12% (twelve percent) up to 50% (fifty percent) from the Company's total equity;
 - k. Writing off bad book receivables and inventory of dead goods;
 - l. Determining and changing the Company logo;
 - m. Conducting the actions that are not mentioned in the Company's budget plan;
 - n. Performing actions that are included in material transactions as determined by the legislation in the capital market with a value more than 12% (twelve percent) up to 50% (fifty percent) from the Company's total equity.
11. The establishment of subsidiaries/joint ventures and/or cooperation contracts carried out in order to participate in non-investment project's tenders and/or to carry out projects obtained as long as necessary, which does not require the approval of the Board of Commissioners as referred in paragraph 10 letters b and e.
 12. If around 45 (forty-five) calendars since receipt of the application or explanation and documents from the Board of Directors, then, the Board of Commissioners does not give a decision or any responses as referred in paragraph 10 article 18, the Board of Commissioners is considered to approve the Board of Directors' proposal.
 13. The following actions below could be only conducted by the Directors after had an agreement from the GMS, namely:
 - a. Performing actions that are included in material transactions as determined by the legislation in the capital market with a value more than 50% (fifty percent) from equity;
 - b. No more collecting bad debts that have been written off.
 14. The Directors must ask an agreement of the GMS for:
 - a. Transferring on the Company's assets; or
 - b. Guaranteeing the Company's wealth debt:
 - Which are more than 50% (fifty percent) from the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether related to one (1) fiscal year;
 15. Further provision on number 14 is as follows:
 - a. The transaction as referred to paragraph 4 letter a, is a transaction that transfers the net assets of the Company within a period of 1 (one) fiscal year;

- b. Sedangkan transaksi sebagaimana dimaksud pada butir 14 huruf b adalah transaksi penjaminan kekayaan Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih.
16. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 14 pasal 18 tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
17. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan sebagai jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 14 pasal 18 harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut.
18. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian aset yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.
19. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
20. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar, dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.
22. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
23. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
- b. Whereas the transaction as referred to paragraph 14 letter b, is guaranteeing of the Company's assets for a period of 1 (one) fiscal year or more.
16. Legal actions as referred to paragraph 14 article 18 without the approval of the GMS, which remains binding on the Company as long as the other parties in the said legal actions have good intentions.
17. Legal actions to transfer/release rights or make a debt security for the Company's assets as referred in paragraph 14 article 18 must be approved by a GMS attended or represented by Shareholders who own at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of all shares with valid votes or approved by at least $\frac{2}{3}$ (three-thirds) from the total number of votes. At one point, the attendance of quorum is not reached, a second GMS may be held with the attendance rate at least $\frac{2}{3}$ (two-thirds) from the total number of votes.
18. Legal actions to transfer/release rights or make guarantees of debt in whole or half of assets, which are merchandise's goods or supplies, including originated from the bad debts payment that occurs because of the implementation of main business activities, which do not require the approval of the Board of Commissioners or GMS.
19. To carry out those legal actions in the form of a transaction that contains a conflict of interest between the personal economic interests of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or Shareholders with the economic interests of the Company, the Board of Directors needs the approval of the General Meeting of Shareholders based on the majority of votes from Shareholders who do not have a conflict of interest.
20. The GMS can reduce restrictions on the Directors stipulated in the Articles of Association or determine other restrictions on the Directors other than those stipulated in the Articles of Association, by heeding the provisions of the prevailing laws and regulations.
21. In order to carry out the management of the Company, the President Director has the right and on behalf of the Board of Directors or represents the Company with several terms that all actions of the President Director have been approved by a meeting of the Directors.
22. If the President Director does not present or is unable to attend due to any reason, which does not need to be proven to a third party, then one member of the Board of Directors who appointed in writing by the President Director, on behalf of the Directors has the authority to act and carry out the duties of the President Director.
23. In the event that the President Director does not appoint, the longest-serving member of the Board of Directors has the authority to act and carry out the duties of the President Director on behalf of the Board of Directors.



24. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
 25. Dalam hal seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.
 26. Semua tindakan anggota Direksi yang mewakili Direktur Utama tersebut wajib disetujui dalam Rapat Direksi.
 27. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
 28. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 29. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
 30. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 31. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 10, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
24. In the event that there is more than 1 (one) member of the Board of Directors who is the longest-serving in office, the oldest member of the Board of Directors who is authorized to act and carry out the duties of the President Director on behalf of the Board of Directors.
 25. In the event that one member of the Board of Directors other than the President Director is unable to attend due to any reason, which does not need to be proven to a third party, then other members of the Board of Directors appoint one member of the Board of Directors to be responsible to take the duties of the Directors who are unable to attend.
 26. All action of members of the Directors whose represent as the President Director needs an agreement from the Directors' meeting.
 27. The Board of Directors on his own responsibility for certain actions, has the right to appoint one or more as representatives or under his authority, by giving him or them the power for certain acts that are regulated in the power of attorney.
 28. The duties and authority distribution of each member of the Board of Directors are determined through GMS. In the event that GMS does not stipulate the distribution of duties and authority among the Board of Directors, it can be determined by the decision of the Directors itself.
 29. The Board of Directors in managing the Company implements the instructions given by the GMS as long as it does not conflict with the laws and regulations or the Articles of Association.
 30. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
 - a. There is a case in court between the Company and the concerned member of the Board of Directors; and
 - b. The concerned member of the Board of Directors has a conflicting interest with the interests of the Company.
 31. In the event that the circumstances referred to paragraph (10) who are entitled to represent the Company:
 - a. Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
 - b. The Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or
 - c. Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Commissioners or Directors have a conflict of interest with the Company.

Pembagian Tugas Masing-Masing Anggota Direksi

Anggota Direksi memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan telah tertuang di dalam Surat Keputusan No. SK.01.01/WB-0A.0009/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi, antara lain:

Distribution of Duties of Board of Directors

The members of the Board of Directors have their respective duties and responsibilities and have been stated in the Decree No. SK.01.01/WB-0A.0009/2019 dated April 22, 2019 concerning Duties and Authorities of Members of the Board of Directors, including:

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Tugas dan Tanggung Jawab / Duties and Responsibilities
1	Hadian Pramudita	Direktur Utama / President Director	<p>Tugas: / Duties:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang/Pendek (RJP) Perusahaan, Hukum dan Kesekretariatan. / Determining the Company's Budget Plan and Long & Short-term Plan, Legal and Secretariat. Menetapkan Arah Pengembangan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perusahaan. Menetapkan Arah Pengembangan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perusahaan dan Kesekretariatan. / Setting the Development Objectives, Target, Strategy and Policy of the Company. Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi perusahaan serta pemeliharaan dan peningkatan Citra Perusahaan untuk mendukung pencapaian Sasaran Perusahaan. / Planning, developing and implementing company strategies as well as maintaining and improving the Company's Image to support the achievement of the Company's Goals. Menetapkan prosedur operasi, kebijakan dan standar perusahaan. / Deciding the operating procedures, policy and standard of the Company. Memastikan proses bisnis perusahaan berjalan sesuai dengan Peraturan dan Kebijakan yang berlaku serta peningkatan citra perusahaan. / Ensuring business process of the Company in line with the prevailing regulation and policy and increasing the Company's image. Memastikan target perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai. / Ensuring that the Company's determined target could be reached. Menjamin keberlangsungan kepemimpinan dan kaderisasi (suksesi) di Perusahaan. / Ensuring that the leadership continuity and regeneration (succession) within the Company. Menjamin tercapainya target <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Sistem Manajemen ISO dan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L). / Ensuring the achievement target of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and ISO Management System - and Occupational, Health and Safety - and Environmental System (HSE). Melaporkan Kinerja Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). / Reporting the performance of the Company to the Board of Commissioners and Shareholders in the General Meeting of Shareholders (GMS). <p>Tanggung Jawab: / Responsibilities:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya perencanaan strategi, kebijakan, dan sasaran perusahaan. / Planning strategies, policies, and targets for the Company. Terlaksananya pengawasan/monitor secara periodik. / Performing periodic supervision/monitoring. Terlaksananya pengambilan keputusan akhir untuk kegiatan perusahaan yang berskala besar. / Making final decisions for the Company's large-scale activities. Terlaksananya monitor hasil audit oleh SPI. / Monitoring result of audits conducted by SPI. Terkendalinya pencapaian kinerja organisasi pada bidang sekretariat perusahaan serta penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), sistem manajemen IS, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan pengelolaan aspek risiko. / Controlling the organization performance, and implementing Good Corporate Governance, IS management system, Safety Management System, Occupational Health and Safety and Environment.
2	Imam Sudiyono	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> & Manajemen Risiko / Director of Finance, Human Capital & Risk Management	<p>Tugas: / Duties:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Arah Pengembangan fungsi Keuangan, <i>Human Capital</i>, dan Manajemen Risiko Perusahaan. / Determining the Development target for the functions of Finance, Human Capital, and Company Risk Management. Menetapkan Sasaran Jangka Panjang dan Jangka Pendek Perusahaan, Kebijakan dan Peraturan di fungsi Keuangan, Pengendalian, dan <i>Human Capital</i>. / Establishing long and short term goals for the Company, policies and regulations in the functions of finance, control and human capital. Mengembangkan strategi yang berkelanjutan dalam bidang keuangan, <i>human capital</i>, dan pengendalian dan manajemen risiko perusahaan. / Developing sustainable strategies in the fields of finance, human capital, and controlling and managing corporate risks. Memastikan jalannya organisasi sesuai dengan arahan strategi yang telah ditetapkan. / Ensuring that the organization runs in accordance with the direction of the established strategy. Mengendalikan Utang dan Piutang Perusahaan dan pengelolaan kebutuhan dan pengembangan pegawainya. / Controlling Company Debt and Receivables and managing the needs and development of its employees. Terciptanya kaderisasi melalui pembinaan yang berkelanjutan dan terarah pada Direktoratny. / Maintaining regeneration through continuous and directed guidance at the Directorate. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang mendukung peningkatan profesionalisme dan produktivitas pegawai. / Creating a favorable work environment that supports increased professionalism and employee productivity. Menjamin terlaksananya dan tercapainya target <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Sistem Manajemen ISO dan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L). / Ensuring the achievement target of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, ISO Management System and Occupational, Health and Safety and Environmental System (OHSE). Melaporkan Kinerja Perusahaan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). / Reporting the performance of the Company to the Board of Commissioners and Shareholders in the General Meeting of Shareholders (GMS). <p>Tanggung Jawab: / Responsibilities:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya perencanaan strategi dan pengambilan keputusan. / Strategic planning and decision-making. Membuat keputusan stratejik bidang keuangan, pengendalian, dan <i>human capital</i> sesuai dengan sasaran perusahaan. / Making strategic decisions in finance, control, and Human Capital based on the Company's targets. Terlaksananya pengambilan keputusan akhir untuk kegiatan keuangan, <i>human capital</i>, pengendalian, dan manajemen risiko. / Making final decisions concerning the Company's financial, Human Capital, control, and risk management activities. Terlaksananya pengawasan/monitor secara periodik. / Periodic supervision monitoring. Terkendalinya pencapaian kinerja organisasi pada bidang keuangan, <i>human capital</i>, dan pengendalian dan manajemen risiko, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), sistem manajemen ISO, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan pengelolaan aspek risiko. / Controlling the organization performance in finance, Human Capital, and control and risk management, implementation of GCG, ISO management system, Occupational Health and Safety Management System, and risk management.

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Tugas dan Tanggung Jawab / Duties and Responsibilities
3	Kuntjara	Direktur Pemasaran & Pengembangan / Director of Marketing & Development	<p>Tugas: / Duties:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Arah Pengembangan fungsi Penjualan, <i>Business Development</i> (Busdev) dan Sistem Informasi. / Establishing the development target of Sales function, <i>Business Development</i> and Information System. Menetapkan sasaran Jangka Panjang dan Jangka Pendek Perusahaan, Kebijakan dan Peraturan di fungsi Penjualan, <i>Business Development</i> (Busdev) dan Sistem Informasi. / Establishing long-term and short-term corporate goals, policies and regulations in the Sales, <i>Business Development</i> and Information Systems function. Mengembangkan strategi yang berkelanjutan dalam pengelolaan Penjualan, <i>Business Development</i> (Busdev) dan Sistem Informasi untuk mendukung pencapaian Sasaran Perusahaan. / Developing sustainable strategies in the management of Sales, <i>Business Development</i> and Information Systems to support the achievement of Company Goals. Memastikan jalannya organisasi sesuai dengan arahan strategi yang telah ditetapkan. / Ensuring the organizations are always in line to the determined direction strategy. Mengamankan penguasaan pasar serta pemanfaatan informasi pasar dan potensinya untuk pengembangan bisnis perusahaan serta tersedianya sistem informasi terkini yang tepat guna. / Securing the Company's market supremacy and the utilization of market information and its potencies to develop the Company's business as well as the available of an appropriate up-to-date information system. Terciptanya kaderisasi pembinaan yang berkelanjutan dan terarah pada Direktoratny. / Maintaining regeneration through the sustainably and distinctly training that is preferably to their Directorate. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang mendukung peningkatan profesionalisme dan produktivitas pegawai. / Creating conducive working environment that always bolster up the professionalism and productivity of the employees Menjamin terlaksananya dan tercapainya target <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Sistem Manajemen ISO dan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L). / Ensuring the achievement target of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and ISO Management System - and Occupational, Health and Safety - and Environmental System (OHSE). Melaporkan Kinerja Perusahaan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). / Reporting the performance of the Company to the Board of Commissioners and Shareholders in the General Meeting of Shareholders (GMS). <p>Tanggung Jawab: / Responsibilities:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya perencanaan strategi dan pengambilan keputusan. / Strategic planning and decision-making. Membuat keputusan strategik bidang penjualan, pengembangan bisnis dan sistem informasi sesuai dengan sasaran perusahaan. / Making strategic decisions in marketing based on the Company's targets. Terlaksananya pengambilan keputusan akhir untuk kegiatan penjualan, pengembangan bisnis dan sistem informasi perusahaan. / Making final decisions concerning the Company's marketing activities. Terlaksananya pengawasan/monitor secara periodik. / Periodic supervision/monitoring. Terkendalinya pencapaian kinerja organisasi pada bidang penjualan, <i>business development</i> (busdev) dan sistem informasi, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), sistem manajemen ISO, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan pengelolaan aspek risiko. / Controlling the organization performance in sales, business development and information system, Good Corporate Governance implementation, ISO management system, Occupational Health and Safety and Environment Management System, and risk management.
4	I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur Operasi & Supply Chain Management / Director of Operation & Supply Chain Management	<p>Tugas: / Duties:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Arah Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Jasa. / Determining the development objectives and service management. Menetapkan Sasaran Jangka Panjang dan Jangka Pendek Perusahaan, Kebijakan dan Peraturan di fungsi Operasi dan Pengelolaan Material. / Defining long & short term targets of the Company, policy and regulation within operation and material management functions. Mengembangkan strategi yang berkelanjutan dalam Pengelolaan Mutu Produk dan Pelayanan yang meliputi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Jasa untuk mendukung pencapaian Sasaran Perusahaan. / Developing the sustainable strategy in the quality control of products and services including business development and services management that support the objectives achievement of the Company. Memastikan jalannya organisasi sesuai dengan arahan strategi yang telah ditetapkan. / Ensuring that the course of organization is in line with the determined strategy direction. Mengamankan Efisiensi, Konsistensi Mutu, Pelayanan dan Efektivitas Biaya Jasa melalui penerapan sistem manajemen dan teknologi yang tepat guna. / Securing Efficiency, Quality Consistency, Service and Service Cost Effectiveness through the implementation of appropriate management systems and technology. Terciptanya kaderisasi melalui pembinaan yang berkelanjutan dan terarah pada Direktoratny. / The creation of regeneration through continuous and directed guidance at the Directorate. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang mendukung peningkatan profesionalisme dan produktivitas pegawai. / The creation of a conducive work environment that supports increased professionalism and employee productivity. Menjamin terlaksana dan tercapainya target <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Sistem Manajemen ISO dan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L). / Ensuring the implementation and achievement of targets for Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), ISO Management Systems and Safety, Health and Environment Management Systems (SMK3L). Melaporkan Kinerja Perusahaan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). / Reporting the Company's Performance to the President Director, Board of Commissioners and Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). <p>Tanggung Jawab: / Responsibilities:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya perencanaan strategi dan pengambilan keputusan. / Implementation of strategic planning and decision making. Membuat keputusan strategik bidang operasi/jasa dan pengelolaan material sesuai dengan sasaran perusahaan. / Making strategic decisions in the field of operations/services and material management in accordance with company goals. Terlaksananya pengambilan keputusan akhir untuk kegiatan operasi/jasa dan pengelolaan material perusahaan. / The implementation of the final decision making for operation/service activities and material management of the company. Terlaksananya pengawasan/monitor secara periodik. / The implementation of periodic supervision/monitoring. Terkendalinya pencapaian kinerja organisasi pada bidang produksi, pengadaan, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), sistem manajemen ISO, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan pengelolaan aspek risiko. / Controlled achievement of organizational performance in the fields of production, procurement, implementation of Good Corporate Governance (GCG), ISO management systems, Safety Management Systems, Occupational Health and Environment (SMK3L) and management of risk aspects.

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Tugas dan Tanggung Jawab / Duties and Responsibilities
5	Sidiq Purnomo	Direktur Teknik & Produksi / Director of Engineering & Production	<p>Tugas: / Duties:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan arah pengembangan fungsi Teknik, Penelitian dan Pengembangan, QSHE & Sistem Manajemen serta Produksi. / Determining the development direction of the Engineering, Research and Development, QSHE & Management Systems and Production functions. Menetapkan sasaran Jangka Panjang dan Jangka Pendek Perusahaan, Kebijakan dan Peraturan di fungsi Teknik, Penelitian dan Pengembangan, QSHE & Sistem Manajemen serta Produksi. / Establishing long-term and short-term company goals, policies and regulations in the functions of Engineering, Research and Development, QSHE & Management and Production Systems. Mengembangkan Strategi yang berkelanjutan dalam Pengelolaan Teknik dan Research & Development, QHSE & SM serta Produksi untuk mendukung pencapaian Sasaran Perusahaan. / Developing sustainable strategies in Engineering Management and Research & Development, QHSE & SM and Production to support the achievement of Company Goals. Memastikan jalannya organisasi sesuai dengan arahan strategi yang telah ditetapkan. / Ensuring that the organization runs in accordance with the direction of the predetermined strategy. Mengendalikan Engineering/Teknologi, Pengembangan, Produk dan/atau Produk baru dan pengendalian QSHE dan Produksi. / Controlling Engineering/Technology, Development, Products and/or New Products and controlling QSHE and Production. Terciptanya kaderisasi melalui pembinaan yang berkelanjutan dan terarah pada Direktoratya. / The creation of regeneration through continuous and directed guidance at the Directorate. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang mendukung peningkatan profesionalisme dan produktivitas pegawai. / The creation of a conducive work environment that supports increased professionalism and employee productivity. Menjamin terlaksana dan tercapainya target Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), Sistem Manajemen ISO dan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L). / Ensuring the implementation and achievement of targets for Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), ISO Management Systems and Work Safety and Environmental Management Systems (SMK3L). Melaporkan Kinerja Perusahaan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). / Reporting the Company's Performance to the President Director, Board of Commissioners and Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). <p>Tanggung Jawab: / Responsibilities:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya perencanaan strategi dan pengambilan keputusan. / Implementation of strategic planning and decision making. Membuat keputusan strategik bidang teknologi konstruksi/engineering, sistem manajemen, serta penelitian dan pengembangan dan produksi. / Making strategic decisions in the fields of construction/engineering technology, management systems, as well as research and development and production. Terlaksananya pengambilan keputusan strategis untuk kegiatan teknik dan sistem manajemen, produksi serta penelitian dan pengembangan perusahaan. / Implementation of strategic decision making for engineering activities and management systems, production and research and development of the company. Terlaksananya pengawasan/monitor secara periodik. / The implementation of periodic supervision/monitoring. Terkendalinya pencapaian kinerja organisasi pada bidang teknik, sistem manajemen, serta penelitian dan pengembangan, penerapan Good Corporate Governance (GCG), sistem manajemen ISO, Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan pengelolaan aspek risiko. / Controlled achievement of organizational performance in the fields of engineering, management systems, as well as research and development, implementation of Good Corporate Governance (GCG), ISO management systems, Occupational Health and Environment Management Systems (SMK3L) and management of risk aspects.

Kewajiban Direksi

- Menyusun menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Perseroan.
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya strategi Perseroan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.
- Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.
- Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan pada waktunya, beserta perubahannya, kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan pada Rapat Dewan Komisaris selambat-lambatnya 60 hari kalender sebelum tahun anggaran dimulai.
 - Rencana Kerja yang dimaksud terdiri atas:
 - Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
 - Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, minimal mencakup bahasan mengenai:
 - Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya.
 - Posisi Perusahaan saat penyusunan RJP.
 - Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJP.

Board of Directors Obligations:

- Formulate the Company's vision, mission, goals, objectives and strategies.
- Strive for and ensure the implementation of the Company's strategy in order to achieve the stated goals/objectives.
- Prepare a development plan for the Company and submit it to the Board of Commissioners and Shareholders for approval.
- Prepare the Work Plan and Articles of Association of the Company on time, along with the amendments thereof, to the Board of Commissioners for approval at the Board of Commissioners Meeting no later than 60 calendar days before the start of the fiscal year.
 - The Work Plan in question consists of:
 - Company Long Term Plan (RJPP);
 - The Board of Directors is obliged to prepare a Long-Term Plan (RJP) which is a strategic plan that contains the goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years, covering at least a discussion of:
 - Evaluation of previous RJP implementation.
 - The position of the Company when drafting the RJP.
 - Determination of the RJP mission, objectives, strategies, policies and work programs.



B. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)

- (i) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP.
- (ii) RKAP sekurang-kurangnya memuat:
 - Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan dan program kerja/kegiatan.
 - Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan.
 - Proyeksi keuangan Perseroan dan Perusahaan anak.
 - Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
 - Hal lain sesuai yang diperlukan Perseroan.
- (iii) Direksi menyusun rencana kerja tahunan dan mendapatkan pengesahan Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi.
 - Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Dokumen Perseroan.
 - Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkannya kepada akuntan publik untuk diaudit.
 - Menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi dalam menjalankan operasi Perseroan memiliki hak dan wewenang sebagaimana tertera dalam *Board Manual* Perseroan yang berisi, antara lain:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
2. Menetapkan kebijakan dalam rangka kepengurusan Perseroan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili perusahaan di dalam dan luar pengadilan.
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili perusahaan di dalam dan luar pengadilan.
5. Menetapkan pedoman pengadaan barang dan/atau jasa yang menguntungkan bagi Perseroan baik harga maupun kualitas barang/jasa tersebut.
6. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

B. Company Work Plan and Budget (RKAP)

- (i) The Board of Directors is obliged to prepare a Company Work Plan and Budget (RKAP) as an annual translation of the RJP.
- (ii) the RKAP shall at least contain:
 - Mission, business objectives, business strategy, Company policies and work programs/activities.
 - Company budget detailed for each work program/activity budget.
 - Financial projections of the Company and Subsidiaries.
 - Other matters that require a resolution of the GMS.
 - Other matters as required by the Company.
- (iii) The Board of Directors prepares an annual work plan and is approved by the Board of Commissioners before the commencement of the next fiscal year.
 - Create a list of shareholders, a special list, minutes of the GMS and minutes of the Board of Directors' Meetings.
 - Prepare an Annual Report as a form of the Company's responsibility, as well as the Company's financial documents as stipulated in the law regarding Company Documents.
 - Prepare Financial Statements based on financial accounting standards and submit them to a public accountant for auditing.
 - Submit the Annual Report and Financial Report to the GMS for approval and validation.

Rights and Authorities of the Board of Directors

In running the Company's operations, the Board of Directors has the rights and authority as stated in the Company's Board Manual which contains the following:

1. Represent the Company inside and outside the court.
2. Establish policies for the management of the Company.
3. Organize the transfer of authority of the Board of Directors to a person or members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company in and outside the court.
4. Organize the transfer of authority of the Board of Directors to a person or several company employees, either individually or collectively or to other people, to represent the company inside and outside the court.
5. Establish guidelines for the procurement of goods and/or services that are beneficial to the Company, both in terms of price and quality of the goods/services.
6. Regulate provisions concerning employment, including the determination of salary, pension or old-age insurance and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations, provided that the stipulation of salary, pension or old age insurance and other income for employees who exceed obligations that are stipulated in laws and regulations, must obtain prior approval from the GMS.

- | | |
|--|--|
| <p>7. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. Menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi yang ditetapkan secara objektif dan transparan.</p> <p>9. Menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit, dan jabatan di dalam organisasi.</p> <p>10. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.</p> <p>11. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.</p> <p>12. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai kepengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>13. Menerima gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.</p> | <p>7. Appoint and dismiss employees of the Company based on the Company's employment regulations and the prevailing laws and regulations.</p> <p>8. Establish a performance appraisal system/guideline for units and positions in the organization which are determined objectively and transparently.</p> <p>9. Set performance targets based on the RKAP and are derived gradually at the unit, sub-unit and position levels within the organization.</p> <p>10. Conduct analysis and evaluation of the performance achievements for positions/units under the Board of Directors and at the corporate level.</p> <p>11. Appoint and dismiss the Corporate Secretary.</p> <p>12. Carry out all other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the Court regarding all matters and all events, with restrictions as regulated in the laws and regulations, the Articles of Association of the Company and/or the resolutions of the GMS.</p> <p>13. Receive salary and other allowances/facilities, including retirement compensation, the types and amounts of which are determined by the GMS.</p> |
|--|--|

Penilaian Kelayakan & Kepatutan (Fit & Proper Test) Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan yang menjabat hingga akhir tahun 2020 sudah dinyatakan lulus dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan oleh Pemegang Saham dan PPM Manajemen sebagai pihak pelaksana eksternal.

Adapun waktu pelaksana uji kelayakan dan kepatuhan setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Waktu Pelaksanaan / Date
Hadian Pramudita	Direktur Utama / President Director	Mei 2020 / May 2020
Imam Sudyono	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> & Manajemen Risiko / Director of Finance, Human Capital & Risk Management	Februari 2020 / February 2020
Kuntjara	Direktur Pemasaran & Pengembangan / Director of Marketing & Development	Februari 2018 / February 2018
I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur Operasi & <i>Supply Chain Management</i> / Director of Operation & Supply Chain Management	Desember 2018 / December 2018
Sidiq Purnomo	Direktur Teknik & Produksi / Director of Engineering & Production	Juni 2016 / June 2016

Fit and Proper Test for the Board of Directors

All members of the Company's Board of Directors who served until the end of 2020 have passed the Fit & Proper Test conducted by Shareholders and PPM Manajemen as external executing parties.

The time for implementing the fit and proper test for each member of the Board of Directors is as follows:

Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru Tahun 2020

Perseroan memberlakukan program orientasi bagi anggota Direksi baru sebagaimana diatur dalam *Board Manual*. Program orientasi atau pengenalan dilakukan untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang bisnis Perusahaan serta kondisi yang dihadapi atau dialami Perusahaan. Dalam program orientasi Direksi juga dilakukan pemaparan mengenai gambaran aktivitas bisnis perusahaan, rencana jangka pendek dan jangka panjang

Orientation Program for New Members of the Board of Directors in 2020

The Company implements an orientation program for new members of the Board of Directors as stipulated in the Board Manual. Orientation or introduction programs are conducted to provide additional knowledge about the Company's business and conditions faced or experienced by the Company. In the orientation program for the Board of Directors, a description of the Company's business activities, short-term and long-

perusahaan, pedoman kerja Direksi, *charter* Direksi, RKA Direksi, *Code of Corporate Governance*, *Code of Conduct*, peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi, serta pembagian tugas Direksi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pada tahun 2020, tidak dilakukan program orientasi Direksi dikarenakan tidak adanya pengangkatan anggota Direksi baru.

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan dimandatkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing secara profesional sebagaimana termaktub di dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 tentang *Board Manual*, Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.01.01/WB-0A.0036/2019 tentang *Code of Corporate Governance* dan *Code of Conduct* yang masing-masing tertanggal 18 Oktober 2019 serta Pakta Integritas yang ditandatangani baik pada setiap pengangkatan pengurus maupun di setiap awal tahun serta saat pengambilan keputusan Direksi. Oleh karena itu, Direksi Perseroan haruslah terjaga independensinya dan terbebas dari tekanan atau benturan kepentingan apa pun saat mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis strategis dan operasional Perseroan.

Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2020

Perseroan memfasilitas Direksi dengan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau *workshop* sebagai upaya peningkatan kapabilitas dan pembaruan informasi mengenai perkembangan terkini dari industri dan bisnis Perseroan maupun perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan kompetensi juga ditujukan untuk memberikan persiapan dan antisipasi atas masalah yang mungkin timbul demi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang diikuti Direksi selama tahun 2020 telah dimuat pada bab 'Profil Perusahaan', bagian 'Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern'.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2020, Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan berupa Keputusan Direksi, Surat Edaran, dan Instruksi Direksi. Beberapa kebijakan strategis yang diputuskan pada tahun 2020 antara lain terkait:

I. Kebijakan terkait proyek-proyek strategis.

term plans of the Company, work guidelines for the Board of Directors, Board of Directors charter, RKA for the Board of Directors, Code of Corporate Governance, Code of Conduct, other regulations relating to the implementation of the duties of the Board of Directors are also carried out, as well as the distribution of duties of the Board of Directors and other matters relating to the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors.

There was no orientation program for the Board of Directors in 2020 since there was no appointment of new members of the Board of Directors.

Board of Directors Independence

All members of the Board of Directors of the Company are mandated to carry out their respective duties and responsibilities in a professional manner as stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 concerning Board Manual, Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. SK.01.01/WB-0A.0036/2019 concerning Code of Corporate Governance and Code of Conduct dated October 18, 2019 respectively as well as the Integrity Pact which is signed both at the appointment of the management and at the beginning of each year as well as the decision making of the Board of Directors. Therefore, the Company's Directors must maintain their independence and be free from any pressure or conflict of interest when making decisions related to the Company's strategic business activities and operations.

Competence Development Program for Board of Directors in 2020

The Company facilitates the Board of Directors with competency development through training, education, seminars, and/or workshops as an effort to increase capabilities and update information on the latest developments in the Company's industry and business as well as changes to applicable laws and regulations. Competency development is also aimed at providing preparation and anticipation for problems that may arise for the sustainability and progress of the Company.

Information regarding competency development that the Board of Directors participated in during 2020 has been published in the 'Company Profile' chapter, 'Education and/or Training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit' section.

Report on Implementation of Board of Directors Duties

The Board of Directors issued various decisions in the operational, financial, and business support sectors in 2020 through policy instruments in the form of Board of Directors Decrees, Circular Letters, and Board of Directors Instructions. Several strategic policies decided in 2020 include:

I. Policies related to strategic projects.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelolaan JV dan JO serta proyek-proyek Perseroan. 3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 pada tanggal 26 Maret 2020, bertempat di Hotel Best Western Premier The Hive, Lantai 3, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340. 4. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 pada tanggal 4 Agustus 2020, bertempat di Hotel Best Western Premier The Hive, Lantai 3, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340. 5. Pelaksanaan rapat Direksi secara berkala. 6. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi Perseroan. 7. Kerjasama-kerjasama strategis dengan perusahaan kontraktor, owner atau BUMN. 8. Sinergi yang lebih antara WIKA Holding dengan WIKA BETON. 9. Sinergi pendayagunaan aset tetap WIKA BETON dengan WIKA Holding dan Anak Perusahaan WIKA Grup. 10. Pengembangan mutu Produk Perseroan. 11. Peningkatan kompetensi pegawai dengan program <i>Coaching, Mentoring, Counselling</i>. 12. Digitalisasi sistem manajemen Perseroan melalui sistem Audit Internal <i>Online</i>. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Management of the JV and JO as well as the Company's projects. 3. Implementation of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on March 26, 2020, at the Best Western Premier, The Hive Hotel, 3rd Floor, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340. 4. The 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 4, 2020, at the Best Western Premier, The Hive Hotel, 3rd Floor, Jl. D.I..Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340. 5. Conducted regular meetings of the Board of Directors. 6. Distribution of duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors of the Company. 7. Strategic collaborations with contractor companies, owners or SOEs. 8. More synergy between WIKA Holding and WIKA Beton. 9. Synergize the utilization of WIKA Beton's fixed assets with WIKA Holding and subsidiaries of WIKA Group. 10. Development of the Company's product quality. 11. Increased employee competence through coaching, mentoring and counseling programs. 12. Digitalization of the Company's management system through the Online Internal Audit system. |
|---|---|

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Anggota Direksi Apabila Terlibat dalam Kejahatan Keuangan

Perseroan telah memiliki kebijakan dan komitmen atas tata laksana Perseroan secara konsisten dengan menerapkan GCG secara komprehensif, melalui pakta integritas yang ditandatangani secara berkala setiap awal tahun yang memuat pengunduran diri Anggota Direksi apabila terlibat dalam Kejahatan Keuangan maupun kegiatan-kegiatan yang menimbulkan benturan kepentingan dan merugikan Perusahaan. Untuk tahun 2020, pakta integritas Direksi baik individual dan kolegal ditandatangani tanggal 26 Maret 2020 setelah yang bersangkutan diangkat menjadi Direksi. Ketentuan pengunduran diri Direksi diatur juga sesuai mekanisme yang dimuat di dalam *Board Manual* dan Anggaran Dasar Perseroan.

Penilaian Kinerja Direksi

Perseroan memberlakukan kebijakan penilaian kinerja Direksi atas kualitas fungsi pengurusan dan pengelolaan perusahaan yang dijalankan. Sebagai perusahaan anak BUMN, Perseroan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang diterbitkan oleh regulator serta Anggaran Dasar untuk menghasilkan penilaian yang objektif. Adapun metode penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *assessment* penerapan GCG (aspek Direksi), serta capaian *Key Performance Indicator* (KPI).

Policy on Resignation of a Member of the Board of Directors if Involved in Financial Crimes

The Company has a policy and commitment to the management of the Company consistently by implementing GCG comprehensively, through an integrity pact that is signed regularly at the beginning of the year which includes the resignation of a Member of the Board of Directors if involved in a Financial Crime or other activities that cause a conflict of interest and harm the Company. For 2020, the integrity pact for the Board of Directors, both individual and collegial, was signed on March 26, 2020 after the concerned person was appointed as the Board of Directors. Provisions for the resignation of the Board of Directors are also regulated according to the mechanism contained in the Board Manual and the Company's Articles of Association.

Assessment on Board of Directors Performance

The Company enforces the performance assessment policy for the Board of Directors on the quality of the Company's management functions. As a subsidiary of SOE, the Company refers to the laws and regulations issued by the regulator as well as the Articles of Association to produce an objective assessment. The method of assessment the performance of the Board of Directors is carried out through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (GMS), assessment of the implementation of GCG (aspects of the Board of Directors), and the achievement of Key Performance Indicators (KPI).

Penilaian Kinerja Direksi melalui Mekanisme RUPS

Penilaian terhadap kinerja Direksi tercermin dari keputusan RUPS yang memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan sebagai bentuk tanggung jawab atas pengurusan perusahaan selama tahun buku. Evaluasi dan penilaian kinerja Direksi dilakukan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan kinerja kolegal berdasarkan kinerja Perseroan yang dituangkan di dalam lembar persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan oleh RUPS. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh RUPS menjadi bagian tak terpisahkan dalam penentuan skema remunerasi dan kompensasi Direksi ataupun penentuan penunjukan kembali yang bersangkutan berdasarkan persetujuan RUPS.

Assessment on Board of Directors Performance through GMS Mechanism

The assessment of the Board of Directors performance is reflected in the GMS resolution which gives approval and validation of the Financial Statements and Annual Report as a form of responsibility for the management of the Company during the fiscal year. Evaluation and assessment of the Board of Directors performance are carried out as a whole based on the collegial performance considerations based on the Company's performance as stated in the approval and validation of the Company's Annual Report by the GMS. The results of assessment of the Board of Directors performance by the GMS are an integral part in determining the remuneration and compensation scheme for the Board of Directors or determining the re-appointment of the concerned person based on the approval of the GMS.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS / Procedures for Board of Directors Performance Assessment by GMS	Pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan perusahaan yang dijalankan Direksi selama tahun buku dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan untuk kemudian memperoleh pernyataan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) sampai dengan berakhirnya tahun buku. / The management of the Company by the Board of Directors during the fiscal year are reported to the Shareholders through the Annual GMS to obtain a statement of full release (<i>acquit et de charge</i>) until the end of the fiscal year.
Kriteria Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS / Criteria for Board of Directors Performance Assessment by GMS	RUPS menilai dan mengevaluasi kinerja Direksi dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan sebagai cerminan atas efektivitas pengurusan dan pengelolaan Direksi secara kolegal. / The GMS assesses and evaluates the performance of the Board of Directors by considering the performance of the Company as a reflection of the effectiveness of the management of the Board of Directors collegially.
Pihak yang Melakukan Assessment / Assessor	Penilaian kinerja Direksi dalam RUPS dilakukan oleh Pemegang Saham. / The performance evaluation of the Board of Directors in the GMS is carried out by the Shareholders.
Hasil Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS / Results of Board of Directors Performance Assessment by GMS	RUPS telah menilai kinerja pengurusan Direksi secara kolegal dan menyatakan telah memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas pengurusan dan pengelolaan perusahaan yang dilakukan hingga akhir tahun buku. / The GMS has assessed the management performance of the Board of Directors collegially and stated that it has granted full release (<i>acquit et de charge</i>) to the Board of Directors for the management of the Company that has been carried out until the end of the fiscal year.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014, Dewan Komisaris telah menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*/"KPI") sebagai kriteria dalam melakukan Penilaian Kinerja Direksi secara Kolegal dan Individual.

Board of Directors Performance Assessment Based on Key Performance Indicator (KPI)

As stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 33 of 2014, the Board of Commissioners has established Key Performance Indicators ("KPI") as criteria for conducting Collegiate and Individual Assessment of the Board of Directors' Performance.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan KPI / Procedures for Board of Directors Performance Assessment Based on KPI	Penilaian kinerja Direksi berdasarkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) disampaikan kepada RUPS dengan mempertimbangkan pada capaian KPI dan RKAP yang telah ditetapkan pada awal tahun buku. / The assessment of the Board of Directors performance based on the Key Performance Indicator (KPI) is submitted to the GMS by taking into account the KPI and RKAP achievements that have been set at the beginning of the fiscal year.
Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan KPI / Criteria for Board of Directors Performance Assessment Based on KPI	Kriteria penilaian kinerja Direksi yang termuat dalam KPI meliputi 5 (lima) aspek, yaitu Kinerja Produk dan Proses, Kinerja Fokus Pelanggan, Kinerja Keuangan dan Pasar, Kinerja Fokus Tenaga Kerja, dan Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola. / The criteria for assessing the Board of Directors performance contained in the KPI include 5 (five) aspects, namely Product and Process Performance, Customer Focus Performance, Financial and Market Performance, Manpower Focus Performance, and Leadership and Governance Performance.
Pihak yang Melakukan Assessment / Assessor	Penilaian kinerja kolegal Direksi diukur berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk di dalamnya Kontrak Manajemen yang disahkan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas Direksi selalu direncanakan pada awal tahun dan dituangkan ke dalam RKAP dan KPI. / The collegial assessment of the Board of Directors performance is measured based on the Company's Work Plan and Budget, including the Management Contract approved by the Board of Commissioners. The implementation of the duties of the Board of Directors is always planned at the beginning of the year and included into the RKAP and KPI.
Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan KPI / Results of Board of Directors Performance Assessment Based on KPI	Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI terlampir pada tabel di bawah ini. / The results of the Board of Directors performance assessment based on KPI can be seen below.

No.	Indikator Kinerja Kunci / Key Performance Indicator	Formula / Formula	Satuan / Unit	Bobot / Value	RKAP			s/d Triwulan IV / Up to Quarter IV		
					Target / Target	Nilai / Value	Skor Ra / Score	Realisasi / Realization	Nilai / Value	Skor Ri / Score
A. KINERJA KEUANGAN DAN PASAR / MARKET AND FINANCIAL PERFORMANCE				31			248			246
1	EBITDA	Laba Bersih Perusahaan (LSP)+ Bunga + Pajak + Depresiasi + Amortisasi periode tahun berjalan / Company Net Profit (LSP) + Interest + Tax + Depreciation + Amortization for the current year	Miliar Rp / Rp Billion	8	418,34	8	64	429,91	9,0	72
2	PENJUALAN / SALES	Nilai penjualan periode berjalan / Sales value for the current period	Miliar Rp / Rp Billion	6	4.985,65	8	48	4.803,36	8,0	48
3	CAPEX	Total nilai realisasi CAPEX pada periode tahun berjalan / Total CAPEX realized in the current year period	Miliar Rp / Rp Billion	6	377,0	8	48	326,00	9,0	54
4	Collection Period	(Total piutang usaha + HAD + Tagihan Bruto) / Nilai Penjualan x 365 hari / (Total trade receivables + HAD + Gross Receivable) / Sales Value x 365 days	Hari / Day	6	120,00	8	48	168,78	7,0	42
5	SINERGI OK BUNDLING / WIKA OK BUNDLING	Persentase dari realisasi sinergi WIKA Group dari OK yang diperoleh / The percentage of the WIKA Group synergy realization from obtained OK	%	5	7,67	8	40	4,38	6,0	30
B. KINERJA FOKUS PELANGGAN / CUSTOMER FOCUS PERFORMANCE				21			168			189
6	CUSTOMER SATISFACTION INDEX	Tingkat persepsi kepuasan pelanggan yang dilakukan melalui survei sesuai prosedur / The level of customer satisfaction perceptions conducted through a survey according to the procedure	Index	9	4,20	8	72	4,23	9,0	81
7	MARKET SHARE	Hasil survei terhadap pangsa pasar WIKA BETON / Survey results on WIKA BETON'S market share	%	12	25,00	8	96	27,00	9,0	108
C. KINERJA PRODUK DAN PROSES / PROCESS AND PRODUCT PERFORMANCE				19			152			166
8	QHSE EXCELLENCE	Realisasi Skor QPASS, 5R, RCA, SHE Level / Realization of QPASS Score, 5R, RCA, SHE Level	%	7	90,00	8	56	114,41	10,0	70
9	PROJECT TIMELINE	Persentase ketepatan jadwal proyek / Project schedule accuracy percentage	%	6	100,00	8	48	92,50	8,0	48
10	INNOVATION	Jumlah inovasi produk telah dipasarkan dalam satu tahun / Total product innovations that have	Buah / Piece	6	2,00	8	48	2,00	8,0	48
D. KINERJA FOKUS TENAGA KERJA / MANPOWER FOCUS PERFORMANCE				17			136			144
11	CAPABILITY	Persentase jumlah kelulusan fit and proper test untuk BOD-I / Percentage of the number of passes the fit and proper test for BOD-I	Orang / Person	9	5,00	8	72	5,00	8,0	72
12	ENGAGEMENT LEVEL	Nilai kepuasan pegawai dengan survei / Employee satisfaction scores with surveys	Nilai / Value	8	85,00	8	64	85,10	9,0	72
E. KINERJA KEPEMIMPINAN DAN TATA KELOLA / LEADERSHIP AND GOVERNANCE PERFORMANCE				12			96			108
13	GCG LEVEL	Nilai sesuai prosedur dari lembaga independen / Value according to the procedure of an independent institution	Nilai / Value	12	88,50	8	96	88,94	9,0	108
Jumlah / Total				100.0			800			853

Keterangan:

1. Realisasi hasil nilai audit eksternal, dirata-rata dalam satu tahun

Description:

1. The actual results of the external audit value, averaged in one year

Pencapaian Target / Target Achievement	Nilai / Value
≤ 70%	6
71% - 80%	7
81% - 90%	7.5
91% - 100%	8
101% - 110%	9
> 111%	10

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Assessment GCG

Komitmen terhadap penerapan prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") telah menjadi bagian yang diatur dalam penilaian kepemimpinan pengelolaan perusahaan dan ditargetkan pada RJPP dan RKAP Perseroan serta disetujui dalam RUPS. Hal ini ditujukan untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap GCG yang diimplementasikan oleh jajaran *top management*. Perseroan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Di sisi lain, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka juga mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Assessment of Board of Directors Performance Based on GCG Assessment

Commitment to the implementation of the principles and practices of Good Corporate Governance ("GCG") has become a part of what is stipulated in the assessment of corporate management leadership and is targeted at the Company's RJPP and RKAP and approved in the GMS. This is aimed at ensuring the Company's compliance with GCG which is implemented by the top management ranks. The Company uses the criteria stipulated in SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. On the other hand, the Company as a Public Company also refers to the Financial Services Authority Circular Letter No: 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Assessment GCG / Procedures for Board of Directors Performance Assessment Based on GCG Assessment	Penilaian implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan oleh penilai eksternal dengan periode penilaian penerapan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. / The assessment of Good Corporate Governance implementation is carried out by an external assessor with the implementation appraisal period from January 1 to December 31, 2020.
Kriteria Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Assessment GCG / Criteria for Board of Directors Performance Assessment Based on GCG Assessment	Penilaian GCG mengacu pada kriteria yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN yang terdiri dari 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG, 43 (empat puluh tiga) Indikator, dan 153 (seratus lima puluh tiga) Parameter, serta Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) Faktor Uji Kesesuaian (FUK). / The GCG assessment refers to the criteria set out in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of GCG in SOEs, consisting of 6 (six) Implementation Factors/Aspects. GCG, 43 (forty-three) Indicators, and 153 (one hundred and fifty-three) Parameters, as well as 568 (five hundred and sixty-eight) Conformity Test Factors (FUK).
Pihak yang Melakukan Assessment / Assessor	Perseroan menunjuk pihak penilai eksternal untuk mengukur penerapan GCG sesuai kriteria yang digunakan. / The Company appoints an external assessor to measure the implementation of GCG according to the criteria used.
Hasil Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Assessment GCG / Results of Board of Directors Performance Assessment Based on GCG Assessment	Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan assessment GCG terlampir pada tabel di bawah ini. / The results of the Board of Directors performance assessment based on the GCG assessment can be seen below.

No.	Indikator / Indicator	Bobot Indikator / Indicator Value	Tingkat Capaian % / % Achievement
Pemenuhan Penilaian Direksi / Fulfillment of Board of Directors Assessment			
1	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. / The Board of Directors carries out training/learning programs on an ongoing basis.	1.089	100
2	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. / The Board of Directors distributes duties/functions, authorities, and responsibilities clearly.	1.867	92
3	Direksi menyusun perencanaan perusahaan. / The Board of Directors prepares a company plan.	4.044	87
4	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. / The Board of Directors plays a role in meeting the Company's performance targets.	8.089	91
5	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. / The Board of Directors exercises operational and financial controls on the implementation of company plans and policies.	3.266	95
6	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. / The Board of Directors carries out the management of the Company in accordance with the applicable laws and regulations and the Articles of Association.	0.778	98
7	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan. / The Board of Directors engages in value-added relationships for the Company.	6.689	99
8	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. / The Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest for members of the Board of Directors and management under the Board of Directors.	1.089	93

No.	Indikator / Indicator	Bobot Indikator / Indicator Value	Tingkat Capaian % / % Achievement
9	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu. / The Board of Directors ensures that the Company carries out information and communication disclosures in accordance with applicable laws and regulations and submits information to the Board of Commissioners/Supervisory Board and Shareholders on time.	1.089	93
10	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. / The Board of Directors holds Board of Directors meetings and attends the Board of Commissioners/Supervisory Board Meetings in accordance with the laws.	1.556	95
11	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. / The Board of Directors is obliged to carry out quality and effective internal supervision.	1.711	81
12	Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. / The Board of Directors performs quality and effective function of Corporate Secretary.	1.711	92
13	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. / The Board of Directors holds the Annual GMS and other GMS in accordance with the laws and regulations.	2.022	100

Penilaian Kinerja Komite Penunjang Direksi

Hingga 31 Desember 2020, Direksi Perseroan belum membentuk komite-komite di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern (SPI) dan organ pendukung Direksi lainnya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal secara berkala baik yang berupa rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi dan komite-komite dengan agenda pembahasan dan diskusi mengenai keperluan pengawasan serta penyampaian saran dan rekomendasi atas aktivitas usaha yang dijalankan Direksi dan komite-komite. Adapun penyelenggaraan rapat internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Rapat internal juga dapat dilaksanakan oleh rapat Direksi atau berdasarkan permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat dan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui metode *voting*. Hal rapat dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Assessment on Board of Directors Supporting Committee Performance

As of December 31, 2020, the Company's Board of Directors have not yet established committees under the Board of Directors. The implementation of the duties of the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary and Internal Audit Unit (SPI) and other supporting organs of the Board of Directors.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners conducts regular internal meetings, either in the form of internal meetings or joint meetings with the Board of Directors and committees, with agenda of discussion regarding the need for supervision and submission of suggestions and recommendations on business activities carried out by the Board of Directors and committees. As for the holding of internal meetings at least once in 2 (two) months and may hold meetings at any time if deemed necessary by the President Commissioner or other members of the Board of Commissioners. Internal meetings can also be held by a meeting of the Board of Directors or based on the request of 1 (one) or more Shareholders who together represent 1/10 (one tenth) of the total shares with valid voting rights.

Each member of the Board of Commissioners must attend at least once in 2 months of the total number of meetings of the Board of Commissioners. Decisions of meetings of the Board of Commissioners are carried out based on deliberation to reach consensus and in the event that consensus is not reached, the decision is made through the voting method. Matters of the meeting are written into the minutes of the meeting, including in the event of a dissenting opinion, and signed by the chairman of the meeting and well documented.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

The Board of Commissioners held 12 (twelve) meetings throughout 2020 with attendance details as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Ade Wahyu	Komisaris Utama / President Commissioner	5	5	100%
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris / Commissioner	12	12	100%
Heru Wisnu Wibowo*	Komisaris / Commissioner	8	8	100%
Priyo Suprobo	Komisaris Independen / Independent Commissioner	12	12	100%
Indrieffouny Indra*	Komisaris Independen / Independent Commissioner	8	8	100%
Agung Budi Waskito**	Komisaris Utama / President Commissioner	4	4	100%
Bambang Pramujo***	Komisaris Utama / President Commissioner	3	3	100%
Asfiah Mahdiani***	Komisaris Independen / Independent Commissioner	3	3	100%
Yustinus Prastowo***	Komisaris Independen / Independent Commissioner	3	3	100%
Yohanes Baptista Priyatmo Hadi****	Komisaris Independen / Independent Commissioner	3	3	100%

*) Menjabat sejak 26 Maret 2020 berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 32 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / since March 26, 2020 based on the Deed of GMS No. 32 dated March 26, 2020 made before Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta

**) Menjabat sejak 26 Maret 2020 berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 32 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sampai dengan 4 Agustus 2020 berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Served from March 26, 2020 based on the Deed of Minutes of the GMS No. 32 dated March 26, 2020 made before Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta until August 4, 2020 based on the Deed of EGM No. 4 dated August 4, 2020 made before Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.

***) Berhenti menjabat sejak 26 Maret 2020 berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 32 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Stopped serving from March 26, 2020 based on the Deed of Minutes of the GMS No. 32 dated March 26, 2020 made before Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.

****) Berhenti menjabat sejak 4 Agustus 2020 berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Stopped serving from August 4, 2020 based on the Deed of Minutes of EGMS No. 4 dated August 4, 2020 made before Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Agenda rapat dan kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Board of Commissioners Meeting Agenda

Meeting agenda and attendance of the Board of Commissioners in meeting can be seen below:

No.	Nomor Risalah / Minutes Number	Tanggal / Date	Agenda/Pembahasan Rapat / Meeting Discussion/Agenda	Anggota Dewan Komisaris yang Hadir / Attended Members
1	01/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	28 Januari 2020 / January 28, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja Perseroan Konsolidasian dan Perusahaan anak sampai dengan Desember 2019 / Discussion on the Consolidated Performance of the Company and Subsidiaries up to December 2019 Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2019 / Discussion on the 2019 Board of Commissioners Work Plan 	<ul style="list-style-type: none"> Bambang Pramujo Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi Herry Trisaputra Zuna Yustinus Prastowo Asfiah Mahdiani Priyo Suprobo
2	02/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	26 Februari 2020 / February 26, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja Perseroan Konsolidasian dan Perusahaan anak sampai dengan Januari 2020 / Discussion on the Consolidated Performance of the Company and Subsidiaries up to January 2020 Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020 / Discussion on the 2020 Board of Commissioners Work Plan 	<ul style="list-style-type: none"> Bambang Pramujo Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi Herry Trisaputra Zuna Yustinus Prastowo Asfiah Mahdiani Priyo Suprobo
3	03/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	24 Maret 2020 / March 24, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja Perseroan Konsolidasian dan Perusahaan anak sampai dengan Februari 2020 / Discussion on the Consolidated Performance of the Company and Subsidiaries up to February 2020 Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020 / Discussion on the 2020 Board of Commissioners Work Plan Masalah Potensial / Potential Issues Pembahasan Masalah <i>Cashflow</i> dan Mitigasi atas Risiko Program Investasi dan Pendanaan / Discussion on Cashflow Issues and Mitigation of Risk for Investment and Funding Programs Pembahasan Upaya Pencairan Piutang / Discussion of Accounts Receivable Disbursement Efforts Arahan untuk Program Efisiensi / Direction for Efficiency Program Tindak Lanjut Hasil Audit KAP / Follow-up of KAP Audit Hasil Temuan SPI / SPI Findings Tindak Lanjut Hasil Assessment GCG / Follow-up of GCG Assessment 	<ul style="list-style-type: none"> Bambang Pramujo Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi Herry Trisaputra Zuna Yustinus Prastowo Asfiah Mahdiani Priyo Suprobo

No.	Nomor Risalah / Minutes Number	Tanggal / Date	Agenda/Pembahasan Rapat / Meeting Discussion/Agenda	Anggota Dewan Komisaris yang Hadir / Attended Members
4	04/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	27 April 2020 / April 27, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan Dewan Komisaris Hasil RUPST Tahun 2020 serta Anggota Komite Dewan Komisaris / Introduction of the Board of Commissioners as the Results of the 2020 AGMS and Members of the Board of Commissioners Committee 2. Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris dan Penjelasan/ Sosialisasi SOP Dewan Komisaris dan Piagam Dewan Komisaris Tahun 2020 / Distribution of Duties of the Board of Commissioners and Explanation/Dissemination of the SOP for the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Charter for 2020 3. Pembahasan Kinerja Perseroan sampai dengan Maret 2020 / Discussion on the Company's performance until March 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Agung Budi Waskito • Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi • Herry Trisaputra Zuna • Heru Wisnu Wibowo • Indrieffouny Indra • Priyo Suprobo
5	05/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	29 Mei 2020 / May 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja Perseroan sampai dengan April 2020 / Discussion on the Company's performance up to April 2020 2. Pemaparan dan Penjelasan/Sosialisasi SOP Good Corporate Governance Tahun 2020 / Presentation and Explanation/ Dissemination of SOP for Good Corporate Governance in 2020 3. Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020 / Discussion on the 2020 Board of Commissioners Work Plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Agung Budi Waskito • Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi • Herry Trisaputra Zuna • Heru Wisnu Wibowo • Indrieffouny Indra • Priyo Suprobo
6	06/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	29 Juni 2020 / June 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja Perseroan sampai dengan Mei 2020 / Discussion on the Company's performance up to May 2020 2. Pemaparan Review RKAP Tahun 2020 / Presentation of the 2020 RKAP Review 3. Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris sampai dengan September 2020 / Discussion on the Work Plan for the Board of Commissioners up to September 2020 4. Masalah Potensial / Potential Issues 5. Pembahasan Rencana RUPSLB tanggal 4 Agustus 2020 / Discussion on the EGMS Plan on August 4, 2020 6. Rencana Kunjungan Dewan Komisaris dalam rangka Tugas Pengawasan / Planned Visit of the Board of Commissioners for Supervision Duties 	<ul style="list-style-type: none"> • Agung Budi Waskito • Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi • Herry Trisaputra Zuna • Heru Wisnu Wibowo • Indrieffouny Indra • Priyo Suprobo
7	07/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	28 Juli 2020 / July 28, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja Perseroan sampai dengan Juni 2020 / Discussion on the Company's performance up to June 2020 2. Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris sampai dengan September 2020 / Discussion on the Work Plan for the Board of Commissioners up to September 2020 3. Pembahasan Rencana RUPSL tanggal 4 Agustus 2020 / Discussion on the EGMS Plan on August 4, 2020 4. Rencana Revisi RKAP Tahun 2020, RJP dan Kontrak Manajemen / Revised RKAP 2020 Plan, RJP and Management Contract 	<ul style="list-style-type: none"> • Agung Budi Waskito • Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi • Herry Trisaputra Zuna • Heru Wisnu Wibowo • Indrieffouny Indra • Priyo Suprobo
8	08/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	24 Agustus 2020 / August 24, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan Dewan Komisaris dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris dan Organ Komite / Introduction to the Board of Commissioners and the Distribution of Duties of the Board of Commissioners and Committee Organs 2. Pembahasan Kinerja Perseroan sampai dengan Juli 2020 / Discussion on the Company's performance up to July 2020 3. Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris / Discussion on the Work Plan for the Board of Commissioners 4. Realisasi Rencana Kunjungan Dewan Komisaris / Realization of Visit of the Board of Commissioners 	<ul style="list-style-type: none"> • Ade Wahyu • Herry Trisaputra Zuna • Heru Wisnu Wibowo • Indrieffouny Indra • Priyo Suprobo
9	09/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	29 September 2020 / September 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Perseroan sampai dengan Agustus 2020 / The Company's performance up to August 2020 2. Paparan Kinerja Pemasaran / Marketing Performance Exposure 3. Evaluasi Kinerja Pengelolaan Piutang / Accounts Receivable Management Performance Evaluation 4. Pemaparan Perkembangan Perusahaan Anak / Presentation of the Development of the Subsidiary 	<ul style="list-style-type: none"> • Ade Wahyu • Herry Trisaputra Zuna • Heru Wisnu Wibowo • Indrieffouny Indra • Priyo Suprobo
10	10/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	27 Oktober 2020 / October 27, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha dan Rasio Keuangan September 2020 / Evaluation of Business Results Performance and Financial Ratios in September 2020 2. Pembahasan Persiapan RKAP 2021 dan RJP 2020 - 2024 / Discussion on the Preparation for the 2021 RKAP and the RJP for 2020 - 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Ade Wahyu • Herry Trisaputra Zuna • Heru Wisnu Wibowo • Indrieffouny Indra • Priyo Suprobo
11	11/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	19 November 2020 / November 19, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha dan Rasio Keuangan Oktober 2020 / Evaluation of Operating Results Performance and Financial Ratios in October 2020 2. Pembahasan Persiapan RKAP 2021 dan RJP 2020-2024 / Discussion on the Preparation for the 2021 RKAP and the 2020-2024 RJP 3. Fokus terhadap Area of Improvement (AOI) GCG dan Target Pencapaian atas Assessment GCG / Focus on the Area of Improvement (AOI) GCG and Achievement Targets of the GCG Assessment 	<ul style="list-style-type: none"> • Ade Wahyu • Herry Trisaputra Zuna • Heru Wisnu Wibowo • Indrieffouny Indra • Priyo Suprobo
12	12/RIS-KOM/WIKA BETON/2020	16 Desember 2020 / December 16, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Hasil Usaha dan Rasio Keuangan November 2020 / Evaluation of Business Results Performance and Financial Ratios in November 2020 2. Penyusunan RKAP 2021 / 2021 RKAP Preparation 	<ul style="list-style-type: none"> • Ade Wahyu • Herry Trisaputra Zuna • Heru Wisnu Wibowo • Indrieffouny Indra • Priyo Suprobo

Rapat Direksi

Direksi secara rutin menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mendiskusikan pengambilan keputusan penting terkait kegiatan operasional dan bisnis Perseroan serta mengevaluasi pengelolaan Perseroan yang dilakukan secara kolektif kolegial.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Direksi didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat yang mengacu kepada *Board Manual* yang berlaku. Hasil rapat termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Selama tahun 2020, Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 29 kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Hadian Pramudita	Direktur Utama / President Director	29	29	100%
Imam Sudyono	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> & Manajemen Risiko / Director of Finance, Human Capital & Risk Management	29	29	100%
Kuntjara	Direktur Pemasaran & Pengembangan / Director of Marketing & Development	29	29	100%
I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur Operasi & <i>Supply Chain Management</i> / Director of Operation & Supply Chain Management	29	29	100%
Sidiq Purnomo	Direktur Teknik & Produksi / Director of Engineering & Production	29	29	100%
Mursyid*	Direktur <i>Human Capital</i> dan Produksi / Director of Human Capital and Production	15	15	51%

* Berhenti menjabat sejak 08 Juni 2020 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan dikukuhkan dalam Akta Perubahan Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 13 tanggal 12 Agustus 2020 / Stopped serving since June 8, 2020 based on the results of the General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and confirmed in the Deed of Change of Management of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 13 dated August 12, 2020

Agenda Rapat Direksi

Agenda rapat dan kehadiran Direksi dalam rapat dimuat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nomor Risalah / Minutes Number	Tanggal / Date	Agenda/Pembahasan Rapat / Meeting Discussion/Agenda	Anggota Direksi yang Hadir / Attended Members
1	MJ.01.01/WB-0A.0011/2020	07 Januari 2020 / January 07, 2020	Persetujuan perpanjangan dan/atau perubahan perjanjian fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia / Approval of extension and/or change of loan facility agreement from PT Bank DBS Indonesia	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
2	MJ.01.01/WB-0A.0012/2020	17 Januari 2020 / January 17, 2020	Penunjukan Konsultan Hukum guna pengurusan lahan Subang / Appointment of a Legal Consultant to manage the Subang land	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
3	MJ.01.01/WB-0A.0013/2020	17 Januari 2020 / January 17, 2020	Penerapan program <i>Supply Chain Management</i> di Perseroan / Implementation of Supply Chain Management in the Company	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors

Board of Directors Meeting

The Board of Directors routinely holds meetings at least 1 (once) a month to discuss key decisions related to the Company's operational and business activities as well as evaluating the Company's collective collegial management.

The Board of Directors meeting is chaired by the President Director. The meeting of the Board of Directors is valid and has the right to make binding decisions if it is attended by more than ½ (half) of the number of members of the Board of Directors or their authorized representatives. In the event that the President Director is absent or unable to attend, then one of the Directors who is appointed in writing by the President Director will chair the meeting of the Board of Directors.

The decision-making mechanism in the Board of Directors' meeting is based on the principle of deliberation for consensus which refers to the applicable Board Manual. The results of the meeting, including in the event of a dissenting opinion, must be recorded in the minutes of the meeting and signed by the chairman of the meeting and well documented.

The Board of Directors held 29 meetings throughout 2020 with the attendance levels of each member of the Board of Directors as follows:

Board of Directors Meeting Agenda

The agenda for the meeting and attendance of the Board of Directors in the meeting is presented in the following table:

No.	Nomor Risalah / Minutes Number	Tanggal / Date	Agenda/Pembahasan Rapat / Meeting Discussion/Agenda	Anggota Direksi yang Hadir / Attended Members
4	MJ.01.01/WB-0A.0014/2020	17 Januari 2020 / January 17, 2020	a. Review Mingguan Terbatas Direksi; / Closed Weekly Review of the Board of Directors; b. Penjabaran <i>Strategic Plan 2020</i> . / 2020 Strategic Plan Explanation.	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
5	MJ.01.01/WB-0A.0020A/2020	10 Februari 2020 / February 10, 2020	Program Percepatan <i>Collection period</i> dan penyusunan schedule produksi <i>Sleeper</i> dan <i>Slab Track</i> untuk Proyek HSR Jakarta-Bandung / Collection period acceleration program and preparation of <i>Sleeper</i> and <i>Slab Track</i> production schedules for the Jakarta-Bandung HSR Project	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
6	MJ.01.01/WB-0A.0025/2020	16 Maret 2020 / March 16, 2020	Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan / Implementation of Buyback of the Company's Shares	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
7	MJ.01.01/WB-0A.0024/2020	16 Maret 2020 / March 16, 2020	Pembelian Lahan Lampung / Purchase of Land in Lampung	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
8	MJ.01.01/WB-0A.0020B/2020	30 Maret 2020 / March 30, 2020	a. Laporan masing-masing PPU terkait dengan penanganan Covid-19; / Reports of each PPU regarding the handling of Covid-19; b. Target Omzet Kontrak dan Omzet Penjualan Tahun 2020; / Target of Contract Turnover and Sales Turnover in 2020; c. Tindak Lanjut Pengalihan Saham <i>Treasury</i> . / Follow-up of Transfer of <i>Treasury</i> Shares.	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
9	MJ.01.01/WB-0A.0020C/2020	13 April 2020 / April 13, 2020	a. Prognosa Hasil Usaha Skenario Covid-19; / Prognosis of Covid-19 Scenario Business Results; b. Peraturan Kerja di Masa menghadapi PSBB. / Work Regulations in Facing PSBB.	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
10	MJ.01.01/WB-0A.0033/2020	14 April 2020 / April 14, 2020	Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali melalui Program Pelaksanaan Kepemilikan Saham oleh Karyawan, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris (MESOP) / Transfer of Shares from Buyback Proceeds through the Share Ownership Implementation Program by Employees, Board of Directors and/or Board of Commissioners (MESOP)	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
11	MJ.01.01/WB-0A.0033/2020	14 April 2020 / April 14, 2020	Pemberian Jaminan kepada Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya untuk proses pengalihan Saham melalui MESOP / Providing guarantees to the Makmur Wijaya Beton Employee Cooperative for the process of transferring Shares through MESOP	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
12	MJ.01.01/WB-0A.0026/2020	17 April 2020 / April 17, 2020	Pengikatan Fasilitas Pembiayaan dengan PT SMFL Leasing / Financing Facility Agreement with PT SMFL Leasing	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
13	MJ.01.01/WB-0A.0030/2020	04 Mei 2020 / May 04, 2020	Laporan Wilayah Penjualan dan Divisi terkait <i>Roadmap</i> Pencairan Piutang Tahun 2020 / Report on Sales Areas and Divisions related to the 2020 Accounts Receivable Disbursement Roadmap	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
14	MJ.01.01/WB-0A.0030/2020	20 Mei 2020 / May 20, 2020	Rotasi Manajer Biro dan PPU / Rotation of Bureau Manager and PPU	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
15	MJ.01.01/WB-0A.0039/2020	04 Juni 2020 / June 04, 2020	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Tbk. / Extension of Banking Facility Period from PT Bank Mandiri Tbk.	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
16	MJ.01.01/WB-0A.0048/2020	09 Juni 2020 / June 09, 2020	Perubahan Pengurus Anak Perusahaan dan Asosiasi / Changes in Management of Subsidiaries and Associates	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
17	MJ.01.01/WB-0A.0043/2020	15 Juni 2021 2020 / June 15, 2020	Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi / Distribution of Duties and Authorities of the Board of Directors	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
18	MJ.01.01/WB-0A.0057/2020	29 Juni 2020 / June 29, 2020	Pengikatan Fasilitas Perbankan PT Bank Mandiri Tbk. / Binding of Banking Facilities from PT Bank Mandiri Tbk.	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
19	MJ.01.01/WB-0A.0051/2020	30 Juni 2020 / June 30, 2020	Perpanjangan Fasilitas Kredit Perbankan / Extension of Banking Credit Facilities	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
20	MJ.01.01/WB-0A.0052/2020	17 Juli 2020 / July 17, 2020	Pengakhiran Sewa Lahan Makassar / Termination of Land Lease in Makassar	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
21	MJ.01.01/WB-0A.0058/2020	05 Agustus 2020 / August 05, 2020	Penempatan Dana Perseroan pada Program Simpanan Berjangka Tahunan Koperasi Karyawan WIKA / Placement of Company Funds in the WIKA Employee Cooperative Annual Time Savings Program	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
22	MJ.01.01/WB-0A.0059/2020	11 Agustus 2020 / August 11, 2020	Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT WIKA Kraton dan PT Citra Lautan Teduh / Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of PT WIKA Kraton and PT Citra Lautan Teduh	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
23	MJ.01.01/WB-0A.0067/2020	12 Agustus 2020 / August 12, 2020	Pengakhiran Kerja Sama Operasi PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT Semen Indogreen Sentosa (WB - SIS - KSO) / Termination of Operation Cooperation between PT Wijaya Karya Beton Tbk. with PT Semen Indogreen Sentosa (WB - SIS - KSO)	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
24	MJ.01.01/WB-0A.0082/2020	01 September 2020 / September 01, 2020	Perpanjangan Jangka Waktu Pengikatan Modal Kerja Perbankan / Extension of the Working Capital Engagement Period for Banking	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors

No.	Nomor Risalah / Minutes Number	Tanggal / Date	Agenda/Pembahasan Rapat / Meeting Discussion/Agenda	Anggota Direksi yang Hadir / Attended Members
25	MJ.01.01/WB-0A.0066/2020	07 September 2020 / September 07, 2020	Pinjaman Modal Kerja PT BRI Agroniaga Tbk. / Working Capital Loan of PT BRI Agroniaga Tbk.	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
26	MJ.01.01/WB-0A.0083/2020	20 Oktober 2020 / October 20, 2020	Penunjukan Bpk. Imam Sudiyono dalam RUPS RKAP Anak Perusahaan / Appointment of Mr. Imam Sudiyono in the GMS of the Subsidiary's RKAP	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
27	MJ.01.01/WB-0A.0094/2020	17 November 2020 / November 17, 2020	Perpanjangan Perjanjian Kredit dengan MUFG Bank / Extension of the Credit Agreement with MUFG Bank	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
28	MJ.01.01/WB-0A.0098/2020	28 Desember 2020 / December 28, 2020	Penunjukan Penanggung Jawab Biro SCM / Appointment of Person in Charge of the SCM Bureau	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors
29	MJ.01.01/WB-0A.0097/2020	29 Desember 2020 / December 29, 2020	Pengadaan Calon Lahan Kompensasi IPPKH / Procurement of Candidates for IPPKH Compensation Land	Seluruh Direksi hadir / All members of Board of Directors

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara rutin menyelenggarakan rapat gabungan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mendiskusikan sekaligus memperkuat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Selama tahun 2020, Perseroan mengadakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rekapitulasi tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Joint Meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company regularly hold joint meetings at least 1 (once) a month to discuss and at the same time strengthen coordination between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Company held 13 (thirteen) joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2020 with a recapitulation of attendance levels and meeting agendas as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Dewan Komisaris / Board of Commissioners				
Ade Wahyu	Komisaris Utama / President Commissioner	5	5	100%
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris / Commissioner	13	13	100%
Heru Wisnu Wibowo*	Komisaris / Commissioner	9	9	100%
Priyo Suprobo	Komisaris Independen / Independent Commissioner	13	13	100%
Indrieffouny Indra*	Komisaris Independen / Independent Commissioner	9	9	100%
Agung Budi Waskito**	Komisaris Utama / President Commissioner	4	4	100%
Bambang Pramujono***	Komisaris Utama / President Commissioner	3	3	100%
Asfiah Mahdiani***	Komisaris Independen / Independent Commissioner	3	3	100%
Yustinus Prastowo***	Komisaris Independen / Independent Commissioner	3	3	100%
Yohanes Baptista Priyatmo Hadi****	Komisaris Independen / Independent Commissioner	7	7	100%
Direksi / Board of Directors				
Hadian Pramudita	Direktur Utama / President Director	13	13	100%
Imam Sudiyono	Direktur Keuangan, Human Capital & Manajemen Risiko / Director of Finance, Human Capital & Risk Management	13	13	100%
Kuntjara	Direktur Pemasaran & Pengembangan / Director of Marketing & Development	13	13	100%
I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur Operasi & Supply Chain Management / Director of Operation & Supply Chain Management	13	13	100%

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Sidiq Purnomo	Direktur Teknik & Produksi / Director of Engineering & Production	13	13	100%
Mursyid****	Direktur Human Capital dan Produksi / Director of Human Capital and Production	5	5	100%

*) Menjabat sejak 26 Maret 2020 berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 32 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / since March 26, 2020 based on the Deed of GMS No. 32 dated March 26, 2020 made before Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta

**) Menjabat sejak 26 Maret 2020 berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 32 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sampai dengan 4 Agustus 2020 berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Served from March 26, 2020 based on the Deed of Minutes of the GMS No. 32 dated March 26, 2020 made before Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta until August 4, 2020 based on the Deed of EGM No. 4 dated August 4, 2020 made before Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.

***) Berhenti menjabat sejak 26 Maret 2020 berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 32 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Stopped serving from March 26, 2020 based on the Deed of Minutes of the GMS No. 32 dated March 26, 2020 made before Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.

****) Berhenti menjabat sejak 4 Agustus 2020 berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. / Stopped serving from August 4, 2020 based on the Deed of Minutes of EGMS No. 4 dated August 4, 2020 made before Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting Agenda

Agenda rapat dan kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Meeting agenda and attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in meetings are as follows:

No.	Nomor Risalah / Minutes Number	Tanggal / Date	Agenda/Pembahasan Rapat / Meeting Discussion/Agenda	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir / Attended Members
1	01.RIS-KOMDIR/WIKABETON/2020	28 Januari 2020 / January 28, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan Desember 2019 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in December 2019 Kinerja Perseroan Kondolidasian dan Entitas Anak sampai dengan Desember 2019 / Consolidated Performance of the Company and Subsidiaries up to December 2019 Rencana Investasi Tahun 2020 / 2020 Investment Plant 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Bambang Pramujio Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi Herry Trisaputra Zuna Yustinus Prastowo Asfiah Mahdiani Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Mursyid Imam Sudiyono
2	02/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2020	24 Februari 2020 / February 24, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan Januari 2020 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in January 2020 Kinerja Perseroan Konsolidasian dan Entitas Anak sampai dengan Januari 2020 dan Laporan Progres Kinerja per Direktorat sampai dengan Januari 2020 / Consolidated Performance of the Company and Subsidiaries up to January 2020 and Performance Progress Report per Directorate up to January 2020 Hal-hal yang Perlu Mendapat Keputusan / Matters that require decisions 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Bambang Pramujio Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi Herry Trisaputra Zuna Yustinus Prastowo Asfiah Mahdiani Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Mursyid Imam Sudiyono
3	03A/RIS-KOMDIR/WIKA BETON/2020	18 Maret 2020 / March 18, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Rencana Pengalihan Saham Treasury Perseroan / Discussion on the Transfer Plan of the Company's Treasury Shares Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 / Preparation for the Implementation of the 2019 Annual GMS Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan / Matters that require approval 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Bambang Pramujio Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi Herry Trisaputra Zuna Yustinus Prastowo Asfiah Mahdiani Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Mursyid Imam Sudiyono

No.	Nomor Risalah / Minutes Number	Tanggal / Date	Agenda/Pembahasan Rapat / Meeting Discussion/Agenda	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir / Attended Members
4	03/RIS-KOMDIR/ WIKA BETON/2020	24 Maret 2020 / March 24, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan Februari 2020 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in February 2020 Kinerja Perseroan Konsolidasian dan Entitas Anak sampai dengan Februari 2020 dan Laporan Progres Kinerja per Direktorat sampai dengan Februari 2020 / Consolidated Performance of the Company and Subsidiaries up to February 2020 and Performance Progress Report per Directorate up to February 2020 Hal-hal yang perlu mendapat keputusan / Matters that require decisions 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Bambang Pramujio Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi Herry Trisaputra Zuna Yustinus Prastowo Asfiah Mahdiani Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Mursyid Imam Sudiyo
5	04/RIS-KOMDIR/ WIKA BETON/2020	27 April 2020 / April 27, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pengenalan Dewan Komisaris Hasil RUPST Tahun 2020 dan Pemaparan Gambaran Umum serta Rencana Kerja Tahun 2020 dan RJP Tahun 2020-2024 / Introduction of the Board of Commissioners on the Results of the 2020 AGMS and Presentation of the General Description and Work Plan for 2020 and RJP for 2020-2024 Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan Maret 2020 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in March 2020 Kinerja Perseroan Konsolidasian dan Entitas Anak sampai dengan Maret 2020 dan Laporan Progres Kinerja per Direktorat sampai dengan Maret 2020 / Consolidated Performance of the Company and Subsidiaries up to March 2020 and Performance Progress Report per Directorate up to March 2020 Paparan Kinerja Keuangan Maret 2020 dan Dampak Covid-19 / Financial Performance Exposure in March 2020 and the Impact of Covid-19 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Agung Budi Waskito Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi Herry Trisaputra Zuna Heru Wisnu Wibowo Indrieffouny Indra Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Mursyid Imam Sudiyo
6	05/RIS-KOMDIR/ WIKA BETON/2020	29 Mei 2020 / May 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan April 2020 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in April 2020 Kinerja Perseroan sampai dengan April 2020 / Company Performance up to April 2020 Paparan Manajemen Risiko WIKA BETON bulan April 2020 / WIKA BETON Risk Management Exposure in April 2020 Paparan KPI Perusahaan sampai dengan April 2020 / Company KPI exposure up to April 2020 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Agung Budi Waskito Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi Herry Trisaputra Zuna Heru Wisnu Wibowo Indrieffouny Indra Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Mursyid Imam Sudiyo
7	05/RIS-KOMDIR/ WIKA BETON/2020	29 Juni 2020 / June 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan Mei 2020 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in May 2020 Kinerja Perseroan sampai dengan Mei 2020 / Company performance up to May 2020 Review RKAP Tahun 2020 / 2020 RKAP Review Pemaparan Pengembangan Usaha / Business Development Exposure 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Agung Budi Waskito Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi Herry Trisaputra Zuna Heru Wisnu Wibowo Indrieffouny Indra Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Imam Sudiyo
8	07/RIS-KOMDIR/ WIKA BETON/2020	24 Juli 2020 / July 24, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan Juni 2020 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in June 2020 Kinerja Perseroan sampai dengan Juni 2020 / Company performance up to June 2020 Paparan Persiapan RUPSLB tanggal 4 Agustus 2020 / Exposure of the Preparation for EGMS on August 4, 2020 Pemaparan Pengembangan Usaha / Business Development Exposure Penandatanganan Revisi RKAP Tahun 2020, RJP dan Kontrak Manajemen / Signing of the Revised 2020 RKAP, RJP and Management Contract 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Agung Budi Waskito Yohanes Babtistas Priyatmo Hadi Herry Trisaputra Zuna Heru Wisnu Wibowo Indrieffouny Indra Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Imam Sudiyo

No.	Nomor Risalah / Minutes Number	Tanggal / Date	Agenda/Pembahasan Rapat / Meeting Discussion/Agenda	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir / Attended Members
9	08/RIS-KOMDIR/ WIKA BETON/2020	24 Agustus 2020 / August 24, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan Juli 2020 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in July 2020 Kinerja Perseroan sampai dengan Juli 2020 / The Company's performance up to July 2020 Pemaparan Perkembangan Perusahaan Anak / Subsidiary Development Exposure 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Ade Wahyu Herry Trisaputra Zuna Heru Wisnu Wibowo Indrieffouny Indra Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Imam Sudyono
10	09/RIS-KOMDIR/ WIKA BETON/2020	29 September 2020 / September 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan Agustus 2020 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in August 2020 Kinerja Perseroan sampai dengan Agustus 2020 / The Company's performance up to August 2020 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Ade Wahyu Herry Trisaputra Zuna Heru Wisnu Wibowo Indrieffouny Indra Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Imam Sudyono
11	10/RIS-KOMDIR/ WIKA BETON/2020	27 Oktober 2020 / October 27, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan September 2020 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in September 2020 Kinerja Perseroan sampai dengan September 2020 / The Company's performance up to September 2020 Penyusunan RKAP 2021 dan RJP 2020 – 2024 / Preparation of 2021 RKAP and 2020-2024 RJP Evaluasi Biaya Tetap WIKA BETON / Evaluation of WIKA BETON Fixed Costs 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Ade Wahyu Herry Trisaputra Zuna Heru Wisnu Wibowo Indrieffouny Indra Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Imam Sudyono
12	11/RIS-KOMDIR/ WIKA BETON/2020	19 November 2020 / November 19, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan Oktober 2020 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in October 2020 Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan Oktober 2020 dan Prognosa sampai dengan Desember 2020 / The Company's Operating Results Performance up to October 2020 and Prognosis up to December 2020 Pembahasan Persiapan RKAP 2021 / Discussion on the Preparation for the 2021 RKAP 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Ade Wahyu Herry Trisaputra Zuna Heru Wisnu Wibowo Indrieffouny Indra Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Imam Sudyono
13	12/RIS-KOMDIR/ WIKA BETON/2020	16 Desember 2020 / December 16, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi bulan November 2020 / Follow-up to the Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in November 2020 Kinerja Hasil Usaha Perseroan sampai dengan November 2020 / The Company's Operating Results Performance up to November 2020 Penyusunan RKAP 2021 / Preparation of 2021 RKAP 	<p>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> Ade Wahyu Herry Trisaputra Zuna Heru Wisnu Wibowo Indrieffouny Indra Priyo Suprobo <p>Direksi / Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> Hadian Pramudita I Ketut Pasek Senjaya Kuntjara Sidiq Purnomo Imam Sudyono

HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberhasilan penerapan GCG salah satunya bergantung pada hubungan kerja antara organ perusahaan. Demi terjalannya hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugas, mekanisme kerja antar organ perusahaan diatur berlandaskan prinsip kebersamaan, saling menghargai fungsi dan peran masing-masing agar bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi misi Perseroan.

Mekanisme kerja Dewan Komisaris dan Direksi harus diatur agar masing-masing dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan perusahaan sesuai dengan indikator dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN selaku regulator.
2. Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi peningkatan nilai Pemegang Saham.
3. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* lainnya.
4. Terlaksananya sistem dan prosedur kegiatan usaha yang berfungsi sebagai pengendalian dan pengelolaan risiko bagi kontinuitas manajemen perusahaan.

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing dengan efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengurus perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengurusan perusahaan oleh Direksi.
3. Dalam rangka saling menghormati tanggung jawab dan wewenang organ perusahaan lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi memahami tanggung jawab dan wewenang organ perusahaan lainnya.
4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

WORKING RELATIONS BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The successful implementation of GCG depends on the working relationship between company organs. In order to maintain a harmonious relationship in the implementation of duties, the work mechanism between company organs is regulated based on the principle of togetherness, mutual respect for each other's functions and roles to act in accordance with the assigned authority to achieve the Company's vision and mission.

The work mechanism of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be regulated so that each of them can carry out their duties and functions effectively and efficiently. The Board of Commissioners and Board of Directors according to their respective functions have the responsibility to maintain the long-term business continuity of the Company, which is reflected in:

1. Maintained company soundness in accordance with the indicators and criteria set by the Ministry of SOE as the regulator.
2. Achieving reasonable returns for the increase in shareholder value.
3. Protected interests of other stakeholders.
4. The implementation of systems and procedures for business activities that function as control and risk management for the continuity of company management.

The creation of a good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is very important so that each of these organs can work according to their respective responsibilities and authorities effectively and efficiently. In this regard, the Company implements the following principles:

1. The Board of Commissioners respects the responsibility and authority of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association.
2. The Board of Directors respects the responsibility and authority of the Board of Commissioners to supervise and provide advice on company management policies by the Board of Directors.
3. In the context of mutual respect for the responsibilities and authorities of other corporate organs, the Board of Commissioners and Board of Directors shall understand the responsibilities and authorities of other corporate organs.
4. Every working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal institutional relationship, meaning that it must always be based on a standard mechanism or accountable correspondence.

5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 6. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
 7. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai perusahaan telah diberikan kepada Dewan Komisaris secara lengkap dan tepat waktu.
 8. Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris berfungsi sebagai pejabat penghubung antara Direksi dan Dewan Komisaris.
 9. Organ yang membantu Dewan Komisaris pada saat berhubungan kerja dengan organ yang membantu Direksi harus sepengetahuan Dewan Komisaris.
 10. Organ yang membantu Direksi pada saat berhubungan kerja dengan organ yang membantu Dewan Komisaris harus sepengetahuan Direksi.
 11. Apabila diundang, Direksi berkewajiban hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.
5. Any working relationship that is informal in nature can be carried out by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, but cannot be used as a formal policy before going through an accountable mechanism or correspondence.
 6. The Board of Commissioners has the right to obtain access to company information in a timely and complete manner.
 7. The Board of Directors is responsible for ensuring that information regarding the company has been provided to the Board of Commissioners in a complete and timely manner.
 8. The Corporate Secretary and the Secretary of the Board of Commissioners function as liaison officers between the Board of Directors and the Board of Commissioners.
 9. Organs that assist the Board of Commissioners when working with organs that assist the Board of Directors must be informed to the Board of Commissioners.
 10. Organs that assist the Board of Directors when working with organs that assist the Board of Commissioners must be informed to the Board of Directors.
 11. If invited, the Board of Directors is obliged to attend meetings held by the Board of Commissioners.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi berhak memperoleh remunerasi dan kompensasi sebagai timbal balik atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penetapan besaran remunerasi atau insentif Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hak dan kuasa Pemegang Saham yang disahkan dalam RUPS. Adapun kebijakan dan proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang mengatur tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi juga mengacu pada ketentuan yang diatur oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku *holding* Perseroan melalui Surat Keputusan No. WIKA-HCE-PM-08.07 tentang Prosedur Usulan dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi.

REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners and the Board of Directors are entitled to receive remuneration and compensation in return for the implementation of their duties and responsibilities. The determination of the amount of remuneration or incentives for the Board of Commissioners and Board of Directors is the right and authority of the Shareholders which is validated in the GMS. The policies and processes for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company refer to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 which regulates Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises. The procedures for determining the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors also refers to the provisions stipulated by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. as the holding of the Company through Decree No. WIKA-HCE-PM-08.07 concerning Procedures for Proposal and Determination of Remuneration for Board of Directors and Commissioners of Subsidiaries/Associated Companies.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan beberapa indikator terhadap kondisi Perseroan, regulasi dan indikator lainnya yang terjadi selama tahun buku. Selanjutnya, usulan tersebut dikaji dan ditinjau ulang secara mendalam oleh Dewan Komisaris dalam RUPS untuk mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan.



Komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

1. Gaji/Honorarium;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas; dan
4. Tantiem/Insentif Kerja

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, berikut adalah indikator yang digunakan dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi:

1. Usulan dan penetapan Penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - Skala usaha
 - Kompleksitas usaha
 - Tingkat inflasi
 - Kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan
 - Faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Usulan dan penetapan penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif kinerja yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur dan komponen remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

Procedures for Determining Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors

The procedures for determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is recommended by the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners by considering several indicators of the Company's conditions, regulations and other indicators that have occurred during the fiscal year. Subsequently, the proposal is reviewed in depth by the Board of Commissioners at the GMS for approval from the Company's Shareholders.

The components of the income of the Board of Commissioners and the Board of Directors consist of:

1. Salary/Honorarium;
2. Allowances;
3. Facilities; and
4. Work bonuses/incentives

Indicators for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Referring to the Company's Articles of Association, the following indicators are used in determining the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors:

1. Proposal and determination of Income in the form of salary or honorarium, allowances and facilities that are permanent in nature shall be carried out by considering:
 - Business scale
 - Business complexity
 - Inflation rate
 - The condition and financial capacity of the Company
 - Other factors that are relevant and must not conflict with statutory regulations.
2. Proposal and determination of income in the form of bonuses / variable performance incentives shall be carried out by taking into account the company's performance and financial capacity factors, as well as other relevant factors.

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Board of Directors

The structure and components of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2020 fiscal year are as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris / Board of Commissioners Remuneration Structure	Struktur Remunerasi Direksi / Board of Directors Remuneration Structure
Gaji Dewan Komisaris / Board of Commissioners Salary <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama / President Commissioner's Salary is 45% of President Director's Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama / Commissioner's salary is 90% of President Commissioner's 	Gaji Direksi / Board of Directors Salary <ul style="list-style-type: none"> Gaji Direktur Utama sebagai acuan utama / President Director's Salary is the main reference Perhitungan gaji Direktur sebesar 85% dari gaji Direktur Utama / Director's salary is 85% of President Director's
Tunjangan Dewan Komisaris / Board of Commissioners Allowance <ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance Tunjangan Hari Raya / Religious Holiday Allowance Asuransi Purna Jabatan / Post-Service Insurance Tunjangan Pakaian / Clothing Insurance 	Tunjangan Direksi / Board of Directors Allowance <ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Perumahan / Housing Allowance Tunjangan Komunikasi / Communication Allowance Tunjangan Hari Raya / Religious Holiday Allowance Asuransi Purna Jabatan / Post-Service Insurance Tunjangan Pakaian / Clothing Allowance
Fasilitas Dewan Komisaris / Board of Commissioners Facility <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Kesehatan / Health Facility Fasilitas Bantuan Hukum / Legal Aid Facility Fasilitas Perkumpulan Profesi / Profession Association Facility 	Fasilitas Direksi / Board of Directors Facility <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Kendaraan Dinas / Official Vehicle Facility Fasilitas Kesehatan / Health Facility Fasilitas Bantuan Hukum / Legal Aid Facility Fasilitas Perkumpulan Profesi / Profession Association Facility Fasilitas Club Membership / Club Membership Facility
Tantiem Dewan Komisaris / Board of Commissioners Tantiem Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS Tahunan / Is proposed to Shareholders and determined in Annual GMS	Tantiem Direksi / Board of Directors Tantiem Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS Tahunan / Is proposed to Shareholders and determined in Annual GMS
Komponen Lainnya / Other Components Asuransi Jiwa & Cacat Total Tetap dan Kepemilikan Unit Penyertaan Saham (UPS) PT Wijaya Karya Beton Tbk dan Anak Perusahaan WIKA lainnya / Life Insurance & Permanent Disability and Ownership of PT Wijaya Karya Beton Tbk and other WIKA Subsidiaries	Komponen Lainnya / Other Components Asuransi Jiwa & Cacat Total Tetap dan Kepemilikan Unit Penyertaan Saham (UPS) PT Wijaya Karya Beton Tbk dan Anak Perusahaan WIKA lainnya / Life Insurance & Permanent Disability and Ownership of PT Wijaya Karya Beton Tbk and other WIKA Subsidiaries

Berikut adalah rincian jumlah remunerasi Dewan Komisaris Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Remunerasi Dewan Komisaris 3 (Tiga) Tahun Terakhir

(dalam Rp)

Keterangan / Description	2020	2019	2018
Imbalan Jangka Pendek / Short-term Rewards	4.103.775.000	4.392.603.000	4.656.960.000
Imbalan Pasca Kerja / Post-employment Rewards	795.656.250	857.891.250	907.200.000
Jumlah / Total	4.899.431.250	5.250.494.250	5.564.160.000

Berikut adalah rincian jumlah remunerasi Direksi Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Remunerasi Direksi 3 (Tiga) Tahun Terakhir

(dalam Rp)

Keterangan / Description	2020	2019	2018
Imbalan Jangka Pendek / Short-term Rewards	8.539.500.000	10.015.650.000	10.636.500.000
Imbalan Pasca Kerja / Post-employment Rewards	1.640.187.500	1.819.012.500	1.921.500.000
Jumlah / Total	10.179.687.500	11.834.662.500	12.558.000.000

The following is a breakdown of the amount of remuneration for the Board of Commissioners of the Company in the last 3 (three) years:

Remuneration for the Board of Commissioners in the Last 3 (three) Years

(in Rp)

The following is a breakdown of the amount of remuneration for the Board of Directors of the Company in the last 3 (three) years:

Remuneration for the Board of Directors in the Last 3 (three) Years

(in Rp)

Berikut adalah rincian jumlah tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi 3 (Tiga) Tahun Terakhir

(dalam Rp)

Keterangan / Description	2020	2019	2018
Dewan Komisaris / Board of Commissioners	2.757.869.892	2.963.385.800	3.457.231.726
Direksi / Board of Directors	5.847.594.095	6.276.614.700	7.542.768.274
Jumlah / Total	8.605.463.987	9.240.000.500	11.000.000.000

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam memilih serta mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu POJK No. 34 tahun 2014, Peraturan OJK No.034/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi atau perusahaan publik dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang pada prinsipnya mengedepankan aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk mendukung kinerja Perseroan. Dengan memberlakukan kebijakan dalam hal keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang objektif sehingga mampu memberikan nilai tambah terhadap aspek operasional dan bisnis Perseroan, serta dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkup Perseroan.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Nama / Name	Jabatan / Position	Kewarganegaraan / Nationality	Latar Belakang Pendidikan / Educational Background	Pengalaman Kerja / Work History	Keahlian / Skills	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender
Dewan Komisaris / Board of Commissioners							
Ade Wahyu	Komisaris Utama / President Commissioner	Indonesia / Indonesian	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi dari Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta / Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara / Master's Degree in Management from Bina Nusantara University 	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Biro Keuangan dan Human Capital Department Bangunan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2011) / Manager of Finance and Human Capital Bureau of Building Department at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2011) Manajer Biro Keuangan Departemen Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2015) / Finance Department Manager of the Finance Department PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2015) General Manager Departemen Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016) / General Manager of Finance Department of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2016) Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019 – sekarang) / Director of Finance at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2019-present) 	Manajemen Keuangan / Financial Management	46 tahun / 46 years old	Pria / Male

The following is a breakdown of the amount of bonuses for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in the last 3 (three) years:

Tantiem for the Board of Commissioners and Board of Directors for the last 3 (Three) Years

(in Rp)

DIVERSITY IN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In selecting and appointing the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company refers to the prevailing laws and regulations, namely POJK No. 34 of 2014, OJK Regulation No. 034/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee or public companies and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning the Governance Guidelines for Public Companies which in principle put forward the aspects of diversity of expertise, knowledge, and experience to support the Company's performance. The diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is expected to enrich the viewpoints and interests in an objective decision-making process so as to be able to provide added value to the operational and business aspects of the Company, as well as to improve the quality of GCG implementation in the Company.

Table of Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama / Name	Jabatan / Position	Kewarganegaraan / Nationality	Latar Belakang Pendidikan / Educational Background	Pengalaman Kerja / Work History	Keahlian / Skills	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris / Commissioner	Indonesia / Indonesian	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung Magister Manajemen Ekonomi dari Universitas Padjadjaran / Master's Degree in Economic Management from Universitas Padjadjaran Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya dari Institut Teknologi Bandung / Master's Degree in Highway Engineering and System from Institut Teknologi Bandung Doktor di bidang Teknik Sipil dari Universitas Indonesia / Doctoral Degree in Civil Engineering from Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Staff Direktorat Teknik Kementerian Pekerjaan Umum (1995) / Staff of the Directorate of Engineering, Ministry of Public Works (1995) Kepala Sub-Direktorat Pembangunan Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum (2007) / Head of Sub-Directorate of Toll Road Development, Ministry of Public Works (2007) Kepala Divisi Investasi Otoritas Jalan Tol Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum (2011) / Head of the Investment Division of the Indonesian Toll Road Authority, Ministry of Public Works (2011) Kepala Divisi Investasi Otoritas Jalan Tol Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum (2011) / Head of the Investment Division of the Indonesian Toll Road Authority, Ministry of Public Works (2011) Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (2019 –2020) / Director of Policy Formulation and Evaluation, Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing (2019-2020) Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (2020-sekarang) / Director for System Development and Strategy for Implementation of Financing, Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing (2020-present) Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017 –sekarang) / Commissioner of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-present) 	Teknik Sipil / Civil Engineering	52 tahun / 55 years old	Pria / Male
Heru Wisnu Wibowo	Komisaris / Commissioner	Indonesia / Indonesian	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh November / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Institut Sepuluh November Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya Institut Teknologi Bandung / Master's Degree in Highway Engineering and System from Institut Teknologi Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (2016 – 2017) / Head of Subdirectorate of Safety Audit and Inspection, Directorate of Railway Safety (2016 - 2017) Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah II (2017 – 2018) / Head of Subdirectorate of Railway Tracks and Buildings Region II (2017 - 2018) Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat (2018) / Head of the Class I Railway Engineering Center for the West Java Region (2018) Direktur Prasarana BPTJ, Kementerian Perhubungan RI (2018 – 2019) / Director of Infrastructure BPTJ, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (2018 - 2019) Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI (2019 –sekarang) / Director of Railway Infrastructure, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (2019-present) 	Teknik Sipil / Civil Engineering	55 tahun / 55 years old	Pria / Male
Priyo Suprobo	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Indonesia / Indonesian	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya Magister Ilmu Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung / Master's Degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung Doktor Ilmu Teknik Sipil dari Purdue University, Amerika Serikat / Doctoral Degree in Civil Engineering from Purdue University, US Profesor Bidang Rekayasa Struktur dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya / Professor in Structural Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (2007 – 2011) / Rector of Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (2007 - 2011) Ketua Senat Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (2012 – 2015) / Chairman of the Senate of Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (2012 - 2015) Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Tbk (2014 – 2019) / Independent Commissioner of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2014 - 2019) Kepala Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Teknik Sipil (2017 – sekarang) / Head of the Laboratory of Concrete and Building Materials for Civil Engineering (2017 - present) Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Tbk (2019 – sekarang) / Independent Commissioner of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2019 - present) 	Teknik Sipil / Civil Engineering	61 tahun / 61 years old	Pria / Male
Indrieffouny Indra	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Indonesia / Indonesian	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Sriwijaya, Palembang / Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Universitas Sriwijaya, Palembang Magister Manajemen dari Universitas Andalas Padang / Master's Degree in Management from Andalas University, Padang 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Departemen Produksi V PT Semen Padang (2011 – 2015) / Head of Production Department V at PT Semen Padang (2011 - 2015) Kepala Departemen Tambang PT Semen Padang (2015 – 2016) / Head of Mining Department at PT Semen Padang (2015 - 2016) Direktur Produksi PT Semen Padang (2016 – 2017) / Production Director of PT Semen Padang (2016 - 2017) Staf Direktur Produksi PT Semen Padang (2017 – 2018) / Staff of the Production Director of PT Semen Padang (2017 - 2018) 	Teknik Mesin / Mechanical Engineering	53 tahun / 53 years old	Pria / Male

Nama / Name	Jabatan / Position	Kewarganegaraan / Nationality	Latar Belakang Pendidikan / Educational Background	Pengalaman Kerja / Work History	Keahlian / Skills	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender
Direksi / Board of Directors							
Hadian Pramudita	Direktur Utama / President Director	Indonesia / Indonesian	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik dari Universitas Parahyangan Bandung / Bachelor's Degree from Universitas Parahyangan Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Wilayah Penjualan IV di PT Wijaya Karya Beton Tbk (1997 – 2005) / Sales Area IV Manager at PT Wijaya Karya Beton Tbk. (1997 - 2005) Manajer Wilayah Penjualan III di PT Wijaya Karya Beton Tbk (2005 – 2008) / Sales Area III Manager at PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2005 - 2008) Manajer Penjualan PT Wijaya Karya Beton Tbk (2008 – 2012) / Sales Manager of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2008 - 2012) Direktur Pemasaran PT Wijaya Karya Beton Tbk (2012 – 2016) / Marketing Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2012 - 2016) Direktur I di PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016 – 2017) / Director I at PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016 - 2017) Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017 – sekarang) / President Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2017 - present) 	Teknik Sipil / Civil Engineering	59 tahun / 59 years old	Pria / Male
Imam Sudiyono	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> & Manajemen Risiko / Director of Finance, Human Capital & Risk Management	Indonesia / Indonesian	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto / Bachelor's Degree in Economic Management from Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta / Master's Degree in Management from Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Keuangan & SDM PT Wijaya Karya Realty (2009 – 2014) / Director of Finance & HR at PT Wijaya Karya Realty (2009 - 2014) Direktur Properti & Pengembangan PT Wijaya Karya Realty (2014 – 2015) / Director of Property & Development at PT Wijaya Karya Realty (2014 - 2015) Direktur Utama PT Wijaya Karya Realty (2015 – 2017) / President Director of PT Wijaya Karya Realty (2015 - 2017) Direktur Utama Dana Pensiun Wijaya Karya (PPMP) (2017 – 2019) / President Director of Wijaya Karya Pension Fund (PPMP) (2017 - 2019) Direktur Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk (2019 – 2020) / Finance Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2019 - 2020) Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> & Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 – sekarang) / Director of Finance, Human Capital & Risk Management at PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2020 - present) 	Ekonomi Manajemen / Economic Management	57 tahun / 57 years old	Pria / Male
Kuntjara	Direktur Pemasaran & Pengembangan / Director of Marketing & Development	Indonesia / Indonesian	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung Magister Manajemen Pemasaran dari Universitas Diponegoro Semarang / Master's Degree in Marketing Management from Diponegoro University 	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Wilayah Penjualan II di PT Wijaya Karya Beton Tbk (2007 – 2010) / Sales Area II Manager at PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2007 - 2010) Manajer Wilayah Penjualan V di PT Wijaya Karya Beton Tbk (2010 – 2012) / Sales Area V Manager at PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2010 - 2012) Manajer Wilayah Penjualan III di PT Wijaya Karya Beton Tbk (2013 – 2015) / Sales Area III Manager at PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2013 - 2015) PS Manajer Wilayah Penjualan IV di PT Wijaya Karya Beton Tbk (2015 – 2016) / PS Manager for Sales Area IV at PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2015 - 2016) Manajer Penjualan di PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016) / Sales Manager at PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2016) PS Manajer Pemasaran di PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016 – 2017) / PS Marketing Manager at PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2016 - 2017) Direktur Pemasaran PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017 – 2020) / Marketing Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2017 - 2020) Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 – sekarang) / Director of Marketing and Development of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2020 - present) 	Manajemen Pemasaran / Marketing Management	50 tahun / 50 years old	Pria / Male
I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur Operasi & Supply Chain Management / Director of Operation & Supply Chain Management	Indonesia / Indonesian	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada Magister Manajemen dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor / Master's Degree in Management from Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor 	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Divisi Operasi I Departemen Sipil Umum 2 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016 – 2017) / Operations I Division Manager Department of Civil General 2 at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2016 - 2017) General Manager Departemen Pemasaran PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017 – 2018) / General Manager of the Marketing Department of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2017 - 2018) General Manager Departemen Sinergi Bisnis PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2018 – 2019) / General Manager of the Business Synergy Department of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2018 - 2019) Direktur Operasi PT Wijaya Karya Beton Tbk (2019 – 2020) / Operation Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2019 - 2020) Direktur Operasi & Supply Chain Management PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 – sekarang) / Director of Operation & Supply Chain Management at PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 - present) 	Teknik Sipil / Civil Engineering	48 tahun / 48 years old	Pria / Male

Nama / Name	Jabatan / Position	Kewarganegaraan / Nationality	Latar Belakang Pendidikan / Educational Background	Pengalaman Kerja / Work History	Keahlian / Skills	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender
Sidiq Purnomo	Direktur Teknik & Produksi / Director of Engineering & Production	Indonesia / Indonesian	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro Semarang / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Diponegoro University, Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Teknik PT Wijaya Karya Beton Tbk (2014 – 2016) / Engineering Manager of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2014 - 2016) Direktur Teknik dan Sistem Manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016 – 2020) / Director of Engineering and Management Systems at PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2016 - 2020) Direktur Teknik dan Produksi PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 – sekarang) / Technical and Production Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 - present) 	Teknik Sipil / Civil Engineering	48 tahun / 48 years old	Pria / Male

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pengungkapan hubungan afiliasi di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Adapun yang dimaksud dengan hubungan keuangan yaitu hal yang berkaitan dengan utang-piutang, kerja sama bisnis, dan sejenisnya. Sementara yang dimaksud dengan hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat pengungkapan hubungan afiliasi yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

DISCLOSURE OF AFFILIATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Disclosure of affiliation among members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Major/Controlling Shareholders includes family relationships and financial relationships. As for what is meant by financial relations, namely matters relating to debts, business cooperation, and the likes. Meanwhile what is meant by family relationship includes a special relationship, especially due to blood ties such as husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, and so on. In the table below, we can see the disclosure of affiliation which includes:

1. Affiliation between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors;
2. Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Affiliation between members of the Board of Directors and Major and/or Controlling Shareholders;
4. Affiliation between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and
5. Affiliation between members of the Board of Commissioners and the Major and/or Controlling Shareholders.

Tabel Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Table of Affiliations between the Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders

Nama / Name	Hubungan Keluarga dengan / Familial Relations with						Hubungan Keuangan dengan / Financial Relations with					
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Dewan Komisaris / Board of Commissioners												
Ade Wahyu		√		√		√		√		√		√
Herry Trisaputra Zuna		√		√		√		√		√		√
Heru Wisnu Wibowo		√		√		√		√		√		√
Priyo Suprobo		√		√		√		√		√		√
Indrieffouny Indra		√		√		√		√		√		√
Direksi / Board of Directors												
Hadian Pramudita		√		√		√		√		√		√
Imam Sudiyono		√		√		√		√		√		√
Kuntjara		√		√		√		√		√		√
I Ketut Pasek Senjaya Putra		√		√		√		√		√		√
Sidiq Purnomo		√		√		√		√		√		√

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya. Secara rinci dapat dilihat kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi pada tabel berikut:

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors are required to report to the Corporate Secretary regarding their share ownership and/or their families in the Company and other companies, including any changes thereof. In detail, you can see the share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the following table:

Nama / Name	Jabatan / Position	Kepemilikan Saham WIKA BETON / WIKA BETON Share Ownership
Dewan Komisaris / Board of Commissioners		
Ade Wahyu	Komisaris Utama / President Commissioner	2.000.000
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris / Commissioner	40.000
Heru Wisnu Wibowo	Komisaris / Commissioner	-
Priyo Suprobo	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-
Indrieffouny Indra	Komisaris Independen / Independent Commissioner	-
Direksi / Board of Directors		
Hadian Pramudita	Direktur Utama / President Director	16.460.000
Imam Sudiyono	Direktur Keuangan, Human Capital & Manajemen Risiko / Director of Finance, Human Capital & Risk Management	13.644.700
Kuntjara	Direktur Pemasaran & Pengembangan / Director of Marketing & Development	13.737.300
I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur Operasi & Supply Chain Management / Director of Operation & Supply Chain Management	13.256.000
Sidiq Purnomo	Direktur Teknik & Produksi / Director of Engineering & Production	15.440.000

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan pada Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Perseroan, Anggota Dewan Komisaris boleh memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain serta Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Sedangkan Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain, Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain, dan/atau Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Based on the Code of Corporate Governance Implementation Guidelines of the Company, Members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as Members of the Board of Directors for at most 2 (two) Issuers or other Public Companies and Members of the Board of Commissioners for at most 2 (two) Issuers or Other Public Companies. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, the concerned member of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners for a maximum of 4 (four) other Issuers or Public Companies

Meanwhile, Members of the Board of Directors may hold concurrent positions as Members of the Board of Directors for at most 1 (one) Issuer or other Public Company, Members of the Board of Commissioners for at most 3 (three) Issuers or other Public Companies, and/or Committee members for at most 5 (five) a committee in an Issuer or a Public Company where the concerned person also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Concurrent positions for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in 2020 can be seen in the following table:

Nama / Name	Rangkap Jabatan / Concurrent Position	
	Induk/Anak Perusahaan / Parent/Subsidiary	Perusahaan/Instansi Lain / Other Companies/Institutions
Dewan Komisaris / Board of Commissioners		
Ade Wahyu	Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk / Director of Finance at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tidak Ada / None
Herry Trisaputra Zuna	Tidak Ada / None	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan / Director of System Development and Strategy for Implementation of Financing, Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing
Heru Wisnu Wibowo	Tidak Ada / None	Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI. / Director of Railway Infrastructure, Ministry of Transportation, Republic of Indonesia.
Priyo Suprobo	Tidak Ada / None	1. Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. / Professor of the Faculty of Civil Engineering and Planning, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. 2. Kepala Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Teknik Sipil / Head of the Laboratory of Concrete and Building Materials for Civil Engineering
Indrieffouny Indra	Tidak Ada / None	Tidak Ada / None
Direksi / Board of Directors		
Hadian Pramudita	Tidak Ada / None	Tidak Ada / None
Imam Sudiyono	Komisaris Utama PT Wijaya Karya Krakatau Beton / President Commissioner at PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Tidak Ada / None
Kuntjara	Komisaris PT Citra Lautan Teduh / Commissioner at PT Citra Lautan Teduh	Tidak Ada / None
I Ketut Pasek Senjaya Putra	Komisaris PT Wijaya Karya Komponen Beton / Commissioner at PT Wijaya Karya Komponen Beton	Tidak Ada / None
Sidiq Purnomo	Tidak Ada / None	Tidak Ada / None

URAIAN MENGENAI KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris Perseroan dibantu oleh 3 (tiga) komite, yaitu:

1. Komite Audit dan Risiko Usaha
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite GCG

Keberadaan ketiga komite tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan operasional Perseroan.

DESCRIPTION ON COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its supervisory function, the Company's Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees, namely:

1. Audit and Business Risk Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. GCG Committee

The existence of these three committees is in accordance with the applicable regulations and aims to improve the implementation of GCG principles in the Company's operational activities.

KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA

Komite Audit dan Risiko Usaha merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, implementasi GCG, manajemen risiko usaha, dan proses pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di Perseroan. Komite Audit dan Risiko Usaha bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun pelaporan.

Pembentukan Komite Audit dan Risiko Usaha mengacu pada ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Pada penerapannya, Komite Audit dan Risiko Usaha senantiasa memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dan operasional Perseroan telah berjalan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku di Perseroan.

Komposisi Komite Audit dan Risiko Usaha

Masa jabatan keanggotaan Komite Audit dan Risiko Usaha Perseroan paling lama adalah 5 (lima) tahun, namun dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketua Komite Audit dan Risiko Usaha ditunjuk dan ditugaskan oleh Komisaris Utama dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota ahli yang memiliki keahlian serta berpengalaman di bidang keuangan/akuntansi dan manajemen/industri beton. Mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK.07/DK-WB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020, susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2020 terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota yang memiliki kompetensi dan integritas di bidangnya. Di bawah ini adalah susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Bidang Keahlian / Expertise	Periode Jabatan / Term of Office
Priyo Suprobo	Ketua merangkap Anggota Audit dan Risiko Usaha / Chairman cum Member of Audit and Business Risk Committee	SK.07/DK-WB/V/2020	Teknik Sipil / Civil Engineering	5 tahun / 5 years
Indrieffouny Indra	Anggota Audit dan Risiko Usaha / Audit and Business Risk Committee Member	SK.07/DK-WB/V/2020	Manajemen / Management	5 tahun / 5 years
Gunarto	Anggota Audit dan Risiko Usaha / Audit and Business Risk Committee Member	SK.07/DK-WB/V/2020	Ekonomi Akuntansi / Accounting Economics	2 tahun / 2 years

Profil Komite Audit dan Risiko Usaha

Priyo Suprobo Ketua Komite Audit dan Risiko Usaha / Chairman of Audit and Business Risk Committee	Profil Bapak Priyo Suprobo telah disajikan dan dibahas pada bab Profil Perusahaan, bagian Profil Dewan Komisaris. / Profile of Mr. Priyo Suprobo has been presented and discussed in the Company Profile chapter, the Profile of the Board of Commissioners section.
Indrieffouny Indra Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha / Audit and Business Risk Committee Member	Profil Bapak Indrieffouny Indra telah disajikan dan dibahas pada bab Profil Perusahaan, bagian Profil Dewan Komisaris. / Profile of Mr. Indrieffouny Indra has been presented and discussed in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners Profile section.

AUDIT AND BUSINESS RISK COMMITTEE

The Audit and Business Risk Committee is a committee under the Board of Commissioners that was established to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function over the financial reporting process, internal control system, audit process, GCG implementation, business risk management, and the process of monitoring compliance with laws and regulations in the Company. The Audit and Business Risk Committee is independent, both in carrying out duties and reporting.

The establishment of the Audit and Business Risk Committee refers to POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Implementation of the Audit Committee's Work. In practice, the Audit and Business Risk Committee always ensures that all business activities and operations of the Company are carried out in accordance with sound business practices in accordance with the prevailing laws and GCG principles in the Company.

Composition of Audit and Business Risk Committee

The term of office of the Audit and Business Risk Committee is no longer than 5 (five) years, but can be re-appointed for one next term. The Chairman of the Audit and Business Risk Committee is appointed and assigned by the President Commissioner and assisted by at least 1 (one) expert member who has expertise and experience in finance/accounting and management/concrete industry. Referring to the Decree of the Company's Board of Commissioners No. SK.07/DK-WB/V/2020 dated May 5, 2020, the composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2020 consists of 1 (one) chairman and 2 (two) members who have competence and integrity in their respective fields. Below is the composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2020:



Gunarto

Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha / Audit and Business Risk Committee Member

Kewarganegaraan	: Indonesia	Nationality	: Indonesian
Tempat & Tanggal Lahir	: Magetan, 8 Januari 1970	Place & Date of Birth	: Magetan, January 8, 1970
Usia	: Berusia 50 tahun per 31 Desember 2020	Age	: 50 years old as of December 31, 2020
Domisili	: Bogor	Domicile	: Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha Perseroan sejak tanggal 20 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.05/DK-WB/VI/2019 dan diperbarui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.03/DK-WB/IV/2018 dan diperbarui berdasarkan SK.07/DK-WB/V/2020.		
Latar Belakang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Merdeka Malang (1995) • PPAK Universitas Trisakti (2009) 		
Pengalaman Kerja	Bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori, Sugiarto & Rekan (1996-sekarang).		
Jabatan Rangkap	Selain menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Partner KAP HLB Hadori, Sugiarto & Rekan.		
Hubungan Afiliasi	Tidak Ada		
Legal Basis of Appointment	Appointed as a Member of the Audit and Business Risk Committee of the Company since June 20, 2019 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk. No: SK.05/DK-WB/VI/2019 and was updated with the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk. No: SK.03/DK-WB/IV/2018 and was updated based on SK.07/DK-WB/V/2020.		
Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor's Degree in Accounting Economics from Universitas Merdeka Malang (1995) • PPAK Universitas Trisakti (2009) 		
Work Experience	He worked at the Public Accounting Firm (KAP) Hadori, Sugiarto & Rekan (1996-present).		
Concurrent Position	In addition to serving as a member of the Company's Audit and Business Risk Committee, he also serves as a Partner of KAP HLB Hadori, Sugiarto & Rekan.		
Affiliations	None		

Kualifikasi Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha

Kualifikasi atau persyaratan keanggotaan Komite Audit dan Risiko Usaha Perseroan mengacu pada ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015, yaitu:

1. Berintegritas tinggi dan memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami isi laporan keuangan, siklus bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit dan Risiko Usaha yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;

Qualification of Audit and Business Risk Committee Member

The qualifications or requirements for membership for the Company's Audit and Business Risk Committee refer to the provisions of POJK No. 55/POJK.04/2015 namely:

1. Have high integrity and possesses the competence, knowledge, experience according to their field of work as well as able to communicate well;
2. Must understand Financial statements, the Company's business cycle especially relating to the services or entity or Public Company's business activities, audit process, risk management and legislations in Stock Market and other regulations;
3. Must comply to the Audit and Business Risk committee code of conduct that the entity or public company has set;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Bersedia untuk meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan dengan mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan; 5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan; 6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; kecuali Komisaris Independen; 8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik; 9. Dalam hal anggota Komite Audit dan Risiko Usaha memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut; 10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan 11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Willing to improve upon his/her competence by participating in various trainings and education; 5. Must have at least 1 (one) member with educational background and has expertise in accounting and finance; 6. Is not someone who works in a Public Accounting Firm, Law Consulting Office, Public Appraisal Service Office, or other parties that provide insurance, non-insurance service, appraisal and/or other consultancy to related entity or public company in the last 6 (six) months; 7. Is not someone who works or has authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the entity or public company in the last 6 (six) months, except for Independent Commissioner; 8. Has no direct or indirect shares in the entity or public company; 9. In the event that the member of Audit and Business Risk Committee gaining shares of the entity or public company both directly or indirectly as a result of a legal event, those shares must be transferred to other parties the latest by 6 (six) months after the shares are given; 10. Has no affiliations with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or main shareholders of the entity or public company; and 11. Has no business relations both directly or indirectly relating to the business activities of the entity or public company. |
|---|---|

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit dan Risiko Usaha

Komite Audit dan Risiko Usaha mempunyai tugas dan bertanggung jawab memberikan pendapat terkait kegiatan pelaporan kegiatan bisnis dan operasional atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara objektif dan independen.

Untuk membatu pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi yang efektif, Komite Audit dan Risiko Usaha memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Meninjau kredibilitas dan objektivitas Laporan Keuangan Perseroan
2. Meninjau implementasi GCG di Perseroan, antara lain:
 - a. Dalam hal kepatuhan Perseroan terhadap peraturan – peraturan terkait serta etika bisnis Perseroan
 - b. Optimalisasi fungsi Audit Internal dan memastikan independensi Auditor Eksternal dalam melaksanakan tugasnya
3. Pengawasan dan pengendalian Perseroan, meliputi:
 - a. Meninjau implementasi proses pengawasan internal dan pekerjaan Auditor Eksternal dalam mengaudit laporan Perseroan

Duties and Responsibilities of Audit and Business Risk Committee

The Audit and Business Risk Committee has the duties and responsibilities to provide opinions regarding business and operational reporting activities or several matters submitted by the Directors to the Board of Commissioners in an objective and independent manner.

To assist the effective implementation of the Board of Commissioners' supervision to the Board of Directors, the Audit Committee and Business Risk has the following scope of duties and responsibilities, among others:

1. Review the credibility and objectivity of the Company's Financial Statements;
2. Review GCG implementation in the Company:
 - a. In the Company's compliance to related regulations and the Company's business ethics
 - b. In optimizing internal audit function and ensuring the independence of external auditor in performing their duties.
3. Company supervision and control, including:
 - a. Reviewing the implementation of internal supervisory process and external auditor in performing their duties.

- b. Memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan efektifitas tugas baik Internal dan Eksternal Auditor
 - c. Memberi rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian dan implementasinya
 - d. Memberi masukan secara profesional dan Independen atas hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan/atau yang dapat membantu pengambilan keputusan Dewan Komisaris
4. Pengawasan terhadap setiap perencanaan keuangan dan risiko usaha, sebagai berikut:
- a. Melakukan penelaahan atas Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).
 - b. Mengenali dan mewaspadai potensi risiko usaha, serta mengusulkan perbaikan perencanaan keuangan untuk mengurangi risiko tersebut.
 - c. Mengenali setiap kendala yang dihadapi oleh Direksi agar dapat segera di bahas oleh Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk implementasi *early warning system*.
- b. Ensuring the effectiveness of the internal control system and performance of duties both for internal and external auditors.
 - c. Providing recommendation on the improvement of control system and its implementation.
 - d. Providing professional and independent advice on matters that need to be paid attention to and/or may help in the decision making of the Board of Commissioners.
4. Supervise Financial Planning and Business Risk, as follows:
- a. Conduct a study on the Long-term Plan (RJP) and Company Budget Plan (RKAP).
 - b. Identify and be aware of the potential for business risks, as well as suggest improvements in financial planning to mitigate those risks.
 - c. Identify all the obstacles faced by the Board of Directors and discuss immediately with the Board of Commissioners as one of the forms of early warning system implementation.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit dan Risiko Usaha

Pada penerapannya, setiap anggota Komite Audit dan Risiko Usaha Perseroan telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Distribution of Duties and Responsibilities of Audit and Business Risk Committee

In its implementation, all members of the Company's Audit and Business Risk Committee has their own duties and responsibilities, as can be seen in the table below:

Nama / Name	Jabatan / Position	Tugas Pokok / Main Duties
Priyo Suprobo	Ketua / Chairman	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa rencana dan program kerja serta anggaran yang dibutuhkan telah tersusun dengan baik. / Ensuring the work plans and programs as well as the budget needed have been well prepared. Mengkoordinasikan kinerja Komite Audit dan Risiko Usaha. / Coordinating the performance of Audit Committee and Business Risk.
Indrieffouny Indra	Anggota / Member	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun rencana dan program kerja Komite Audit dan Risiko Bisnis serta rencana kebutuhan anggaran Komite Audit dan Risiko Bisnis. / Arranging the work plan and programs of Audit and Business Risk Committee as well as their budget needed. Melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi pengendalian internal Perseroan pada laporan keuangan lainnya, termasuk evaluasi atas efektivitas pengawasan dan keamanan dari sisi teknologi informasi yang digunakan. / Evaluating the implementation effectiveness of the Company's internal control in other financial statements, and evaluating the supervisory and security effectiveness from the Information used. Menelaah ruang lingkup dan kajian audit internal atas laporan keuangan serta memperoleh daftar temuan dan rekomendasi termasuk tanggapan dari pihak manajemen. / Reviewing the scope and analysis of Internal Audit on the financial statements as well as obtaining findings and making a list of recommendation including response from management. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas Satuan Pengawas Internal (SPI) Perseroan. / Evaluating the effectiveness of the Company's Internal Supervisory Unit (SPI) Melakukan evaluasi atas penyajian Laporan Keuangan Internal, baik triwulanan dan tahunan. / Evaluating the presentation of quarterly and yearly internal financial statements Melakukan evaluasi dan <i>monitoring</i> terhadap pelaksanaan tugas Auditor Independen. / Evaluating and monitoring the duties implementation of Independent Auditor Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan komite kepada Dewan Komisaris. / Providing accountability report in the implementation of committee activities to the Board of Commissioners.

Nama / Name	Jabatan / Position	Tugas Pokok / Main Duties
Gunarto	Anggota / Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana, target, dan program kerja serta anggaran yang dibutuhkan oleh Komite Risiko Usaha. / Arranging plans, targets, and work programs and budgets needed by the Business Risk Committee. 2. Melakukan evaluasi atas kewajaran dan prospek realisasi setiap rencana proyek, pengembangan usaha, kegiatan investasi, pendirian anak perusahaan, unit usaha/ bisnis lain yang diusulkan kepada Dewan Komisaris. / Evaluating the reasonableness and prospects for each project plan, business development, investment activities, establishment of a subsidiary, other business units/businesses before proposed to the Board of Commissioners. 3. Melakukan kajian mengenai potensi risiko yang mungkin muncul di setiap pelaksanaan proyek, pengembangan usaha, kegiatan investasi, pendirian anak Perusahaan, unit usaha/bisnis lain yang diusulkan kepada Dewan Komisaris. / Conducting a review of the potential risks that may arise in every project implementation, business development, investment activities, establishment of a subsidiary, other business units/businesses before proposed to the Board of Commissioners. 4. Menindaklanjuti seluruh informasi baik yang berasal dari internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Perusahaan dan keberlangsungan kegiatan operasional Perusahaan. / Following up all information both internal and external that effects to the Company's financial condition and the sustainability of operations. 5. Mengevaluasi implementasi prosedur dan sistem manajemen risiko di setiap direktorat, departemen & divisi. / Evaluating the implementation of procedures and risk management systems in each directorate, department & division. 6. Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Komite kepada Dewan Komisaris. / Providing reports on the implementation of the Committees activities to the Board of Commissioners.

Piagam dan Pedoman Komite Audit dan Risiko Usaha

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, wewenang, serta fungsi Komite Audit dan Risiko Usaha berpedoman pada Piagam Komite Audit yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.02/DK-WB/IV/2020 tanggal 1 April 2020. Piagam tersebut mengatur hal-hal mengenai Definisi Komite Audit dan Risiko Usaha, Persyaratan Keanggotaan, Struktur dan Risiko Usaha, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang dan Rapat Komite Audit dan Risiko Usaha serta Tanggung Jawab Pelaporan dan Masa Tugas.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit dan Risiko Usaha juga perlu menyusun Rencana Kerja sebagai panduan dalam melakukan pengawasan yang faktual terhadap proses pelaporan keuangan Perseroan, *monitoring* dan mengevaluasi proses pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dan auditor internal.

Struktur dan Kedudukan Komite Audit dan Risiko Usaha

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam *Board Manual* Dewan Komisaris SK.01.01/WVB-0A.0037/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Komite Audit dan Risiko Usaha Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan diketuai oleh Komisaris Independen. Kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit dan Risiko Usaha serta hubungan kelembagaan antara Komite Audit dan Risiko Usaha dengan Internal Audit, Komite Audit dengan Direksi dan Komite Audit dengan Auditor Eksternal telah tertuang di dalam Piagam Komite Audit yang telah ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Independensi Komite Audit dan Risiko Usaha

Seluruh anggota Komite Audit dan Risiko Usaha Perseroan merupakan pihak independen yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan

Charter and Guidelines of Audit and Business Risk Committee

The implementation of duties and responsibilities, authorities, and functions of the Audit and Business Risk Committee refers the Audit Committee Charter which was established based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tb. No: SK.02/DK-WB/IV/2020 dated April 1, 2020. The Charter regulates matters regarding the Definition of the Audit Committee and Business Risk, Membership Requirements, Business Structure and Risk, Duties and Responsibilities, Authorities and Meetings of the Audit Committee and Business Risk as well as Reporting Responsibilities and Term of Service.

To maximize the implementation of its duties and responsibilities, the Audit and Business Risk Committee also needs to prepare a Work Plan as a guide in carrying out factual supervision of the Company's financial reporting process, monitoring and evaluating the audit implementation process by external auditors and internal auditors.

Structure and Position of Audit and Business Risk Committee

As has been stipulated in the Board of Commissioners charter SK.01.01/WVB-0A.0037/2019 on October 18, 2019, the Company's Audit Committee is appointed by the Board of Commissioners and is chaired by the Independent Commissioner. The position, duties and responsibilities of the Audit Committee as well as the institutional relations between the Audit Committee with Internal Audit, Audit Committee with the Board of Directors and Audit Committee with the External Auditor has been stated in the Audit Committee Charter that has been signed by the President Commissioner and President Director.

Independency of Audit and Business Risk Committee

All members of the Audit and Business Risk Committee are independent parties from outside of the Company and has no financial and/or familial relationship both with the Main

keluarga baik dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris maupun Direksi, serta telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Shareholders, Board of Commissioners as well as the Board of Directors, and have complied with the requirements set in the Financial Services Authority Regulations No.55/POJK.04/2015 on The Audit Committee Formation and Implementation Guidelines.

Aspek Independensi / Independence Aspect	Priyo Suprobo	Indrieffouny Indra	Gunarto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi / Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. / Has no management relationship in the Company, subsidiary, or affiliations.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan / Has no share ownership relationship in the Company	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan sesama anggota Komite Audit dan Risiko Usaha / Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and fellow members of the Audit and Business Risk Committee	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau pejabat Pemerintah. / Does not serve as administrators of political parties and/or government officials.	√	√	√

Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Audit dan Risiko Usaha

Komite Audit dan Risiko Usaha Perseroan secara berkala menyelenggarakan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris sebagaimana telah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Secara teknis, rapat Komite Audit dan Risiko Usaha Perseroan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit dan Risiko Usaha. Sementara keputusan rapat Komite Audit dan Risiko Usaha diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan sifat keputusan rapat sah serta mengikat.

Frequency and Agenda of Audit and Business Risk Committee

The Audit and Business Risk Committee of the Company periodically holds internal meetings at least 1 (once) in 3 (three) months or at least the same as the minimum requirements for the meeting of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association of the Company. Technically, the meeting of the Audit and Business Risk Committee of the Company can be held if attended by more than 1/2 (half) of the members of the Audit and Business Risk Committee. Meanwhile the decisions of the Audit and Business Risk Committee meetings are made based on deliberation to reach a consensus with the nature of the meeting decisions being valid and binding.

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit dan Risiko Usaha telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat sebagaimana dapat dilihat uraiannya pada tabel di bawah ini:

Throughout 2020, the Audit and Business Risk Committee held 4 (four) meetings as can be seen in the descriptions in the table below:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Priyo Suprobo*	Ketua Komite Audit dan Risiko Usaha / Chairman of Audit and Business Risk Committee	4	4	100%
Indrieffouny Indra*	Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha / Audit and Business Risk Committee Member	4	4	100%
Gunarto	Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha / Audit and Business Risk Committee Member	4	4	100%

*) Bergabung di Komite Audit dan Risiko Usaha sejak 5 Mei 2020. / Joined Audit and Business Risk Committee since May 5, 2020.

Agenda Rapat Komite Audit dan Risiko Usaha

Audit and Business Risk Committee Meeting Agenda

Tanggal / Date	Agenda / Agenda	Komite Audit dan Risiko Usaha yang Hadir / Attended Audit and Business Risk Member
18 Mei 2020 / May 18, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Paparan Kinerja sampai dengan April 2020 dan Dampak Covid-19 di Wilayah Penjualan V dan PPB Pasuruan. / Exposure to Performance up to April 2020 and the Impact of Covid-19 in Sales Area V and PPB Pasuruan. Hasil Audit SPI dan Kinerja SPI sampai dengan April 2020 / SPI Audit Results and SPI Performance up to April 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Priyo Suprobo Indrieffouny Indra Gunarto

Tanggal / Date	Agenda / Agenda	Komite Audit dan Risiko Usaha yang Hadir / Attended Audit and Business Risk Member
6 Juni 2020 / June 6, 2020	1. Hasil Audit SPI dan Kinerja SPI sampai dengan Mei 2020 / SPI Audit Results and SPI Performance up to May 2020 2. Rencana Audit sampai dengan Desember 2020 / Audit Plan up to December 2020 3. Rencana Audit Proyek A.P. Pettarani / Audit Plan on A.P. Pettarani Project	<ul style="list-style-type: none"> • Priyo Suprobo • Indrieffouny Indra • Gunarto
18 Oktober 2020 / October 18, 2020	1. Hasil Audit SPI dan Kinerja SPI sampai dengan September 2020 / SPI Audit Results and SPI Performance up to September 2020 2. Rencana Audit sampai dengan Desember 2020 / Audit Plan up to December 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Priyo Suprobo • Indrieffouny Indra • Gunarto
30 Desember 2020 / December 30, 2020	1. Hasil Audit SPI dan Kinerja SPI sampai dengan Desember 2020 / SPI Audit Results and SPI Performance up to December 2020 2. Rencana Audit Tahun 2021 / Audit Plan for 2021 3. Kajian Tim Penghapusan Aset Tetap / Review of Fixed Asset Elimination Team	<ul style="list-style-type: none"> • Priyo Suprobo • Indrieffouny Indra • Gunarto

Pengembangan Kompetensi Komite Audit dan Risiko Usaha Tahun 2020

Perseroan membekali pengetahuan dan kompetensi Komite Audit dan Risiko Usaha melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Informasi mengenai program pelatihan dan pendidikan Komite Audit dan Risiko Usaha telah disajikan dalam Laporan Tahunan, bab Profil Perusahaan, sub bab Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit dan Risiko Usaha Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugasnya, kegiatan Komite Audit pada tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perseroan di tahun 2020 telah melakukan aktivitas pengendalian internal, menyajikan temuan/catatan pemeriksaan yang telah dilaporkan sebagai salah satu dasar bagi Manajemen untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga memungkinkan Manajemen menjalankan kegiatan operasional Perseroan secara efektif dan efisien.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, SPI senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal di semua level organisasi. Selain itu, SPI juga mengawasi penerapan kebijakan, prosedur, pengawasan internal serta manajemen risiko agar senantiasa sesuai dengan SOP yang berlaku. Seluruh pelaporan hasil Audit setelah disampaikan kepada Direktur utama, untuk diteruskan kepada Komite Audit.

Pencapaian KPI Komite Audit dan Risiko Usaha

Penilaian KPI Komite Audit dan Risiko Usaha dilakukan dengan berpedoman pada KPI Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris 2020. Hasil penilaian KPI Komite Audit dan Risiko Usaha, antara lain:

Competence Development for Audit and Business Risk Committee in 2020

The Company provides the knowledge and competence of the Audit and Business Risk Committee through participation in training and education, both organized formally and informally. Information regarding training and education programs for the Audit and Business Risk Committee has been presented in this Annual Report on the Company Profile chapter, the Training and/or Education of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit section.

Audit and Business Risk Committee Activities Report in 2020

In performing their duties, the Audit Committee activities in 2020 fiscal year are as follows:

1. The Company's Internal Supervisory Unit in 2020 has conducted internal control activities, presenting the findings/examination notes that have been reported as one of the bases for Management to determine the improvements and ways to perfect them in order for Management to run the Company's operations effectively and efficiently.
2. In implementing its duties, SPI continually made evaluations on the effectiveness of internal control in all levels of organization. Furthermore, SPI also monitors policy, procedure, implementation of internal supervision implementation as well as risk management in order for everything to be according to the prevailing SOP. All reporting of Audit results after being submitted to the President Commissioner must be forwarded to the Audit Committee.

KPI Achievement of Audit and Business Risk Committee

KPI Assessment of the Audit and Business Risk Committee was carried out based on the KPI 2020 stipulated in the Board of Commissioners' 2020 Work Plan. The KPI assessment results of Audit Committee and Business Risk, including:

No.	Indikator / Indicator	Bobot Indikator / Indicator Value	Realisasi / Realization	Pencapaian / Achievement
I	Review terhadap target kinerja hasil usaha RKAP tahun 2020 terhadap pencapaian realisasi. / Review on the operating results of the Company's Budget Plan 2020 against the achievement of its realization	Dilaksanakan / Implemented	Dilaksanakan / Implemented	100%

No.	Indikator / Indicator	Bobot Indikator / Indicator Value	Realisasi / Realization	Pencapaian / Achievement
2	Review terhadap proses pelaksanaan Investasi (Realisasi CAPEX) / Review on the Investment implementation process (CAPEX Realization)	Dilaksanakan / Implemented	Dilaksanakan / Implemented	100%
3	Review terhadap kinerja persediaan, Piutang Usaha, Piutang Retensi, HAD / Review on the performance of inventory, Accounts Receivable, Retention Receivables, HAD	Dilaksanakan / Implemented	Dilaksanakan / Implemented	100%
4	Review terhadap Hasil Temuan Pemeriksaan SPI dan kepatuhan oleh KAP / Review on Findings from Internal Audit Unit and compliance by Public Accounting Firm	Dilaksanakan / Implemented	Dilaksanakan / Implemented	100%
Pencapaian Rata-rata / Average Achievement				100%

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sebagaimana diatur di dalam POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.09/DK-WB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Pengangkatan Organ Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wijaya Karya Beton Tbk. yang bertujuan untuk mendukung transparansi di dalam proses nominasi dan remunerasi. Pada penerapannya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki sejumlah fungsi dan peranan, antara lain:

1. Menentukan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Mengusulkan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali asalkan periodenya tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. SK.09/DK-WB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Pengangkatan Organ Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wijaya Karya Beton Tbk., susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan/ Basis of Appointment	Keahlian / Expertise	Periode Jabatan / Term of Office
Indrieffouny Indra	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Chairman cum Member of Nomination and Remuneration Committee	SK Dewan Komisaris No. SK.09/DK-WB/V/2020	Manajemen / Management	5 tahun / 5 years
Priyo Suprobo	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member	SK Dewan Komisaris No. SK.09/DK-WB/V/2020	Teknik Sipil / Civil Engineering	5 tahun / 5 years
Manajer Human Capital Perseroan	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member	SK Dewan Komisaris No. SK.09/DK-WB/V/2020	Pengelolaan Sumber Daya Manusia / Human Resources Management	2 tahun / 2 years

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

As regulated by POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuers and Public Company, the Board of Commissioners established Nomination and Remuneration committee through the Decision Letter of the Board of Commissioners No. SK.01/DK-WB/IV/2019 dated April 29, 2019 concerning the Organ Appointment of Nomination and Remuneration Committee of PT Wijaya Karya Beton Tbk, which has a purpose to boost transparency process of Nomination and remuneration. In its implementation, Nomination and Remuneration Committee has functions and roles, among others:

1. Determining the criteria for Board of Commissioners and Board of Directors candidate;
2. Determining the policy related to remuneration system of Board of Commissioners & Board of Directors;
3. Preparing candidates for Board of Commissioner & Board of Directors;
4. Suggesting the amount of remuneration for Board of Commissioners & Board of Directors.

Nomination and Remuneration Committee Composition

Members of the Nomination & Remuneration Committee are appointed for a certain term of office and can be reappointed as long as the period is no longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association of the Company. In accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. SK.09/DK-WB/V/2020 dated May 5, 2020 concerning the Appointment of the Nomination and Remuneration Committee Organ of PT Wijaya Karya Beton Tbk., The membership composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2020 is as follows:

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Profile

<p>Indrieffouny Indra Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Chairman cum Member of Nomination and Remuneration Committee</p>	<p>Profil Bapak Indrieffouny Indra telah disajikan dan dibahas pada bab Profil Perusahaan, bagian Profil Dewan Komisaris. / The profile of Mr. Indrieffouny Indra has been presented and discussed in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners Profile section.</p>
<p>Priyo Suprobo Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member</p>	<p>Profil Bapak Priyo Suprobo telah disajikan dan dibahas pada bab Profil Perusahaan, bagian Profil Dewan Komisaris. / The profile of Mr. Priyo Suprobo has been presented and discussed in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners Profile section.</p>



Agung Damiar

(Manajer Human Capital) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / (Human Capital Manager) Nomination and Remuneration Committee Member

<p>Kewarganegaraan : Indonesia Tempat & Tanggal Lahir : Bandung, 1 April 1966 Usia : Berusia 55 tahun per 31 Desember 2020 Domisili : Bogor</p>	<p>Nationality : Indonesian Place & Date of Birth : Bandung, April 1, 1966 Age : 55 years old as of December 31, 2020 Domicile : Bogor</p>
<p>Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK.01.01/WB-0A.20B/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang diperbarui berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK.09/DK-WB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.</p>	<p>Legal Basis of Appointment Appointed as a Member of the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK.01.01/WB-0A.20B/2015 dated January 27, 2015 which was renewed based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK.09/DK-WB/V/2020 dated May 5, 2020</p>
<p>Masa Jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak 26 Maret 2020.</p>	<p>Term of Office 2 (two) years since March 26, 2020.</p>
<p>Latar Belakang Pendidikan Sarjana Teknik Industri dari Universitas Muhammadiyah Cirebon (2008).</p>	<p>Educational Background Bachelor's Degree in Industrial Engineering from Universitas Muhammadiyah Cirebon (2008).</p>
<p>Pengalaman Kerja Sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai Staf Peralatan Pabrik Komponen Konstruksi Cileungsi (1989), Manajer Pabrik Majalengka (2005-2013), Manajer PPB Bogor (2013-2017), dan Manajer Human Capital (2017-sekarang).</p>	<p>Work Experience Previously, he worked as a Construction Component Equipment Staff for Cileungsi (1989), Majalengka Plant Manager (2005-2013), Bogor PPB Manager (2013-2017), and Human Capital Manager (2017-present).</p>
<p>Jabatan Rangkap Selain menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Manajer Biro Human Capital Kantor Pusat (2017-sekarang)</p>	<p>Concurrent Position In addition to serving as a member of the Company's Nomination and Remuneration Committee, he also serves as Manager of the Head Office Human Capital Bureau (2017-present)</p>
<p>Hubungan Afiliasi Tidak Ada</p>	<p>Affiliations None</p>
<p>Jumlah Kepemilikan Saham PT Wijaya Karya Beton Tbk Memiliki saham Perseroan sejumlah 13.809.800 lembar saham atau sebesar 0,1584516%.</p>	<p>Share Ownership in PT Wijaya Karya Beton Tbk. 13,809,800 shares or 0.1584516%.</p>

Kualifikasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan GCG maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.
2. Tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas.
4. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.
5. Anggota Komite Nominasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Syarat lainnya, antara lain:
 - a. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Perseroan sesuai peraturan yang berlaku, atau hubungan dengan perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - b. Bukan merupakan pemilik, pengurus atau pegawai dari perusahaan, badan ataupun lembaga yang memberikan jasa kepada Perseroan atau memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan.
 - c. Bukan merupakan karyawan Perseroan.
 - d. Tidak merangkap sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/ Perusahaan lain.
 - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada perusahaan lain pada periode yang sama.
 - Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menyusun serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan yang berkaitan dengan nominasi & remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif, dan pegawai secara menyeluruh. Sebagaimana tertuang di dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, rincian tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

Qualifications for Nomination and Remuneration Committee Member

Qualifications of the Company's Nomination & Remuneration Committee membership are as follows:

1. Having integrity, dedication, ability, education, independence, and experience to carry out their duties and GCG supervision function as well as written all the results of the implementation of their duties to the Board of Commissioners in accordance with applicable procedures.
2. Do not have personal interests or relationships that can cause a conflict of interest with the Company.
3. Can provide sufficient time to complete the tasks.
4. Able to work together and communicate well and effectively.
5. Nomination Committee Member from outside the Issuer or Public Company concerned. Other requirements include:
 - a. Have no financial, management, share ownership and/or family relations with the Board of Commissioners, Directors and/or Shareholders of the Company in accordance with the applicable regulations, or relations with the company that can affect their ability to act independently.
 - b. Not an owner, manager or employee of a company, agency or institution that provides services to the Company or has a business relationship with the Company.
 - c. Not an employee of the Company.
 - d. Not concurrently serving as:
 - Member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other SOEs/Companies.
 - Member of the Nomination and Remuneration Committee in other companies within the same period.
 - Executive official who in charge of human resources should have knowledge regarding the remuneration system and/or nomination as well as the Company's succession plan.

Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

Nomination & Remuneration Committee is responsible for evaluating and preparing as well as providing recommendations to the Board of Commissioners regarding systems/policies relating to nominations & remuneration for the Board of Commissioners, the Board of Directors, executive officials, and employees as a whole. As stated in the Nomination & Remuneration Committee Charter, details of the duties and responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee of the Company among others:

- I. Bidang Nominasi
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan di dalam RUPS;
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Risiko kepada Dewan Komisaris;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2. Bidang Remunerasi
 - a. Mengevaluasi kebijakan remunerasi; dan
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Piagam dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi & Remunerasi yang memuat informasi mengenai visi, misi, struktur organisasi, kualifikasi, tanggung jawab dan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, ketentuan rapat, serta masa tugas atau masa jabatan. Pembentukan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No.06A/DK-WB/IV/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2020.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan merupakan pihak independen yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga baik dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris maupun Direksi.

Frekuensi dan Agenda Rapat Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala mengadakan rapat internal paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana termaktub di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Secara teknis, rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Human Capital (HC).

- I. Nomination Field
 - a. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedures for selecting and/or replace members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners in order to be submitted at the GMS;
 - b. Provide recommendations regarding prospective members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
 - c. Provide recommendations regarding independent parties who will become members of the Audit Committee and Business Risk to the Board of Commissioners;
 - d. Carry out other tasks given by the Board of Commissioners.
2. Remuneration Field
 - a. Evaluating remuneration policy; and
 - b. Providing recommendations to the Board of Commissioners about:
 - Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the GMS;
 - Remuneration policy for Executive Officials and overall employee to deliver to the Board of Directors;

Nomination and Remuneration Committee Charter and Guidelines

The Company has a Nomination and Remuneration Committee's Charter that contains information relating to vision, mission, organization structure, qualification, responsibility and duty, authority, right and obligation, meeting rules, and term of office or tenure. This establishment of Nomination and Remuneration Committee of the Company refers to the Board of Commissioners Decree No.06A/DK-WB/IV/2020 stipulated on April 22, 2020.

Independency of Nomination and Remuneration Committee

All members of the Nomination & Remuneration Committee of the Company are independent parties from outside the Company and do not have financial relationships and/or family relations with either the Major Shareholders, the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda and Frequency

Nomination and Remuneration Committee holds internal meeting regularly at least 4 (four) times in a year as stipulated in the Company's Articles of Associations. Technically, Nomination and Remuneration Committee meeting can only be held when attended by at least 51% (fifty one percent) of total members, including Independent Commissioner and executive officials in charge of Human Capital division among of them. Decision

Pengambilan keputusan di dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, namun dalam hal tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

making in Nomination and Remuneration Committee meeting is to reach the consensus agreement, when that consensus agreement is not reached, decision making is based on majority votes with the principle of 1 (one) person for 1 (one) vote.

Sepanjang tahun 2020, rapat Komite Nominasi dan Remunerasi telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana dapat dilihat uraiannya pada tabel di bawah ini:

Throughout 2020, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings as described in the table below:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Indrieffouny Indra*	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Chairman cum Member of Nomination and Remuneration Committee	3	3	100%
Priyo Suprobo	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member	4	4	100%
Agung Damiar	Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha / Audit and Business Risk Committee Member	4	4	100%
Y.B. Priyatmo Hadi**	Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha / Audit and Business Risk Committee Member	1	1	100%

*) Bergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 5 Mei 2020. / Joined the Nomination and Remuneration Committee since May 5, 2020.

***) Berhenti menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 11 Agustus 2020. / Stopped serving as Nomination and Remuneration Committee Member since August 11, 2020.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

Tanggal / Date	Agenda / Agenda	Komite Nominasi dan Remunerasi yang Hadir / Attended Nomination and Remuneration Committee
4 Februari 2020 / February 4, 2020	Rapat Komite Nominasi Remunerasi, Pembahasan Masa Tugas Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Tbk / Remuneration Nomination Committee Meeting, Discussion of Term of Duty for Independent Commissioner of PT Wijaya Karya Beton Tbk	<ul style="list-style-type: none"> Priyo Suprobo Y.B. Priyatmo Hadi Agung Damiar
30 Juni 2020 / June 30, 2020	Rapat Komite Nominasi Remunerasi, Pembahasan Usulan Perubahan Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk / Remuneration Nomination Committee Meeting, Discussion on Proposed Change of Management of PT Wijaya Karya Beton Tbk	<ul style="list-style-type: none"> Indrieffouny Indra Y.B. Priyatmo Hadi Agung Damiar
1 September 2020 / September 1, 2020	Rapat Komite Nominasi Remunerasi, Pembahasan Usulan Perubahan Organisasi PT Wijaya Karya Beton Tbk / Remuneration Nomination Committee Meeting, Discussion on Proposed Change of Organization of PT Wijaya Karya Beton Tbk	<ul style="list-style-type: none"> Indrieffouny Indra Priyo Suprobo Agung Damiar
15 Desember 2020 / December 15, 2020	Rapat Komite Nominasi Remunerasi, Pembahasan Laporan Kegiatan Komite Nominasi Remunerasi / Remuneration Nomination Committee Meetings, Discussion of Remuneration Nomination Committee Activity Reports	<ul style="list-style-type: none"> Indrieffouny Indra Priyo Suprobo Agung Damiar

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam menjalankan Kebijakan Suksesi Direksi, Perseroan senantiasa melandaskan kegiatannya pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Saat ini, Perseroan telah memiliki komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi, sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Suksesi Direksi. Adapun kebijakan mengenai suksesi tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di Perseroan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan. Dalam proses suksesi Direksi telah ditentukan hal-hal berikut ini:

Board of Directors Succession Policy

In implementing the Board of Directors Succession Policy, the Company continually based its activities on the regulations of the Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Entity of Public Company. Currently, the Company has Nomination and Remuneration Committee that has the duties to arrange the policy and criteria needed in the Nomination process of prospective members of the Board of Directors, as stated in the Board of Directors Succession Policy. Policy on succession has the aim to maintain the sustainability of leadership regeneration process in the Company in order to maintain business longevity and the long-term goals of the Company. The Board of Directors succession process has determined the following:

1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas pengambilan keputusan;
2. Penentuan komposisi anggota Direksi dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan;
3. Anggota Direksi yang membawahi bidang Operasional harus memiliki keahlian teknik dan berpengalaman dalam bidangnya, begitu juga Anggota Direksi yang membawahi akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan membekali pengetahuan dan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Informasi mengenai program pelatihan dan pendidikan Komite Nominasi dan Remunerasi telah disajikan dalam Laporan Tahunan, bab Profil Perusahaan, sub bab Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagaimana fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan proses nominasi bagi Direksi dan mengusulkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Pencapaian KPI Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian KPI Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan berpedoman pada KPI Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris 2020. Hasil penilaian KPI sebagai berikut:

No.	Indikator / Indicators	Bobot Indikator / Indicator Value	Realisasi / Realization	Pencapaian / Achievement
1	Tugas dalam Nominasi dan Seleksi calon Direksi / Duties on Candidate Selection for Board of Directors	Dilaksanakan / Implemented	Dilaksanakan / Implemented	100%
2	Review kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi / Review on Board of Commissioners policy on Board of Directors remuneration proposal.	Dilaksanakan / Implemented	Dilaksanakan / Implemented	100%
Pencapaian Rata-rata / Average Achievement				100%

1. Determination of the members of the Board of Directors in consideration of the condition of Public Company as well as effectiveness in decision making;
2. Determination on the composition of the Board of Directors while keeping in mind the expertise, knowledge, and experience needed;
3. Members of the Board of Directors that supervises Operations must have technical expertise and is experienced in his/ her field, as well as members of the Board of Directors that supervises accounting or finance must possess the expertise and/or knowledge in accounting.

Competence Development for Nomination and Remuneration Committee

The Company provides the knowledge and competence for the Nomination and Remuneration Committee through participation in training and education, both organized formally and informally. Information regarding the Nomination and Remuneration Committee's training and education programs has been presented in this Annual Report, the Company Profile chapter, the Training and/or Education of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit section.

Report on Nomination and Remuneration Committee Activities

As with its functions and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee has carried out activities in the form of organizing a nomination process for the Board of Directors and proposing remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

KPI Achievement of Nomination and Remuneration Committee

The KPI assessment of Nomination and Remuneration is carried out based on the 2020 KPI as stipulated in the Board of Commissioners' Work Plan for 2020. The KPI assessment results are as follows:

KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komite *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta dapat memperoleh hasil, manfaat, dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan.

Komposisi Komite *Good Corporate Governance*

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite GCG adalah sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara masa jabatan anggota Komite GCG yang tidak termasuk dalam anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite GCG tersebut sewaktu-waktu. Adapun komposisi dan masa jabatan komite GCG sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. dari Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor SK.10/DK-WB/XII/2019 *juncto* Surat Keputusan Nomor SK.08/DK-WB/V/2020 tentang Pengangkatan Organ Komite *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk, sehingga komposisi keanggotaan Komite GCG Perseroan di tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Duty and responsibility of Good Corporate Governance (GCG) Committee are to assist the Board of Commissioners in supervising the implementation of corporate governance to comply with applicable laws and regulations, and to obtain optimal results, benefits and positive impacts from the Company's performance.

Good Corporate Governance Committee Composition

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Associations, the Board of Commissioners' tenure who concurrently positioned as a member of GCG Committee is conformable with their member appointments of the Board of Commissioners approved by the General Meeting of Shareholders (GMS). Meanwhile, for the member of GCG Committee' tenure who not to be concurrently as a member of the Board of Commissioners is for 3 (three) years of services and can be extended for one more term of office without disrespecting the right of the Board of Commissioner who has authority to dismiss the concerned member of GCG Committee at any time. For the composition and tenure of GCG Committee are always in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk. from Decree No. SK.10/DK-WB/XII/2019 *juncto* Decree No. SK.08/DK-WB/V/2020 concerning Appointment of Organs of Good Corporate Governance Committee of PTWijaya Karya Beton Tbk., thus, the composition of the Company's GCG Committee as of December 31, 2020 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keahlian / Expertise	Periode Jabatan / Term of Office
Herry Trisaputra Zuna	Ketua merangkap Anggota Komite <i>Good Corporate Governance</i> / Chairman cum Member of Good Corporate Governance Committee	SK.08/DK-WB/V/2020	Teknik Sipil / Civil Engineering	5 tahun / 5 years
Priyo Suprobo	Anggota Komite <i>Good Corporate Governance</i> / Good Corporate Governance Committee Member	SK.08/DK-WB/V/2020	Teknik Sipil / Civil Engineering	5 tahun / 5 years
Priatna Agus Setiawan	Anggota Komite <i>Good Corporate Governance</i> / Good Corporate Governance Committee Member	SK.08/DK-WB/V/2020	SDM dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / HR and Good Corporate Governance	2 tahun / 2 years

Profil Komite *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance Committee Profile

Herry Trisaputra Zuna Ketua merangkap Anggota Komite <i>Good Corporate Governance</i> / Chairman cum Member of Good Corporate Governance Committee	Profil Bapak Herry Trisaputra Zuna telah disajikan dan dibahas pada bab Profil Perusahaan, bagian Profil Dewan Komisaris. / The profile of Mr. Herry Trisaputra Zuna has been presented and discussed in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners Profile section.
Priyo Suprobo Anggota Komite <i>Good Corporate Governance</i> / Good Corporate Governance Committee Member	Profil Bapak Priyo Suprobo telah disajikan dan dibahas pada bab Profil Perusahaan, bagian Profil Dewan Komisaris. / The profile of Mr. Priyo Suprobo has been presented and discussed in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners Profile section.



Priatna Agus Setiawan

Anggota Komite Good Corporate Governance / Good Corporate Governance Committee Member

Kewarganegaraan	: Indonesia	Nationality	: Indonesian
Tempat & Tanggal Lahir	: Jakarta, 10 Agustus 1958	Place & Date of Birth	: Jakarta, August 10, 1958
Usia	: Berusia 62 tahun per 31 Desember 2020	Age	: 62 years old as of December 31, 2020
Domisili	: Bogor	Domicile	: Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Anggota Komite Good Corporate Governance sejak 30 Desember 2019 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK.10/DK-WB/XII/2019 yang diperbarui berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK.08/DK-WB/IV/2020 tanggal 5 Mei 2020.		
Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Anggota Komite Good Corporate Governance sejak 30 Desember 2019 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK.10/DK-WB/XII/2019 yang diperbarui berdasarkan SK Dewan Komisaris No. SK.08/DK-WB/IV/2020 tanggal 5 Mei 2020.		
Masa Jabatan	2 (dua) tahun terhitung sejak 26 Maret 2020.		
Term of Office	2 (two) years since March 26, 2020.		
Latar Belakang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Sosial Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (1981). • Magister Manajemen dari PPM Graduate School of Management Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia (2005). 		
Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor's Degree in Socioeconomics from Institut Pertanian Bogor (1981). • Master's Degree from PPM Graduate School of Management majoring in Human Resources Management (2005). 		
Pengalaman Kerja	Sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai HR Section Manager PT Dipasena Citra Darmaja (1996-1998), HR & GA General Manager PT Pusaka Marmer Indahjaya (1999-2000), Senior Associate Consultant PPM (2000-sekarang), Rent to Manage as HR Manager and Community Development Lembaga Pengembangan Masyarakat Amugme dan Kamoro (LPMK), Timika, Papua (2003-2008), dan HR Senior Manager PT Bintang Pelajar (2013-2017).		
Work Experience	Previously, he worked as HR Section Manager at PT Dipasena Citra Darmaja (1996-1998), HR & GA General Manager at PT Pusaka Marmer Indahjaya (1999-2000), Senior Associate Consultant PPM (2000-present), Rent to Manage as HR Manager and Community Development at Lembaga Pengembangan Masyarakat Amugme and Kamoro (LPMK), Timika, Papua (2003-2008), and HR Senior Manager at PT Bintang Pelajar (2013-2017).		
Jabatan Rangkap	Tidak Ada		
Concurrent Position	None		
Hubungan Afiliasi	Tidak Ada		
Affiliations	None		

Kualifikasi Anggota Komite Good Corporate Governance

Kualifikasi atau persyaratan keanggotaan Komite GCG Perseroan mengacu pada Piagam Komite GCG yang dikukuhkan dengan SK No. SK.06/DK-WB/IV/2020 tanggal 22 April 2020, yaitu:

1. Berintegritas dan berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tata kelola perusahaan serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Qualifications for Good Corporate Governance Committee Member

Qualification or requirement for a member of GCG Committee is made based on GCG Committee's charter and supported by No. SK.06/DK-WB/IV/2020 dated on April 22, 2020, namely:

1. Have integrity, dedication, ability, education, independence, and experience to perform the duties and functions of corporate governance supervision and communicate verbally and in writing all the results of its duties implementation to the Board of Commissioners pursuant to the applicable procedures.

2. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memahami prinsip-prinsip GCG dan etika bisnis perusahaan.
 3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan, Peraturan Pasar Modal, serta peraturan lain yang terkait GCG.
 4. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan perusahaan secara baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang usaha perusahaan dan kaitannya dengan aspek GCG dan etika perusahaan.
 5. Anggota Komite GCG yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi.
 6. Anggota Komite GCG yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 7. Anggota Komite GCG yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain;
 - Sekretaris/staf Dewan Komisaris pada perusahaan lain;
 - Anggota Komite lain pada Perusahaan;
 - Anggota di perusahaan lain.
 8. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk. yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 9. Bukan merupakan karyawan kunci, yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan yang dijalankan di PT Wijaya Karya Beton Tbk. dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
 10. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material perusahaan.
 11. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang dapat memberikan jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk. dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
 12. Tidak keberatan dan bersedia untuk membuat serta menandatangani pernyataan tertulis yang berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana tercantum di atas.
 13. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik serta beretika untuk senantiasa menyediakan waktu yang cukup guna menyelesaikan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah.
2. Have sufficient knowledge to comprehend the principles of GCG and corporate ethics.
 3. Have adequate knowledge about the company's articles of association, laws and regulations relating to the Company operations, capital market regulations, and other regulations related to GCG.
 4. Able to learn and understand the Company's activities well and have adequate knowledge about the company's line of business and its relation to GCG and corporate ethics.
 5. Members of GCG Committee who are members and who are not members of Board of Commissioners must not have familial relation to third generations vertically or horizontally or familial relation resulted from marriage with BOC/BOD members.
 6. Members of the GCG Committee who are or are not members of the Board of Commissioners, do not have any concurrent positions as administrators of political parties and/or candidate/ member of legislative and/or regional head candidates/deputy regional heads, and other positions in accordance with statutory provisions that can cause conflict of interest.
 7. Members of the GCG Committee who are not members of the Board of Commissioners of the Company, include:
 - Members of the Board of Commissioners in other companies;
 - Secretary/staff of the Board of Commissioners in other companies;
 - Other Committee members to the Company;
 - Members in other companies.
 8. Do not have any business relations, directly or indirectly related to the business activities of PT Wijaya Karya Beton Tbk. which can cause any conflict of interest.
 9. Is not a key employee, i.e. a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control business activities of PT Wijaya Karya Beton Tbk. within the last 6 months prior to appointment by the Board of Commissioners.
 10. Have no direct or indirect personal interests with the company's material information.
 11. Is not a person in the Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, or any other party who may provide audit services, non- audit services and or other consulting services to PT Wijaya Karya Beton Tbk. in the last 6 months prior to appointment by the Board of Commissioners.
 12. Have no objection and willing to make and sign a written statement in relation to the independence requirements set forth above.
 13. Is able to cooperate and communicate well and ethically and provide adequate time to carry out their duties properly and value-added.

14. Wajib mematuhi kode etik Komite yang ditetapkan Perseroan.
15. Bersedia meningkatkan kompetensi secara berkala dengan mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Good Corporate Governance

Tugas dan tanggung jawab Komite GCG Perseroan, antara lain:

1. Memastikan bahwa Perseroan sudah memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) yang berlaku dan memastikan bahwa aspek kepatuhan seluruh insan Perseroan terhadap SOP tersebut telah berjalan, baik di tingkat jajaran Dewan Komisaris maupun dalam rangka hubungan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Mengevaluasi implementasi sistem GCG di Perseroan.
3. Mengevaluasi kode etik GCG baik di internal Dewan Komisaris maupun hubungan Direksi dan Dewan Komisaris, serta hubungan manajemen pada tingkat di bawah Direksi berdasarkan usulan yang disampaikan Direksi.

Piagam dan Pedoman Komite Good Corporate Governance

Komite GCG berpedoman pada Piagam Komite GCG guna menjamin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Komite GCG telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.06/DK-WB/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dan telah mengatur mengenai pembentukan, struktur organisasi, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang dan mekanisme kerja, kewajiban pelaporan, dan pelaksanaan rapat.

Independensi Komite Good Corporate Governance

Komite GCG Perseroan menjalankan fungsi dan peranannya secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sesuai dengan *Board Manual* PT Wijaya Karya Beton Tbk. No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 tanggal 18 Oktober 2019, seluruh anggota Komite GCG merupakan pihak independen yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga baik dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris maupun Direksi.

Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Good Corporate Governance

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Piagam Komite GCG, rapat Komite GCG diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Secara teknis, rapat Komite GCG hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi SDM.

14. Shall comply with the Code of Conduct set by the Company.
15. Willing to improve competencies continuously through education and training.

Duties and Responsibilities of Good Corporate Governance Committee

Duties and responsibilities of GCG Committee are as follows:

1. Ensure that the Company has a valid Standard Operating Procedure (SOP) and ensure that the compliance aspects of all the Company's employees towards the SOP have been running, both at the Board of Commissioners level and in the context of the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. Evaluate the implementation of GCG system in the Company.
3. Evaluate GCG code of conducts within the Board of Commissioners as well as relation between the Board of Directors and the Board of Commissioners, and managerial relation under the Board of Directors based on suggestions given by the Board of Directors.

Good Corporate Governance Committee Charter and Guidelines

The GCG Committee refers to the GCG Committee Charter to ensure that the duties and responsibilities are carried out in an efficient, effective, transparent, professional, independent and accountable manner in accordance with the prevailing laws and regulations. The GCG Committee Charter has been established by virtue of the Decree of the Board of Commissioners No.06/DK-WB/IV/2020 dated April 22, 2020 and has regulated the establishment, organizational structure, tenure, duties and responsibilities, authorities and work mechanisms, reporting obligations, and meeting implementation.

Independence of Good Corporate Governance Committee

GCG Committee of the Company takes care of its functions and roles professionally without any intervention from any parties. Referring to Board Manual of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.037/2019 dated October 18, 2019, the whole members of GCG Committee stand on independently, come from external, and have no family relationship with Main Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors.

Good Corporate Governance Committee Meeting Agenda and Frequency

As regulated by GCG Committee's Charter, GCG Committee meeting is held based on the Company's need, at minimum 4 times in a year. Technically, the GCG Committee meeting can only be arranged when attended by 51% (fifty one percent) of all members, including an Independent Commissioners and Executive Officials in charge of Human Capital Division.

Sepanjang tahun 2020, Komite GCG Perseroan telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat internal. Pada tabel di bawah ini, dapat dilihat jumlah pertemuan, tingkat kehadiran, dan agenda rapat Komite GCG, yaitu:

Throughout 2020, GCG Committee of the Company held 4 (four) internal meetings. In the table below, we can see the number of meeting, attendance rate and meeting agenda of GCG Committee, namely:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Indrieffouny Indra	Ketua merangkap Anggota Komite <i>Good Corporate Governance</i> (periode April – Mei 2020) / Chairman cum Member of Good Corporate Governance Committee (April – May 2020)	1	1	100%
Heru Wisnu Wibowo	Ketua merangkap Anggota Komite <i>Good Corporate Governance</i> (periode Mei – Juli 2020) / Chairman cum Member of Good Corporate Governance Committee (May – July 2020)	1	1	100%
Herry Trisaputra Zuna	Ketua merangkap Anggota Komite <i>Good Corporate Governance</i> (periode Mei 2020 – sekarang) / Chairman cum Member of Good Corporate Governance Committee (May 2020 – present)	4	4	100%
Priyo Suprobo	Anggota Komite <i>Good Corporate Governance</i> (periode Agustus 2020 – sekarang) / Good Corporate Governance Committee Member (August 2020 – present)	2	2	100%
Priatna Agus Setiawan	Anggota Komite <i>Good Corporate Governance</i> / Good Corporate Governance Committee Member	4	4	100%

Agenda Rapat Komite *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance Committee Meeting Agenda

Tanggal / Date	Agenda / Agenda	Komite <i>Good Corporate Governance</i> yang Hadir / Attended Good Corporate Governance Committee Member
27 April 2020 / April 27, 2020	Rencana Tindak Lanjut Hasil Assessment GCG Eksternal oleh BPKP / Follow-up Plan for External GCG Assessment Results by BPKP	<ul style="list-style-type: none"> Indrieffouny Indra Herry Trisaputra Zuna Priatna Agus S.
28 Juli 2020 / July 28, 2020	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Assessment GCG / Evaluation of the Follow-up of GCG Assessment Results	<ul style="list-style-type: none"> Herry Trisaputra Zuna Heru Wisnu Wibowo Priatna Agus S.
18 November 2020 / November 18, 2020	Evaluasi Tindak Lanjut Program GCG / Evaluation of the GCG Program Follow-up	<ul style="list-style-type: none"> Herry Trisaputra Zuna Priyo Suprobo Priatna Agus S.
20 November 2020 / November 20, 2020	Evaluasi Pelaksanaan dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2020 / Evaluation of the Implementation of Corporate Governance of PT Wijaya Karya Beton Tbk. in 2020	<ul style="list-style-type: none"> Herry Trisaputra Zuna Priyo Suprobo Priatna Agus S.

Pengembangan Kompetensi Komite *Good Corporate Governance*

Perseroan membekali pengetahuan dan kompetensi Komite GCG melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Informasi mengenai program pelatihan dan pendidikan Komite GCG telah disajikan dalam Laporan Tahunan, bab Profil Perusahaan, sub bab Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

Competence Development for Good Corporate Governance Committee

The Company provides the knowledge and competence of the GCG Committee through participation in training and education, both organized formally and informally. Information regarding the GCG Committee's training and education programs has been presented in the Annual Report, the Company Profile chapter, the Training and/or Education section of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Good Corporate Governance

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite GCG Perseroan telah menjalankan sejumlah kegiatan di sepanjang tahun 2020, yakni mengawasi penerapan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melengkapi infrastruktur GCG, di antaranya dengan dimilikinya Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*), Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Code of Corporate Governance*), Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*), dan organ pendukung lainnya di lingkungan Perseroan.

Pencapaian KPI Komite Good Corporate Governance

Penilaian KPI GCG dilakukan dengan berpedoman pada KPI Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris 2020. Hasil penilaian KPI Komite GCG adalah sebagai berikut:

No.	Indikator / Indicators	Bobot Indikator / Indicator Value	Realisasi / Realization	Pencapaian / Achievement
1	Kajian, Tinjauan dan Analisis Penerapan GCG di Lingkungan Perusahaan / Review, Overview and Analysis of the implementation of GCG in the Corporate Environment	Dilaksanakan / Implemented	Dilaksanakan / Implemented	100%
2	Kajian atas pelaksanaan sistem manajemen yang ada di perusahaan, yaitu Sistem Manajemen Mutu, Manajemen SMK3, Sistem Manajemen Risiko, dan Sistem Manajemen Informasi / Review of the management systems in the Company, namely the quality management system, OHSE management, Risk Management System, and Information Management System	Dilaksanakan / Implemented	Dilaksanakan / Implemented	100%
3	Kegiatan tinjauan proyek atau unit dalam rangka monitoring penerapan GCG khususnya untuk pelaksanaan investasi / Project or unit review activities in order to monitor the implementation of GCG specifically for the implementation of investments	Dilaksanakan / Implemented	Dilaksanakan / Implemented	100%
Pencapaian Rata-rata / Average Achievement				100%

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang berperan dalam menjalankan fungsi kesekretariatan perusahaan, memfasilitasi komunikasi antar organ Perseroan dan/atau dengan pemangku kepentingan, serta mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik. Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan, serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan, hubungan investor, dan pelaku pasar modal lainnya dengan memperhatikan prinsip standar etika perusahaan, prinsip-prinsip GCG, dan nilai serta budaya perusahaan. Secara teknis, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Kriteria dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 juncto POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Report on Good Corporate Governance Committee Activities

In implementing its duties, GCG Committee of the Company has conducted some activities throughout 2020, which is overseeing the principles of GCG practices in managing the Company. This commitment is manifested through the completion of GCG infrastructure, among others, having Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors, Code of Corporate Governance, Code of Conduct, and others supporting organs within the Company.

KPI Achievement of Good Corporate Governance Committee

The GCG's KPI assessment is based on the 2020 KPI as stipulated in the Board of Commissioners' 2020 Work Plan. The results of the KPI assessment of GCG Committee are as follows:

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is an individual or person in charge of a work unit who is assigned to carry out corporate secretarial functions, facilitate communication between Company organs and/or with stakeholders, and support the creation of a good corporate image. Corporate Secretary also plays a role in supporting policy formulation, planning, and ensuring the effectiveness and transparency of corporate communications, institutional relations, investor relations and other capital market players by taking into account the principles of corporate ethical standards, GCG principles, and corporate values and culture. Technically, Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors and is appointed and dismissed based on the Decree of the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

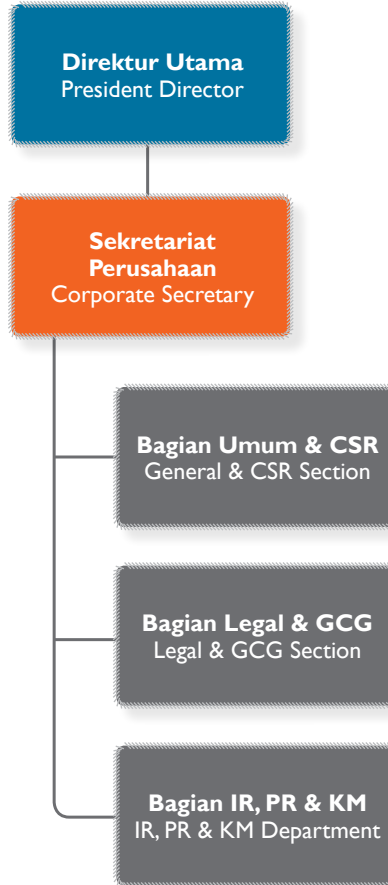
The criteria and procedures for the appointment of the Corporate Secretary refer to the Regulation of the Minister of State for SOE No. PER-01/MBU/2011 in conjunction with POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan SK Organisasi Perseroan No. SK.01.01/WB-0A.011/2020 tanggal 17 Agustus 2020 tentang Struktur Organisasi PT Wijaya Karya Beton Tbk, struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut.

Corporate Secretary Organizational Structure

In accordance with the Company Organization Decree No. SK.01.01/WB-0A.011/2020 dated August 17, 2020 concerning the Organizational Structure of PT Wijaya Karya Beton Tbk., the organizational structure of the Corporate Secretary is as follows.



Jabatan / Position	Nama / Name
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	Yuherni Sisdwi Rachmiyati
Manajer/Kepala Bagian Umum & CSR / Manager/Head of General Affairs & CSR	Gatot Hendratno
Manajer/Kepala Bagian Legal & GCG / Manager/Head of Legal & GCG	Deden Alfaisal
Manajer/Kepala Bagian Investor Relation, Public Relation, & KM / Manager/Head of Investor Relation, Public Relation & KM	Yushadi
Staf Bagian Umum & CSR / Staff of General Affairs & CSR	<ul style="list-style-type: none"> • Sutono • Saptono • Dwiki Rizki Oktavian • Rachellia Nanet Putri • Yoslivia Damarshandi • Usada Abirawa • Ishak Juarsa S. • Kharis Wicaksono • Mariska Ednalia • Nurul Ulfa Cholisiatin
Staf Bagian Legal & GCG / Staff of Legal & GCG	<ul style="list-style-type: none"> • Eki Sufyan Tsuari • Ria Novanti • Dwitija Elmadani • Ika Rahmandani Styorini • Pratiwi Hastry
Staf Bagian Investor Relation, Public Relation, & KM / Staff of Investor Relation, Public Relation, & KM	<ul style="list-style-type: none"> • Sarah Regina Sitompul • Maesa Madina Putri • Wilandari Aldini • Nirmala Fauzia • Shodry
Jumlah / Total	24 orang / People

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile



Yuherni Sisdi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary Profile

<p>Kewarganegaraan : Indonesia</p> <p>Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 11 Juni 1970</p> <p>Usia : 50 tahun per 31 Desember 2020</p> <p>Domisili : Bogor</p>	<p>Nationality : Indonesian</p> <p>Place and Date of Birth : Malang, June 11, 1970</p> <p>Age : 50 years old as of December 31, 2020</p> <p>Domicile : Bogor</p>
<p>Dasar Hukum Pengangkatan Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 11 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: SK.02.01/A.DIR.12125/2017 jo. Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: SK.02.01/WB-0A.315/2017.</p>	<p>Legal Basis of Appointment Appointed as Corporate Secretary since August 11, 2017 based on the Decree of the Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) No: SK.02.01/A.DIR.12125/2017 jo. Decree of the Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) No: SK.02.01/WB-0A.315/2017.</p>
<p>Masa Jabatan Sampai dengan pengangkatan Sekretaris Perusahaan yang baru</p>	<p>Term of Office As of appointment of new Corporate Secretary.</p>
<p>Latar Belakang Pendidikan Sarjana Pendidikan Jurusan Akuntansi dari Universitas Negeri Jakarta (2005).</p>	<p>Educational Background Bachelor's Degree in Accounting from Univeritas Negeri Jakarta (2005).</p>
<p>Pengalaman Kerja Sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai Manajer Evaluasi Hasil Usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2009-2017), Manajer Divisi Manajemen Portofolio PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017), dan Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017-sekarang).</p>	<p>Work Experience Previously, he worked as Manager of Business Results Evaluation of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2009-2017), Manager of the Portfolio Management Division of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2017), and Corporate Secretary of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017-present).</p>
<p>Jabatan Rangkap Tidak Ada</p>	<p>Concurrent Position None</p>
<p>Hubungan Afiliasi Tidak Ada</p>	<p>Affiliations None</p>

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

Based on Financial Service Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 about the Corporate Secretary of Issuers or Public Company, duties of Corporate Secretary as follows:

1. Monitoring Capital Market update especially related to the laws and regulations in Capital Market;
2. Providing suggestion to the Board of Commissioners and Board of Directors of Issuers or Public Company in order to always meet the laws and regulations in Capital Market;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perseroan membekali pengetahuan dan kompetensi Komite GCG melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Informasi mengenai program pelatihan dan pendidikan Komite GCG telah disajikan dalam Laporan Tahunan, bab Profil Perusahaan, sub bab Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

Competence Development for Corporate Secretary

The Company provides the knowledge and competence of the GCG Committee through participation in training and education, both organized formally and informally. Information regarding the GCG Committee's training and education programs has been presented in the Annual Report, the Company Profile chapter, the Training and/or Education section of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan sejumlah kegiatan sepanjang tahun 2020, antara lain:

Report on Corporate Secretary Activities

In carrying out its function, Corporate Secretary has carried out several activities throughout 2020, among others:

No.	Kebijakan / Policies	Program Kerja / Work Program	Status / Status
1	Melakukan <i>advisory</i> dan klasifikasi aksi korporasi Perseroan / Conduct advisory and classifying the Company's corporate actions	Pengadaan investasi tanah/lahan untuk peningkatan kapasitas produksi melalui perluasan pabrik dan/atau pengembangan pabrik dengan jalur. / Procurement of land investment to increase production capacity through plant expansion and/or plant development by route.	Terlaksana / Implemented
2	Melakukan <i>advisory</i> kerja sama usaha Perseroan / Conduct advisory on the Company's business cooperation	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>advisory</i> terkait kerja sama operasi. / Conduct advisory related to operational cooperation. 	Terlaksana / Implemented
3	Melakukan <i>advisory</i> Aksi Korporasi Perseroan / Conduct advisory on Corporate Action	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>review</i> dan <i>advisory</i> atas setiap Aksi Korporasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Rapat Umum Pemegang Saham. / Conduct review and advisory on every Corporate Action of the Company, including but not limited to the General Meeting of Shareholders. • Melakukan <i>advisory</i> hukum aksi korporasi Anak Perusahaan/Asosiasi dan perjanjian-perjanjian antar Anak Perusahaan/Asosiasi dengan mitra kerjanya. / Conduct legal advisory on corporate action of subsidiary/associates and agreements between subsidiaries/associates and their partners. • Menyusun perjanjian pemanfaatan <i>cash loan</i> dan <i>non cash loan</i> antara Perseroan dengan Induk Perseroan dan Perseroan dengan Anak Perusahaan. / Prepare a cash loan and non-cash loan utilization agreement between the Company and the Parent Company and the Company and its Subsidiaries. 	Terlaksana / Implemented
4	Melakukan proses litigasi dan non litigasi Perseroan / Carry out the Company's litigation and non-litigation processes	Terselenggaranya penanganan perkara dan isu hukum Perseroan secara terkendali dan terpadu, serta melakukan penyelesaian utang piutang Perseroan dengan pihak lain. / The handling of cases and legal issues of the Company in a controlled and integrated manner, as well as carrying out the settlement of the Company's debts and receivables with other parties.	Terlaksana / Implemented

No.	Kebijakan / Policies	Program Kerja / Work Program	Status / Status
5	Melakukan <i>compliance</i> Perseroan atas peraturan perundang-undangan di sektor industri usaha dan pasar modal di Kantor Pusat dan seluruh Unit Usaha Perseroan / Conduct compliance with the laws and regulations in the business industry and capital market sectors at the Head Office and all of the Company's Business Units	Pengurusan perizinan usaha Perseroan dilaksanakan secara tepat waktu dan tersedianya monitoring perizinan usaha Perseroan. / The management of the Company's business licenses is carried out in a timely manner and the monitoring of the Company's business licenses is available.	Terlaksana / Implemented
6	Melaksanakan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) / Implement Good Corporate Governance (GCG)	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan <i>assessment</i> penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). / Carry out an assessment of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) Melaksanakan sosialisasi penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). / Disseminate the implementation of Good Corporate Governance (GCG). Menyelenggarakan Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala. / Hold regular meetings of the Board of Directors and Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors. Menyelenggarakan Rapat Direksi dengan Manajer Biro secara berkala. / Hold regular meetings of the Board of Directors and the Bureau Manager. Meningkatkan transparansi melalui keterbukaan pelaporan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, situs website Perseroan, Bursa Efek Indonesia, surat kabar, dan media-media lainnya. / Increase transparency through disclosure of information disclosure reporting to the Financial Services Authority, the Company's website, the Indonesia Stock Exchange, newspapers, and other media. 	Terlaksana / Implemented
7	Hubungan Investor / Investor Relations	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019. / Conduct the Annual General Meeting of Shareholders for the 2019 Fiscal Year. Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 / Conduct Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020. Melaksanakan pelaporan dan/atau keterbukaan informasi kepada regulator secara berkala, baik insidental, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. / Carry out regular reporting and/or information disclosure to regulators, whether incidental, monthly, quarterly, semester, and annually. Menyelenggarakan <i>Analyst Meeting, Forum Investor, Public Expose, dan One-on-One Meeting</i> sebagai bentuk keterbukaan kepada analis dan investor baik dalam maupun luar negeri. / Organize Analyst Meetings, Investor Forum, Public Expose, and One-on-One Meetings as a form of openness to analysts and investors both at home and abroad. Mengikuti dan turut serta dalam melakukan publikasi dan sosialisasi oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. / Participate in publications and socialization by the Indonesia Stock Exchange and Financial Service Authority. 	Terlaksana / Implemented
8	Membina hubungan yang baik secara berkelanjutan dengan pemangku kepentingan / Foster good relations on an ongoing basis with stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti beberapa sosialisasi yang dilaksanakan online oleh regulator. / Participate in several outreach conducted online by regulators. Menjaga hubungan dengan jurnalis melalui <i>press release</i> maupun <i>interview session</i>. / Maintain relationships with journalists through press releases and interview sessions. Melakukan upaya pemberian informasi terkini melalui pengelolaan dan pembaruan konten situs <i>web</i> Perseroan baik atas informasi yang disediakan secara berkala, serta merta, maupun setiap saat harus tersedia. / Make efforts to provide up-to-date information through the management and updating of the Company's website content, both on the basis of information provided regularly, immediately, or at any time. 	Terlaksana / Implemented
9	Peningkatan <i>Service Excellence</i> / Service Excellence Improvement	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelayanan umum standar memuaskan (<i>service excellence</i>) bagi kebutuhan internal dan eksternal. / Perform satisfactory standard public service (<i>service excellence</i>) for internal and external needs. Penggunaan <i>software</i> yang dikembangkan oleh Biro Sistem Informasi untuk pengaturan penggunaan kendaraan dan ruangan. / Use of software developed by the Information Systems Bureau to regulate the use of vehicles and spaces. Melakukan survei tentang kepuasan pelayanan umum kepada pegawai Kantor Pusat. / Conduct a survey on general service satisfaction to Head Office employees. 	Terlaksana / Implemented

No.	Kebijakan / Policies	Program Kerja / Work Program	Status / Status
10	Pengelolaan Arsip Perusahaan / Company Archive Management	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan sistem arus informasi internal secara elektronik dan penyimpanan dokumen arsip yang terintegrasi. / Organize an internal electronic information flow system and integrated archival document storage. Menyelenggarakan pengendalian informasi terdokumentasi bentuk <i>softcopy</i> dalam <i>Electronic Document Management System</i> dan <i>hardcopy</i> dalam tata pengarsipan yang terintegrasi seluruh unit kerja. / Organize documented information control in the form of <i>softcopy</i> in the <i>Electronic Document Management System</i> and <i>hardcopy</i> in an integrated filing system for all work units. 	Terlaksana / Implemented
11	Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility (CSR) 2020</i> beserta Penyusunan Program dan Anggaran <i>CSR 2021</i> / Implementation of the 2020 <i>Corporate Social Responsibility (CSR) Program</i> along with the Preparation of the 2021 <i>CSR Program and Budget</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan berbagai program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>. / Carry out various <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> programs. Menyusun <i>Roadmap CSR 2020-2022</i> Perseroan. / Prepare the Company's 2020-2022 <i>CSR Roadmap</i>. Penyusunan <i>Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2020</i>. / Preparation of a <i>Sustainability Report for the 2020 Fiscal Year</i>. 	Terlaksana / Implemented

Pertemuan Investor & Analis

Sekretariat Perusahaan secara berkala melakukan kegiatan pertemuan investor dan analis (*investor & analyst meeting*) yang bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan kredibel terkait kondisi usaha terkini perusahaan, memberikan edukasi bagi publik, sekaligus memperbarui informasi mengenai kebijakan strategis yang dijalankan Perseroan kepada investor maupun calon investor serta analis pasar modal Perseroan.

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan melakukan 4 (empat) kali *investor meeting* dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Triwulan 2020 / Quarters in 2020	Jumlah Pertemuan / Total Meetings
Triwulan I / Quarter I	1
Triwulan II / Quarter II	1
Triwulan III / Quarter III	1
Triwulan IV / Quarter IV	1

Paparan Publik (*Public Expose*)

Paparan Publik (*Public Expose*) merupakan pemaparan umum kepada publik terkait informasi terkini kinerja dan operasional Perseroan yang bertujuan agar informasi kinerja perusahaan tersebar secara merata. Perseroan diwajibkan melaksanakan *public expose* minimal satu kali dalam setahun.

Pada tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali *Public Expose* pada tanggal 27 Agustus 2020 secara *live* dalam acara *Public Expose LIVE 2020* dan dihadiri oleh 377 orang.

Investor & Analyst Meeting

The Company Secretariat regularly conducts investor and analyst meetings with the aim of providing up-to-date and credible information regarding the Company's current business conditions, providing education to the public, as well as updating information on strategic policies implemented by the Company to investors and potential investors as well as the Company's capital market analyst.

Throughout 2020, the Corporate Secretary conducted 4 (Four) investor meetings with the following recapitulation:

Public Expose

Public Expose is a general exposure to the public regarding the latest information on the Company's performance and operations, which aims to distribute the Company's performance information evenly. The Company is required to hold a *public expose* at least once a year.

In 2020, the Company held 1 (one) live *Public Expose* on August 27, 2020 in the *Public Expose LIVE 2020* event and was attended by 377 people.

Media Komunikasi Eksternal

Dalam menjalankan fungsi komunikasi, Sekretaris Perusahaan memfasilitas media komunikasi kepada pihak eksternal guna memenuhi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Media yang digunakan Perseroan dalam penyampaian komunikasi eksternal antara lain:

- **Media Cetak**
Perseroan menggunakan media cetak untuk menyampaikan informasi kepada publik, seperti Laporan Keuangan, risalah RUPS, dan paparan publik. Media cetak atau harian yang biasa digunakan Perseroan untuk menyampaikan informasi kepada publik antara lain Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan Kontan.
- **Buletin/Majalah**
Perseroan menerbitkan buletin/majalah bernama WTON Magz secara berkala sebanyak 2 kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebagai salah satu media informasi bagi internal Perusahaan maupun pihak eksternal lainnya. WTON Magz memuat berbagai rubrik yang membahas informasi terkini mengenai perkembangan di unit kerja atau divisi internal perusahaan, testimoni, event, hiburan, hingga kuis.
- **Hubungan Media (Media Relations)**
Sekretaris Perusahaan menjalankan dan menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan rekan-rekan media selaku bagian dari *stakeholders* Perusahaan. Perseroan memahami peran strategis media dalam mendukung penyampaian informasi terkini Perseroan kepada publik dan pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melakukan kegiatan *media relations* melalui siaran pers (*press release*) sebanyak 7 sebagai berikut:

External Communication Media

In carrying out its communication function, the Corporate Secretary facilitates communication media to external parties in order to comply with the principles of transparency and information disclosure. The media used by the Company in delivering external communications include:

- **Print Media**
The Company uses print media to deliver information to the public, such as financial reports, minutes of the GMS, and public exposures. The printed or daily media commonly used by the Company to deliver information to the public include Bisnis Indonesia, Investor Daily, and Kontan.
- **Bulletin/Magazines**
The Company publishes a bulletin/magazine called WTON Magz on a regular basis as many as 2 times a year or according to the needs of the Company as a medium of information for internal and other external parties. WTON Magz contains various rubrics that discuss the latest information about developments in work units or internal divisions of the Company, testimonials, events, entertainment, and quizzes.
- **Media Relations**
The Corporate Secretary runs and maintains good partnership relations with media colleagues as part of the Company's stakeholders. The Company understands the strategic role of the media in supporting the delivery of the latest information on the Company to the public and stakeholders. Throughout 2020, the Company has carried out media relations activities through press releases as many as 7 as follows:

No.	Tanggal Siaran Pers / Press Release Date	Perihal / Subject
1	7 Januari 2020 / January 7, 2020	Tanggap Bencana Banjir, WIKA BETON Kerahkan 9 Tangki Air Bersih / Flood Disaster Response, WIKA BETON Deploys 9 Clean Water Tanks
2	13 Februari 2020 / February 13, 2020	WIKA Mengajar 2020 / WIKA Teaching 2020
3	26 Maret 2020 / Marh 26, 2020	WIKA BETON Bukukan Laba Bersih 2019 Sebesar Rp510,71 Miliar / WIKA BETON Booked 2019 Net Profit of Rp510.71 Billion
4	17 Mei 2020 / May 17, 2020	Proyek Jalan Tol Layang A.P. Pettarani Makassar Masuk Tahap Akhir Pemasangan Balok Jembatan / A.P. Pettarani Makassar Toll Road Project Entering the Final Stage of Bridge Beam Installation
5	9 Juni 2020 / June 9, 2020	Bertahan di Tengah Pandemi, WIKA BETON Catat Kenaikan Laba 1,65% per Maret 2020 / Surviving in the Middle of a Pandemic, WIKA BETON Records an Increase in Profit of 1.65% as of March 2020
6	4 Agustus 2020 / August 4, 2020	RUPSLB WTON Tahun 2020 Rombak Struktur Organisasi Perseroan / 2020 WTON EGM Reorganizing the Company's Organization Structure
7	27 Agustus 2020 / August 24, 2020	WIKA BETON Susun Ulang Target Kinerja 2020 / WIKA BETON Rearranges 2020 Performance Targets

UNIT AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personil Perseroan, yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian internal Perseroan dijalankan oleh Unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dibentuk dengan memperhatikan serta mengacu Bab VI Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Keputusan Menteri BUMN Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.01.01/WB0A.024/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Intern, Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.01.01/WB-0A.144A/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Susunan Organisasi Satuan Pengawasan Intern. Kedudukan SPI di dalam organisasi Perseroan bertujuan untuk memberikan pendapat profesional, independen, dan objektif kepada Direktur Utama atas jalannya aktivitas dan kegiatan operasional Perseroan. Agar dapat tercipta sebuah sistem pengendalian internal yang baik di lingkungan Perseroan, maka SPI senantiasa mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktik terbaik GCG dan aspek manajemen risiko sebagai basis model pemeriksaan yang dilakukan.

INTERNAL AUDIT UNIT

Internal control is a process designed and carried out by the Board of Commissioners, Board of Directors and other members of management and all personnel of the Company. It is aimed at providing proper certainty in achieving effective and efficient operation, reliable financial reports and compliance with applicable laws and regulations. The Company's internal audit process is carried out by Internal Audit Unit (SPI), which was established by considering and by based on Chapter VI of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Government Regulation No 12 of 1998 concerning Limited Liability Companies (Persero), Decree of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 concerning implementation of Good Corporate Governance (GCG) by SOE, Decree of the Board of Directors of the Company No. SK.01.01/WB0A.024/2006 dated March 27, 2006 concerning Organizational Structure of Internal Audit Unit, and Decree of the Board of Directors of the Company No. SK.01.01/WB-0A.144A/2018 dated March 16, 2018 concerning Organizational Structure of Internal Audit Unit. The position of SPI in the Company's organization aims at providing professional, independent, and objective opinions to the President Director on the operations of the Company's activities and operations. To create a good internal control system in the Company, the SPI always implements the principles of GCG and risk management aspects as a basis for the conducted examination models.

Visi dan Misi Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Visi / Vision	Menjadi auditor internal yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam mengambil peran fungsi pengawasan yang berbasis prinsip-prinsip <i>transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness</i> . / To become Internal Auditor that upholds integrity and professionalism in taking the audit function role based on the principle of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.
Misi / Mission	Menjalankan fungsi pengawasan dalam membantu Direktur Utama, melalui proses audit dan memberikan masukan yang objektif dan independen selaras dengan implementasi <i>Good Corporate Governance</i> . / To carry out audit functions in assisting the President Director, through a risk-based audit program synergized with GCG principles

Vision and Mission of Internal Audit Unit (SPI)

Struktur dan Kedudukan SPI

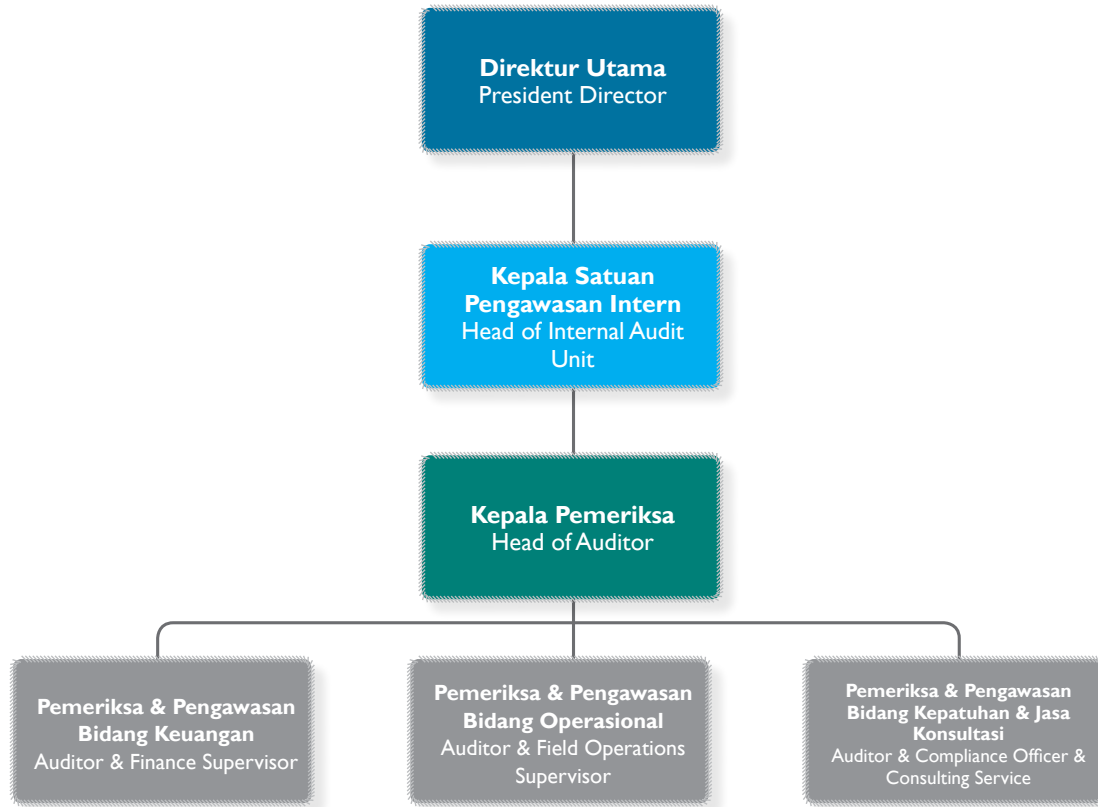
Dalam menjalankan fungsi pengawasannya di Perseroan, Kepala SPI adalah pemegang jabatan struktural di dalam organisasi SPI yang kedudukannya diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Dalam menjalankan proses audit, Kepala SPI dibantu oleh Kepala Pemeriksa bersama dengan Pemeriksa melaksanakan 3 (tiga) jenis pemeriksaan dan pengawasan yaitu Pemeriksa & Pengawasan Bidang Keuangan, Pemeriksa & Pengawasan Bidang Operasional, Pemeriksa & Pengawasan Bidang Kepatuhan & Jasa Konsultasi.

SPI Position and Structure

In carrying out audit function in the Company, the Head of Internal Audit Unit is a structural position holder in the SPI organization whose position is appointed and dismissed by the Board of Directors. In carrying out the audit process, the Head of Internal Audit Unit is assisted by Head of Auditor and Auditors carry out 3 (three) types of inspection and audit, namely Audit & Audit in the Financial Sector, Inspection & Audit in the Operational Sector, Inspection & Audit in the Compliance Sector & Consulting Services.

Struktur organisasi SPI Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

The organizational structure of the Company's SPI can be seen in the chart below:



Secara hierarki, Satuan Pengawasan Intern (SPI) berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama. Direktur Utama memiliki kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan Kepala SPI atas persetujuan Dewan Komisaris. Kepala SPI membawahi dan mengkoordinir para Kepala Pemeriksa dan para Pemeriksa.

Hierarchically, the Internal Audit Unit (SPI) is positioned directly under the coordination of the President Director. The President Director has the authority to appoint and dismiss the Head of SPI with the approval of the Board of Commissioners. The Head of SPI oversees and coordinates the Heads of Investigators and Inspectors.

Personil Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Sampai dengan 31 Desember 2020, keanggotaan SPI terdiri dari 7 orang dengan komposisi 1 (satu) orang Kepala SPI, 3 (tiga) orang Kepala Pemeriksa, dan 3 (tiga) orang Pemeriksa SPI. Rincian personil SPI dapat dilihat pada tabel berikut:

Internal Audit Unit (SPI) Personnel

As of December 31, 2020, SPI membership consists of 7 people with the composition of 1 (one) SPI Head, 3 (three) Head Examiners, and 3 (three) SPI Examiners. Details of SPI personnel can be seen in the following table:

Jabatan / Position	Nama / Name
Kepala SPI / Head of SPI	Bambang Arif Setyabudi
Kepala Pemeriksa / Head of Examiner	<ul style="list-style-type: none"> • Murda Sehri • Mochamad Farid • Teguh Tyas Adi S.
Pemeriksa & Pengawasan Bidang Keuangan / Examiner & Audit in Finance	<ul style="list-style-type: none"> • Ginanjar Satria Febriandito • Anggun Nuansa Dewi • Wenny Indriyani
Pemeriksa & Pengawasan Bidang Operasional / Examiner & Audit in Operation	<ul style="list-style-type: none"> • Murda Sehri • Teguh Tyas Adi Sunaryo
Pemeriksa & Pengawas Bidang Kepatuhan & Jasa Konsultasi / Examiner & Audit in Compliance & Consultation Services	Bambang Arif Setyabudi
Jumlah / Total	7 orang / 7 people

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Head of Internal Audit Unit Profile



Bambang Arif Setyabudi

Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) / Head of Internal Audit Unit

Kewarganegaraan	: Indonesia	Nationality	: Indonesian
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kediri, 6 Februari 1966	Place and Date of Birth	: Kediri, February 6, 1966
Usia	: 54 tahun per 31 Desember 2020	Usia	: 54 years old as of December 31, 2020
Domisili	: Bekasi	Domicile	: Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern Perseroan sejak 10 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/WB-0A.298/2017.		
Masa Jabatan	Sampai diputuskan lebih lanjut		
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1991).		
Pengalaman Kerja	Sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai Manajer Keuangan PT Wijaya Karya Komponen Beton (2013-2014), Direktur Keuangan dan SDM PT Wijaya Karya Krakatau Beton (2014-2017), dan Kepala SPI PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017-sekarang).		
Sertifikasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Register Negara Akuntan (1991) • Internal Quality Auditor (2005) • Certified Professional Management Accountant (2012) • Risk Assessment Technique (ISO 31000) (2014) • Qualified Internal Auditor (2019) 		
Jabatan Rangkap	Tidak Ada		
Hubungan Afiliasi	Tidak Ada		
Legal Basis of Appointment	Appointed as Head of the Company's Internal Audit Unit since July 10, 2017 based on the Decree of the Board of Directors SK.02.01/WB-0A.298/2017.		
Term of Office	Until further decision		
Educational Background	Bachelor's Degree in Economics from Brawijaya University (1991).		
Work Experience	Previously, he worked as Finance Manager at PT Wijaya Karya Komponen Beton (2013-2014), Director of Finance and Human Resources at PT Wijaya Karya Krakatau Beton (2014-2017), and Head of SPI at PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2017-present).		
Professional Certification	<ul style="list-style-type: none"> • State Registered Accountant (1991) • Internal Quality Auditor (2005) • Certified Professional Management Accountant (2012) • Risk Assessment Technique (ISO 31000) (2014) • Qualified Internal Auditor (2019) 		
Concurrent Position	None		
Affiliations	None		

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang kedudukannya setingkat dengan Manajer Biro. Secara teknis, Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan setiap pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Kepala SPI diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris jika kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor SPI sebagaimana diatur dalam persyaratan jabatan Kepala SPI dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Dan jika

Party Appointing and Dismissing Head of Internal Audit Unit

SPI is led by a Head of SPI who is at the same level as the Bureau Manager. Technically, the Head of SPI is directly responsible to the President Director. The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and every appointment, replacement, and dismissal of the Head of SPI is notified to the Financial Services Authority. The President Director can dismiss the Head of SPI, after obtaining approval from the Board of Commissioners if the head of SPI does not meet the requirements as an SPI auditor as stipulated in the requirements for the position of the Head of SPI and or fails or is incapable of carrying out his/her duties. And

pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Direktur Utama perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, maka Direktur Utama memberikan tanggapan atau disposisi secara tertulis, untuk segera ditindaklanjuti oleh SPI.

Piagam Satuan Pengawasan Intern

Dalam rangka mendorong efektivitas pengawasan terhadap implementasi GCG dan Manajemen Risiko, Perseroan telah memiliki Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) sebagaimana termaktub di dalam Surat Keputusan Direksi No. 01.01/WB-0A.010/2014 tanggal 27 Januari 2014 dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. 01.01/WB-0A.0127/2016 tanggal 15 Agustus 2016, menyesuaikan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Intern Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.01.01/WB-0A.499/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern yang disahkan dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan. Piagam Pengawasan Intern Perseroan berisi tentang pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Audit Intern, visi & misi, struktur & kedudukan, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab, pelaporan, kode etik, persyaratan auditor, standar profesional, serta pola hubungan dan larangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern

Sebagaimana tertuang di dalam Piagam Pengawasan Internal Perseroan, di bawah ini adalah sejumlah tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh SPI Perseroan, yaitu:

1. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berbasis risiko termasuk perhitungan anggaran biayanya yang berkaitan dengan sifat audit dan jumlah unit kerja yang diprogramkan akan diperiksa.
2. Melakukan pemeriksaan rutin sesuai dengan jadwal yang telah dituangkan di dalam PKPT, dan menguji serta mengevaluasi pelaksanaan Pengendalian Intern dan sistem Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas, minimal dilakukan pada bidang Akuntansi, Keuangan, Operasional, Human Capital, Pemasaran, Teknik Mutu, Produksi, Teknologi Informatika dan melakukan evaluasi atas sistem, prosedur, dan kebijakan operasi perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan.
4. Menyiapkan dan mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
5. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah ditandatangani Kepala SPI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Membuat draft Surat Tindak Lanjut Direktur Utama yang difokuskan pada permasalahan utama dan yang dirasa perlu mendapatkan penanganan segera dari pimpinan unit kerja yang diperiksa. Selanjutnya, Direktur Utama akan menandatangani Surat Tindak Lanjut tersebut apabila telah sesuai dengan pandangan Direktur Utama.

if the accountability submitted to the President Director needs further explanation, then the President Director will provide a response or disposition in writing, to be followed up immediately by SPI.

Internal Audit Unit Charter

To promote the effective monitoring of GCG implementation and risk management, the Company has an Internal Audit Charter according to Decree of the Board of Directors No. 01.01/WB-0A.010/2014 dated January 27, 2014 and has been amended by Decree of the Board of Directors No. 01.01/WB-0A.0127/2016 dated August 15, 2016, adjusting the OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Formulation of Internal Audit Charter, endorsed and signed by the President Commissioner and the President Director of the Company. The charter contains implementation of tasks, authorities, and responsibilities of internal audit, vision and mission, structures and position, targets, scope of work, reporting, code of conduct, auditor requirement, professional standard, and relationship pattern.

Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit

As set forth in the Internal Audit Charter, duties and responsibilities that must be conducted by IAU are as follows:

1. Prepare the Risk-based Annual Work Program (PKPT) including cost calculation budget related to audit nature and number of work units programmed to be examined.
2. Conduct routine inspection according to the schedule in the PKPT, and examining or evaluating the implementation of Internal Control and Risk Management Systems by the applicable provisions.
3. Conduct checkups and evaluations on efficiency and effectiveness, at a minimum carried out in the fields of Accounting, Finance, Operations, Human Capital, Marketing, Quality Engineering, Production, Information Technology and evaluating the Company's systems, procedures and operational policies that are carried out continuously.
4. Prepare and make an Audit Working Paper (KKP) documentation.
5. Submit the Audit Result Report (LHP) signed by the Head of Internal Audit Unit to the President Director and the Board of Commissioners via Audit Committee.
6. Draft Letter of Follow up of the President Director which is focused on the main issues and need to get immediate handling from the head of the work unit being examined and the President Director will sign the Follow-Up Letter if it has been in accordance with the views of the President Director.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Memantau dan menganalisis tindak lanjut dari LHP yang disampaikan kepada pimpinan tertinggi unit kerja secara terus menerus sampai ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi dari Direktur Utama, dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dan Komite Audit. 8. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan auditor SPI dengan mengikuti berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi keahlian profesi seperti <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i> dan atau <i>Professional Internal Auditor (PIA)</i> yang berkelanjutan. 9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan oleh SPI dengan melakukan “peer review” sebagaimana diatur dalam prosedur jaminan kualitas (<i>Quality Assurance</i>) pemeriksaan SPI. 10. Memberikan pendapat, masukan, dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. 11. Bekerja sama dan membina hubungan yang setara dengan Komite Audit. 12. Melakukan audit khusus bila diperlukan. 13. Dalam hal ditugaskan untuk bekerja sama dengan organ pendukung Dewan Komisaris selain Komite Audit akan ditetapkan dalam surat penugasan tersendiri. | <ol style="list-style-type: none"> 7. Monitor Follow-Up from LHP submitted to the highest chairman of the work unit continuously until followed up in accordance with the disposition of the President Director, and report the results to the President Director and Audit Committee. 8. Improve the competence and capability of SPI auditors through ongoing education and training and certification of professional expertise, such as <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i> and/or <i>Professional Internal Auditors (PIA)</i>. 9. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities conducted by SPI by conducting a “peer review” as stipulated in the quality assurance procedure for the SPI examination. 10. Provide opinions, inputs and considerations as well as objective consultation services to Management and other work units related to supervisory functions. 11. Work together and foster relationships that are on par with the audit committee. 12. Conduct a special audit if needed. 13. In the case of being assigned to cooperate with supporting organs of the Board of Commissioners other than the Audit Committee, it will be stipulated in a separate assignment letter. |
|---|--|

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki peranan sebagai berikut:

1. Memberi masukan kepada Direktur Utama dalam hal pengurusan dan pengelolaan Perseroan agar selaras dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan.
2. Membantu Direktur utama dalam memastikan kecukupan dan memberikan penilaian tas sistem pengendalian internal Perseroan di semua level operasional Perseroan.
3. Membantu Direktur Utama agar dapat secara efektif mengamankan aset Perseroan.
4. Melakukan analisis dan evaluasi efektivitas sistem serta prosedur pada semua lini dalam organisasi Perseroan.
5. Sebagai mitra unit kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan saat menjalankan kegiatan operasional Perseroan.
6. Membantu dalam sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.
7. Membantu dalam menciptakan sistem peringatan dini bagi manajemen guna mengambil tindakan korektif atas penyimpangan yang mungkin akan atau telah terjadi.
8. Sebagai organ pendorong perubahan untuk menciptakan budaya bersih dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan Satuan Pengawasan Intern

SPI Perseroan juga memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:

1. Menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.

In performing its duties, SPI has the following roles:

1. Provide input to the President Director in managing the Company to be consistent with the established business strategy.
2. Assist the President Director in ensuring the adequacy and conduct assessment of the Company’s internal control system at all operational levels of the Company.
3. Assist the President Director in order to effectively safeguard the Company’s assets.
4. Conduct analysis and evaluation of system effectiveness and procedures on all lines within the organization of the Company.
5. As a partner of the work unit in carrying out supervisory functions in the Company’s operational activities.
6. Assist the socialization and implementation of policies and regulations set by the management of the Company.
7. Assist to create an early warning system for management to take corrective action on deviations that have occurred or will occur.
8. As the driving organ of change to create a clean culture and in accordance with applicable laws and regulations.

Authorities of Internal Audit Unit

Authorities of IAU of the Company are as follows:

1. Preparing, changing, and carrying out internal audit policies, among others, determining the procedures and scope of work.

2. Memasuki seluruh area Perseroan dan meninjau tempat usaha, lingkungan kerja, dan lokasi aset Perseroan.
 3. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai dalam rangka pemeriksaan.
 4. Memiliki akses sepenuhnya atas semua dokumen, pencatatan, Pegawai Perseroan dan fisik Informasi atas Objek Pemeriksaan (OBRIK), untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
 5. Meminta bantuan tenaga pemeriksa dari dalam Perseroan maupun tenaga profesional dari eksternal dalam hal tidak tersedianya kompetensi Auditor SPI dan dari luar Perseroan jika dipandang perlu dengan beban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
 6. Mengomunikasikan secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris.
 7. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
 8. Mengoordinasikan seluruh kegiatan SPI dengan kegiatan Auditor Eksternal.
 9. Melakukan pengawasan pada Anak Perusahaan dalam lingkup PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SPI PT Wijaya Karya Beton Tbk wajib melakukan koordinasi dengan Kepala SPI Anak Perusahaan untuk meminta keterangan dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah pengawasan dan menyelaraskan program SPI PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan SPI Anak Perusahaan.
 - b. Atas hasil pemeriksaan SPI PT Wijaya Karya Beton Tbk dilaporkan secara langsung kepada Komisaris Utama Anak Perusahaan dengan ditembuskan kepada Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk dan Direktur Utama Anak Perusahaan.
2. Having access into all areas of the Company and reviewing the Company's business projects, workplace and assets location.
 3. Requesting explanations to all levels of management and employees in the framework of the audit.
 4. Having full access to all documents, records, Company Officers and physical information on Audit Object (OBRIK), to obtain data and or information related to the conduct of audit.
 5. Requests the assistance of auditors from within the Company as well as external professionals in the absence of the competence of SPI Auditors, and from outside the Company if deemed necessary by the expenses that are the responsibility of the Company.
 6. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and or other Committees under the Board of Commissioners.
 7. Conducting regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and /or Audit Committee.
 8. Coordinate the activities of SPI with the activities of the External Auditor.
 9. Supervise the subsidiaries under PT Wijaya Karya Beton Tbk. with the following conditions:
 - a. Head of SPI of PT Wijaya Karya Beton Tbk. must coordinate with Head of SPI of the subsidiary to request information and documents needed in accordance with the rules of supervision and aligning the SPI program of PT Wijaya Karya Beton Tbk. with SPI of the subsidiaries.
 - b. Upon the results of the SPI inspection of PT Wijaya Karya Beton Tbk. reported directly to the President Commissioner of the subsidiary by being sent to the President Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk. and Managing Director of the subsidiaries.

Hubungan Kerja Satuan Pengawasan Intern

Dalam rangka melaporkan proses pelaporan kegiatan audit internal, SPI menjalin hubungan kerja dengan organ Perseroan lainnya yang meliputi aktivitas hubungan kerja dengan manajemen, hubungan kerja dengan Komite Audit, serta hubungan dengan Auditor Eksternal.

I. Hubungan Kerja dengan Manajemen

SPI menjadi mitra bagi semua level manajemen di Perseroan dengan berperan sebagai advisor untuk memberikan masukan kepada Direksi, serta memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan di semua unit kerja guna memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh Direksi dan SPI telah dijalankan oleh semua lini usaha di dalam organisasi secara konsisten.

Internal Audit Unit Work Relations

To finish their report on internal audit report, SPI works together with other organs within the Company. SPI works together with management, Audit Committee, and External Auditor.

I. Work Relationship with Management

SPI as a partner for all levels of management as well as an advisor who provides constructive feedback to the Board of Directors, is authorized at all times to perform its functions on all work units within the scope of the Company to ensure that the policies of the Board of Directors and Internal Control System are carried out by all lines within the organization consistently.

2. Hubungan Kerja dengan Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI dan Komite Audit menjadi mitra kerja yang baik, di mana Komite Audit melakukan penilaian atas aktivitas hasil audit yang dilakukan oleh SPI dan memberikan masukan yang konstruktif kepada SPI sebagai wujud umpan balik atas pelaksanaan tugas yang dilakukan SPI. Rapat koordinasi antara SPI dan Komite Audit diselenggarakan minimal 1 kali dalam sebulan.

3. Hubungan dengan Auditor Eksternal

SPI berperan sebagai mitra bagi auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dalam memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan audit eksternal agar proses audit dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Independensi Satuan Pengawasan Intern

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pemeriksa Intern dalam konteks kebebasan bertindak (independensi) secara objektif diaplikasikan sebagai berikut:

1. Tidak memihak kepada kepentingan para pihak dalam Perseroan seperti Manajemen dan Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan kaidah dan prinsip audit internal yang diterima dan berlaku secara umum.
3. Dalam pelaksanaan tugas audit membebaskan diri dari segala kepentingan pribadi maupun unit kerja yang diperiksa, dengan tetap menjunjung teguh kode etik yang telah ditetapkan.

Kode Etik SPI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SPI berkewajiban untuk senantiasa menjaga martabat dan kehormatan, serta berpedoman pada etika bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh anggota SPI terikat pada kode etik dan prinsip dasar yang wajib dipatuhi selama pelaksanaan tugas masing-masing, yaitu:

1. Pemeriksa internal wajib bersikap jujur, objektif, hati-hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani, dan memiliki integritas yang tinggi serta harus mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya, dan harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Utama dan atau Kepala Satuan Pengawasan Internal.
2. Pemeriksa internal harus mampu memelihara dan menjaga kepercayaan yang diberikan dalam rangka tugas pemeriksaan.
3. Pemeriksa internal harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai guna mendukung pernyataannya.
4. Pemeriksa internal harus berusaha untuk meningkatkan keahlian dalam melakukan pekerjaannya dengan memelihara kompetensi jabatan, moralitas, dan menjunjung tinggi kehormatan jabatan.
5. Pemeriksa internal harus membangun komunikasi yang intens dengan sesama pemeriksa dan auditor eksternal, untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembannya.

2. Work Relationship with Audit Committee

In performing its duties, the SPI and the Audit Committee are good partners, in which the Audit Committee reviews the audit activities conducted by the SPI, and provides constructive input to the SPI as feedback on the implementation of the task undertaken by the SPI, which is realized by the coordination meeting conducted at least once a month.

3. Work Relationship with External Auditor

Internal Audit Unit is as a partner for external auditors (Public Accounting Firm) to provide relevant information based the objectives of the external audit, so the audit process can be done according to the applicable regulations.

Independency of Internal Audit Unit

In carrying out its duties and functions as Internal Examiner in the context of freedom of action (independence) objectively the following are applied:

1. Not taking sides with the interests of the parties in the Company such as Management and Commissioners, either directly or indirectly.
2. Conduct an inspection in accordance with the generally accepted rules and principles of internal audit.
3. In carrying out the audit task, free himself/herself from all personal interests and work units being examined, while still upholding the established code of conduct.

SPI Code of Conduct

In carrying out its duties and responsibilities, SPI is obliged to always maintain dignity and honor, and be guided by business ethics and applicable laws and regulations. Therefore, all SPI members are bound by code of ethics and basic principles that must be obeyed during the execution of their respective duties, namely:

1. Internal auditors must be honest, objective, careful, wise, responsible, brave and have high integrity and must be able to act independently in carrying out their duties and obligations, and must be able to maintain the trust given by the President Director and or Head of Internal Audit Unit.
2. Internal auditors shall maintain the trust given in the framework of the examination task.
3. Internal auditors shall use all his or her ability to obtain, sufficient evidence to support his or her statement.
4. Internal auditors shall strive to improve their skills in performing their work by maintaining the competence of office, morality, and upholding honor of position.
5. Internal auditors shall establish intense communication with fellow auditors and external auditors, for the interest of the Company in the context of carrying out its duties.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Dalam rangka menjalankan tugasnya, pemeriksa internal harus berpedoman kepada norma-norma pemeriksaan dan prosedur umum pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Internal. 7. Pemeriksa internal harus menghindarkan diri untuk mengambil bagian dalam aktivitas ilegal atau yang tidak sepatasnya dilakukan. 8. Pemeriksa internal berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun prasangka yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertindak secara independen. 9. Dalam menerima penugasan di luar kegiatan pemeriksaan dan operasional perusahaan, diminta sebagai pemeriksa internal wajib menanggalkan identitas dan atributnya selaku pemeriksa internal; 10. Pemeriksa internal dilarang untuk merangkap tugas secara langsung dalam kegiatan operasional Perseroan. | <ol style="list-style-type: none"> 6. In the framework of his/her duties, internal auditors shall be guided by the norms of examination and general inspection procedures by the Internal Audit Unit. 7. Internal auditors shall avoid taking part in illegal or inappropriate activities. 8. Internal auditors strive to not engage in activities that may create conflicts of interest or prejudices that may doubt their ability to act independently. 9. In accepting the assignment outside the Company's audit and operational activities, requested as an internal auditor shall be required to dispose of its identity and its attributes as an internal auditor. 10. Internal auditors are prohibited from being assigned directly to the operations of the Company. |
|--|--|

Persyaratan/Kualifikasi Sebagai Anggota SPI

Menyadari peranan SPI yang sangat besar bagi Perseroan terutama dalam hal pengendalian internal di segala aspek bisnis dan operasional, maka seluruh anggota SPI diwajibkan untuk memenuhi kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, setiap insan SPI harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas audit internal serta berkewajiban untuk melakukan pelatihan/pengembangan profesional berkelanjutan. Uraian lengkap mengenai persyaratan keahlian lainnya yang harus dimiliki oleh seluruh anggota SPI telah diatur di dalam Piagam Pengawasan Internal.

Sertifikasi Profesi Audit Internal

Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 4 (empat) orang personil SPI yang telah memiliki sertifikasi yang relevan dengan aktivitas audit internal, antara lain:

Nama / Name	Sertifikasi / Certifications
Bambang Arif Setyabudi	Sertifikasi QIA (<i>Qualified Internal Auditor</i>)
M. Farid	Sertifikat Konsultan Pajak dari KP3SKP / Tax Consultant Certificate from KP3SKP
	<i>Qualified Internal Audit Level Manajerial / Managerial Level Qualified Internal Audit</i>
Murda Sehri	<i>Qualified Internal Audit Level Dasar / Basic Level Qualified Internal Audit</i>
Anggun Nuansa Dewi	Sertifikasi CA (<i>Chartered Accountant</i>)

Requirements/Qualifications for SPI Member

Acknowledging the important roles of Internal Audit Unit to the Company in internal control systems in business and operational aspects, all members of Internal Audit Unit shall fulfill the established qualifications. All members of Internal Audit Unit must possess the knowledge, skill, and competency required for audit activities and need to participate in advanced professional training. The complete detail for these requirements is noted in the Internal Audit Unit Charter.

Internal Audit Professional Certification

As of December 31, 2020, there are 4 (four) SPI personnel that have certifications relevant with internal audit activity, among others:

Pengembangan Kompetensi SPI Tahun 2020

Perseroan mengakomodasi pengembangan kompetensi bagi auditor internal agar senantiasa relevan dengan perkembangan audit melalui pelatihan dan/atau pendidikan secara berjenjang, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal Perseroan. Informasi mengenai pengembangan kompetensi auditor internal telah dimuat dalam Laporan Tahunan ini, bab Profil Perusahaan, bagian Pelatihan dan/atau Pendidikan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

Competence Development for SPI in 2020

The Company accommodates competency development for internal auditors so that they are always relevant to the development of audits through training and/or education in stages, both organized by the Company internally and externally. Information regarding the competency development of internal auditors has been contained in this Annual Report on the Company Profile chapter, the Training and/or Education of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit section.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Tahun 2020

Kegiatan SPI selama tahun 2020 terdiri atas rencana pemeriksaan dan non pemeriksaan. Selama tahun 2020, SPI merencanakan program kerja pemeriksaan reguler sebanyak 33 auditee dan telah terealisasi sebanyak 33 auditee sampai dengan 31 Desember 2020. Adapun program kerja non pemeriksaan selama tahun 2020 adalah sebanyak 7 program kerja. Rincian kegiatan SPI tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program kerja pemeriksaan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan I
- Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan II
- Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan III
- Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan IV
- Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan V
- Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan VI
- Pemeriksaan Audit SPI di PPB Sumatera Utara
- Pemeriksaan Audit SPI di PPB Bogor
- Pemeriksaan Audit SPI di PPB Majalengka
- Pemeriksaan Audit SPI di PPB Boyolali
- Pemeriksaan Audit SPI di PPB Pasuruan
- Pemeriksaan Audit SPI di PPB Sulawesi Selatan
- Pemeriksaan Audit SPI di PPB A.P. Pettarani
- Pemeriksaan Audit SPI di PPB Karawang
- Pemeriksaan Audit SPI di PPB Subang
- Pemeriksaan Audit SPI di PPB Lampung Selatan
- Pemeriksaan Audit SPI di *Mobile Plant* Bangkinang
- Pemeriksaan Audit SPI di Proyek A.P. Pettarani
- Pemeriksaan Audit SPI di Proyek Dermaga Kijing
- Pemeriksaan Audit SPI di Proyek Ramp Barat – Ramp Timur Jakarta International Stadium
- Pemeriksaan Audit SPI di Divisi Operasi
- Pemeriksaan Audit SPI di Divisi Pengelolaan Material
- Pemeriksaan Audit SPI di Unit Penunjang Konstruksi
- Pemeriksaan Audit SPI di Unit Pemancangan
- Pemeriksaan Audit SPI di *Ready Mix Concrete High Speed Railway*
- Pemeriksaan Audit SPI di *Ready Mix Concrete* Pusat
- Pemeriksaan Audit SPI di *Ready Mix Concrete* Pekanbaru
- Pemeriksaan Audit SPI di *Ready Mix Concrete* A.P. Pettarani
- Pemeriksaan Audit SPI di Proyek Hunian Tetap Palu (2x kunjungan)
- Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan IV (Audit Khusus Piutang)
- Pemeriksaan Audit SPI di *Crushing Plant* Lampung Selatan

2. Program Kerja Non Pemeriksaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Laporan Tahunan dan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2020
- Rapat Pembahasan Temuan dengan Komite Audit dan Komisaris
- Pertemuan SPI BUMN dan SPI WIKA Group
- Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI)
- Counterpart Pemeriksaan Audit Kantor Akuntan Publik

Report on SPI Activities in 2020

SPI activities in 2020 consist of audit and non-audit plans. Throughout 2020, SPI planned 33 auditees for regular examination work programs and 33 auditees have been realized by December 31, 2020. As for the non-examination work program throughout 2020, there were 7 work programs. The details of SPI activities in 2020 are as follows:

1. Audit work program in 2020 with the following details:

- SPI Audit in Sales Area I
- SPI Audit in Sales Area II
- SPI Audit in Sales Area III
- SPI Audit in Sales Area IV
- SPI Audit in Sales Area V
- SPI Audit in Sales Area VI
- SPI Audit at PPB North Sumatra
- SPI Audit at PPB Bogor
- SPI Audit at PPB Majalengka
- SPI Audit at PPB Boyolali
- SPI Audit at PPB Pasuruan
- SPI Audit at PPB South Sulawesi
- SPI Audit at PPB A.P. Pettarani
- SPI Audit at PPB Karawang
- SPI Audit at PPB Subang
- SPI Audit at PPB South Lampung
- SPI Audit at Mobile Plant Bangkinang
- SPI Audit at the A.P. Pettarani Project
- SPI Audit at the Kijing Dock Project
- SPI Audit at West Ramp - East Ramp Jakarta International Stadium Project
- SPI Audit in the Operations Division
- SPI Audit in the Material Management Division
- SPI Audit in Construction Support Unit
- SPI Audit at the Piling Unit
- SPI Audit on Ready Mix Concrete High Speed Railway
- SPI Audit at the Readymix Concrete Center
- SPI Audit at Ready Mix Concrete Pekanbaru
- SPI Audit at Ready Mix Concrete A.P. Pettarani
- SPI Audit at the Palu Permanent Residential Project (2 visits)
- SPI Audit in Sales Area IV (Receivables Audit)
- SPI Audit at Crushing Plant South Lampung

2. Non-Audit Work Program in 2020 is as follows:

- Preparation of the 2020 Annual Report and Annual Audit Work Program (PKPT)
- Findings Discussion Meeting with the Audit Committee and the Commissioners
- Meeting of SPI BUMN and SPI WIKA Group
- Communication Forum for Internal Audit Unit (FKSPI)
- Counterpart Audit of Public Accounting Firm

- Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA)
- Rapat Koordinasi Internal SPI

- Qualified Internal Auditor (QIA) Certification
- Internal SPI Coordination Meeting

Laporan Temuan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan 33 auditee yang telah dilaksanakan selama tahun 2020, terdapat 348 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 348 temuan (100%).

Fokus SPI Tahun 2021

Pada tahun 2021, selain melakukan audit terhadap unit maupun anak perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk, SPI menjalankan fokus audit sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan merencanakan program kerja pemeriksaan reguler sebanyak 31 auditee dan 3 anak perusahaan serta program kerja non pemeriksaan tahun 2021 adalah sebanyak 9 program kerja, dengan rincian kegiatan SPI tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- I. Program Kerja Pemeriksaan Reguler
 - Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan I
 - Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan II
 - Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan III
 - Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan IV
 - Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan V
 - Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan VI
 - Pemeriksaan Audit SPI di Wilayah Penjualan VII
 - Pemeriksaan Audit SPI di PPB Sumatera Utara
 - Pemeriksaan Audit SPI di PPB Lampung
 - Pemeriksaan Audit SPI di PPB Bogor
 - Pemeriksaan Audit SPI di PPB Majalengka
 - Pemeriksaan Audit SPI di PPB Boyolali
 - Pemeriksaan Audit SPI di PPB Pasuruan
 - Pemeriksaan Audit SPI di PPB Sulawesi Selatan
 - Pemeriksaan Audit SPI di PPB Subang *Plant* Karawang
 - Pemeriksaan Audit SPI di PPB Subang
 - Pemeriksaan Audit SPI di PPB Lampung Selatan
 - Pemeriksaan Audit SPI di *Mobile Plant* Bangkinang
 - Pemeriksaan Audit SPI di *Crushing Plant* Bogor
 - Pemeriksaan Audit SPI di Proyek Ramp Barat – Ramp Timur Jakarta International Stadium
 - Pemeriksaan Audit SPI di Divisi Operasi
 - Pemeriksaan Audit SPI di Divisi Pengelolaan Material
 - Pemeriksaan Audit SPI di Unit Penunjang Konstruksi
 - Pemeriksaan Audit SPI di Unit Pemancangan
 - Pemeriksaan Audit SPI di *Mobile Concrete* I
 - Pemeriksaan Audit SPI di *Mobile Concrete* II
 - Pemeriksaan Audit SPI di *Mobile Concrete* III
 - Pemeriksaan Audit SPI di *Mobile Concrete* IV
 - Biro Penelitian dan Pengembangan
 - Biro Sistem Informasi
 - Pemeriksaan Audit Anak Perusahaan PT Citra Lautan Teduh
 - Pemeriksaan Audit Anak Perusahaan PT WIKA Kobe
 - Pemeriksaan Audit Anak Perusahaan PT WIKA Krakatau Beton

Findings and the Follow-up

There were 348 findings from 33 auditees in 2020 and all of the findings have been followed-up (100%).

SPI Focus for 2021

In 2021, in addition to auditing the unit and subsidiary of PT Wijaya Karya Beton Tbk., SPI focuses its audit in accordance with the Annual Audit Work Program (PKPT) and plans a regular audit work program of 31 auditees and 3 subsidiaries as well as a yearly non-audit work program. There are 9 work programs for 2021, with details as follows:

- I. Regular Audit Work Program
 - SPI Audit in Sales Area I
 - SPI Audit in Sales Area II
 - SPI Audit in Sales Area III
 - SPI Audit in Sales Area IV
 - SPI Audit in Sales Area V
 - SPI Audit in Sales Area VI
 - SPI Audit in Sales Areas VII
 - SPI Audit at PPB North Sumatra
 - SPI Audit at PPB Lampung
 - SPI Audit at PPB Bogor
 - SPI Audit at PPB Majalengka
 - SPI Audit at PPB Boyolali
 - SPI Audit at PPB Pasuruan
 - SPI Audit in PPB South Sulawesi
 - SPI Audit at PPB Subang *Plant* Karawang
 - SPI Audit at PPB Subang
 - SPI Audit at PPB South Lampung
 - SPI Audit at *Mobile Plant* Bangkinang
 - SPI Audit at *Crushing Plant* Bogor
 - SPI Audit at West Ramp - East Ramp Jakarta International Stadium Project
 - SPI Audit in the Operations Division
 - SPI Audit in the Material Management Division
 - SPI Audit in Construction Support Unit
 - SPI Audit at the Piling Unit
 - SPI Audit on *Mobile Concrete* I
 - SPI Audit on *Mobile Concrete* II
 - SPI Audit on *Mobile Concrete* III
 - SPI Audit on *Mobile Concrete* IV
 - Research and Development Bureau
 - Information System Bureau
 - Audit of subsidiary PT Citra Lautan Teduh
 - Audit of Subsidiary PT WIKA Kobe
 - Audit of Subsidiary PT WIKA Krakatau Beton

2. Program Kerja Non-Pemeriksaan
 - Penyusunan Laporan Tahunan dan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2021
 - Rapat Pembahasan dengan Komite Audit dan Komisaris
 - Pertemuan SPI BUMN dan SPI WIKA Group
 - Rencana Pertemuan Seminar Nasional Internal Auditor 2021
 - Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI)
 - Counterpart Pemeriksaan Audit Kantor Akuntan Publik
 - Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA)
 - Rapat Koordinasi Internal SPI
 - Mendampingi (*Counterpart*) GCG Tahun 2021

AUDITOR EKSTERNAL

Dalam mendukung penerapan prinsip independensi dan akuntabilitas *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal independen profesional yang melakukan audit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember setiap tahunnya. Mekanisme pemilihan Kantor Akuntan Publik mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit dan disetujui oleh RUPS.

Pada pelaksanaannya, auditor eksternal yang telah ditunjuk tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan demi menjadi independensi dan akuntabilitas hasil audit. Auditor eksternal bertanggungjawab dalam memberikan opini audit mengenai aspek kepatuhan laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, manajemen bertanggung jawab dalam hal penyajian laporan keuangan Perseroan dan aspek kepatuhannya terhadap SAK yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah ditetapkan oleh Ikatan akuntan Indonesia (IAI) dan Keputusan Ketua Badan Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Prosedur Pelaksanaan Audit Eksternal

Dalam menjalankan aktivitas audit sebagaimana penunjukannya, Akuntan Publik dan Auditor Eksternal senantiasa patuh terhadap prosedur yang berlaku sebagai berikut:

1. Audit atas laporan keuangan Perseroan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu.

2. Non-Audit Work Program
 - Preparation of the 2021 Annual Report and Annual Audit Work Program (PKPT)
 - Discussion Meetings with the Audit Committee and Commissioners
 - Meeting of SPI BUMN and SPI WIKA Group
 - Plan for the 2021 National Internal Auditor Seminar
 - Communication Forum for Internal Audit Unit (FKSPI)
 - Counterpart Audit of Public Accounting Firm
 - Qualified Internal Auditor (QIA) Certification
 - Internal SPI Coordination Meeting
 - Assist (*Counterpart*) GCG in 2021

EXTERNAL AUDITOR

In supporting the implementation of the principles of independence and accountability of *Good Corporate Governance* (GCG), the Company appointed a Public Accounting Firm (KAP) as a professional independent External Auditor that audits financial statements for the year ended in December 31 each year. The mechanism for selecting a Public Accounting Firm follows the procedures for procurement of goods and services applicable in the Company by taking into account the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee and approved by the GMS.

In practice, the appointed external auditor is not allowed to have a conflict of interest with the Company in order to be independent and accountable for the results of the audit. The external auditor is responsible for providing audit opinions regarding the compliance aspects of the Company's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). Meanwhile, management is responsible for the presentation of the Company's financial statements and aspects of compliance with the applicable SAK in Indonesia as stipulated by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Decree of the Chairman of the Financial Institution and Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK) which is currently known as the Financial Services Authority (OJK) No. VIII.G.7, Attachment to Decree No. KEP-347/BL/2012, dated June 25, 2012 concerning Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Procedures of External Audit Implementation

In carrying out audit activities, Public Accountants and External Auditors always comply with the following applicable procedures:

1. Audit on the Company's financial statements is carried out in accordance with the professional standards of the Public Accountant which includes all audit procedures deemed necessary.

2. Aktivitas audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, serta pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan di dalam laporan keuangan. Kegiatan audit eksternal mencakup penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikansi yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan proses tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
4. Kegiatan audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material, maka KAP akan menyampaikannya kepada manajemen.
5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perseroan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Perseroan telah menunjuk KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, di mana proses penunjukan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yang ada:

- Berdasarkan Surat Dewan Komisaris WIKA Nomor: II/DK/WB/VI/2020
- Berdasarkan Surat Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: KU.02.01/A.DIR.03920/2020
- Berdasarkan surat Tim Pengadaan Jasa KAP Nomor: KU.04.09/WB-0A.0009/2020
- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 26 Maret 2020 yang memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Pengganti.

Nama KAP dan Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Keuangan 5 Tahun Terakhir

Informasi nama Kantor Akuntan Publik (KAP), nama Akuntan Publik, fee, dan izin KAP yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir dimuat dalam tabel berikut:

Tahun / Year	Nama KAP / KAP Name	Nama Akuntan Publik / Public Accountant Name	Jasa / Service	Jasa Lainnya / Other Services	Biaya (Rp) / Fees (Rp)
2020	RSM Indonesia	Benny Andria, Se, Ak, CPA	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2020 / General Audit of the 2020 Consolidated Financial Statements	1. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) / Audit of Compliance with the Laws and Regulations and Internal Control (PSA 62) 2. Evaluasi Kinerja Tahun 2020 berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 / 2020 Performance Evaluation based on Minister of SOE Decree No.KEP-100/MBU/2002	415.000.000

2. The audit activity includes testing and evaluation of the internal control system, as well as examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The external audit activity includes assessing the accounting principles used and estimates of significance made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI.
3. As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts a question and answer process to management regarding management's statements presented in the financial statements.
4. Audit activities carry an inherent risk that if there are material errors and irregularities, the KAP will deliver it to management.
5. Management approved the KAP audit working paper on the Company to be reviewed by the relevant agency or authority.

Mechanisms for Public Accountant Appointment

The Company has appointed KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan to audit the 2020 Financial Statements, where the appointment process has been carried out according to the existing procedures:

- Based on the Letter of the WIKA Board of Commissioners No: II/DK/WB/VI/2020
- Based on the Letter of the Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No: KU.02.01/A.DIR.03920/2020
- Based on the letter of the KAP Service Procurement Team No: KU.04.09/WB-0A.0009/2020
- Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk dated March 26, 2020 which delegated power and authority to the Board of Commissioners to appoint a replacement KAP.

Name of KAP and Public Accountant that Audited the Financial Statements for the Last 5 Years

Information on the name of the Public Accounting Firm (KAP), the name of the Public Accountant, fees, and the KAP license that audited the Company's Financial Statements for the last 5 (five) years is presented in the following table:

Tahun / Year	Nama KAP / KAP Name	Nama Akuntan Publik / Public Accountant Name	Jasa / Service	Jasa Lainnya / Other Services	Biaya (Rp) / Fees (Rp)
2019	RSM Indonesia	Benny Andria, Se, Ak, CPA	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2019 / General Audit of the 2019 Consolidated Financial Statements	<ul style="list-style-type: none"> Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) / Audit on Compliance with the Laws and Regulation and Internal Control (PSA 62) Evaluasi Kinerja Tahun 2019 berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 / Evaluation on Performance in 2019 based on the Decree of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 	384.294.000
2018	RSM Indonesia	Benny Andria, Se, Ak, CPA	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2018 / General Audit of the 2018 Consolidated Financial Statements	<ul style="list-style-type: none"> Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) / Audit on Compliance with the Laws and Regulation and Internal Control (PSA 62) Evaluasi Kinerja Tahun 2018 berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 / Evaluation on Performance in 2018 based on the Decree of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 	374.587.200
2017	HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Djarwoto, Ak, CPA	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2017 / General Audit of the 2017 Consolidated Financial Statements	<ul style="list-style-type: none"> Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) / Audit on Compliance with the Laws and Regulation and Internal Control (PSA 62) Evaluasi Kinerja Tahun 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 / Evaluation on Performance in 2017 based on the Decree of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 	306.000.000
2016	HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Djarwoto, Ak, CPA	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2016 / General Audit of the 2016 Consolidated Financial Statements	<ul style="list-style-type: none"> Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) / Audit on Compliance with the Laws and Regulation and Internal Control (PSA 62) Evaluasi Kinerja Tahun 2016 berdasarkan SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 / Evaluation on Performance in 2016 based on the Decree of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 	252.000.000

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Tujuan Perseroan dalam mendukung pencapaian dan kecukupan pengawasan dan pengendalian internal tidak hanya didukung oleh organ yang memadai, tetapi juga infrastruktur dan perangkat kebijakan yang sistematis dan komprehensif. Untuk itu, Perseroan memberlakukan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memuat rangkaian aturan, prosedur, dan mekanisme pengendalian atas aktivitas Perseroan serta teknis pencegahan dan penanganan terhadap segala bentuk penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) yang terjadi lingkungan Perseroan.

Pada implementasinya, sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan merupakan sebuah proses penyatuan tindakan dan kegiatan secara berkesinambungan baik yang dilakukan oleh pimpinan Perseroan maupun karyawan untuk memberi keyakinan bahwa tujuan Perseroan telah terealisasi melalui kinerja yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's objective in supporting the achievement and adequacy of internal supervision and control is not only supported by adequate organs, but also systematic and comprehensive infrastructure and policy instruments. For this reason, the Company applies an Internal Control System (SPI) which contains a series of rules, procedures, and control mechanisms for the Company's activities as well as technical prevention and handling of all forms of irregularities and fraud that occur within the Company.

In its implementation, the internal control system implemented in the Company is a continuous process of unifying actions and activities, both carried out by the leadership of the Company and employees to ensure that the Company's objectives have been realized through effective and efficient performance, reliability of financial reporting, asset security, and compliance with laws and regulations.

Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian dan penilaian efektivitas sistem pengendalian internal ditujukan untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan sekaligus menjaga kualitas sistem pengendalian internal yang ketat dan efisien. Adapun lingkup sistem pengendalian internal yang dijalankan Perseroan terdiri dari Lingkungan Pengendalian Internal, pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta *Monitoring* terhadap efektivitas sistem pengendalian internal yang berjalan di Perseroan.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan mencakup aktivitas pengendalian keuangan dan operasional, dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pengendalian Keuangan

Sistem pengendalian internal dalam hal keuangan dilakukan guna memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan serta aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.

2. Pengendalian Operasional

Pengendalian dalam kegiatan operasional yang meliputi kegiatan produksi, penjualan, operasi maupun investasi dilakukan agar tercapainya target Perseroan yang terbebas dari kecurangan dan sesuai dengan peraturan di dalam Perseroan.

Kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan terbuka, Perseroan senantiasa mematuhi seluruh regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, Perseroan secara proaktif mengikuti setiap perubahan atau *update* terkait peraturan di bidang pasar modal, khususnya yang relevan dengan bidang usaha Perseroan. Pada tahun ini, Perseroan telah mengikuti berbagai seminar dan sosialisasi yang berkaitan dengan perundang-undangan, antara lain:

1. Pelatihan Dasar-Dasar Internal Audit (YPIA)
2. Webinar Auditor Jaman Now “Menyingkap Lirik Mata di Ruang Virtual” (YPIA)
3. Webinar FKSPI “Agile Auditing” (YPIA)
4. Sertifikasi *Qualified Internal Auditing* (YPIA)
5. Pertemuan *Zoom Meeting* SPI BUMN dan SPI Wika Group.

Objective of Internal Control

Control and assessment of the effectiveness of the internal control system are aimed at securing the Company's investment and assets while maintaining the quality of the internal control system that is strict and efficient. The scope of the internal control system implemented by the Company consists of the Internal Control Environment, assessment of business risk management (*risk assessment*), Control Activities, Information and Communication Systems, as well as monitoring of the effectiveness of the internal control system running in the Company.

Financial and Operational Control

The internal control system implemented in the Company includes financial and operational control activities, with a further description as follows:

1. Financial Control

The internal control system in terms of finance is implemented to provide assurance of the correctness of financial information, the effectiveness and efficiency of the Company's management processes as well as aspects of compliance with related laws and regulations. The Board of Directors shall establish an effective internal control system to secure the investment and assets of the Company.

2. Operational Control

Control in operational activities which includes production, sales, operation, and investment activities is carried out to achieve the Company's targets which are free from fraud and in accordance with the regulations in the Company.

The Company's Compliance with the Laws and Regulations

In its capacity as a public company, the Company always complies with all applicable laws and regulations. In principle, the Company proactively monitors any changes or updates related to regulations in the capital market, particularly those relevant to the Company's line of business. This year, the Company has participated in various seminars and disseminations related to the laws and regulations, including:

1. Internal Audit Basics Training (YPIA)
2. Jaman Now Auditor Webinar “Unveiling a Glimpse in Virtual Room” (YPIA)
3. FKSPI Webinar “Agile Auditing” (YPIA)
4. Certification of *Qualified Internal Auditing* (YPIA)
5. *Zoom Meeting* of SPI BUMN and SPI Wika Group.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO Internal Control Framework

Sistem Pengendalian Internal yang berlaku di Perseroan telah menerapkan standar yang berlaku secara internasional, yaitu *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework*. Ruang lingkup kesesuaian sistem pengendalian internal dengan COSO adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian Internal (Control Environment)

Manajemen telah menetapkan standar, proses, dan struktur sebagai dasar terlaksananya pengendalian internal secara menyeluruh yang dilaksanakan secara disiplin dan terstruktur. Lingkup pengendalian internal mencakup:

- a. Integritas, kompetensi karyawan dan nilai etika yang dianut Perseroan;
- b. Filosofi dan gaya manajemen;
- c. Parameter-parameter manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
- d. Pembagian wewenang dan pengembangan sumber daya manusia, serta arahan yang dilakukan Direksi;
- e. Proses untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten serta kejelasan ukuran kinerja;
- f. Insentif dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas kinerja.

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha merupakan proses identifikasi, analisis, dan penilaian mengenai pengelolaan risiko yang relevan. Hal ini dilakukan Perseroan antara lain:

- a. Menetapkan tujuan yang jelas dalam kategori operasi, pelaporan dan kepatuhan sehingga dapat dilakukan perbandingan antara pelaksanaan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan risiko dapat secepatnya teridentifikasi;
- b. Menetapkan lingkup konteks penerapan, identifikasi, analisa, evaluasi, penanganan, pemantauan, dan review serta komunikasi dan konsultasi mengenai kemungkinan risiko;
- c. Membuat skala prioritas dalam penanganan risiko-risiko yang strategis, risiko fisik, risiko terhadap kepatuhan hukum, dan lainnya.

3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

Kegiatan Pengendalian dilaksanakan di seluruh tingkatan dan fungsi Perseroan. Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkat organisasi pada berbagai tahap proses bisnis. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya hal-hal berikut:

Conformity of Internal Control System with COSO Internal Control Framework

The Internal Control System that applies in the Company adopts internationally accepted standards, namely *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework*. The scope of the internal control system's compliance with COSO is as follows:

1. Internal Control Environment

Management has established standards, processes, and structures as the basis for the implementation of comprehensive internal control which is implemented in a disciplined and structured manner. The scope of internal control includes:

- a. Integrity, employee competence and ethical values adhered to by the Company;
- b. Management philosophy and manner;
- c. Management parameters in carrying out its authorities and responsibilities;
- d. The division of authority and human resource development, as well as the direction taken by the Board of Directors;
- e. Processes for attracting, developing, and retaining competent individuals and clarity of performance measures;
- f. Incentives and rewards to encourage performance accountability.

2. Risk Assessment

The assessment of business risk management is a process of identifying, analyzing, and assessing relevant risk management. This is done by the Company, among others by:

- a. Establishing clear objectives in the category of operations, reporting, and compliance so that comparisons can be made between the implementation against the predetermined criteria and risks can be identified as quickly as possible;
- b. Determining the scope of the context of implementation, identification, analysis, evaluation, treatment, monitoring and review as well as communication and consultation regarding possible risks;
- c. Making a priority scale in handling strategic risks, physical risks, risks of legal compliance, and others.

3. Control Activities

Control activities are carried out at all levels and functions of the Company. Control activities include the actions that were established through policies and procedures to help ensure that management directives are implemented in order to minimize the risk of achieving objectives. Control activities are carried out at all levels of the organization at various stages of the business process. The Board of Directors is responsible for ensuring the implementation of the following:



- Proses tinjauan berkala dan pencapaian sasaran kinerja Perseroan;
- Kepatuhan terhadap perundang-undangan untuk setiap tindakan dan proses yang dilakukan oleh Perseroan;
- Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan internal, terutama dalam proses otorisasi, verifikasi dan penanganan hal-hal yang berkaitan dengan aset dan investasi Perseroan.

4. Informasi dan Komunikasi

Perseroan memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Perseroan harus menyajikan laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan agar dapat mendukung proses pengendalian internal berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

5. Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat menyajikan informasi tepat waktu.

- Segala bentuk penyimpangan yang terjadi atas pelaksanaan *Monitoring* dilaporkan kepada Direktur Utama.
- Monitoring* merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai kinerja (mutu), Sistem Pengendalian Internal sepanjang waktu dalam bentuk *on-going monitoring*, evaluasi secara terpisah, atau kombinasi dari kedua bentuk tersebut.
- On-going monitoring* dilakukan bersamaan dengan proses operasional Perseroan.
- Monitoring* ini mencakup aktivitas pengelolaan dan supervisi reguler dan berbagai hal lain yang dilakukan dalam bentuk aktivitas masing-masing.

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2020

Upaya penerapan dan penilaian kecukupan pengendalian internal yang menjadi tanggung jawab manajemen wajib diiringi oleh evaluasi secara berkala dan komprehensif guna memastikan bahwa pelaksanaannya telah berjalan efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Evaluasi kualitas dan kecukupan pengendalian internal senantiasa mempertimbangkan prinsip berbasis risiko untuk meningkatkan kesadaran dan membangun budaya sadar risiko pada setiap aktivitas Perseroan.

- Periodic review process and achievement of the Company's performance targets;
- Compliance with laws and regulations for every action and process carried out by the Company;
- Compliance with the implementation of internal regulations, especially in the process of authorization, verification, and handling of matters relating to the Company's assets and investments.

4. Information and Communication

The Company requires information for the implementation of an internal control function that supports the achievement of the Company's goals. Management shall obtain, produce, and use relevant and good quality information from internal and external sources. Therefore, the Company shall present reports on operational, financial activities as well as compliance with the prevailing laws and regulations to support the internal control process to function as expected.

5. Monitoring Activities

Monitoring activities include continuous evaluation of the quality of the internal control system, including the internal audit function at each level and unit in the Company's organizational structure so that it can function properly and can provide timely information.

- All forms of deviation that occur in the implementation of Monitoring are reported to the President Director.
- Monitoring is a process carried out to assess performance (quality), the Internal Control System at all times in the form of on-going monitoring, separate evaluation, or a combination of the two forms.
- On-going monitoring is carried out simultaneously with the Company's operational processes.
- This monitoring includes regular management and supervision activities and various other things that are carried out in the form of their respective activities.

Effectiveness of the Implementation of the Internal Control System in 2020

Efforts to implement and assess the adequacy of internal controls which are the responsibility of management must be accompanied by periodic and comprehensive evaluations to ensure that their implementation is running effectively and efficiently as expected. Evaluation of the quality and adequacy of internal control always considers risk-based principles to increase awareness and build a culture of risk awareness in every activity of the Company.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab sebagai unit kerja yang me-review tingkat pengendalian risiko di seluruh aktivitas di unit kerja. Dalam hal ini, SPI dapat bekerja sama dengan Bagian Manajemen Risiko dan QSHE dalam melaksanakan audit baik pada lingkup unit, proyek, maupun di Biro Kantor Pusat.

Hasil evaluasi atas Pengendalian Internal telah disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Komite Audit turut berperan aktif terkait evaluasi terhadap kinerja audit internal berdasarkan standar yang berlaku di Perseroan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan ke depan, di antaranya:

1. Melakukan efisiensi, efektivitas, dan memaksimalkan kinerja monitoring.
2. Melakukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja.
3. Pengembangan sistem aplikasi audit SPI terintegrasi.

MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan aktivitas usaha Perseroan dipahami tidak terlepas dari eksposur risiko yang berdampak terhadap pencapaian kinerja dan keberlangsungan usaha Perseroan. Untuk itu, manajemen menyadari pentingnya memiliki sebuah kebijakan dan mekanisme yang mengatur pengelolaan risiko secara memadai, andal, dan terukur sesuai prinsip dan kerangka *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam penerapannya, Perseroan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah terintegrasi ke dalam proses bisnis secara komprehensif sehingga dapat menjadi *early warning system* yang efektif dalam memberikan informasi dini mengenai potensi risiko yang dihadapi Perseroan. Bersamaan dengan itu, Perseroan turut membangun budaya sadar risiko di seluruh aktivitas bisnis perusahaan dan secara konsisten memastikan adanya evaluasi dan penyempurnaan efektivitas secara berkesinambungan sehingga implementasinya mampu mewujudkan terciptanya iklim bisnis yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan.

Landasan Manajemen Risiko

Sebagai anak perusahaan BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Perseroan diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya. Merujuk pada Pasal 25 Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor PER-01/MBU/2011, maka Direksi Perseroan diwajibkan untuk menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Di dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan korporasi harus mempertimbangkan risiko usaha.
- b. Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan:
 - 1) Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - 2) Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk manajemen risiko.

The Internal Audit Unit (SPI) is responsible as a work unit that reviews the level of risk control in all activities in the work unit. In this case, SPI can cooperate with the Risk Management and QSHE Division in carrying out audits both at the scope of the unit, project, and at the Head Office Bureau.

The results of the evaluation of Internal Control have been submitted to the Board of Directors for follow-up and monitoring of its implementation. The Audit Committee plays an active role in the evaluation of internal audit performance based on the applicable standards in the Company. Based on the results of the evaluation, there are several recommendations for future improvements, including:

1. Carrying out efficiency, effectiveness, and maximizing monitoring performance.
2. Conducting innovations to improve performance.
3. Developing an integrated SPI audit application system.

RISK MANAGEMENT

The Company's business activities are inseparable from risk exposure which has an impact on the achievement of the Company's performance and business continuity. For this reason, management realizes the importance of having a policy and mechanism that regulates risk management in an adequate, reliable, and measurable manner in accordance with the principles and framework of Good Corporate Governance (GCG). In its implementation, the Company ensures that the implementation of risk management is integrated into the business process in a comprehensive manner so that it can become an effective early warning system in providing early information on potential risks faced by the Company. At the same time, the Company helps build a culture of risk awareness in all of its business activities and consistently ensures continuous evaluation and improvement of effectiveness so that its implementation is able to create a sound, favorable, and sustainable business climate.

Basis of Risk Management

As a subsidiary of the state-owned company PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., the Company is required to implement GCG principles in carrying out its business operations. Referring to Article 25 of the Regulation of the Minister of State for SOE of the Republic of Indonesia No. PER-01/MBU/2011, the Board of Directors of the Company is required to implement the following:

- a. In every decision making/corporate action, business risks must be considered.
- b. Build and implement an integrated corporate risk management program which is part of the implementation of the GCG program. The implementation of a risk management program can be done by:
 - 1) Establishing a separate work unit under the Board of Directors; or
 - 2) Assigning existing and relevant work units for risk management.

c. Menyampaikan laporan profil risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

c. Deliver risk profile reports and their handling together with periodic company reports.

Bahwa untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan praktik terbaik tentang *Enterprise Risk Management* (ERM), maka pengembangan Manajemen Risiko Perseroan dilaksanakan dengan mengadopsi standar nasional SNI ISO 31000 dan regulasi (landasan) lain, di antaranya:

To adapt to the development of best practices on Enterprise Risk Management (ERM), the Company's Risk Management development is carried out by adopting the SNI ISO 31000 national standard and other regulations, including:

- a. UU No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
- c. Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/MBU/2002 tentang *Good Corporate Governance*.
- d. Kebijakan Strategis Perusahaan yang mengatur agar saat menjalankan setiap aktivitas bisnis dan operasionalnya, Perseroan senantiasa menerapkan manajemen risiko guna mencari dan meminimalkan risiko yang berdampak negatif.

- a. Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies.
- b. Minister of BUMN Regulation No. PER-01/MBU/ 2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance as amended by PER-09/ MBU/ 2012 dated July 6, 2012.
- c. Decree of the Minister of State for SOE No. Kep-117/ MBU/2002 concerning Good Corporate Governance.
- d. The Company's Strategic Policy which regulates that when carrying out every business activity and its operations, the Company always implements risk management to seek and minimize risks that have a negative impact.

Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Lingkup manajemen risiko yang diterapkan Perseroan meliputi 7 (tujuh) aspek sebagaimana dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:

Scope of Risk Management

The scope of risk management implemented by the Company includes 7 (seven) aspects as described in the following chart:

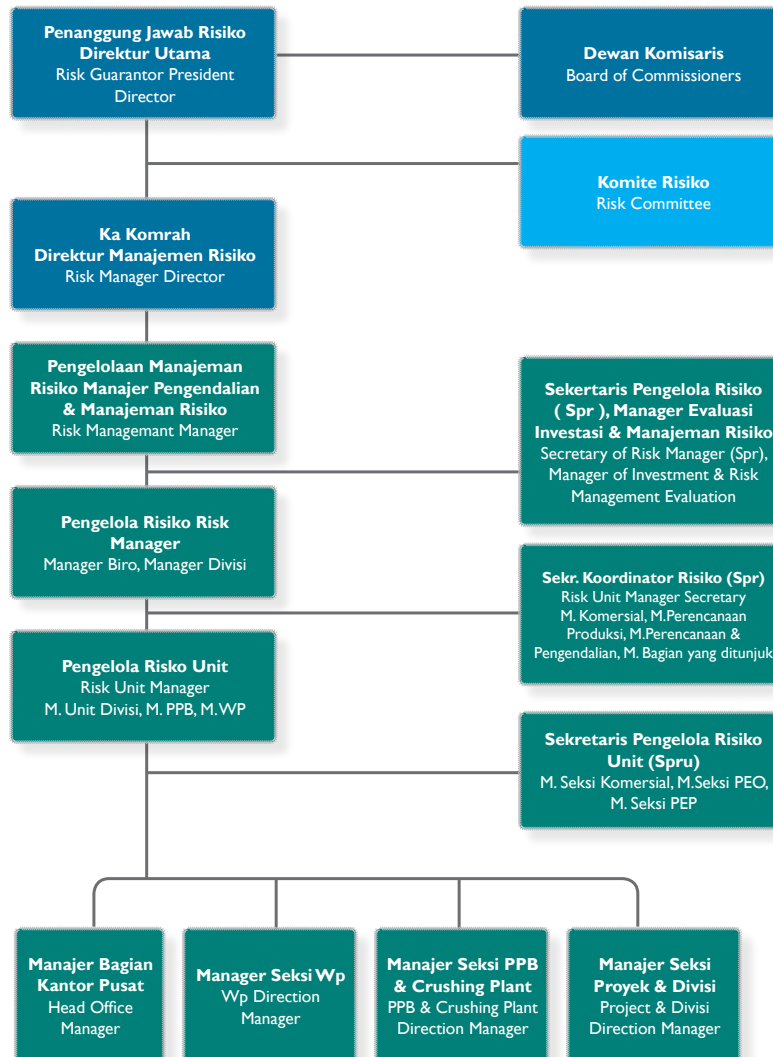


Organisasi Pengelola Manajemen Risiko

Susunan organisasi pengelolaan manajemen risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Risk Management Organization

The organizational structure of the Company's risk management is as follows:



Profil Kepala Bagian Manajemen Risiko

Profile of Head of Risk Management



Taufik Dwi Wibowo

Manajer Biro Pengendalian dan Manajemen Risiko / Risk Management and Control Bureau Manager

Kewarganegaraan	: Indonesia	Nationality	: Indonesian
Tempat dan Tanggal Lahir	: Malang, 19 Juli 1967	Place and Date of Birth	: Malang July 19, 1967
Usia	: 53 tahun	Usia	: 53 years old
Domisili	: Jakarta	Domicile	: Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Manajer Biro Pengendalian dan Manajemen Risiko Perseroan sejak 10 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.01.02/WB-0A.0001/2019.		
Masa Jabatan	Sampai diputuskan lebih lanjut		
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil dari Sekolah Tinggi Teknik Dharma Yadi (2010).		
Pengalaman Kerja	Sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai Manajer Biro Penjualan		
Jabatan Rangkap	Tidak Ada		
Hubungan Afiliasi	Tidak Ada		
Jumlah Kepemilikan Saham PT Wijaya Karya Beton Tbk	Tidak Ada		
Legal Basis of Appointment	Appointed as Manager of the Company's Risk Management and Control Bureau since January 10, 2019 based on the Decree of the Board of Directors No. SK.01.02/WB-0A.0001/2019.		
Term of Office	Until further decision		
Educational Background	Bachelor's Degree in Civil Engineering from Sekolah Tinggi Teknik Dharma Yadi (2010).		
Work Experience	He previously served as Sales Bureau Manager.		
Concurrent Position	None		
Affiliations	None		
Ownership of PT Wijaya Karya Beton Tbk. Shares	None		

Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Pengendalian Risiko

Tugas dan tanggung jawab Bagian Pengendalian Risiko meliputi:

1. Mengembangkan, memelihara, mengevaluasi validitas dan kapasitas sistem manajemen risiko perusahaan.
2. Menyusun format dan formula kriteria risiko korporat serta kriteria risiko unit kerja yang selanjutnya diusulkan kepada Direksi.
3. Menjadi fasilitator dan katalisator dalam penerapan sistem manajemen risiko terintegrasi yang dilakukan oleh para pemilik risiko. Selanjutnya memastikan bahwa para pemilik risiko serta jajarannya memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola risiko sesuai ketentuan dalam Pedoman Manajemen Risiko.
4. Menyusun, memelihara, memantau dan mengkaji perkembangan status risiko korporat sesuai dinamika perubahan *database* risiko yang dilaporkan para pemilik risiko dan selanjutnya dilaporkan kepada Direksi dalam bentuk profil/portofolio risiko.

Duties and Responsibilities of Risk Control Division

Duties and responsibilities of Risk Control Division are as follows:

1. Develop, maintain, evaluate the validity and capacity of the Company's risk management system.
2. Prepare the format and formula for corporate risk criteria and work unit risk criteria, which are then proposed to the Board of Directors.
3. Become a facilitator and catalyst in the implementation of an integrated risk management system carried out by risk owners. Furthermore, ensure that risk owners and their staff have adequate competence to manage risks in accordance with the provisions in the Risk Management Guidelines.
4. Prepare, maintain, monitor, and review the development of corporate risk status in accordance with the dynamics of changes in the risk database reported by risk owners and subsequently reported to the Board of Directors in the form of a risk profile/portfolio.

5. Mengevaluasi aplikasi sistem manajemen risiko melalui pemantauan dan pengkajian ulang atas laporan pengelolaan risiko oleh para pemilik risiko serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan sistem kepada Direksi.
6. Memberikan opini terhadap semua kebijakan perusahaan, tindakan korporasi (*corporate action*) dan investasi dari sudut pandang manajemen risiko guna mendukung pengambilan keputusan strategis oleh Direksi.
7. Membuat laporan pelaksanaan manajemen risiko korporasi kepada Direksi dan pihak-pihak internal dan eksternal Perseroan yang berkepentingan jika diminta.

5. Evaluate the risk management system application by monitoring and reviewing risk management reports by risk owners and recommending system improvement steps to the Board of Directors.
6. Provide opinion on all company policies, corporate actions, and investments from a risk management point of view to support strategic decision making by the Board of Directors.
7. Prepare reports on the implementation of corporate risk management to the Board of Directors and interested internal and external parties if requested.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran seluruh karyawan mengenai pentingnya efektivitas implementasi manajemen risiko di dalam proses operasional dan bisnis Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan membuka kesempatan kepada setiap karyawan untuk meningkatkan kompetensinya dengan menyediakan berbagai pelatihan dan pendidikan bersertifikasi. Informasi mengenai pelatihan dan pendidikan bersertifikasi di bidang manajemen risiko yang masih berlaku sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama / Name	Nama Sertifikasi / Certification's Name	Periode Berlaku / Validity Period	Penyelenggara / Organizer	Jabatan / Position
Ashuri	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	Desember 2017 – Desember 2020 / December 2017 - December 2020	Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi (BNSP) / Competence Certification National Body (BNSP)	Manajer Keuangan Korporasi / Corporate Finance Manager
Sofyandi Puspo Prabowo	Certified Risk Management Officer	April 2019 – April 2021 / April 2019 – April 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko / Risk Management Profession Certification Institution	Staf Manajemen Risiko & Evaluasi Investasi / Risk Management & Investment Evaluation Staff

Risk Management Certifications

The Company is committed to continuously increasing the awareness of all employees regarding the importance of effective risk management implementation in the Company's operational and business processes. Therefore, the Company opens opportunities for every employee to improve their competence by providing various certified training and education. Information regarding certified training and education in the field of risk management that is still valid until the end of 2020 can be seen in the table below:

Pelatihan Manajemen Risiko

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam meningkatkan kapabilitas pengelolaan risiko usaha dan operasionalnya, Bagian Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan dan pendidikan selama tahun 2020 sebagai berikut:

Risk Management Training

As a manifestation of the Company's commitment to improving its business and operational risk management capabilities, the Risk Management Section has attended training and education throughout 2020 as follows:

Nama Pelatihan / Training Name	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan / Place and Date of Training	Penyelenggara / Organizer
Workshop Implementasi dan Persiapan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap ISO 37001 / Workshop on the Implementation and Preparation of ISO 37001 Anti-Bribery Management System Certification	Online, 19-20 Mei 2020 / Online, May 19-20, 2020	CENTROIS
ISO 31000 International Risk Management Standar ERM Fundamental / ISO 31000 International Risk Management Fundamental ERM Standards	Online, 1-3 Desember 2020 / Online, December 1-3, 2020	CRMS

Kesesuaian Proses Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000

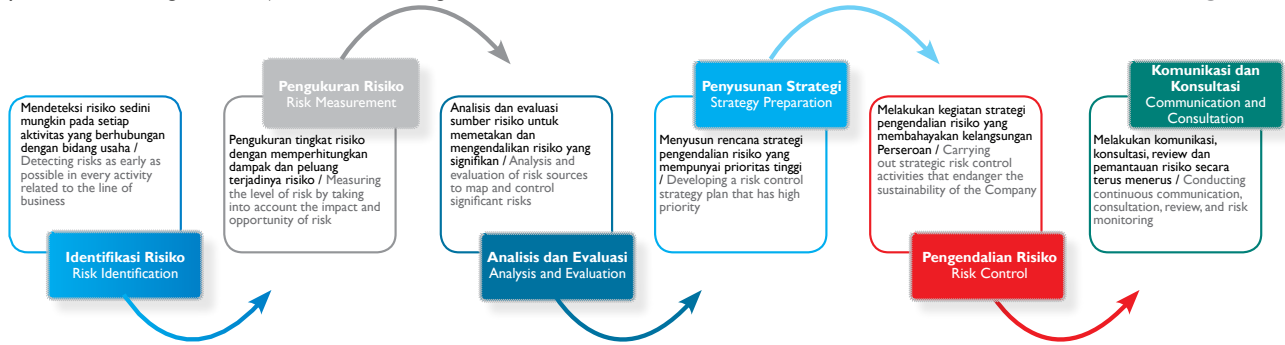
Proses implementasi manajemen risiko senantiasa dijalankan dengan didukung oleh kerangka dan perangkat kebijakan yang memadai dan terstruktur. Berbasis pada kerangka ISO 31000:2011, proses manajemen risiko diterapkan secara komprehensif dengan bertujuan pada identifikasi kejadian potensial yang dapat memengaruhi entitas, pengembangan dan peningkatan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif sehingga dapat memberikan informasi

Conformity of ISO 31000-based Risk Management Process

The risk management implementation process is always supported by an adequate and structured policy framework and tools. Based on the ISO 31000:2011 framework, the risk management process is implemented in a comprehensive manner with the aim of identifying potential events that can affect the entity, developing and improving an integrated and comprehensive risk management system framework and internal control structure so as to provide early information about potential risks that

dini tentang adanya potensi risiko yang berpengaruh pada hasil perusahaan, serta penyusunan langkah antisipasi dan mitigasi yang memadai dan terukur.

Pengelolaan risiko yang mungkin terjadi didukung oleh penerapan proses manajemen risiko di Kantor Pusat dan unit kerja/anak perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut:



affect the Company's business results, as well as preparation of adequate and measurable anticipatory and mitigation measures.

Risk management that may occur is supported by the implementation of a risk management process at the Head Office and work units/subsidiaries as described in the following chart:

Identifikasi Risiko

Perseroan melakukan pemetaan dan identifikasi risiko yang mungkin dihadapi dalam melakukan aktivitas bisnis secara menyeluruh, baik dalam lingkup internal maupun eksternal, sebagai dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan mitigasi yang tepat, matang, dan terukur. Identifikasi risiko mempertimbangkan konteks risiko, *risk appetite*, serta profil serta limit risiko yang dimiliki perusahaan untuk selanjutnya menjadi bahan kajian bagi manajemen dalam menentukan dan menyusun strategi mitigasi yang sesuai dengan pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Risk Identification

The Company maps and identifies risks that may be faced in conducting business activities as a whole, both internally and externally, as a basis for determining appropriate, mature, and measurable anticipation and mitigation measures. Risk identification takes into account the risk context, risk appetite, as well as the profile and risk limits of the Company, which will then serve as review material for management in determining and formulating mitigation strategies that are in line with the achievement of the Company's strategic objectives.

Profil dan Mitigasi Risiko

Secara umum, jenis risiko yang dihadapi Perseroan terbagi menjadi 4 (empat) profil risiko sebagai berikut:

Risk Profile and Mitigation

In general, there are 4 types of risk faced by the Company as follows:

No.	Jenis Risiko / Type of Risk	Penyebab / Causes	Akibat / Impact	Rencana Mitigasi / Mitigation Plan
1	Bertambahnya pesaing di industri yang sama / More competitors in the same industry	<ul style="list-style-type: none"> Daya tarik industri beton precast meningkat pesat, sehingga semua precaster menambah kapasitas produksi dan mendirikan pabrik baru di sekitar wilayah pabrik WTON. / The interest for precast concrete is increasing rapidly, which triggers all of precast suppliers to add more their production capacity and build new plants area. Pesaing meningkatkan daya saing melalui bauran produk / Competitor increases their competitiveness via product diversification 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan kontrak tidak tercapai / Contractual target is not achieved Persaingan harga dengan pesaing menjadi lebih kompetitif / Price competition becomes more competitive Menurunnya margin laba / Decreased on profit margin Pangsa pasar WTON menurun / Decreased WTON market shares 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya program <i>marketing intelligent</i> yang lebih intensif / Developing marketing intelligent program to be more intensive Meningkatkan daya saing dengan inovasi dan kualitas produk untuk memperoleh HPP yang lebih kompetitif / Increasing competitiveness through innovation and best quality of the products to gain more competitive price Terlibat aktif dalam asosiasi agar dapat menjaga situasi yang kondusif dalam persaingan / Actively participating in associations that can keep us on favorable position in this competition Menerapkan EPI (<i>Engineering, Production, Installation</i>) untuk memperbesar peluang memenangkan persaingan dengan meningkatkan usaha <i>ready mix</i>, keagenan komponen konstruksi, instalasi, dan pemancangan serta pengembangan <i>post-tensioning</i> / Implementing EPI (<i>Engineering, Production, Installation</i>) to increase the opportunity to win the competition by increasing Readymix business, construction component agency, installation and the development of post tensioning
2	Beralihnya Pelanggan potensial menjadi kompetitor / Potential buyers become competitors	<ul style="list-style-type: none"> BUMN Karya mendirikan Pabrik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri / Other SOEs among this industry build plant to fill their own needs Harga Produk WTON yang relatif lebih tinggi / WTON's products prices are relatively higher 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan pelanggan potensial / Losing potential customers Bertambahnya kompetitor di industri precast / Increasing in competitors number of precast industry Daya saing berkurang / Decreased competitiveness 	<ul style="list-style-type: none"> Memperluas kerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam industri konstruksi sebagai <i>captive market</i> / Expanding the cooperation linked with more parties in construction industry as captive market Meningkatkan komposisi perolehan kontrak dari WIKA Grup melalui program sinergi / Increasing our contractual gain through synergizing with WIKA Group Menciptakan produk baru untuk menciptakan pasar baru / Creating new product to create new market Mengintegrasikan evaluasi harga penawaran melalui sinergi Biro Penjualan dan Biro Produksi / Integrating price offering evaluation through synergy with Sales & Production Bureau

No.	Jenis Risiko / Type of Risk	Penyebab / Causes	Akibat / Impact	Rencana Mitigasi / Mitigation Plan
3	Penerimaan pembayaran dari Pelanggan terlambat / Receiving late payments from customers	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggan mengalami likuiditas / Customers went through liquidity problem Pengurusan dokumen penagihan memakan waktu yang lama / Payment documents took too long to be processed Tidak ada kepastian kelangsungan proyek / Uncertainty of project's continuity 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas Perusahaan terganggu / Company's liquidity is disturbed Persyaratan administrasi dalam kontrak yang cukup banyak untuk dipenuhi / Quite a lot of administrative requirements to be fulfilled Timbulnya piutang macet / Bad debt emerges 	<ul style="list-style-type: none"> Kerja sama dengan perbankan untuk menutup gap penerimaan dan pembayaran serta penggunaan instrumen pembayaran melalui SCF / Cooperate with banking services to cover the gap temporarily via SCF instruments Membuat persyaratan kontrak yang berimbang dan mudah untuk dipenuhi / Create a balance contract requirements that is easy to fulfill Menggunakan <i>lawyer</i> perusahaan untuk menyelesaikan piutang macet / Using the service of lawyers to settle bad debts
4	Kemampuan kapasitas pabrik / Plant production capacity	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan kontrak bersamaan waktunya atau tidak merata di sepanjang tahun dan komposisi produk putar dan non-putar tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki / Contracts came at the same time, or distributed unevenly during the whole year. The composition of products didn't match with the capacity Keterbatasan kapasitas peralatan produksi / Limitation in production tool capacity Terdapat Pabrik yang diperuntukkan menghasilkan produk tertentu / Some plants can only produce certain products 	<ul style="list-style-type: none"> Penjualan tidak tercapai sesuai rencana yang diharapkan / Sales target was not achieved then we expect Inefisiensi pabrik / Plant inefficiency Keterlambatan penyelesaian produksi / Late in finishing production 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun pabrik baru dan produk baru / Building new plants & products Meningkatkan prasarana dan modernisasi sistem produksi di seluruh pabrik yang dimiliki / Increasing platforms and modernize production system at all plants Menambah penetrasi pasar yang berfokus pada produk yang sesuai / Penetrating the market to focus on sustainable products

Evaluasi Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2020

Komitmen Perseroan terhadap implementasi manajemen risiko yang efektif dan efisien diwujudkan melalui pengukuran efektivitas manajemen risiko secara berkala. Penilaiannya dilakukan melalui 3 (tiga) mekanisme sebagai berikut:

1. Audit internal SPI

Audit berbasis risiko yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjadi mekanisme berkala yang diterapkan dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnis Perseroan. Penetapan objek audit dan fokus audit diprioritaskan mulai dari risiko yang paling besar hingga risiko yang paling kecil. Berdasarkan audit tersebut, hasil evaluasi akan disampaikan kepada Direksi bersamaan dengan aktivitas Perseroan yang berpengaruh signifikan pada Perseroan untuk kemudian ditetapkan langkah antisipasi dan mitigasinya.

2. Audit Internal (AI)

Audit internal dilaksanakan setiap semester di seluruh Unit Kerja tidak terkecuali Direksi, yang dilakukan oleh Tim Internal perusahaan yang telah dibekali pengetahuan untuk melakukan tugasnya. Audit Internal meliputi audit atas pelaksanaan Manajemen ISO, Manajemen Peralatan, SMK3 dan Manajemen Risiko. Selanjutnya, temuan Audit Internal harus diperbaiki oleh Unit Kerja terkait yang tertuang dalam Rencana Tindakan Preventif (RTP) yang juga dimonitor secara berkala pelaksanaannya. Hasil audit juga dilaporkan ke Direksi termasuk evaluasi performa masing-masing Unit Kerja.

Evaluation on Effectiveness of Risk Management in 2020

The Company's commitment to the implementation of effective and efficient risk management is realized by measuring the effectiveness of risk management on a regular basis. The assessment is carried out through 3 (three) mechanisms as follows:

1. SPI Internal Audit

Risk-based audits carried out by the Internal Audit Unit (SPI) are a periodic mechanism applied in measuring the level of risk faced in the Company's business activities. The determination of the audit object and the focus of the audit is prioritized starting from the greatest risk to the least risk. Based on the audit, the results of the evaluation will be submitted to the Board of Directors in conjunction with the Company's activities that have a significant impact on the Company to determine anticipation and mitigation measures.

2. Internal Audit (AI)

Internal audits are carried out every semester in all Work Units including the Board of Directors, which are carried out by the Company's Internal Team who is equipped with the knowledge to carry out their duties. Internal Audit includes audits of the implementation of ISO Management, Equipment Management, SMK3 and Risk Management. Furthermore, the findings of the Internal Audit must be corrected by the relevant work unit as stated in the Preventive Action Plan (RTP) which is also regularly monitored for its implementation. The audit results are also reported to the Board of Directors, including an evaluation of the performance of each Work Unit.

3. Assessment Risk Maturity oleh Konsultan Independen Perseroan

Dalam memfokuskan pengukuran risiko secara lebih akuntabel dan independen, Perseroan menunjuk Konsultan Manajemen Risiko independen secara berkala untuk melakukan pengukuran tingkat pencapaian pelaksanaan serta memberikan rekomendasi perbaikan manajemen risiko.

Objek *assessment* adalah organ Perseroan yang dimulai dari Direksi sampai dengan tingkat manajemen di lapangan. Pemetaan hasil audit kemudian akan menjadi perbandingan atas pencapaian praktik manajemen risiko pada periode sebelumnya serta menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan untuk tahap berikutnya.

Pada tahun 2020, evaluasi atas efektivitas manajemen risiko Perseroan dilakukan dengan melakukan internal *assessment* WIKA Group dengan nilai 4,19 melalui penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (*risk maturity*).

Sosialisasi Manajemen Risiko

Sosialisasi dan *sharing knowledge* dalam meningkatkan *awareness* dan menumbuhkan budaya sadar risiko menjadi upaya yang terus dilakukan Perseroan kepada seluruh jajaran manajemen yang dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dengan mengedarkan prosedur dan melakukan sosialisasi setiap unit mengenai prosedur risiko WB-ERM-PS-01 PROSEDUR PENGELOLAAN RISIKO BISNIS dan WB-LDS-PO-02 PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN. Selain itu, Perseroan juga terus memperkuat peranan SDM dalam penerapan sistem manajemen risiko melalui upaya fasilitasi pengembangan kompetensi di bidang manajemen risiko melalui pelatihan internal, seminar, ataupun diskusi internal secara berkala.

PERKARA HUKUM TAHUN 2020

Pada tahun 2020, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi ataupun melibatkan Perseroan, yang memiliki dampak material atau memiliki nilai minimal 20% dari ekuitas Perseroan.

Perkara Hukum yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Selama Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak terlibat dalam kasus hukum apa pun, baik yang bersifat perdata maupun pidana, yang memiliki dampak material atau memiliki nilai minimal 20% dari ekuitas Perseroan.

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan anak

Sepanjang tahun 2020, seluruh perusahaan anak Perseroan tidak terlibat dalam kasus hukum apa pun, baik yang bersifat perdata maupun pidana, yang memiliki dampak material atau memiliki nilai minimal 20% dari ekuitas Perseroan.

3. Risk Maturity Assessment by the Company's Independent Consultants

In focusing on risk measurement in a more accountable and independent manner, the Company appoints independent Risk Management Consultants on a regular basis to measure the level of implementation achievement and provide recommendations for risk management improvements.

The object of assessment is the Company's organs starting from the Board of Directors to the management level in the field. The mapping of the audit results will then be a comparison of the achievement of risk management practices in the previous period and produce a number of recommendations for improvements or enhancements for the next stage.

In 2020, an evaluation of the effectiveness of the Company's risk management will be carried out by conducting an internal assessment of the WIKA Group with a score of 4.19 through an assessment of the maturity level of risk management implementation.

Risk Management Dissemination

Dissemination and sharing of knowledge in increasing awareness and fostering a culture of risk awareness are efforts that the Company continues to make to all levels of management in various ways, namely by circulating procedures and disseminating each unit regarding risk procedures WB-ERM-PS-01 BUSINESS RISK MANAGEMENT PROCEDURES and WB-LDS-PO-02 CORPORATE RISK MANAGEMENT GUIDELINES. In addition, the Company also continues to strengthen the role of human resources in implementing the risk management system by facilitating competency development in the risk management sector through internal training, seminars, or regular internal discussions.

2020 LEGAL CASES

In 2020, there were no legal cases containing material impact or having value at least 20% of the Company's equity faced by or involving the Company.

Legal Cases Faced by Members of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020

Throughout 2020, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in any legal cases, whether civil or criminal containing material impact or having value at least 20% of the Company's equity.

Legal Cases Faced by Subsidiaries

Throughout 2020, all of the Company's subsidiaries were not involved in any legal cases, whether civil or criminal containing material impact or having value at least 20% of the Company's equity.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak menerima sanksi administratif dari pihak regulator mana pun.

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERSEROAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak menerima laporan pengaduan terkait kegiatan Perseroan yang mencemari lingkungan.

AKSES DAN TRANSFORMASI INFORMASI

Dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya, Perseroan senantiasa mengedepankan aspek transparansi sebagai bagian dari upaya implementasi prinsip-prinsip GCG demi terjaminnya hak pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut Perseroan telah menyediakan akses informasi yang dapat diakses seluas- luasnya oleh seluruh pihak melalui situs web resmi Perseroan yaitu www.wikabeton.co.id. Situs web Perseroan secara berkala terus diperbaharui dan tersedia di dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Di dalam situs tersebut, Perseroan telah menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan profil Perseroan, produk dan jasa, ikhtisar keuangan, informasi saham, dan informasi korporasi lainnya. Selain itu, Perseroan juga senantiasa bersikap terbuka dalam hal penyampaian informasi yaitu dengan memperbolehkan semua pihak atau para pemangku kepentingan untuk langsung menghubungi kantor pusat Perseroan yang beralamat di:

Kantor Pusat PT Wijaya Karya Beton Tbk

WIKATower I Lt. 2-4, Jl. D.I. Panjaitan Kav.9
Kel. Cipinang, Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur 13340

Surel

- marketing@wika-beton.co.id (informasi produk dan teknikal)
- sekper@wika-beton.co.id (informasi umum)

Media Sosial

- Facebook : PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- LinkedIn : PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Instagram : @wikabeton
- Twitter : @wika_beton

Korespondensi dan Laporan Berkala

Informasi keuangan dan non-keuangan Perseroan disusun dan dilaporkan secara transparan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang dan regulasi yang berlaku. Seluruh informasi Perseroan dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Perseroan. Adapun pemaparan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan, antara lain:

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Throughout 2020, the Company did not receive administrative sanctions from any regulator.

REPORTS ON COMPANY ACTIVITIES THAT POLLUTE THE ENVIRONMENT

Throughout 2020, the Company did not receive reports of complaints related to the Company's activities that pollute the environment.

INFORMATION ACCESS AND TRANSFORMATION

In running its business and operational activities, the Company continuously puts forth transparency aspects as part of its implementation of GCG principles in order to ensure the rights of its shareholders and other stakeholders. To realize this commitment, the Company provides information access to all parties through the Company's website: www.wikabeton.co.id. The Company's website is always updated and available in 2 (two) languages, namely Indonesian Language and English. On the website, the Company provides various information regarding Company profile, products and services, financial highlights, shares information, and other corporate information. Furthermore, the Company is also always open in disclosing information by allowing all parties or its stakeholders to contact the Company's Head Office directly at:

Head Office of PT Wijaya Karya Beton Tbk.

WIKATower I Lt. 2-4, Jl. D.I. Panjaitan Kav.9
Kel. Cipinang, Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur 13340

E-mail

- marketing@wika-beton.co.id (technical and product information)
- sekper@wika-beton.co.id (general information)

Social Media

- Facebook : PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- LinkedIn : PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Instagram : @wikabeton
- Twitter : @wika_beton

Correspondence and Periodic Report

The Company's financial and non-financial information are gathered and reported transparently to the shareholders and other stakeholders as required by the prevailing Legislations and regulations. All of the Company's information is reported according to the time frame, presented comprehensively and accurately, updated, complete and sufficient according to the procedures, type and coverage as regulated in the legislation regarding the Company's Financial Condition Transparency. The information disclosure presented in the form of reports, among others:

1. Laporan Tahunan
2. Laporan Keuangan Triwulan
3. Laporan administrasi bulanan pemegang saham Perseroan
4. Laporan terkait rencana RUPS
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
6. Laporan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris
7. Penjelasan dan klarifikasi atas pemberitaan di media massa kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
8. Keterbukaan informasi terkait aksi korporasi dan paparan publik.

1. Annual Report
2. Quarterly Financial Report
3. Monthly Administration Report for the Company's Shareholders
4. Report on GMS plan
5. Report on the Use of Initial Public Offering Proceeds
6. Board of Directors and Commissioners Share Ownership Report
7. Explanation and Clarification in mass media to the Indonesian Stock Exchange and Financial Services Authority
8. Information disclosure regarding to corporate action and public exposes.

Pada tabel di bawah ini tersaji informasi mengenai korespondensi Perseroan dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selama tahun 2020:

In the table below is the Company's correspondence with the Indonesian Stock Exchange (IDX) and Financial Services Authority (OJK) all throughout 2020:

Korespondensi dengan BEI

Correspondence with IDX

Bentuk Korespondensi / Form of Correspondence	Frekuensi / Frequency	Perihal / Subject
Surat Menyurat / Mailing	4	Laporan Keuangan Triwulan / Quarterly Financial Statements
Surat Menyurat / Mailing	1	Laporan Tahunan / Annual Report
Surat Menyurat / Mailing	12	Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi / Monthly Report of Registration Activity
Surat Menyurat / Mailing	26	Keterbukaan Informasi / Information Disclosure
Surat Menyurat / Mailing	19	Pelaksanaan RUPS / GMS Implementation
Surat Menyurat / Mailing	3	Pelaksanaan <i>Public Expose</i> / Public Expose Implementation
Surat Menyurat / Mailing	4	Penyampaian Bukti Iklan / Submission of Ads Proof

Korespondensi dengan OJK

Correspondence with OJK

Bentuk Korespondensi / Form of Correspondence	Frekuensi / Frequency	Perihal / Subject
Surat Menyurat / Mailing	4	Laporan Keuangan Triwulan / Quarterly Financial Statements
Surat Menyurat / Mailing	1	Laporan Tahunan / Annual Report
Surat Menyurat / Mailing	26	Keterbukaan Informasi / Information Disclosure
Surat Menyurat / Mailing	19	Pelaksanaan RUPS / GMS Implementation
Surat Menyurat / Mailing	16	Permohonan Informasi dan Tanggapan Surat / Request for Information and Letter Responses
Surat Menyurat / Mailing	3	Pelaksanaan <i>Public Expose</i> / Public Expose Implementation
Surat Menyurat / Mailing	4	Penyampaian Bukti Iklan / Submission of Ads Proof

Korespondensi dengan KSEI

Correspondence with KSEI

Bentuk Korespondensi / Form of Correspondence	Frekuensi / Frequency	Perihal / Subject
Surat Menyurat / Mailing	1	Pelaksanaan RUPS / GMS Implementation

Forum Komunikasi Internal

Perseroan senantiasa mengoptimalkan kualitas dan meningkatkan frekuensi komunikasi internal di antara karyawan dan manajemen melalui berbagai cara seperti menyediakan fasilitas portal, WTON Magz, *family gathering*, Rapat Lintas Biro (setiap bulan), pertemuan bulanan, Manajemen Review (setiap tiga bulan), *morning briefing*,

Internal Communication Forum

The Company provides a means of communication that optimizes the quality and to increase the communication frequency between employees and the management who periodically carried out in many format: Portal facilities, WTON Magz, family gathering, inter bureau meetings (every month), monthly meeting,

Kick-Off RKAP, Midyear Communication, Monthly Operation Review, dan Sarasehan Serikat Pekerja. Selain itu, Perseroan juga mengoptimalkan fungsi media eksternal dalam memberikan informasi dan data Perseroan kepada publik. Berkenaan dengan hal tersebut, Perseroan senantiasa mengikuti sejumlah prosedur yang telah ditetapkan di dalam Kebijakan Komunikasi Keluar dan Pedoman Kebijakan Perseroan. Pada tahun 2020, tidak ditemukan kejadian/kasus/temuan dari unit Satuan Pengawasan Internal terkait pelanggaran dalam Kebijakan Komunikasi Keluar atau Pedoman Kebijakan Perseroan, seperti kebocoran informasi yang bersifat rahasia.

Media Elektronik

Perseroan berkomitmen untuk membangun hubungan dan komunikasi yang transparan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu:

1. Situs Web

Situs web resmi Perseroan difungsikan sebagai wadah untuk menyampaikan berbagai informasi umum yang relevan terkait Perseroan secara akurat dan tepat waktu, seperti produk layanan, berita, rilis media, dan informasi penting lainnya yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan. Situs web Perseroan ditangani secara langsung oleh Sekretaris Perusahaan dan dapat diakses melalui link www.wika-beton.co.id.

2. WTON Mobile Apps

Aplikasi WTON Mobil merupakan sebuah *platform* digital yang dirancang dan dikembangkan oleh SDM internal WILKA BETON (BSI) guna meningkatkan *employee engagement* setiap pegawai. Aplikasi ini menawarkan sejumlah fitur di antaranya:

- Home berisi berita terkini mengenai Perseroan
- Human Capital Information System
- E-File berisi dokumen Perseroan
- Cuti & Dinas
- Annual Report
- Financial Highlight
- Penilaian Pegawai
- Survei Engagement Pegawai
- Kuesioner Covid-19 WILKA BETON

3. Relasi Media

Sepanjang tahun 2020, Perseroan melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan *Media Relations*. Namun karena adanya pandemi Covid-19, kegiatan pertemuan fisik yang biasanya diadakan setiap tahun, pada tahun 2020 terpaksa ditiadakan seperti kunjungan media dan *media gathering*. Di tahun 2020, Perseroan lebih fokus memanfaatkan *platform digital* untuk sarana menjalin relasi dengan media. Sepanjang tahun 2020, Perseroan melakukan kegiatan *media relations* sebagai berikut

Management Review (every three months), morning briefings, Kick Off RKAP, Midyear Communication, Monthly Operation Review, Labor Union Workshop. In addition to these channels of information, the Company also optimizes the external media as an attempt to provide information and data of the Company to the public. In this case, the Company constantly follows a number of procedures set forth in the Company's External Communication Policy and Policy Guidance. By 2019, no incident / case or findings of Internal Audit Unit regarding violations in the Public Communications Policy or Corporate Policy Guidelines, such as leakage of confidential information.

Electronic Media

The Company is committed to building a transparent relation and communication with stakeholders by optimizing information technology and communication, namely:

1. Website

The Company already has media for Public information is the website that is handled directly by the Corporate Secretary. This site is an online media targeted to the public that contains various information and data concerning the Company, such as service products, news, media releases, and other important information intended for all stakeholders. Site can be accessed through the link www.wikabeton.co.id.

2. WTON Mobile Apps

The WTON Mobile application is a digital platform that designed developed by internal HR WILKA BETON (BSI) aiming to increase employee engagement for every employee. This application offers a number of features including:

- Home (latest news about the Company)
- Human Capital Information System
- E-File (company documents)
- Out of office tasks & On leave
- Annual Report
- Financial Highlight
- Employee Assessment
- Employment Engagement Survey
- WILKA BETON Covid-19 Questionnaire

3. Media Relations

Throughout 2020, the Company carried out a number of activities related to *Media Relations*. However, due to the Covid-19 pandemic, physical gathering activities which were usually held annually had to be eliminated in 2020, such as media visits and media gatherings. In 2020, the Company focused more on utilizing digital platforms as a means of establishing relations with the media. Throughout 2020, the Company carried out media relations activities as follows:

- Rilis media (*press release*) sebanyak 7 kali
Kegiatan *media relations* yang dijalankan bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama dan membangun hubungan komunikasi yang efektif dengan rekan-rekan media.

Paparan Publik (*Public Expose*)

Perseroan melakukan paparan publik atau *public expose* (*pubex*) kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum tentang aktivitas operasi dan siklus bisnis Perseroan. Paparan publik dilakukan melalui metode presentasi kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, dan pihak-pihak yang diundang. Perseroan memandang kegiatan paparan publik seperti ini sangat membantu Perseroan dalam menyampaikan informasi yang lebih luas dan menjangkau khalayak yang lebih banyak.

Pada tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali *Public Expose* sebagai berikut:

Kegiatan / Activity	Tanggal Penyelenggaraan / Date	Tempat Penyelenggaraan / Place
<i>Public Expose</i> 2020	27 Agustus 2020 / August 27, 2020	Online dalam acara <i>Public Expose LIVE</i> 2020 yang diselenggarakan BEI / Online on <i>Public Expose LIVE</i> 2020 held by IDX

Ragam Media kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Ragam media komunikasi yang digunakan Perseroan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, siklus bisnis, dan pencapaian kinerja Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kepada / To	Bentuk Komunikasi / Media Platform
Regulator / Regulator	Surat dan Laporan di IDXNet dan Sistem Pelaporan Emiten (SPE) / Mail and Report at IDXNet and Issuer Reporting System (SPE)
Pemegang Saham / Shareholders	RUPST, RUPSLB, <i>Public Expose</i> , dan Media Massa / GMS, EGM, <i>Public Expose</i> , and Mass Media
Investor / Investors	<i>Investor Meeting</i> , <i>Conference Meeting</i> , NDR (<i>Non-Deal Roadshow</i> , <i>One on One Meeting</i>)
Lembaga Publik / Public Institutions	Notaris, Biro Administrasi Efek, Pemingkat Efek / Notary, Share Registrar, Securities Rating
Konsumen / Consumers	Media Massa, Indeks Kepuasan Pelanggan / Mass Media, Customer Satisfaction Index
Karyawan / Employees	Manajemen Review, Pelatihan, Media Komunikasi Internal / Management Review, Trainings, Internal Communication Media
Perusahaan Sejenis Lainnya / Other Similar Companies	Media Massa, Website, <i>Annual Report</i> / Mass Media, Website, Annual Report
Mitra Kerja dan Rekanan / Business Partners and Vendors	<i>Gathering</i> , <i>Vendor Rating</i>
Organisasi Profesi / Profession Organization	Keanggotaan Asosiasi, misalnya Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) / Association Membership, such as Indonesian Issuer Association (AEI)
Masyarakat/Umum / Public/General Parties	<i>Press Release</i> , Pemberitaan, dan Situs Web Perseroan yang bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh seluruh <i>stakeholder</i> / <i>Press Release</i> , News, and Website that are transparent and can be accessed by all stakeholders

- Press releases 7 times
The media relations activities that are carried out aim to strengthen cooperative relations and build effective communication relationships with media colleagues.

Public Expose

The Company holds public expose to the shareholders, stakeholders, and public regarding the operational activities and the Company's business cycle. Public expose is carried out through presentation methods to the shareholders, stakeholders, and invited parties. The Company views this public expose activity as greatly helpful to the Company in delivering a widely information and reaching more people.

In 2020, the Company held 1 (one) public exposes as follows:

Variety of Media for Shareholders and Stakeholders

The variety of communication media used by the Company to deliver data and information regarding operational activities, business cycle, and performance achievements can be seen in the table below:

KODE ETIK DAN BUDAYA PERSEROAN

Dalam mendukung terlaksananya pemenuhan prinsip akuntabilitas dan profesionalitas di lingkungan kerja, Perseroan menerapkan Kode Etik dan Budaya Perseroan sebagai bentuk keseragaman etika bisnis, etos kerja, dan budaya yang selaras dengan nilai-nilai moral bagi seluruh insan Perseroan. Kode Etik dan Budaya Perseroan juga menjadi dasar perilaku dan etika bagi seluruh insan Perseroan dalam melaksanakan hubungan kerja dan berinteraksi dengan sesama insan Perseroan maupun dengan *stakeholders* lainnya.

Kode Etik Perusahaan telah disahkan oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 18 Oktober 2019. Adapun Kode Etik Perseroan disusun berdasarkan kompilasi dari berbagai sumber, antara lain Anggaran Dasar, budaya perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi Kode Etik

Pedoman dan Etika Perilaku (*Code of Conduct*) Perseroan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Etika Bisnis Perseroan merupakan penjelasan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika, dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perseroan dengan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perseroan. Etika Bisnis Perseroan mengatur tentang:
 - a. Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemberian dana penerimaan hadiah/gratifikasi, suap dan lainnya;
 - c. Kepedulian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH);
 - d. Pemberian kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mendapatkan penugasan, promosi dan pemberhentian kerja;
 - e. Etika terkait *stakeholders*;
 - f. Standar etika jajaran manajemen dan pegawai;
 - g. Integritas laporan keuangan.
2. Etika Perilaku Insan Perseroan, adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Pegawai dan Perseroan. Etika Perilaku Insan Perseroan mengatur tentang:
 - a. Komitmen Insan Perseroan;
 - b. Manajemen Risiko;
 - c. Menjaga nama baik Perseroan;
 - d. Keterbukaan informasi;
 - e. Menjaga hubungan baik antar insan Perseroan;
 - f. Melindungi informasi Perusahaan (*Intangible Asset*);

CODE OF CONDUCT AND CORPORATE CULTURE

In supporting the fulfillment of the principles of accountability and professionalism in the work environment, the Company implements the Code of Conduct and Corporate Culture as a form of uniform business ethics, work ethic, and culture in line with moral values for all Company personnel. The Code of Conduct and Corporate Culture are also the basis of behavior and ethics for all Company personnel in carrying out work relationships and interacting with fellow employees of the Company as well as with other stakeholders.

The Company's Code of Conduct was validated by the Board of Commissioners and Board of Directors on October 18, 2019. The Company's Code of Conduct was prepared based on a compilation of various sources, including the Articles of Association, corporate culture, and applicable laws and regulations.

Content of Code of Conduct

The Company's Code of Conduct is grouped into 3 (three) sections consisting of:

1. The Company's Business Ethics is an explanation of how the Company as a business entity behaves, has ethics, and acts in an effort to balance the interests of the Company with the interests of stakeholders in accordance with GCG principles and sound corporate values while maintaining the Company's profitability. The Company's Business Ethics regulates:
 - a. Compliance to the laws and regulations;
 - b. Giving and receiving of presents/gratification, bribery, and others;
 - c. Maintain Occupational Health, Safety, and Environment (K3LH);
 - d. Equal opportunity for our employees in case of assignments, promotions, and terminations;
 - e. Ethics regarding Stakeholders;
 - f. Management and employee ethical standards;
 - g. Financial Statements integrity.
2. The Company's employee behavioral ethic is a value system or norms embraced by all Leaders and employees in implementing their duties including relation's ethics between the employees and Company. The Company's employee behavioral ethics regulate about:
 - a. Employee commitment;
 - b. Risk Management;
 - c. Maintaining the Company's reputation;
 - d. Information Disclosure;
 - e. Maintaining good relations between the Company employees;
 - f. Protecting company information (intangible assets);

- g. Pengelolaan data Perusahaan dan penyusunan laporan;
 - h. Menjaga dan menggunakan Aset Perusahaan;
 - i. Menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup;
 - j. Pelarangan *insider trading*;
 - k. Memberi dan/atau menerima Hadiah, Jamuan, Hiburan, dan Donasi;
 - l. Benturan kepentingan;
 - m. Pengelolaan anak perusahaan.
3. Penegakan dan Pelaporan, meliputi mekanisme pelaporan dan pelanggaran sanksi, mengatur tentang:
- a. Pelaporan Pelanggaran;
 - b. Sosialisasi dan Internalisasi;
 - c. Konsultasi dan Pelaporan Masalah;
 - d. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran;
 - e. Sanksi atas Pelanggaran

Pengungkapan Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Kode Etik Perseroan wajib dipatuhi oleh seluruh insan Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Organ Penunjang dan seluruh karyawan baik di level kantor pusat, unit kerja, maupun perusahaan anak serta aliansi lainnya yang berada di bawah pengendalian Perseroan. Uraian bahwa Kode Etik Perseroan berlaku bagi seluruh level organisasi telah tertuang dalam bentuk tanda tangan setiap karyawan di Lembar Pernyataan Kepatuhan Standar Etika Perseroan dan *Code of Corporate Governance* sebagai wujud komitmen pelaksanaan Kode Etik dan *Code of Corporate Governance*.

Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

Perseroan menyadari bahwa standar etika bisnis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari implementasi praktik bisnis sehat dan penilaian kinerja seluruh karyawan Perseroan. Oleh karenanya, seluruh pejabat di lingkungan Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar etika Perseroan telah disosialisasikan dan dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan. Guna mendukung hal tersebut, Perseroan secara berkala mengadakan berbagai acara yang bertujuan untuk mengingatkan dan menekankan penerapan kode etik kepada seluruh karyawan di berbagai level manajemen. Salah satu bentuk sosialisasi informasi yang biasa dilakukan Perseroan misalnya dalam hal terjadi perubahan terkait Peraturan Perusahaan di bidang kepegawaian, maka Sarasehan Tim Manajemen akan terjun langsung ke seluruh unit kerja guna memastikan bahwa informasi mengenai perubahan tersebut telah dipahami oleh seluruh karyawan. Sebagai informasi, tahun ini Perseroan kembali melakukan sosialisasi Kode Etik kepada pegawai di antaranya:

- 1. Penyampaian materi mengenai *Good Corporate Governance* yang memuat Kode Etik Perusahaan kepada pegawai Pabrik Produk Beton Boyolali dan Wilayah Penjualan IV di Pabrik Produk Beton Boyolali pada tanggal 31 Januari 2020;

- g. Company Data Management and Report preparation;
 - h. Maintaining and Using Company asset;
 - i. Maintaining occupational health, safety, and environment;
 - j. Insider trading prohibition;
 - k. Giving and/or receiving gifts, dining, entertainment, and donations;
 - l. Conflict of interest; and
 - m. Political activities
3. Enforcement and Reporting include reporting mechanism and sanction violations, regulating on:
- a. Whistleblowing;
 - b. Dissemination and Internalization;
 - c. Consultation and Reporting of Issues;
 - d. Whistleblowing Mechanism;
 - e. Sanctions for Violations.

Code of Conduct Disclosure is Addressed to All Organizational Levels

The Company's code of conduct must be complied with by all of the Company's employees, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Supporting Organs, and all employees both in the head office, work units, as well as subsidiaries and other affiliations under the Company's authority. The description of the Company's Code of Conduct being required for all levels of organization has been stated in the form of signatures by all employees in the Company's Ethical Standard Compliance Statement and Code of Corporate Governance as a form of implementation of Code of Conduct and Code of Corporate Governance.

Code of Conduct Dissemination

The Company is aware that business ethics standards are an inseparable part of implementing healthy business practices and assessing the performance of all employees of the Company. Therefore, all officials of the Company are responsible for ensuring that the Company's ethical standards are well disseminated and understood by all employees. To support this, the Company periodically holds various events aimed at reminding and emphasizing the implementation of a code of conduct to all employees at various levels of management. One form of information dissemination that is usually carried out by the Company, for example in the event of a change in Company Regulations in the field of employment, the Management Team Workshop will go directly to all work units to ensure that all employees understand the information regarding these changes. For information, this year the Company once again disseminated the Code of Conduct to employees, including:

- 1. Submission of material on *Good Corporate Governance* containing the Company's Code of Conduct to employees of the Boyolali Concrete Product Plant and Sales Area IV at the Boyolali Concrete Product Plant on January 31, 2020;

2. Sosialisasi dalam forum *Sales Engineer* WIKA BETON melalui daring pada tanggal 14 Oktober 2020.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Setiap insan WIKA BETON yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Sanksi bagi karyawan yang melanggar Kode Etik diputuskan oleh Atasan Langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
2. Direksi memberi arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing.
3. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris.
4. Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
5. Apabila mitra kerja atau pemangku kepentingan Perseroan didapati melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang tertuang di dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana, Perseroan dapat meneruskannya kepada pihak berwajib.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2020

Pada tahun 2020, Perseroan tidak menemukan adanya pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Nilai dan Budaya Perusahaan

Pada tahun 2020, Perseroan mengusung nilai dan budaya baru bertajuk AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Rincian nilai-nilai yang diusung tersebut adalah sebagai berikut:

- **AMANAH**
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- **KOMPETEN**
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- **HARMONIS**
Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- **LOYAL**
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
- **ADAPTIF**
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- **KOLABORATIF**
Membangun kerja sama yang sinergis.

Bersamaan dengan diusungnya nilai-nilai Perusahaan yang baru, maka Perseroan turut melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai yang mana pada tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2020 melalui acara *site visit* dan sosialisasi yang bertempat di Pabrik Produk Beton Boyolali dan sosialisasi melalui

2. Dissemination in the WIKA BETON Sales Engineer forum online on October 14, 2020.

Sanctions for Code of Conduct Violation

Every WIKA BETON employee who is proven to have violated the Code of Conduct will be imposed to sanctions in accordance with applicable policies and laws, namely:

1. Sanctions for employees who violate the Code of Conduct are decided by the direct supervisor or the Board of directors according to the level of the violation.
2. The Board of Directors provides directions for mentoring actions, disciplinary sanctions, and/or other actions as well as prevention that must be carried out by Direct Supervisors in their respective environments.
3. Sanctions for Directors who committed violations are decided by the Board of Commissioners.
4. Sanctions for the Board of Commissioners who committed violations are decided by the Shareholders.
5. If partners or stakeholders of the Company are found to have committed violations, they will be subject to sanctions according to the provisions contained in the contract. If it is related to a criminal act, the Company can pass it on to the authorities.

Total Code of Conduct Violation in 2020

There were no violations against the code of conduct throughout 2020.

Corporate Culture and Values

In 2020, the Company promoted a new value and culture entitled AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, and Kolaboratif). The details of the values carried are as follows:

- **AMANAH (RESPONSIBLE)**
Uphold the trust given.
- **KOMPETEN (COMPETENT)**
Continuously learn and develop capabilities.
- **HARMONIS (HARMONIOUS)**
Caring for each other and respecting differences.
- **LOYAL (LOYAL)**
Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the Country.
- **ADAPTIF (ADAPTIVE)**
Continuously innovate and enthusiastically move or face change.
- **KOLABORATIF (COLLABORATIVE)**
Build synergistic cooperation.

Along with the promotion of new Corporate values, the Company also disseminated to all employees which in 2020 was held on January 31, 2020 through a site visit and dissemination which took place at the Boyolali Concrete Product Plant and online dissemination on October 14, 2020. Apart from employee

daring pada tanggal 14 Oktober 2020. Selain melalui *gathering* pegawai, kegiatan sosialisasi mengenai nilai-nilai dan budaya Perseroan juga dilakukan melalui sarasehan ataupun kegiatan penunjang lainnya.

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mewujudkan iklim kerja yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel, Perseroan memiliki pakta integritas yang berfungsi sebagai *tools* untuk menumbuhkan prinsip keterbukaan dan kejujuran saat menjalankan aktivitas bisnis dan operasi Perseroan. Pakta Integritas Perseroan berisi berbagai hal yang dinilai dapat menegakkan implementasi GCG di Perseroan, antara lain:

1. Seluruh insan Perseroan telah menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Perseroan dan bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham telah menandatangani kontrak manajemen yang memuat kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham tentang target-target kinerja yang akan dicapai pada 2020.
3. Dalam rangka mengupayakan pemenuhan aspek komitmen, Perseroan telah menunjuk penanggung jawab penerapan tata kelola di jajaran Perseroan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI, ANTI GRATIFIKASI DAN DONASI

Komitmen Perseroan dalam menjunjung prinsip korporasi yang bersih, sehat, dan akuntabel serta bebas dari berbagai bentuk perilaku yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik kepentingan, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diwujudkan dengan pemberlakuan kebijakan dan mekanisme anti korupsi dan anti gratifikasi dan donasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Perseroan turut menyusun kebijakan dan mekanisme anti gratifikasi berupa pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berkaitan dengan wewenang/jabatannya di perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Kebijakan dan ketentuan tersebut telah diatur dalam Pokok-Pokok Kebijakan Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh insan Perseroan.

gatherings, dissemination activities regarding the Company's values and culture are also carried out through workshops or other supporting activities.

INTEGRITY PACT

Integrity Pact was made to create a high quality, effective, efficient and accountable execution of duties within the business environment, while also grow the principle of transparency and honesty within the company. The integrity pact contains various matters that can uphold GCG implementation within the Company as follows:

1. All of the Company's personnel have signed a statement of compliance with the Company's Code of Conduct and be willing to accept sanctions if violations according to applicable regulations.
2. Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders have signed a management contract containing an agreement between the Board of Directors and Board of Commissioners with the Shareholders regarding the performance targets to be achieved by 2020.
3. To pursue the commitment aspect fulfillment, the Company has appointed personnel who monitor the implementation of corporate governance and submit periodic reports to the Board of Directors and Board of Commissioners.

POLICY ON ANTI-CORRUPTION, ANTI-GRATIFICATION, AND DONATIONS

The Company's commitment to upholding the principles of a clean, sound, and accountable corporation and free from various forms of behavior that have the potential to cause conflicts of interest, such as corruption, collusion, and nepotism (KKN) is realized by implementing anti-corruption, anti-gratuity, and donation policies and mechanisms.

In line with this policy, the Company has participated in formulating anti-gratification policies and mechanisms in the form of giving money, goods, rebates (*discounts*), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, travel tours, free medical treatment and other facilities, both accepted inside or outside the country, and those conducted using electronic means or without electronic means relating to his/her authority/ position in the Company so that it has the potential to create a conflict of interest. These policies and provisions have been regulated in the Principles of Business Ethics, Anti-Corruption and Donation Policies which must be obeyed and carried out by all Company personnel.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan juga telah menerapkan standar etika yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan nilai-nilai budaya Perseroan. Adapun yang diatur dalam pedoman ini meliputi:

1. Keterlibatan Politik

- a. Tidak ada dana atau aset Perusahaan yang boleh digunakan untuk kontribusi partai politik atau calon partai politik. Larangan ini meliputi tidak hanya secara kontribusi langsung tetapi juga bantuan tidak langsung atau dukungan melalui pemberian barang-barang atau jasa atau perlengkapan untuk tujuan penggalangan dana politik atau tujuan kampanye lainnya. Penerapan larangan hanya untuk penggunaan dana atau aset Perusahaan untuk tujuan politik dan tidak diartikan untuk mengecilkan pegawai dari kontribusi pribadi kepada calon atau partai politik yang dipilih.
- b. Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan pegawai mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur keterlibatan Perusahaan dan pegawai dalam urusan politik. Mereka tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik.
- c. Perusahaan melarang seseorang melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

2. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan

- a. Organ Perseroan dan karyawan Perseroan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Perseroan.
- b. Perseroan senantiasa melakukan pencatatan atas harta, utang, dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4. Pelaporan atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi Pelapor

- a. Direksi berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis dan Panduan Perilaku Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu berdasarkan kebijakan *Whistleblowing System* Perseroan.
- b. Perseroan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, Panduan Perilaku Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

In this regard, the Company has also implemented ethical standards that have been adjusted to the vision, mission, and cultural values of the Company. As for what is regulated in this guideline include:

1. Political Involvement

- a. No funds or assets of the Company may be used for political party contributions or candidate of political party. This prohibition includes not only by direct contribution but also indirect assistance or support through the provision of goods or services or equipment for the purpose of raising political funds or other campaign objectives. Implementation of the prohibition is only for the use of funds or assets of the Company for political purposes and not meant to limit employees from personal contributions to candidates or political party.
- b. Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees shall comply with any laws and regulations which governs the involvement of the Company and its employees in political affairs. They are not allowed to become a political party official.
- c. The Company prohibits anyone from doing coercion to others which may limit the rights of the individual concerned to channel his political aspirations.

2. Giving and Receiving Gifts and Donations

- a. Every member of the Board of Commissioners and the Board of Directors and employees of the Company are prohibited from giving or offer something, either directly or indirectly, to any State official or individual representing a business partner, which can influence decision making.
- b. Every member of the Board of Commissioners and the Board of Directors and employees of the Company are prohibited from receiving something for his/her benefit, both direct or indirectly, from business partners, which can influence decision making.

3. Regulatory Compliance

- a. Company organs and employees must comply with laws and regulations and Company regulations.
- b. The Company has to register on assets, debt, and capital properly according to generally accepted accounting principles.

4. Report on Violation and Witness Protection

- a. Board of Directors shall accept the report and ensure that the violation of business ethics, the Company's behavior guide as well as the laws and regulations is processed fairly and on time based on the Company's whistleblowing policy.
- b. The Company shall develop regulations that guarantee the protection of individuals who report violations of business ethics, Company Code of Conduct and the laws and regulations.

5. Benturan Kepentingan

- a. Benturan Kepentingan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan Organ Utama Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi) memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara objektif.
- b. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena Organ Perseroan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan baik oleh Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Pedoman Perilaku Perseroan.
- c. Benturan kepentingan ini dapat melibatkan jajaran Perseroan dan Perusahaan Anak.
- d. Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan peran/fungsi Organ Utama Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditentukan oleh RUPS.
 - 2) Dilarang memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - 3) Tidak berwenang mewakili Perseroan apabila mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - 4) Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dalam pembuatan suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus mundur dari proses pengambilan keputusan tersebut.
 - 5) Larangan hubungan keluarga sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Sosialisasi Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi telah dilaksanakan pada saat site visit di Pabrik Produk Beton Boyolali kepada seluruh pegawai Pabrik Produk Beton Boyolali dan Wilayah Penjualan IV pada tanggal 31 Januari 2020 serta sosialisasi dalam forum Sales Engineer Perseroan melalui daring pada tanggal 14 Oktober 2020.

Laporan Korupsi dan Gratifikasi Tahun 2020

Berdasarkan Laporan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020, terdapat/tidak terdapat laporan atas dugaan dan/atau penerimaan gratifikasi ataupun indikasi terjadinya pelanggaran korupsi di lingkungan Perseroan.

5. Conflict of Interest

- a. Conflict of interest is defined as a condition that allows the Company's Main Organs (Shareholders, Board of Commissioners, and Directors) to use their position and authority within the company for personal, family or group interests so they can implement the duties, which mandated by the company objectively.
- b. Such conflict of interest can occur when the Company's Organ does things that are not permitted either by the Company's Articles of Association, applicable laws, regulations and the Company's Code of Conduct.
- c. Such conflict of interest may involve personnel of the Company and Subsidiaries.
- d. The Company's Main Organs (Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors) need to take into account the following matters in carrying out their roles:
 - 1) No transaction shall result in conflict of interest, such as taking personal advantage out of company's activities, other than the salary and facility set by GMS for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
 - 2) Must not hold other position that may result in conflict of interest.
 - 3) Are not authorized to represent the Company in the event that they have interest conflicting with the Company's interest.
 - 4) In the event that the Board of Commissioners and the Board of Directors have conflict of interest in decision making process, he/she must back off from the process.
 - 5) The prohibition on family relations as mentioned above is further regulated in the Articles of Association.

Dissemination of Anti-Corruption and Gratification Policies

The dissemination of the Gratification Policy was carried out during the site visit at the Boyolali Concrete Product Plant to all employees of the Boyolali Concrete Product Plant and Sales Area IV on January 31, 2020 as well as dissemination in the Company's Sales Engineer forum online on October 14, 2020.

Report on Corruption and Gratification in 2020

Based on the 2020 Gratification Control Report, there are/no reports of allegations and/or receipt of gratuities or indications of corruption violations in the Company.

KEBIJAKAN INSIDER TRADING

Secara umum, *insider trading* diartikan sebagai aktivitas perdagangan saham perusahaan publik atau surat berharga lainnya (seperti obligasi atau opsi saham) oleh individu yang dapat mengakses informasi non-publik atas sebuah perusahaan publik lalu menggunakan informasi tersebut demi mendapat keuntungan untuk diri sendiri. Di berbagai negara, perdagangan saham yang dilakukan karena mendapatkan informasi dari orang dalam adalah ilegal. Demikian halnya di Perseroan, seluruh karyawan yang mempunyai dan/atau memiliki akses informasi orang dalam dilarang keras untuk menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material:

1. Yang dapat memengaruhi keputusan investor untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perseroan.
2. Kepada orang-orang yang memiliki hubungan istimewa untuk melakukan tindakan transaksi perdagangan barang/jasa kepada Perseroan.

Seluruh informasi Perseroan yang bersifat rahasia dan material dapat dipublikasikan oleh Perseroan kepada pihak eksternal dengan berpedoman pada Kebijakan Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi yang dimiliki oleh Perseroan. Setiap insan Perseroan yang tidak mematuhi kebijakan ini akan dikenakan sanksi dan/atau pemecatan yang ditentukan oleh Perseroan.

Jumlah Pelanggaran Insider Trading Tahun 2020

Selama tahun 2020, tidak terdapat aktivitas Perseroan yang dicurigai sebagai bentuk kegiatan *insider trading* baik oleh pejabat maupun pegawai Perseroan.

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, seluruh karyawan dihadapkan pada informasi-informasi tertentu yang apabila terjadi penggunaan yang tidak sepatutnya atau keterbukaan atas informasi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan. Kebijakan ini menitikberatkan pada kepemilikan dan kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia Perusahaan atau tidak terbuka untuk publik. Penerapan kebijakan ini berlaku untuk seluruh karyawan Perseroan dengan batasan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan

1. Perseroan menguasai semua bentuk ciptaan dalam bentuk kepemilikan secara intelektual.
2. Selama masa bisnisnya, Perseroan mungkin berkecimpung dengan Informasi Rahasia tertentu kepada pihak ketiga yang harus dipertahankan kerahasiaannya oleh Perseroan. Perseroan akan membatasi keterbukaan Informasi Rahasia dengan “need to know” basis. Seluruh insan Perseroan mempertahankan kerahasiaan kepemilikan Informasi ataupun Informasi Rahasia yang dipelajari dan disampaikan selama masa kerjanya. Dengan kepercayaan yang terbatas, seluruh insan Perseroan harus terus menerus berusaha menghindari keterbukaan yang disengaja maupun tidak disengaja.

INSIDER TRADING POLICY

In general, insider trading means a public company's securities trading activities or other securities (such as bonds or stock options) by individuals that can access non-public information of a public company that uses the information for personal gain. In various countries, securities trading that is done from insider information is illegal. Such is also the case in the Company, all employees that has and/or owns access of insider information are strictly prohibited in taking advantage of their position and job in disclosing of material information:

1. That may affect the investor decision to buy, sell, or retain Company shares.
2. To people with special affiliations to carry out goods/service transactional activities with the Company.

All Company information that is confidential and material in nature cannot be published by the Company to external parties by referring to the Company's Information Privacy and Ownership Policy. All of the Company's employees that do not comply with this policy will be sanctioned and/or terminated by the Company.

Insider Trading Violations in 2020

Throughout 2020, there were no Company activities that were suspected of being a form of insider trading by either the Company's officials or employees.

INFORMATION CONFIDENTIALITY AND OWNERSHIP POLICY

In carrying out the Company's business activities, all employees are exposed to certain information which in case of improper use or disclosure of the information may cause harm to the Company. This policy focuses on the ownership and confidentiality of information that is confidential to the Company or is not open to the public. The implementation of this policy applies to all employees of the Company with limits as set out in the prevailing laws and regulations.

Policy

1. The Company controls all forms of invention in the form of intellectual ownership.
2. During its business period, the Company may be dealing with certain Confidential Information to third parties of which the confidentiality must be maintained by the Company. The Company will limit the disclosure of Confidential Information on a “need to know” basis. All Company personnel maintain the confidentiality of ownership of Information or Confidential Information which is studied and conveyed during their working period. With limited trust, all personnel of the Company must continuously strive to avoid deliberate or unintentional disclosures.

3. Sebagaimana di atur dalam *Code of Conduct* Perseroan, bahwa setiap insan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi Perusahaan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut, Insan Perseroan bertanggung jawab untuk:
 - a. Melindungi informasi rahasia Perusahaan baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerja sama dengan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - b. Menggunakan informasi perusahaan baik yang bersifat umum dan khusus hanya untuk kepentingan perusahaan.
 - c. Penyebaran Informasi yang bersifat rahasia baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain berupa perorangan, perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Perusahaan.
3. As stipulated in the Company's Code of Conduct, that every employee of the Company in accordance with their authority and scope of work has access to Company information, both public and confidential. In this regard, the Company's Individuals are responsible for:
 - a. Protecting the Company's confidential information, both while still actively working or not working or not having a cooperative relationship with the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.
 - b. Using general and specific company information only for the benefit of the Company.
 - c. Dissemination of confidential information, either verbally or in writing, to other parties in the form of individuals, companies, associations, or other legal entities is carried out by officials appointed by the Company.

Sanksi

Setiap insan Perseroan yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi disiplin dan/atau pemecatan yang ditentukan oleh kebijaksanaan internal Perseroan. Setiap insan Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kebijaksanaan ini harus langsung melaporkan pelanggaran tersebut sesuai *Whistleblowing System* yang telah diberlakukan oleh Perseroan.

Sanctions

Every employee of the Company who does not comply with this Policy will be subject to disciplinary sanctions and/or dismissal as determined by the Company's internal policies. Every employee of the Company who is aware of a violation of this policy must immediately report the violation in accordance with the Whistleblowing System that has been implemented by the Company.

Jumlah Pelanggaran Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran yang terjadi terkait kerahasiaan atau kebocoran informasi rahasia Perusahaan yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Total Violations against Ownership and Confidentiality of Information in 2020

Throughout 2020, there were no violations that occurred regarding the confidentiality or leakage of the Company's confidential information that occurred within the Company.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Sebagai perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang industri beton pracetak yang menghasilkan berbagai jenis produk beton dan jasa usaha penunjang lainnya, Perseroan senantiasa bekerja secara profesional agar dapat menghasilkan produk beton yang bermutu tinggi dan terjamin kualitasnya sesuai dengan harapan pelanggan. Oleh karenanya, Perseroan telah menerapkan standar etika dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya sebagaimana diatur di dalam standar mutu ISO, SMK3, sistem manajemen peralatan dan penerapan prinsip-prinsip GCG. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya, Perseroan berkomitmen untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul di masyarakat setempat dengan mempekerjakan tenaga kerja setempat dan menghormati budaya daerah setempat. Pada implementasinya, Perseroan menjunjung tinggi etika bisnis saat menjalankan praktik bisnis yang saling menguntungkan terhadap mitra usaha dengan memperlakukan semua Pemangku Kepentingan sebagai mitra.

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICE POLICY

As a leading company in precast concrete industry that has produced various kinds of concrete products and other supporting business services, the Company continually collaborates professionally in order to produce high quality concrete products that meet the consumers' expectations. Therefore, the Company has implemented ethical standards in conducting all its business activities as stipulated in ISO quality standards, SMK3, equipment management system and GCG principles implementation. In conducting its business and operational activities, the Company is committed to minimize negative impacts that occur in the local community by hiring local labor and respecting local culture. In its implementation, the Company upholds business ethics while running a beneficial business practice with all work partners by treating all Stakeholders as partners.

Prinsip dan Kebijakan

Perseroan memiliki prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan secara cepat dan transparan, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG guna mencegah terjadinya benturan kepentingan di dalam prosesnya. Kebijakan yang diterapkan dalam proses pengadaan ini mengacu pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Prinsip-Prinsip Utama

Prinsip-prinsip utama yang wajib dipahami dan dipatuhi saat proses pengadaan barang dan/atau jasa Perseroan berlangsung, antara lain:

1. Semua kegiatan pengadaan dilakukan hanya untuk kepentingan PT Wijaya Karya Beton Tbk (Perseroan). Semua kegiatan pengadaan harus dilaksanakan secara masuk akal, dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan menerapkan pengelolaan biaya dengan prinsip kewajaran.
2. Pelaksanaan pengadaan wajib menghindarkan diri dari *fraud* dengan bertindak dan bekerja sesuai kode etik, peraturan, prosedur dan dalam kontrol yang memadai.
3. Unit yang berwenang melakukan pengadaan adalah unit-unit di dalam Perseroan yang diberikan wewenang melakukan pengadaan barang/ jasa sesuai kategori yang diatur dalam Kebijakan Biaya Perseroan.

Etika Unit Pengadaan

Semua unit-unit pengadaan yang berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan rekan bisnis dan vendor Perseroan untuk kegiatan pengadaan wajib mengikuti standar etika yang tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan dan memegang teguh kejujuran;
2. Mematuhi semua ketentuan eksternal/ perundang-undangan yang disyaratkan dan seluruh ketentuan internal Perseroan;
3. Setiap pengadaan yang dilakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan biaya Perseroan;
4. Proses pengadaan barang/ jasa harus berdasarkan pada persaingan yang sehat yang memerhatikan tingkat kemampuan yang setara dan kredibilitas dari setiap vendor;
5. Semua vendor harus diperlakukan sama dalam hal kesempatan, informasi, perhitungan atas pengambilan keputusan dalam proses seleksi vendor sebagai entitas eksternal yang terikat secara profesional;
6. Tidak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kesalahan vendor. Dengan maksud, pada saat ada kesalahan yang dapat dijelaskan dan diterima oleh Perseroan, maka Perseroan wajib memberikan kesempatan untuk re-negosiasi selama masih bias diterima oleh Perseroan;
7. Setiap kegiatan pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
8. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi vendor yang diberikan kepada Perseroan dan sebaliknya;

Principles and Policy

The Company has procedures for procurement of goods and services that are conducted swiftly and transparently by applying the principles of GCG in order to prevent conflict of interest in the process. The policies applied in this procurement process refers to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, Law No. 40 of 2007 on Limited Liabilities Company, and Presidential Regulation No. 70 of 2012 on The Second Amendment of Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Goods and Services Procurement.

Main Principles

The main principles that must be understood and complied with during the procurement process of the Company's goods and/or services are:

1. All procurement activities are carried out solely for the benefit of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (the Company). All procurement activities must be carried out in a sensible manner, can be accounted for and carried out by implementing cost management with the principle of fairness.
2. The implementation of procurement must avoid fraud by acting and working in accordance with the code of conduct, regulations, procedures, and under adequate control.
3. Units authorized to conduct procurement are units in the Company that are given the authority to procure goods/ services according to the categories stipulated in the Company's Cost Policy.

Ethics of Procurement Unit

All procurement units communicate directly or indirectly with business partners and/or Company vendors regarding procurement activities must follow ethical standards that are not limited to:

1. Implement and uphold honesty.
2. Comply with all external regulations, required laws and regulations and all internal regulations of the Company.
3. All procurement done is an integral part of the Company's cost policy.
4. The procurement of goods and/or services process must be based on sound competition by keeping in mind equal level of capability and credibility of each vendor.
5. Each vendor must be treated equal in opportunity, information, calculation on decision making in the vendor selection as external entity that is professional bound.
6. Does not take any opportunity to take advantage of vendor mistakes. If there is a mistake that can be explained and accepted by the Company, then the Company must give a chance to renegotiate as long as it is acceptable by the Company.
7. All procurement activities must be carried out openly and can be accounted for.
8. Protection on vendor information privacy that the Company provides and vice versa.

9. Tidak menyediakan informasi yang dapat memberikan keuntungan kepada salah satu vendor saja;
10. Dalam keadaan apa pun, tidak menerima hadiah, barang, komisi berupa uang tunai atau sejenisnya (cek, voucher), souvenir, cinderamata, makanan, di lingkungan kantor maupun rumah;
11. Tidak melakukan kegiatan pinjam/meminjamkan uang kepada vendor.

Hubungan dengan Mitra Perusahaan

Perusahaan dalam berhubungan dengan calon mitra Perusahaan dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memilih Mitra Perusahaan yang memiliki kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil;
2. Senantiasa melakukan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku;
3. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kontrak;
4. Mitra usaha wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Perusahaan;
5. Memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap seluruh Mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Proses pengadaan barang dan jasa harus bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
7. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan;
8. Mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan;
9. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Pemasok yang memenuhi kualitas persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
10. Menjalin komunikasi yang baik dengan Pemasok termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
11. Melakukan Evaluasi Kepuasan Pemasok/Mitra Kerja dengan mengirimkan kuesioner ke Pemasok/Mitra Kerja yang dilakukan secara tahunan.

9. Does not provide information that can benefit one of the vendors.
10. In any situation, does not receive gifts, goods, commission in the form of cash or equivalent (check or voucher), souvenirs, food, in the office or at home.
11. Does not lend or borrow money to or from the vendor.

Relations with Business Partners

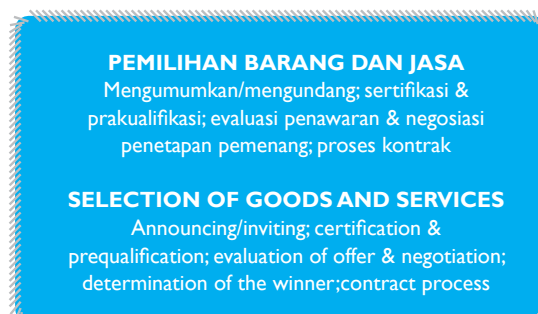
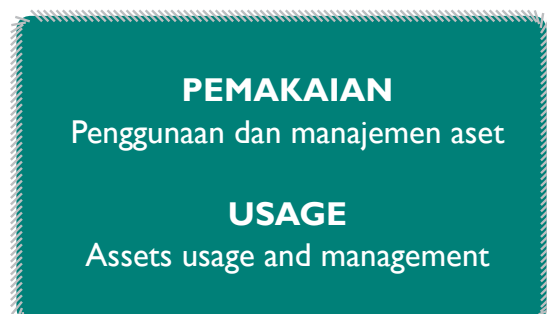
The relationship between the Company and prospective partner must be professional, equal, and beneficial by following these principles:

1. Choose Company partners with credibility and bonafide that can be accounted for and free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) by putting forth prudential principles, selective, competitive and fair;
2. Continuously build work relations that are according to ethical values and the prevailing laws and regulations;
3. Meet the rights and responsibilities of each party according to contract;
4. Business partner must comply to all prevailing internal regulations;
5. Provide equal treatment and opportunities to all work partners in the procurement of goods and/or services as stipulated in Company policy as well as the prevailing laws and regulations;
6. Goods and services procurement must be free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN);
7. Does not influence each other both directly or indirectly that can cause unhealthy competition that impacts the quality of procurement process and work results;
8. Prevent any conflict of interest with parties that are directly or indirectly involved in the procurement process;
9. Conduct a transparent, competitive, and fair procurement process to obtain a supplier that meets the quality of job requirements and prices that can be accounted for;
10. Maintain good communication with Supplier including following up on complaints and objections;
11. Evaluate the Suppliers/Work Partners satisfaction by annually distributing questionnaire to the Suppliers/Work Partners.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Proses Tahapan Pengadaan di Lingkungan Perseroan



Goods and Service Procurement Process
Stages of Procurement in the Company



Proses tahapan pengadaan barang dan/atau jasa

Perseroan seperti tercermin pada bagan di atas dijalankan secara terbuka dengan mengedepankan asas kejujuran dan keadilan dimana seluruh calon penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan terutama dalam hal kemampuan dan kinerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, berhak untuk mengikuti aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa ini.

Procurement Stages Process in the Company

The process for procurement of goods and/or services as reflected in the above chart is conducted openly by putting forth the principles of honesty and fairness where all suppliers of goods and/ or services that meet the requirements especially in competence and performance according to what's needed, has the right to participate in this goods and/or services procurement activities.

Transparansi Jumlah Pemasok dan Nilai Kontrak

Berikut adalah informasi jumlah pemasok domestik dan luar negeri yang telah terikat kontrak dengan Perseroan beserta nilai kontraknya:

Transparency of Total Suppliers and Contract Value

The following is information on the number of domestic and foreign suppliers who have been bound by contracts with the Company and their contract values:

	Jumlah Pemasok / Total Suppliers			Nilai Kontrak (Rp juta) / Contract Value (Rp million)		
	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	2020	2019	Pertumbuhan / Growth
Domestik / Domestic	498	498	0	1.216.243	2.370.453	(1.154.210)
Luar Negeri / Overseas	7	7	0	16.198	29.063	(12.865)
Jumlah / Total	505	505	0	1.232.441	2.399.516	(1.167.075)

Peningkatan Kemampuan Pemasok

Kebijakan peningkatan kemampuan pemasok/ vendor disusun demi memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok dalam memasok/ memenuhi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan

Supplier Capacity Building

The supplier/vendor capacity building policy is formulated to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The supplier's ability to supply/fulfill the goods and/or services needed by the Company will affect the quality of the Company's

akan mempengaruhi kualitas output Perusahaan. Untuk itu, dengan dilakukannya seleksi, maka diharapkan pemasok yang mendaftarkan dirinya untuk bersaing semakin meningkatkan kemampuan dan daya tawarnya.

Demi tercapainya suatu hubungan kemitraan yang baik dengan para pemasok, Perseroan selalu memenuhi hak-hak pemasok sesuai dengan yang dijanjikan. Pedoman hubungan antara Perusahaan dan para pemasoknya juga diatur secara khusus dan *Code of Corporate Governance* dan kebijakan internal Perusahaan.

Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*, Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan para pihak yang membantu Perseroan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan maupun sebagai sumber pendanaan untuk keperluan investasi jangka menengah dan panjang (kreditur) agar dapat terus mendapatkan kepercayaan sehingga prospek pertumbuhan Perseroan dalam jangka panjang dapat terus terjaga.

Demi mewujudkan komitmen tersebut maka Perseroan telah menerbitkan suatu kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur yang bertujuan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak Kreditur dan menjaga kepercayaan yang diberikan Kreditur terhadap Perseroan. Secara garis besar, prinsip-prinsip kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan mempertimbangkan dan mengukur kemampuan secara internal untuk memenuhi hak-hak kreditur sebelum melakukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini dilakukan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perseroan;
2. Perseroan melakukan pemilihan kreditur berdasarkan aspek kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Perseroan menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*);
4. Perseroan senantiasa memastikan bahwa pembayaran hutang pokok, bunga dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu;
5. Perseroan memastikan penyampaian informasi laporan keuangan kepada kreditur dilakukan secara tepat waktu, transparan, akurat, dan dapat dipercaya;
6. Perseroan menjaga rasio keuangan sesuai dengan rasio yang disepakati dengan kreditur;
7. Perseroan menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan pengguna kredit yang diperjanjikan;
8. Perseroan memastikan bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian dengan pihak kreditur terpenuhi;
9. Perseroan memberikan informasi secara transparan, akurat, terbuka dan tepat waktu tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur;

output. For this reason, by conducting the selection, it is hoped that suppliers who register themselves to compete will further increase their ability and bargaining power.

To achieve a good partnership relationship with suppliers, the Company always fulfills the supplier's rights as promised. The guidelines for the relationship between the Company and its suppliers are also specifically regulated and the Code of Corporate Governance and the Company's internal policies.

Policy on Creditor's Rights

As a manifestation of the Company's commitment to implementing the Good Corporate Governance principles, the Company always pays attention to the interests of the parties who assist the Company to increase the Company's working capital capacity as well as a source of funding for medium and long term investment needs (creditors) in order to be able to gain trust so that the Company's long-term growth prospects can be maintained.

To realize this commitment, the Company has issued a policy related to the fulfillment of creditors' rights which aims to fulfill the Creditor's rights and maintain the trust given by the Creditor to the Company. Broadly speaking, the principles for the fulfillment of creditors' rights carried out by the Company are as follows:

1. The Company considers and measures the ability internally to fulfill creditor rights before making a loan to creditors. This is conducted to maintain the fulfillment of rights and maintain creditors' trust in the Company;
2. The Company selects creditors based on the accountable credibility aspect;
3. The Company accepts loans bound by legal agreements with agreement clauses that prioritize fairness principles;
4. The Company always ensures that the payment of principal debt, interest and loan principal is made on time;
5. The Company ensures that the submission of financial report information to creditors is carried out in a timely, transparent, accurate and reliable manner;
6. The Company maintains financial ratios in accordance with the ratio agreed upon with the creditors;
7. The Company uses the loan in accordance with the agreed loan user's purpose;
8. The Company ensures that all requirements in the agreement with the creditor are fulfilled;
9. The Company provides transparent, accurate, open and timely information on the use of funds to increase creditor confidence;

10. Perseroan menyampaikan salinan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada kreditur;
11. Perseroan memberitahukan kepada kreditur pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perseroan;
12. Perseroan menginformasikan kepada kreditur apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan;

Dalam menjalin hubungan dengan Kreditur, insan Perseroan diwajibkan untuk:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada kreditur sehubungan dengan kerja sama yang terjadi dengan menjunjung tinggi transparansi dan kejelasan serta tidak mengandung hal-hal yang multitafsir, dengan tetap memperhatikan dan menjaga informasi-informasi yang bersifat *confidential* atau rahasia yang dimiliki Perusahaan;
2. Bekerja sama dengan para kreditur yang sudah dipilih atas dasar pertimbangan kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan dan pengembangan bisnis;
3. Melakukan analisa risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerja sama;
4. Menjaga dan mengutamakan kepentingan perusahaan;
5. Berkomitmen untuk memenuhi hak-hak para kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Pemenuhan prinsip dan *best practices* GCG didukung oleh pemberlakuan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/"WBS") sebagai mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas indikasi atau tindak penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lingkungan Perseroan. Pembentukan WBS Perseroan sekaligus sebagai bentuk upaya Perseroan dalam membangun *Fraud Control System* (FCS) sebagaimana telah diatur di dalam *Code of Conduct*, *Code of Corporate Governance*, *Board Manual*, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Dasar Kebijakan *Whistleblowing System*

Kebijakan *Whistleblowing System* Perseroan telah diatur dalam Pedoman *Whistle Blower System* No. WB-GCG-PS-02 tanggal 3 September 2018. Kebijakan WBS juga telah diatur dalam *Code of Conduct* yang disahkan melalui SK Direksi No. SK.01.01/WB-0A.0036/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang *Code of Corporate Governance* dan *Code of Conduct* PT Wijaya Karya Beton Tbk, serta Pedoman Tata Laksana bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0037/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

10. The Company submits a copy of the deed of amendment to the Company's Articles of Association to the creditor;
11. The Company notifies the creditors of dividend distribution to the Shareholders of the Company;
12. The Company informs creditors if there is a change in the composition of the management and/or shareholders of the Company;

In establishing a relationship with Creditors, the Company's personnel are required to:

1. Provide complete and accurate information to creditors in relation to cooperation that occurs by upholding transparency and clarity and does not contain multiple interpretations, while paying attention to and maintaining confidential information owned by the Company;
2. Cooperate with creditors who have been selected on the basis of credibility and bona fide considerations that can be accounted for in the interests and development of the business;
3. Perform risk and benefit analysis before entering into a cooperation agreement;
4. Maintain and prioritize the interests of the Company;
5. Commit to fulfill the rights of creditors in accordance with the agreed agreement, including payment of interest, principal repayment and other rights of creditors in accordance with the provisions of the agreement agreed between the Company and the Creditor as well as the relevant laws and regulations.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The fulfillment of GCG principles and best practices is supported by the implementation of the Whistleblowing System ("WBS") as an early warning system for indications or acts of irregularities and fraud occurring within the Company. The establishment of the WBS of the Company is also a form of the Company's efforts in building a Fraud Control System (FCS) as regulated in the Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Board Manual, and other applicable laws and regulations.

Basis of Whistleblowing System Policy

The Company's Whistleblowing System Policy has been regulated in the Whistle Blower System Guidelines No. WB-GCG-PS-02 dated September 3, 2018. The WBS policy has also been regulated in the Code of Conduct which was validated by the Decree of the Board of Directors No. SK.01.01/WB-0A.0036/2019 dated October 18, 2019 concerning the Code of Corporate Governance and Code of Conduct of PT Wijaya Karya Beton Tbk., as well as the Code of Conduct for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) which was updated based on the Joint Decree of the Board Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.01/WB-0A.0037/2019 dated October 18, 2019.

Tujuan Implementasi Whistleblowing System

Menyadari pentingnya peranan implementasi WBS sebagai bagian dari *Soft Structure* GCG Perseroan, maka penerapan kebijakan WBS di lingkungan Perseroan memiliki sejumlah tujuan, antara lain:

1. Sebagai wadah dan panduan untuk menerima laporan mengenai berbagai dugaan pelanggaran hukum dan peraturan Perseroan, benturan kepentingan, kecurangan, korupsi, suap serta pencurian yang terjadi di lingkungan kerja Perseroan.
2. Membangun sistem penanganan pengaduan yang tanggap, transparan, aman, dan bertanggung jawab.
3. Memberi pemahaman yang sama tentang fungsi, peran dan proses sistem pelaporan pelanggaran serta menjamin kesinambungan di dalam sistem manajemen meskipun terjadi perubahan organisasi dan rotasi sumber daya manusia dengan menciptakan budaya GCG.
4. Menyediakan cara penyampaian yang efektif terkait informasi penting dan kritis bagi Perseroan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
5. Menciptakan keengganan untuk melakukan pelanggaran yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan kesediaan semua pihak untuk melaporkan semua pelanggaran yang terjadi ke dalam WBS
6. Menyediakan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran.
7. Menyediakan kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik dan melibatkan aparat yang berwenang.
8. Mengurangi risiko yang dihadapi Perseroan, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
9. Mengurangi biaya dalam menangani suatu perkara akibat dari terjadinya pelanggaran.
10. Meningkatkan reputasi Perseroan di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum.
11. Memberi masukan kepada Perseroan untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Prinsip-Prinsip Umum

Prinsip-prinsip umum yang harus dipatuhi oleh insan Perseroan saat menerapkan kebijakan WBS di lingkungan Perseroan, antara lain:

1. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh insan Perseroan, yaitu Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Pihak Independen, Pihak Ketiga dan *shareholders* lainnya. Jika anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melakukan pelanggaran, laporan yang disampaikan secara tertulis kepada ketua Komite Audit.

Objectives of Whistleblowing System

Realizing the importance of the role that WBS implementation plays as part of the Company's GCG Soft Structure, then the implementation of WBS policy in the Company has various purposes, such as:

1. As tools and guidelines to receive reports on various suspicion of legal violations and Company regulations, conflict of interest, fraud, corruption, bribery as well as theft that happen in the Company.
2. Building a whistleblowing response system that is responsive, transparent, safe and responsible.
3. Providing the same understanding about the function, roles and process of whistleblowing system as well as guaranteeing sustainability in the management system even with organizational changes and human resources rotation by creating GCG culture.
4. Providing effective delivery mechanism regarding crucial and critical information of the Company to the parties that must handle it discreetly.
5. Creating the reluctance to commit violations by improving awareness and willingness from all parties to report all violations to the WBS.
6. Providing early warning system mechanism on the possibility of a violation.
7. Providing the opportunity to handle violations internally first, before spreading into violations that are public in nature and involving authorities.
8. Reducing the risk that the Company faces, from violations both from financial, operational, legal, occupational safety and reputation.
9. Reducing costs in handling a case resulting from a violation.
10. Improving the Company's reputation in the eyes of stakeholders, regulators, and general public.
11. Providing suggestions to the Company to see further in critical areas and work processes with weaknesses in internal control, as well as designing improvement actions needed.

General Principles

The general principles must be complied by Company employees when applying WBS policies in the Company are as follows:

1. This policy is applicable for all Company employees, which include employees, Board of Directors, Board of Commissioners, Independent Parties, Third Parties and other stakeholders. If the violations are done by the members of the Board of Commissioners or Directors, then report must be written and submitted to the Chairman of Audit Committee.

2. Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah:
 - a. Segala informasi yang disampaikan bersifat rahasia.
 - b. Setiap pelapor harus mendapat perlindungan.
 - c. Setiap informasi yang dilaporkan harus dilakukan proses *due diligence* dan investigasi lebih lanjut.
3. Setiap pelapor harus bertanggung jawab dan memiliki itikad baik dalam melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran yang akan atau telah merugikan Perseroan.
4. Dengan adanya kebijakan *Whistle Blower*, diharapkan tidak ada seorang pekerja atau manajemen perusahaan maupun pihak ketiga lainnya yang dapat menggunakan jabatan mereka untuk mencegah seseorang untuk membuat laporan.

Lingkup Kebijakan WBS dan Cakupan Pelaporan

Lingkup kebijakan WBS Perseroan mencakup pelaporan terhadap perbuatan pelanggaran seperti tindak korupsi, kecurangan, ketidakjujuran, perbuatan melanggar hukum, pelanggaran terhadap peraturan perundangan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), keamanan dan kesehatan kerja atau keamanan Perseroan, Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) baik yang berpotensi merugikan keuangan Perseroan maupun yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap citra Perseroan. Secara normatif, Kebijakan WBS mengatur peran dan tanggung jawab semua pihak yang terkait, jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan, ketentuan perlindungan pelapor pelanggaran, penerimaan laporan pelanggaran, tindak lanjut laporan pelanggaran dan penerimaan serta pengelolaan Gratifikasi.

Sarana Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pada prinsipnya, setiap insan Perseroan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan terkait tindakan yang dianggap melanggar *Code of Conduct* kepada Pihak yang berwenang, baik melalui surat maupun email. Selanjutnya, laporan pengaduan tersebut akan diterima dan ditindaklanjuti oleh Tim Kepatuhan GCG. Laporan pengaduan dapat dibuat oleh pelapor baik melalui surat elektronik (e-mail) maupun dalam bentuk laporan tertulis yang ditujukan kepada:

- Alamat email Sekretaris Perusahaan atau Bagian Legal & GCG: sekper@wika-beton.co.id atau legalgcg@wika-beton.co.id / legalwikabeton@gmail.com
- Alamat Tim Kepatuhan GCG: Kantor Pusat PT Wijaya Karya Beton Tbk.
WIKA Tower I, Lt. 2-5, Jl. D.I. Panjaitan Kav.9
Kel. Cipinang, Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur 13340

2. The basic principles of this policy are:
 - a. All of submitted information are confidential.
 - b. Every informant must receive protection.
 - c. All information reported must go through a due diligence process and investigated further.
3. All informants must be responsible and has good intentions in reporting violations or the potential of violations which will or have harm the Company.
4. Through this WBS policy it is expected that no employee or management or third parties can misuse their position in preventing someone to make whistleblowing report.

Scope of WBS Policy and Reporting Coverage

The scope of the Company's WBS policy covers reporting on violations such as corruption, fraud, dishonesty, criminal actions, violations against: the laws and regulations, Code of Corporate Governance, Code of Conduct, occupational health and safety or Company security, Standard Operating Procedures both that have the potential to harm the Company financially as well as those that can cause a negative effect on the Company image. Normatively, WBS policy governs the roles and responsibilities of all related parties, types of violations that can be reported, the stipulation of protection for informant, reception of violation report, follow up on violation report and reception as well as management of gratification.

Violations Report Submission

In principle, every employee of the Company can submit reports regarding allegations related to actions deemed to have violated the Code of Conduct to the competent authorities, either by letter or e-mail. Furthermore, the complaint report will be received and followed up by the GCG Compliance Team. Complaint reports can be made by the whistleblower either via electronic mail (e-mail) or in the form of a written report addressed to:

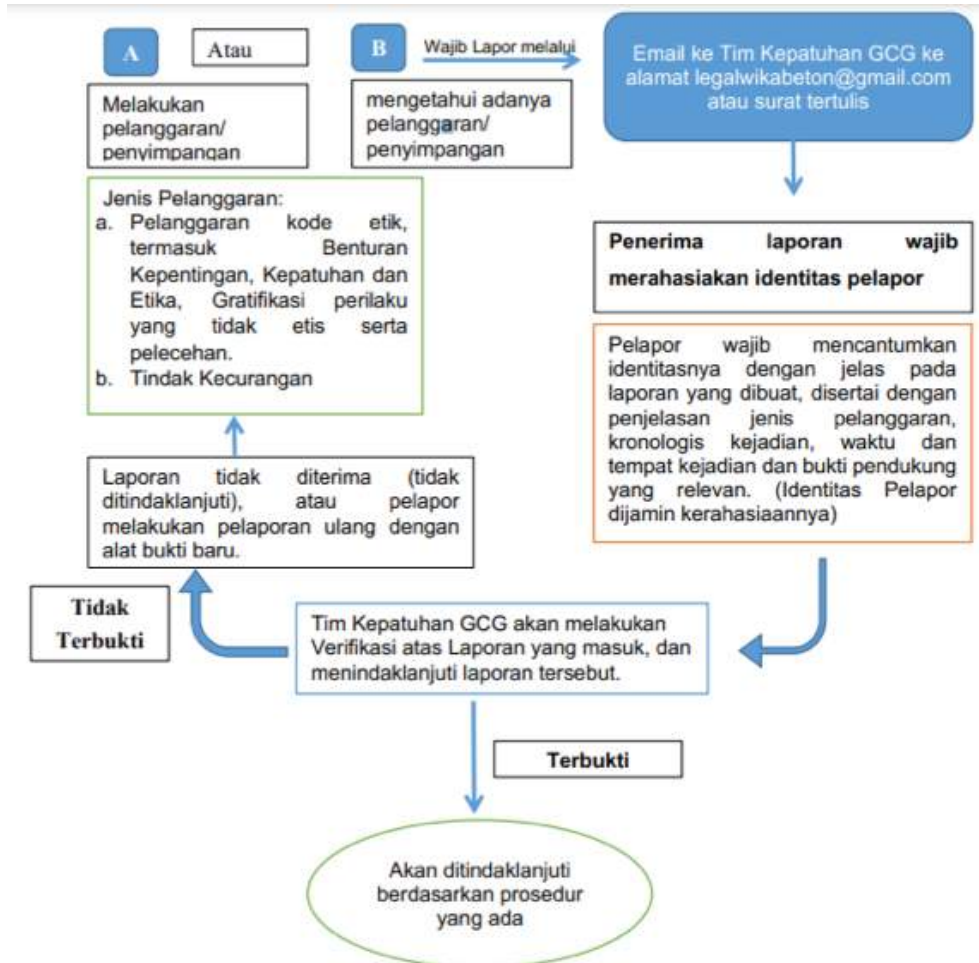
- E-mail address of the Corporate Secretary or Legal & GCG Section: sekper@wika-beton.co.id or legalgcg@wika-beton.co.id / legalwikabeton@gmail.com
- Address of GCG Compliance Team: Head Office of PT Wijaya Karya Beton Tbk.
WIKA Tower I, Lt. 2-5, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9
Kel. Cipinang, Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur 13340

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan atas pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan dengan mengikuti alur sebagai berikut:

Mechanisms for Violations Report

Report on *Code of Conduct* violation is carried out by following the below flow:



Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan senantiasa memberikan jaminan perlindungan kepada setiap pelapor sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan dan *best practices* yang berlaku umum dalam hal penyelenggaraan WBS. Terkait hal tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan Perseroan kepada para pelapor; antara lain:

1. Perseroan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada setiap pelapor dengan menjamin aspek keamanan dan kenyamanan yang diperlukan.
2. Perseroan memberikan perlindungan kepada setiap keluarga pelapor dari aksi atau tindakan balasan oleh pihak yang dilaporkan atau pihak yang memiliki kepentingan.
3. Jenis perlindungan yang diberikan Perseroan baik kepada pelapor maupun keluarga pelapor adalah berupa perlindungan hukum terhadap tekanan atau serangan fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Protection for Informants

The Company ensures protection to all informants as is stipulated in the legislation and common best practices in WBS implementation. In that regard, the form of protection that the Company provides to the Informant is as follows:

1. The Company is committed to providing protection to all informants by ensuring safety and comfort.
2. The Company provides protection to all informant families from actions or retaliations by the reported or interested parties.
3. The type of protection that the Company provides to informants as well as their families are legal protection against pressure or physical attack according to the prevailing laws and regulations.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pihak-pihak yang ditugaskan Perseroan untuk mengelola pengaduan yang masuk melalui WBS meliputi:

1. Tim Kepatuhan GCG

Merupakan tim yang dibentuk oleh Perseroan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan *Code of Conduct* dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam rangka menjaga independensi dan profesionalisme, maka seluruh identitas anggota Tim Kepatuhan GCG dirahasiakan, dan setiap anggotanya diberikan perlindungan terhadap aksi pembalasan, tekanan, ancaman fisik dan/atau psikologis, administrasi, maupun penuntutan hukum

2. Tim Pencari Fakta

Merupakan tim yang dibentuk dan direkomendasikan oleh Tim Kepatuhan GCG dan berfungsi untuk mencari serta menyelidiki indikasi penyelewengan terhadap pelaksanaan kepatuhan *Code of Conduct*. Keberadaan Tim Pencari Fakta bersifat Ad Hoc.

3. Majelis Kehormatan Pegawai

Majelis Kehormatan Pegawai terdiri dari pejabat dan/atau pegawai Perseroan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang dilaporkan/diduga melanggar peraturan Perusahaan atau *Code of Conduct*.

Seluruh laporan mengenai pelaporan pelanggaran yang masuk akan diproses dan ditangani oleh Bagian Legal dan GCG yang telah diberikan kewenangan oleh Direksi untuk melakukan pengelolaan dan penanganan.

Penanganan Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan atas laporan pelanggaran yang masuk melalui WBS akan dilakukan tahap investigasi dengan prosedur sebagai berikut:

1. Semua laporan pelanggaran yang diterima akan melalui proses investigasi oleh tim yang bertugas khusus dalam menangani WBS. Investigasi ini melibatkan pencarian fakta dan bukti yang valid guna mendukung proses penanganan laporan selanjutnya.
2. Dalam melakukan proses investigasi, Perseroan menitikberatkan pada aspek independensi tim investigasi guna menjamin objektivitas, kewajaran, dan keadilan dalam menilai hasil temuan.
3. Pihak terlapor diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti dan menyampaikan pembelaan atas kasus yang terjadi.
4. Hasil penilaian dan investigasi akan disampaikan kepada Direksi, untuk selanjutnya diproses lebih lanjut yaitu penetapan sanksi apabila kasus tersebut dinyatakan benar dengan menimbang bukti-bukti yang ada.

Whistleblowing Manager

Parties assigned to manage complaints received via WBS are as follows:

1. GCG Compliance Team

It is a team formed by the Company to receive and follow up on reports of violations and/or misconduct of the Code of Conduct and directly responsible to the President Director. In order to maintain independence and professionalism, then all the identities of the GCG compliance Team are kept confidential, and all members are given protection against retaliation, pressure, physical and/or psychological threats, administration, or legal prosecution.

2. Fact Finding Team

It is a team formed and recommended by GCG compliance Team and functions to find as well as investigate indication of fraud against all implementation of Code of Conduct compliance. Fact Finding Team has an Ad Hoc nature.

3. Employee Honor Assembly

Employee Honor Assembly consists of an official and/ or Company employee given the authority to investigate employees that are reported/suspected to violate the regulations/Code of Conduct.

All reports on whistleblowing will be processed and handled by the Legal and GCG Department that has been given the authority by the Board of Directors to manage and handle it.

Complaint Handling

The mechanism for handling complaints regarding violation reports that are submitted through the WBS will be carried out in an investigation stage with the following procedures:

1. All reports of violations received will go through an investigation process by a team that is specifically tasked with handling WBS. This investigation involves finding valid facts and evidence to support the subsequent reporting process.
2. In conducting the investigation process, the Company focuses on the independence of the investigation team to ensure objectivity, fairness and justice in assessing the findings.
3. The reported party is given the opportunity to provide explanations and evidence and submit a defense of the case that occurred.
4. The results of the assessment and investigation will be submitted to the Board of Directors, for further processing, namely the determination of sanctions if the case is declared true by considering the existing evidence.

Sosialisasi WBS

Untuk memastikan bahwa setiap insan Perseroan mengetahui kebijakan, mekanisme, dan prosedur WBS, Perseroan secara rutin memberikan sosialisasi WBS kepada seluruh karyawan baik dengan mengoptimalkan media komunikasi internal maupun memanfaatkan rapat manajemen dan karyawan sebagai sarana sosialisasi.

Pada tahun 2020, Perseroan melakukan sosialisasi WBS pada saat site visit di Pabrik Produk Beton Boyolali kepada seluruh pegawai Pabrik Produk Beton Boyolali dan Wilayah Penjualan IV pada tanggal 31 Januari 2020 serta sosialisasi dalam forum *Sales Engineer* Perseroan melalui daring pada tanggal 14 Oktober 2020.

Sanksi atas Pelanggaran

Sanksi yang diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran telah termaktub di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 064/PHIJSK-PK/PKB/IV/2018 tanggal 6 April 2018, di antaranya pemberian teguran, peringatan tertulis, penurunan kelas jabatan, dan pemecatan. Sementara, sanksi yang diberikan kepada pemangku kepentingan selain karyawan Perseroan adalah pemutusan kontrak kerja sama.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran & Tindak Lanjut Pengaduan Selama Tahun 2020

Selama tahun 2020, Perseroan menerima/tidak menerima adanya laporan pengaduan atas pelanggaran atau indikasi pelanggaran yang masuk melalui WBS.

Evaluasi Efektivitas dan Perbaikan WBS

Penerapan WBS didukung dengan upaya evaluasi penilaian efektivitas serta penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan dengan pemutakhiran Pedoman WBS sesuai dengan kebutuhan Perseroan, tindak lanjut saran dan rekomendasi yang diterima, serta sosialisasi WBS yang dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan pelanggaran yang responsif dan akurat serta meminimalkan potensi risiko reputasi bagi Perseroan.

KEPATUHAN TERHADAP PAJAK

Perseroan senantiasa memenuhi seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan bagi Badan Usaha/Perusahaan. Hal ini merupakan komitmen kepatuhan dan kewajiban Perseroan selaku wajib pajak dalam berkontribusi terhadap pembangunan negara.

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Dalam mendukung independensi seluruh pejabat dan pegawai WIKALAH BETON, Perseroan tidak memperkenankan terlibat dalam kegiatan politik yang dapat memengaruhi integritasnya dalam

WBS Dissemination

To ensure that everyone in the Company is aware of WBS policies, mechanisms and procedures, the Company regularly provides WBS dissemination to all employees, both by optimizing internal communication media and utilizing management and employee meetings as a means of dissemination.

In 2020, the Company conducted WBS dissemination during the site visit at the Boyolali Concrete Product Plant to all employees of the Boyolali Concrete Product Plant and Sales Area IV on January 31, 2020 as well as dissemination in the Company's Sales Engineer forum online on October 14 2020.

Sanctions for Violations

The sanction is given to the parties who have been proven to do some pity violations, which have been embodied in the Collective Labor Agreement ratifying by the Decision of the Directorate General of Industrial Relations Development and Social Security No. Kep.064/PHIJSK-PK/PKB/IV/2018 dated April 6, 2018, which by giving first warning, written warning, demotion, and termination. Meanwhile, the sanction given to Stakeholders other than the Company's employees is the termination of work agreement.

Total Complaints & the Follow-up in 2020

There were no complaints on violations or violations indication throughout 2020.

Evaluation on Effectiveness and WBS Improvement

The implementation of the WBS is supported by efforts to evaluate the effectiveness assessment and improve the system on an ongoing basis. This effort is realized by updating the WBS Guidelines according to the needs of the Company, following up on suggestions and recommendations received, and conducting regular WBS dissemination. This is aimed at improving a responsive and accurate whistleblowing system and minimizing potential reputational risks for the Company.

TAX COMPLIANCE

The Company always complies with all laws and regulations governing the obligation to pay and report income tax for Business Entities/Companies. This is a commitment to the compliance and obligations of the Company as a taxpayer in contributing to the development of the country.

INFORMATION ON PROVISION OF FUNDS FOR POLITICAL ACTIVITIES

In supporting the independence of all WIKALAH BETON officials and employees, the Company does not allow involvement in

menjalankan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki. Selain itu, tidak diperkenankan untuk menggunakan dana dan/atau aset Perseroan untuk mendukung kegiatan politik dalam bentuk apa pun yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dan mengganggu integritas Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini telah diatur dalam *Code of Conduct*, *Code of Corporate Governance*, serta Kebijakan Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi.

BUYBACK SAHAM DAN BUYBACK OBLIGASI

Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat melakukan *buyback* saham dan/atau *buyback* obligasi dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam hal ini adalah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek selama 3 (tiga) hari berturut-turut secara kumulatif turun 15% (lima belas persen) atau lebih atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal terjadi Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal disetor dan melaporkan keterbukaan informasi pembelian kembali saham tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Selama tahun 2020, Perseroan tidak melakukan *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

Sepanjang tahun 2020, tidak ditemukan adanya kegiatan atau indikasi yang mengarah pada praktik *bad corporate governance* di lingkungan Perseroan yang dinilai dapat mengganggu sistem penerapan GCG dan menimbulkan risiko reputasi ataupun risiko lainnya di kemudian hari, sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

No.	Keterangan / Description	Praktik / Practice
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan. / The Company's activities which is harmful to the environment	Nihil / Nil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, perusahaan anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan. / Important cases faced by the Company & its subsidiaries, active members of Board of Directors and/or Board of Commissioners are not disclosed in the Annual Report.	Nihil / Nil
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. / Non-compliance in fulfilling tax requirements	Nihil / Nil
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK. / Inaccuracy on presenting Annual report and Financial Statements against the prevailing regulations and Financial Accounting Standards	Nihil / Nil
5	Kasus terkait buruh dan karyawan. / Issues related to Labor and Employee	Nihil / Nil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed. / There is no disclosure on Operational Segment of listed company	Nihil / Nil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i> . / Incompatibility between Annual Report <i>hardcopy</i> and Annual Report <i>Softcopy</i>	Nihil / Nil

political activities that may affect its integrity in carrying out its responsibilities and authorities. In addition, it is prohibited to use the Company's funds and/or assets to support political activities in any form that could create a potential conflict of interest and disrupt the Company's integrity to the prevailing laws and regulations. This provision has been regulated in the Code of Conduct, Code of Corporate Governance, as well as the Policy on Business Ethics, Anti-Corruption and Donation.

SHARE BUYBACK AND BOND BUYBACK

Under certain conditions, the Company may carry out share buybacks and/or bond buybacks by following the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 2/POJK.04/2013 concerning Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies in Market Conditions Fluctuates Significantly. Market Conditions Fluctuating Significantly, in this case, is the composite share price index on the Stock Exchange for 3 (three) consecutive days, cumulatively decreasing by 15% (fifteen percent) or more or other conditions determined by the Financial Services Authority.

In the event of a Significantly Fluctuating Market Condition, the Company may repurchase shares without the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) for a maximum of 20% (twenty percent) of the paid-up capital and report the disclosure of the share buyback information to the Financial Services Authority and the Stock Exchange no later than 7 (seven) days after the occurrence of market conditions that fluctuate significantly.

Throughout 2020, the Company did not carry out share buybacks or bond buybacks.

BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

Throughout 2020, there were no activities or indications that led to bad corporate governance practices in the Company's environment which were deemed to disrupt the GCG implementation system and cause reputational or other risks in the future, as detailed in the following table:





TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility



“ Perseroan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Strategis Perusahaan (*Strategic Corporate Social Responsibility*) dengan menerapkan pendekatan konsep 5P (*planet, people, profit, peace dan partnership*).

The Company implements a Strategic Corporate Social Responsibility program by applying 5P (planet, people, profit, partnership) concept approach.

KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan sepenuhnya menyadari akan kewajiban serta tanggung jawab WIKA BETON sebagai entitas sosial dalam mendukung dan menyeimbangkan kepentingannya dalam meraih *profit* dengan kepentingannya dalam mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan. Menetapkan dan menjalankan program-program terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan mendasarkan diri kepada peraturan-peraturan dan ketentuan berlaku yang menjadi acuan dan landasan Perseroan dalam menjalankan praktik-praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas;

COMMITMENT TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

In carrying out its business activities, the Company is fully aware of the obligations and responsibilities of WIKA BETON as a social entity in supporting and balancing its interests in gaining profit with its interests in supporting a more sustainable future. To determine and carry out programs related to Corporate Social Responsibility, the Company refers to the applicable rules and regulations which serve as a reference and foundation for the Company in carrying out its Corporate Social Responsibility practices, including:

1. Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 88 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 dan revisi terbaru atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
5. Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Wijaya Karya Beton Tbk.

2. Article 88 of Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises;
3. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
4. Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 and the latest revision of the Regulation of the Minister of SOE No: PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 concerning the Partnership Program for State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program.
5. Articles of Association of PT Wijaya Karya Beton Tbk.
6. Work Plan and Company Budget (RKAP) of PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Oleh karena itu, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Perseroan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, seperti tingkat keuntungan atau dividen, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Therefore, Corporate Social Responsibility is closely related to sustainable development. In carrying out its activities, the Company must base its decisions not solely on the impact in economic aspects, such as the level of profit or dividends, but must also consider the social and environmental impacts arising from these decisions, both in the short and long term.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingan. Sejak berdirinya Perseroan pada tahun 1987, Perseroan senantiasa melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan seiring dengan berjalannya operasional perusahaan.

Corporate Social Responsibility is the Company's contribution to the goal of sustainable development by means of impact management (minimizing negative impacts and maximizing positive impacts) on all stakeholders. Since the establishment of the Company in 1987, the Company has always implemented Corporate Social Responsibility in line with the company's operations.

Pada awal tahun 2020, Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur dalam tata pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai berikut:

At the beginning of 2020, the Board of Directors has established policies and procedures in the implementation of Corporate Social Responsibility as follows:



Gambar A. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Figure A. Corporate Social Responsibility Policy



Gambar A. Prosedur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Figure A. Corporate Social Responsibility Procedure



Perseroan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Strategis Perusahaan (*Strategic Corporate Social Responsibility*) dengan menerapkan pendekatan konsep 5P (*planet, people, profit, peace dan partnership*). Pemenuhan tanggung jawab Perusahaan tidak sekedar sebagai bentuk kepatuhan semata, tetapi juga komitmen yang dijalani dalam mencapai tujuan-tujuan keberlanjutan, antara lain:

1. Membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis kepada Perusahaan;
2. *Social License to Operate* (izin sosial untuk beroperasi) sebagai hasil atas perolehan dukungan dan kepercayaan masyarakat;
3. Menumbuhkan rasa bangga dan nilai positif karyawan terhadap Perusahaan;
4. Terbangunnya dialog yang baik dengan para pemangku kepentingan lainnya; dan
5. Menekan risiko bisnis perusahaan.

DASAR HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan WILAJA BETON dilandasi dengan komitmen serta kepatuhannya pada regulasi yang berlaku demi mengoptimalkan manfaat yang dapat diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Peraturan dan regulasi tersebut antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
10. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
11. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Permenaker No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
14. Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;

The Company implements a Strategic Corporate Social Responsibility program by applying 5P (planet, people, profit, partnership) concept approach. The fulfillment of the Company's responsibilities is not merely a form of compliance, but also a commitment to achieve sustainability goals, including:

1. Building the Company's image and reputation, which in turn increases the trust of both consumers and business partners to the Company;
2. Social License to Operate as a result from gaining the public's support and trust;
3. Building the employees' pride and positive values to the Company;
4. Building good dialogue with other stakeholders; and
5. Reducing company business risks.

LEGAL BASIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The implementation of corporate social responsibility carried out by WILAJA BETON is based on the commitment and compliance with applicable regulations in order to optimize the benefits that can be provided to all stakeholders. These rules and regulations include:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law No. 1 of 1970 on Work Safety;
3. Law No. 23 of 1992 on Health;
4. Law No. 13 of 2003 on Employment;
5. Law No. 25 of 2007 on Capital Investment;
6. Law No. 32 of 2009 on Environment Protection and Management;
7. Law No. 24 of 2011 on Social Security Organizing Agency;
8. Law No. 18 of 2008 on Waste Management;
9. Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health management system;
10. Government Regulation No. 42 of 2012 on Social Responsibility and Limited Liability Company's Environment;
11. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
12. Government Regulation No. 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste;
13. Permenaker No. 4 of 1987 on the Committee for Supervisory Safety and Health at Work;
14. Permenaker No. 5 of 2018 on Occupational Safety and Health in the Work Environment;

- 15. Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik;
- 16. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 17. Management System ISO 9001:2015;
- 18. Management System ISO 14001:2015;
- 19. Management System OHSAS 18001:2007.

- 15. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 1827.K/30/MEM/2018 on Guidelines for the Implementation of Good Mining Engineering Principles;
- 16. Decree of the Director General of Mineral and Coal No. 185.K/37.04/DJB/2019 on Technical Guidelines for Mining Safety Implementation and Implementation, Assessment and Reporting of Mineral and Coal Mining Safety Management Systems;
- 17. Management System ISO 9001:2015;
- 18. Management System ISO 14001:2015;
- 19. Management System OHSAS 18001:2007.

Sementara itu dalam hal pengungkapan uraian dan pelaporan kegiatan CSR, khususnya dalam Laporan Tahunan, Perseroan berpedoman pada ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* dan *Sustainability Development Goals* (SDGs) sebagai landasan.

Meanwhile, in terms of disclosing the description and reporting of CSR activities, particularly in the Annual Report, the Company adheres to ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* and *Sustainability Development Goals* (SDGs) as the basis.

KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

Komitmen Perseroan dalam menerapkan *best practice framework* CSR diwujudkan melalui implementasi prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial lingkungan berdasarkan ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* sebagai standar yang berlaku internasional di bidang industrial dan komersial dunia. ISO 26000 membidik 7 (tujuh) aspek utama secara holistik dalam pemenuhan tanggung jawab sosial lingkungan sebagai berikut:

POLICIES AND SCOPES

The Company's commitment to implement CSR best practice framework is realized through the implementation of the basic principles of environmental social responsibility based on ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* as an international standard in the industrial and commercial sectors of the world. ISO 26000 aims at 7 (seven) main aspects holistically in fulfilling environmental social responsibility as follows:

Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Berdasarkan ISO 26000

The Scope of Social Responsibility in the Company's Environment Based on ISO 26000



Tata Kelola Organisasi / Organization Governance	Sistem pengambilan dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya. / The system for making and implementing company decisions in order to achieve its goals.
Hak Asasi Manusia / Human Rights	Hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia, yang antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. / Basic rights that are entitled to all as human beings, which include, among other things, civil, political, economic, social and cultural rights.
Operasi yang Adil / Fair Operations	Perilaku etis organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain. / The organization's ethical behavior when dealing with other organizations and individuals.
Lingkungan Hidup / Environment	Dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan. / Impact of company decisions and activities on the environment.
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Employment and Occupational Health and Safety (K3)	Segala kebijakan dan praktik terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam atau atas nama perusahaan. / All policies and practices related to work performed within or on behalf of the company.
Hak Konsumen/Pelanggan / Consumers/Customers Rights	Tanggung jawab perusahaan penyedia barang/jasa terhadap konsumen dan pelanggannya. / The responsibility of the goods/service provider company to the consumers and customers.
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan / Social and Community Development	Hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. / Organizational relations with the community in the vicinity of its operations.

Dalam membidik ketujuh isu-isu tersebut, pelaksanaan kegiatan CSR turut didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan menurut ISO 26000, yang meliputi:

1. Kepatuhan kepada hukum
Perusahaan harus menerima bahwa penghormatan terhadap aturan hukum adalah wajib.
2. Menghormati norma-norma perilaku internasional
Perusahaan harus menghormati norma-norma perilaku internasional, sementara berpegang pada prinsip penghormatan terhadap aturan hukum
3. Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya
Perusahaan harus menghormati, mempertimbangkan, dan menanggapi kepentingan pemangku kepentingan.
4. Akuntabilitas
Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Transparansi
Perusahaan harus transparan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan.
6. Perilaku yang beretika
Perusahaan harus bersikap etis setiap saat.
7. Melakukan tindakan pencegahan
Perusahaan mengambil langkah
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia
Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dan mengakui pentingnya dan berlakunya universalitas.

Peran dan kontribusi WIKA BETON sebagai entitas global terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai pedoman ISO 26000 dan *Sustainable Development Goals* (SGDs) bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar, membangun hubungan yang harmonis dan sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan, dan mewujudkan kelangsungan usaha jangka panjang.

Perseroan mengadopsi pendekatan konsep 5P dalam memetakan tujuan kegiatan CSR, yaitu *planet, people, prosperity, peace, dan partnership*). Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan WIKA BETON diklasifikasikan sebagai berikut:

In targeting these seven issues, the implementation of CSR activities is also based on the basic principles and information that supports decision making according to ISO 26000, which includes:

1. Compliance to law
The Company must accept that adherence to law is compulsory.
2. Respect for norms of international behaviors
The Company must respect international norms of behavior, while adhering to the principle of respect for the rule of law
3. Respect to the stakeholders and their interests
The Company must respect, consider, and respond to the interests of stakeholders.
4. Accountability
The Company must be responsible for the impact on society and the environment.
5. Transparency
The Company must be transparent in making decisions and activities that have an impact on society and the environment.
6. Ethical Behavior
The Company must be ethical at all times.
7. Conduct prevention action
The Company takes actions.
8. Respect the basics of human rights
The Company must respect human rights and recognize the importance and applicability of its universality.

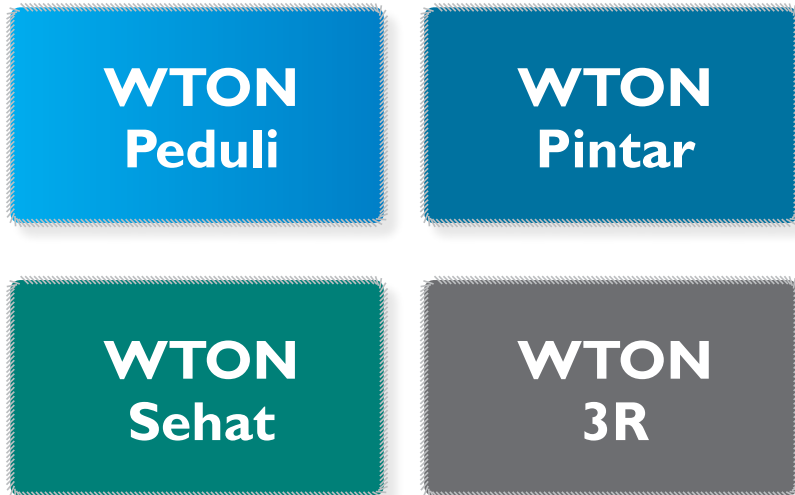
The role and contribution of WIKA BETON as a global entity to sustainable development in the economic, social and environmental fields according to ISO 26000 guidelines and Sustainable Development Goals (SGDs) are aimed to improve the quality of life and the surrounding environment, build harmonious and synergistic relationships with all stakeholders, and realize long-term business continuity.

The Company adopts 5P concept approach in mapping the goals of CSR activities, namely *planet, people, prosperity, peace, and partnership*. Based on this, the implementation of the WIKA BETON Corporate Social Responsibility program is classified as follows:

Filantropi / Philanthropy	Program tanggung jawab sosial strategis perusahaan sebagai perwujudan dari kepedulian kepada sesama manusia yang berwujud sumbangan dalam bentuk uang, beasiswa, santunan, pemberian produk, layanan gratis, dan aktivitas lain terkait kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan bagi pemangku kepentingan yang membutuhkan atau untuk tujuan-tujuan sosial lainnya. / The corporate's strategic social responsibility program as an embodiment of caring for fellow human beings in the form of donations in the form of money, scholarships, compensation, giving products, free services, and other activities related to social activities that are the company's priority concern for stakeholders who need or for purposes other social goals.
Community Involvement & Development (CID)	Program tanggung jawab sosial strategis perusahaan yang diarahkan untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat berbasis sumber daya setempat (lokal) untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik, mandiri dan berkelanjutan dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. / The corporate's strategic social responsibility program is directed to involve and empower local based community resources to achieve better, more independent and sustainable social, economic and cultural conditions with better quality of life and welfare.
Non-Community Involvement & Development (Non-CID)	Program tanggung jawab sosial strategis perusahaan yang mengacu pada panduan subjek inti (<i>core subject</i>) ISO 26000 di luar subjek inti (<i>core subject</i>) <i>Community Involvement and Development (CID)</i> yaitu subjek inti (<i>core subject</i>) hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan hidup, operasi yang adil, isu konsumen, dan tata kelola organisasi. / The corporate's strategic social responsibility program that refers to the ISO 26000 core subject outside the <i>Community Involvement and Development (CID)</i> core subject, which is the core subject of human rights, labor practices, the environment, fair operating practices, consumer issues, and organizational governance.

Klasifikasi tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 (empat) pilar aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang meliputi:

The classification is then transformed into 4 (four) activity pillars of Corporate Social Responsibility, which include:



1. WTON Peduli

Merupakan program yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bantuan sosial dan pelibatan dan pengembangan kepada *stakeholders*, baik yang dilaksanakan secara swadaya maupun bersinergi dengan program pemerintah melalui program WTON Peduli.

Fokus utama: CID/Comdev, Bencana alam, Sumbangan, dan Charity

2. WTON Pintar

Merupakan program yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan *stakeholders* internal dan eksternal, baik secara swadaya maupun sinergi kemitraan dengan pemerintah melalui program WTON Cerdas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan.

Fokus utama: peningkatan kualitas SDM Unggul, Diklat, WTON Mengajar, Beasiswa, Goes to Campus, dan lain-lain.

1. WTON Cares

It is a program aimed for the basic needs fulfillment of social assistance, involving and developing stakeholders, both independently and synergy with our government programs through WTON Care program.

Main focus: CID / Comdev, Natural disasters, Donations and Charity.

2. WTON Smart

It is a program aimed for the basic educational needs fulfillment of internal and external stakeholders, both independently and in synergy with the government through WTON Cerdas program. This program aims to improve the quality of education and skills.

Main focus: improving the quality of Excellent HR, Training, WTON Teaching, Internships, Goes to Campus, etc.

3. WTON Sehat

Merupakan program yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar *stakeholders* pada aspek kesehatan yang dilakukan secara swadaya maupun dengan melibatkan pemerintah melalui program WTON Sehat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar.

Fokus utama: Penerapan protokol kesehatan Covid-19, penanaman pohon, peningkatan kompetensi kader kesehatan, *medical check up*, donor darah, posyandu, sanitasi lingkungan dan air bersih.

4. WTON 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle)

Merupakan program yang ditujukan untuk pemanfaatan sisa limbah & sampah, daur ulang sisa hasil produksi, serta mengurangi penggunaan material tidak ramah lingkungan.

Fokus utama: penerapan ekonomi melingkar (*circular economy*) guna memastikan pemanfaatan yang optimal & efisien semua material yang ada di dalam industri, guna mendukung keberlanjutan program pelestarian lingkungan secara global dan memberikan dampak positif bagi industri dan ekonomi.

Dalam memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainable Report*) yang memuat uraian lengkap mengenai program/kegiatan CSR Perseroan dan program-program keberlanjutan lainnya yang penyajiannya mengacu pada standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Laporan Keberlanjutan menjadi bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pengelola Kegiatan CSR

Pengelolaan kegiatan tanggung jawab Perusahaan melibatkan beberapa divisi dan unit kerja sesuai dengan aspek CSR yang dilaksanakan. Secara sederhana, struktur pengelola CSR Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Subjek Inti / Core Subject (ISO 26000)	Penanggung Jawab di Lingkup WILKA BETON / Person in Charge in WILKA BETON's Scope
Tata Kelola Perusahaan / Corporate Governance	Sekretariat Perusahaan (Bagian Legal dan GCG) / Corporate Secretary (Legal and GCG Section)
Hak Asasi Manusia / Human Rights	Biro <i>Human Capital</i> / Human Capital Bureau
Operasi yang Adil / Fair Operations	Biro Pengendalian / Control Bureau
Praktik Ketenagakerjaan dan K3 / Employment and K3 Practice	Biro <i>Human Capital</i> dan Biro QSHE & Sistem Manajemen / Human Capital Bureau and QSHE and Management System Bureau
Lingkungan Hidup / Environment	Biro QSHE & Sistem Manajemen / QSHE and Management System Bureau
Isu Konsumen / Consumers Issue	Biro Penjualan, Biro <i>Engineering</i> , Sekretaris Perusahaan (Bagian Umum dan CSR) / Sales Bureau, Engineering Bureau, Corporate Secretary (General and CSR Section)
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan / Social and Community Development	Sekretariat Perusahaan (Bagian Umum & CSR) / Corporate Secretary (General & CSR Section)

3. WTON Healthy

Merupakan program yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar *stakeholders* pada aspek kesehatan yang dilakukan secara swadaya maupun dengan melibatkan pemerintah melalui program WTON Sehat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar.

Main focus: Planting trees, improving the competence of health cadres, medical checkup, blood donors, pre- and post-natal healthcare center (*posyandu*), environmental sanitation, and clean water.

4. WTON 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle)

It is a program aimed for utilizing waste and rubbish residues, recycling the residual production results, and reducing the use of environmentally unfriendly materials.

Main focus: the application of a circular economy to ensure an optimal & efficient utilization of all materials in the industry, in order to support global sustainability of environmental preservation programs & have a positive impact on industry and the economy.

In fulfilling its obligations in accordance with applicable regulations, the Company also publishes a Sustainable Report, which contains a complete description of the Company's CSR programs/activities and other sustainability programs whose presentation refers to the *Global Reporting Initiative* (GRI) standard. Sustainable Report is an integral part of this Annual Report.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT

CSR Activity Manager

The management of corporate responsibility activities involves several divisions and work units in accordance with the implemented CSR aspects. In simple terms, the structure of the Company's CSR management can be seen in the table below:

Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.01.01/WB-0A.011/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Struktur Organisasi PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2020, Sekretaris Perusahaan khususnya Bagian Umum dan CSR menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasi, dan melaksanakan kegiatan terkait fungsi kesekretariatan, rumah tangga, tata perkantoran dan pelaksanaan CSR di Perseroan.

Based on Decree No. SK.01.01/WB-0A.011/2020 dated August 12, 2020 concerning the Organizational Structure of PT Wijaya Karya Beton Tbk in 2020, the Corporate Secretary, especially the General and CSR Section, carries out duties and responsibilities in planning, coordinating, and carrying out activities related to secretarial functions, household, office administration and CSR implementation in the Company.

ROADMAP KEBERLANJUTAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pemenuhan kepatuhan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di WIKABETON mengacu pada panduan yang telah disusun yaitu *Roadmap Keberlanjutan CSR*, di mana *roadmap* ini berperan sebagai ketetapan arah pengembangan program dan inisiatif CSR dari tahun ke tahun. *Roadmap Keberlanjutan* telah mengintegrasikan pedoman ISO 26000 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

SUSTAINABILITY ROADMAP OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The fulfillment of compliance and implementation of Corporate Social Responsibility at WIKABETON refers to the prepared guidelines, namely *CSR Sustainability Roadmap*, which serves as a set of directions for the development of CSR programs and initiatives from year to year. The Sustainability Roadmap has integrated ISO 26000 guidelines and Sustainable Development Goals (SDGs).

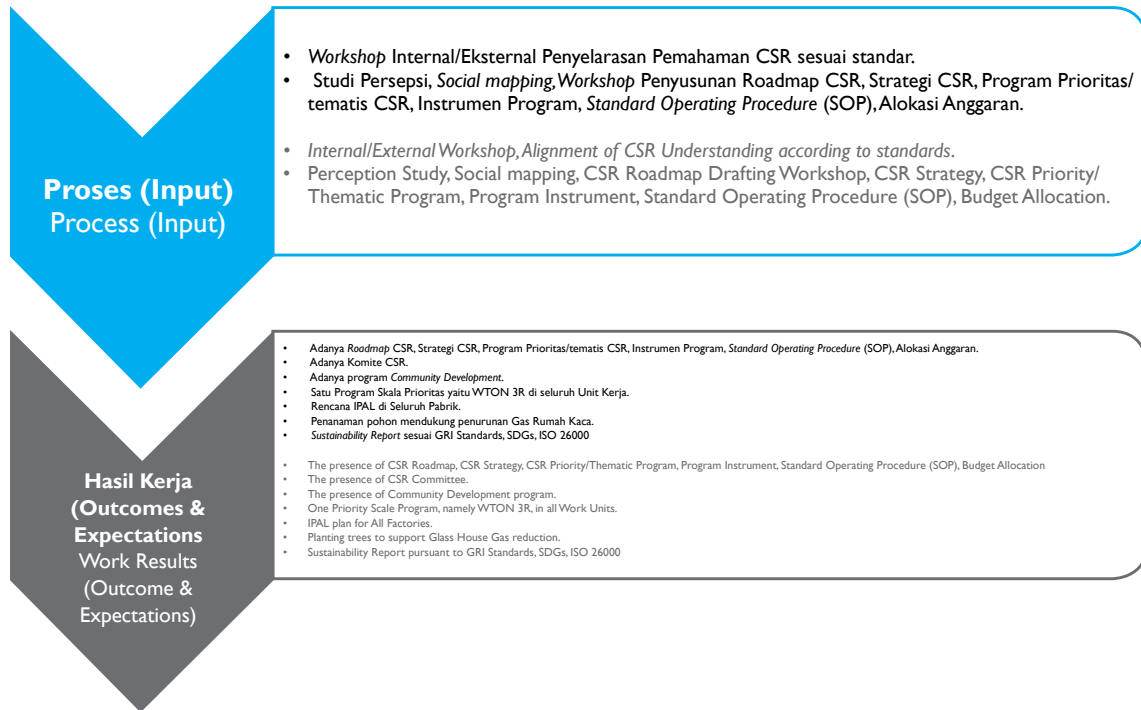


Berdasarkan pemetaan indikator SDGs dan ISO 26000, maka dirumuskan *Action Plan Roadmap Sustainability WTON 2020-2022*, di mana pada tahun 2020 Perseroan berada pada fase Peletakan Dasar Keberlanjutan di mana program dan inisiatif keberlanjutan Perseroan berfokus pada proses (*input*) dan hasil kerja (*outcomes and expectations*) sebagai berikut:

Based on the mapping of SDGs and ISO 26000 indicators, the WTON Sustainability Roadmap Action Plan 2020-2022 is formulated, in which in 2020 the Company is in the Sustainability Foundation Laying phase where the Company's sustainability programs and initiatives focus on the processes (*input*) and work results (*outcomes and expectations*) as follows:

Proses (Input) dan Hasil Kerja (Outcomes & Expectations) Fase Peletakan Dasar Keberlanjutan 2020

Process (Input) and Work Results (Outcomes & Expectations) of the Laying Phase of the Sustainability Foundation 2020



Metode Due Diligence Pemetaan Isu dan Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari Aktivitas Perseroan

Due Diligence Method for Mapping of Economic, Social, and Environmental Issues and Impacts of the Company's Activities

Perseroan secara berkala melakukan *due diligence* untuk memetakan topik dan isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang relevan dengan aktivitas bisnis Perseroan serta melakukan identifikasi dampak isu-isu tersebut bagi pemangku kepentingan berdasarkan tingkat materialitas setiap isu dan topik yang telah teridentifikasi. Hasil pemetaan dan penelaahan tersebut menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam menentukan langkah pengelolaan isu keberlanjutan dan melakukan perbaikan kinerja keberlanjutan ke depannya.

The Company periodically carries out due diligence to map the economic, social, and environmental topics and issues, which are relevant to the Company's business activities, and to identify the impact of these issues for stakeholders based on the materiality level of each identified issue and topic. The results of the mapping and analysis become a consideration for management in determining steps for managing sustainability issues and making improvements to future sustainability performance.

Perseroan senantiasa melibatkan pemangku kepentingan dalam mengkaji dan mengidentifikasi isu-isu keberlanjutan tersebut guna memperkaya sudut pandang dan memenuhi harapan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan Perseroan. Penetapan prioritas aspek material ditentukan melalui proses diskusi antara pihak internal yang diwakili oleh masing-masing Biro, Sekretariat Perusahaan, dan pihak eksternal diwakili oleh akademisi dan konsultan pengamat laporan keberlanjutan.

The Company always involves stakeholders in reviewing and identifying these sustainability issues in order to enrich viewpoints and meet the expectations of stakeholders in making the Company's decisions. Prioritization of material aspects is determined through a discussion process between internal parties represented by each Bureau, the Corporate Secretary, and external parties represented by academics and consultants who are observers of sustainability reports.

Hasil pengkajian topik material selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Metode dan hasil identifikasi serta pengungkapan topik material telah dimuat lebih lengkap dalam Laporan Keberlanjutan WIKA BETON 2020, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan WIKA BETON 2020.

The results of the study of material topics will then become the basis for preparing a sustainability report. The methods and results of identification and disclosure of material topics have been published in more detail in the 2020 WIKA BETON Sustainability Report, which is an integral part of the 2020 WIKA BETON Annual Report.

Pemangku Kepentingan Perseroan dan Pelibatangannya

Perseroan sepenuhnya menyadari peranan penting pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan dan kelangsungan usaha perusahaan. Oleh sebab itu, Perseroan senantiasa mengelola hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan melalui Biro-Biro WIKA BETON sehingga diharapkan WIKA BETON dapat menyediakan produk dan jasa berkualitas serta mewujudkan penyempurnaan secara berkelanjutan.

Dalam melakukan identifikasi pemangku kepentingan, Perseroan merujuk pada AA100 *Stakeholder Engagement Standard* versi tahun 2015 dengan mempertimbangkan 6 (enam) aspek, yaitu:

1. *Dependency (D)*: Ketergantungan Perseroan kepada seseorang atau sebuah organisasi, atau sebaliknya.
2. *Responsibility (R)*: Tanggung jawab legal, komersial, atau etika Perseroan terhadap seseorang atau sebuah organisasi.
3. *Tension (T)*: Seseorang atau organisasi yang membutuhkan perhatian Perseroan terkait isu ekonomi, sosial, atau lingkungan tertentu.
4. *Influence (I)*: Seseorang atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap Perseroan atau strategi/kebijakan pemangku kepentingan lain.
5. *Diverse Perspective (DP)*: Seseorang atau organisasi yang memiliki pandangan yang berbeda sehingga berpotensi memengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya.
6. *Proximity (P)*: Seseorang atau organisasi yang memiliki kedekatan geografis dan operasional dengan Perseroan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, maka pemangku kepentingan Perseroan berikut upaya pelibatan, topik keberlanjutan yang relevan, dan upaya pemenuhan kebutuhan *stakeholders* tersebut adalah sebagai berikut:

Pelanggan / Customers	<p>Metode Pelibatan dan Frekuensinya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Website dan <i>frontline information</i> dengan frekuensi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atau insidental; 2. Kunjungan langsung, dengan frekuensi minimal setahun sekali; 3. Layanan <i>call center</i>; 4. Survei kepuasan pelanggan setiap setahun sekali. 	<p>Involvement Methods and Frequency</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Website and <i>frontline information</i> with frequency as needed or incidental; 2. Direct visitation, with a frequency of once a year at minimum; 3. Call center service; 4. Customer satisfaction survey once a year.
	<p>Topik Keberlanjutan yang Relevan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi beragam produk dan jasa; 2. Informasi mengenai proses dan pengolahan produk; 3. Koordinasi kebutuhan pelanggan setiap bulan; 4. Metode pembayaran tagihan; 5. Layanan pengaduan/keluhan dan solusi; 6. Mendapatkan kepuasan layanan. 	<p>Relevant Sustainability Topics</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Information on various products and services; 2. Information regarding product processing and processing; 3. Coordination of customer needs every month; 4. Bill payment methods; 5. Complaints and solutions service; 6. Get service satisfaction.
	<p>Upaya Pemenuhan Kebutuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan meningkatkan akses informasi produk dan jasa; 2. Biro Penjualan aktif berkoordinasi dengan pelanggan; 3. Menyediakan akses pengaduan dan keluhan pelanggan; 4. Menindaklanjuti dan memberikan solusi atas pengaduan/keluhan pelanggan. 	<p>Efforts to Meet the Needs</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provide and improve access to information on products and services; 2. Sales Bureau actively coordinates with customers; 3. Provide access to customer complaints; 4. Follow up and provide solutions to customer complaints.

Company's Stakeholders and Their Involvement

The Company is fully aware of the important role of stakeholders in supporting the success and sustainability of its business. Therefore, the Company always manages a harmonious relationship with stakeholders through the WIKA BETON Bureaus so that WIKA BETON can provide quality products and services and realize continuous improvement.

In identifying stakeholders, the Company refers to the 2015 version of the AA100 *Stakeholder Engagement Standards* by considering 6 (six) aspects, namely:

1. *Dependency (D)*: The Company's dependency to an individual or an organization, and vice versa.
2. *Responsibility (R)*: The Company's legal, commercial, or ethical responsibility to an individual or an organization.
3. *Tension (T)*: An individual or an organization requires the Company's attention regarding specific economic, social, or environmental issue.
4. *Influence (I)*: An individual or organization with influence on the Company or other stakeholders' strategy/policy.
5. *Diverse Perspective (DP)*: An individual or an organization with different vision, thus having potentials to affect the situation and encourage previously-nonexisting action.
6. *Proximity (P)*: An individual or an organization with geographical and operational closeness with the Company.

Based on this mapping, the Company's stakeholders and engagement efforts, relevant sustainability topics, and efforts to meet the needs of these stakeholders are as follows:



Pemegang Saham / Shareholders	<p>Metode Pelibatan dan Frekuensinya Pelaporan kinerja setiap kuartal</p>	<p>Involvement Methods and Frequency Performance reporting every quarter</p>
	<p>Topik Keberlanjutan yang Relevan 1. Kinerja keuangan; 2. Kinerja non-keuangan; 3. Kinerja sepanjang tahun tentang tata kelola, kinerja keuangan, non-keuangan, dan lain-lain.</p>	<p>Relevant Sustainability Topics 1. Financial performance; 2. Non-financial performance; 3. Performance throughout the year on governance, financial performance, non-financial performance, and others.</p>
	<p>Upaya Pemenuhan Kebutuhan 1. Membuat laporan keuangan konsolidasian; 2. Membuat Laporan Tahunan; 3. Membuat Laporan Keberlanjutan; 4. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa.</p>	<p>Efforts to Meet the Needs 1. Prepare consolidated financial statements; 2. Making Annual Reports; 3. Making a Sustainability Report; 4. Organizing Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS).</p>
Pemerintah / Government	<p>Metode Pelibatan dan Frekuensinya Rapat dengar pendapat</p>	<p>Involvement Method and Frequency Meeting with opinions</p>
	<p>Topik Keberlanjutan yang Relevan 1. Pengurusan izin usaha dan regulasi; 2. Koordinasi terkait tata niaga, ekspor/impor.</p>	<p>Relevant Sustainability Topics 1. Arrangement of business permits and regulations; 2. Coordination related to trade, export/import systems.</p>
	<p>Upaya Pemenuhan Kebutuhan 1. Mengikuti kegiatan yang dijadwalkan pemerintah; 2. Kepatuhan pada peraturan; 3. Memberikan laporan kinerja secara berkala.</p>	<p>Efforts to Meet the Needs 1. Following activities scheduled by the government; 2. Compliance with regulations; 3. Provide regular performance reports.</p>
Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority	<p>Metode Pelibatan dan Frekuensinya 1. Pelaporan pelaksanaan; 2. Kepatuhan dan notifikasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p>	<p>Involvement Methods and Frequency 1. Reporting of implementation; 2. Compliance and notification to the Financial Services Authority (OJK)</p>
	<p>Topik Keberlanjutan yang Relevan Informasi tentang kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Relevant Sustainability Topics Information on compliance with the prevailing regulations.</p>
	<p>Upaya Pemenuhan Kebutuhan 1. Memenuhi peraturan OJK; 2. Membuat laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.</p>	<p>Efforts to Meet the Needs 1. Meeting OJK regulations; 2. Making annual reports and sustainability reports.</p>
Perbankan / Banking	<p>Metode Pelibatan dan Frekuensinya 1. Letter of Kredit (LC); 2. Perjanjian akad kredit.</p>	<p>Involvement Methods and Frequency 1. Letter of Credit (LC); 2. Credit agreement.</p>
	<p>Topik Keberlanjutan yang Relevan 1. Tata cara, syarat dan ketentuan LC, atau akad kredit; 2. Metode dan pembayaran LC atau kredit; 3. Sanksi apabila terjadi wanprestasi.</p>	<p>Relevant Sustainability Topics 1. Procedures, terms and conditions of LC, or credit agreement; 2. LC or credit payment methods and; 3. Sanctions in case of default.</p>
	<p>Upaya Pemenuhan Kebutuhan 1. Memenuhi persyaratan bank; 2. Melakukan pembayaran kredit sesuai jatuh tempo.</p>	<p>Efforts to Meet the Needs 1. Meeting bank requirements; 2. Making credit payments according to maturity.</p>
Pegawai / Employees	<p>Metode Pelibatan dan Frekuensinya Media internal, setiap dua bulan.</p>	<p>Involvement Methods and Frequency Internal media, every two months.</p>
	<p>Topik Keberlanjutan yang Relevan 1. Sosialisasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan kepegawaian; 2. Kesetaraan kesempatan kerja dan jenjang karier; 3. Pengembangan karier, pelatihan dan lain-lain; 4. Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.</p>	<p>Relevant Sustainability Topics 1. Dissemination of policies and strategies related to employment; 2. Equal employment opportunities and career paths; 3. Career development, training and others; 4. Health and safety insurance.</p>
	<p>Upaya Pemenuhan Kebutuhan 1. Memenuhi hak-hak normatif pegawai; 2. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi; 3. Melakukan penilaian kinerja pegawai; 4. Memberikan tunjangan kesehatan dan pensiun.</p>	<p>Efforts to Meet the Needs 1. Fulfill the normative rights of employees; 2. Organizing training and competency development; 3. Conducting employee performance appraisals; 4. Providing health and pension benefits.</p>
Mitra Kerja / Business Partners	<p>Metode Pelibatan dan Frekuensinya 1. Kontrak kerja, frekuensi <i>incidental</i> dalam setahun; 2. Seminar dan <i>workshop</i>, minimal sekali dalam setahun.</p>	<p>Involvement Methods and Frequency 1. Work contract, incidental frequency in a year; 2. Seminar and workshop, at least once a year.</p>
	<p>Topik Keberlanjutan yang Relevan 1. Proses pengadaan yang objektif; 2. Kerja sama saling menguntungkan, transparan dan adil; 3. Penjelasan lingkup pekerjaan; 4. Ketentuan tentang penagihan biaya pekerjaan; 5. Strategi dan pemetaan dasar.</p>	<p>Relevant Sustainability Topics 1. Objective procurement process; 2. Cooperation mutually beneficial, transparent and fair; 3. Explanation of the scope of work; 4. Provisions regarding the billing of work costs; 5. Basic mapping and strategy.</p>
	<p>Upaya Pemenuhan Kebutuhan 1. Memberikan informasi yang jelas pada saat proses tender berlangsung; 2. Melakukan kerja sama sesuai kontrak yang disepakati dengan mitra; 3. Melakukan pembayaran tepat waktu.</p>	<p>Efforts to Meet the Needs 1. Provide clear information during the tender process; 2. Cooperating according to the contract agreed upon with the partner; 3. Make payments on time.</p>

Pelaku Usaha Sejenis dan Asosiasi / Similar Business Players and Associates	Metode Pelibatan dan Frekuensinya Pertemuan dan kegiatan, baik skala nasional, regional maupun internasional.	Involvement Methods and Frequency Meeting and activities in national, regional, and international scales.
	Topik Keberlanjutan yang Relevan 1. Bagaimana meningkatkan tata kelola perusahaan, termasuk menjangkau kebaruan-kebaruan ihwal tata kelola; 2. Strategi bisnis dalam menghadapi masalah dan tantangan.	Relevant Sustainability Topics 1. How to improve corporate governance, including capturing novelties in governance; 2. Business strategy in facing problems and challenges.
	Upaya Pemenuhan Kebutuhan Melakukan diskusi bersama dalam setiap pertemuan.	Efforts to Meet the Needs Conduct discussion in every meeting.
Organisasi Kemasyarakatan/ Masyarakat Sekitar / Community Organization/ Nearby Community	Metode Pelibatan dan Frekuensinya 1. Kerja sama strategis untuk menjalankan program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan; 2. Pertemuan dengan ormas, organisasi sosial, masyarakat sekitar dan kampus.	Involvement Methods and Frequency 1. Strategic cooperation to carry out Corporate Social Responsibility programs, both in the economic, social and environmental fields; 2. Meetings with mass organizations, social organizations, local communities and campuses.
	Topik Keberlanjutan yang Relevan 1. Sosialisasi program CSR; 2. Pelaksanaan program CSR; 3. Cara mengoptimalkan pencapaian program CSR; 4. Informasi tentang kegiatan perusahaan.	Relevant Sustainability Topic 1. Socialization of the CSR program; 2. Implementation of the CSR program; 3. How to optimize the achievement of the CSR program; 4. Information about the Company's activities.
	Upaya Pemenuhan Kebutuhan 1. Melakukan kegiatan CSR yang tepat sasaran; 2. Membuat <i>roadmap</i> CSR; 3. Membuat <i>roadmap</i> keberlanjutan.	Efforts to Meet the Needs 1. Performing CSR activities that are right on target; 2. Creating a CSR roadmap; 3. Creating a sustainability roadmap.
Media / Media	Metode Pelibatan dan Frekuensinya <i>Press release</i>	Involvement Methods and Frequency Press release.
	Topik Keberlanjutan yang Relevan Kinerja keuangan	Relevant Sustainability Topics Financial performance.
	Upaya Pemenuhan Kebutuhan 1. Mengunggah berita dan laporan kinerja keuangan di <i>website</i> perusahaan; 2. Memberikan informasi kinerja keuangan pada media.	Efforts to Meet the Needs 1. Uploading news and financial performance reports on the company's website; 2. Provide information on financial performance to the media.

Isu-Isu Utama Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Perseroan telah melakukan identifikasi isu-isu penting terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan ada setiap pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dan interaksi. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis dampak atas isu-isu pada pemangku kepentingan dilakukan dengan menjalin komunikasi pada setiap pemangku kepentingan secara rutin melalui berbagai kegiatan.

Informasi isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan, alasan mengenai pentingnya topik tersebut, serta metode pelibatan dan tindak lanjut atas dampak yang diidentifikasi diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Main Economic, Social, and Environmental Issues

The Company has identified important issues related to the social, economic, and environmental impacts of each stakeholder through various stakeholder engagement and interaction activities. One of the methods used to analyze the impact of issues on stakeholders is to establish regular communication with each stakeholder through various activities.

Information on social, economic, and environmental issues, reasons for the importance of these topics, as well as methods of involvement and follow-up on the identified impacts are described in the following table:

Isu/Topik Material / Material Issue/Topic	Alasan Isu/Topik tersebut Material / Reason for Material Issue/Topic	Dampak Isu/Topik tersebut bagi WIKA BETON dan Pemangku Kepentingan / Impact of the Issue for WIKA BETON and the Stakeholders	Keterlibatan WIKA BETON dalam Pengelolaan Dampak / WIKA BETON's Involvement in Impact Management
Kinerja Ekonomi / Economic Performance	Kinerja ekonomi yang baik akan memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan dan menjamin keberlangsungan perusahaan. Good economic performance will have a positive impact on stakeholders and ensure the sustainability of the company.	Pengelolaan kinerja ekonomi yang baik berdampak positif bagi perusahaan (menjalankan kegiatan operasi) dan pemangku kepentingan (manfaat bagi pegawai, masyarakat melalui CSR, dan pendapatan pajak bagi Pemerintah). Good management of economic performance has a positive impact on the Company (running operational activities) and stakeholders (benefits for employees, society through CSR, and tax revenue for the Government).	1. Penyusunan target-target keuangan; 2. Pembuatan Laporan Keuangan; 3. Penyusunan strategi bisnis; 4. Pelaksanaan audit internal dan eksternal atas kinerja keuangan perusahaan. 1. Formulation of financial targets; 2. Preparation of Financial Statements; 3. Formulation of a business strategy; 4. Implementation of internal and external audits of the company's financial performance.

Isu/Topik Material / Material Issue/Topic	Alasan Isu/Topik Tersebut Material / Reason for Material Issue/Topic	Dampak Isu/Topik Tersebut bagi WIKABETON dan Pemangku Kepentingan / Impact of the Issue for WIKABETON and the Stakeholders	Keterlibatan WIKABETON dalam Pengelolaan Dampak / WIKABETON's Involvement in Impact Management
Rantai Pasokan / Supply Chain	<p>Manajemen rantai pasokan merupakan aspek signifikan untuk mendukung keberlanjutan usaha perusahaan.</p> <p>Supply chain management is a significant aspect to support the company's business sustainability.</p>	<p>Dalam rantai pasokan, WIKABETON mengikat kontrak dengan sejumlah pemasok, baik untuk keperluan barang maupun jasa. Seleksi ketat diterapkan pada pemasok karena praktik dan cara pengelolaan bisnis mereka akan berpengaruh terhadap citra dan reputasi WIKABETON. Manajemen rantai pasokan yang kuat akan menjamin produktivitas.</p> <p>In the supply chain, WIKABETON has formed contracts with a number of suppliers, both for goods and services. Strict selection is applied to suppliers because their business practices and management will affect WIKABETON's image and reputation. Strong supply chain management will ensure productivity.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pada rantai pasokan; Menjaga relasi dengan para pemasok; Membentuk Biro Supply Chain Management; Mengembangkan sistem khusus berbasis teknologi informasi untuk mendukung SCM. <ol style="list-style-type: none"> Monitoring and evaluating the supply chain; Maintain relationships with suppliers; Establish a Supply Chain Management Bureau; Developing a special information technology-based system to support SCM.
Quality, Safety, Health, & Environment (QSHE)	<p>Mutu produk yang baik akan menjamin kepuasan pelanggan dan penguasaan pasar. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi seluruh insan Perseroan mewujudkan operasi yang aman dan berkualitas. Pengelolaan lingkungan merupakan kewajiban mengingat kegiatan operasi Perseroan menghasilkan limbah produksi dan melakukan penambangan.</p> <p>Good product quality will ensure customer satisfaction and market domination. The implementation of Occupational Health and Safety (K3) for all Company personnel realizes safe and quality operations. Environmental management is an obligation considering that the Company's operations produce production waste and carry out mining.</p>	<p>Implementasi QSHE yang optimal akan mendorong kualitas dan produktivitas produk yang dihasilkan, yang akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, keamanan proses produksi, pencegahan pencemaran lingkungan, dan penguatan <i>brand</i> Perseroan.</p> <p>The optimal implementation of QSHE will encourage the quality and productivity of the products produced, which will have a positive impact on increasing revenue, safety in the production process, preventing environmental pollution, and strengthening the Company's brand.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung keselamatan pegawai; Melakukan prinsip dan praktik kesehatan dan keselamatan pegawai; Memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait K3 pada seluruh pegawai; Menerapkan Sistem Manajemen K3L sesuai peraturan yang berlaku; Melakukan sertifikasi jaminan mutu ISO 9001:2015; Melakukan sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015; Melakukan sertifikasi Sistem Manajemen K3 di tempat kerja, OHSAS 18001:2007; Menyediakan fasilitas kesehatan dan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai secara berkala. <ol style="list-style-type: none"> Provide tools and equipment to support employee safety; Carry out the principles and practices of employee health and safety; Provide training and socialization related to K3 to all employees; Implement the K3L Management System in accordance with the applicable regulations; Conduct ISO 9001:2015 quality assurance certification; Conduct ISO 14001:2015 environmental management system certification; Conduct K3 Management System certification in the workplace, OHSAS 18001:2007; Provide health facilities and health checks for employees on a regular basis.
Material / Material	<p>Material produk yang digunakan akan berpengaruh terhadap kualitas produk.</p> <p>The product materials used will affect the quality of the product.</p>	<p>Pemilihan dan penggunaan material yang baik dan memenuhi standar dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik. Perseroan memberikan kepuasan kualitas produk kepada pemangku kepentingan (pembeli dan Pemerintah).</p> <p>Selection and use of good materials that meet standards can produce good quality products. The Company provides product quality satisfaction to stakeholders (buyers and the Government).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan riset dan inovasi untuk penggunaan bahan pendukung; Berelasi dengan mitra pemasok bahan baku dan bahan pendukung yang kualitasnya telah memenuhi standar yang ditetapkan; Merencanakan penambahan penguasaan sumber material alam. <ol style="list-style-type: none"> Conduct research and innovation for the use of supporting materials; Relate with partners who supply raw materials and supporting materials whose quality has met the established standards; Plan for additional control over natural material resources.
Pengelolaan Limbah dan Efluen / Wastes and Effluent Management	<p>Limbah dan efluen yang dihasilkan Pabrik Produk Beton (PPB) tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Perseroan selalu menerapkan pengelolaan limbah dan efluen sesuai peraturan dan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>Wastes and effluents produced by the Concrete Product Factory (PPB) does not contain Hazardous and Toxic Materials (B3) and the Company always implements waste and effluent management according to regulations and reports it to interested parties.</p>	<p>Pengelolaan limbah dan efluen yang dilakukan di PPB sudah berjalan dengan baik. Keberhasilan WIKABETON dalam mengelola limbah dan efluen berdampak positif bagi reputasi perusahaan, kepercayaan investor, dan pemeliharaan lingkungan. Di sisi lain, limbah padat berupa endapan lumpur dan semen bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pengerasan infrastruktur jalan.</p> <p>Waste and effluent management carried out in PPB is already running well. The success of WIKABETON in managing waste and effluent has a positive impact on the company's reputation, investor confidence, and environmental care. On the other hand, solid waste in the form of silt and cement can be used by local communities to harden road infrastructure.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya sistem pengelolaan air limbah di setiap pabrik yang terstandar; Memenuhi kinerja pengelolaan limbah dan efluen sesuai peraturan baku mutu limbah bagi kegiatan industri; Menempatkan personil untuk memantau IPAL beserta meteran (<i>flow meter</i>). <ol style="list-style-type: none"> The availability of a standardized wastewater management system in each factory; Meet the performance of waste and effluent management in accordance with the waste quality standard regulations for industrial activities; Place personnels to monitor the WWTP along with the flow meter.

Isu/Topik Material / Material Issue/Topic	Alasan Isu/Topik Tersebut Material / Reason for Material Issue/Topic	Dampak Isu/Topik Tersebut bagi WIKABETON dan Pemangku Kepentingan / Impact of the Issue for WIKABETON and the Stakeholders	Keterlibatan WIKABETON dalam Pengelolaan Dampak / WIKABETON's Involvement in Impact Management
Pengembangan Kompetensi Pegawai / Employee Competency Development	<p>Pegawai merupakan salah satu modal yang signifikan bagi Perseroan. WIKABETON terus berupaya untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi pegawai guna menunjang tuntutan pekerjaan yang dihadapi, jenjang karier pegawai, dan meningkatkan daya saing perusahaan.</p> <p>Employees are one of the significant capitals of the Company. WIKABETON continues to improve the employees' skills and competencies in order to support the job demands faced, employee career paths, and improve company competitiveness.</p>	<p>Pegawai yang kompeten diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan berdaya guna bagi Perseroan. Pengembangan kompetensi secara menyeluruh bermanfaat bagi pegawai dan perusahaan guna mendukung kelangsungan usaha, yang pada akhirnya berujung pada laba perusahaan sehingga memberikan manfaat pada pemangku kepentingan.</p> <p>Competent employees are expected to increase competitiveness and be useful for the Company. Competency development as a whole is beneficial for employees and the company in order to support business continuity, which in turn leads to company profits so as to benefit the stakeholders.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>design training</i>; 2. Melakukan <i>Training Need Analysis (TNA)</i>; 3. Melaksanakan asesmen kompetensi pegawai serta <i>feedforward</i> dan penilaian prestasi kerja. <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation of training design; 2. Conducting Training Need Analysis (TNA); 3. Carrying out employee competency assessments as well as feed forward and work performance assessments.

Strategi dan Program Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penerapan strategi dan program kerja tanggung jawab sosial perusahaan diklasifikasikan berdasarkan ketiga aspek keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan serta membidik fokus area secara spesifik sebagai berikut:

Strategy and Work Program of Corporate Social Responsibility

The implementation of corporate social responsibility strategy and work program is classified based on the three aspects of sustainability, namely economic, social and environmental aspects and targets specific focus areas as follows:

Kategori / Category	Fokus Area / Area Focus	Strategi dan Program Kerja / Strategy and Work Program
Ekonomi / Economy	Kinerja Bisnis dan Operasional / Business and Operational Performance	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan restrukturisasi dan pengembangan struktur organisasi Perusahaan dengan mengubah Biro Operasi menjadi Divisi Operasi dan Biro Pengelolaan Material menjadi Divisi Pengelolaan Material dan memberlakukan masing-masing Divisi menjadi <i>profit center</i>; • Memperkuat rantai pasokan dengan melakukan perubahan pada Biro Pengadaan menjadi Biro <i>Supply Chain Management (SCM)</i>. • Penguatan sinergi dengan WIKABETON Group dan BUMN lainnya untuk melakukan penetrasi pasar ke Asia Tenggara. <ul style="list-style-type: none"> • Restructuring and developing the Company's organizational structure by converting the Operations Bureau into the Operations Division and the Material Management Bureau into the Material Management Division and turning each Division into a profit center; • Strengthening the supply chain by making changes to the Procurement Bureau into the Supply Chain Management (SCM) Bureau. • Strengthening synergies with WIKABETON Group and other SOEs to penetrating to the Southeast Asia Market.
	Dampak Ekonomi Tidak Langsung / Indirect Economic Impacts	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan investasi infrastruktur kepada masyarakat di sekitar wilayah produksi dan penjualan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. • Providing infrastructure investment assistance to communities around the production and sales areas to increase community economic independence.
	Tata Kelola Keberlanjutan / Sustainability Governance	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyusunan rencana dan peta jalan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk periode 2020-2022; • Melakukan sosialisasi program anti korupsi dan gratifikasi. • Making plans and road maps for Corporate Social Responsibility programs for the period 2020-2022; • Promote anti-corruption and gratification programs.
Sosial / Social	Keselamatan dan Kesehatan Kerja / Occupational Health and Safety	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan QSHE Patrol secara rutin; • Penerapan prosedur K3L konstruksi; • Sosialisasi <i>Safety Culture</i>. • Conduct QHSE Patrol regularly; • Application of QSHE construction procedures; • Safety Culture Socialization
	Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM / Employment and HC Development	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengembangan pada sistem penilaian pegawai Perseroan; • Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi SDM Perseroan. • Developing the Company employee evaluation system; • Providing training and development to employees to improve the competency of the Company's HC.
	Bantuan Masyarakat / Community Assistance	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan berupa bantuan pendidikan kepada masyarakat melalui program WIKABETON Mengajar; • Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar wilayah operasi usaha berupa sumbangan dan bantuan pembangunan sarana peribadahan, sarana dan prasarana umum lainnya; • Memberikan bantuan sosial kepada wilayah terdampak bencana. • Conducting activities in the form of educational assistance to the community through the WIKABETON Teaching program; • Providing social assistance to the community around the area of business operations in the form of donations and assistance in the construction of worship facilities, other public facilities and infrastructure; • Providing social assistance to disaster areas.

Kategori / Category	Fokus Area / Area Focus	Strategi dan Program Kerja / Strategy and Work Program
Lingkungan / Environment	Pengelolaan Bisnis Ramah Lingkungan / Green Business Management	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan investasi pada sarana pengelolaan air limbah produksi; Pemanfaatan material sisa (waste) sebagai barang bernilai ekonomis; Menekan produksi emisi melalui program penghematan energi dan penanaman pohon. <ul style="list-style-type: none"> Investment in production wastewater management facilities; Utilization of waste material as economic value commodity; Reducing emissions production through energy saving and tree planting programs.

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Melebihi Kewajiban

Perseroan berupaya menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip dan praktik yang melebihi kewajiban, antara lain dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan sebagai berikut:

Kegiatan / Activity	Prinsip dan Kebijakan yang Diadopsi / Adopted Principle and Policy
Tata Kelola CSR / CSR Governance	GRI Standards 2016 dan ISO 26000: <i>Guidance on Social Responsibility</i> / GRI Standards 2016 and ISO 26000
Lingkungan Hidup / Environment	ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan / ISO 14001:2015 on Environmental Management System
Ekonomi / Economy	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan / Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance

Implementation of Corporate Social Responsibility that Exceeds Obligations

The Company strives to carry out its corporate social responsibility by adopting principles and practices that exceed its obligations, among others by referring to the following rules and regulations:

Sumber dan Realisasi Anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2020

Kebijakan sumber dana dan anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berasal dari alokasi Laba Bersih dengan ketentuan paling banyak 2% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

Sources and Realization of Corporate Social Responsibility Budgets in 2020

The policy on the source of funds and the Corporate Social Responsibility budget comes from the allocation of Net Profits with the provision that a maximum of 2% of the profit after tax for the previous fiscal year.

Adapun realisasi anggaran program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan selama tahun 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan kategori programnya adalah sebagai berikut:

The realization of the Corporate Social Responsibility program budget for 2020, which was classified based on the program category, is as follows:

No.	Unit Kerja / Work Unit	Kategori / Category			
		WTON Peduli / WTON Care	WTON Pintar / WTON Smart	WTON Sehat / WTON Healthy	WTON 3R / WTON 3R
1	Kantor Pusat / Headquarters	Rp10.000.000	Rp414.558.372	Rp1.031.379.576	PPB : Memanfaatkan ban bekas untuk alas Trostel / PPB: Utilizing used tires for Trostel pedestals
2	Wilayah Penjualan / Areas of Sales	Rp316.666.070	-	Rp62.272.503	
3	Pabrik Produksi Beton / Concrete Products Factories	Rp811.840.484	Rp323.128.970	Rp344.175.726	
4	Proyek / Projects	Rp21.940.750	Rp26.587.400	Rp312.009.545	
Jumlah / Total		Rp1.160.447.304	Rp1.749.837.350	Rp764.274.742	-

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Kebijakan dan Komitmen

Perseroan berupaya mewujudkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal dengan menjunjung prinsip dasar penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai pegawai yang terdampak kegiatan Perseroan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS

Policy and Commitment

The Company strives to create harmonious and respectful relationships with all internal and external stakeholders by upholding the basic principles of respecting human rights, culture, customs, and values of employees who are affected by the Company's activities.

Latar belakang kondisi kegiatan operasi yang beragam dengan wilayah operasional tersebar di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan Perseroan memiliki beragam suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kondisi fisik. Oleh sebab itu, Perseroan berkomitmen untuk menjunjung prinsip kemanusiaan dan menciptakan iklim kerja yang kondusif dan bebas unsur diskriminasi SARA. Prinsip ini diterapkan dalam proses pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja, dan penyediaan kesempatan pengembangan karier. Perseroan turut mendukung hak pegawai dalam berserikat dan berorganisasi melalui pembentukan serikat pegawai, memberikan kebebasan beribadah, menerapkan jam kerja yang wajar dan bebas dari praktik kerja paksa, serta memenuhi hak perlindungan bagi seluruh pegawai.

Sementara itu dalam membangun hubungan dan kerja sama yang sehat dengan pemangku kepentingan eksternal, Perseroan senantiasa melindungi hak adat istiadat, budaya, dan agama, khususnya dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perseroan. Prinsip toleransi dan menghindari pertentangan menjadi landasan pemahaman dan komitmen Perseroan dalam mewujudkan harmonisasi antara Perseroan dan masyarakat lokal.

Target Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait HAM Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Perseroan senantiasa mewujudkan iklim kerja yang saling menghormati tanpa membedakan gender, khususnya dalam hal pemberian skema remunerasi dan kompensasi, penilaian dan evaluasi kinerja, pengembangan kompetensi, dan pemberian kesempatan pengembangan karier. Meski mayoritas pegawai di WIKA BETON adalah laki-laki, namun dalam proses rekrutmen dan seleksi Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Proses seleksi dan rekrutmen sepenuhnya mempertimbangkan secara adil kompetensi serta keahlian yang dimiliki calon pegawai dan kesesuaiannya dengan kualifikasi jabatan yang akan diisi.

Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah pegawai Perseroan adalah 1.444 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 1.369 orang dan pegawai perempuan berjumlah 75 orang.

Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi

Perseroan menjamin hak pegawai untuk berserikat, berorganisasi, serta menyampaikan pendapat sebagai bentuk hak asasi manusia. Untuk itu, Perseroan telah membentuk Serikat Pegawai PPWB (Perhimpunan Pegawai WIKA BETON) dengan anggota berjumlah 1.444 orang atau mencakup 100% dari jumlah pegawai WIKA BETON. Serikat pegawai ini telah tercatat di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Timur dengan bukti pencatatan No. 232/IV/P/IX/2001 tanggal 18 September 2001 melalui Surat Kepala Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Timur No. B-3046/W26-K5/04/K/IX/2001 tanggal 25 September 2001.

The background of the various operating conditions with operational areas spread across Indonesia causes the Company to have various ethnicities, races, religions, genders, and physical conditions. Therefore, the Company commits to upholding the principles of humanity and creating a conducive work climate free from the elements of racial discrimination. This principle is applied in the process of developing competencies, assessing and evaluating performance, and providing career development opportunities. The Company also supports the rights of employees to associate and organize through the formation of employee unions, providing freedom of worship, implementing reasonable working hours and free from forced labor practices, and fulfilling the rights of protection for all employees.

Meanwhile, in building healthy relationships and cooperation with external stakeholders, the Company always protects the rights of customs, culture and religion, especially with the communities around the Company's operational areas. The principles of tolerance and avoidance of conflict are the basis for the Company's understanding and commitment in realizing harmony between the Company and local communities.

Corporate Social Responsibility Targets Related To HR Corporate Social Responsibility Activities Related To Human Rights

Gender Equality and Work Opportunity

The Company always creates a work climate that is mutually respectful without differentiating gender, particularly in the provision of remuneration and compensation schemes, performance appraisal and evaluation, competency development, and career development opportunities. Although the majority of employees at WIKA BETON are men, in the recruitment and selection process the Company always upholds the principles of equality and non-discrimination. The selection and recruitment process fully considers the competence and expertise of prospective employees and their suitability with the qualifications of the position to be filled.

As of December 31, 2020, the number of the Company's employees was 1,444, with 1,369 male employees and 75 female employees.

Freedom of Association and Forming Organization

The Company guarantees the employees' rights to associate, form organization, and express their opinion as forms of human rights. As such, the Company established PPWB (WIKA BETON Employee Association) Employee Union with a total members of 1,440 members or around 100% of the total numbers of WIKA BETON employees. This employee union has been listed in East Jakarta Municipal Manpower Office with proof of record No. 232/IV/P/IX/2001 dated September 18, 2001 through Letter of the Head of the Department of Manpower, East Jakarta Municipality No. B-3046/W26-K5/04/K/IX/2001 dated September 25, 2001.

Pemenuhan Hak Pegawai untuk Dilindungi dan Memperoleh Pekerjaan yang Layak

Sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perseroan menjamin perlindungan pegawai melalui keikutsertaan pegawai dalam asuransi jiwa/BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perseroan juga memastikan pegawai disediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan fasilitas keselamatan lainnya yang dapat digunakan sewaktu-waktu, khususnya bagi pegawai di lingkungan proyek maupun PPB.

Hal lain yang diatur dalam PKB adalah pengaturan jam kerja dan jam istirahat dengan jelas, sehingga tidak ada praktik kerja paksa sebagaimana telah tertuang dalam PKB Bab VIII Pasal 33 dan PKB Bab IX Pasal 59 dan 60. WILAJA BETON turut memastikan bahwa seluruh pegawainya telah dikelola untuk menempati posisi yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan pada saat rekrutmen atau promosi, sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Perlindungan Hak Adat Istiadat, Budaya, dan Agama

Lokasi operasi Perseroan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia menjadi sebuah keuntungan sekaligus tantangan bagi Perseroan. Perbedaan wilayah ini memungkinkan adanya perbedaan budaya, suku, ras, dan agama. Kayanya nilai perbedaan di setiap wilayah Indonesia menjadi sebuah nilai tambah keberagaman akan SDM baik di dalam Perusahaan maupun di luar Perusahaan.

Untuk menjaga harmonisasi dengan masyarakat lokal, Perseroan senantiasa menjaga komunikasi dan interaksi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan. Pendekatan yang dilakukan juga selalu dilandasi dengan prinsip toleransi terhadap adat budaya tanpa harus bertentangan dengan adat dan budaya setempat.

Selain pada adat dan budaya, Perseroan juga selalu memperhatikan hak asasi dalam menganut kepercayaan. Perseroan memberikan toleransi untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing individu. Perseroan juga rutin mengadakan acara keagamaan pada setiap hari besar seluruh agama yang berlaku di Indonesia.

Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Meski tidak dapat diukur secara kuantitatif, dampak atas pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang Hak Asasi Manusia kian memupuk kepercayaan serta mendukung hubungan yang harmonis dan sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Fulfillment of the Employees' Rights for Protection and Decent Works

As stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB), the Company guarantees employee protection through employee participation in life insurance/National Health Insurance (BPJS Kesehatan) and Social Security (BPJS Ketenagakerjaan). The Company also ensures that employees are provided with Personal Protective Equipment (PPE) and other safety facilities that can be used at any time, especially for employees in the project environment and PPB.

Other matter that are regulated in the PKB is a clear arrangement of working hours and rest hours, so that there is no forced labor practice as stated in the PKB Chapter VIII Article 33 and PKB Chapter IX Articles 59 and 60. WILAJA BETON also ensures that all employees have been managed for occupy a position in accordance with the position offered at the time of recruitment or promotion, according to their competence and expertise.

Caring the Rights of Tradition, Culture, and Religion

Our operation locations are across the regions in Indonesia which is a benefit and to be also the challenges for us. The different regions may arise the diversity of culture, ethnic, race and religion. This Indonesia diversity is to be an added diversity value of our human resources, both inside or outside of the Company.

To maintain harmony relationship with people outside the Company, especially the local community around us, we always build strong communication and interaction and conduct activities that involve our stakeholders. The approach we taken is also always based on the tolerance principle of cultural customs without having to conflict with local customs and culture.

Despite customs and culture, the Company also always heeds on human rights in adhering to the beliefs. The Company provides tolerance norm to pray according to the beliefs of each individual employee. The Company also routinely holds religious events on every major religious holiday in Indonesia.

Impact of Corporate Social Responsibility Related To Human Rights

Although cannot be measured quantitatively, the impact of fulfilling corporate social responsibility in the field of human rights fosters trust and supports harmonious and synergistic relationships with all internal and external stakeholders.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Kebijakan dan Komitmen

Sebagai entitas usaha yang menjunjung asas profesionalisme, akuntabilitas, dan perilaku etis yang tinggi, Perseroan memaknai pelaksanaan operasi yang adil sebagai sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, pelaksanaan operasi yang adil membutuhkan kesadaran dalam berperilaku etis dalam berhubungan dengan perusahaan, organisasi, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga hubungan kerja yang berlandaskan kepercayaan, loyalitas, dan rasa saling menghormati dapat terciptanya secara sinergis.

Komitmen Perseroan dalam menjalankan praktik bisnis yang adil dan berlandaskan etika ditunjukkan melalui pemberlakuan kode etik yang tertuang dalam Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang mengatur hubungan Perseroan dengan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan prinsip dan praktik operasi yang adil, bersih, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan turut diwujudkan melalui pemeliharaan integritas dengan didukung oleh perangkat kebijakan yang memfasilitasi, di antaranya kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, pengelolaan keterlibatan Perseroan dan penyediaan dana bagi kepentingan politik, hingga pengelolaan perangkat kepatuhan yang dimiliki, yaitu Sistem Pelaporan Pelanggan (*Whistleblowing System*). Upaya ini telah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Nomor 16 yaitu Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola dan landasan ISO 26000 subjek inti Praktik Operasi yang Adil (*Fair Operating Practices*).

Target Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Operasi yang Adil

Upaya dan komitmen Perseroan dalam menerapkan praktik operasi yang adil, jujur, dan profesional serta mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku mengarahkan Perseroan dalam mencapai tingkat integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme yang lebih tinggi. Jalinan hubungan kerja sama antara Perseroan dan para pemangku kepentingan berbekal perilaku bisnis yang etis akan memperkuat fondasi kepercayaan yang terbangun secara sinergis. Dengan didukung oleh perangkat kebijakan yang kuat, pelaksanaan operasi yang adil dan bebas dari segala macam penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) akan mengurangi potensi risiko reputasi yang dapat merugikan perusahaan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS FAIR OPERATING PRACTICE

Policy and Commitment

As a business entity that upholds the principles of professionalism, accountability and high ethical behavior, the Company interprets fair operation as an obligation and responsibility that must be fulfilled. In this case, the implementation of fair operations requires awareness in behaving ethically in dealing with companies, organizations and other stakeholders so that working relationships based on trust, loyalty and mutual respect can be created synergistically.

The Company's commitment to running fair business practices based on ethics is demonstrated through the application of the code of conduct contained in the Code of Conduct, which regulates the Company's relations with stakeholders.

The implementation of fair, clean, and compliant operating principles and practices is also manifested through the maintenance of integrity supported by policies that facilitate, including Anti-Corruption and Gratification policies, management of conflicts of interest, management of the Company's involvement and provision of funds for interests. politics, to the management of its compliance instruments, namely the Whistleblowing System. This effort is in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) Number 16, namely Peace, Justice, Strong Institutions in the Pillars of Law and Governance and the ISO 26000 foundation as the core subject of Fair Operating Practices.

Corporate Social Responsibility's Target Related to Fair Operating Practice

The Company's efforts and commitment in implementing fair, honest and professional operating practices and complying with applicable rules and regulations directs the Company to achieve a higher level of integrity, accountability and professionalism. The cooperative relationship between the Company and stakeholders armed with ethical business behavior will strengthen the foundation of trust that is built synergistically. Supported by strong policy tools, fair operation and free from all kinds of irregularities and fraud will reduce the potential reputation risk that could harm the company.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Operasi yang Adil

Mewujudkan Iklim Usaha yang Bersih Melalui Pemberlakuan Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi

WIKABETON sebagai entitas bisnis yang bertanggungjawab menjunjung tinggi prinsip korporasi yang bersih dan mencegah segala bentuk perilaku penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) di lingkungan Perusahaan, termasuk perilaku yang berindikasi pada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan gratifikasi. Untuk itu, Perseroan menilai perlunya sebuah mekanisme dan kebijakan yang memayungi hal tersebut sesuai dengan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai Perusahaan.

Kebijakan Perseroan dalam mencegah perilaku yang berindikasi pada korupsi diterapkan pada setiap insan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pokok-Pokok Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi serta telah disepakati bersama melalui penandatanganan Pakta Integritas. Langkah ini diperkuat melalui sosialisasi anti korupsi secara berkala, yang mana pada tahun 2020 telah diselenggarakan saat *site visit* di Pabrik Produk Beton Boyolali kepada seluruh pegawai Pabrik Produk Beton Boyolali dan Wilayah Penjualan IV pada tanggal 31 Januari 2020 serta sosialisasi dalam forum Sales Engineer Perseroan melalui daring pada tanggal 14 Oktober 2020.

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Dalam mendukung pencegahan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di lingkungan perusahaan, Perseroan telah mengatur mengenai ketentuan benturan kepentingan dalam Pokok-Pokok Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi. Benturan kepentingan diartikan sebagai kondisi yang menyebabkan objektivitas organ utama Perseroan dalam pengambilan keputusan. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena organ Perseroan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun Pedoman Perilaku Perusahaan.

Untuk mencegah benturan kepentingan, Perseroan melarang organ Perusahaan untuk melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan yang bersangkutan, memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, dan mewakili Perusahaan apabila mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Praktik Pengadaan yang Transparan

Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menjadi mitra dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun, untuk menunjang kualitas mitra atau pemasok, Perseroan secara ketat telah menetapkan persyaratan tertentu kepada calon mitra sesuai dengan kualifikasi bidang usahanya masing-masing. Kebutuhan akan pengadaan barang dan

Corporate Social Responsibility Activity on Fair Operations

Realizing Clean Business Climate Through the Enforcement of Anti-Corruption and Anti-Gratification Policy

WIKABETON as a business entity that is responsible for upholding the principles of a clean corporation and preventing all forms of irregularities and fraud in the Company's environment, including behavior that indicates Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and gratification. For this reason, the Company assesses the need for a mechanism and policies that cover this in accordance with the aspects of compliance with applicable laws and regulations and Company values.

The Company's policy in preventing behavior that indicates corruption is applied to every individual in the Company, as stipulated in the Principles of Business Ethics, Anti-Corruption and Donation and has been mutually agreed upon through the signing of the Integrity Pact. This step is strengthened through periodic anti-corruption socialization, which in 2020 has been held through during the *site visit* at the Boyolali Concrete Product Factory to all employees of the Boyolali Concrete Product Factory and Sales Area IV on January 31, 2020 as well as socialization in the Company's Sales Engineer forum online on October 14, 2020.

Conflict of Interest Management

In supporting the prevention of conflict of interest within the company environment, the Company has regulated the provisions on conflicts of interest in the Principles of Business Ethics, Anti-Corruption and Donations. Conflict of interest is defined as a condition that causes the objectivity of the main instruments of the Company in making decisions. This conflict of interest can occur because the Company's organs do things that are not permitted by the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, as well as the Company's Code of Conduct.

To prevent conflicts of interest, the Company prohibits the Company's instruments from conducting transactions that have a conflict of interest and taking personal advantage from the activities of the Company concerned, holding other positions that may cause conflicts of interest, and representing the Company if they have interests that are contrary to the interests of the Company.

Transparent Procurement Practice

The Company always provides equal opportunities to all parties to become partners in the process of procuring goods and services. However, to support the quality of partners or suppliers, the Company has strictly set certain requirements for potential partners in accordance with the qualifications of their respective fields of business. The need for the procurement of goods and

jasa tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan tidak diperkenankan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Dalam memelihara rantai nilai secara seimbang dan berkesinambungan dalam kegiatan operasi Perseroan, WIKA BETON melakukan manajemen rantai pasokan (*supply chain management*) sebagai mekanisme untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penunjang lainnya dengan mempertimbangkan aspek efisiensi. Seluruh proses pengadaan di Perseroan dikelola melalui Biro SCM.

Biro SCM bertanggung jawab untuk mengidentifikasi peluang dari hulu sampai hilir, serta meningkatkan efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa guna mendukung strategi *cost leadership* yang diterapkan Perseroan.

Untuk mendukung keadilan dan transparansi pengadaan, terdapat tahapan prosedur pengadaan yang harus dilakukan, yaitu:

- Kualifikasi dan evaluasi vendor
- Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan
- Penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang
- Pengukuran kepuasan dan pembinaan vendor

Dalam penerapannya, alur pengadaan dijelaskan sebagai berikut:



Dalam praktik pengadaan, Perseroan mengutamakan pemasok lokal, sesuai dengan program Pemerintah untuk memberdayakan pemasok domestik (lokal dan nasional) dan meningkatkan persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan rantai pasokan, Perseroan mengembangkan aplikasi ERP-SCM yang memudahkan user untuk melakukan pengadaan. Sistem ERP-SCM berisikan seluruh *database* mitra kerja Perseroan sehingga memudahkan sistem dan prosedur pengadaan secara terintegrasi.

Bersamaan dengan upaya tersebut, Perseroan berupaya memperkuat relasi dengan mitra bisnis melalui penyelenggaraan *vendor gathering*. Adapun agenda dalam *vendor gathering* umumnya adalah diskusi dan pemaparan upaya dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan maupun mitra melalui SCM yang baik.

Upaya Perseroan dalam menjalankan dan memenuhi praktik pengadaan yang transparan dan adil telah sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Nomor 17 yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dalam Pilar Ekonomi dan ISO 26000 Subjek Inti Isu Konsumen (*Consumer Issues*).

services will of course be adjusted to the needs of the Company and are not allowed to use them for personal gain.

In maintaining the value chain in a balanced and sustainable manner in the Company's operations, WIKA BETON carries out supply chain management as a mechanism to ensure the availability of raw materials and other supporting materials by considering efficiency aspects. The entire procurement process in the Company is managed through the Supply Chain Management Bureau.

The Supply Chain Management Bureau is responsible for identifying opportunities from upstream to downstream, as well as increasing the efficiency of the goods and services procurement process in order to support the cost leadership strategy implemented by the Company.

To support fairness and transparency in procurement, there are stages of procurement procedures that must be carried out, namely:

- Vendor qualification and evaluation
- Procurement planning and implementation
- Receiving, storing and releasing goods
- Measurement of vendor satisfaction and guidance

In its implementation, the procurement flow is explained as follows

In procurement practice, the Company prioritizes local suppliers, in accordance with the Government's program to empower domestic suppliers (local and national) and increase the percentage of Domestic Component Level (TKDN). In supporting the efficiency and effectiveness of supply chain management, the Company has developed ERP-SCM application that makes it easier for users to make procurement. The ERP-SCM system contains all of the Company's work partner databases, making it easier for the integrated procurement system and procedures.

Along with these efforts, the Company seeks to strengthen relations with business partners by organizing vendor gatherings. The agenda in vendor gatherings is generally a discussion and presentation of efforts to increase the profitability of companies and partners through good SCM.

The Company's efforts in carrying out and fulfilling transparent and fair procurement practices are in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs) Number 17, namely Partnerships to Achieve the Goals in the Economic Pillar and ISO 26000 Core Subjects of Consumer Issues.

Keterlibatan Politik yang Bertanggung Jawab

Perseroan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam kegiatan politik. Oleh sebab itu, Perseroan menjamin bahwa setiap insan WILABETON pun dapat memiliki hak-hak dan menyampaikan aspirasi politiknya dalam batasan kepentingan pribadi dan tidak melibatkan kepentingan perusahaan. Ketentuan yang mengatur mengenai batasan pemberian hak politik bagi insan Perseroan yang terhindar dari benturan kepentingan telah diatur dalam Pedoman Etika Perilaku Perseroan sebagai berikut:

1. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
2. Tidak diperkenankan ikut serta atau diikutsertakan sebagai pelaksana atau menghadiri kampanye presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan anggota legislatif;
3. Tidak memanfaatkan nama, aset, dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu;
4. Tidak mengatasnamakan Perseroan;
5. Tidak membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa Perseroan memiliki keterikatan dengan partai politik mana pun.

Pemenuhan hak-hak politik yang wajar selaras dengan landasan ISO 26000 Subjek Inti Praktik Operasi yang Adil (*Fair Operating Practices*) dengan isu nomor 2, yaitu Keterlibatan Politik yang Bertanggungjawab.

Persaingan Sehat

Perseroan senantiasa mendukung iklim usaha yang berlandaskan pada persaingan yang sehat dan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menjunjung prinsip saling menghormati dan kaidah-kaidah persaingan yang sehat. Perseroan memandang persaingan yang adil dan sehat kian mendorong pertumbuhan inovasi, strategi, dan efisiensi, memastikan semua organisasi memiliki peluang yang sama, mendorong pengembangan produk atau proses baru atau yang sedang ditingkatkan, dan dalam jangka panjang, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan standar hidup yang lebih merata. Implementasi prinsip dan praktik persaingan sehat menghindarkan Perseroan dari indikasi persaingan yang tidak wajar yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan risiko reputasi bagi Perseroan.

Salah satu bentuk perilaku anti persaingan adalah terkait aspek penetapan harga. Perseroan dengan etika bisnis yang diterapkan menghindari persaingan tidak sehat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui:

1. Pelaksanaan praktik bisnis dengan cara yang konsisten pada hukum dan peraturan persaingan, dan bekerja sama dengan pihak berwenang yang sesuai;
2. Menetapkan prosedur dan perlindungan untuk mencegah keterlibatan dalam perilaku anti persaingan;

Responsible Political Engagement

The Company complies with the provisions and regulations which state that every citizen has the same right to be involved in political activities. Therefore, the Company guarantees that every WILABETON employee can have rights and convey their political aspirations within the boundaries of personal interests and do not involve the interests of the company. The provisions governing the limits on granting political rights to Company personnel who are protected from conflicts of interest are regulated in the Company's Code of Ethics as follows:

1. Not becoming administrators and members of political parties;
2. Are prohibited to participate or be involved as executor or attend the presidential and vice presidential campaigns as well as regional heads and members of the legislature;
3. Not using the Company's names, assets and potentials for certain political purposes;
4. Not on behalf of the Company;
5. Not making an understanding, engagement, or statement, either directly or indirectly, which can indicate that the Company has ties to any political party.

The fulfillment of reasonable political rights is in line with the foundation of ISO 26000. Core Subjects of Fair Operating Practices with issue number 2, namely Responsible Political Engagement.

Fair Competition

The Company always supports a business climate based on fair and honest competition in accordance with applicable regulations, by upholding the principle of mutual respect and the principles of fair competition. The Company views that fair and healthy competition is increasingly driving the growth of innovation, strategy and efficiency, ensuring all organizations have equal opportunities, encouraging the development of new or improved products or processes, and in the long term, increasing economic growth and a more equitable standard of living. The implementation of the principles and practices of fair competition prevents the Company from indicating unfair competition that has the potential to create legal and reputational risks for the Company.

One form of anti-competitive behaviors is related to the aspect of pricing. The Company, with applied business ethics, avoids unfair competition and create a conducive business climate through:

1. Carry out business practices in a manner consistent with competition laws and regulations, and cooperate with the appropriate authorities;
2. Establish procedures and safeguards to prevent involvement in anti-competitive behavior;

3. Mempromosikan kesadaran karyawan tentang pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang persaingan yang adil;
4. Mendukung praktik *anti-trust* dan *anti-dumping*, serta kebijakan publik yang mendorong persaingan, dan
5. Memperhatikan konteks sosial di mana Perseroan beroperasi dan tidak memanfaatkan kondisi sosial, seperti kemiskinan, untuk mencapai keunggulan kompetitif yang tidak adil.

Penerapan upaya dan kebijakan tersebut telah sesuai dengan landasan ISO 26000 Subjek inti Praktik Operasi yang Adil (*Fair Operating Practices*) dengan isu nomor 3, yaitu Persaingan yang Sehat.

Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Meski tidak dapat diukur secara kuantitatif, dampak atas pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang Operasi yang Adil kian memperkuat integritas WILABETON sebagai entitas usaha yang bersih, sehat, dan senantiasa patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut kian memberikan nilai tambah bagi citra dan reputasi Perseroan di industri, yang pada akhirnya akan menjadi sebuah investasi sosial yang mampu memupuk kepercayaan dan loyalitas pemangku kepentingan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan dan Komitmen

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang tak pernah lepas dari perhatian Perseroan sebagai wujud integritas dan komitmennya pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Hal ini turut dilatarbelakangi pemahaman bahwa kegiatan operasi Perseroan memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Dengan upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan dampak lingkungan secara berkelanjutan, ketercapaian kondisi lingkungan hidup yang lebih lestari dan berkelanjutan akan menjadi salah satu faktor yang menunjang keberlanjutan usaha dan mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk bersama.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Perseroan telah membangun upaya sistematis dan terpadu untuk mengelola dampak lingkungan dan mendukung pelestarian lingkungan. Upaya ini didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasi demi mencegah dampak negatif bagi lingkungan.

3. Boost employee awareness about the importance of compliance with competition laws and fair competition principle;
4. Support anti-trust and anti-dumping practices, and public policies that encourage competition; and
5. Pay attention to the social context where the Company operates and does not use social conditions, such as poverty, to achieve an unfair personal competitive advantage.

The implementation of these efforts and policies is in accordance with the ISO 26000 core subject frameworks of Fair Operating Practices with issue number 3, namely Fair Competition.

Impact of Corporate Social Responsibility on Fair Operations

Even though it cannot be measured quantitatively, the impact on fulfilling corporate social responsibility in the Fair Operations sector has further strengthened the integrity of WILABETON as a clean, healthy business entity and always complies with the prevailing laws and regulations. This provides added value to the Company's image and reputation in the industry, which in turn will become a social investment capable of fostering stakeholder trust and loyalty.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Policy and Commitment

The environment is one aspect that is inseparable from the Company's attention as a manifestation of its integrity and commitment to the Sustainable Development Goals. This is motivated by the understanding that the Company's operations have a direct or indirect impact on the environment. With efforts to conserve the environment and manage environmental impacts in a sustainable manner, attaining a more sustainable and sustainable environmental condition will be one of the factors that support business sustainability and create a better future together.

In accordance with Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (PPLH), the Company has built a systematic and integrated effort to manage environmental impacts and support environmental preservation. This effort is supported by the application of the precautionary principle in all operational activities to prevent negative impacts on the environment.



Perseroan senantiasa menjalankan kepatuhan terhadap lingkungan dengan memenuhi dokumen-dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibutuhkan pada setiap proyek-proyek yang akan dijalankan, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Selain itu, Perseroan memperkaya kepatuhannya kepada lingkungan dengan senantiasa menerapkan baku mutu lingkungan serta perizinan penggunaan sumber daya alam.

Dalam menjalankan aktivitas usaha yang bertanggung jawab, Perseroan menerapkan operasi yang berwawasan lingkungan dengan mengimplementasikan pengelolaan secara sistematis pada aspek-aspek lingkungan yang meliputi material, limbah dan efluen, penerapan 3R, penggunaan energi, dan konsumsi air.

Upaya pengelolaan dan kepatuhan lingkungan yang dijalankan merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan ISO 26000 Subjek Inti Lingkungan Hidup, dengan isu-isu:

1. Pencegahan polusi;
2. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan; dan
3. Konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara itu, relevansinya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- SDGs No. 3 (*Good Health*)
- SDGs No. 6 (*Clean Water and Sanitation*)
- SDGs No. 7 (*Affordable and Clean Energy*)
- SDGs No. 13 (*Climate Action*)
- SDGs No. 14 (*Life Below Water*)
- SDGs No. 15 (*Life on Land*)
- SDGs No. 17 (*Partnership for the Goals*)

Target Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Lingkungan Hidup

Target dan rencana kegiatan tanggung jawab perusahaan di bidang lingkungan hidup diorientasikan pada peningkatan kepatuhan terhadap lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan operasi Perseroan, konservasi lingkungan, dan penggunaan sumber daya serta konsumsi yang wajar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Secara lebih rinci, target dan rencana pemenuhan tanggung jawab perusahaan di bidang lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan atas setiap proyek yang dijalankan berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta ketentuan perizinan lingkungan lainnya yang berlaku;
2. Terlaksananya penggunaan material yang bertanggung jawab dan mengupayakan langkah efisiensi;

The Company always carries out compliance with the environment by fulfilling the environmental monitoring and management documents required for each project, such as the Environmental Impact Analysis (AMDAL) document, Environmental Management Efforts, and Environmental Monitoring Efforts (UKL-UPL). In addition, the Company enriches its compliance with the environment by always implementing environmental quality standards and permits for the use of natural resources.

In carrying out responsible business activities, the Company implements environmentally friendly operations by implementing systematic management of environmental aspects including material, waste and effluent, 3R application, energy use, and water consumption.

Environmental management and compliance efforts are forms of corporate social responsibility fulfillment based on ISO 26000 on Environmental Core Subjects, with the following issues:

1. Pollution prevention;
2. Sustainable use of resources; and
3. Responsible and sustainable consumption.

Meanwhile, its relevance to the Sustainable Development Goals (SDGs) includes the following aspects:

- SDGs No. 3 (*Good Health*),
- SDGs No. 6 (*Clean Water and Sanitation*),
- SDGs No. 7 (*Affordable and Clean Energy*),
- SDGs No. 13 (*Climate Action*),
- SDGs No. 14 (*Life Below Water*),
- SDGs No. 15 (*Life on Land*),
- SDGs No. 17 (*Partnership for the Goals*)

Corporate Social Responsibility Targets in the Environment

The targets and plans for corporate responsibility activities in the environmental sector are oriented towards increasing compliance with the environment, managing the environmental impact of the Company's operations, environmental conservation, and the use of resources and consumption that is fair, responsible, and sustainable. In details, the targets and plans for fulfilling corporate responsibility in the environmental sector are as follows:

1. Fulfillment of environmental impact monitoring and management of each project that is carried out based on the documents of Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts (UKL-UPL) and Environmental Impact Analysis (AMDAL), as well as other applicable environmental permit provisions;
2. Implementing responsible use of materials and striving for efficiency measures;

3. Terlaksananya pengelolaan limbah dan efluen yang sesuai dengan karakteristik limbah dan efluen yang dihasilkan (termasuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3));
4. Terlaksananya penerapan upaya 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di lingkungan operasi Perseroan;
5. Terlaksananya langkah efisiensi penggunaan energi;
6. Terlaksananya konsumsi air yang wajar dan penerapan langkah efisiensinya;
7. Terlaksananya upaya konservasi lingkungan.

3. Implementing waste and effluent management in accordance with the characteristics of the waste and effluent produced (including the management of Hazardous and Toxic Waste (B3));
4. Implementing of 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) efforts in the Company's operating environment;
5. Implementing efficiency of energy usage;
6. Implementing reasonable water consumption and implementing efficient measures;
7. Implementing environmental conservation efforts.

Kegiatan/Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Lingkungan Hidup Penggunaan dan Pengelolaan Material

Karakteristik usaha Perseroan di bidang produksi beton pracetak menjadikan upaya pengelolaan material sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan secara cermat. Perseroan secara konsisten senantiasa menyeimbangkan kepentingan dalam menghasilkan produk beton terbaik dengan spesifikasi material yang berkualitas tanpa mengesampingkan pertimbangan terhadap lingkungan.

Rantai pasokan material yang digunakan berasal dari mitra kerja yang telah bekerja sama dengan baik dengan Perseroan. Hal ini memudahkan Perseroan untuk memantau kualitas dan spesifikasi material yang diperoleh. Adapun material utama yang digunakan dalam pembuatan produk beton antara lain adalah *split*, besi prategang, pasir, air, semen, dan zat aditif, sedangkan material pendukungnya adalah *fly ash* dan *silica fume*. Sebagai salah satu rencana jangka panjang WILABETON, Perseroan bertujuan untuk memperkuat penguasaan material alam, yang sekaligus menjadi bagian dari strategi efisiensi.

Corporate Social Responsibility Activities/ Implementation in the Environment Material Usage and Management

The characteristics of the Company's business in the field of precast concrete production make material management an aspect that needs careful attention. The Company consistently balances its interests in producing the best concrete products with quality material specifications without compromising environmental considerations.

The material supply chain used comes from partners who have worked well with the Company. This makes it easier for the Company to monitor the quality and specifications of the material obtained. The main materials used in the manufacture of concrete products include gravel, prestressed iron, sand, water, cement, and additives, while the auxiliary materials are flyash and silicafume. As one of WILABETON's long-term plans, the Company aims to strengthen control of natural materials, which is also part of the efficiency strategy.

Volume Material yang Digunakan

Volume of Materials Used

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019
Material Utama / Main Material			
Split / Gravel	m ³	483.954	678.538
Besi prategang / Prestressed iron	kg	25.829.768	36.620.436
Besi beton / Concrete iron	kg	21.666.921	31.096.521
Pasir / Sand	m ³	314.488	455.038
Air / Water	liter	285.770	464.727
Semen / Cement	kg	303.681.549	430.981.668
Zat aditif beton / Concrete additives	liter	3.463.374	5.141.297
Material Pendukung / Auxiliary Material			
Flyash	kg	9.838.407	13.866.702
Silika fume / Silica fume	kg	933.599	1.133.717

Untuk memproduksi beton berkualitas, campuran bahan baku yang digunakan harus memenuhi standar spesifikasi produk. Bahan baku produksi beton seluruhnya merupakan jenis material *non-renewable*. Selain itu, tidak ada material bahan baku yang sifatnya merupakan material daur ulang dalam produksi beton.

To produce high quality concrete, the mixture of raw materials used must meet product specification standards. The raw materials for concrete production are entirely non-renewable materials. In addition, there are no raw materials which are recycled materials in the production of concrete.

Namun demikian, penggunaan *fly ash* sebagai bahan baku pendukung adalah salah satu upaya WILAJA BETON untuk berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan, karena *fly ash* merupakan jenis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). *Fly ash* dibeli dari pihak lain, yang kemudian dikirim oleh vendor yang memiliki izin pengangkut B3. Pengelolaan dan penggunaan *fly ash* di lingkungan pabrik beton telah dilakukan seizin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK). Secara tidak langsung, Perseroan turut mengurangi jumlah *fly ash* atau B3 yang dihasilkan oleh sektor industri lain.

Pengelolaan Limbah dan Efluen

Proses produksi beton yang dijalankan Perseroan menghasilkan limbah dan efluen sehingga perlu diterapkan langkah pengelolaan yang tepat sehingga tidak berisiko tinggi merusak lingkungan sekitar. Penanganan dan pengelolaan limbah hasil produksi senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengklasifikasikan limbah berdasarkan kategorinya, yaitu limbah padat B3, limbah padat non B3, dan limbah cair. Pada nantinya, langkah pengelolannya pun akan disesuaikan dengan karakteristik dan kategori limbah tersebut.

Informasi jenis limbah dan metode pengelolannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Jenis Limbah dan Metode Pengelolannya

Jenis Limbah / Waste Type	Limbah yang Dihasilkan / Waste Produced	Metode Pengelolannya / Management Method
Non-B3 Padat / Solid Non-B3	Botol minum plastik / Plastic drinking bottles	Mengurangi (<i>reduce</i>) penggunaan botol plastik dengan menyediakan gelas minum di setiap ruang rapat dan dapur. / Reduce the use of plastic bottles by providing drinking glasses in every meeting room and kitchen.
	Kertas / Paper	Mengurangi cetakan dokumen, memanfaatkan dokumen digital (<i>soft file</i>), menggunakan kertas bekas untuk mencetak dokumen. / Reducing document printing, utilizing digital documents (soft files), using used paper to print documents.
	Sisa makanan / Food leftovers	Reduce, atau sisa makanan catering kembali ke pihak catering. / Reduce, or returning catering food leftovers to the caterer.
	Sisa beton / Concrete leftovers	Dimanfaatkan kembali (<i>reuse</i>) untuk pembuatan <i>conblock</i> dan urugan warga sekitar pabrik. / Reused to make <i>conblocks</i> and fills for residents around the factory.
	Timbulan tanah / Soil heap generation	Dimanfaatkan (<i>reuse</i>) sebagai tanah uruk untuk kepentingan warga sekitar pabrik. / Reused as landfill for the benefit of residents around the factory.
Non-B3 cair / Liquid Non-B3	Air limbah domestik/RT / Domestic/RT wastewater	Reduksi air limbah domestik/RT, diolah di IPAL dan sanitasi untuk menyiram debu dan tanaman. / Reduction of domestic/RT wastewater, treated in IPAL and sanitation to flush dust and plants.
	Air dan timbulan limbah sisa produksi / Water and residual production waste generation	Dimanfaatkan kembali (<i>reuse</i>) untuk memproduksi <i>paving</i> , timbunan perumahan, dan jalan. / Reused to produce <i>paving</i> , housing landfills, and roads.
B3	Filter dan oli bekas / Used filters and oil	Diserahkan kepada pihak ketiga (Bank Sampah Indonesia) / Submitted to a third party (Indonesian Waste Bank)
	Cartridge/tinta / Cartridge/ink	Diserahkan kepada pihak pengelola limbah B3 yang memiliki izin. / Handed over to the licensed B3 waste manager.
Gas dan partikel / Gas and particles	CO ₂ , debu / CO ₂ , dust	Reduksi (<i>reduce</i>) dengan penyiraman dan pengurangan penggunaan BBM. / Reduce by watering and reducing fuel use.

untuk jenis limbah padat yang dihasilkan dari Pabrik Produk Beton (PPB), berupa timbulan *coor*, dimanfaatkan kembali untuk memproduksi *paving block*. *Paving block* digunakan untuk pemadatan jalan, timbulan *coor* digunakan untuk fondasi rumah warga. Sementara itu, timbulan tanah digunakan untuk pengurugan jalan, sawah, lahan kosong, dan fondasi bangunan.

However, the use of flyash as a supporting raw material is one of WILAJA BETON's efforts to contribute to reducing environmental pollution, because flyash is a type of Hazardous and Toxic Material (B3). Flyash is purchased from another party, which is then sent by a vendor who has a B3 carrier license. Flyash management and use in a concrete factory environment has been carried out with the permission of the Ministry of Environment and Forestry (KHLK). The Company also indirectly reduces the number of flyash or B3 produced by other industrial sectors.

Waste and Effluent Management

The concrete production process carried out by the Company produces waste and effluent, so it is necessary to apply appropriate management steps so that there is no high risk of damaging the surrounding environment. The handling and management of production waste always applies the principle of prudence by classifying wastes based on its categories, namely B3 solid waste, non-B3 solid waste, and liquid waste. In the future, the management steps will also be adjusted to the characteristics and categories of the waste.

Information on waste types and management methods are described in the following table:

Types of Waste and Management Methods

The type of solid waste produced from the Concrete Product Factory (PPB), in the form of cast generation, is reused to produce paving blocks. Paving blocks are used for road compaction, and cast generaton is used for the foundation of residents' houses. Meanwhile, the soil heap generation is used for filling roads, rice fields, vacant land, and building foundations.

Pada tahun 2020, volume limbah padat yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Volume Limbah Padat yang Dihasilkan (m³)

Uraian / Description	2020	2019	2018
Jumlah / Total	22.911	83.156	51.797

Adapun pengelolaan limbah cair adalah dengan mengalirkannya ke dalam penampung untuk dibersihkan dari endapan lumpur sebelum keluar dari pabrik. Selanjutnya, air limbah dialirkan ke bak penyangran, sedangkan endapan lumpurnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pengerasan dan tanggul. Sementara itu, air limbah hasil produksi diendapkan dan disaring di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk digunakan kembali sebagai air untuk proses cuci alat produksi dan material atau air siraman tanaman dan stockyard.

Pada tahun 2020, volume limbah cair yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Volume Limbah Cair yang Dihasilkan (m³)

Uraian / Description	2020	2019	2018
Jumlah / Total	16.039	17.748	19.789

Kampanye 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle)

Perseroan secara giat mendorong pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) di operasional kantor. Dalam hal ini, Perseroan menerapkan aktivitas minim plastik dan sampah dengan penggunaan gelas minum kaca dibandingkan plastik, menggunakan email untuk berkirim surat, hemat dalam penggunaan air, mencetak dokumen seperlunya dan lebih mendukung penggunaan *soft file* dalam aktivitas sehari-hari.

Sementara di lingkup PPB, realisasi 3R diarahkan pada limbah padat menjadi barang-barang berdaya guna, di antaranya:

1. Pemanfaatan kembali ban bekas untuk alas *trostel recycle*;
2. Pemanfaatan sepatu *safety* menjadi pot tanaman;
3. Penggunaan drum bekas sebagai tempat penyimpanan pasir kontaminasi untuk mengatasi tumpahan cairan minyak atau oli (sebagai *spill kit*);
4. Kayu palet bekas didaur ulang menjadi meja atau lemari;
5. Sampah organik diolah menjadi meja atau lemari;
6. Sisa *sludge* proses produksi beton putar dapat diolah menjadi *paving block*;
7. Memanfaatkan *pin connector* sebagai pengikat antara satu segmen dengan segmen lainnya pada produk balok segmental.

In 2020, the volume of generated solid waste can be viewed in the following table

Volume of Generated Solid Waste (m³)

The management of liquid waste is conducted by flowing water into a container to be cleaned of sludge before it leaves the factory. Furthermore, the wastewater is channeled into a filtering tank, while the sludge can be used by the local community for hardening and embankment. Meanwhile, the wastewater produced is deposited and filtered in the Wastewater Treatment Plant (IPAL) to be reused as water for the washing process of production equipment and materials or water for plant and stockyard water.

In 2020, the volume of liquid waste generated can be viewed in the following table:

Volume of Generated Liquid Waste (m³)

3R (Reduce, Reuse, Recycle) Campaign

The Company actively encourages 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*) in all office operations. In this case, the Company implements minimal plastic and waste activities by using drinking glass instead of plastic, using email for sending letters, economizing on water usage, printing documents as needed and more supporting the use of *soft files* in daily activities.

Meanwhile, in the PPB scope, 3R realization is directed at solid waste into useful goods, including:

1. Reuse of used tires for recycle trolley mats;
2. Reuse of safety shoes into plants vases;
3. Reuse of drums as containers for contaminated sand to deal with oil or oil spills (as a *spill kit*);
4. Reuse of pallet woods into tables or cabinets;
5. Organic waste is processed into tables or cabinets;
6. The remaining sludge in the rotating concrete production process can be processed into paving blocks;
7. Utilizing a pin connector as a fastener between one segment and another in segmental beam products.

Efisiensi Energi

Perseroan mengelola penggunaan energi secara efektif dan efisien guna menekan dampak negatif dan kontribusi emisi dan karbon. Selain bertujuan dalam mendukung kelestarian lingkungan, pengelolaan konsumsi energi juga ditujukan sebagai bentuk efisiensi sumber daya yang berujung pada biaya operasi yang lebih rendah.

Biro QSHE & Sistem Manajemen sebagai Biro yang bertugas untuk mengendalikan dan memastikan sistem manajemen energi di seluruh unit kerja. Biro QSHE dan Sistem Manajemen juga bertanggung jawab atas pelaksanaan efisiensi energi yang telah direncanakan oleh Perseroan.

Energy Efficiency

The Company manages the use of energy effectively and efficiently in order to reduce the negative impact and contribution of emissions and carbon. Besides aiming at supporting environmental sustainability, energy consumption management is also aimed at being a form of resource efficiency that leads to lower operating costs.

QSHE Bureau and Management System as a Bureau that is responsible for controlling and ensuring the energy management system in all work units. The QSHE Bureau and Management System are also responsible for implementing the energy efficiency planned by the Company.

Konsumsi Energi Langsung Berdasarkan Sumber Energi | Direct Energy Consumption Based on Energy Sources

Sumber Energi / Energy Source	Satuan / Unit	Tujuan Penggunaan / Intended Use	2020	2019	2018*
Listrik PLN / Electricity	GJ	Kegiatan Operasional / Operational Activity	40.646	46.994	60.862
Diesel / Diesel	GJ	Kegiatan Operasional / Operational Activity	591	5.071	1.797
Bahan Bakar Minyak (Solar) / Fuel Oil (Solar)	Liter	Kegiatan Operasional / Operational Activity	3.000.013	795.741	967.472
Bahan Bakar Minyak (Bensin/Pertalite/Pertamax) / Fuel Oil (Gasoline/Pertalite/Pertamax)	Liter	Kendaraan / Vehicle	349.143	257.998	165.591
Gas Alam / Natural Gas	m ³	Kegiatan Operasional / Operational Activity	200.440	166.240	135.557
Marine Fuel Oil (MFO) / Marine Fuel Oil (MFO)	m ³	Kegiatan Operasional / Operational Activity	141.652	280.260	242.071

*) Keterangan: Data tahun 2018 dinyatakan kembali, karena cakupan sumber data disesuaikan dengan cakupan data yang dilaporkan untuk tahun 2020 Kantor Pusat, WP, dan PPB. / Note: Data for 2018 is restated, because the scope of data source is adjusted to the coverage of data reported for 2020, namely Headquarters, WVP, and PPB.

Beberapa upaya telah diterapkan dalam mendorong reduksi emisi yang dihasilkan dari aktivitas bisnis Perseroan, antara lain:

- Memaksimalkan penggunaan lampu hemat energi dalam lingkungan kantor secara bertahap;
- Melakukan efisiensi terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mobil operasional.

Several efforts have been implemented to encourage emission reduction resulting from the Company's business activities, including:

- Maximize the use of energy efficient lighting in the office environment gradually;
- Perform efficiency in the use of fuel oil (BBM) for operational cars.

Konsumsi Air

Air merupakan salah satu komponen material dalam produksi beton di Perseroan maupun sebagai kebutuhan di aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Selama ini, kecukupan air di Perseroan bersumber dari air tanah melalui sumur dan PAM. Perseroan mendorong upaya penghematan konsumsi air khususnya dalam kegiatan kantor dengan menghimbau pegawai untuk menggunakan air secukupnya dan menghindari penggunaan air berlebihan.

Water Consumption

Water is one of the material components in the production of concrete in the Company and as a necessity in the company's day-to-day operational activities. So far, the Company's water supply is sufficiently sourced from groundwater through wells and PAM. The Company encourages efforts to save water consumption, especially in office activities by urging employees to use sufficient water and avoid excessive water use.

Pada tahun 2020, jumlah penggunaan air dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Volume Air yang Digunakan (m³)

Uraian / Description	2020	2019	2018
Jumlah / Total	391.905	319.430	264.944

In 2020, total water usage can be viewed in the following table:

Volume of Used Water (m³)

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Perseroan telah memiliki mekanisme yang mengatur mengenai penanganan dan penyelesaian permasalahan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terdampak. Setiap pengaduan akan dipelajari, dikomunikasikan dengan pelapor dengan pihak yang berkaitan, untuk selanjutnya menentukan tindak lanjut penyelesaiannya.

Environmental Complaints Mechanism

The Company has a mechanism that regulates the handling and resolution of environmental problems for all affected stakeholders. Each complaint will be studied, communicated with the reporter with the parties concerned, to further determine the follow-up resolution.

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis melalui alamat email resmi Perseroan yaitu sekper@wika-beton.co.id atau juga dapat menghubungi:

Yuherni Siswi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Complaints can be submitted verbally or in writing via the Company's official email address, namely sekper@wika-beton.co.id or by contacting:

Yuherni Siswi Rachmiyati

Corporate Secretary

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Kantor Pusat:

WIKA Tower I, Lt. 2-4

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340

Telp: +62 21 8192802 / 85909003 (hunting)

Fax: +62 21 85903872

Email: sekper@wika-beton.co.id

Website: www.wika-beton.co.id

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Headquarters:

WIKA Tower I, Lt. 2-4

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340

Telp: +62 21 8192802 / 85909003 (hunting)

Fax: +62 21 85903872

Email: sekper@wika-beton.co.id

Website: www.wika-beton.co.id

Selama tahun 2020, tidak terdapat pengaduan yang disampaikan terkait masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Perseroan.

During 2020, there was no complaints submitted regarding environmental problems caused by the Company's activities.

Penghargaan di Bidang Lingkungan

Komitmen dan upaya WIKA BETON dalam mengelola dampak lingkungan melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan berhasil membuahkan pengakuan eksternal dengan diterimanya sejumlah penghargaan di bidang lingkungan selama tahun 2020, antara lain sebagai berikut

Awards In Environmental Management

WIKA BETON's commitment and efforts in managing environmental impacts through the company's social and environmental responsibility program have resulted in external recognition by receiving a number of awards in the environmental field during 2020, including the following:



Penghargaan Top CSR Awards 2020 dari Majalan Top Business / Top CSR Awards 2020 from Top Business Magazine



Peringkat Keterbukaan Environmental Emiten Sektor Industri Dasar Terbaik dari Bumi Global Karbon Foundation (BGKF) dan Majalah Investor. / Environmental Disclosure Rating for Best Basic Industry Sector Issuers from Bumi Global Karbon Foundation (BGKF) and Investor Magazine.

Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Lingkungan

Penerapan kegiatan operasi berwawasan lingkungan dengan upaya pengelolaan dan pemantauan penggunaan material, konsumsi energi, efisiensi air, serta pengelolaan limbah dan efluen berdampak positif terhadap efisiensi sumber daya maupun efisiensi biaya operasi. Disertai strategi efisiensi yang terus menerus, Perseroan mampu mencatatkan penurunan konsumsi listrik sebesar 13,51% dan penurunan limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan mencapai masing-masing 50,05% dan 32,49%. Gerakan penerapan 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yang dilakukan di kantor maupun pabrik beton kian menekan volume material bekas dan tidak terpakai. Upaya pengelolaan limbah dan efluen sesuai dengan karakteristik dan kategori limbahnya berhasil dilakukan dan tercermin dari tidak adanya pengaduan yang disampaikan terkait masalah polusi dan limbah yang mencemari lingkungan. Selain itu, Perseroan juga tidak mendapat pengaduan ataupun sanksi mengenai manajemen lingkungan yang tidak etis.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Kebijakan dan Komitmen

Pemahaman WILAJA BETON akan pentingnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset sekaligus katalisator penggerak keberhasilan bisnis diiringi dengan upaya dalam memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan di bidang ketenagakerjaan dan K3. Prinsip serta praktik ketenagakerjaan dan K3 yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan daya saing serta mendorong kinerja terbaik dari setiap pegawai.

Dalam memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap pegawai, Perseroan berupaya mematuhi ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku serta memenuhi hak-hak pegawai sebagaimana telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sementara itu, pemenuhan aspek K3 ditujukan untuk mendorong iklim kerja yang kondusif, aman, serta minim angka kecelakaan kerja (*zero accident*).

Perseroan senantiasa memperhatikan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan kebijakan dan praktik Ketenagakerjaan dan K3, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Impact of Corporate Social Responsibility in the Environment

The application of environmentally sound operations with efforts to manage and monitor material use, energy consumption, water efficiency, as well as waste and effluent management has a positive impact on resource efficiency and operational cost efficiency. Accompanied by a continuous efficiency strategy, the Company was able to record a decrease in electricity consumption by 13.51% and a decrease in solid waste and liquid waste which was generated by 50.05% and 32.49% respectively. The movement to implement 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*) in offices and concrete factories has increasingly reduced the volume of used and unused materials. Effluent and waste management efforts in accordance with the characteristics and categories of waste have been successfully carried out and are reflected in the absence of complaints submitted regarding pollution and waste polluting the environment. In addition, the Company also did not receive complaints or sanctions regarding unethical environmental management.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN MANPOWER, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3)

Policy and Commitment

WILAJA BETON's understanding of the importance of the role of Human Resources (HR) as an asset as well as a catalyst for driving business success is accompanied by efforts to fulfill corporate social responsibility in the field of manpower and K3. The principles and practices of manpower and well-managed K3 are able to increase competitiveness and encourage the best performance of each employee.

In fulfilling the company's responsibilities towards employees, the Company strives to comply with applicable labor regulations and regulations and fulfill employee rights as mutually agreed in the Collective Labor Agreement (PKB). Meanwhile, the fulfillment of the K3 aspect is aimed at encouraging a work climate that is conducive, safe, and with a minimum number of work accidents (*zero accidents*).

The Company always pays attention to the prevailing laws and regulations as the basis for Manpower and K3 policies and practices, including:

1. Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety.
2. Law No. 23 of 1992 concerning Health.
3. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.
4. Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency.
5. Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health

6. Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan;
7. Permenaker No. 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
15. Keputusan Menteri ESDM RI No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik;
16. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Sistem Manajemen ISO 9001:2015;
18. Sistem Manajemen ISO 14001:2015;
19. Sistem Manajemen OHSAS 18001:2007.

Pengelola Human Capital Management dan QSHE

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan No. SK.01.01/WB-0A.011/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Struktur Organisasi PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun 2020, pengelolaan aspek ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab Biro *Human Capital*, sementara pengelolaan QSHE menjadi tanggung jawab Biro QSHE & Sistem Manajemen.

Target Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan dan K3

Rencana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang ketenagakerjaan dan K3 diarahkan pada program-program sebagai berikut:

Ketenagakerjaan

1. Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020 terkait dengan UU Cipta Kerja;
2. Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2021;
3. Pelaksanaan protokol covid 19 dan penanggulangannya.

management system.

6. Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 38 of 2014 concerning the application of the Mining Safety Management System.
7. Ministry of Labor Regulation No. 4 of 1987 concerning the Committee for Supervising of Occupational Safety and Health.
8. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.
9. Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management.
10. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits.
11. Government Regulation No. 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste;
12. Minister of Manpower Regulation No. 4 of 1987 concerning the Committee for Supervisory Safety and Health at Work;
13. Minister of Manpower Regulation No. 5 of 2018 concerning Occupational Safety and Health in the Work Environment;
14. Minister of Environment Regulation No.68 of 2016 concerning Domestic Wastewater Quality Standards;
15. Minister of Energy and Mineral Resources RI Decree No. 1827.K/30/MEM/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Good Mining Engineering Principles;
16. Decree of the Director General of Mineral and Coal No. 185.K/37.04/DJB/2019 concerning Technical Guidelines for Mining Safety Implementation and Implementation, Assessment and Reporting of Mineral and Coal Mining Safety Management Systems;
17. Management System ISO 9001: 2015;
18. Management System ISO 14001: 2015;
19. Management System OHSAS 18001: 2007..

Human Capital Management and QSHE

As stipulated in Decree No. SK.01.01/WB-0A.011/2020 dated 12 August 2020 on the Organization Structure of PT Wijaya Karya Beton Tbk in 2020, the management of the manpower aspect is the responsibility of the Human Capital Bureau, while the management of QSHE is the responsibility of the QSHE Bureau & Management System.

Corporate Social Responsibility Targets in Manpower and K3

The plan for implementing corporate social responsibility in the field of manpower and K3 is directed at the following programs:

Manpower

1. Implementation of Law No. 11 of 2020 related to the Job Creation Law;
2. Preparation of Collective Labor Agreement (PKB) for the 2020-2021 Period;
3. Implementation of the covid 19 protocol and countermeasures.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pada tahun 2020, Perseroan berhasil merealisasikan sejumlah target CSR di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan perolehan re-sertifikasi SMK3 PP 50 Tahun 2012 tingkat lanjutan di PPB Sumatera Utara dan PPB Pasuruan dengan hasil mendapatkan Bendera Emas. Selain itu, Perseroan telah mengikuti acara SNI Awards yang diselenggarakan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) dengan hasil penilaian akan dilakukan di tahun 2021. Perseroan juga telah melakukan persiapan migrasi dari OHSAS 18001:2007 ke ISO 45001:2018.

Salah satu komitmen Direksi dan manajemen terhadap penerapan SMK3L tercermin dari terselenggaranya program QSHE Patrol di sepanjang tahun 2020 sebanyak 6 (enam) kali ke unit kerja.

Perseroan juga telah melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan program seperti *sharing session awareness COVID-19* dengan pihak internal maupun eksternal, penyusunan protokol tetap kesehatan, kampanye *new normal* melalui *Covid Rangers*, *monitoring* kesehatan atau kasus terkonfirmasi, serta langkah-langkah 3T (*Testing, Tracing & Treatment*).

Kegiatan/Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan dan K3 Ketenagakerjaan

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Dalam menjalankan proses rekrutmen calon pegawai, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya kepada siapa pun tanpa memandang aspek gender, perbedaan etnis, agama, ras, kelas, maupun kondisi fisik tertentu. Kesempatan kerja diberikan dengan mempertimbangkan sepenuhnya pada kompetensi dan kualifikasi calon pegawai yang disesuaikan dengan posisi/jabatan yang akan diisi. Perseroan berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip non-diskriminasi di dalam proses rekrutmen pegawai dengan membuka kesempatan kerja yang sama bagi perempuan dan laki-laki sejauh memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Penerimaan ataupun pengangkatan calon pegawai dilakukan secara transparan di mana hasil keputusannya senantiasa mengacu pada hasil seleksi dan evaluasi selama masa percobaan dan orientasi pegawai.

Kesempatan yang Sama dalam Pengembangan Kompetensi

Perseroan secara berkesinambungan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan SDM yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi tiap pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini tercermin dari pencapaian rata-rata jam pelatihan pegawai sebagai berikut:

Occupational Health and Safety (OHS)

In 2020, the Company succeeded in realizing a number of CSR targets in the field of Occupational Safety and Health (OHS) by obtaining re-certification of SMK3 PP 50/2012 at the advanced level in PPB North Sumatra and PPB Pasuruan with the result of Gold Flag. In addition, the Company has participated in the SNI Awards held by BSN (National Standardization Agency) with the results of the assessment to be carried out in 2021. The Company has also made preparations for migration from OHSAS 18001:2007 to ISO 45001:2018.

One of the Board of Directors and management's commitments to implementing SMK3L is reflected in the implementation of the QSHE Patrol program throughout 2020 6 (six) times to work units.

The Company has also taken steps to prevent and control the spread of COVID-19 by implementing programs such as sharing COVID-19 awareness sessions with internal and external parties, drafting permanent health protocols, new normal campaign through Covid Rangers, health monitoring or confirmed cases, as well as 3T (*Testing, Tracing & Treatment*) steps.

Corporate Social Responsibility Activity/Implementation in Manpower and K3

Manpower

Gender Equality and Work Opportunity

In carrying out the recruitment process of prospective Employees, the Company always upholds the principles of Human Rights by opening the broadest employment opportunities to anyone, regardless of their gender, ethnic, religion, race, social class, or certain physical conditions. The Company is committed to always applying the principle of non-discrimination into our employee recruitment process by equal employment opportunities for both women and men, as long as they meet the specified requirements. Acceptance or appointment decision of our prospective employees is always in transparently manner that refers to the selection and evaluation results during their trial period and orientation.

Equal Opportunity in Competency Development

The Company continuously organizes HR education and training programs aimed at meeting the competency needs of each employee in accordance with their respective fields. This is reflected in the achievement of the following average employee training hours:

Rata-Rata Jam Pelatihan Berdasarkan Gender

Average Training Hours Based on Gender

Uraian / Description	Jumlah Peserta (a) / Total Participant (a)	Total Jam Pelatihan (b) / Total Training Hours (b)	Total jam pelatihan per peserta (b):(a) / Total hours of training per participant (b):(a)
Laki-laki / Male	513	2.393	5
Perempuan / Female	58	215	4
Jumlah / Total	571	2.608	4,5

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Level Jabatan

Average Training Hours Based on Position

Uraian / Description	Jumlah Peserta (a) / Total Participant (a)	Total Jam Pelatihan (b) / Total Training Hours (b)	Total jam pelatihan per peserta (b):(a) / Total hours of training per participant (b):(a)
Direksi / Board of Directors	5	19	4
Manajer Biro / Bureau Manager	32	98	3
Manajer PPU / PPU Manager	15	68	5
Manajer Bagian / Division Manager	59	287	5
Manajer Seksi / Section Manager	212	958	5
Staf / Staff	248	1.178	5
Jumlah / Total	571	2.608	4,5

Kebebasan Beribadah

Perseroan memfasilitasi pegawai dengan fasilitas ibadah berupa masjid/mushola di tempat kerja yang bertujuan agar setiap pegawai dapat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan dengan nyaman. Selain itu, Perseroan juga memberikan kesempatan kepada pegawai utk cuti dalam rangka ibadah haji selama 3 hari sebelum keberangkatan dan 7 hari setelah kepulangan. Sedangkan untuk ibadah umroh, pelaksanaannya memotong hak cuti pribadi.

Remunerasi dan Kesejahteraan Pegawai

Perseroan senantiasa memperhatikan kualitas kesejahteraan seluruh pegawainya dengan memberikan skema remunerasi, kompensasi, dan manfaat yang sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan oleh setiap pegawai terhadap Perseroan demi terciptanya level produktivitas kerja yang optimal. Adapun kompensasi dan manfaat yang diberikan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan yang nilainya disesuaikan dengan golongan dan/atau jabatan masing-masing, sementara kompensasi yang bersifat tetap atau tidak terkait dengan kehadiran/pencapaian prestasi kerja tertentu adalah minimal sebesar 75% dari total pendapatan.

Perseroan juga patuh terhadap ketentuan ketenagakerjaan dengan menetapkan kebijakan pemberian Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/P) yang besarnya disesuaikan dengan wilayah kerja operasional masing-masing pegawai. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, maka gaji terendah yang diterima pegawai baru di Perseroan sekurang-kurangnya sama dengan standar UMR/P yang berlaku di wilayah kerja operasional

Freedom of Worship

The Company facilitates employees with worship facilities in the form of mosque/prayer room in the workplace which aims to enable each employee to carry out worship and religious activities comfortably. In addition, the Company also provides employees with the opportunity to take leave for the pilgrimage for 3 days before departure and 7 days after return. As for the Umrah service, the implementation cuts off the right to personal leave.

Remuneration and Employee Welfare

The Company always sharpen our focus on the welfare quality for all Employees by providing compensation and benefits in accordance with their contributions made to the Company in order to create an optimal level of their work productivity. The compensation and benefits provided consist of basic salary and welfare benefits, the value is adjusted to each class and/or position, while fixed compensation or not related to certain presence/achievement of their work performance is a minimum of 75% of total income .

The Company also complies with applicable manpower regulations by establishing a policy of giving Regional/Provincial Minimum Wages (UMR/P), with the amount of employee salary is adjusted by our operational working area. With this policy enactment, the lowest salary received by our entry level Employees in the Company is as same as the applicable UMR/P standard for each employee in the operational working area. In

masing-masing pegawai. Selain itu, pegawai juga menerima tunjangan kehadiran yang dipengaruhi oleh tingkat kehadiran atau prestasi kerja tertentu dengan bobot 25% dari total pendapatan. Terkait remunerasi, Perseroan senantiasa berupaya menjaga *gap* rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi. Hal ini terlihat dari rasio gaji tertinggi dan terendah di Perseroan selama tahun 2020 sebagai berikut:

Keterangan / Description	Rasio / Ratio
Rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah / Highest and lowest Employee salary ratio	20.05 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah / Highest and lowest Board of Directors salary ratio	1.18 : 1
Rasio honorarium Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah / Highest and lowest Board of Commissioners honorarium ratio	1.11 : 1
Rasio gaji Direksi dan Pegawai tertinggi / Highest Board of Directors and Employee salary ratio	2.31 : 1

Hak Cuti Pegawai

Dalam mendukung kesejahteraan pegawai, Perseroan memberikan hak cuti pegawai yang disesuaikan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan skala/golongan tiap pegawai. Ketentuan jatah cuti pegawai di Perseroan adalah sebagai berikut:

- Cuti Tahunan: 12 hari kerja (untuk Pegawai yang telah memenuhi masa kerja satu tahun).
- Cuti Bersalin/Keguguran:
 - 1,5 bulan sebelum perkiraan kelahiran
 - 1,5 bulan setelah melahirkan
- Cuti Bersama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selain cuti di atas, pegawai juga berhak mengambil izin tidak masuk kerja seperti izin sakit, izin haid, izin penting, serta izin meninggalkan pekerjaan di luar tanggungan Perseroan.

Kebebasan Berserikat

Seluruh hak dan kewajiban Pegawai telah tertuang di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh pihak manajemen dan PPWB. Sebagai entitas bisnis yang selalu siap menghadapi beragam tantangan dan fleksibel terhadap pengembangan organisasi, Perseroan bersikap terbuka terhadap setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan SDM, oleh karenanya PKB senantiasa diperbarui setiap 2 (dua) tahun sekali melalui perundingan dan kesepakatan bersama. Sebagai informasi, di akhir tahun 2017 telah dilakukan perundingan antara Perseroan dan PPWB guna meninjau isi PKB dan menyetujui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2018-2020. PKB ini sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada tanggal 6 April 2018.

addition, each employee also can receives an attendance benefit based on their attendance or work performance with 25% of their total income. Regarding the remuneration, the Company always strives to maintain our salary ratio gap of all employees, so there is no high-difference gap. This is shown in the highest and lowest salary ratios of the Company in 2020:

Employee Leave Rights

To support employee welfare, the Company provides employee leave rights that are adjusted to the applicable manpower provisions and the scale/class of each employee. The provisions for employee leave at the Company are as follows:

- Annual leave: 12 working days (for employees who have one year work period).
- Maternity / Miscarriage Leave:
 - 1.5 months before the estimated birth.
 - 1.5 months after giving birth.
- Public Leave in accordance with applicable laws and regulations.
- Despite the above leave, the employees are also entitled to take permission not to come to work, such as sick leave, menstrual permits, important permits, as well as permission to leave their work outside the responsibility of the Company.

Freedom of Association

All employees' rights and obligations have been stated in the Collective Labor Agreement (PKB) signed by the management and PPWB. As a business entity that is always ready to face a variety of challenges and is being flexible on organizational development, the Company is open to every policy changes related to HR, therefore, PKB is always updated every 2 (two) years through negotiations and collective agreements. For information, at the end of 2017 negotiations between the Company and PPWB were conducted to review the contents of the Collective Labor Agreement and approve the 2018-2020 Joint Work Agreement (PKB). PKB was also registered in the Directorate General of Industrial Relations and Workers Social Security on April 6, 2018.

Pengelolaan Aspek Perburuhan

Perseroan bekerja sama dengan mandor borong telah menerapkan sistem penerapan Upah Minimum Regional/Kota (UMR/UMK) kepada semua pekerja yang berada di bawah mandor borongan. Di samping itu, Perseroan juga menyediakan asuransi kematian, kecelakaan kerja, Tunjangan Hari Raya (THR), dan insentif produksi.

Tingkat Turnover Pegawai

Upaya Perseroan dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi seluruh pegawai berdampak pada tingkat perputaran (*turnover*) pegawai sebagai berikut:

Uraian / Description	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)	
			Jumlah (orang) / Total (people)	Persentase / Percentage
Pegawai Masuk / Employee Enter	0	104	(104)	(100%)
Meninggal Dunia / Pass Away	11	4	7	175%
Pengunduran Diri / Resignation	15	14	1	7%
Pemutusan Hubungan Kerja / Work Termination	0	0	0	0
Pensiun / Retired	21	36	(15)	(42%)
Keputusan Perusahaan / The Company's Decision	9	5	4	80%
Jumlah / Total	56	163	(107)	(66%)

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Apabila terjadi keluhan kesah dan perselisihan terkait ketenagakerjaan, maka tahapan penyelesaian pada tingkat pertama dapat dilakukan oleh atas langsung masing-masing pegawai. Selanjutnya, jika keluhan kesah dan perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan di level atasan langsung, maka Pegawai dapat mengajukan keluhan kepada level atasan yang memiliki jabatan lebih tinggi. Selanjutnya, jika belum juga dapat ditemukan solusinya, maka Pegawai dapat meneruskan aduannya kepada PPVVB untuk disampaikan kepada Direksi dan diselesaikan bersama. Pada implementasinya, apabila persoalan yang dimaksud tetap tidak dapat diselesaikan pada tingkat Direksi, maka laporan tersebut dapat diteruskan oleh pihak yang bersengketa kepada Departemen Tenaga Kerja atau lembaga yang berwenang menurut peraturan perundangan untuk memperoleh jasa-jasa dalam penyelesaian masalahnya.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Guna memastikan keselamatan kerja seluruh pegawai pada saat sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan membentuk tim unit kerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/1987 tentang Tata Cara Pembentukan P2K3

Labor Aspects Management

The Company cooperates with the contract foreman that has a system of implementing Regional/City Minimum Wages (UMR/UMK) to all workers under the foreman wholesale. In addition, the Company also provides life insurance, work accident insurance, Religious Holiday Allowance (THR), and production incentives.

Employee Turnover Level

The Company's effort to create a conducive work climate for all employees affects the employee turnover as follows:

Manpower Complaints Mechanism

If there is complaints and dissensions related to our manpower, the settlement stage at the first level can pass through their direct supervisor of each employee. Furthermore, if these complaints and dissensions can not be resolved at the level of the direct supervisor, then the employee can submit a complaint to the a higher position level. Furthermore, if a solution has not been found, the Employee can send forward the complaint to PPVVB then to be submitted to and resolved by the Directors. In its implementation, if the dissenting problem cannot be resolved at the Board of Directors level, the report can be forwarded by both concerned parties to the Department of Labor or the authorized institution according to the laws and regulations to obtain good services to solve the problem.

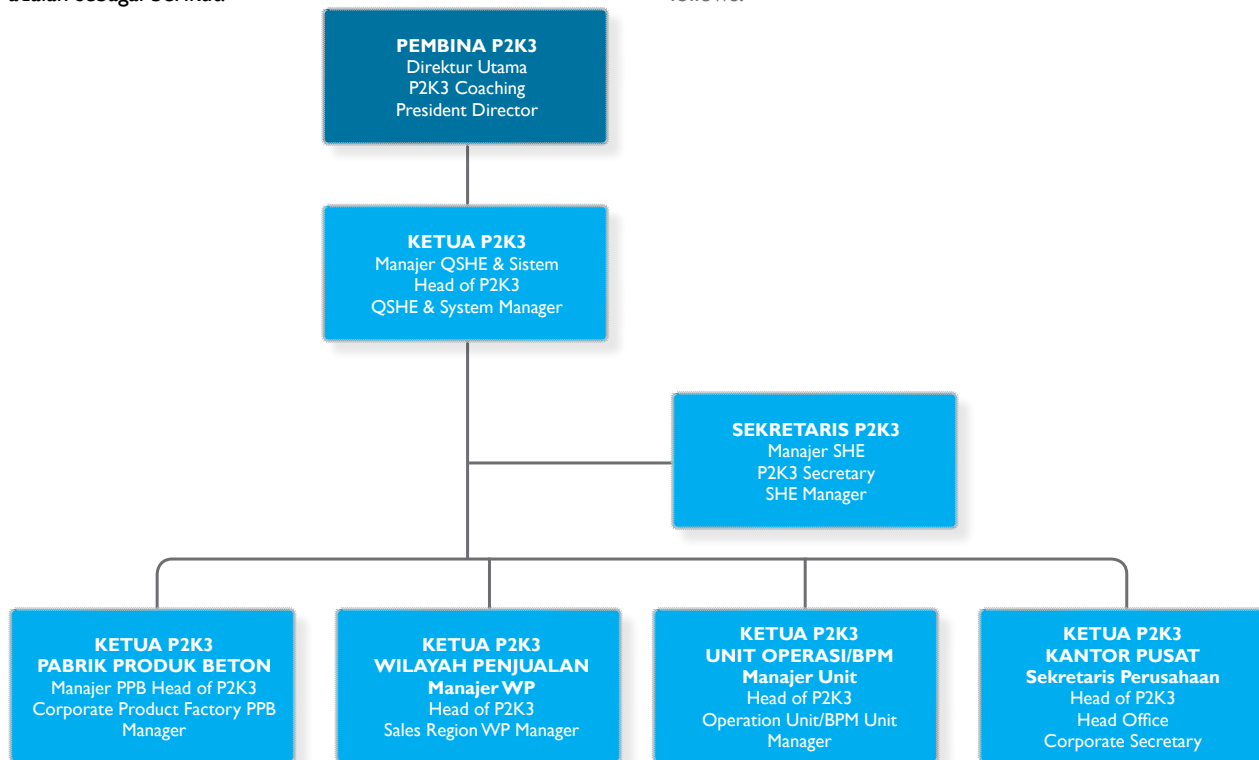
Occupational Health and Safety(K3)

Establishment of Occupational Health and Safety Committee

To ensure all Employees safe while carrying out their duties and responsibilities, The Company formed a team of work units, in accordance with Minister of Manpower Regulation No. 4/1987 concerning Procedures for the Establishment of P2K3 and

dan Pengangkatan Ahli K3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di tingkat pusat dan unit-unit kerja adalah sebagai berikut:

Appointment of K3 Experts. The Occupational Health and Safety Committee (P2K3) in headquarters and work unit levels is as follows:



Implementasi Budaya Keselamatan

Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan telah memperoleh sertifikasi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di mana awalnya sertifikasi ini hanya diimplementasikan di PPB Sumatera Utara, tetapi pada perjalanannya juga diterapkan di sejumlah pabrik lain yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk mengoptimalkan implementasi SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Perseroan turut menerapkan *safety culture* (implementasi Budaya K3) yang diharapkan dapat menjadi budaya kerja di seluruh unit usaha Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2020, Perseroan telah memiliki 10 (sepuluh) pabrik yang menerapkan SMK3. Hal ini sekaligus sebagai bentuk pengakuan bagi Perseroan karena telah menjalankan SMK3 dengan nilai sempurna di sejumlah pabriknya dan diaudit secara berkala oleh pihak eksternal yaitu PT Sucofindo (Persero).

Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam rangka menjamin aspek keselamatan kerja bagi seluruh pegawai, Perseroan senantiasa menyediakan sarana keselamatan kerja yang meliputi:

- Ruang P3K dan perlengkapannya;
- Sarana pemadam kebakaran;
- Klinik kesehatan dan dokter Perseroan.

Safety Culture Implementation

The Company has implemented the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) stated in the Regulation about Implementation of Health & Safety Management System (K3) and has obtained certification from the Ministry of Manpower and Transmigration, where this certification was only initially implemented in North Sumatra PPB, during the time, it also applied by other factories owned by the Company.

In its implementation, to optimize the implementation of SMK3 (Occupational Health and Safety Management System), the Company also participates in implementing safety culture (Implementation of K3 Culture) that is expected to become a work culture in all business units of the Company. Until the end of 2020, the Company has 10 (ten) factories that implements SMK3. This is also a recognition for us due to implement SMK3 with perfect scores in a number of factories and has been audited frequently by external parties, namely PT Sucofindo (Persero).

Work Safety and Health Facilities

In order to guarantee all employees safety aspect, the Company always provides work safety facilities, including:

- First aid rooms and its appliances;
- Fire extinguishers;
- The Company's health clinic and doctors.

Pemenuhan sarana keselamatan yang disediakan Perseroan mengacu pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan secara berkala melakukan perawatan dan pengecekan atau *checklist* bulanan terhadap seluruh sarana keselamatan yang ada baik di kantor pusat maupun di area operasional. Selain itu, Perseroan juga secara berkala melakukan kegiatan *Emergency Drill* sebagai upaya persiapan dalam menangani keadaan darurat. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan *Emergency Drill* tetap harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak pengelola gedung, yaitu PT WIKA Realty.

Pelatihan dan Sosialisasi K3

Guna menumbuhkan budaya K3 bagi seluruh pegawai di seluruh kegiatan operasional serta meningkatkan pemahaman pegawai terkait pentingnya K3, Perseroan mengikutsertakan pegawai pada program pelatihan dan sosialisasi terkait kebijakan K3. Berikut adalah pelatihan K3 yang dilaksanakan selama tahun 2020:

No.	Nama Pelatihan / Training Name	Penyelenggara / Organizer	Waktu / Time	Jumlah Peserta yang Diikutsertakan / Total Participant
1	Practical Functional Workshop Modul QSHE Awareness	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Januari, November, Desember 2020 / January, November, December 2020	5
2	Awareness ISO 45001:2018	PT Wijaya Karya Beton Tbk	November 2020 / November 2020	126
3	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja / Training and Certification of Junior OHS Experts for the Work Environment	Upaya Riksa Patra	Oktober 2020 / October 2020	1

Fasilitas Kesehatan Pegawai

Perseroan memandang bahwa aspek kesehatan merupakan unsur penting bagi kehidupan setiap orang. Oleh karenanya, Perseroan turut memperhatikan kualitas kesehatan seluruh Pegawai dengan memberlakukan kebijakan pemberian fasilitas kesehatan bagi Pegawai dan anggota keluarga agar kesejahteraan seluruh Pegawai senantiasa terjamin terutama bagi Pegawai yang bekerja di area produksi atau yang menjalankan klasifikasi pekerjaan berisiko tinggi. Perseroan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan bagi pegawai tetap maupun honorer serta tambahan asuransi kesehatan bagi pegawai tetap.

Perseroan turut memfasilitasi pegawai dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala (*Medical Check-Up/MCU*), sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 13 tahun 2003, Peraturan Menakertrans No. PER.02/Men/1980 Pasal 3 ayat 2 dan Peraturan Menakertrans No. PER.03/Men/1982. Pada tahun 2020, kegiatan MCU telah diberikan dan diikuti oleh seluruh pegawai Perseroan di PPB dan kantor pusat. Biro *Human Capital* akan mencatat dan melaporkan data hasil MCU karyawan tetap, sedangkan hasil MCU untuk pekerja di lapangan dikelola oleh masing-masing *site* proyek.

The safety facilities provided by the Company refers to the applicable laws and regulations. The Company regularly carries out maintenance and monthly checklists on all safety facilities, both in Head Office and Operational Area. In addition, the Company also regularly conducts *Emergency Drill* activities as an our effort for handling emergency circumstances. However, this implementation of *Emergency Drill* activities still to be coordinated in advance with the building management, which is PT WIKA Realty.

K3 Training and Socialization

In order to foster K3 culture for all employees in all operational activities and to increase employees' understanding of the importance of K3, the Company includes employees in training and socialization programs related to K3 policies. The following is the K3 training carried out during 2020:

Health Facilities for Employees

The Company views that the health aspect is an important element in everyone's life. Therefore, the Company also pays attention to the health quality of all employees by enforcing a policy of providing health facilities for employees and family members so that the welfare of all employees is always guaranteed, especially for employees who work in production areas or who carry out high-risk job classifications. The Company provides BPJS Health facilities for permanent and honorary employees as well as additional health insurance for permanent employees.

The Company also facilitates employees with regular *Medical Check-Up (MCU)*, as regulated in law No. 13 of 2003, Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER.02/Men/1980 Article 3 paragraph 2 and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER.03/Men/1982. In 2020, MCU activities have been provided and participated by all Company employees at PPB and headquarters. The *Human Capital Bureau* will record and report data on the MCU results for permanent employees, while the MCU results for workers in the field are managed by each project site.

Selain MCU, Perseroan juga secara rutin melakukan kegiatan donor darah bekerja sama dengan Perusahaan anak WIKA. Pada tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan 8 kali kegiatan donor darah, di bulan Februari, Maret, Juni, dan September 2020.

Sertifikasi di Bidang Ketenagakerjaan dan K3

Dalam mengukuhkan tanggung jawab dan perhatian terhadap aspek K3, Perseroan telah memiliki sertifikasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meliputi:

- Ahli K3 Umum
- Ahli K3 Konstruksi
- Auditor SMK3
- Auditor ISO 14001
- Auditor SMKP
- Pesawat angkat angkut
- Petugas Pemadam Kebakaran
- Ahli K3 Listrik
- K3 Perancah (*Scaffolding*)
- LPS Asesor AK3 Konstruksi
- Auditor ISO 45001
- Ahli K3 Lingkungan Kerja
- Investigator Kecelakaan

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan berhasil meraih beberapa sertifikasi, antara lain:

- Sertifikat ISO 9001:2015
- Sertifikat OHSAS 18001:2007
- Sertifikat ISO 14001:2015
- Sertifikat SNI 6680:2016
- Sertifikat SMK3 di seluruh 10 (sepuluh) PPB WIKA BETON

Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan dan K3

Upaya perseroan dalam mengelola aspek keselamatan Kesehatan kerja sesuai standar OHSAS 18001:2017 dan SMK3 sesuai PP No. 50 Tahun 2012 juga dapat digambarkan dengan meminimalisir angka kecelakaan kerja di semua unit. Adapun angka kecelakaan kerja tercermin dalam indikator sebagai berikut:

Keterangan / Description	2020	2019	2018	Jumlah / Total
Fatality	0	0	0	0
LTI	0	0	3	4
NLTI	7	21	17	45

Keterangan:

- NLTI (*Non Lost Time Injury*): Kecelakaan yang tidak menyebabkan kehilangan hari kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan.
- LTI (*Lost Time Injury*): Jumlah jam kerja hilang akibat kecelakaan kerja.
- Fatality/Meninggal: Kecelakaan yang menyebabkan pekerja meninggal dunia.

Apart from the MCU, the Company also regularly conducts blood donation activities in collaboration with WIKA's subsidiaries. In 2020, the Company carried out 8 blood donation activities, namely in February, March, June, and September 2020.

Manpower and K3 Certification

In affirming its responsibility and attention to K3 aspects, the Company has certifications in the field of Occupational Safety and Health, including:

- General K3 Expert
- K3 Construction Expert
- K3 Management System Auditors
- ISO 14001 Auditors
- SMKP Auditors
- Lift aircraft
- Firefighters
- Electric K3 Expert
- K3 Scaffolding
- LPS Asesor AK3 Construction
- ISO 45001 Auditor
- Occupational Health and Safety Expert
- Accident Investigator

Up to December 31, 2020, the Company received certifications, such as:

- ISO 9001:2015 certificate
- OHSAS 18001:2007 certificate
- ISO 14001:2015 certificate
- SNI 6680:2016 certificate
- SMK3 certificate in 10 (ten) WIKA BETON PPB

Corporate Social Responsibility Impact on Manpower and K3

The Company's efforts in managing occupational health safety aspects according to OHSAS 18001:2017 and SMK3 standards according to Government Regulation No. 50/2012 can also be illustrated by minimizing the number of work accidents in all units. The number of work accidents is reflected in the following indicators:

Information:

- NLTI (*Non Lost Time Injury*): Accidents that do not cause lost work days for workers who are involved in accidents.
- LTI (*Lost Time Injury*): The number of hours worked lost due to work accidents
- Fatality/Death: An accident that causes the loss of lives of workers.

Severity Rate, Frequency Rate, LTI, dan Jam Kerja Selamat

Severity Rate, Frequency Rate, LTI, and Safety Working Hours

Keterangan / Description	2020	2019
Severity Rate / Severity Rate	0	0
Frequency Rate / Frequency Rate	0,29%	0,39%
Lost Time Injury / Lost Time Injury	0	0
Jam Kerja Selamat / Safety Working Hours	17.351.181	18.411.897

Keterangan:

- Severity Rate (SR) : Jumlah hari yang hilang per satu juta jam kerja orang akibat kecelakaan selama periode 1 tahun.
- Frequency Rate (FR): Banyaknya kecelakaan kerja per satu juta jam kerja orang akibat kecelakaan selama periode 1 tahun
- Lost Time Injury (LTI) : Jumlah jam kerja hilang akibat kecelakaan kerja
- Jam kerja selamat (*Safety Working Hours*) : Jumlah jam kerja tanpa kecelakaan

Di samping itu, terpenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan terkait aspek ketenagakerjaan berdampak pada meningkatnya komitmen Perseroan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan ISO 26000 Subjek Inti Praktik Ketenagakerjaan dengan isu-isu:

- Issue 1: *Employment and employment relationships*
- Issue 2: *Conditions of work and social protection*
- Issue 3: *Social dialogue*
- Issue 4: *Health and safety at work*
- Issue 5: *Human development and training in the workplace*

Sementara itu kesesuaian dengan SDGs meliputi aspek SDGs No. 5 (Kesetaraan Gender), SDGs No. 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDGs No. 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), dan SDGs No. 17 (*Partnership for the Goals*).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA KONSUMEN

Kebijakan dan Komitmen

Pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan perusahaan yang memegang peranan dalam mendukung keberlangsungan usaha Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya mewujudkan tanggung jawab kepada pelanggan melalui penyediaan pelayanan yang prima dan produk terbaik. Perseroan juga telah menerapkan kebijakan berprinsip integritas, profesionalisme, komunikasi, dan sikap melayani dengan nilai-nilai dan budaya Perseroan, yaitu:

1. Mengembangkan layanan yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan serta menjalin hubungan jangka panjang yang dapat memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak;
2. Menjaga kualitas produk dan jasa yang prima, sesuai dengan standar nasional/internasional mengenai produk dan jasa yang dihasilkan serta menyediakan sarana komunikasi bagi pelanggan;

Information:

- Severity Rate (SR): The number of days lost per one million man working hours due to accidents during a 1 year period.
- Frequency Rate (FR): The number of work accidents per one million man working hours due to accidents during a period of 1 year
- Lost Time Injury (LTI): The number of working hours lost due to work accidents
- Safety Working Hours: The number of working hours without accidents

In addition, the fulfillment of corporate social responsibility related to labor aspects has an impact on increasing the Company's commitment to the Sustainable Development Goals and ISO 26000 Core Subjects of Labor Practices with the following issues:

- Issue 1: *Employment and employment relationships*
- Issue 2: *Conditions of work and social protection*
- Issue 3: *Social dialogue*
- Issue 4: *Health and safety at work*
- Issue 5: *Human development and training in the work place*

On the other hand, the alignment with SDGs covers SDGs No.5 (Gender Equality), SDGs No.8 (Decent Work and Economic Growth), SDGs No. 16 (Peace, Justice and Tough Institutions), and SDGs No. 17 (*Partnership for the Goals*).

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE CONSUMERS

Policy and Commitment

Customers are one of the Company's stakeholders who play a role in supporting the sustainability of the Company's business. Therefore, the Company strives to fulfill its responsibility to customers by providing excellent service and the best products. The Company has also implemented policies based on the principles of integrity, professionalism, communication, and an attitude of service with the Company's values and culture, namely:

1. Develop our services excellence in accordance with customer expectations and establish long-term relationships that can provide added value for both parties.
2. Maintain excellent product and service quality, in accordance with national/international standards regarding products and services produced and provide communication facilities for our customers.



3. Menyediakan sarana komunikasi bagi pelanggan untuk menampung keluhan dan saran dari pelanggan;
4. Meningkatkan layanan sesuai dengan hasil survei kepuasan pelanggan.

Target/Rencana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Konsumen

Rencana pelaksanaan kebijakan dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen pada tahun 2020 antara lain:

1. Menetapkan target CSI tahun 2020;
2. Komitmen terhadap mutu ketepatan waktu *delivery*;
3. Komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja;
4. Komitmen terhadap ketepatan sistem administrasi kontrak dan penagihan.

Kegiatan/Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Konsumen

Kesehatan dan Keselamatan bagi Konsumen

Kegiatan *QSHE patrol* rutin dilakukan setiap bulannya oleh perwakilan jajaran manajemen baik di lingkungan pabrik maupun di lokasi proyek. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meninjau atau mengevaluasi kesesuaian implementasi aspek K3L terhadap standar yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Ketersediaan Informasi Produk

Sebagai wujud tanggung jawab kepada konsumen, Perseroan menyajikan informasi terkait produk dan jasa yang dimiliki secara jelas dan transparan pada situs web resmi Perseroan (www.wika-beton.co.id) yang dapat diakses oleh semua pihak. Hal ini dimaksudkan agar para pemangku kepentingan Perseroan senantiasa mendapatkan informasi yang transparan, akurat, dan terkini mengenai produk dan/atau jasa yang dimiliki Perseroan.

Sarana dan Mekanisme Pengaduan Pelanggan

Sebagai wujud keseriusan Perseroan dalam menjamin hak para pemangku kepentingannya, Perseroan telah menyediakan sarana pelaporan pengaduan khusus melalui situs web dan alamat email resmi Perseroan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, setiap pelanggan juga dapat menyampaikan keluhannya secara langsung ke kantor penjualan wilayah agar keluhan dan pertanyaan dapat dengan mudah disampaikan. Pada prinsipnya, Perseroan senantiasa bersikap terbuka atas setiap kritik dan saran yang masuk demi menjaga kualitas produk dan/atau layanan yang dimiliki. Oleh karenanya, Perseroan berupaya untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk dan merespons setiap pertanyaan pelanggan dengan batas maksimal 2x24 jam setelah pengaduan atau pertanyaan tersebut diterima Perseroan. Mekanisme dan prosedur ini telah diatur dalam Prosedur Tetap (Protap) atau *Standard Operational Procedure* (SOP) Perseroan No. WB-MNS-PS-06.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan mencatat/tidak mencatat adanya keluhan atau pengaduan pelanggan yang masuk melalui laporan Tim Wilayah Penjualan.

3. Provide communication facilities for our customers to accommodate complaints and suggestions from customers.
4. Improve services in accordance with the results of customer satisfaction surveys.

Corporate Social Responsibility Target/Plan to the Consumers

The plans for implementing policies and corporate social responsibility activities to consumers in 2020 include:

1. Determining the CSI target for 2020;
2. Commitment to quality on time delivery;
3. Commitment to occupational health and safety;
4. Commitment to accuracy of contract administration and collection systems.

Corporate Social Responsibility Activity/Implementation to the Consumers

Health and Safety for Consumers

Routine *QSHE patrol* activities is conducted every month by representative Board of our Top management, both in factory environment or project location. This activity is to evaluate or review on the implementation of K3 aspects with the standard determined by the Company.

Availability of Product Information

As a form of responsibility to consumers, the Company provides clear and transparent information related to its products and services on the Company's official website (www.wika-beton.co.id) which can be accessed by all parties. This is intended so that the stakeholders of the Company will always receive transparent, accurate, and up-to-date information regarding the products and/or services owned by the Company.

Complaints Facilities and Mechanism

As a manifestation of our seriousness in guaranteeing the rights of our stakeholders, the Company has provided a special complaint reporting facility through our website, and official e-mail in order for the management to be more targeted. In addition, each customer can also leave their complaints directly to the regional sales office, so those complaints and questions can be easily submitted. Principally, the Company is always open to any incoming criticism and suggestions to maintain the quality of our products and/or services. Therefore, the Company strives to follow up on every incoming complaint and to respond to every customer question with a maximum limit of 2x24 hours after the complaint or question is received by the Company as stipulated in the Company's *Standard Operating Procedure* (SOP) No. WBMNS-PS-06.

Throughout 2020, the Company recorded/did not record complaints coming through the Sales Area Team report.

Upaya Penanggulangan atas Pengaduan Konsumen

Setiap pengaduan atau komplain pelanggan yang masuk ke Perseroan akan terlebih dahulu diterima oleh Divisi Penjualan, lalu selanjutnya dianalisis atau diinvestigasi oleh Biro terkait. Sementara untuk keluhan yang berkaitan dengan mutu akan ditindaklanjuti bersama Biro Engineering; keluhan terkait kontrak akan ditindaklanjuti bersama Bagian Legal; dan keluhan terkait keuangan atau pembayaran akan ditindaklanjuti bersama Biro Keuangan. Sebagai bentuk keseriusan Perseroan dalam menangani semua keluhan dan pengaduan pelanggan, Perseroan senantiasa mencatat hasil penilaian tingkat kepuasan pelanggan yang terus menguat, sebagaimana tercermin dari Indeks Kepuasan Pelanggan yang rutin dilakukan setiap tahun.

Indeks Kepuasan Pelanggan

Perseroan berkomitmen untuk terus berinovasi demi mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap produk dan/atau jasa yang dimiliki Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan atau *Customer Satisfaction Indeks* (CSI) sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) No. WB-CSH-PS-01 dengan menerapkan metode kuesioner yang dikirimkan kepada pelanggan setelah selesai menjalankan sebuah proyek. Selanjutnya, jawaban dari kuesioner tersebut akan dianalisis sehingga didapat hasil akhir berupa tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan Perseroan. Pada prinsipnya, apa pun hasil dari survei tersebut akan tetap bermanfaat bagi Perseroan untuk dijadikan sebagai bahan masukan, evaluasi, dan perbaikan pengembangan produk dan jasa Perseroan di masa mendatang.

Pada tahun 2020, perolehan nilai rata-rata CSI Perseroan adalah sebesar 4,23 Merujuk pada hasil CSI tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Perseroan masih harus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi seluruh SDM di Wilayah Penjualan agar senantiasa mampu menangkap peluang bisnis yang lebih besar dan peka dalam mengantisipasi atau memitigasi risiko. Informasi mengenai hasil CSI Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini:

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	2018
Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Index	Skala 5 / Scale 5	4,23	4,29	4,27

Efforts to Handle Consumers Complaints

Every incoming customer complaint or suggestion will first be received by our Sales Division, then subsequently analyzed or investigated by the relevant Bureau. Meanwhile, the complaints related to quality of our product and service will be followed up together with the Engineering Bureau, and complaints related to contracts will be followed up with the Legal Department, as well as complaints related to finance or payments will be followed up with the Finance Bureau. our seriousness and pledge of handling all customer complaints, it can be seen its positive correlation with the trend of the customer satisfaction level that continues to strengthen, as reflected in the Customer Satisfaction Index that is routinely carried out every year.

Customer Satisfaction Index

The Company is committed to keep innovating to win our customers' loyalty on the product and services we have. Therefore, the Company conduct routine customers satisfaction index or (CSI) using Standard Operation Procedures (SOP) No. WBCSH-PS-01 and questionnaire method, which sent to our customers after finishing a project. Next, the result of those questionnaires will be analyzed by us, so we can see the level of customers satisfaction on our product and services. Principally, the result of those surveys keep becoming a benefit for us to be as the evaluation and input material in order to develop our product and services for the years to come.

In 2020, the Company's average CSI value was 4.23 Referring to the CSI results, it is concluded that the Company still has to improve the knowledge and competence of all human resources in the Sales Area in order for them to always seize bigger and more sensitive business opportunities in anticipating or mitigating risk. Information regarding the results of the Company's CSI for the last 3 (three) years is presented in the table below:

Penghargaan di Bidang Konsumen

Sepanjang tahun 2020, Perseroan berhasil meraih sejumlah penghargaan di bidang konsumen serta produk dan jasa, antara lain:



Penghargaan *Bronze Winner* Sub Kategori Media Cetak dari Public Relations Indonesia. / *Bronze Winner Award* for Printed Media Sub-Category from Public Relations Indonesia.



Penghargaan *Bronze Winner* Sub Kategori Website dari Public Relations Indonesia. / *Bronze Winner Award* for Website Sub-Category from Public Relations Indonesia.



Penghargaan *Silver Winner* Sub Kategori Media Sosial dari Public Relations Indonesia. / *Silver Winner Award* for Social Media Sub-Category from Public Relations Indonesia.

Awards in Consumers Sector

Throughout 2020, the Company won a number of awards in the consumer sector as well as products and services, including:

Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Konsumen

Seluruh kebijakan, strategi, dan upaya Perseroan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada konsumen tercermin pada capaian Indeks Kepuasan Pelanggan yang kian menunjukkan peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan konsistensi WIKA BETON dalam menyempurnakan produk dan jasa yang diberikan sehingga kian memperkuat kepercayaan dan loyalitas pelanggan kepada Perseroan.

Sebagai bentuk integritas kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs), penyempurnaan upaya pemenuhan tanggung jawab perusahaan kepada konsumen semakin memperkuat kontribusi yang diberikan Perseroan, yang sejalan dengan kerangka ISO 26000 Subjek Inti *Consumer Issues* dengan isu-isu utama antara lain:

- *Issue 1: Fair marketing, factual and unbiased information and fair contractual practices*
- *Issue 2: Protecting consumers' health and safety*
- *Issue 3: Sustainable consumption*
- *Issue 4: Consumer service, support, and complaint and dispute resolution*
- *Issue 5: Consumer data protection and privacy*
- *Issue 6: Access to essential services*
- *Issue 7: Education and awareness*

Sementara itu, kesesuaian tanggung jawab perusahaan kepada konsumen sejalan dengan fokus SDGs No. 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDGs No. 17 (Implementasi dan Revitalisasi Kemitraan Global).

Corporate Social Responsibility Impact on the Consumers

All policies, strategies, and efforts of the Company in fulfilling its responsibilities to consumers are reflected in the achievement of the Customer Satisfaction Index, which shows a gradual increase from year to year. This shows WIKA BETON's consistency in perfecting the products and services provided, thereby strengthening customers' trust and loyalty to the Company.

As a form of integrity towards the Sustainable Development Goals (SDGs), the refinement of efforts to fulfill corporate responsibility to consumers further strengthens the contribution made by the Company, which is in line with the ISO 26000 framework. Core Subjects *Consumer Issues* with key issues including:

- *Issue 1: Fair marketing, factual and unbiased information and fair contractual practices*
- *Issue 2: Protecting consumers' health and safety*
- *Issue 3: Sustainable consumption*
- *Issue 4: Consumer service, support, and complaint and dispute resolution*
- *Issue 5: Consumer data protection and privacy*
- *Issue 6: Access to essential services*
- *Issue 7: Education and awareness*

Meanwhile, the alignment of corporate social responsibility to the consumers is in accordance with the focus of sustainable development (SDGs): SDGs No.8 (Decent Work and Economic Growth), and SDGs No. 17 (Global Partnership Implementation and Revitalization).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Kebijakan dan Komitmen

Sebagai salah satu pemangku kepentingan Perseroan, masyarakat memegang kontribusi bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha jangka panjang. Kehadiran Perseroan di tengah masyarakat dilandasi pemahaman bahwa kegiatan operasi WIKA BETON memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya serta bentuk tanggung jawab dalam mengelola dampak yang terjadi. Dengan demikian, Perseroan dapat memberikan upaya timbal balik (*giving back*), membangun hubungan yang sinergis dan harmonis, serta mendukung kesejahteraan sosial yang lebih baik.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Strategis Perusahaan (*Strategic Corporate Social Responsibility*) didasari oleh kepatuhan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ISO 26000, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, WIKA BETON berupaya mewujudkan kontribusi dan manfaatnya melalui program yang relevan, tepat sasaran, dan berilai tambah bagi masyarakat sekitar. Adapun pelaksanaan program ini berpedoman pada kebijakan strategis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Prosedur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan No. WB-CSH-Ps-05 PROSEDUR PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL Rev. 02.

Target/Rencana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Perseroan merencanakan program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pengembangan sosial kemasyarakatan dengan membidik isu-isu yang relevan melalui program WTON Peduli, WTON Pintar, WTON Sehat, dan WTON 3R. Adapun fokus dan isu utama yang menjadi target/rencana pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan selama tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

Program / Program	Fokus Kegiatan / Activity Focus
WTON Peduli / WTON Care	Fokus utama: Penanaman pohon, Peningkatan kompetensi kader kesehatan, donor darah, posyandu, sanitasi lingkungan & air bersih / Main focus: tree planting, increasing the competence of health cadres, blood donors, posyandu, environmental sanitation & clean water
WTON Pintar / WTON Smart	Fokus utama: CID/Comdev, Bencana alam, Sumbangan dan Charity. / Main focus: CID/Comdev, Natural disasters, Donations and Charity.
WTON Sehat / WTON Healthy	Fokus utama: peningkatan kualitas SDM UNGGUL, Diklat, WTON Mengajar, Beasiswa, Goes to Campus, dll. / Main focus: improving the quality of SUPERIOR HR, Education and Training, Teaching WTON, Scholarships, Goes to Campus, etc.
WTON 3R / WTON 3R	Fokus utama: penerapan ekonomi melingkar (<i>circular economy</i>) guna memastikan pemanfaatan yang optimal & efisien semua material yang ada di dalam industri, guna mendukung keberlanjutan program pelestarian lingkungan secara global & memberikan dampak positif bagi industri dan ekonomi. / Main focus: application of a circular economy to ensure optimal & efficient use of all materials in the industry, to support the sustainability of environmental conservation programs globally & to have a positive impact on industry and the economy.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Policy and Commitment

As one of the Company's stakeholders, the community contributes to the long-term sustainability and success of the business. The presence of the Company in the community is based on the understanding that WIKA BETON's operational activities have both direct and indirect impacts on the community, so that efforts and forms of responsibility are needed in managing the impacts that occur. Thus, the Company can provide reciprocal (*giving back*) efforts, build synergistic and harmonious relationships, and support better social welfare.

The Strategic Corporate Social Responsibility policy is based on compliance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, ISO 26000, and Sustainable Development Goals.

Through the Corporate Social Responsibility program, WIKA BETON strives to realize its contributions and benefits through programs that are relevant, right on target, and have added value to the surrounding community. The implementation of this program is guided by strategic policies, namely Corporate Social Responsibility and Corporate Social Responsibility Procedures: WB-CSH-PS-05 PROCEDURES FOR MANAGING SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES Rev. 02.

Corporate Social Responsibility Targets/Plans in Social and Community Development

The Company plans a corporate social responsibility program in the field of community social development by targeting relevant issues through the WTON Peduli, WTON Pintar, WTON Sehat, and WTON 3R programs. The main focus and issues that are the targets/plans for fulfilling corporate social responsibility during 2020 are described as follows:



Kegiatan/Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Berada di bawah payung keempat pilar aktivitas Tanggung Jawab Sosial Strategis Perusahaan (*Strategic Corporate Social Responsibility*), kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan yang telah direalisasikan selama tahun 2020 antara lain:

Corporate Social Responsibility Activity/Implementation on the Social and Community Development

Under the four pillars of Strategic Corporate Social Responsibility activities, the social development activities that have been realized during 2020 include:

Pilar Program / Program Pillar	Deskripsi / Description	Uraian Kegiatan / Activity Description
WTON Peduli / WTON Care	<p>Program ini mewujudkan kepedulian Perseroan terhadap masyarakat sekitar wilayah operasi Perseroan, sesuai dengan ISO 26000 Subjek Inti Pengembangan dan Pelibatan Masyarakat (<i>Community Involvement and Development</i>) dan investasi sosial yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDGs No. 1 (Tanpa Kemiskinan) • SDGs No. 2 (Tanpa Kelaparan) • SDGs No. 10 (Berkurangnya Kesenjangan) • SDGs No. 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) • SDGs No. 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) <p>This program embodies the Company's concern for the communities around the Company's operational areas, in accordance with ISO 26000 Core Subjects Community Involvement and Development and social investment in accordance with the following Sustainable Development Goals (SDGs):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDGs No. 1 (No Poverty) • SDGs No. 2 (No Hunger) • SDGs No. 10 (Reduced Inequality) • SDGs No. 11 (Sustainable Cities and Communities) • SDGs No. 17 (Partnerships to Achieve Goals) 	<ul style="list-style-type: none"> • Santunan panti asuhan, pesantren, dan anak yatim di Kantor Pusat dan wilayah operasi Perseroan. • Bantuan sarana umum untuk masyarakat seperti sarana ibadah, lampu lalu lintas, dan lampu penerangan jalan di sekitar wilayah operasi Perseroan. • Kegiatan sosial keagamaan dalam memperingati Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Natal. • Bantuan untuk bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. • Compensation for orphanages, boarding schools and orphans children in the Head Office and the Company's operational areas. • Assistance of public facilities for the communities such as religious facilities, traffic lights and street lighting around the Company's operational areas. • Religious social activities in commemoration of Eid al-Fitr, Eid al-Adha and Christmas Day. • Assistance for natural disasters such as earthquakes.
WTON Pintar / WTON Smart	<p>Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah atau perguruan tinggi, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Program ini sesuai dengan kerangka ISO 26000 Subjek Inti Pengembangan dan Pelibatan Masyarakat dengan isu pendidikan (<i>education</i>) dan budaya (<i>culture</i>) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDGs No. 4 (Pendidikan Berkualitas) • SDGs No. 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) <p>This program aims to provide assistance to schools or colleges in order to improve the quality of education. This program is in accordance with the ISO 26000 framework Core Subjects for Community Development and Engagement with issues on education and culture as well as the following Sustainable Development Goals (SDGs):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDGs No. 4 (Quality Education) • SDGs No. 17 (Partnership for the Goals). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal, baik secara swadaya maupun sinergi kemitraan dengan pemerintah (Pelatihan kompetensi) • Beasiswa untuk Anak pegawai • Memberikan <i>Sharing Knowledge</i> ke sekolah-sekolah (WTON Mengajar) • Diklat • Fulfilling the basic needs of education for internal and external stakeholders, both independently and in partnership with the government (Competency training) • Scholarships for employees' children • Providing Sharing Knowledge to schools (WTON Mengajar) • Education and Training
WTON Sehat / WTON Healthy	<p>Program ini bertujuan untuk membantu menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar daerah operasi. Program ini sesuai dengan kerangka ISO 26000 Subjek Inti Pengembangan dan Pelibatan Masyarakat dengan isu kesehatan (<i>health</i>) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDGs No. 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) • SDGs No. 6 (Air Bersih dan Sanitas Layak) • SDGs No. 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) <p>This program aims to help maintain and improve the quality of life and health of the community in the environment around the operational area. This program is in accordance with the ISO 26000 framework Core Subjects for Community Development and Engagement with issues on health as well as the following Sustainable Development Goals (SDGs):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDGs No. 3 (Good Health) • SDGs No. 6 (Clean Water and Sanitation) • SDGs No. 17 (Partnership for the Goals). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman pohon, • Peningkatan kompetensi kader kesehatan, • Donor darah, • Posyandu, • Sanitasi lingkungan & air bersih. • <i>Covid Ranger</i> • Penyuluhan 5R selama Pandemi • Penanganan Karyawan, keluarga, dan lingkungan yang terdampak Covid-19 • Pemeriksaan rapid dan swab rutin terhadap karyawan selama pandemi Covid-19 • Tree planting, • Increasing the competence of health cadres, • Blood donation, • Posyandu, • Environmental sanitation & clean water. • <i>Covid Ranger</i> • 5R outreach during the Pandemic • Handling of employees, families, and the environment affected by Covid-19 • Regular rapid and swab tests of employees during the Covid-19 pandemic

Pilar Program / Program Pillar	Deskripsi / Description	Uraian Kegiatan / Activity Description
WTON 3R (Reduce, Reuse, Recycle) / WTON 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	<p>Program ini bertujuan untuk mengurangi, memanfaatkan ulang dan menggunakan material sisa kegiatan produksi. Program ini sesuai dengan kerangka ISO 26000 Subjek Inti Pengembangan dan Pelibatan Masyarakat dengan isu kesehatan (<i>health</i>) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDGs No. 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) • SDGs No. 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) • SDGs No. 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) • SDGs No. 13 (Penanganan Perubahan Iklim) • SDGs No. 14 (Ekosistem Laut) • SDGs No. 15 (Ekosistem Darat) • SDGs No. 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) <p>This program aims to reduce, reuse, and use materials left over from production activities. This program is in accordance with the ISO 26000 framework Core Subjects for Community Development and Engagement with issues on health as well as the following Sustainable Development Goals (SDGs):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDGs No. 3 (Good Health) • SDGs No. 6 (Clean Water and Sanitation) • SDGs No. 7 (Affordable and Clean Energy) • SDGs No. 13 (Climate Action) • SDGs No. 14 (Life Below Water), SDGs No. 15 (Life on Land) • SDGs No. 17 (Partnership for the Goals). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sisa kegiatan produksi industri digunakan untuk pemadatan jalan, pengurukan area masjid, dan pengurukan di rumah warga di sekitar wilayah operasi Perseroan. • Pemanfaatan oli bekas untuk digunakan sebagai pelumas mesin dan cetakan. • Penanaman pohon di sekitar wilayah operasi Perseroan. • Penghematan energi bahan bakar, energi listrik, gas, dan air bersih di seluruh wilayah operasi Perseroan. • Pemanfaatan air sisa kegiatan produksi untuk kegiatan pencucian material untuk digunakan penyiraman produk. • Melakukan pengelolaan dan pengawasan pada instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di seluruh wilayah operasi Perseroan. • Melakukan kegiatan penghematan dan pemanfaatan kembali kertas bekas dan barang bekas lainnya di seluruh wilayah operasi Perseroan. <ul style="list-style-type: none"> • Utilization of the rest of the industrial production is used for road compaction, backfilling of the mosque area, and backfill in the homes of residents around the Company's operational area. • Utilizing used oil to be used as engine and mold lubricants. • Planting trees around the Company's operational area. • Energy savings in fuel, electricity, gas and clean water throughout the Company's operational areas. • Utilization of residual water from production activities for washing materials for watering products. • Conduct management and supervision of wastewater management installations (IPAL) throughout the Company's operational areas. • Savings and reuse scrap paper and other used goods throughout the Company's operational areas.

Realisasi Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Pengembangan Sosial Masyarakat

Biaya yang dikeluarkan Perseroan sepanjang tahun 2020 untuk menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bidang pengembangan sosial masyarakat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Realisasi Biaya CSR per Pilar Program Tahun 2020

No.	Pilar Program / Program Pillar	Total Biaya CSR / Total CSR Cost
1	WTON Peduli / WTON Care	Rp1.160.447.304
2	WTON Pintar / WTON Smart	Rp1.749.837.350
3	WTON Sehat / WTON Healthy	Rp764.274.742
4	WTON 3R / WTON 3R	(penggunaan bahan sisa produksi menjadi dudukan cetakan (TROSTEL)) / (use of the remaining production material into a mold holder (TROSTEL))
Jumlah / Total		Rp3.674.559.396

Cost Realization for Corporate Social Responsibility on the Social and Community Development

The costs incurred by the Company throughout 2020 for carrying out Corporate Social Responsibility activities in the field of community social development are described in the table as follows:

CSR Cost Realization per Program Pillar 2020

Realisasi Biaya CSR per Unit Kerja

CSR Cost Realization per Work Unit

No.	Pilar Program / Program Pillar	Total Biaya CSR / Total CSR Cost
1	Kantor Pusat (KP) / Headquarters (KP)	Rp1.455.937.948
2	Wilayah Penjualan (WP) / Sales Area (WP)	Rp1.479.145.180
3	Pabrik Produk Beton (PPB) / Concrete Product Factory (PPB)	Rp378.938.573
4	Proyek (PRY) / Project (PRY)	Rp360.537.695
Jumlah / Total		Rp 3.674.559.396

Realisasi Biaya CSR per Jenis Kegiatan
CSR Cost Realization per Activity Type

No.	Keterangan / Description	Filantropi / Philantrophy	CID / CID	Non-CID / Non-CID
1	Kantor Pusat (KP) / Headquarters (KP)	10.000.000	0	1.445.937.948
2	Wilayah Penjualan (WP) / Sales Area (WP)	330.166.070	0	48.772.503
3	Pabrik Produk Beton (PPB) / Concrete Product Factory (PPB)	1.329.355.130	25.610.625	124.179.425
4	Proyek (PRY) / Project (PRY)	48.528.150	0	312.009.545
Jumlah / Total		1.718.049.350	25.610.625	1.930.899.421

Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bidang pengembangan sosial kemasyarakatan, Perseroan telah memelihara dampak yang nyata kepada masyarakat, membina harmonisasi yang terjalin secara dua arah antara Perseroan dan komunitas lokal, membangun citra dan reputasi WIKALABETON, serta memperkuat integritas dan komitmen Perseroan untuk mendukung kesejahteraan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Seluruh realisasi dan alokasi dana CSR dimaknai tidak hanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga sebagai investasi modal sosial yang ke depannya berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi dan penguatan reputasi WIKALABETON sebagai entitas bertanggungjawab.

Impact of Corporate Social Responsibility in the Social and Community Development

Through Corporate Social Responsibility program in the field of community social development, the Company has maintained a real impact on society, fostered two-way harmonization between the Company and the local community, built the image and reputation of WIKALABETON, and strengthened the Company's integrity and commitment to support prosperity and sustainable development goals. The entire realization and allocation of CSR funds is interpreted not only as a form of concern, but also as an investment in social capital which in the future will contribute to economic independence and strengthen WIKALABETON's reputation as a responsible entity.

\

**Referensi Isi Laporan Tahunan
dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)**

Annual Report Contents Reference
To The Financial Services Authority Regulation



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
/ Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
I. Umum / General		
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. / Annual Report is presented in good and correct Indonesian and it is recommended to present the report also in English.		✓
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. / Annual report is printed in good quality and use type and font so that the text is easy to read.		✓
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. / Annual report should state clearly the identity of the company.	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: / Name of company and year of the annual report is placed on: 1. Sampul muka; / Front cover; 2. Samping; / Side; 3. Sampul belakang; / Back cover; 4. Setiap halaman. / Every page.	✓
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan. / Annual Report is presented in the company's website.	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. / Covers the latest annual report and, at the least, the annual report of the past 4 years.	✓
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting / Key Financial Data Highlights		
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk Perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. / Business results information in comparative form over a period of 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: / The information shall include, among others: 1. Penjualan/pendapatan usaha; / Operating sales/revenues; 2. Laba (rugi); / Profit (loss): • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; / Attributable to owner of parent entity; • Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali; / Attributable to non-controlling interest; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: / Comprehensive income for the current period: • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; / Attributable to owner of parent entity; • Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali; / Attributable to non-controlling interest; 4. Laba (rugi) per saham. / Earnings (loss) per share.	16-18
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. / Financial position information in comparative form over a period of 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: / The information shall include, among others: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; / Total investment in associate entities; 2. Jumlah aset; / Total assets; 3. Jumlah liabilitas; / Total liabilities; 4. Jumlah ekuitas. / Total equity.	17
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. / Financial ratio in comparative form over a period of 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. / Information includes 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the industry the company.	17-18
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. / Share price information in the form of table and chart.	Informasi memuat: / The information shall include: 1. Jumlah saham yang beredar; / Total outstanding shares; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: / Information in the form of table shall include: • Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; / Market capitalization based on prices at Stock Exchange on which the shares are listed; • Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; / Highest, lowest, and closing prices based on prices at Stock Exchange on which the shares are listed; • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; / Share trading volume at Stock Exchange on which the shares are listed; 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: / Information in the form of chart shall include, among others: • Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; / Closing price based on prices at Stock Exchange on which the shares are listed; • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. / Share trading volume at Stock Exchange on which the shares are listed for a quarterly basis during the last 2 (two) fiscal years.	22-24
Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan / Note: If the company does not have market capitalization, share price information, and share trading volume, to be disclosed as such.		

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation		
Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. / Information on outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds within the last 2 (two) fiscal years.	<p>Informasi memuat: / The information shall include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); / Total outstanding bonds/ sukuk/ convertible bonds; 2. Tingkat bunga/imbalan; / Interest/return rate; 3. Tanggal jatuh tempo; / Maturity date; 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2017 dan 2018. / Bonds/sukuk rating in 2017 and 2018. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan. / Note: If the company does not have bonds/ sukuk/ convertible bonds, to be disclosed as such.</p>	25
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi / Reports of Board of Commissioners and Board of Directors		
Laporan Dewan Komisaris. / Report of Board of Commissioners.	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut: / Contains the following items:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; / Assessment on the performance of Board of Directors on company's management and the basis for the assessment; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; / Perspective on company's business prospects set by the Board of Directors and the basis of consideration; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; / Perspective on the implementation/management of whistleblowing system (WBS) at the company and the role of Board of Commissioners in WBS; and 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. / Changes in the composition of Board of Commissioners and the reason behind the change (if any). 	36-49
Laporan Direksi. / Report of Board of Directors.	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut: / Contains the following items:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: / Analysis on company's performance, which shall include, among others: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan strategis; / Strategic policies; • Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; / Comparisons between realizations and targets; • Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; / Obstacles faced by the company and the steps to address them 2. Analisis tentang prospek usaha; / Analysis on business prospects; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan / Development of corporate governance implementation in the fiscal year; and 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. / Changes in the composition of Board of Directors (if any) and the reason behind the change. 	50-65
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. / Signature of members of Board of Commissioners and Board of Directors.	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut: / Contains the following items:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; / Signatures are set on a separate page; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; / Statements that the Board of Commissioners and Board of Directors are fully responsible for the accuracy of the annual report; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; / Signed by all members of Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and titles/positions; 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. / A written explanation in a separate letter from the member of Board of Commissioners or Board of Directors who refuses to sign the annual report, or written explanation in a separate letter from the other members in the event that there is no written explanation provided by the concerned member. 	498-499

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
/ Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
IV. Profil Perusahaan / Company Profile		
Nama dan alamat lengkap perusahaan. / Name and address of the company	Memuat informasi antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website. / Containing information on, among others, name and address, postal code, telephone number, facsimile number, email, and website of the company.	69
Riwayat singkat perusahaan. / Brief history of the company.	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. / Includes, among others, date/year of establishment, name, change to the company's name (if any), and effective date for the change to the company's name. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan / Note: if the company has not changed its name, to be disclosed as such.	70-73
Bidang usaha. / Business lines	Memuat antara lain: / Contains, among others: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; / Company's business activities based on the latest articles of association; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; / Business activities carried out; 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. / Products and/or services generated.	76
Struktur Organisasi dalam bagan. / Organization structure in a chart.	Meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi / Contains the names and positions/titles, at the very least, one level below the Board of Directors.	92
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan. / Vision, Mission and Corporate Culture	Mencakup antara lain: / Contains, among others: 1. Visi perusahaan; / Company's vision; 2. Misi perusahaan; / Company's mission; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah di-review dan disetujui oleh Direksi/ Dewan Komisaris pada tahun buku; / Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors/Board of Commissioners in the current fiscal year; 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. / Statement on corporate culture established within the company.	88-89
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris. / Identity and brief curriculum vitae of the members of Board of Commissioners.	Memuat informasi antara lain: / Contains information on, among others: 1. Nama; / Name; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); / Position and tenure (including position at the company or other institutions); 3. Umur; / Age; 4. Domisili; / Domicile; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); / Education (Field of Study and Educational institution); 6. Pengalaman kerja (jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); / Work experience (Position, Institution, and Service Period); 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. / History of the appointment (period and position) as members of Board of Commissioners since the first appointment.	94-98
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi. / Identity and brief curriculum vitae of the members of Board of Directors.	Memuat informasi antara lain: / Contains information on, among others: 1. Nama; / Name; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); / Position and tenure (including position at the company or other institutions); 3. Umur; / Age; 4. Domisili; / Domicile; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); / Education (Field of Study and Educational institution); 6. Pengalaman kerja (jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); / Work experience (Position, Institution, and Service Period); 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. / History of the appointment (period and position) as members of Board of Directors since the first appointment.	99-103
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi. / Number of employees (comparative in 2 years) and data of employee competency development which reflects the presence of opportunity for each level of organization.	Memuat informasi antara lain: / Contains information on, among others: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; / Number of employees for each level of the organization; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; / Number of employees for each level of education; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; / Number of employees based on employment status; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; / Data of employee competency development conducted in the fiscal year, consisting party (position level) attending the training, type of training, and objective of training; 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. / Costs incurred for employee competency development in the fiscal year.	136-140

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation		
Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Komposisi Pemegang saham. / Composition of Shareholders	Mencakup antara lain: / Contains, among others: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; / Detailed name of shareholders covering 20 largest shareholders and their shareholding percentage; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: / Details of shareholders and their shareholding percentage include: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; / Names of shareholders having 5% or more shares; b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%; / Public shareholder group with share ownership each less than 5%; c. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan. / Names of Directors and Commissioners as well as their shareholding percentage, directly or indirectly. Note: if the Directors and Commissioners do not have direct or indirect shares, to be disclosed as such.	108-113
Daftar perusahaan anak dan/atau entitas asosiasi dalam bentuk tabel. / List of subsidiaries and/or associate entities in table.	Memuat informasi antara lain: / Contains information on, among others: 1. Nama perusahaan anak dan/atau asosiasi; / Name of subsidiaries and/or associate entities; 2. Persentase kepemilikan saham; / Shareholding percentage; 3. Keterangan tentang bidang usaha perusahaan anak dan/atau entitas asosiasi; / Information on the line of business of subsidiaries and/or associate entities; 4. Keterangan status operasi perusahaan anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). / Information regarding the operational status of subsidiaries and/or associate entities (already operating or not yet operating).	117-120
Struktur grup perusahaan. / Company's group structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, perusahaan anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV). / Company's group structure in a chart describing subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPVs).	116
Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. / Chronology of share issuance (including private placement) and/or share listing, from the initiation of issuance to the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: / Contains, among others: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); / Year of share issuance, number of shares, nominal value of shares, and offering price for each corporate action; 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); / Number of shares listed after each corporate action; 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. / Name of stock exchange on which the company's shares are listed Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. / Note: if the company does not have chronology of share listing, to be disclosed as such.	114-115
Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. / Chronology of other securities issuance and/or listing, from the initiation of issuance to the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: / Contains, among others: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; / Name of other securities, year of other securities issuance, interest/return rate of other securities and maturity date; 2. Nilai penawaran efek lainnya; / Issuance value of other securities; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; / Name of stock exchange on which the other securities are listed 4. Peringkat efek. / Rating of securities. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. / Note: if the company does not have chronology of other securities issuance and listing, to be disclosed as such.	115
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang. / Name and address of supporting institutions and/or professions.	Informasi memuat antara lain: / The information shall contain, among others: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; / Name and address of Share Registrar/party administrating the company's shares; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; / Name and address of Public Accounting Firm; 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. / Name and address of securities rating agency.	121



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
/ Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional. / Awards received in the last fiscal year and/or valid certificates in the last fiscal year, both of national scale and international scale.	Informasi memuat antara lain: / The information shall contain, among others: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; / Name of award and/or certificate; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; / Year in which the award and/or certificate is obtained; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; / Institution presenting the award and/or certificate; 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). / Validity period (for certification).	30
Nama dan alamat perusahaan anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). / Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any).	Memuat informasi antara lain: / Contains information on, among others: 1. Nama dan alamat perusahaan anak; dan / Name and address of subsidiaries; and 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. / Name and address of branch/representative offices. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki perusahaan anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. / Note: if the company does not have any subsidiaries, branch offices, and representative offices, to be disclosed as such.	117
Informasi pada Website Perusahaan. / Information on Company's Website.	Meliputi paling kurang: / Contains, at the very least: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; / Information on shareholders and end beneficiary; 2. Isi Kode Etik; / Contents of Code of Conduct; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; / Information on General Meeting of Shareholders (GMS) which shall include, among others, agenda to be discussed in the GMS, summary of GMS minutes, and information on important dates, namely GMS announcement date, GMS summons date, GMS date, and announcement date of summary of GMS minutes; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); / Separate annual financial statements (the past 5 years); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; / Profiles of Board of Commissioners and Board of Directors; 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. / Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	126-127
Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal. / Education and/or training activities of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): / Contains information on, at the very least (type and relevant party): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; / Education and/or training for Board of Commissioners; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; / Education and/or training for Board of Directors; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; / Education and/or training for Audit Committee; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; / Education and/or training for Nomination and Remuneration Committee; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; / Education and/or training for Other Committees; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; / Education and/or training for Corporate Secretary; 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku. / Education and/or training for Internal Audit Unit attended in the fiscal year. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan. / Note: if there is no education and/or training conducted in the fiscal year, to be disclosed as such.	128-129
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan / Management Discussion and Analysis on Company's Performance		
Tinjauan operasi per segmen usaha. / Operational overview per business segment.	Memuat uraian mengenai: / Contains description of: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha; / Each business segment of the company; 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: / Performance per business segment, among others: • Produksi; / Productions; • Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; / Increase/decrease of production capacities; • Penjualan/pendapatan usaha; / Sales/ revenues; • Profitabilitas. / Profitability.	186-186
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan, yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel). / Description of company's financial performance, which includes financial performance comparison between the current year and the previous year, and the reason behind the increase/decrease of an account (in the form of narrative and table)	Antara lain mengenai: / Includes, among others: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; / Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; / Current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities; 3. Ekuitas; / Equity; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; / Sales/revenues, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and comprehensive income for the current period; 5. Arus kas. / Cash flows;	186-215

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation		
Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. / Discussion and analysis on solvency and receivables collectability rate of the company, by presenting the calculation of ratios relevant to the company's industry.	Penjelasan tentang: / Describes: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; / Solvency, both short-term and long-term; 2. Tingkat kolektibilitas piutang. / Receivables collectability rate.	219-220
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>). / Discussion on capital structure and management's policy on capital structure.	Penjelasan atas: / Describes: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; / Details of capital structure, consisting of interest/sukuk-and-equity-based debts; 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); / Management's policy on capital structure; 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. / Basis for selecting the policy on capital structure by the management.	223-225
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir. / Discussion on material commitments for capital goods investment (not funding commitments) in the last fiscal year.	Penjelasan tentang: / Describes: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; / Party conducting the commitment; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; / Objective of the commitment; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; / Source of fund expected to meet the commitments; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; / Denomination currency; 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. / Steps taken by the Company to protect against the related foreign exchange risk. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. / Note: if the company does not have any commitment related to capital goods investment in the last fiscal year, to be disclosed as such.	225
Bahasan mengenai ikatan investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. / Discussion on capital goods investment realized in the last fiscal year.	Penjelasan tentang: / Describes 1. Jenis investasi barang modal; / Types of capital goods investment; 2. Tujuan investasi barang modal; dan / Objectives of capital goods investment; and 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. / Value of capital goods investment spent in the last fiscal year. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. / Note: if there is no realization of capital goods investment, to be disclosed as such.	225-226
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. / Information on comparison between target set at the beginning of the fiscal year and the realization, and target or projection for the next year concerning revenue, profit, and others considered important for the company.	Informasi memuat antara lain: / Contains information on, among others: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); / Comparison between target of the beginning of the fiscal year and the realization; 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. / Target or projection for the following year.	230-233
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. / Material information and fact subsequent to the date of accountant's report.	Uraian mengenai kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. / Description on significant events that take place after the date of accountant's report, including the impact on the performance and business risk in the future. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. / Note: if there is no significant events subsequent to the date of accountant's report, to be disclosed as such.	226
Uraian tentang prospek usaha Perusahaan. / Description of company's business outlook/prospects.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. / Description on company's business outlook/prospects related to the condition of industry and economy in general, complete with quantitative data from reliable sources.	227-230
Uraian tentang aspek pemasaran. / Description of marketing aspect.	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. / Description of marketing aspect of company's products and/or services, such as marketing strategy and market share.	236-237
Uraian mengenai kebijakan dividen. / Description of dividend policy.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, Memuat uraian mengenai: / Description of dividend policy and total cash dividend per share, and total dividend per year announced or paid in the last 2 (two) fiscal years. Contains information on: 1. Kebijakan pembagian dividen; / Dividend distribution policy; 2. Total dividen yang dibagikan; / Total dividend distributed; 3. Jumlah dividen kas per saham; / Total cash dividend per share; 4. <i>Payout ratio</i> ; 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. / Date of announcement and payment of cash dividend for each year. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. / Note: if there is no dividend distribution, to be disclosed as such.	237-239



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
/ Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku. / Existing employee and/or management stock option plan (ESOP/ MSOP) carried out by the company up to the fiscal year.	<p>Memuat uraian mengenai: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; / Total ESOP/MSOP shares and the realization; 2. Jangka waktu; / Term; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; / Requirements for entitled employees and/or management; 4. Harga exercise. / Exercise price. <p>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. / Note: if there is no such program, to be disclosed as such.</p>	239-241
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). / Realization of the use of proceeds from public offering (in the event the company is required to submit the report of the use of proceeds).	<p>Memuat uraian mengenai: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total perolehan dana; / Total funds obtained; 2. Rencana penggunaan dana; / Plans for the use of funds; 3. Rincian penggunaan dana; / Details of the use of funds; 4. Saldo dana; / Balance; 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). / Date of approval of GMS on the change in the use of funds (if any). <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. / Note: if there is no information on the realization of proceeds from public offering, to be disclosed as such.</p>	242
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. / Information on material transaction containing conflict of interest and/or transaction with affiliated parties.	<p>Memuat uraian mengenai: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; / Name of the parties involved in the transactions and related affiliation; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; / Explanation on fairness of transaction 3. Alasan dilakukannya transaksi; / Reason for transaction; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; / Realization of transaction in the last fiscal year; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; / Company's policy related to review mechanis of the transaction; 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. / Compliance with the related provisions. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. / If there is no transaction related to this issue, to be disclosed as such.</p>	242-246
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir. / Description of changes in laws and regulations affecting the company in the last fiscal year.	<p>Uraian memuat antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan / Title of laws and regulations undergone changes; and b. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. / The impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or statements that the impact is not significant. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. / If there is no change in the laws and regulations in the last fiscal year, to be disclosed as such.</p>	247-250
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. / Description of changes in accounting policies implemented by the company in the last fiscal year.	<p>Uraian memuat antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan akuntansi; / Changes in accounting policies; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; / Reason behind the changes in accounting policies; 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. / The quantitative impact on the financial statements. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. / Note: if there is no change in the accounting policies in the last fiscal year, to be disclosed as such.</p>	250-254
Informasi kelangsungan usaha. / Information on business continuity.	<p>Pengungkapan informasi mengenai: / Discloses information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; / Matters that potentially give significant impact on the company's business continuity in the last fiscal year. 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; / Management's assessment on matters described in number 1; 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. / Assumptions used by the management in conducting assessment. <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. / Note: In the event that there are no matters that potentially give significant impact on the company's business continuity in the last fiscal year, to disclose the underlying assumption of the management which makes them believe that there are no matters that potentially give significant impact on the company's business continuity in the last fiscal year.</p>	254-257

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation		
Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
VI. Tata Kelola Perusahaan / Good Corporate Governance		
Uraian Dewan Komisaris. / Description of Board of Commissioners.	Memuat antara lain: / Contains information on: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; / Description of responsibilities of Board of Commissioners; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; / Assessment of performance of each committee under the Board of Commissioners and basis for assessment; 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). / Disclosure of Board Charter (guidelines and work procedures of Board of Commissioners).	304-320
Komisaris Independen (jumlah minimal 30% dari total Dewan Komisaris). / Independent Commissioner (minimum amount: 30% of the total members of Board of Commissioners).	Meliputi antara lain: / Contains information on: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan / Criteria to determine Independent Commissioner; and 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. / Statement of independency of each Independent Commissioner.	313
Uraian Direksi. / Description of Board of Directors.	Memuat antara lain: / Contains information on: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi / Scope of works and responsibilities of each member of Board of Directors. 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada) / Assessment of performance of each committee under the Board of Directors (if any); 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). / Disclosure of Board Charter (guidelines and work procedures of Board of Commissioners).	324-343
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. / Assessment on GCG Implementation for 2018 fiscal year, which shall include, at the very least, the aspects of Board of Commissioners and Board of Directors	Memuat uraian mengenai: / Contains information on: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; / Criteria used in the assessment 2. Pihak yang melakukan penilaian; / Assessor 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; / Assessment score of each criteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; / Recommendation of assessment results; 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. / Reason of the lack implementation of recommendation. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan. / Note: if there is no assessment on GCG implementation for 2015 fiscal year, to be disclosed as such.	277-282
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. / Description of policy of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors.	Mencakup antara lain: / Contains information on: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; / Disclosure of proposal procedure to the determination of remuneration for the Board of Commissioners; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; / Disclosure of proposal procedure to the determination of remuneration for the Board of Directors; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; / Remuneration structure which shows remuneration component and nominal value per component for each member of Board of Commissioners; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; / Remuneration structure which shows remuneration component and nominal value per component for each member of Board of Directors; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; / Disclosure of indicator to determine the remuneration for Board of Directors. 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). / Disclosure of performance and non-performance bonuses, and/or share option received by each member of Board of Commissioner and Board of Directors (if any). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. / Note: if there are no performance and non-performance bonuses, and/or share option received by each member of Board of Commissioner and Board of Directors, to be disclosed as such.	353-356
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan). / Frequency and Attendance Rate of Meetings attended by the majority members of Board of Commissioners (at minimum once in 2 (two) months), Board of Directors (at minimum once a month), and Joint Meetings of Board of Commissioners with the Board of Directors (at minimum once in 4 (four) months).	Informasi memuat antara lain: / Contains information on: 1. Tanggal Rapat / Meeting Date 2. Peserta Rapat / Meeting Participants 3. Agenda Rapat / Meeting Agenda untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. / for each meeting of Board of Commissioners, Board of Directors, and joint meeting.	343-351

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
/ Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
<p>Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. / Information on main and controlling shareholders, both direct and indirect, up to the final individual owner.</p>	<p>Informasi dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. / Information in the form of scheme or diagram that separates the main shareholders with the controlling shareholders.</p> <p>Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. / Note: main shareholder is a party who, either directly or indirectly, has 20% (twenty percent), at the very least, votes of the entire shares with valid voting rights issued by the Company, but they are not controlling shareholders.</p>	285
<p>Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. / Disclosure of affiliation among Board of Directors, Board of Commissioners, and Main and/or Controlling Shareholders</p>	<p>Mencakup antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; / Affiliations among the members of Board of Directors; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; / Affiliations between the members of Board of Directors and members of Board of Commissioners; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; / Affiliations between the members of Board of Directors and the Main and/or Controlling Shareholders; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan / Affiliations among the members of Board of Commissioners; 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. / Affiliations between the members of Board of Commissioners and the Main and/or Controlling Shareholders. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. / Note: if there is no affiliation, to be disclosed as such.</p>	359-360
<p>Komite Audit. / Audit Committee</p>	<p>Mencakup penyampaian informasi antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; / Name, position, and tenure of members of audit committee; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; / Educational background (Field of Study and Educational institution) and work experience (Position, Institution, and Service Period); 3. Independensi anggota komite audit; / Independency of members of audit committee; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; / Description of duties and responsibilities; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan / Description of activities of audit committee conducted in the fiscal year; and 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. / Meeting frequency and attendance rate of audit committee. 	362-369
<p>Komite Nominasi dan/atau Remunerasi. / Nomination and/or Remuneration Committee.</p>	<p>Penyampaian informasi antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; / Name, position, and brief curriculum vitae of members of nomination and/or remuneration committee 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; / Independency of members of nomination and/or remuneration committee; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; / Description of duties and responsibilities; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; / Description of activities of nomination and/or remuneration committee conducted in the fiscal year; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; / Meeting frequency and attendance rate of nomination and/or remuneration committee; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan / Statement of the establishment of nomination and/or remuneration committee charter; and 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. / Policy on the succession of Board of Directors. 	369-374
<p>Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. / Other committees under the Board of Commissioners established by the company.</p>	<p>Penyampaian informasi antara lain: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; / Name, position, and brief curriculum vitae of members of other committees; 2. Independensi komite lain; / Independency of other committees; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; / Description of duties and responsibilities; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan / Description of activities of other committees conducted in the fiscal year; and 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. / Meeting frequency and attendance rate of other committees. 	375-380

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation		
Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan. / Description of duties and functions of Corporate Secretary.	Penyampaian informasi antara lain: / Contains information on: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; / Name, position, and brief work experience of corporate secretary; 2. Domisili; / Domicile; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan / Description of duties and responsibilities; and 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. / Description of duties of corporate secretary conducted in the fiscal year.	380-386
Uraian mengenai unit audit internal. / Description of internal audit unit.	Penyampaian informasi antara lain: / Contains information on: 1. Nama ketua unit audit internal; / Name of the head of internal audit unit; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; / Number of employees (internal auditors) in the internal audit unit; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; / Certification for the profession of internal auditor; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; / Position of internal audit unit in company's structure; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan / Description of activities of internal audit unit conducted in the fiscal year; and 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. / Party appointing and dismissing the head of internal audit unit.	387-397
Akuntan Publik. / Public Accountant.	Penyampaian informasi antara lain: / Contains information on: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; / Name of public accountant and the year the public accountant conducts audit activity on the annual financial statements in the last 5 years; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; / Name of Public Accounting Firm and the year the Public Accounting Firm conducts audit activity on the annual financial statements in the last 5 years; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan / Amount of fee for each service provided by the Public Accounting Firm in the last fiscal year; and 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. / Other services provided by the Public Accounting Firm and public accountant other than the audit service on annual financial statements in the last fiscal year. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. / Note: if there is no other service, to be disclosed as such.	397-399
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. / Description of company's risk management.	Mencakup antara lain: / Contains, among others: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; / Description of risk management system implemented by the company; 2. Penjelasan mengenai hasil review yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; / Description of the results of review on risk management system conducted in the fiscal year; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan / Description of the risks faced by the company; and 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. / Efforts to manage the risks.	403-410
Uraian mengenai sistem pengendalian intern. / Description of internal control system.	Penyampaian informasi antara lain / Contains information on: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; / Brief description of internal control system, covering, among others, financial and operational control; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan / Description of the conformity of internal control system with the internationally recognized framework (COSO – internal control framework); and 3. Penjelasan mengenai hasil review yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. / Description of the results of review on internal control system conducted in the fiscal year.	399-403



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
/ Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait tata kelola tanggung jawab sosial. / Description of corporate social responsibility related to governance of social responsibility	<p>Informasi meliputi: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial; / Commitment to social responsibility; 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup <i>due diligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan; / Method and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts from company's activities; 3. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan; / Key stakeholders that are impacted by or influenced by the impact from company's activities; 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan; / Significant issues of social, economic, and environment related to the impact of company's activities; 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban; / Scope of positive corporate social responsibility activities that is the obligation or exceeds the obligation of the company; 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan value untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i>; / Strategies and work programs of the company in handling social, economic, and environmental issues in the framework of stakeholders engagements and improvement of values for stakeholders and shareholders; 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan; dan / Various programs that exceed the minimum responsibilities of the company relevant to the business being carried out; and 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial. / Funds and budgets for social responsibility activities. 	442-450
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait core subject Hak Asasi Manusia. / Description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights.	<p>Informasi meliputi: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Asasi Manusia; / Commitment and policy of social responsibility regarding the core subject of Human Rights; 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Asasi Manusia; / Company's definition of the responsibility scope of the core subject of Human Rights; 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Asasi Manusia; / Corporate social responsibility planning in the field of Human Rights; 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia; dan / Implementation of CSR initiatives in the field of Human Rights; and 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia. / Achievement and awards for the CSR initiatives in the field of Human Rights. 	450-452
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait core subject Operasi yang adil. / Description of corporate social responsibility related to the core subject of fair Operations.	<p>Informasi meliputi: / Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil; / Commitment and policy of social responsibility regarding the core subject of fair Operations; 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil; / Company's definition of the responsibility scope of the core subject of fair Operations; 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil; / Corporate social responsibility planning in the field of fair Operations; 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil; dan / Implementation of CSR initiatives in the field of fair Operations; and 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. / Achievement and awards for the CSR initiatives in the field of fair operations. 	453-457

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation		
Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup. / Description of corporate social responsibility related to the environment.	Penyampaian informasi tentang: / Contains information on: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan; / Commitment and policy of social responsibility regarding the environment; 2. Informasi tentang dampak dan risiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan; / Significant impact and risk of environment related, either directly or indirectly, to the company; 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; / Activity targets/plans in 2018 established by the management; 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan; / Activities conducted in relation to the environmental programs that are relevant to the company's operations; 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup; / Implementation of CSR initiatives in the field of environment; 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain; dan / Quantitative impact of the activities, such as the use of green material and energy that can be recycled, company's waste treatment system, mechanism to submit environmental complaints, consideration of environmental aspect in providing loans to the customers, and so on; and 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. / Certification in the field of environment owned by the company.	464-464
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. / Description of corporate social responsibility related to manpower and occupational health and safety.	Mencakup antara lain informasi tentang: / Contains information on, among others: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> ketenagakerjaan; / Commitment and policy of social responsibility regarding the core subject of manpower; 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan; / Scope and definition of social responsibility in manpower; 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; / Activity targets/plans in 2018 established by the management; 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan / Activities conducted and quantitative impact of such activities; and 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. / Manpower and occupational health and safety practices, such as gender equality and work opportunity, work facilities and safety, employee turnover rate, work accident rate, remuneration, mechanism to submit employment complaints, and so on.	464-473
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. / Description of corporate social responsibility related to responsibility to customers	Mencakup antara lain: / Contains information on, among others: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; / Activity targets/plans in 2018 established by the management; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan / Activities conducted and quantitative impact of such activities; and 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. / Issues related to product responsibility, such as customer's health and safety, product information, facilities, amount and management of customer complaints, and so on.	473-476
Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat. / Description of corporate social responsibility related to social and community development.	Mencakup antara lain informasi tentang: / Contains information on, among others: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan masyarakat; / Commitment and policy of social responsibility regarding the core subject of social and community development; 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan; / Social issues that are relevant to the company; 3. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan; / Social risks managed by the Company 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan masyarakat; / Scope and definition of social responsibility in the field of social and community development; 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; / Activity targets/plans in 2018 established by the management; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; / Activities conducted and quantitative impact of such activities; 7. Biaya yang dikeluarkan; dan / Expenses; and 8. Terkait pengembangan sosial dan masyarakat, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. / Issues related to socio-community, such as the use of local manpower, empowerment of community around the company; improvement of social facilities and infrastructure, other form of donation, communication on anti-corruption policy and procedure, training on anti-corruption, and so on.	477-480

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
/ Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, perusahaan anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan. / Litigation faced by the company, subsidiaries, and members of Board of Commissioners and Board of Directors serving in the period of annual report.	<p>Mencakup antara lain: / Contains information on, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan; / Principal case/claim; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; / Status of settlement of case/claim; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan / Risk faced by the company and nominal value of case/claim; and 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). / Administrative sanction imposed on the company, members of Board of Commissioners and Board of Directors, from the related authorities (capital market, bank institutions, and others) in the last fiscal year (or statement if there is no administrative sanction imposed on the company). <p>Catatan: dalam hal perusahaan, perusahaan anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. / Note: if the company, subsidiaries, and members of Board of Commissioners and Board of Directors do not any litigation, to be disclosed as such.</p>	410
Akses informasi dan data perusahaan. / Access to company's information and data.	<p>Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. / Description on the provision of access to company's information and data for the public, such as through website (in Indonesian Language and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, and so on.</p>	411-414
Bahasan mengenai kode etik. / Discussion on code of conduct.	<p>Memuat uraian antara lain: / Contains information on, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok kode etik; / Principles of code of conduct; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; / Disclosure that code of conduct is applicable for all levels of organization; 3. Penyebarluasan kode etik; / Dissemination of code of conduct; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan / Sanction for each type of violation regulated in the code of conduct (normative); and 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. / Total violations of code of conduct as well as the sanctions imposed in the last fiscal year. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. / Note: if there is no violation of code of conduct, to be disclosed as such.</p>	415-418
Pengungkapan mengenai whistleblowing system. / Disclosure of whistleblowing system.	<p>Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: / Contains description of whistleblowing system mechanism, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pelanggaran; / Submission of violation report; 2. Perlindungan bagi whistleblower; / Protection for whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; / Management of complaint; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; / Party managing the complaint; 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan / Total incoming and processed complaints in the last fiscal year; and 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. / Sanctions/follow-up activities on the settled complaints in the fiscal year. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. / Note: if there is no incoming and processed complaints in the last fiscal year, to be disclosed as such.</p>	427-432
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. / Policy on the diversity of composition of Board of Commissioners and Board of Directors	<p>Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. / Description of written policy of the Company on the diversity of composition of Board of Commissioners and Board of Directors in terms of education (field of study), work experience, age, and gender.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. / Note: if there is no such policy, to be disclosed as such.</p>	356-359
VII. Informasi Keuangan / Financial Information		
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. / Statement of Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Responsibility for Financial Statements.	<p>Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. / Conformity to the regulations related to Responsibility for Financial Statements.</p>	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Opini auditor independen atas laporan keuangan. / Opinion of independent auditor on the financial statements.		Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements

Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation		
Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Deskripsi Auditor Independen di Opini. / Description of the Independent Auditor in the Opinion.	Deskripsi memuat tentang: / Describes: 1. Nama dan tanda tangan; / Names and signatures; 2. Tanggal Laporan Audit; dan / Date of Audit Report; and 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. / KAP and Public Accountant license numbers.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Laporan keuangan yang lengkap. / Complete financial statements.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: / Contains complete elements of financial statements: 1. Laporan posisi keuangan; / Statements of financial position; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; / Statements of profit or loss and other comprehensive income; 3. Laporan perubahan ekuitas; / Statements of changes in equity; 4. Laporan arus kas; / Statements of cash flows; 5. Catatan atas laporan keuangan; / Notes to the financial statements; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan / Comparative information about the previous period; and 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporannya (jika relevan). / Statements of financial position at the beginning of the previous period when the entity implemented an accounting policy retrospectively or prepared restatements of items in the financial statements, or when the entity reclassified the items in its financial statements (if relevant).	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Perbandingan tingkat profitabilitas. / Comparison of profitability rate.	Menampilkan perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. / Displays the comparison of performance/ profit (loss) of the current year and of the previous year.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Laporan Arus Kas. / Cash Flows Statements.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: / Complies with the following provisions: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; / Classification for three activities: operating, investing, and financing; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; / Use of direct method to report cash flows from operating activities; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan / Separated presentation of cash inflows and/or cash outflows during the current year in the operating, investing, and financing activities; and 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. / Disclosure of non-cash transaction which must be stated in the notes to financial statements.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. / Accounting Policy Highlights.	Meliputi sekurang-kurangnya: / Contains, among others: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; / Statement of compliance with the FAS; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; / Basis for calculating and preparing the financial statements; 3. Pajak penghasilan; / Income tax; 4. Imbalan kerja; dan / Employee benefits; and 5. Instrumen Keuangan. / Financial Instruments.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan transaksi pihak berelasi. / Disclosure of transaction with related parties.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: / Issues to be disclosed are: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; / Name of related parties as well as the nature of relations with related parties; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan / Value of transactions and the percentage to the related total revenues and expenses; and 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. / Balance and the percentage to the related total asset or liabilities.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements



Referensi Isi Laporan Tahunan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
/ Annual Report Contents Reference To The Financial Services Authority Regulation

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Description	Halaman / Page
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. / Disclosure of details related to taxes.	Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; / Fiscal reconciliation and calculation of current tax expenses; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; / Description of relationship between tax expenses (gains) and profit from accounting; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018; / Statement that Taxable Profit (LKP) as the result of reconciliation becomes the basis in filling out the Annual Tax Return (SPT) of Corporate Income Tax of 2018; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan / Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the statements of financial position for each presentation period, and total deferred tax expenses (gains) recognized in the statements of profit or loss if the amount is not evident in total deferred tax assets and liabilities recognized in the statements of financial position; and 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. / Disclosure of the presence of tax dispute.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. / Disclosure of details related to fixed assets.	Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are: 1. Metode penyusutan yang digunakan; / Method of depreciation used; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; / Description of the selected accounting policy, between the revaluation model and cost model; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan / Significant method and assumption used in estimating the fair value of fixed assets (for revaluation model) or disclosing the fair value of fixed assets (for cost model); 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. / Reconciliation of gross carrying amount and accumulation of depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period, by displaying: addition, deduction, and reclassification.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. / Disclosure of details related to operating segments.	Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; / General information covering the factors used in identifying the reported segments; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; / Information on profit or loss, assets, and liabilities of reported segments; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan / Reconciliation of total income of the segments, profit or loss of the reported segments, assets and liabilities of the segments, and other material elements of the segments to the related amount in the entity; and 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. / Disclosure at the entity's level, covering information on products and/or services, geographical area, and primary customers.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. / Disclosure of details related to Financial Instruments.	Hal-hal yang harus diungkapkan: / Issues to be disclosed are: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; / Details of financial instruments owned based on their classification; 2. Nilai wajar dan hierarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; / Fair value and the hierarchy for each group of financial instrument; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; / Description of risks related to the financial instruments, including market risk, credit risk, and liquidity risk. 4. Kebijakan manajemen risiko; dan / Risk management policy; and 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. / Quantitative analysis of risks related to the financial instruments.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements
Penerbitan laporan keuangan. / Publication of financial statements.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: / Issues to be disclosed are: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan / Date of financial statements authorized for publication; and 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. / Party responsible for authorizing the financial statements.	Laporan Keuangan Audited / Audited Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

RESPONSIBILITY STATEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING PT WIJAYA KARYA BETON TBK 2020 ANNUAL REPORT

Kami, anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned members of the Board of Commissioners of the Company stated that all information in 2020 Annual Report of PT Wijaya Karya Beton Tbk has been informed completely and therefore declare we are fully responsible for the information set forth.

Jakarta, April / April 2021

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Ade Wahyu
Komisaris Utama
President Commissioner

Herry Trisaputra Zuna
Komisaris
Commissioner

Heru Wisnu Wibowo
Komisaris
Commissioner

Priyo Suprobo
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Indrieffouny Indra
Komisaris Independen
Independent Commissioner

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

RESPONSIBILITY STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS REGARDING PT WIJAYA KARYA BETON TBK 2020 ANNUAL REPORT

Kami, anggota Direksi Perseroan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned members of the Board of Directors of the Company stated that all information in 2020 Annual Report of PT Wijaya Karya Beton Tbk has been informed completely and therefore declare we are fully responsible for the information set forth.

Jakarta, April / April 2021

Direksi Board of Directors Profile



Hadian Pramudita
Direktur Utama
President Director



Kuntjara
Direktur Pemasaran dan Pengembangan
Director of Marketing and Development



I Ketut Pasek Senjaya Putra
Direktur Operasi & Supply Chain
Management
Director of Operations and Supply Chain
Management



Sidiq Purnomo
Direktur Teknik & Produksi
Director of Engineering and Production



Imam Sudiyono
Direktur Keuangan, Human Capital &
Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital, and
Risk Management





LAPORAN KEUANGAN

Financial Report

08



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

DESEMBER 2020



PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

2020

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019,
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

*FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019,
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*

Daftar Isi	Halaman/ <u>Pages</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2020 and 2019</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
DIRECTOR'S STATEMENT LETTER

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. DAN ENTITAS ANAK
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. AND SUBSIDIARIES

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

NO: MJ.02.02/WB.OA.0002/2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :	Hadian Pramudita	:	<i>We Are Undersigned:</i>
Alamat Kantor :	Wika Tower, Jalan D.I. Panjaitan Kav.9 Lt 2-4 DKI Jakarta - 13340	:	Name
Alamat Domisili sesuai :	Jl Kemang Utara VIII No 46 ZZ RT.05 RW 04	:	Office Address
Kartu Identitas :	Jakarta Selatan - 12730	:	Domicile as stated in
Nomor Telepon :	021-80679200	:	ID card
Jabatan :	Direktur Utama / <i>President Director</i>	:	Phone Number
			Position
Nama :	Imam Sudiyono	:	Name
Alamat Kantor :	Wika Tower, Jalan D.I. Panjaitan Kav.9 Lt 2-4 DKI Jakarta - 13340	:	Office Address
Alamat Domisili sesuai :	Jl. Lumbu Tengah Raya No.30 RT 07 RW 28	:	Domicile as stated in
Kartu Identitas :	Bekasi - 17116	:	ID card
Nomor Telepon :	021-80679200	:	Phone Number
Jabatan :	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko/ <i>Director of Finance, Human Capital, & Risk Management</i>	:	Position

Menyatakan bahwa :

Declare that :

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the company and its subsidiaries' Consolidated Financial Statement;</i> |
| 2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The company and its subsidiaries' Consolidated Financial Statement have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the company and subsidiaries' Consolidated Financial Statement are complete and correct;</i> |
| b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The company and its subsidiaries' Consolidated Financial Statement do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anak. | 4. <i>We are responsible for the company and its subsidiaries' internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 18 Februari / February 2021

Direktur Utama /	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko/
<i>President Director</i>	<i>Director of Finance, Human Capital and Risk Management</i>



Hadian Pramudita Imam Sudiyono

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00071/2.1030/AU.1/04/0181-3/1/III/2021

RSMIndonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Wijaya Karya Beton Tbk ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 2.a, atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa efektif sejak 1 Januari 2020, Perusahaan dan entitas anak menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan dan PSAK 73: Sewa. Penerapan PSAK tersebut dilakukan secara retrospektif dengan mengakui dampak kumulatif pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020 sebagai penyesuaian saldo awal dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Kami juga membawa perhatian pada Catatan 46 atas laporan keuangan konsolidasian yang menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perusahaan dan entitas anak serta asesmen manajemen bahwa Perusahaan dan entitas anak belum dapat secara akurat memprediksi dan mengkuantifikasi seberapa lama atau sejauh mana wabah Covid-19 tersebut berdampak terhadap hasil operasi, posisi keuangan,

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Wijaya Karya Beton Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

We draw attention to Note 2.a, to the accompanying consolidated financial statements which explains that effective January 1, 2020, the Company and its subsidiaries implemented Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) 71: Financial Instruments and PSAK 73: Leases. The adoption of these PSAKs was implemented retrospectively by recognizing the cumulative effect on the date of initial implementation beginning January 1, 2020 as an adjustment to the opening balance and did not restate the comparative information.

We also draw attention to Note 46 to the consolidated financial statements which describes impact of the Covid-19 pandemic on the business and operations of the Company and its subsidiaries and the management assessment that the Company and its subsidiaries could not yet to accurately predict and quantify how long or how far the Covid-19 pandemic will affect the operating results, financial position, and cash flows of the Company

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dilakukan atas ketidakpastian tersebut.

and its subsidiaries. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the uncertainty.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Benny Andria

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181/
Public Accountant License Number: AP.0181

Jakarta, 18 Februari/February 18, 2021

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	5	1,542,217,223,256	1,602,280,750,520	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha - Bersih				Trade Receivables - Net
Pihak Berelasi	6, 38, 45	413,057,690,355	738,604,641,514	Related Parties
Pihak Ketiga	6, 45	219,680,373,484	531,444,313,944	Third Parties
Piutang Retensi - Bersih				Retention Receivable - Net
Pihak Berelasi	6	3,829,682,989	--	Related Parties
Pihak Ketiga	6	81,553,308,092	39,484,142,827	Third Parties
Pendapatan Akan Diterima - Bersih				Accrued Income - Net
Pihak Berelasi	7, 45	1,021,594,171,264	1,544,881,964,353	Related Parties
Pihak Ketiga	7	285,379,476,812	278,012,068,854	Third Parties
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Bersih				Gross Amount Due From Customer - Net
Pihak Berelasi	8, 45	12,498,198,506	--	Related Parties
Pihak Ketiga	8	185,960,369,254	461,166,732,495	Third Parties
Piutang Lain-Lain	9	18,740,129,445	21,459,194,735	Other Receivables
Pajak Dibayar di Muka	23.a	422,764,882,758	408,574,050,787	Prepaid Taxes
Persediaan	10	793,744,013,430	1,148,378,932,136	Inventories
Uang Muka	11	7,770,478,755	38,473,203,747	Advances
Biaya Dibayar di Muka	12	176,042,085,336	304,145,062,649	Prepaid Expenses
Proyek Dalam Pelaksanaan	13	63,376,220,049	52,007,487,274	Project on Progress
Jumlah Aset Lancar		5,248,208,303,785	7,168,912,545,835	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON - CURRENT ASSETS
Aset Pajak Tangguhan	23.c	26,833,922,238	3,911,023,727	Deferred Tax Assets
Investasi Entitas Asosiasi	14	33,391,081,882	30,322,603,468	Investment in Associates
Investasi Ventura Bersama	15.a	12,065,081,549	21,846,517,440	Investments in Joint Ventures
Properti Investasi	16	81,544,418,000	79,408,000,000	Investment Property
Aset Hak Guna-Bersih	17	145,328,984,266	--	Right-of-Use Assets-Net
Aset Tetap - Bersih	18	2,952,492,507,874	3,012,075,396,737	Fixed Assets - Net
Investasi Jangka Panjang Lainnya	19	9,153,000,000	21,419,000,000	Other Long Term Investment
Jumlah Aset Tidak Lancar		3,260,808,995,809	3,168,982,541,372	Total Non - Current Assets
JUMLAH ASET		8,509,017,299,594	10,337,895,087,207	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman Jangka Pendek	20	2,363,381,456,028	2,035,684,801,444	Short-Term Loan
Utang Usaha				Trade Payables
Pihak Berelasi	22, 39	94,871,038,558	39,453,506,099	Related Parties
Pihak Ketiga	22	623,302,862,933	859,093,836,233	Third Parties
Utang Pajak	23.b	50,617,644,747	116,229,962,299	Taxes Payables
Uang Muka Dari Pelanggan	24	181,621,632,942	413,497,907,030	Advances From Customer
Pendapatan Diterima di Muka	25	90,193,216,372	296,705,373,223	Unearned Revenue
Beban Akrual	26	1,254,006,182,137	2,065,504,675,825	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	27	4,432,841,183	40,937,243,638	Other Payables
Bagian Jangka Pendek dari				Current Portion of
Utang Jangka Panjang:				Short-term debt:
Pinjaman Bank	29	--	250,000,000,000	Bank Loan
Liabilitas Sewa	21	44,193,711,079	77,947,654,987	Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		4,706,620,585,979	6,195,054,960,778	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Jangka Panjang, setelah				Long-term Debt,
dikurangi bagian jangka pendek				Net of current portion
Pinjaman Bank	29	380,000,000,000	500,000,000,000	Bank Loan
Liabilitas Sewa	21	712,368,147	34,212,061,802	Lease Liabilities
Imbalan Pascakerja	28	23,636,945,033	70,514,487,962	Post-Employment Benefits
Utang kepada Ventura Bersama	15.b	7,474,401,311	--	Debt to Joint Ventures
Liabilitas Pajak Tangguhan	23.c	--	29,667,636,658	Deferred Tax Liabilities
Jumlah Utang Jangka Panjang		411,823,714,491	634,394,186,422	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		5,118,444,300,470	6,829,449,147,200	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY
Modal Saham				Capital Stock
Modal Dasar 26.680.000.000 saham, modal ditempatkan dan disetor 8.715.466.600 saham. Nilai nominal Rp100 per saham.	31	871,546,660,000	871,546,660,000	Authorized Capital 26,680,000,000 share, par value of Rp 100 per share. Issued and paid up are 8,715,466,600 shares.
Tambahan Modal Disetor	32	988,633,419,562	973,193,706,603	Additional Paid-in Capital
Saham Diperoleh Kembali	31	--	(58,246,193,143)	Treasury Stock
Saldo Laba				Retained Earnings
Ditentukan Penggunaannya	33	344,817,328,522	242,297,750,536	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	33	1,119,716,376,301	1,408,926,053,627	Unappropriated
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		3,324,713,784,385	3,437,717,977,623	Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	30	65,859,214,739	70,727,962,384	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		3,390,572,999,124	3,508,445,940,007	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		8,509,017,299,594	10,337,895,087,207	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
PENDAPATAN USAHA	35	4,803,359,291,718	7,083,384,467,587	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	36	(4,493,836,346,777)	(6,132,667,455,204)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		309,522,944,941	950,717,012,383	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	37			OPERATING EXPENSES
Beban Umum dan Administrasi		(120,347,903,640)	(145,368,001,304)	General and Administrative Expenses
Beban Pengembangan Bisnis		(3,995,065,883)	(8,219,042,470)	Business Development Expenses
Beban Pemasaran		(783,140,379)	(1,724,010,721)	Marketing Expenses
Jumlah Beban Usaha		(125,126,109,902)	(155,311,054,495)	Total Operating Expenses
LABA USAHA		184,396,835,039	795,405,957,888	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan Bunga		23,980,821,605	8,329,313,155	Interest Income
Beban Bunga		(113,196,382,597)	(146,014,430,427)	Interest Expenses
(Beban) Pemulihan Nilai Instrumen Keuangan		63,312,979,546	(9,755,627,756)	Gain (Loss) Impairment of Financial Instruments
Laba (Rugi) Selisih Kurs		(2,987,789,613)	1,378,440,238	Gain (Loss) on Foreign Exchange
Beban Pajak Final		(44,568,544,400)	(44,578,959,963)	Final Tax Expenses
Laba Bersih Entitas Asosiasi	14	3,068,478,414	4,708,602,241	Share in Profit from Associates
Laba (Rugi) Bersih Pada Ventura Bersama	15.a, 15.b	(11,704,926,040)	2,050,185,656	Share in Profit (Loss) from Joint Ventures
Perubahan Nilai Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi Lain - lain Bersih	19	(12,266,000,000)	--	Changes on Financial Assets Measured at Fair Value through Profit or Loss Others - Net
Jumlah Beban Lain-Lain		(53,892,025,070)	(169,135,413,178)	Total Other Expenses
LABA SEBELUM PAJAK		130,504,809,969	626,270,544,710	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN-BERSIH	23.d	(7,357,730,549)	(115,558,811,307)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA TAHUN BERJALAN		123,147,079,420	510,711,733,403	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi:				Items that will not be Reclassified Subsequently to Profit or Loss:
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti		(2,936,287,327)	9,094,517,722	Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities
Pajak Penghasilan Terkait	23	779,505,237	(2,234,525,047)	Related Tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		(2,156,782,090)	6,859,992,675	Total Other Comprehensive Income For the Year Net of Tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		120,990,297,330	517,571,726,078	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		128,052,492,224	512,346,720,675	Owners of The Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali		(4,905,412,804)	(1,634,987,272)	Non-Controlling Interest
JUMLAH		123,147,079,420	510,711,733,403	TOTAL
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		125,738,435,375	519,156,210,001	Owners of The Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali		(4,748,138,045)	(1,584,483,923)	Non-Controlling Interest
JUMLAH		120,990,297,330	517,571,726,078	TOTAL
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	34	14.69	58.79	BASIC EARNING PER SHARE

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Diaudit)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019 (Audited)
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Equity Attributable to Owners of the Parent Entity</i>				Saham Diperoleh Kembali/ <i>Treasury Stock</i> Rp	Jumlah/ Total Rp	Kepentingan Non Pengendali/ <i>Non Controlling Interest</i> Rp	Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp		
	Modal Ditempatkan dan Disetor/ <i>Issued and Paid up Capital</i> Rp	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid in Capital</i> Rp	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i> Ditetapkan Penggunaannya/ <i>Appropriated</i> Rp	Belum Ditetapkan Penggunaannya*/ <i>Unappropriated*</i> Rp						
Saldo tanggal 1 Januari 2019	31,32	871,546,660,000	973,193,706,603	143,194,248,877	1,134,793,746,643	(58,246,193,143)	3,064,482,168,980	72,329,841,225	3,136,812,010,205	Balance as of January 1, 2019
Dana Cadangan Bertujuan	33	--	--	99,103,501,659	(99,103,501,659)	--	--	--	--	<i>Appropriated Reserves</i>
Dividen Tunai	33	--	--	--	(145,920,401,358)	--	(145,920,401,358)	(145,937,796,276)	(145,937,796,276)	<i>Cash Dividend</i>
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	512,346,720,675	--	512,346,720,675	(1,634,987,272)	510,711,733,403	<i>Profit for the Year</i>
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	--	6,809,489,326	--	6,809,489,326	50,503,349	6,859,992,675	<i>Other Comprehensive Income</i>
Saldo tanggal 31 Desember 2019	31,32	871,546,660,000	973,193,706,603	242,297,750,536	1,408,926,053,627	(58,246,193,143)	3,437,717,977,623	70,727,962,384	3,508,445,940,007	Balance as of December 31, 2019
Dampak Penerapan SAK Baru										<i>Impact of Implementation of New SAK</i>
PSAK 71 : Instrumen Keuangan	2	--	--	--	(184,165,112,437)	--	(184,165,112,437)	(93,095,384)	(184,258,207,821)	<i>PSAK 71 : Financial Instruments</i>
PSAK 73 : Sewa	2	--	--	--	(187,001,429)	--	(187,001,429)	--	(187,001,429)	<i>PSAK 73: Lease</i>
Penyajian Kembali Saldo 1 Januari 2020	31,32	871,546,660,000	973,193,706,603	242,297,750,536	1,224,573,939,761	(58,246,193,143)	3,253,365,863,757	70,634,867,000	3,324,000,730,757	Restatement Balance as of January 1, 2020
Dana Cadangan Bertujuan	33	--	--	102,519,577,986	(102,519,577,986)	--	--	--	--	<i>Appropriated Reserves</i>
Penjualan Saham Treasuri	--	--	15,439,712,959	--	--	58,246,193,143	73,685,906,102	--	73,685,906,102	<i>Sales of Treasury Stock</i>
Dividen Tunai	33	--	--	--	(128,076,420,849)	--	(128,076,420,849)	(27,514,216)	(128,103,935,065)	<i>Cash Dividend</i>
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	128,052,492,224	--	128,052,492,224	(4,905,412,804)	123,147,079,420	<i>Profit for the Year</i>
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	--	(2,314,056,849)	--	(2,314,056,849)	157,274,759	(2,156,782,090)	<i>Other Comprehensive Income</i>
Saldo tanggal 31 Desember 2020	31,32	871,546,660,000	988,633,419,562	344,817,328,522	1,119,716,376,301	--	3,324,713,784,385	65,859,214,739	3,390,572,999,124	Balance as of December 31, 2020

* Termasuk Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti/ *Included Remeasurement of Defined Benefits Plan*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		6,000,517,078,119	6,733,691,185,868	Cash Received from Customers
Pembayaran Kepada Pemasok		(4,206,958,768,509)	(4,329,991,873,057)	Payment to Suppliers
Pembayaran Kepada Direksi dan Karyawan		(318,942,762,704)	(340,373,031,775)	Payment for Director and Employee
Penerimaan Restitusi		68,990,519,214	--	Receipt of Taxes
Pembayaran Pajak-Pajak		(526,678,407,937)	(559,573,427,319)	Payment of Taxes
Pembayaran Operasi Lainnya		(213,663,778,150)	(238,258,038,841)	Payment of Others Operating Activities
Kas Bersih Diperoleh dari				Net Cash Provided by
Aktivitas Operasi		803,263,880,033	1,265,494,814,876	Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Pembelian Aset Tetap dan Aset Hak Guna		(316,805,842,817)	(391,439,925,685)	Acquisition of Fixed Assets and Right-of-use-asset
Penjualan Aset Tetap		--	148,000,000	Disposal of Fixed Assets
Penerimaan Bunga		29,736,471,632	9,184,039,904	Interest Received
Penyertaan pada Ventura Bersama	15.b	(450,000,000)	--	Investment in joint Venture
Penerimaan dari Investasi Ventura Bersama	15a	6,000,911,158	12,000,000,000	Receipt of Investment in Joint Venture
Kas Bersih Digunakan Untuk				Net Cash Used for
Aktivitas Investasi		(281,518,460,027)	(370,107,885,781)	Investing Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman Bank		1,707,013,027,642	2,549,709,785,729	Receipt of Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank		(1,667,710,445,688)	(2,727,751,085,706)	Payment of Bank Loans
Penerimaan Pinjaman dari Pihak Berelasi		23,608,631,162	--	Loans Received from Related Parties
Pembayaran Pinjaman pada Pihak Berelasi		(35,608,631,162)	(30,000,000,000)	Loans Payment to Related Parties
Pembayaran Bunga		(110,698,365,952)	(148,626,425,566)	Interest Paid
Pembayaran Liabilitas Sewa		(76,096,110,176)	(55,398,283,223)	Payment of Lease Liabilities
Penerimaan dari Penjualan Saham Treasury	32	76,185,906,102	--	Receipt of Sales Treasury Stock
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang		--	700,000,000,000	Receipt of Long Term Bank Loans
Pelunasan Pinjaman Bank Jangka Panjang		(370,000,000,000)	(300,000,000,000)	Payment of Long Term Bank Loans
Pembayaran Dividen				Payment of Dividend
Kepada Pemegang Saham	33	(128,076,420,849)	(145,920,401,358)	to The Company's Stakeholder
Pembayaran Dividen				Payment of Dividend
Kepada Kepentingan Nonpengendali		(27,514,216)	(17,394,918)	to Non Controlling Interest
Kas Bersih Digunakan untuk				Net Cash Used for
Aktivitas Pendanaan		(581,409,923,137)	(158,003,805,042)	Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH				NET INCREASE (DECREASE)
KAS DAN SETARA KAS		(59,664,503,131)	737,383,124,053	CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas				Effect of Foreign Exchange on Cash
Pada Akhir Tahun		(399,024,133)	(118,815,199)	and Cash Equivalent at end of the Year
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA				BEGINNING BALANCE OF CASH AND
AWAL TAHUN		1,602,280,750,520	865,016,441,666	CASH EQUIVALENTS
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS PADA				ENDING BALANCE OF CASH AND
AKHIR TAHUN	5	1,542,217,223,256	1,602,280,750,520	CASH EQUIVALENTS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perusahaan"), didirikan di Jakarta dengan Akta Perusahaan Terbatas PT Wijaya Karya Beton No. 44 tanggal 11 Maret 1997, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., selaku pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya sejak tanggal 11 Maret 1997.

Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-12776.HT.01.01.TH.97 tanggal 9 Desember 1997 dan telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai Undang- Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2096/BH.09.03/1/98 tanggal 13 Januari 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 43 tanggal 29 Mei 1998 Tambahan No. 2832.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta No. 13 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.AH.01.03-0355176.

Pada tanggal 26 Maret 2014, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat No. S-174 /D.04/ 2014 untuk melakukan penawaran umum saham perdana sejumlah 2.045.466.600 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 setiap lembar saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp590 setiap saham. Termasuk didalamnya jumlah saham umum perdana kepada masyarakat adalah saham yang telah dialokasikan sehubungan dengan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA") sejumlah 61,364,000 saham baik berupa Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti Pegawai yang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No.SK.01.01/WB-0A.019/2014 tanggal 11 Februari 2014.

1. General

1.a. The Company Establishment

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("the Company"), was established in Jakarta with the Deed of a Limited Liability Company PT Wijaya Karya Beton No. 44 dated March 11, 1997, made in the presence of Achmad Bajumi, S.H., as successor of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta. The Company's started operational activities at March 11, 1997.

The deed has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with its decision No.C2-12776.HT. 01.01. TH. 97 dated December 9, 1997 and have been registered in the list of companies according to Act No. 3 of 1982 about a mandatory list of companies in the Company Registration Office of south Jakarta No.2096/BH. 09.03/1/98 dated January 13, 1998 and published in state No. 43 Gazette Supplement No. 2832 dated May 29, 1998.

The Articles of Association have been amended several times and were last amended by Deed No. 13 dated August 12, 2020 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in South Jakarta and received approval from the Indonesian Minister of Law and Human Rights No. AHU.AH.01.03-0355176.

*On March 26, 2014, the Company obtained an effective statement of the Board of Commissioner of the Financial Services Authority ("OJK") in their letter No. S-174 / D.04 / 2014 for an initial public offering of 2,045,466,600 ordinary shares with a par value of Rp100 per share offered to the public at the offering price of Rp590 per share. Including the number of initial public stock to the public is that the stock has been allocated in connection with the Employee Stock Allocation Program (*Employee Stock Allocation* or "ESA") number of 61,364,000 shares in the form of stocks and shares Ration Definitely Award Employees in accordance with the Decree of the Directors No. SK.01.01/WB-0A.019/2014 dated February 11, 2014.*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

1.b. Kegiatan Usaha Perusahaan

Sesuai Akta No. 33 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03.033.5957 Tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020, maka maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Berusaha dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lain yang terkait.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Melakukan Perencanaan, Produksi, Penjualan, Pemasangan dan Pelaksanaan Konstruksi produk-produk beton, antara lain:
 - 1) Industri Barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi
 - 2) Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang
 - 3) Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung
 - 4) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
 - 5) Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang tahan api
 - b. Melakukan usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha Sipil, Elektrikal dan *Post-tensioning*.
 - c. Melakukan Perencanaan, Produksi dan Penjualan produk/ komponen bahan bangunan.
 - d. Melakukan usaha impor dan ekspor yang terkait dengan usaha tersebut pada huruf a, b dan c di atas.
3. Selain kegiatan usaha utama tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
 - a. Pekerjaan pelaksanaan konstruksi:
 - 1) Sipil (seluruh sector pembangunan)
 - a) Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran, dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase

1.b. The Company's Activities

In accordance with the deed No. 33 dated July 23, 2020 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in South Jakarta and received approval from the Indonesian Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03.033.5957 dated August 7, 2020, the Company's aims and objectives and business activities are as follows:

1. *Perform business in concrete industry, construction services, and other related sector.*
2. *To achieve goals and purposes above, the Company can carry out business activities as follows:*
 - a. *Planning, Production, Sales, Installation and Execution of concrete products construction, such as:*
 - 1) *Lime and Cement Products for Construction Purposes Industry*
 - 2) *Foundation and Pile Installation*
 - 3) *Offshore and Floating Structure Industry*
 - 4) *Various Building Materials Trading*
 - 5) *Industry of Fire-resistant Brick, Mortar, Cement, etc*
 - b. *Performing business of Construction Planning, Execution and Supervision Services in Civil, Electrical, and Post-tensioning.*
 - c. *Undertake Planning, Production and Sale of products/ components of building material.*
 - d. *Conducting import and export related to the aforementioned business activities.*
3. *In addition to the aforesaid main business, the Company can carry out supporting business activities in order to optimize the utilization of available resources to:*
 - a. *Construction work:*
 - 1) *Civil (entire development sector)*
 - a) *Construction of Drinking Water, Wastewater, and Drainage Processing, Distribution, and Reservoir Structure*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

- | | |
|--|--|
| b) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | b) <i>Construction of Water Resource Infrastructure</i> |
| c) Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah | c) <i>Installation of Prefabricated Structure for Irrigation Channel, Communication Network, and Waste Disposal Network Construction</i> |
| d) Konstruksi Jaringan Irigasi | d) <i>Construction of Irrigation Network</i> |
| e) Konstruksi Terowongan | e) <i>Tunnel Construction</i> |
| f) Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang | f) <i>Bridge and Overpass Construction</i> |
| g) Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel | g) <i>Railway and Rail Bridge Construction</i> |
| h) Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jalan Rel | h) <i>Installation of Prefabricated Structure for Road and Railway Construction</i> |
| i) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | i) <i>Non-fishery Harbor Structure Construction</i> |
| j) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | j) <i>Harbor Structure Construction</i> |
| k) Pengerukan | k) <i>Dredging</i> |
| l) Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang | l) <i>Airplane Runway Construction</i> |
| m) Penyiapan Lahan | m) <i>Land Preparation</i> |
| n) Konstruksi Jalan Raya | n) <i>Highway Construction</i> |
| o) Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | o) <i>Train Telecommunication and Signal Construction</i> |
| p) Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai | p) <i>Sea Navigation and River Sign Telecommunication Aid Construction</i> |
| q) Pemasangan Perancah | q) <i>Scaffolding Installation</i> |
| r) Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya | r) <i>Installation of Prefabricated Structure for Other Civil Constructions</i> |
| s) Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya | s) <i>Construction of Other Electrical and Telecommunication Network</i> |
| t) Konstruksi Khusus Lainnya | t) <i>Other Distinctive Construction</i> |
| u) Konstruksi Bangunan Sipil lainnya | u) <i>Other Civil Structure Construction</i> |
| 2) Pekerjaan Gedung (seluruh sektor pembangunan) | 2) <i>Building Work (entire development sector)</i> |
| a) Konstruksi Gedung Perkantoran | a) <i>Office Building Construction</i> |
| b) Konstruksi Gedung Penginapan | b) <i>Lodging Building Construction</i> |
| c) Konstruksi Gedung Industri | c) <i>Industrial Building Construction</i> |
| d) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal | d) <i>Residential Building Construction</i> |
| e) Konstruksi Gedung Kesehatan | e) <i>Health Services Building Construction</i> |
| f) Konstruksi Gedung Pendidikan | f) <i>Educational Building Construction</i> |
| g) Konstruksi Gedung Perbelanjaan | g) <i>Commercial Building Construction</i> |

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> h) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga i) Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah j) Konstruksi Gedung Lainnya k) Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung l) Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya <p>3) Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk jaringannya</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Konstruksi Bangunan Elektrikal b) Instalasi Listrik c) Instalasi Telekomunikasi d) Instalasi Mekanikal e) Instalasi Navigasi Laut dan Sungai f) Instalasi Navigasi Udara g) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api h) Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya i) Instalasi Saluran Air (<i>Plumbing</i>) j) Instalasi Pemanas dan Geotermal k) Instalasi Minyak dan Gas l) Instalasi Konstruksi Lainnya <p>4) Pelaksanaan Pekerjaan EPI (<i>Engineering, Production, and Installation</i>), Jasa Perencanaan, <i>Feasibility Study</i>, Perancangan (<i>Design</i>), <i>Quantity Surveying</i>, <i>Project Management Services</i>, <i>Construction Management Services</i>, Pengawasan, dan Pekerjaan Rancang Bangun (<i>Design And Build</i>), yang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aktivitas Kantor Pusat b) Aktivitas Arsitektur c) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis d) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi e) Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa f) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya g) Penelitian Pasar | <ul style="list-style-type: none"> h) <i>Entertainment and Sports Building Construction</i> i) <i>Groundwater Well Construction</i> j) <i>Other Building Construction</i> k) <i>Installation of Prefabricated Structure for Building</i> l) <i>Completion of Other Building Construction</i> <p>3) <i>Works of Electrical Mechanics including its network</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Construction of Electrical Structure</i> b) <i>Electrical Installation</i> c) <i>Telecommunication Installation</i> d) <i>Mechanics Installation</i> e) <i>Sea and River Navigation Installation</i> f) <i>Air Navigation Installation</i> g) <i>Train Telecommunication and Signal Installation</i> h) <i>Highway Signs Installation</i> i) <i>Waterways (Plumbing) Installation</i> j) <i>Heater and Geothermal Installation</i> k) <i>Oil and Gas Installation</i> l) <i>Installation of Other Construction</i> <p>4) <i>Execution of EPI (Engineering, Production, and Installation) Operation, Planning Service, Feasibility Study, Design, Quantity Surveying, Project Management Services, Construction Management Services, Supervision, and Design and Build Services, such as:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Headquarters Activity</i> b) <i>Architecture Activity</i> c) <i>Engineering and Technical Consulting Activity</i> d) <i>Installation Technique Inspection Service</i> e) <i>Engineering Technology Research and Development</i> f) <i>Science and Other Engineering Technology Research and Development</i> g) <i>Market Research</i> |
|--|--|

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> h) Aktivitas Perancangan Khusus i) Jasa Pengujian Laboratorium j) Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa k) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> h) <i>Distinctive Design Activity</i> i) <i>Laboratory Testing Service</i> j) <i>Technology and Engineering Research and Development</i> k) <i>Other Professional, Scientific, and Technical Activity</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan Usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dalam bidang usaha: <ul style="list-style-type: none"> 1) Aktivitas Arsitektur; 2) Instalasi Konstruksi Lainnya; c. Melakukan Usaha Penyewaan dan Penyediaan Jasa dalam Bidang Peralatan Konstruksi, seperti: <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator 2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil 3) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya d. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak. e. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai. f. Melakukan perencanaan, penggalian, penambangan, produksi, penjualan dan perdagangan produk sumber material alam/ <i>Quarry</i>: <ul style="list-style-type: none"> 1) Penggalian Pasir 2) Penggalian Kerikil (<i>sirtu</i>) 3) Penggalian Tanah dan Tanah Liat 4) Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya 5) Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan 6) Penggalian Kuarsa/ Pasir Kuarsa 7) Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi 8) Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan dan Bahan Bangunan g. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya. h. Melakukan Perencanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian, Sewa Menyewa dan Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> b. <i>Perform Construction Planning, Execution, and Supervision in the following business fields:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Architecture Activity;</i> 2) <i>Other Construction Installation;</i> c. <i>Perform Rental and Service business in Construction Equipments sector, such as:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Construction Equipments including Operator Rental</i> 2) <i>Leasing Activity and Business Lease Without Option Right for Civil Engineering and Construction Equipments and Machineries</i> 3) <i>Leasing Activity and Business Lease Without Option Right for Other Equipments, Machineries, and Tangible Goods</i> d. <i>Carry out Fee or Contract based Commerce.</i> e. <i>Mortar and Readymix Concrete Industry.</i> f. <i>Execution of planning, drilling, mining, producing, and selling of natural resources products / Quarry:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Sand Mining</i> 2) <i>Gravel Mining</i> 3) <i>Soil and Clay Mining</i> 4) <i>Other Rock, Sand, and Clay Mining</i> 5) <i>Ornamental dan Material Stone Mining</i> 6) <i>Quartz/ Quartz Sand Mining</i> 7) <i>Mining, Digging, and Construction Machine Industry</i> 8) <i>Rock-Based Household and Building Material Products Industry</i> g. <i>Management and Disposal Of Hazardous Waste.</i> h. <i>Perform Planning, Management, Sale, Purchase, Lease and Trade In Port And Dock</i> |

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

- | | |
|---|--|
| <p>Bidang Usaha Kepelabuhan Dan Dermaga (<i>Jetty</i>), Seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut 2) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau 3) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan <p>i. Melakukan Perencanaan, Pengelolaan, Penjualan, Pembelian, Sewa- Menyewa dan Perdagangan Jasa Ekspedisi/ Usaha Angkutan Darat dan Laut, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jasa Pengurusan Transportasi 2) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api (EMKA) dan Ekspedisi Angkutan Darat (EAD) 3) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) 4) Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) 5) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum 6) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus 7) Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang 8) Angkutan Laut Dalam Negeri Trampler untuk Barang 9) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 10) Angkutan Laut Luar Negeri Liner untuk Barang 11) Angkutan Laut Luar Negeri Trampler untuk Barang 12) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus 13) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan atau Hewan 14) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus 15) Angkutan Penyeberangan Umum Antar provinsi untuk Barang 16) Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi untuk Barang 17) Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyeberangan Antar Negara | <p>(<i>Jetty</i>) Business, Such As:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Sea Port Service Activity</i> 2) <i>River and Lake Port Service Activity</i> 3) <i>Ferriage Port Service Activity</i> <p>i. <i>Perform planning, management, sale, purchase, lease and trade in land and sea expedition/ transportation services.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Transportation Management Service</i> 2) <i>Train Cargo Expedition (EMKA) and Land Transportation Expedition (EAD) Activity</i> 3) <i>Ship Cargo Expedition (EMKL) Activity</i> 4) <i>Airplane Cargo Expedition (EMPU) Activity</i> 5) <i>Motorized Transport for General Goods</i> 6) <i>Motorized Transport for Uncommon Goods</i> 7) <i>Domestic Linear Sea Transport for Goods</i> 8) <i>Domestic Trampler Sea Transport for Goods</i> 9) <i>Domestic Sea Transport for Uncommon Goods</i> 10) <i>Overseas Linear Sea Transport for Goods</i> 11) <i>Overseas Trampler Sea Transport for Goods</i> 12) <i>Overseas Sea Transport for Uncommon Goods</i> 13) <i>Lake and River Transport for General Goods and Animals</i> 14) <i>Lake and River Transport for Uncommon Goods</i> 15) <i>General Provincial Ferriage Transport for Goods</i> 16) <i>Provincial Pioneer Ferriage Transport for Goods</i> 17) <i>Other Ferriage for Goods, including Intercountry Ferriage</i> |
|---|--|

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- j. Melakukan Usaha Industri Dan Perdagangan Peralatan Produksi Beton, seperti:
 - 1) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya
 - 2) Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya
 - 3) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya
 - 4) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan perlengkapan Lainnya
- k. Industri Semen
- l. Melakukan Usaha Industri Dan Perdagangan Besi dan Baja:
 - 1) Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*)
 - 2) Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*)
 - 3) Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
 - 4) Industri Konstruksi dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya
 - 5) Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
 - 6) Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
 - 7) Industri Pengecoran Besi dan Baja
 - 8) Industri Paku, Mur dan Baut
 - 9) Industri Pembuatan Profil
 - 10) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam
 - 11) Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
- m. Melakukan Usaha Industri Dan Perdagangan Bahan Bangunan:
 - 1) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
 - 2) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
 - 3) Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
 - 4) Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu
 - 5) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

- j. *Perform business and commerce in Concrete Manufacturing Equipments Industry, such as:*
 - 1) *Commerce of Industrial and Office Machineries, its Spare Parts and Supplies*
 - 2) *Commerce of Sea Transportation Equipments, its Spare Parts and Supplies*
 - 3) *Commerce of Land Transportation Equipments (excluding cars, motorcycles, among others), its Spare Parts and Supplies*
 - 4) *Commerce of Machineries, Equipments, and other Devices*
- k. *Cement Industry*
- l. *Perform business and commerce in iron and steel industry:*
 - 1) *Iron and Steel Making Industry*
 - 2) *Steel Rolling Industry*
 - 3) *Pre-installed Steel for Building and Heavy Construction Industry*
 - 4) *Pre-installed Metal for Other Construction Industry*
 - 5) *Steel Forging, Pressing, Molding, and Forming Industry;*
 - 6) *Iron and steel pipe and pipe-joint Industry*
 - 7) *Iron and Steel Casting Industry*
 - 8) *Nail, Screw, and Bolt Industry*
 - 9) *Profile Manufacture Industry*
 - 10) *Commerce of Metal and Metal Ore*
 - 11) *Commerce of Metal for Construction Material*
- m. *Perform business and commerce in Building Material Industry:*
 - 1) *Commerce of Cement, Lime, Sand, and Rock*
 - 2) *Commerce of Other Construction Materials*
 - 3) *Retail Trade of Metal for Construction Material*
 - 4) *Retail Trade of Cement, Lime, Sand, and Rock*
 - 5) *Retail Trade of Various Building Material*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

- | | |
|---|---|
| <p>6) Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya</p> <p>n. Melakukan usaha reparasi, pabrikasi, instalasi/ pemasangan mesin dan peralatan konstruksi, seperti:</p> <p>1) Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya</p> <p>2) Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus</p> <p>3) Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri</p> <p>o. Melakukan Usaha Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di Bidang Sarana dan Prasarana Dasar (Infrastruktur) Termasuk:</p> <p>1) Aktivitas Jalan Tol</p> <p>2) Aktivitas Perusahaan Holding</p> <p>3) Trust, Pembiayaan dan Entitas Keuangan Sejenis</p> <p>4) Aktivitas Manajemen Dana</p> <p>5) <i>Real Estate</i> yang Dimiliki Sendiri atau Disewa</p> <p>p. Melakukan Usaha Identifikasi, Perencanaan, Survei, dan Investigasi Seperti Pemetaan Udara, dan Penginderaan Jauh untuk Mendukung Pekerjaan <i>Structural Health Monitoring System</i> (SHMS), Seperti:</p> <p>1) Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara</p> <p>2) Konstruksi Sentral Telekomunikasi</p> <p>4. Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat di muka dan setiap kegiatan yang berhubungan baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.</p> | <p>6) <i>Retail Trade of Other Construction Material</i></p> <p>n. <i>Perform business in Construction Equipments and Machineries repair, fabrication, and installation, such as:</i></p> <p>1) <i>Fabricated Metal Products Reparation</i></p> <p>2) <i>Equipments for Specific Purpose Reparation</i></p> <p>3) <i>Industrial Equipments and Machineries Installation</i></p> <p>o. <i>Perform Investment and/or Managerial business in basic infrastructure sector, such as:</i></p> <p>1) <i>Toll Road Activity</i></p> <p>2) <i>Holding Company Activity</i></p> <p>3) <i>Trust, Financing, and Other Similar Financial Entity</i></p> <p>4) <i>Fund Management Activity</i></p> <p>5) <i>Real Estate Ownership or Leasing</i></p> <p>p. <i>Perform business of identification, planning, survey, and investigation, such as air mapping, and remote sensing to support Structural Health Monitoring System (SHMS), such as:</i></p> <p>1) <i>Construction of Air Navigation Telecommunication</i></p> <p>2) <i>Construction of Central Telecommunication</i></p> <p>4. <i>Carry out every action that conform with aforementioned purposes and objectives, whether independently or with cooperation of other parties, under any methods that are allowed by law and regulations.</i></p> |
|---|---|

Perusahaan merupakan anak Perusahaan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan 60%. Sejak tahun 1997 Perusahaan telah menjalankan operasinya dengan dibagi atas beberapa kantor Wilayah Penjualan (WP), di mana tiap Wilayah Penjualan didukung dengan rata - rata satu Pabrik Produk Beton (PPB) dan *Quarry*, berikut ini merupakan lokasi kantor dan pabrik:

The Company is a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk with ownership of 60%. The company has been running its business nationwide since 1997, supported by several marketing offices which divided by areas of sales (WP), where each sales area are supported by Concrete Products Factory (PPB) and Quarry, the following is the location of head office, marketing offices, and factories:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Kantor Pusat	Wika Tower 1 Lt. 2-5, Jl. D.I. Panjaitan Kav 9, Jakarta, 13340	Head Office
Kantor Wilayah Penjualan		Regional Sales Office
Wilayah Penjualan I	Jl. Gunung Krakatau No. 15, Medan 20239	Sales Region I
Wilayah Penjualan II	Jl. Bambang Utoyo Rama Kasih Raya No. 957 Palembang	Sales Region II
Wilayah Penjualan III	Jl. Let. Jend MT Haryono Kav 12, Jakarta Timur	Sales Region III
Wilayah Penjualan IV	Jl. Teuku Umar No. 21, Semarang 50234	Sales Region IV
Wilayah Penjualan V	Gedung Taman Sari Papiilo It 5, Jl Ahmad Yani 176-178 Surabaya 60235	Sales Region V
Wilayah Penjualan VI	Jl. Kima Raya 11 Kav. S/4-5-6, Kawasan Industri Makassar	Sales Region VI
Wilayah Penjualan VII	Ruko BSB Blok A, Balikpapan 74110	Sales Region VII
Divisi		Division
Operasi	Jl. Let. Jend MT Haryono Kav 12, Jakarta Timur	Operation
Pengelolaan Material	Jl. Let. Jend MT Haryono Kav 12, Jakarta Timur	Management Material
Pabrik Produk Beton		Concrete Products Factory
Sumatera Utara	Jl. Binjai Km. 15,5 No. 1, Deli Serdang Sumatera Utara	North Sumatera
Lampung	Jl. Raya Kota Bumi Km. 34,5 Tegineneng, Lampung	Lampung
Bogor	Jl. Raya Narogong Km. 26 Cileungsi, Bogor 16820	Bogor
Majalengka	Jl. Raya Brujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka 45454	Majalengka
Boyolali	Jl. Raya Boyolali - Solo Km. 4,5 Mojosongo, Boyolali	Boyolali
Pasuruan	Jl. Raya Kejapanan No. 323 Gempol, Pasuruan 67155	Pasuruan
Sulawesi Selatan	Jl. Kima Raya 11 Kav. S/4-5-6 Kawasan Industri Makassar, Makassar 90241	South Sulawesi
Karawang	Jl. Surya Madya III Kav. 134 Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang Timur	Karawang
Lampung Selatan	Jl. Wijaya Karya Beton Desember Sumur Ketapang Lampung Selatan 35596	South Lampung
Subang	Jl. Raya Pabuaran - Cipeundeuy KM.3.5 Kp. Sukamukti, Subang 41272	Subang
Pabrik Pengolahan Material Alam		Quarry Crushing Plant
Crushing Plant Bogor	Jl. Raya Parung Panjang, Mekarjaya, Cigudeg, Bogor	Bogor Crushing Plant
Crushing Plant Lampung Selatan	Jl. Wijaya Karya Beton, Desember Sumur Ketapang, Lampung Selatan, 35596	Lampung Selatan Crushing Plant
Crushing Plant Palu	Jl. Trans Palu - Donggala KM 23 Desember Lolidondo Kec. Banawa kabupaten Donggala Sulawesi Tengah	Palu Crushing Plant

1.c. Entitas Anak

PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKAKOBE)

WIKAKOBE didirikan sebagai bentuk kerja sama antara Perusahaan dengan PT Komponindo Betonjaya, dimana Perusahaan memiliki penyertaan saham sebesar 51%.

WIKAKOBE didirikan di Jakarta dengan Akta Perusahaan Terbatas PT Wijaya Karya Komponen Beton No. 18 tanggal 10 Mei 2012, dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris, di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-25815.AH.01.01 tanggal 14 Mei 2012. Perubahan Anggaran Dasar WIKAKOBE terakhir dimuat dalam Akta No. 38 tanggal 22 Maret 2019 dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.0017194.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 28 Maret 2019.

Akta perubahan pengurus terakhir dalam Akta Notaris No. 2 tanggal 3 September 2018, dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0241958 tertanggal 13 September 2018.

1.c. Subsidiaries

PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKAKOBE)

WIKAKOBE was founded as a form of cooperation between the Company and PT Komponindo Betonjaya, where the Company hold 51% ownership share participation.

WIKAKOBE, was founded at Jakarta based on Limited Liability Company Deed No. 18 dated May 10, 2012, made in presence of Karin Christiana Basoeki, S.H., Notary in Jakarta. The Deed has been approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia No. AHU-25815.AH.01.01 dated May 14, 2012. The latest amendment in the articles of Association of WIKAKOBE is written in deed No. 38 dated March 22, 2019, made in presence of Karin Christiana Basoeki, S.H., Notary in Jakarta. The Deed has been approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.0017194.AH.01.02 dated March 28, 2019.

The deed was last amended by Notarial Deed No. 2 dated September 3, 2018, made in presence of Karin Christiana Basoeki, S.H., Notary in Jakarta, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0241958 dated September 13, 2018.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

WIKA KOBE berdomisili di Karawang, Jawa Barat dan bergerak dalam bidang industri beton pracetak, perdagangan, dan kegiatan usaha lain yang terkait.

WIKA KOBE is domiciled in Karawang, West Java, and engaged in precast concrete industry, trade and other related business activity.

Berdasarkan Anggaran Dasar WIKA KOBE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

According to WIKA KOBE article of Association, the capital and shareholder's structure is as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Nilai Nominal/ Par Value		
	Saham/ Shares	Rupiah Penuh/ Full in Rupiah	%
Modal Dasar/ Authorized Capital	374,000	374,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Paid in Capital			
PT Wijaya Karya Beton Tbk	47,685	47,685,000,000	51
PT Komponindo Beton Jaya	45,815	45,815,000,000	49
Jumlah/ Total	93,500	93,500,000,000	100
Saham dalam Portepel/ Portfolio Stock	280,500	280,500,000,000	

Ikhtisar Data Keuangan

Financial Data Summary

	2020 Rp	2019 Rp	
Jumlah Aset	170,123,582,296	132,699,967,159	Total Assets
Jumlah Liabilitas	79,076,077,750	35,556,209,725	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	91,047,504,546	97,143,757,434	Total Equity
Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif	(6,096,252,888)	(4,252,892,627)	Total Comprehensive (Loss) Income

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA KRATON)

WIKA KRATON didirikan pada tanggal 16 Desember 2013 sesuai dengan Akta Notaris Indrajati Tandjung, S.H., No. 16 di Cilegon dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-02372.AH.01.01. tanggal 17 Januari 2014. WIKA KRATON berdomisili di Cilegon, Banten dan bergerak dalam bidang industri beton pracetak, perdagangan, dan kegiatan usaha lain yang terkait.

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKA KRATON)

WIKA KRATON was established on December 16, 2013 in accordance with Notarial Deed No. 16 by Indrajati Tandjung, S.H., in Cilegon and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-02372.AH.01.01 dated January 17, 2014. WIKA KRATON is domiciled in Cilegon, Banten, and engaged in precast concrete, trade and industry.

Perubahan Anggaran Dasar WIKA Kraton terakhir dimuat dalam Akta No. 61 tanggal 29 Agustus 2019 dibuat dihadapan Suherman, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0061529.AH.01.02 tertanggal 30 Agustus 2019.

The latest amendment in the articles of Association of WIKA Kraton is written in deed No. 61 dated August 29, 2019, made in presence of Suherman, S.H., M.Kn., Notary in Bekasi and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0061529 dated August 30, 2019.

Terjadi perubahan susunan pengurus perusahaan sesuai Akta pernyataan keputusan rapat WIKA KRATON No. 20 tanggal 16 Desember 2019, oleh Notaris Miki Tanumiharja, S.H. di Jakarta.

There is a change in the composition of the management of the company in accordance with the deed of WIKA KRATON No. 20 dated December 16, 2019, by Notary Miki Tanumiharja, S.H., in Jakarta.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham WIKA KRATON adalah sebagai berikut:

The WIKA KRATON's capital structure and shareholder is as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Nilai Nominal/ Par Value		
	Saham/ Shares	Rupiah Penuh/ Full in Rupiah	%
Modal Dasar/ Authorized Capital	175,000	175,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Paid in Capital			
PT Wijaya Karya Beton Tbk	32,400	32,400,000,000	60
PT Krakatau Engineering	16,200	16,200,000,000	30
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5,400	5,400,000,000	10
Jumlah/ Total	54,000	54,000,000,000	100
Saham dalam Portepel/ Portfolio Stock	121,000	121,000,000,000	

Ikhtisar Data Keuangan

Financial Data Summary

	2020 Rp	2019 Rp	
Jumlah Aset	115,527,230,813	108,100,071,390	Total Assets
Jumlah Liabilitas	65,849,592,540	53,892,936,315	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	49,677,638,273	54,207,135,075	Total Equity
Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif	(4,529,496,802)	972,094,010	Total Comprehensive (Loss) Income

PT Citra Lautan Teduh (CLT)

Pada tanggal 12 September 2014, Perusahaan mengakuisisi 90% saham CLT yang berdomisili di Batu Besar, Batam. Kemudian, pada tanggal 5 Desember 2014, Perusahaan menambah akuisisi atas CLT menjadi 99.5 % saham. CLT bergerak dalam sektor perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha terkait.

PT Citra Lautan Teduh (CLT)

On September 12, 2014, the Company acquired 90% of CLT share, where domiciled in Batu Besar, Batam. Then on December 5, 2014, the Company enlarge its acquisition of CLT to 99.5 % share. CLT is engaged in the concrete trade and industry, construction and related business.

Anggaran Dasar telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir yaitu mengenai perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan pada Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Miki Tanumiharja, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0096839.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 21 November 2019.

The Articles of Association have been amended several times, the latest regarding the changes of Company's Business Activities in the Deed of Amendment of Articles of Association No.76 dated October 24, 2019 made in presence of Miki Tanumiharja, S.H., notary in South Jakarta. The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree No. AHU-0096839.AH.01.02-TAHUN 2019 dated November 21, 2019.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CLT adalah sebagai berikut:

The CLT's capital structure and shareholder is as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Nilai Nominal/ Par Value		
	Saham/ Shares	Rupiah Penuh/ Full in Rupiah	%
Modal Dasar/ Authorized Capital	3,738,692,000	373,869,200,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Paid in Capital			
PT Wijaya Karya Beton Tbk.	929,999,635	92,999,963,500	99.5
Kopkar Beton Makmur Wijaya	4,673,365	467,336,500	0.5
Jumlah/ Total	934,673,000	93,467,300,000	100
Saham dalam Portepel/ Portfolio Stock	2,804,019,000	280,401,900,000	

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Ikhtisar Data Keuangan

Financial Data Summary

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Jumlah Aset	513,884,820,362	619,867,822,367	Total Assets
Jumlah Liabilitas	184,754,685,290	288,764,539,611	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	329,130,135,072	331,103,282,756	Total Equity
Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif	9,871,216,306	22,011,372,971	Total Comprehensive (Loss) Income

1.d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Dewan Komisaris

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) No. AHU-AH.01.03-0355176 tanggal 19 Agustus 2020.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21 tanggal 9 April 2019 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) No. AHU-AH.01.03-0197300 tanggal 10 April 2019.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

1.d. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Board of Commissioner

As stated in the Deed No. 13 dated August 12, 2020, made in presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta and has been received and recorded in the database Legal Entity Administration System (SABH) No. AHU-AH.01.03-0355176 dated August 19, 2020.

As stated in the Deed No. 21 dated April 9, 2019, made in presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta and has been received and recorded in the database Legal Entity Administration System (SABH) No. AHU-AH.01.03-0197300 dated April 10, 2019.

The composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

2020

Ade Wahyu
Herry Trisaputra Zuna
Heru Wisnu Wibowo
Priyo Suprobo
Indrieffouny Indra

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Direksi

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) No. AHU-AH.01.03-0355176 tanggal 19 Agustus 2020.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21 tanggal 9 April 2019 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) No. AHU-AH.01.03-0197300 tanggal 10 April 2019.

Susunan Dewan Direksi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama
Direktur Pemasaran
dan Pengembangan
Direktur Keuangan, *Human Capital*
dan Manajemen Risiko
Direktur Operasi
dan *Supply Chain Management*
Direktur Teknik
dan Produksi

2020	
Hadian Pramudita	Kuntjara
Imam Sudiyo	I Ketut Pasek Senjaya Putra
Sidiq Purnomo	

President Director
Director of Marketing
and Development
Director of Finance, Human Capital
and Risk Management
Director of Operations
and Supply Chain Management
Director of Engineering
and Production

Direktur Utama
Direktur Pemasaran
Direktur Keuangan
Direktur Human Capital dan
Produksi
Direktur Operasi
Direktur Teknik dan
Pengembangan

2019	
Hadian Pramudita	Kuntjara
Imam Sudiyo	Mursyid
I Ketut Pasek Senjaya Putra	Sidiq Purnomo

President Director
Marketing Director
Director of Finance
Director of Human Capital
and Production
Director of Operations
Director of Engineering
and Development

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.02/DK-WB/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 *juncto* No.SK.05/DK-WB/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019, *juncto* No. SK.09/DK-WB/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan SK.07./DK-WB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 susunan Komite Audit tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Directors

As stated in the Deed No. 13 dated August 12, 2020, made in presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta and has been received and recorded in the database Legal Entity Administration System (SABH) No. AHU-AH.01.03-0355176 dated August 19, 2020.

As stated in the Deed No. 21 dated April 9, 2019, made in presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta and has been received and recorded in the database Legal Entity Administration System (SABH) No. AHU-AH.01.03-0197300 dated April 10, 2019.

The composition of the Board of Directors as of December 31, 2020, and 2019 are as follows:

Directors

Audit Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK.02/DK-WB/IV/2019 dated April 29, 2019 *juncto* No.SK.05/DK-WB/VI/2019 dated June 20, 2019, *juncto* No. SK.09/DK-WB/XII/2019 dated 30 December 2019, and SK.07./DK-WB/IV/2020 dated May 5, 2020 the composition of the Audit Committee on December 31, 2020 and 2019 are as follows:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Komite Audit

	<u>2020</u>
Ketua	Priyo Suprobo
Anggota	Indrieffouny Indra
Anggota	Gunarto

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Komite Audit

	<u>2019</u>
Ketua	Asfiah Mahdiani
Anggota	Yustinus Prastowo
Anggota	Gunarto

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. SK.02.01/WB-0A.315/2017 tanggal 11 Agustus 2017, Sekretaris Perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 adalah Yuherni Sisdwi Rachmiyati.

Corporate Secretary

Based on the decree of the Board of Directors No. SK.02.01/WB-0A.315/2017 dated August 11, 2017, the Corporate Secretary on December 31, 2020 is Yuherni Sisdwi Rachmiyati.

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris, Direksi Perusahaan, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Perusahaan dan Manajer Biro.

Key management personnel are the Company's Boards of Commisisoners, Directors, Head of Internal Audit, Corporation Secretary and Bureau Manager.

Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners and Directors Remuneration December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Dewan Komisaris

Board of Commissioner

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	Rp	Rp	
Imbalan Jangka Pendek	4,103,775,000	4,392,603,000	Short-Term Benefit
Imbalan Pascakerja	795,656,250	857,891,250	Post-employment benefit
Jumlah	<u>4,899,431,250</u>	<u>5,250,494,250</u>	Total

Direksi

Directors

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	Rp	Rp	
Imbalan Jangka Pendek	8,539,500,000	10,015,650,000	Short-Term Benefit
Imbalan Pascakerja	1,640,187,500	1,819,012,500	Post-employment Benefit
Jumlah	<u>10,179,687,500</u>	<u>11,834,662,500</u>	Total

Jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 1.444 orang dan 1.492 orang (tidak diaudit).

Total employees as of December 31, 2020 and 2019 are 1,444 person and 1,492 person respectively (unaudited).

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

2. Adoption of New and Revised Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of PSAK ("ISAK")

2.a. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah;
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

2.a. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the year starting on or after January 1, 2020, are as follows:

- PSAK 71: Financial Instrument;
- PSAK 72: Revenue from Contract with Customer;
- PSAK 73: Lease;
- PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract;
- PSAK 15 (Amendment 2017): Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures;
- PSAK 71 (Amendment 2018): Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation;
- ISAK 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;
- PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;
- PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;
- PSAK 102 (Revised 2019): Accounting for Murabahah;
- ISAK 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;
- ISAK 102: Impairment on Murabahah Receivable;
- ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases
- PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting; and
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan hasil kajian Perusahaan terhadap dua kriteria dalam menentukan klasifikasi aset keuangan, terdapat perubahan klasifikasi dan pengukuran investasi jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur dengan metode biaya menurut PSAK 55 berubah menjadi klasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai PSAK 71.

Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Perusahaan pada awal penerapan PSAK 71.

Berikut adalah tabel nilai tercatat aset keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 55 dan PSAK 71, serta penyesuaian saldo laba pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Except for the changes described below, the implementation of these standards did not result in a substantial change in the Company's accounting policies and had no material impact on the financial statements of the current year or previous year.

PSAK 71: Financial Instruments

PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

In accordance with the transitional requirements on PSAK 71, the Company chose to apply retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information

Based on the results of the Company's review of the two criteria in determining the classification of financial assets, there is a change in classification and measurement of long-term investments classified as available for sale and measured using the cost method under PSAK 55 are changed to the classification of financial assets at fair value through other comprehensive income in accordance with PSAK 71.

Changes in the approach to calculating impairment of financial assets have an impact on the carrying value of the Company's financial assets at the beginning of the implementation of PSAK 71.

The following is a table of the carrying values of financial assets based on the provisions of PSAK 55 and PSAK 71, as well as adjustments to retained earnings on the initial application date of January 1, 2020:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Berdasarkan PSAK 55/ <i>Based on PSAK 55</i>	Penyesuaian Saldo Laba/ <i>Adjustment to Retained Earnings</i>	Berdasarkan PSAK 71/ <i>Based on PSAK 71</i>	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Piutang Usaha - Bersih				Trade Receivables - Net
Pihak Berelasi	738,604,641,514	(98,845,864,474)	639,758,777,040	Related Parties
Pihak Ketiga	570,928,456,771	(44,461,148,146)	526,467,308,625	Third Parties
Pendapatan Akan Diterima	1,822,894,033,207	(76,300,394,353)	1,746,593,638,854	Accrued Income
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	461,166,732,495	(23,819,561,329)	437,347,171,166	Gross Amount Due From Customer
Aset Pajak Tangguhan	7,589,321,895	59,168,760,481	66,758,082,376	Deferred Tax Assets
Jumlah	3,601,183,185,882	(184,258,207,821)	3,416,924,978,061	Total
EKUITAS				EQUITY
Saldo Laba				Retained Earnings
Belum Ditentukan Penggunaannya	1,408,926,053,627	(184,165,112,437)	1,224,760,941,190	Appropriated
Kepentingan Nonpengendali	70,727,962,384	(93,095,384)	70,634,867,000	Non-controlling Interest
Jumlah	1,479,654,016,011	(184,258,207,821)	1,295,395,808,190	Total

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Perusahaan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Perusahaan terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Perusahaan sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah

PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers

PSAK 72 replaces PSAK 23: "Revenue" and introduces 5 (five)-step model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

The Company applies PSAK 72 retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Based on the review that the Company has conducted on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages in PSAK 72, there is no significant impact on the financial statements so it does not require adjustments in the opening balance on January 1, 2020.

PSAK 73: Leases

PSAK 73 replace PSAK 30: "Leases", which requires the Company as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases with low-value assets.

The Company has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, which are discounted using the Company's incremental loan interest rate as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liabilities adjusted for the amount of prepayments or

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal penerapan awal, Perusahaan juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020;
- Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

Dampak penerapan awal PSAK 73: Sewa terhadap saldo awal 1 Januari 2020 adalah pengakuan aset hak-guna bangunan sebesar Rp5.246.909.260, penambahan liabilitas sewa sebesar Rp5.059.907.831 dan penyesuaian saldo laba sebesar Rp187.001.429.

2.b. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 73 (Amandemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

lease payments accrued in connection with a lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019

At the initial implementation date, the Company also adopted the following practical policies:

- *Using a single discount rate on lease portfolios with fairly similar characteristics;*
- *Rely on previous assessments of whether leases are onerous as an alternative to undertaking an impairment review, that there are no aggravating contracts as of 1 January 2020;*
- *Opting out of the requirement for leases whose leases expire within 12 months from the date of initial application. Record these leases in the same manner as short-term leases and include the costs associated with those leases in the disclosure of short-term lease expenses in the annual reporting period covering the date of initial application.*

The impact of first implementation of PSAK 73: Leases on the beginning balance as per January 1, 2020 for right-of-use building are Rp5,246,909,260, additional lease liabilities are Rp5,059,907,831 and adjustment of retained earnings are Rp187,001,429.

2.b. New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2020.

Amendments to standard effective for periods beginning on or after June 1, 2020, with early adoption is permitted is:

- *PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Rent Concessions related to Covid-19.*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2.

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 112: Accounting for Endowments;*
- *PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;*
- *PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;*
- *PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and*
- *Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2.*

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks; and*
- *Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs*

New standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 74: Insurance Contract.*

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan

3.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan

3. Significant Accounting Policies

3.a. Compliance Statements

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

3.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

3.b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the return given in exchange for assets.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas diklasifikasikan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Consolidated cash flows are prepared based on direct method by classifying cash flow from operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Company. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

3.c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Grup (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

3.c. The Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Group. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control as listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the noncontrolling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the noncontrolling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
- c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

If the Group loses control, the Group:

- a) *Derecognized the asset (including goodwills) and liabilities of the subsidiaries at their carrying amount at the date when the contract is lost;*
- b) *Derecognized the carrying amount of any none controlling interest in the for more subsidiaries at the date when the control is lost (including any component of other comprehensive income attributeable to none controlling interest);*
- c) *Recognized fair value of the payment received, if any, from the transaction, event or circumstances that result in the lost of control;*
- d) *Recognized any investment retained in the formal subsidiaries at fair value at the date when the control is lost;*
- e) *Reclasifies to profit and loss, or transfer directly to retained earning if recuired by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiaries;*
- f) *Recognized any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

3.d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas dalam Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap individu entitas Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter diukur dalam biaya historis yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
USD	14.105	13.901	USD
Euro	17.330	15.589	Euro
SGD	10.644	10.321	SGD
JPY	136	128	JPY
GBP	19.085	18.250	GBP

3.d. Transactions and Balances in Foreign Currency

The individual financial statements of each Group's entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of each individual Group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange rate differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

Transactions during the years in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e., middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2020 and 2019, respectively are as follows:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

3.e. Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor atau;
 - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka 1.;
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam angka 1.a memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas) ;

3.e. Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

1. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - a. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - b. *Has a significant influence upon the reporting entity or;*
 - c. *Is a member of key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
2. *An entity is related to reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - a. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - b. *One entity is an associations or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - c. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - d. *One entity is a joint venture of the third entity and other entity is an associate of the third entity;*
 - e. *The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the provider itself, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - f. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in 1.;*
 - g. *A person identified in 1.a has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

- h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

3.f. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

**3.g. Instrumen Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

- h. *The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government-related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes.

3.f. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement and are not issued as collateral and are not restricted in use.

**3.g. Financial Instrument
Initial Recognition and Measurement**

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran selanjutnya aset keuangan perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent measurement of financial assets accounting treatment before January 1, 2020

The Company and its subsidiaries' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii. Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) *those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
- (b) *those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
- (c) *those for which the holder may not recover substantially all of its initial*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as loans and receivables, held to maturity investments or financial assets at FVTPL.

On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cumulative gain or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.

The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and derivatives that are linked to and must be settled by delivery of such unquoted equity investments are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Perlakuan Akuntansi Sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiaries' rights to receive the dividends are established.

Accounting Treatment Since January 1, 2020

The Group financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

(i) Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) *The objective of the Company's business model to hold the financial assets is only to collect contractual cash flows; and*
- (2) *The contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian,

(ii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- (1) The objective of business model to hold the financial assets is to collect contractual cash flows and to sell the assets; and
- (2) The contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

(iii) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari
2020**

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan;
- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

**Impairment of Financial Assets
Accounting treatment before January 1,
2020**

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization;
- observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group and its subsidiaries' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti obyektif sebagai akibat adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan terdampak.

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada *FVTOCI*, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Accounting treatment since January 1, 2020

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

*The Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at *FVTOCI*, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts. Financial asset in form of investment in equity instrument is not impaired.*

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 month expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada *FVTOCI* yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "*investment grade*" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.*

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with 'investment grade' according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Derecognition of Financial Assets

The Group and its subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group and its subsidiaries neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Group and its subsidiaries recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Group and its subsidiaries retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group and its subsidiaries continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

**Reklasifikasi
Perlakuan akuntansi sebelum
1 Januari 2020**

Grup dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is reclassified to profit or loss.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Group and its subsidiaries retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Group and its subsidiaries allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

**Reclassification
Accounting treatment before
January 1, 2020**

The Group and its subsidiaries shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group and its subsidiaries as at fair value through profit or loss. The Group and its subsidiaries may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group and its subsidiaries shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori *FVTPL*, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori *FVTPL* menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi

If, as a result of a change in the Group and its subsidiaries' intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for-sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Accounting treatment since January 1, 2020

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

*When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through profit or loss, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from *FVTPL* into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.*

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through other comprehensive income,

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

kategori *FVTOCI*, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori *FVTOCI* menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran *FVTPL* menjadi kategori pengukuran *FVTOCI*, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori *FVTOCI* menjadi kategori pengukuran *FVTPL*, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through profit or loss into fair value through other comprehensive income, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into fair value through profit or loss, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Classification as Liabilities or Equity
Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak terutama terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang lain-lain, dan pinjaman bank jangka panjang.

Pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang lain-lain, dan pinjaman bank jangka panjang pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian premium atau diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries' financial liabilities mainly consist short-term loans, account payables, accrued expenses, other payables, and long-term payables.

Short-term loans, account payables, accrued expenses, other payables, and long-term payables are initially measured at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

After initial recognition, if the carrying amount is different from the nominal value caused by the premium or discount, then the difference is amortized on straight-line basis over the period of the sukuk ijarah.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries derecognize financial liabilities, if and only if the Company and its subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

3.h. Tagihan Bruto Kepada Pemberi kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan dan belum ditagihkan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1)*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2)*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

3.h. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents receivable originated from construction contract in progress and not yet billed. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

3.i. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi sampai menjadi produk jadi.

Persediaan bahan baku, suku cadang, BBM dan pelumas diakui berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan (menggunakan metode rata-rata tertimbang) dan nilai realisasi bersih, sedangkan untuk persediaan barang jadi dinilai berdasarkan harga perolehan dikarenakan semua persediaan barang jadi merupakan barang pesanan (*job ordered*). Manajemen menetapkan untuk persediaan yang bukan merupakan kategori kelompok bahan baku dan persediaan yang telah kadaluarsa yang sebelumnya tercatat dalam persediaan bahan baku, dikoreksi dan dibebankan sebagai biaya.

3.j. Uang Muka Diterima

Uang muka diterima merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sesuai dengan kontrak yang akan dikompensasikan secara proporsional dengan tagihan.

3.k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan aset, pada saat manfaat diterima.

Biaya dibayar di muka terdiri dari biaya usaha, biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya sewa akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui pada setiap periode, sedangkan biaya dibayar dimuka atas sewa diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

3.l. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Pengaturan Bersama

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan aset atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

3.i. Inventory

Inventories are assets in the form of materials or equipment to be used in the production process to a finished product.

Inventories of raw materials, spare parts, fuel and lubricants are recognized at the lower of cost (using the weighted average method) and net realizable value, while for finished goods inventory valued at cost because all the inventory of finished goods are goods orders (job ordered). Management set for the inventory that is not a category of raw materials and supplies that have expired and previously listed in the inventory of raw materials, are corrected and accounted for as expenses.

3.j. Advances Received

Advances received is an advance received from customer in accordance with the contract will be proportionally compensated to the bill.

3.k. Prepaid Expense

Prepaid expenses are costs that have been paid but have not yet recognized as expense, it will be recognized as expense in the coming period, when the benefit is received.

Prepaid expenses, which consist of operating expenses, production costs, distribution costs, and rental fees, will be charged in proportion to revenue recognized in each period, while the prepaid rent are amortized over the useful life of each expense with a straight-line method.

3.l. Investments in Associates and Joint Arrangement

Associates

Associates are entities in which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or jointly control over those policies (significant influence).

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* akan mengurangi nilai tercatat investasi.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- a. Jika investasi menjadi entitas anak, dan
- b. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan atas dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan aset sebagai:

Ventura Bersama

Grup mengklasifikasikan pengaturan aset sebagai ventura aset yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian aset atas pengaturan memiliki hak atas aset netto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai *venturer* bersama.

Investment in associates is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted by the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee will reduce the carrying amount of the investment.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- a. *If the investment becomes a subsidiary, and*
- b. *If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value.*

When the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classifies joint arrangement as:

Joint Venture

The Group classifies joint arrangement as a joint venture whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

A joint venturer recognise its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

3.m. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk menaikkan nilai atau kedua-duanya dan bukan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan bisnis normal.

3.m. Investment Properties

Investment properties are properties (land or building or part of a building or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya, termasuk biaya transaksi, setelah dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Nilai wajar properti investasi ditentukan berdasarkan laporan penilai independen yang dilakukan setiap tahun berdasarkan keputusan manajemen. Nilai wajar properti investasi termasuk biaya penggantian untuk bagian tertentu dari properti investasi yang telah ada pada saat beban terjadi, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti investasi diakui dalam laba rugi periode terjadinya.

Investment properties are initially measured at its costs and subsequently measured at fair value, including transaction costs, less any accumulated impairment loss, if any. Fair values of investment properties are determined based on an independent appraisal report on a yearly basis, as decided by the management. Fair values of investment properties includes the cost of replacing part of an existing investment properties at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met, and excludes the cost of day-to-day servicing of an investment properties. Gains or losses from changes in fair value of investment properties are recognised in profit or loss for the period in which it arises.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang akan digunakan sendiri;
- b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- d. Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- a. *Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*
- b. *Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- c. *End of owner-occupation for a transfer from owner occupied property to investment property; and*
- d. *Inception of operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Aset dalam konstruksi yang memenuhi definisi sebagai properti investasi diklasifikasikan sebagai properti investasi dan diukur sebesar harga perolehan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

3.n. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan dipindahkan ke aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

Aset tetap secara keseluruhan disusutkan berdasarkan metode garis lurus sesuai umur ekonomis masing-masing aset.

Berdasarkan hasil kajian teknis pencatatan perhitungan umur ekonomis aset tetap khususnya beberapa peralatan produksi mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, sesuai Surat Keputusan Direksi No. SK.01.03/WB- 0A.0001/2020 tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Construction in progress which meets the definition of investment properties are classified as investment properties and measured at its cost.

Investment properties are derecognized when either they have been disposed of or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of retirement or disposal.

3.n. Fixed Asset

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Construction in progress stated at cost and removed into fixed asset at the time of the completion and ready to be used.

Fixed assets are depreciated based on the overall straight-line method according to the economic life of each asset.

Based on the results of technical studies recording the calculation of the age of the assets, particularly some of the production equipment was changed from the previous year, according the Decree of the Directors No. SK.01.03/WB- 0A.0001/2020 dated September 30, 2020 are as follows:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Masa Manfaat / Useful Life	
Bangunan	10 - 30 Tahun/ Years	Buildings
Prasarana	10- 20 Tahun/ Years	Infrastructures
Perlengkapan Kantor	4 Tahun/ Years	Office Equipment
Kendaraan	8 Tahun/ Years	Vehicles
Cetakan	7 - 20 Tahun/ Years	Mold
Peralatan	7 - 20 Tahun/ Years	Plant Equipment
Pelabuhan Dermaga	30 Tahun/ Years	Port Dock

Tambang disajikan sebesar harga perolehan, disusutkan dengan menggunakan unit produksi dimulai dari awal operasi komersial, penyusutan tersebut dihitung berdasarkan estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif dimulai sejak periode terjadinya perubahan.

Mining are stated at cost less, the value of mining properties is depreciated using the unit of production method from the date of the commencement of commercial operation. The depreciation is calculated based on estimated mineable reserves. change in estimated reserves are accounted for on a prospective basis, from the beginning of the period in which the change occurs.

Aset tetap yang masa penyusutannya telah berakhir dinilai sebesar Rp1.000 (seribu rupiah). Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dan menambah umur ekonomis atau kapasitas dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang berlaku. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Fixed asset depreciation period has ended is valued at Rp1,000 (one thousand rupiahs). The cost of maintenance and repairs are charged to income as incurred. Restoration and improvement of efficiency in large numbers and add the economic life or capacity are capitalized and depreciated in accordance with the applicable depreciation rates. Fixed assets that are no longer used are removed from the following fixed asset accumulation. Gains or losses from sale of fixed assets recorded in the income statement for the year.

Perusahaan senantiasa melakukan *review* atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

The Company continually reviews the estimated useful life, depreciation method and residual value at the end of each reporting period.

3.o. Sewa

3.o. Lease

Perlakuan akuntansi sebelum penerapan PSAK 73: Sewa

Accounting treatment before implementation of PSAK 73: Leases

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa

Determining whether an arrangement contains a lease

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Grup menyewa aset tetap tertentu dengan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset hak-guna atau masa sewa. Aset sewa pembiayaan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap".

Grup menyewa aset tetap tertentu. Sewa aset tetap dimana Grup, sebagai *lessee*, memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran sewa minimum.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas.

Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- a. Sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang; atau
- b. Sewa yang asetnya bernilai-rendah.

Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa

Perlakuan akuntansi setelah penerapan PSAK 73: Sewa

Pada tanggal insepasi suatu kontrak, Perusahaan menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Perusahaan menilai apakah:

The Group leases certain fixed asset by recognising the right-of-use asset and lease liabilities. The right-of-use assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment. Right-of-use assets are depreciated using straight-line method over the shorter of the useful life of the assets or the lease term. Financial lease assets are classified as part of "Fixed Assets".

The Group leases certain fixed assets. Leases of fixed assets where the Group as the lessee substantially bears all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased asset and the present value of the minimum lease payments.

Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments that are not paid. Each lease payment is allocated between the liability portion and finance cost. Lease liabilities are classified in long-term liabilities except for those with maturities of 12 months or less which are included in current liabilities. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant rate of interest on the remaining balance of the liability.

The Group does not to recognise rightofuse assets and lease liabilities for:

- a. *Short-term leases that have a lease term of 12 months or less; or*
- b. *Leases with low-value assets.*

Payments made under those leases are charged to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Accounting treatment after implementation of PSAK 73: Leases

At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

- a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b. Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c. Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Perusahaan mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perseroan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Perseroan cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Perusahaan dan entitas anak mengakui aset hak-guna dan utang sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari utang sewa

- a. *The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- b. *The Company has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- c. *The Company has the right to direct the use of the identified asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Company has the right to direct the use of the asset if either:*
 - *The Company has the right to operate the asset; or*
 - *The Company designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.

The Company and subsidiaries recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Periode penyusutan untuk aset hak-guna dengan opsi beli yang dieksekusi tersebut mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap.

Utang sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan dan entitas anak. Umumnya, Perusahaan dan entitas anak menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Setelah pengakuan awal utang sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Utang sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan dan entitas anak atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan dan entitas anak mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika utang sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Perusahaan dan entitas anak menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah berdasarkan sewa-per-sewa.

liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

If the lease transfers the ownership of the underlying asset at the end of the lease term, then the asset will be depreciated from the beginning of the lease term to the end of the underlying asset's useful life. The depreciation periods for the right-of-use assets with buy options executed should refer to the policy for the property, plant and equipment.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company and subsidiaries incremental borrowing rate. Generally, The Company and subsidiaries uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

After the initial acquisition of a lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company and subsidiaries estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company and subsidiaries changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Company and subsidiaries apply the exemption for low-value assets on a lease-by-lease basis; and for all other leases of low value asset.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Sewa aset bernilai rendah adalah sewa untuk perlengkapan umum seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan perlengkapan kantor lainnya, serta aset lain yang harga barunya tidak lebih dari plafon nilai rendah yang ditetapkan oleh Perusahaan.

3.p. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Grup memberikan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto-kan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Furthermore, payments associated with contracts included in the exception, which are payments associated with all short-term leases and certain leases of all low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in profit or loss. The lease payments associated with those leases will be recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets are those of general equipments which comprise of computers, tablets, mobile phones and small items of office supplies, and other assets which have value less than the maximum amount of low value set in The Company's policy.

3.p. Post-Employee Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during the period, at the undiscounted amount of Short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-Employment Benefit

The Group also provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

3.q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan.
 - Kontrak memiliki substansi komersial
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- (a) *When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- (b) *When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

3.q. Revenue and Expense Recognition

In determining revenue recognition, the Group perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *Identify contracts with customers with certain criteria as follows:*
 - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
 - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred*
 - *The contract has commercial substance*
 - *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred*
2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non proyek (beban usaha).

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

Revenues related to construction contracts are contracts are recognized over time which accounted for using the percentage of completion method, the revenue recognised equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognised as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognised as current year expenses in profit or loss

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognised as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognised as non-project expenses (operating expenses).

Revenue from the sale of goods is recognised when the control of goods has been transferred to the customer. Revenue from the rendering of services is recognised when the customer has received and consumed benefit from the services.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

Expenses are recognised as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

3.r. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

3.r. Interest Expenses

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

3.s. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

3.s. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax which calculated in determining profit or loss in the period. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh

Benefits related to tax losses that can be withdrawn to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) The initial recognition of goodwill; or*
- b) The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the entity expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini disajikan jika, dan hanya jika, Grup:

- 1) memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menghapus dalam jumlah yang diakui; dan
- 2) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3.t. Laba Per Saham

Laba per saham dasar masing-masing dihitung dengan membagi laba atau rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba atau rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Tidak ada indikasi kejadian pada Perusahaan yang dapat menimbulkan efek dilusi saham.

to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *The Group has rights that can be enforced by law to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *The deferred tax assets and deferred tax liabilities related to income taxes levied by the same taxation authority on:*
 - i. *The same taxable entity; or*
 - ii. *Different taxable entities which intend to recover current tax assets and liabilities with a net basis, or realize the asset and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of the assets or deferred tax liabilities are expected to be completed or restored.*

The offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- 1) *has legally enforceable right to set-off the recognized amounts; and*
- 2) *intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

3.t. Earning Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to the owners of the parent entity by the weighted average of outstanding shares during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to the owners of the company by the weighted average number of ordinary shares that has been adjusted with potential effects of all dilutive ordinary shares.

There is no indication that any events in the Company can affect to the dilution of shares.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

3.u. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi segmen geografis disusun untuk menunjukkan aset dan hasil usaha setiap Grup wilayah geografis.

3.v. Saham Diperoleh Kembali

Ketika Perusahaan membeli kembali sahamnya, jumlah yang dibayarkan, termasuk tambahan biaya yang terkait secara langsung (bersih dari pajak penghasilan), dikurangi dari ekuitas pemegang saham Perusahaan sampai saham tersebut dibatalkan, diterbitkan kembali atau dijual. Pada saat saham tersebut dijual atau diterbitkan kembali, pembayaran yang diterima, bersih setelah dikurangi tambahan biaya dan pajak penghasilan yang terkait langsung, diperhitungkan sebagai penambah atau pengurang akun tambahan modal disetor.

3.w. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban

3.u. Operating Segment

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- c) for which discrete financial information is available.*

Geographical Segment information is prepared to show the assets and results of operations of each geographical Group.

3.v. Treasury Stock

Where the company buys back share capital, the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes), is deducted from equity holders attributable to the Company equity holders until the shares are cancelled, reissued or disposed. Where such shares are subsequently sold or reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is accounted for as an addition to or deduction from additional paid-in capital.

3.w. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban ini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

3.x. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun

reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

3.x. Impairment of Nonfinancial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of nonfinancial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

3.y. Properti Tambang

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah yang dicatat sebagai aset tetap.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai "tambang dalam pengembangan" pada akun property pertambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

"Aset tetap Tambang dalam Pembangunan" direklasifikasi ke "Aset Tetap Tambang" pada akun Aset Tetap pada akhir tahap *commissioning*, ketika tambang tersebut mampu beroperasi sesuai dengan maksud manajemen.

"Aset tetap Tambang dalam Pembangunan" tidak disusutkan sampai direklasifikasi menjadi "Aset Tetap Tambang".

asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

3.y. Mining Properties

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure and excludes physical assets and land rights, which are recorded as property, plant and equipment.

Once a development decision has been taken, the carrying amount of the exploration and evaluation assets in respect of the area of interest is transferred to "mines under development" within mining properties and aggregated with the subsequent development expenditure.

"Construction in Progress of Mine" are reclassified as "Fixed Asset of Mine" within mining properties at the end of the commissioning phase, when the mine is capable of operating in the manner intended by management.

No depreciation is recognised for "Construction in Progress of Mine" until they are reclassified as "Fixed Asset of Mine"

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari "Aset Tetap Tambang" apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomis masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Perusahaan. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

"Aset Tetap Tambang" (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*.

"Aset tetap Tambang dalam Pembangunan" dan "Aset Tetap Tambang" diuji penurunan nilainya.

When further development expenditure is incurred on a mining property after the commencement of production, the expenditure is carried forward as part of "Fixed Asset of Mine" when it is probable that additional future economic benefits associated with the expenditure will flow to the company. Otherwise, such expenditure is classified as a cost of production.

"Fixed Asset of Mine" (including reclassified exploration, evaluation and development expenditure and payments made to acquire mineral rights and leases) are amortised using the units-of-production method on the basis of proved and probable reserves, with separate calculations being made for each area of interest.

"Construction in Progress of Mine" and "Fixed Asset of Mine" are tested for impairment.

4. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Penting dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan penting, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap

4. Sources of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgments

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Group accounting policies and that have the most significant effect on the amounts

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama, apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - a. Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - b. Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
 - c. Fakta dan kondisi lainnya, jika relevan.

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan sebuah ventura bersama.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

recognized in the consolidated financial statements.

Interests in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle
- When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:
 - a. The legal form of the separate vehicle;
 - b. The terms of the contractual arrangement; and
 - c. Other relevant facts and circumstances.

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures. These structures and terms of the contractual arrangement indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangement. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Persentase Penyelesaian

Pengakuan pendapatan dan beban pokok penjualan Grup mengakui pendapatan dan beban pokok penjualan dari proyek yang masih dalam progress pembangunan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Tahap penyelesaian diukur berdasarkan kebijakan akuntansi, asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan dan jumlah biaya pembangunan. Dalam membuat asumsi, Grup mengevaluasinya berdasarkan pengalaman di waktu yang lampau dan bantuan dari spesialis.

Rugi Penurunan Nilai pada Aset Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 5, 6, 7, 8, dan 9.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Percentage of Completion

The Group recognise revenues and cost of revenues from the construction and project in development stage based on percentage of completion method. Stage of completion is measured based on the accounting policies, important assumption is required in determining the stage completion (percentage of completion) and the amount of estimated income and total development cost. In making assumptions, the Group evaluates them based on past experience and with the assistance of specialist.

Impairment Loss on Financial Asset measured at Amortized Cost

The Group assess their financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. The carrying amount of financial assets are disclosed in Notes 5, 6, 7, 8, and 9.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 18.

Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi aktual yang berbeda dari asumsi Grup akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Grup. Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam Catatan 28.

assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets.

The carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 18.

Post-employment Benefits

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions generally affect the recognized expense in profit or loss and other comprehensive income and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's post-employment benefit obligations. The carrying amounts of post-employment benefits obligations are disclosed in Note 28.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

5. Kas dan Setara Kas

5. Cash and Cash Equivalents

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2020	2019
	Rp	Rp
Kas / <i>Cash</i>	937,750,102	530,388,200
Bank	1,009,279,473,154	606,748,241,087
Deposito / <i>Deposit</i>	532,000,000,000	995,002,121,233
Jumlah / <i>Total</i>	1,542,217,223,256	1,602,280,750,520

Rincian saldo bank dan deposito kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Details of bank balances and deposits to related parties and third parties are as follows:

	2020	2019
	Rp	Rp
Bank		
Pihak Berelasi / <i>Related Parties</i>		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	293,223,965,031	528,766,589,349
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	200,115,883,885	
PT Bank Syariah Mandiri	72,397,882,289	99,779,381
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	67,217,011,812	12,772,213,745
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	50,204,290,590	209,965,765
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10,693,599,231	4,550,103,377
PT BRISyariah Tbk	323,569,253	--
PT BNI Syariah	--	1,172,981
USD		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,510,133,910	1,492,478,862
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	708,986,975	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	107,788,386	105,523,678
SGD		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	106,778,955	104,770,578
Subjumlah/ <i>Subtotal</i>	696,609,890,317	548,102,597,716
Pihak Ketiga / <i>Third Parties</i>		
Rupiah		
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah/ <i>Syariah Unit</i>	288,783,846,511	9,351,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	15,464,188,616	2,290,548,590
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	1,617,679,364	2,284,003,893
PT Bank HSBC Indonesia	1,040,823,853	1,431,549,126
PT Bank DBS Indonesia	991,332,533	783,132,655
PT Bank BTPN Tbk	864,525,111	429,197,417
PT Bank Central Asia Tbk	742,917,569	1,185,530,167
PT Bank Mega Tbk	715,576,803	1,387,694,453
PT Bank Permata Tbk	603,780,530	--
PT Bank DKI	569,079,909	--
MUFG Bank, Ltd.	508,173,518	48,227,806,072
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	334,649,783	175,040,648
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	134,669,698	123,468,516
PT Bank Resona Perdania	99,540,000	99,880,000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	362,563	610,350
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	--	18,890,209
USD		
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	105,655,196	--
PT Bank HSBC Indonesia	92,781,280	94,768,810
PT Bank BTPN Tbk	--	104,171,465
Subjumlah/ <i>Subtotal</i>	312,669,582,837	58,645,643,371
Jumlah/ <i>Total</i>	1,009,279,473,154	606,748,241,087

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2020 Rp	2019 Rp
Deposito / Deposit		
Rupiah		
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	150,000,000,000	100,000,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	105,500,000,000	3,500,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50,000,000,000	502,500,000,000
PT Bank BRI Syariah Tbk	20,000,000,000	-
Subjumlah/ Subtotal	325,500,000,000	606,000,000,000
Pihak Ketiga / Third Parties		
Rupiah		
Koperasi Karyawan Wijaya Karya	55,000,000,000	--
PT Bank Mega Tbk	50,000,000,000	50,000,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta	25,000,000,000	--
PT Bank HSBC Indonesia	25,000,000,000	--
MUFG Bank, Ltd.	25,000,000,000	50,000,000,000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	25,000,000,000	14,002,121,233
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	1,500,000,000	--
PT Bank Permata Tbk	--	225,000,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	50,000,000,000
Subjumlah/ Subtotal	206,500,000,000	389,002,121,233
Jumlah/ Total	532,000,000,000	995,002,121,233

Penempatan deposito berupa *Deposito On Call (DOC)* dan Deposito berjangka sampai dengan 1 bulan, dengan tingkat bunga 2,25%-7,50%, dan 6,50%-7,50% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Placement of deposits in the form of Deposit On Call (DOC) and time deposits up to 1 month, with an interest rate 2.25%-7.50%, and 6.50%-7.50% for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

6. Piutang Usaha-Bersih

Semua piutang Grup dalam mata uang rupiah.

Rincian piutang usaha kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

6. Trade Receivables-Net

All of the Group trade receivables are on rupiah.

Details of trade receivables to related parties and third parties are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	35,826,662,067	45,263,586,646
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	33,444,820,260	23,456,235,360
PT Wijaya Karya Tbk. - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk JO	30,709,327,850	--
PT Wika Gedung, PT Jaya Konstruksi, PT Pembangunan Perumahan KSO	29,744,358,408	--
PT Waskita Beton Precast Tbk	28,365,673,944	29,989,911,656
PT Waskita - Gorip KSO	23,836,964,686	24,964,156,000
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	22,820,429,026	93,330,386,705
PT Utama Karya (Persero)	19,520,596,640	24,089,671,745
PT Haka Aston	14,855,100,000	121,953,408,000
PT Adhi - Esa, KSO	13,676,978,180	--
PT Wijaya Karya Beton Tbk - PPI KSO	13,315,992,600	--
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	11,661,788,900	256,346,200
PT Utama Karya Infrastruktur	11,243,849,522	7,785,131,933
PT Pembangunan Perumahan - PT Karya Pare Sejahtera KSO	10,344,040,000	--
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - ASHFRI - MINARTA KSO	9,030,376,000	--
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	7,003,982,452	17,734,110,116
JO SK E&C CO.,Ltd , HEC Ltd,		
PT Rekayasa Industri dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	6,858,068,620	--

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) - Team WIKA	6,509,225,000	11,299,083,361
PT Wika Pracetak Gedung	6,182,630,369	4,633,685,166
PT Brantas Abipraya (Persero)	5,653,087,000	1,329,723,000
Penta Ocean Toa Rinkai PP, WIKA Consortium	5,567,872,000	11,757,372,800
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar/ Others below Rp5 Billion	99,299,072,765	322,227,773,826
Jumlah / Total	445,470,896,289	740,070,582,514
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses Bersih/ Net	(32,413,205,934)	(1,465,941,000)
	413,057,690,355	738,604,641,514
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Dian Previda	58,411,580,209	58,325,214,715
PT Servo Marga Sejahtera	34,992,305,410	34,992,305,410
PT Truba Jaya Engineering	34,174,569,300	34,174,569,300
Shimizu-PP-BCK JO	31,524,618,063	22,866,451,589
Prasasti - Tiara - Ayunda, KSO	16,613,955,000	42,974,267,990
PT New Asia International	16,117,680,000	1,129,504,000
Maskar Abadi - Tanjung Raya, KSO	12,937,431,929	20,025,178,489
PT Adara Persada Sejahtera	11,746,967,265	11,746,967,265
PT Ganesha Bangun Riau Sarana	10,060,256,000	--
PT Dharma Leksana	8,407,717,012	9,907,717,012
PT Komponindo Betonjaya	7,099,657,800	1,484,214,332
PT Satyamitra Surya Perkasa	6,406,970,164	9,561,351,854
PT Samsung C&T Corporation	6,088,817,690	--
PT Pandji Pratama Indonesia	5,834,109,091	6,334,109,091
PT Lati Inti Muara Asa	5,282,043,000	5,282,043,000
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar/ Others below Rp5 Billion	105,449,795,133	303,059,905,370
Jumlah/Total	371,148,473,066	561,863,799,417
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses Bersih/Net	(151,468,099,582)	(30,419,485,473)
	219,680,373,484	531,444,313,944
Jumlah/ Total	632,738,063,839	1,270,048,955,458

Rincian piutang retensi kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Details of retention receivables to related parties and third parties are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties	3,833,657,519	--
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(3,974,530)	--
Bersih/ Net	3,829,682,989	--
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bosowa Marga Nusantara	74,519,209,615	24,357,222,324
MITSUI Eng & Shipbuilding Co. Ltd	13,561,641,127	12,636,079,069
Lain-lain di bawah Rp3 Miliar/ Other below Rp 3 Billion	726,688,664	2,490,841,434
Jumlah/ Total	88,807,539,406	39,484,142,827
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(7,254,231,314)	--
Bersih/ Net	81,553,308,092	39,484,142,827
Jumlah/ Total	85,382,991,081	39,484,142,827

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian analisis umur piutang usaha dihitung sejak tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Aging analysis of trade receivables are calculated from the due date are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Belum Jatuh Tempo	310,531,777,461	187,798,271,927	<i>not yet due</i>
> 0 - 3 bulan	131,903,141,453	603,548,493,001	<i>> 0 up to 3 months</i>
> 3 - 6 bulan	41,741,102,326	175,218,145,906	<i>> 3 up to 6 months</i>
> 6 - 9 bulan	59,910,117,289	114,413,600,478	<i>> 6 up to 9 months</i>
> 9 - 12 bulan	35,869,451,644	33,434,483,322	<i>> 9 up to 12 months</i>
> 12 - 15 bulan	22,998,279,161	38,922,712,677	<i>> 12 up to 15 months</i>
> 15 - 18 bulan	35,107,890,601	36,104,198,483	<i>> 15 up to 18 months</i>
> 18 - 21 bulan	46,015,522,588	9,428,180,112	<i>> 18 up to 21 months</i>
> 21 - 24 bulan	16,135,651,646	40,702,712,531	<i>> 21 up to 24 months</i>
> 24 - 27 bulan	22,494,185,845	24,929,479,125	<i>> 24 up to 27 months</i>
> 27 - 30 bulan	11,520,169,120	2,257,054,714	<i>> 27 up to 30 months</i>
> 30 - 33 bulan	4,299,963,270	1,458,115,022	<i>> 30 up to 33 months</i>
> 33 - 36 bulan	40,987,744,657	1,992,064,040	<i>> 33 up to 36 months</i>
Diatas 36 bulan	37,104,372,294	31,726,870,593	<i>36 months above</i>
Jumlah	816,619,369,355	1,301,934,381,931	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(183,881,305,516)	(31,885,426,473)	<i>Allowance for Impairment losses</i>
Neto	632,738,063,839	1,270,048,955,458	Net

Penurunan nilai piutang Grup menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi, untuk mengukur penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

The impairment Group is using the expected credit loss model, which replaced the incurred credit loss model, to measure the provision for impairment of trade receivables.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movement in allowance for impairment losses of receivables are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	31,885,426,473	49,777,955,273	<i>Beginning Balance</i>
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	143,307,012,620	--	<i>Impact of Initial Implementation PSAK 71</i>
Penambahan Penyisihan	136,600,562,941	9,755,627,756	<i>Addition Impairment</i>
Pemulihan Penyisihan	(127,911,696,518)	(27,648,156,556)	<i>Impairment Recovery</i>
Saldo Akhir	183,881,305,516	31,885,426,473	Ending Balance

Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp127.991.696.518 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp27.648.156.556, terdiri dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp10.714.681.069, PT Dian Previta sebesar Rp9.607.346.370, PT Sino Road and Bridge Group Co. Ltd sebesar Rp7.794.331.166, PT Waskita Precast Beton Tbk sebesar Rp6.633.220.941, PT Utama Infrastruktur sebesar Rp5.678.403.460, PT Haka Aston sebesar Rp5.138.207.200, PT Pembangunan Perumahan (Persero)

The value of recovery on allowance impairment of account receivables for the period ended December 31, 2020 and year ended amounted to Rp127.991.696.518 and December, 31 2019 amounted to Rp27,648,156.556, consist of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) amounted to Rp10,714,681,069, PT Dian Previta amounted to Rp9,607,346,370, PT Sino Road and Bridge Group Co. Ltd amounted to Rp7,794,331,166, PT Waskita Precast Beton Tbk amounted to Rp6,633,220,941, PT Utama Infrastruktur amounted to Rp5,678,403,460, PT Haka

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp5.179.593.857, KSO Maskar Abadi- PT Tanjung Raya sebesar Rp4.949.748.871, PT Utama Karya sebesar Rp4.761.889.165, KSO PT Yasapola Remaja- PT Calista Perkasa Mulia sebesar Rp3.680.603.717, PT Satyamitra Surya Perkasa sebesar Rp2.790.519.310, PT New Asia Internasional sebesar Rp2.771.689.190, KSO Prasasti- Tiara- Ayunda sebesar Rp2.673.451.018, KSO Adhi- Acset sebesar Rp2.417.694.960, PT Barata Indonesia (Persero) sebesar Rp1.430.439.188, PT Girder Indonesia sebesar Rp1.330.173.936, PT Sumaraja Indah sebesar Rp1.089.330.005, PT Imesco Dito sebesar Rp1.000.000.000 dan lainnya sebesar Rp48.270.373.095.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Apabila ada pembayaran atas piutang yang telah dilakukan penurunan nilai, dilakukan pemulihan dan dicatat sebagai penghasilan lain-lain.

Piutang digunakan sebagai agunan utama atas fasilitas kredit modal kerja *revolving* dan fasilitas *Non Cash Loan* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT Bank HSBC Indonesia dan MUFG Bank, Ltd (Catatan 20 dan 29).

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Aston amounted to Rp5,138,207,200, PT Pembangunan Perumahan (Persero) amounted to Rp5,179,593,857, KSO Maskar Abadi- PT Tanjung Raya amounted to Rp4,949,748,871, PT Utama Karya amounted to Rp4,761,889,165, KSO PT Yasapola Remaja- PT Calista Perkasa Mulia amounted to Rp3,680,603,717, PT Satyamitra Surya Perkasa amounted to Rp2,790,519,310, PT New Asia Internasional amounted to Rp2,771,689,190, KSO Prasasti- Tiara- Ayunda amounted to Rp2,673,451,018, KSO Adhi- Acset amounted to Rp2,417,694,960, PT Barata Indonesia (Persero) amounted to Rp1,430,439,188, PT Girder Indonesia amounted to Rp1,330,173,936, PT Sumaraja Indah amounted to Rp1,089,330,005, PT Imesco Dito amounted to Rp1,000,000,000, and others amounted to Rp48,270,373,095.

Based on a review of individual receivable accounts at the end of reporting period, the management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible trade account receivables.

If there is a payment for receivables that has been impaired, it will be recovered and recorded as other income.

Receivables used as the primary collateral for working capital revolving credit facility and Non Cash Loan facilities at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT Bank HSBC Indonesia and MUFG Bank, Ltd. (Note 20 and 29)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

7. Pendapatan Akan Diterima

Merupakan pendapatan yang sudah dicatat atas penyerahan barang ke pelanggan namun masih dalam proses penagihan.

Rincian pendapatan akan diterima per pelanggan adalah sebagai berikut:

7. Accrued Income

Revenue that has been recorded for the delivery of goods to customers, but still in the billing process.

Details of accrued income per customers are as follows:

	2020	2019
	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	434,080,231,724	762,250,154,630
High Speed Railway Contractor Consortium - Team Wijaya Karya	268,148,747,014	249,746,101,526
PT Utama Karya (Persero) Tbk	50,637,534,620	16,657,895,900
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	64,693,399,742	202,183,430,594
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	18,235,779,420	8,458,274,700
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	36,533,217,000	29,643,121,016
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	31,729,934,800	58,055,755,140
Pembangunan Perumahan - Wijaya Karya, JO	28,942,690,000	--
ABIPRAYA-MKI, KSO	20,408,760,000	--
PP-KPS KSO	16,004,040,000	--
Adhi Karya - ESA, KSO	8,560,800,000	--
PT Wijaya Karya Industri & Kontruksi	7,554,840,000	21,477,465,000
PENTA-TOA-RINKAI-PP-WIKA (PTRPW) CONSORTIUM	7,015,140,900	--
PT Rekayasa Industri	6,336,000,000	--
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	6,304,757,000	--
PT Nindya Karya (Persero)	5,689,034,000	--
WIKA - WG, KSO	5,521,075,000	--
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar/ Others below Rp5 Billion	10,106,291,250	196,409,765,847
Subjumlah/ Subtotal	1,026,502,272,470	1,544,881,964,353
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(4,908,101,206)	--
Bersih/ Net	1,021,594,171,264	1,544,881,964,353
Pihak Ketiga/ Third Parties		
New Asia International, PT	35,608,869,900	13,848,272,000
RDMP JO Balikpapan	15,261,392,329	--
PT Balikpapan Ready Mix Pile	10,944,530,140	11,740,930,800
Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya	10,870,504,000	--
PT Cipta Batu Alam Sejahtera	8,311,913,521	--
Chiyoda, Saipem, Tripatra, SAE, JO	7,993,554,480	--
PT Pembangunan Deltamas	7,732,403,865	--
JO SK E & C CO., LTD, HEC LTD, REKIND	7,391,875,000	6,796,527,200
PT Kapuk Naga Indah	6,453,815,638	21,987,259,543
Calista Perkasa Mulia - Mitra Sinergi Visitama, KSO	6,410,811,690	--
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	5,958,150,000	7,140,962,378
PT Kukuh Mandiri Lestari	5,925,885,600	50,598,413,999
PT Servo Marga Sejahtera	5,110,809,900	20,209,362,000
Lain-lain di bawah Rp5 Miliar/ Others below Rp5 Billion	156,163,121,164	145,690,340,934
Subjumlah/ Subtotal	290,137,637,227	278,012,068,854
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(4,758,160,415)	--
Bersih/ Net	285,379,476,812	278,012,068,854
Jumlah/ Total	1,306,973,648,076	1,822,894,033,207

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pendapatan akan diterima adalah sebagai berikut:

The movement in allowance for impairment losses of accrued income are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	--	--	<i>Beginning Balance</i>
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	76,300,394,353	--	<i>Impact of Initial Implementation PSAK 71</i>
Pemulihan Penyisihan	(66,634,132,732)	--	<i>Impairment Recovery</i>
Saldo Akhir	9,666,261,621	--	<i>Ending Balance</i>

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan pendapatan akan diterima masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on a review of individual achievement accrued income at the end of reporting period, the management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible trade account receivables.

8. Tagihan Bruto Pemberi Kerja

8. Gross Amount Due From Customer

Rincian saldo tagihan bruto kepada pemberi kerja adalah sebagai berikut:

Details of gross amount due from customers are follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Biaya Konstruksi Kumulatif	1,589,158,212,259	916,193,220,213	<i>Accumulated Construction Costs</i>
Laba yang Diakui Kumulatif	243,492,831,168	139,289,737,016	<i>Recognized Accumulated Profit</i>
Sub Jumlah	1,832,651,043,427	1,055,482,957,229	<i>Sub total</i>
Penagihan	(1,632,338,564,746)	(594,316,224,734)	<i>Progress billing</i>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/	(1,853,910,921)	--	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Jumlah tagihan bruto kepada pemberi kerja	198,458,567,760	461,166,732,495	<i>Total Due from customer</i>

Rincian tagihan bruto pemberi kerja per pelanggan adalah sebagai berikut:

Gross amount due from customer per customers are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
WG JAKON PP KSO	9,928,095,096	--
PT Barata Indonesia	1,729,085,863	--
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	563,735,100	--
PT Wijaya Pracetak Gedung	290,187,500	--
Jumlah/ Total	12,511,103,559	--
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses Bersih/ Net	(12,905,053)	--
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bosowa Marga Nusantara	186,033,002,108	461,166,732,495
RDMP-BALIKPAPAN JO	1,622,719,791	--
Lain-lain	145,653,223	--
Jumlah/ Total	187,801,375,122	461,166,732,495
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses Bersih/ Net	(1,841,005,868)	--
Total/ Total	198,458,567,760	461,166,732,495

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto adalah sebagai berikut:

The movement in allowance for impairment losses of gross amount due from customer are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	--	--	<i>Beginning Balance</i>
Dampak Penerapan Awal PSAK	23,819,561,329	--	<i>Impact of Initial Implementation PSAK 71</i>
Pemulihan Penyisihan	(21,965,650,408)	--	<i>Impairment Recovery</i>
Saldo Akhir	1,853,910,921	--	<i>Ending Balance</i>

9. Piutang Lain-Lain

9. Other Receivables

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

Details of other receivables is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	4,311,185,924	3,312,217,516
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	2,392,023,625	1,630,054,465
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	1,893,439,919	1,980,692,283
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	685,732,744	456,695,651
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	323,403,649	718,388,606
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	--	2,597,708,281
Lain-lain di bawah Rp300 Juta/ Others below Rp300 Million	3,897,122,445	5,080,279,784
Sub jumlah/ Sub total	13,502,908,306	15,776,036,586
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Jui Shin Indonesia	1,212,193,404	--
Lain-lain di bawah Rp300 Juta/ Others below Rp300 Million	4,025,027,735	5,683,158,149
Sub jumlah/ Sub total	5,237,221,139	5,683,158,149
Jumlah/ Total	18,740,129,445	21,459,194,735

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang lain-lain pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan tidak ada peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Based on a review of individual achievement of other receivables at the end of reporting period, the management believes that there is no significant increase in credit risk.

10. Persediaan

10. Inventories

Akun ini dapat dirinci sebagai berikut :

This account can be specified as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Persediaan Barang Jadi di Gudang	493,401,326,228	617,142,999,103	<i>Finished Goods in Warehouse</i>
Persediaan Bahan Baku	242,699,940,470	346,104,068,968	<i>Raw Materials</i>
Persediaan Barang Jadi di Lapangan	30,485,717,608	154,135,130,182	<i>Finished Goods in the Field</i>
Persediaan Suku Cadang	24,604,963,388	26,671,654,794	<i>Spare Parts Inventory</i>
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	2,535,565,736	3,669,828,485	<i>Supplies of Fuel Oil and Lubricant</i>
Persediaan Bahan Baku Dalam Pengiriman	16,500,000	655,250,604	<i>Raw Materials on Delivery</i>
Jumlah	793,744,013,430	1,148,378,932,136	<i>Total</i>

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Persediaan bahan baku merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Persediaan bahan baku dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penunjang. Masing-masing bahan baku terdapat rincian sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp	
Bahan Baku Utama	185,084,125,568	291,655,511,786	Primary Raw Materials
Bahan Baku Penunjang	57,615,814,902	54,448,557,182	Secondary Raw Materials
Jumlah	242,699,940,470	346,104,068,968	Total

Raw material are materials that are used to produce finished goods. Raw material are divided into two types: primary raw materials and secondary raw material. The detail of each item are:

Persediaan barang jadi di lapangan merupakan persediaan barang jadi yang sudah terkirim ke pelanggan atau sudah di lokasi proyek dan dalam proses Berita Acara Serah Terima, dengan rincian sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp	
Produk Putar	19,890,039,571	96,880,742,364	Spun Concrete
Produk Non Putar	9,848,360,256	48,642,942,318	Precast Concrete
Produk Quarry	747,317,781	8,403,450,400	Quarry Product
Ready Mix	--	207,995,100	Ready Mix
Jumlah	30,485,717,608	154,135,130,182	Total

Finished goods inventory in the field are the inventory of finished goods that have been sent to the customer or already at the project site and in the progress of handover certificate, with the following details:

Persediaan barang jadi di gudang merupakan persediaan barang jadi yang belum terkirim ke pelanggan, masih tersimpan di pabrik, dengan rincian sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp	
Produk Putar	302,671,590,458	309,548,869,434	Spun Concrete
Produk Non Putar	143,231,112,104	254,336,737,326	Precast Concrete
Produk Quarry	47,498,623,666	52,186,106,617	Quarry Product
Ready Mix	--	1,071,285,726	Ready Mix
Jumlah	493,401,326,228	617,142,999,103	Total

Finished goods inventory in warehouse are finished goods inventory that has not been sent to the customer, is stored in the factory, with the following details:

Persediaan bahan baku dalam pengiriman merupakan persediaan yang hak kepemilikannya sudah berpindah kepada Perusahaan namun persediaan tersebut masih berada di gudang penjual.

Raw materials on delivery are inventory which is ownership rights have been transferred to the Company but the inventory is still in the seller's warehouse.

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban masing-masing adalah Rp1.876.348.151.297 dan Rp2.212.177.318.282 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

The cost of inventories recognized as an expense was Rp1,876,348,151,297 and Rp2,212,177,318,282 for year ended as of December 31, 2020 and 2019.

Perusahaan tidak mengasuransikan dan tidak melakukan penyisihan penurunan nilai atas persediaan karena berdasarkan sifat produk yang tidak mudah rusak dan tidak mudah hilang sehingga Perusahaan tidak akan menanggung biaya atas kerusakan, kehilangan dan penurunan nilai.

The Company did not insure and did not provided allowance for impairment on inventories based on the nature of the product that is not easily damaged and lost, the Company believes it will not bear the cost of any damage, loss and impairment.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Persediaan produk jadi digunakan sebagai agunan atas fasilitas kredit modal kerja revolving dan fasilitas *non cash loan* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank DKI, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, MUFG Bank Ltd, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Permata Tbk dan Pinjaman Transaksi Khusus pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 20 dan 29).

The inventory of finished products are pledge as collaterals on the working capital revolving credit facility and Non Cash Loan facilities at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank DKI, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, MUFG Bank Ltd, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Permata Tbk and Facility Credit Agreement to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Notes 20 and 29).

11. Uang Muka

Rincian uang muka adalah sebagai berikut:

	2020 Rp
Pemasok	3,956,396,679
Persekot pekerjaan	3,808,835,000
Subkontraktor	5,247,076
Jumlah	7,770,478,755

Uang muka merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok dan subkontraktor sehubungan dengan pengadaan bahan baku, pelaksanaan pekerjaan distribusi dan pemasangan produk.

11. Advances

Details of advances are as follows:

	2019 Rp	
	17,499,446,828	<i>Suppliers</i>
	4,332,430,475	<i>Advance the work</i>
	16,641,326,444	<i>Subcontractors</i>
Jumlah	38,473,203,747	Total

Advances represents advances paid to suppliers and subcontractors in connection with procurement of raw materials, distribution and installation project work operation.

12. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dikeluarkan namun masih ditangguhkan dan akan diakui sebagai beban atau harga pokok pada saat pengakuan pendapatan atau Berita Acara Serah Terima (BAST) telah ditandatangani.

Rincian biaya dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

	2020 Rp
Biaya Pelaksanaan Proyek	105,679,580,386
Biaya Produksi	67,081,604,846
Sewa Dibayar di Muka	3,280,900,104
Jumlah	176,042,085,336

Sewa dibayar di muka merupakan sewa jangka pendek yang tidak berkelanjutan dan bernilai rendah.

12. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are expenses that have been incurred but still deferred and will be recognized as an expense or cost of goods sold when revenue is recognized or Handover (BAST) has been signed.

Details of prepaid expenses are as follows:

	2019 Rp	
	184,204,445,404	<i>Project Implementation Cost</i>
	115,907,159,629	<i>Production Cost</i>
	4,033,457,616	<i>Prepaid Rent</i>
Jumlah	304,145,062,649	Total

Prepaid leases are low-value and unsustainable short-term leases.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya pelaksanaan proyek dibayar di muka merupakan biaya atas distribusi, perawatan dan pemasangan produk yang ditangguhkan sehubungan dengan perbedaan waktu antara pengakuan penjualan dan saat terjadinya pengiriman produk, dengan rincian sebagai berikut:

Prepaid project implementation costs is the cost for the products distribution, maintenance and installation which were deferred due to time difference between the sales recognition and the time of delivery of the product, the details are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Material	39,679,028,935	117,025,505,904	Materials
Subkontraktor	24,694,191,406	47,523,866,038	Subcontractors
Fasilitas Distribusi	40,754,692,014	19,506,084,372	Distribution Facilities
Upah Buruh	551,668,031	148,989,090	Labour's Wage
Jumlah	105,679,580,386	184,204,445,404	Total

13. Proyek Dalam Pelaksanaan

13. Project On Progress

Proyek Dalam Pelaksanaan merupakan aktivitas dari kegiatan suatu proyek atau pekerjaan-pekerjaan proyek yang sedang dilaksanakan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

Projects on Progress is an activity of a project or activities work projects that are still on progress as of the date of the financial statements.

Rincian Proyek dalam Pelaksanaan sebagai berikut:

Details of Projects on Progress are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	13,807,938,070	8,426,345,197
PT Rekayasa Industri	4,757,349,789	--
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	331,411,200	--
PT Barata Indonesia (Persero)	203,711,923	--
Lain-lain di bawah Rp200 Juta/ Others below Rp200 Million	688,303,547	9,248,250,289
Sub jumlah/ Sub total	19,788,714,529	17,674,595,486
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bosowa Marga Nusantara	12,188,035,485	4,832,906,329
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung - Jakon - PP	11,372,711,524	--
PT Agung Namaskara	4,827,898,482	--
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	2,981,042,229	2,256,426,879
PT Yasapola Remaja	2,474,754,407	--
PT Tunggal Jaya Mandiri	863,662,099	--
KSO PT China Railway Engineering Indonesia - PT Indo Panshi Bum	802,567,131	--
PT Punggu Mas	588,772,812	--
PT Kukuh Mandiri Lestari	552,393,967	1,255,831,531
PT Brahmakerta Adiwira	524,953,890	--
Lain-Lain Di Bawah Rp500 Juta/ Others Below Rp500 Million	6,410,713,494	25,987,727,049
Sub jumlah/ Sub total	43,587,505,520	34,332,891,788
Jumlah/ Total	63,376,220,049	52,007,487,274

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

14. Investasi Pada Entitas Asosiasi

14. Investment In Associates

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Details of investment in associates are as follows:

Nama Perusahaan/ Company Name	Aktifitas Utama/Principal Activity	Tempat Kedudukan/Domicile	Persentase Kepemilikan dan hak suara yang dimiliki Perusahaan / Percentage Ownership Interest and Voting Power Held by the Company	Jumlah tercatat / Carrying amount	
				2020 Rp	2019 Rp
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	Perindustrian, Perdagangan dan Jasa Beton Pracetak/Industrial, Trade and Precast Concrete Services	Jakarta	49%	33,391,081,882	30,322,603,468

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Changes in investments in associates are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Nilai Tercatat Awal Tahun	30,322,603,468	25,614,001,227	Carrying Amount at Beginning of Year
Bagian Laba Entitas Asosiasi	3,068,478,414	4,708,602,241	Equity in Net Income of Associates
Nilai Tercatat Akhir Tahun	33,391,081,882	30,322,603,468	Carrying Amount at Year End

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi Perusahaan ditetapkan di bawah ini.

Summarized financial information in respect of the associate is set out below.

	PT Wijaya Karya Pracetak Gedung		
	2020 Rp	2019 Rp	
Aset Lancar	181,706,622,516	116,746,255,631	Current Assets
Aset Tidak Lancar	33,794,752,929	33,624,365,988	Noncurrent Assets
Liabilitas Lancar	148,213,953,721	87,968,786,836	Current Liabilities
Liabilitas Tidak Lancar	--	268,955,012	Noncurrent Liabilities
Pendapatan	139,336,610,785	115,927,574,808	Revenues
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	6,262,200,848	9,609,392,326	Comprehensive Income for The Year

15. Ventura Bersama

15. Joint Venture

15.a Investasi pada ventura Bersama

15.a Investment in Joint Venture

Rincian saldo investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of investment in joint ventures are as follows:

Nama Perusahaan/ Company Name	Proyek/ Project	Tempat Kedudukan/ Domicile	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah tercatat/ Carrying amount	
				2020	2019
Wijaya Karya Beton - Semen Indogreen Sentosa KSO	Ready Mix Apartmen Podomoro View Cimanggis	Jakarta	50%	18,508,715	3,519,419,873
Wijaya Karya Beton - Emrail KSO	Jakarta Light Rapid Transit koridor 1 Kelapa Gading - Velodrome	Jakarta	50%	12,046,572,834	14,470,702,411
Wijaya Karya Beton - PT Pandji Pratama Indonesia	Pembangunan Pengaman Pantai Jakarta Tahap 3 Paket 2	Jakarta	60%	--	3,856,395,156
Jumlah/Total				12,065,081,549	21,846,517,440

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investments in joint ventures are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Nilai Tercatat Awal Tahun	21,846,517,440	31,796,331,784	Carrying Amount at Beginning of the Year
Mutasi Investasi - Bersih Reklasifikasi	(6,000,911,158) (3,856,395,160)	(12,000,000,000) --	Investment Movements - net Reclassification
Bagian Laba (Rugi) Investasi pada Ventura Bersama	75,870,427	2,050,185,656	Equity in Net Income (Loss) of Joint Ventures
Nilai Tercatat Akhir Tahun	12,065,081,549	21,846,517,440	Carrying Amount at Ending of the Year

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Ringkasan informasi keuangan dari ventura bersama Perusahaan ditetapkan di bawah ini.

Summarized financial information in respect of the Company joint venture is set out below.

PT Wijaya Karya Beton Tbk - Emrail KSO		2020	2019	
		Rp	Rp	
Aset Lancar		36,230,822,231	51,618,603,518	Current Assets
Aset Tidak Lancar		10,000,000	28,881,604	Noncurrent Assets
Liabilitas Lancar		12,147,676,555	22,706,080,300	Current Liabilities
Pendapatan	--		51,585,561,175	Revenues
Laba Komprehensif di Tahun Berjalan	151,740,854		1,697,230,974	Comprehensive Income for the Year

PT Wijaya Karya Beton Tbk - Semen Indogreen Sentosa KSO		2020	2019	
		Rp	Rp	
Aset Lancar		31,894,569	3,042,163,076	Current Assets
Aset Tidak Lancar		--	9,286,012,701	Noncurrent Assets
Liabilitas Lancar		31,894,569	5,289,336,033	Current Liabilities
Pendapatan	--		6,600,415,151	Revenues
Rugi Komprehensif di Tahun Berjalan	--		(5,309,649,975)	Comprehensive Loss for the Year

15.b Utang kepada Ventura Bersama

15.b Debt to Joint Venture

Rincian saldo utang kepada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of investment in joint ventures are as follows:

Nama Perusahaan/ Company Name	Proyek/ Project	Tempat Kedudukan/ Domicile	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah tercatat/ Carrying amount	
				2020	2019
Wijaya Karya Beton - PT Pandji Pratama Indonesia	Pembangunan Pengaman Pantai Jakarta Tahap 3 Paket 2	Jakarta	60%	7,474,401,311	--
Jumlah/Total				7,474,401,311	--

Mutasi utang kepada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in debt in joint ventures are as follows:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Nilai Tercatat Awal Tahun	3,856,395,156	--	Carrying Amount at Beginning of the Year
Tambahan Penyertaan	450,000,000	--	Additional of Investment
Bagian Laba (Rugi) Investasi pada Ventura Bersama	(11,780,796,467)	--	Equity in Net Income (Loss) of Joint Ventures
Nilai Tercatat Akhir Tahun	(7,474,401,311)	--	Carrying Amount at Ending of the Year

Ringkasan informasi keuangan dari ventura bersama Perusahaan ditetapkan di bawah ini.

Summarized financial information in respect of the Company joint venture is set out below.

PT Wijaya Karya Beton Tbk - PT PPI		2020	2019	
		Rp	Rp	
Aset Lancar		6,264,527,240	23,804,399,992	Current Assets
Liabilitas Lancar		19,471,862,760	17,377,074,732	Current Liabilities
Pendapatan	1,603,038,734		72,827,063,145	Revenues
Laba (Rugi) Komprehensif di Tahun Berjalan	(19,634,660,779)		6,427,325,260	Comprehensive Profit (Loss) for the Year

Perjanjian penting atas investasi ventura bersama diungkapkan pada Catatan 38.

Significant agreement related to joint venture disclose on Note 38.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

16. Properti Investasi

16. Investment Property

Properti investasi merupakan investasi Perusahaan yang berupa tanah dan bangunan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga jual dan hasil sewa. Metode pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan nilai wajar.

Investment property is a Company's investment in the form of land and buildings that are intended to gain profit from increasing of market value and rent revenue. Methods of measurement after initial recognition using the fair value.

Mutasi properti investasi adalah sebagai berikut:

The movements of the investment properties are as follows:

2020						
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Addition</i>	Pengurangan / <i>Deduction</i>	Reklasifikasi / <i>Reclassification</i>	Penurunan Nilai Investasi / <i>Decrease in Investment Value</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Wajar						
Bangunan dan Prasarana	79,408,000,000	2,306,200,000	--	--	(169,782,000)	81,544,418,000
						<i>At Fair Value Building and Equipment</i>
2019						
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Addition</i>	Pengurangan / <i>Deduction</i>	Reklasifikasi / <i>Reclassification</i>	Kenaikan Nilai Investasi / <i>Increase in Investment Value</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Wajar						
Tanah	1,860,000,000	--	--	(1,860,000,000)	--	--
Bangunan dan Prasarana	2,520,000,000	18,573,957,337	(1,334,275,507)	59,500,739,063	147,579,107	79,408,000,000
Total	4,380,000,000					79,408,000,000
						<i>At Fair Value Land Building and Equipment Total</i>

Penambahan properti investasi di tahun 2020 merupakan hasil konversi piutang Perusahaan di PT Asria Jaya dengan Tanah Bangunan Rumah Tinggal yang berlokasi Jl Hibrida 2, Gang Masjid Al- Fattah/ Gang 1, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Addition of investment property in 2020 is residential building which located at Jl Hibrida 2, Gang Masjid Al- Fattah/ Gang 1, Bengkulu City, Bengkulu Province obtained from the set-off of the Company's receivables to PT Asria Jaya.

Penambahan properti investasi di tahun 2019 merupakan hasil konversi piutang Perusahaan di PT Utama Karya (Persero) dengan 11 unit Apartemen yang terletak Jl. Epicentrum Boulevard Tim. No.3, Jakarta Selatan sebesar Rp18.573.957.337.

Addition of investment property in 2019 is 11 units of apartments which located at Jl. Epicentrum Boulevard Timur. No.3, South Jakarta obtained from the set-off of the Company's receivables to PT Utama Karya (Persero) amounted to Rp18,573,957,337.

Pada tahun 2019 Perusahaan melakukan reklasifikasi atas aset bangunan berupa Ruang Perkantoran yang terletak di Gedung The Hive Office Lantai 3 dan 5, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur ke aset properti investasi sebesar Rp62.020.739.063.

In 2019 company reclassified its building asset in the form of Office Space which located in The Hive Office, 3rd and 5th floor, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 2, East Jakarta to investment property asset amounted to Rp62,020,739,063.

Properti Investasi yang terletak di Komplek Mall E. Walk BSB Blok A No. 1 Balikpapan telah digunakan sendiri menjadi kantor untuk Wilayah Penjualan VII dan aset Properti Investasi tersebut telah direklasifikasi ke dalam aset tetap tanah dan bangunan dengan menggunakan nilai wajar per 1 Januari 2019 sebesar Rp2.520.000.000 dan Rp1.860.000.000.

Investment Property assets which located in Mall E. Walk Complex BSB Blok A No. 1 Balikpapan is used as an office for Sales Area VII and the Investment Property assets are reclassified into building assets using fair value as of January 1, 2019 amounted to Rp2,520,000,000 and Rp1,860,000,000.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya sebesar Rp81.544.418.000 berdasarkan laporan penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik Toha, Okky, Heru dan Rekan tertanggal 19 Januari 2021 dan Kantor Jasa Penilai Publik Wisnu Junaedi dan Rekan.

Pengukuran nilai wajar untuk properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 menggunakan pendekatan nilai pasar dan nilai wajar.

Hierarki nilai wajar untuk properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 menggunakan hierarki nilai wajar Tingkat 2.

The investment properties as at December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp81,544,418,000 are stated at fair value based on independent appraisers valuation report of Toha, Okky, Heru and Partner dated January 28, 2021 and independent appraisers valuation report of Wisnu Junaedi and Patner.

Fair value measurement of investment properties as at December 31, 2020 were used market value and fair value approach.

Fair value measurement of investment properties as at December 31, 2020 and 2019 were using hierarchy Level 2.

17. Aset Hak-Guna

Rincian aset hak-guna adalah sebagai berikut:

	2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Dampak Penerapan PSAK 73/ Impact of Implementation of PSAK 73 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Saldo Akhir/ Ending balance Rp	
Aset Hak Guna						Right-of-Use-Assets
Peralatan	--	178,021,103,421	--	--	178,021,103,421	Plant Equipment
Bangunan	--	9,749,783,754	13,085,317,075	--	22,835,100,829	Building
Jumlah	--	187,770,887,175	13,085,317,075	--	200,856,204,250	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Peralatan	--	19,690,909,357	19,543,868,337	--	39,234,777,694	Plant Equipment
Bangunan	--	4,502,874,494	11,789,567,796	--	16,292,442,290	Building
Jumlah	--	24,193,783,851	31,333,436,133	--	55,527,219,984	Total
Nilai Tercatat	--	163,577,103,324			145,328,984,266	Carrying Value

Beban penyusutan dan beban bunga liabilitas sewa yang diakui masing-masing adalah Rp31.333.436.133 yang dialokasikan ke beban pokok penjualan dan beban usaha. (Catatan 36 dan 37) dan Rp5.246.909.260 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Aset hak-guna bangunan merupakan hak guna atas ruang kantor yang berada di WIKA Tower dan Wilayah Penjualan I di Sumatera Utara selama 2 tahun efektif pada tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2021.

Sedangkan, aset hak-guna yang dikategorikan peralatan perjanjiannya merupakan sewa pembiayaan dan berdasarkan PSAK 30: Sewa sudah diakui sebagai aset sewa pembiayaan di dalam laporan posisi keuangan sebelum penerapan PSAK 73: Sewa. (Catatan 18)

17. Right-of-Use Assets

Details of right of use assets is as follows:

Depreciation expense and interest of lease liabilities recognized amounted to Rp31,333,436,133 which are allocated to cost of revenue and operating expenses. (Notes 36 and 37) and Rp5,246,909,260 for year ended as of December 31, 2020, respectively.

Right-of-use assets building represent right of use of office space located at WIKA Tower and Regional Sales Office I in North Sumatera for 2 years effective on Januari 1, 2019 until December 31, 2021.

Meanwhile, the amount of right-of-use assets categorized as plant equipment which the legal form of the contract is financial lease agreement under PSAK 30: Leases and had been recognized as asset under financial leases in the balance sheet before the implementation of PSAK 73: Leases. (Note 18)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban penyusutan yang diakui adalah Rp217.184.943.125 dan Rp248.650.731.541 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang dialokasikan ke beban pokok penjualan. (Catatan 36).

Beban penyusutan yang diakui adalah Rp1.911.927.851 dan Rp2,378,140,529 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang dialokasikan ke beban usaha. (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp282.850.150.952 dan Rp235.846.488.479.

Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan atas nilai tercatat aset tetap tersebut.

Perusahaan memiliki Aset tambang galian C seluas 1.213.000 m² untuk batu split yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Lampung Selatan. Pemenuhan perijinan untuk masing-masing aset tambang antara lain:

- a. Surat Keputusan Bupati Donggala tanggal 18 Oktober 2013 Nomor: 188.45/0568/DESDM Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), tanggal 24 September 2013 Nomor: 188.45/0507/BLHD Tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Pertambangan, serta Surat Rekomendasi Kepala Dinas PU tanggal 22 Agustus 2013 No.: 660.663/DPU KAB-DGL/VIII/727/2013 Tentang Rekomendasi Tata Ruang.
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor tanggal 27 November 2013 Nomor: 541.3/1657-PU/ESDM Tentang Pemberian Wilayah Ijin Usaha Pertambangan. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 591.1/001/00062/BPT/2014 tanggal 27 Juni 2014 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Perusahaan.
- c. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 503.540/01/UP.E/III.09/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Persetujuan

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Depreciation expenses recognized was Rp217,184,943,125 and Rp248,650,731,541 for the years ended as of December 31, 2020 and 2019 which are allocated to cost of revenue. (Notes 36)

Depreciation expenses recognized was Rp1,911,927,851 and Rp2,378,140,529 for the years ended as of December 31, 2020 and 2019 which are allocated to operating expenses. (Notes 37)

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has property, plant and equipment with acquisition cost that have been fully depreciated and still in use amounted to Rp282,850,150,952 and Rp235,846,488,479 respectively.

The Company believe that there has been no impairment in the carrying amount of fixed assets.

The Company has a mining asset types Pit C with area 1,213,000 sqm of split stone which are located in District Bogor, District Donggala and District South Lampung. Fulfillment of licensing for each of these assets include:

- a. Regent of Donggala Decree dated October 18, 2013 Number: 188.45/0568/DESDM regarding Approval of Mining Permit (IUP), dated September 24, 2013 Number: 188.45/0507/BLHD Regarding Environmental Permit Mining Activities, and Head of Department of Public Works Recommendation Letter dated August 22, 2013 No.: 660.663/DPU KAB-DGL/VIII/727/2013 regarding Recommendations Spatial.
- b. Energy and Mineral Resources of the Head of District Bogor Decree dated November 27, 2013 Number: 541.3/1657-PU/ESDM regarding Giving Territory Mining Permit. Regent of Bogor Regency Decree Number.: 591.1/001/00062/BPT/2014 dated June 27, 2014 regarding Giving Mining Permit (IUP) to exploration for the Company.
- c. Regent of South Lampung Decree dated July 1, 2014 Number: 503.540/01/UP.E/III.09/2014 regarding

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 60 (enam puluh) Hektar dengan komoditas batu andesit.

- d. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/354/IV.03/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pantai seluas 40.014 m² (empat puluh ribu empat belas meter persegi) di Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

Aset dalam pembangunan tanah, tambang, bangunan, prasarana, dan peralatan merupakan aset atas pembangunan pabrik baru, penambangan batu, perluasan pabrik *existing* maupun penambahan prasarana dan peralatan antara lain di Pabrik Majalengka, Pasuruan, Sulawesi Selatan, Lampung Selatan, Subang, *Crushing Plant* Bogor, Palu dan Lampung Selatan.

Aset tanah dengan SHGB No. 8 dan 30 seluas 45.685 m² yang terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Natar, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung serta Mesin dan Peralatan di PPB Lampung dijadikan jaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Catatan 20)

Aset tanah dengan SHGB No.3,118,119,120, 121 dan 604 yang terletak di Jl. Raya Narogong KM 26 Cileungsi Bogor (Kawasan Industri WIKA) dan SHGB No 21387 (Eks SHGB No 6 /Kapasa) yang terletak di Kawasan Industri Makasar dijadikan jaminan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 20)

Reklasifikasi atas aset sewa pembiayaan merupakan dampak atas penerapan PSAK 73. (Catatan 17)

Aset tetap Perusahaan kecuali tanah telah diasuransikan dengan polis Standar Kebakaran Indonesia pada 31 Desember 2020 dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp2.359.254.924.244.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Approval Territory Mining Permit (WIUP) of 60 (sixty) hectares with commodity stones.

- d. *Regent of South Lampung Decree No. B / 354 / IV.03 / HK / 2014 dated July 10, 2014 regarding Granting Permits covering an area of 40,014 sqm (forty thousand and fourteen square meters) Coastal Reclamation in Sumur Village, Ketapang district, South Lampung regency.*

Construction in progress of mine, buildings, infrastructure, and equipment are assets for the construction of new factories, stone mining, expansion of existing factories, and also an increase in infrastructure and plant equipment in Plant Majalengka, Pasuruan, Sulawesi Selatan, Lampung Selatan, Subang, Crushing Plant Bogor, Palu and Lampung Selatan.

Land assets with HGB certificate No. 8 and 30 covering 45,685 sqm located in Bumi Agung Village, Natar Subdistrict, Pesawaran Regency, Province of Lampung, along with machine and heavy equipment in Lampung Factory to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Note 20)

Land assets with SHGB No.3,118,119,120, and 604 located in Jl. Raya Narogong KM 26 Cileungsi Bogor (WIKI Manufacturing Zone), SHGB No 21387 (Eks SHGB No 6 /Kapasa) located in Makassar Manufacturing Zone. are pledged as collateral to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 20)

Reclassification of assets under financial lease represent the impact of implementation of PSAK 73. (Note 17)

The fixed asset of the Company, excepts land, are covered by Indonesian Fire Standard Policy on December 31, 2020 with insurance coverage amounting to Rp2,359,254,924,244.

Management believes that insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

19. Investasi Jangka Panjang Lainnya

Akun ini merupakan investasi Perusahaan pada PT Istaka Karya (Persero) dalam bentuk saham seri C sebanyak 21.419 lembar saham atau 3,28% dengan nilai tercatat:

	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership		Nilai Tercatat Carrying Value	
	2020 %	2019 %	2020 Rp	2019 Rp
PT Istaka Karya (Persero)	3.28%	3.28%	9,153,000,000	21,419,000,000
Jumlah / Total			9,153,000,000	21,419,000,000

*Saham Seri C

Saham seri C tersebut berasal dari konversi piutang dengan PT Istaka Karya (Persero) yang termaktub dalam Akta No.06 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Siti Listiani, S.H., MKn. Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-AH.01.03-0187081 tanggal 4 April 2019.

Berdasarkan Akta No.3 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penegasan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Istaka Karya (Persero) yang dibuat dihadapan Notaris Sita Listiani, S.H., MKn. di Jakarta menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut adanya konversi utang PT Istaka Karya (Persero) kepada kreditur menjadi saham.

Investasi Perusahaan pada PT Istaka Karya (Persero) pada tanggal 31 Desember 2020 dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya sebesar Rp9.153.000.000 berdasarkan laporan penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputri, Dewi Apriyanti dan Rekan tertanggal 16 Januari 2021.

Pengukuran nilai wajar untuk saham seri C PT Istaka Karya (Persero) pada tanggal 31 Desember 2020 menggunakan pendekatan nilai pasar.

19. Other Long Term Investment

This account is the Company's investment in C series shares of PT Istaka Karya (Persero) amounting in total of 21,419 shares or 3.28%:

The C series shares originated from the conversion of receivables from PT Istaka Karya (Persero) as stipulated in Deed No.06 dated January 25, 2019, which was made before Siti Listiani, S.H., MKn. Notary in South Jakarta and was approved by the Minister of Law and Indonesian Human Rights No.AHU-AH.01.03-0187081 dated April 4, 2019.

Based on Deed No. 3 dated October 3, 2019 concerning Confirmation of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as stated in the PT Istaka Karya (Persero) General Meeting of Shareholders made before Notary Sita Listiani, S.H., MKn. in Jakarta stated that as an act of adhering to the conversion of PT Istaka Karya's debt to creditors to be converted into shares.

Company's investment in C series shares of PT Istaka Karya (Persero) as at December 31, 2020 amounted to Rp9,153,000,000 are stated at fair value based on independent appraisers valuation report of Nirboyo Adiputri Dewi Apriyanti and Partner dated January 16, 2021.

Fair value measurement of the C series shares as at December 31, 2020 were used market value approach.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

20. Pinjaman Jangka Pendek

20. Short-Term Loan

Rincian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

Details of the credit facility are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Perusahaan/ The Company		
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Pinjaman Rekening Koran/ <i>Overdraft</i>	184,920,778	11,507,803,349
Pinjaman Tetap/ <i>Fixed Loan</i>	82,000,000,000	10,000,000,000
Pinjaman Non-kas/ <i>Non-cash Loan</i>	796,456,485,093	791,360,800,864
Subjumlah/ Subtotal	878,641,405,871	812,868,604,213
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Pinjaman Non-kas/ <i>Non-cash Loan</i>	74,439,670,201	117,001,329,794
Subjumlah/ Subtotal	74,439,670,201	117,001,329,794
PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk		
Pinjaman Tetap/ <i>Fixed Loan</i>	199,000,000,000	--
Subjumlah/ Subtotal	199,000,000,000	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Pinjaman Non-kas/ <i>Non-cash Loan</i>	70,729,133,687	98,344,533,630
Subjumlah/ Subtotal	70,729,133,687	98,344,533,630
PT Bank Syariah Mandiri		
Pinjaman Non-kas/ <i>Non-cash Loan</i>	196,287,738,040	27,340,636,280
Subjumlah/ Subtotal	196,287,738,040	27,340,636,280
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Rupiah		
PT Bank DKI		
Pinjaman Non-kas/ <i>Non-cash Loan</i>	20,902,838,932	--
Subjumlah/ Subtotal	20,902,838,932	--
PT Bank BTPN Tbk		
Pinjaman Tetap/ <i>Fixed Loan</i>	100,000,000,000	--
Pinjaman Non-kas/ <i>Non-cash Loan</i>	82,455,649,761	--
Subjumlah/ Subtotal	182,455,649,761	--
PT Bank HSBC Indonesia		
Pinjaman Tetap/ <i>Fixed Loan</i>	100,000,000,000	200,000,000,000
Pinjaman Non-kas/ <i>Non-cash Loan</i>	189,595,867,451	225,892,506,055
Subjumlah/ Subtotal	289,595,867,451	425,892,506,055
MUFG Bank, Ltd		
Pinjaman Tetap/ <i>Fixed Loan</i>	--	200,000,000,000
Pinjaman Non-kas/ <i>Non-cash Loan</i>	199,634,151,190	--
Subjumlah/ Subtotal	199,634,151,190	200,000,000,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
Pinjaman Rekening Koran/ <i>Overdraft</i>	--	4,367,273,007
Pinjaman Non-kas/ <i>Non-cash Loan</i>	73,355,755,308	119,038,822,050
Subjumlah/ Subtotal	73,355,755,308	123,406,095,057
PT Bank Permata Tbk		
Pinjaman Non-kas/ <i>Non-cash Loan</i>	117,376,428,220	149,930,116,281
Subjumlah/ Subtotal	117,376,428,220	149,930,116,281
PT Bank Net Indonesia Syariah		
<i>Non Cash Loan</i>	--	20,181,710,015
Subjumlah/ Subtotal	--	20,181,710,015

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2020 Rp	2019 Rp
Entitas Anak/ Subsidiaries		
PT Wijaya Karya Komponen Beton		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Pinjaman Tetap/ Fixed Loan	--	10,000,000,000
Subjumlah/ Subtotal	--	10,000,000,000
PT Wijaya Karya Krakatau Beton		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		
Pinjaman Tetap/ Fixed Loan	--	3,149,187,790
Subjumlah/ Subtotal	--	3,149,187,790
PT Citra Lautan Teduh		
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Pinjaman Non-kas/ Non-cash Loan	49,911,695,902	39,625,675,826
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
Pinjaman Tetap/ Fixed Loan	11,051,121,465	7,944,406,503
Subjumlah/ Subtotal	60,962,817,367	47,570,082,329
Jumlah/ Total	2,363,381,456,028	2,035,684,801,444

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 19 Mei 2020 Perusahaan telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor penawaran pemberian kredit No. CBG.CB2/SCD.SPPK.034/2020 atas pemberian fasilitas kredit terdiri dari Kredit Investasi (*refinancing*), fasilitas KMK *Revolving* senilai Rp15.000.000.000, Fasilitas kredit NCL senilai Rp335.000.000.000, Fasilitas *Supplier Financing* senilai Rp800.000.000.000, Fasilitas *Treasury Line* senilai USD1,000,000, *Bill Purchasing Line* senilai Rp10.000.000.000. Dengan tingkat bunga berkisar 8,12% - 9,50% per tahun.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas sejak 11 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2021.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang, persediaan, tanah dan bangunan. (Catatan 6, 10, dan 18)

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio* minimal sebesar 100%;
- Debt to Equity Ratio* maksimal 400%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

The Company

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

At May 19, 2020 the Company has obtained approval of the extension of credit facilities to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with agreement No.CBG.CB2/SCD.SPPK.034/2020 credit facilities above consist of KI *refinancing*, facilities KMK *Revolving* with of value of Rp15,000,000,000, Credit NCL Facility with of value Rp335,000,000,000, Supplier Financial Facility with value of Rp800,000,000,000, Treasury Line Facility with value of USD1,000,000, Bill Purchasing Line value of Rp10,000,000,000. The interest rate is about 8.12% - 9.50% per year.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is from June 11, 2020 until June 10, 2021.

The loan is collateralized by receivables, inventories, land and building. (Notes 6, 10 and 18)

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current Ratio* of at least 100%;
- Debt to Equity Ratio* maximum of 400%.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied by the terms and conditions of the loans.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp812.868.604.213. Pencairan pinjaman baru di tahun 2020 sebesar Rp1.431.469.626.034. Pembayaran pinjaman di tahun 2020 sebesar Rp1.365.696.824.376. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp878.641.405.871.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 13 Desember 2020 Perusahaan telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor perjanjian No. R.IV.05 CRO/CBO/12/2020. Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 13 Desember 2020 sampai dengan 13 Maret 2021. Perusahaan telah mengajukan perpanjangan perjanjian kredit dengan nomor surat: KU.02.01/WB-0A.016/2020.

Fasilitas yang diberikan berupa Kredit *Non-Cash Loan* dengan limit Rp175.000.000.000 dan fasilitas Penangguhan Jaminan Atas Impor (PJI) Rp28.000.000.000 (*Interchangeable* dengan fasilitas *Non-Cash Loan* dengan limit Rp175.000.000.000).

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang, persediaan, tanah, dan bangunan. (Catatan 6, 10, dan 18).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio* minimal sebesar 100%;
- Debt to Equity Ratio* maksimal 400%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp117.001.329.794. Pencairan pinjaman baru di tahun 2020 sebesar Rp142.280.933.083. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp184.842.592.676. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp74.439.670.201.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

The beginning balance of the year 2020 amounted to Rp812,868,604,213. Total drawdown of loans in 2020 amounted to Rp1,431,469,626,034. Payment of the loan in 2020 amounted to Rp1,365,696,824,376. The Outstanding balance at December 31, 2020 amounted to Rp878,641,405,871.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

On December 13, 2020 the Company has an obtained approval for the extension of a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a treaty number No. R.IV.05 CRO/CBO/12/2020. The validity period of the extended agreement is from December 13, 2020 until March 13, 2021. The company has submitted an additional credit agreement with letter number: KU.02.01 / WB-0A.016 / 2020.

Facilities are provided in the form *Non-Cash Loan* facility with a limit of Rp175,000,000,000 and facilities for *Import Suspension of Guarantees (PJI)* with a limit of Rp28,000,000,000 (*Interchangeable* with *Non-Cash Loan* with a limit of Rp175,000,000,000).

The loan is collateralized with receivables, inventories, land and building. (Notes 6, 10 and 18).

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current Ratio* of at least 100%;
- Debt to Equity Ratio* maximum of 400%.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied by the terms and conditions of the loans.

The beginning balance of the year 2020 amounted to Rp117,001,329,794. Total drawdown of loans in 2020 amounted to Rp142,280,933,083. Payment of the loan in the current year amounted to Rp184,842,592,676. The outstanding balance at December 31, 2020 amounted to Rp74,439,670,201.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 7 Oktober 2020 Perusahaan melakukan persetujuan perpanjangan Fasilitas Kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor BIN/2.1/390/R dimana terdapat tambahan fasilitas KMK sebesar Rp200.000.000.000 dan fasilitas *Non Cash Loan* berupa LC/SKBDN; GB/SBLC; SCF/OAF, T/R sebesar Rp200.000.000.000.

Tingkat bunga berkisar 9,00% per tahun.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 9 November 2020 sampai dengan 8 November 2021.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa Piutang sebesar Rp100.000.000.000 dan Persediaan sebesar Rp100.000.000.000. (Catatan 6 dan 10).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio* minimal sebesar 100%;
- Debt to Equity Ratio* maksimal 400% dan;
- Debt Service Coverage* minimal 100%

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp98.344.533.630. Pencairan pinjaman baru di tahun 2020 sebesar Rp333.679.820.753 Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp361.295.220.426. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.729.133.687.

PT Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal 5 Desember 2019 Perusahaan telah melakukan penandatanganan perubahan atas perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank Syariah Mandiri dengan nomor perjanjian kredit No. TP.02.03/WB-0A.0064/2019.

Fasilitas yang diberikan berupa *Islamic Banking Supplier Financing* dengan total senilai Rp200.000.000.000 dan tingkat nisbah berkisar 8,10% per tahun.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

On October 7, 2020 the Company has obtained an approval for the extension of a credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BIN/2.1/390/R number where there are additional Working Capital Credit facilities amounted to Rp200,000,000,000 and Non-Cash Loan facility in the form of LC / SKBDN; GB / SBLC; SCF / OAF, T / R with total value of Rp200,000,000,000.

The interest rate is around 9.00% per year.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is from November 9, 2020 until November 8, 2021.

Collaterals of the agreement are in the form of Receivables amounting to Rp100,000,000,000 and Inventory amounting to Rp100,000,000,000. (Notes 6 and 10).

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current Ratio* of at least 100%;
- Debt to Equity Ratio* maximum of 400% and;
- Debt Service Coverage* is 100%

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied by the terms and conditions of the loans.

The beginning balance of the year 2020 amounted to Rp98,344,533,630 Total drawdown of loans in 2020 amounted to Rp333,679,820,753 Payment of the loan in the current year amounted to Rp361,295,220,426. The outstanding balance at December 31, 2020 amounted to Rp70,729,133,687.

PT Bank Syariah Mandiri

On December 5, 2018 the Company signed an amendment loan agreement with PT Bank Syariah Mandiri with a number of credit agreement No. TP.02.03/WB-0A.0064/2019.

Facilities provided are in the form of *Islamic Banking Supplier Financing* with a total value of Rp200,000,000,000 and the rate of syariah loan is around 8.10% per year.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jangka waktu perjanjian untuk *Line Supplier Financing* adalah dari tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2021. Jangka waktu perfasilitasnya maksimal 6 bulan dan tidak melebihi jangka waktu *Line Supplier Financing*.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp27.340.636.280. Pencairan pinjaman baru di tahun 2020 sebesar Rp229.377.686.489. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp60.430.584.729. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp196.287.738.040.

PT Bank DKI

Pada tanggal 1 November 2019 Perusahaan telah melakukan penandatanganan perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank DKI dan telah diperpanjang pada tanggal 6 Januari 2021 dengan nomor perjanjian kredit Nomor 27/SPPK/901/I/2021.

Fasilitas kredit terdiri dari Kredit Investasi (refinancing), fasilitas KMK Pinjaman Tetap Berjangka Rp100.000.000.000, dan Fasilitas kredit NCL senilai Rp100.000.000.000 dan tingkat bunga berkisar 8,25% per tahun.

Masa berlaku perjanjian adalah 6 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2022. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan keuangan konsolidasian, perpanjangan perjanjian masih dalam proses.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio* minimal sebesar 100%;
- Debt to Equity Ratio* maksimal 400% dan;
- Debt Service Coverage* minimal 100%

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar nihil. Pencairan pinjaman baru di tahun 2020 sebesar Rp99.367.021.748. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp78.464.182.816. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp20.902.838.932.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

The term of the agreement for the *Supplier Line Financing* is from November 28, 2019 until November 28, 2021. The term of the facility is a maximum of 6 months and does not exceed the term of the *Supplier Line Financing*.

The beginning balance of the year 2020 amounted Rp27,340,636,280. Total drawdown of loans in 2020 amounted to Rp229,377,686,489. Payment of the loan in the current year amounting to Rp60,430,584,729. The outstanding balance at December 31, 2020 amounted to Rp196,287,738,040.

PT Bank DKI

On November 1, 2019, the Company signed a banking facility agreement with PT Bank DKI and it has been extended on January 6, 2021 with credit agreement number Number 27/SPPK/901/I/2021.

Credit facilities above consist of KI refinancing, Credit Working Capital facilities Fixed Term Loans with of value of Rp100,000,000,000 and Credit NCL Facility with of value Rp100,000,000,000 and The interest rate is about 8.25% per year.

The validity period of the agreement is from January 6, 2021 until February 8, 2022. Until the date of issuance the consolidated financial statement, the addendum of agreement still on process.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current Ratio* of at least 100%;
- Debt to Equity Ratio* maximum of 400% and;
- Debt Service Coverage* is 100%

The beginning balance of the year 2020 amounted nil. Total drawdown of loans in 2020 amounted to Rp99,367,021,748. Payment of the loan in the current year amounting to Rp78,464,182,816. The outstanding balance at December 31, 2020 amounted to Rp20,902,838,932.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Pada tanggal 23 September 2020, Perusahaan telah melakukan persetujuan fasilitas kredit kepada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dengan nomor perjanjian B.59/PK -ADK/09/2020 berupa Fasilitas KMK-PRK senilai Rp199.000.000.000 dengan tingkat bunga sekitar 7% pertahun. Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 23 September 2020 sampai dengan 22 September 2021.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa Piutang dan Persediaan sebesar Rp199.000.000.000. (Catatan 6 dan 10)

Saldo pada awal tahun 2020 nihil. Pencairan pinjaman baru di tahun 2020 sebesar Rp199.000.000.000. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp199.000.000.000.

PT Bank BTPN Tbk

Pada tanggal 17 September 2020, Perusahaan telah melakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank BTPN Tbk berdasarkan nomor perjanjian fasilitas No. SMBCI/NS/0487.

Fasilitas yang diberikan berupa fasilitas *cash loan* dalam bentuk *Loan on Note* untuk tujuan modal kerja dengan total senilai Rp100.000.000.000 serta fasilitas dalam bentuk *Commercial L/C, Acceptance, Loan on Note T/R, Loan on Note ARF, Loan on Note APF (1), Loan on Note APF (2), dan Guarantee* dengan limit Rp500.000.000.000.

Tingkat bunga yang digunakan adalah *Cost of Fund + 2%* atau sesuai dengan kesepakatan.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas sejak 31 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang dan persediaan dengan masing-masing senilai Rp600.000.000.000. (Catatan 6 dan 10)

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

On September 23, 2020, the Company has obtained an approval for a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk with a treaty number B.59/PK-ADK/09/2020 credit facilities KMK-PRK with of value of Rp199,000,000,000 with interest rate is around 7% per year. The validity period of the extended agreement is from September 23, 2020 until September 22, 2021.

Collaterals of the agreement are in the form of Receivables and Inventory amounting to Rp199,000,000,000. (Notes 6 and 10)

The beginning balance of the year 2020 was nil. Total drawdown of loans in 2020 amounted to Rp199,000,000,000. Payment of the loan in the current year amounted to Nil. The outstanding balance at December 31, 2020 amounted to Rp199,000,000,000.

PT Bank BTPN Tbk

On September 17, 2020 the Company entered into a facility agreement extension with PT Bank BTPN Tbk formerly based on the facility agreement number No. SMBCI/NS/0487.

Facility provided on cash loan facility are in the form of Loan on Note for the purpose of working capital with a total of Rp100,000,000,000 and facilities in the form of Commercial L / C, Acceptance, Loan on Note T / R, Loan on Note ARF, Loan on Note APF, Loan on Note APF (2), and Guarantee with limit of Rp500,000,000,000.

The interest rate used is *Cost of Fund + 2%* or in accordance with the agreement.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is from August 31, 2020 until August 31, 2021.

The loan is collateralized with receivables and inventories with a value of Rp600,000,000,000. (Notes 6 and 10)

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- a. *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
- b. *Debt to Net Worth* maksimal 350%;
- c. *Interest Coverage Ratio* (EBITDA/
Interest Expense) minimal 200%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Nihil. Pencairan pinjaman baru di tahun 2020 sebesar Rp538.602.524.765. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp356.146.875.004. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah Rp182.455.649.761.

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 2 Januari 2020, Perusahaan telah melakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan perjanjian nomor NO.JAK/200001/U/190808.

Fasilitas yang diberikan berupa fasilitas *Cash Loan* sejumlah Rp100.000.000.000 dan *Non Cash Loan* sebesar Rp500.000.000.000 dan kenaikan tingkat bunga sebesar *Term Lending Rate* 4,3 % dan *Best Lending Rate* 5%.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 7 Desember 2019 sampai dengan 6 Desember 2020. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian tersebut, perpanjangan perjanjian masih dalam proses.

Sebagai jaminan atas fasilitas-fasilitas tersebut diatas, Bank akan selalu memiliki hak jaminan atas seluruh agunan sebagai berikut sehingga seluruh kewajiban debitur kepada Bank sehubungan dengan Perjanjian ini telah dinyatakan lunas oleh Bank secara tertulis.

Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang dan Piutang dengan nilai gabungan sebesar Rp600.000.000.000. dimana Piutang yang dijaminan tidak termasuk milik debitur yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

- a. *Current Ratio* of at least 100%;
- b. *Debt to Net Worth* is 350%;
- c. *Interest Coverage Ratio* (EBITDA /
Interest Expense) is 200%.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied by the terms and conditions of the loans.

The beginning balance of the year 2020 amounted to nil. Total drawdown of loans in 2020 amounted to Rp538,602,524,765. Payment of the loan in the current year amounted to Rp356,146,875,004. The outstanding balance at December 31, 2020 amounted Rp182,455,649.761.

PT Bank HSBC Indonesia

On January 2, 2020, the Company has obtained an approval for the extension of a facility agreement with PT Bank HSBC Indonesia based on the facility agreement number NO.JAK/200001/U/190808.

The facilities provided are in the form of *Cash Loan* facilities amounting to Rp100,000,000,000 and *Non Cash Loan* of Rp500,000,000,000 and bear interest rate of *Term Lending Rate* of 4.3% and *Best Lending Rate* of 5%.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is from December 7, 2019 until December 6, 2020. Until the date of issuance the consolidated financial statement, the addendum of agreement still on process.

As collateral for the above facilities, the Bank will always have the collateral rights to all collaterals as follows so that all liabilities of the debtor to the Bank based on the terms of this Agreement have been declared fully paid by the Bank in writing.

Fiduciary Guarantee on Inventory of Goods and Receivables with a combined value of Rp600,000,000,000. where the *Guaranteed Receivable* does not include the property of the debtor who is more than 1 (one) year old.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

- a. Rasio lancar minimum 100%;
- b. Rasio *Leverage* pada maksimum 400%;
- c. Rasio EBITDA pada terhadap beban bunga pada minimum 200%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pada awal tahun 2020 Rp425.892.506.055. Pencairan pinjaman baru di tahun 2020 sebesar Rp532.899.082.292. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp669.195.720.896. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp289.595.867.451.

MUFG Bank, Ltd

Pada tanggal 21 Desember 2020, Perusahaan telah melakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian fasilitas perbankan dengan MUFG Bank Ltd dengan nomor perjanjian fasilitas No : 115/CF/CDU-NJ/RAD/20/2020-00506559.

Fasilitas yang diberikan berupa Fasilitas Trade impor/lokal/ L/C (Sight/ Usance) dan Garansi (Bank Garansi dan/atau SBLC), dengan batasan fasilitas masing-masing Rp200.000.000.000 dan USD1.000.000.

Masa berlaku perjanjian fasilitas sejak 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2021.

Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang dan tagihan-tagihan dengan nilai gabungan sebesar 100% dari limit fasilitas atau sejumlah Rp600.000.000.000. (Catatan 6 dan 10)

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Cash Ratio* minimal 100%;
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 250%;
- *Current Ratio* minimum 110%;
- *Leverage Ratio* pada maksimum 400%; dan
- *EBITDA Ratio* terhadap beban bunga minimum 200%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

- a. *Current ratio* minimum 100%;
- b. *Leverage ratio* at a maximum of 400%;
- c. *Ratio of EBITDA to the interest expense* at a minimum of 200%.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied by the terms and conditions of the loans.

The beginning balance of the year 2020 was Rp425,892,506,055. Total drawdown of loans in 2020 amounted to Rp532,899,082,292. Payment of the loan in the current year amounted to Rp669,195,720,896. The Outstanding Balance at December 31, 2019 amounted to Rp289,595,867,451.

MUFG Bank, Ltd

On December 21, 2020 the Company entered into a facility agreement extension with MUFG Bank Ltd under the facility agreement number No : 115/CF/CDU-NJ/RAD/20/2020-00506559.

The facilities provided are in the form of import / local / L / C (Sight / Usance) trade facilities and guarantees (Bank Guarantee and / or SBLC), with facility limits of Rp200,000,000,000 and USD1,000,000 respectively.

The validity period of agreement is from December 21, 2020 until December 21, 2021.

Collaterals of the agreement are Inventory and bills with a combined value of 100% from facility limit or amounted Rp600,000,000,000. (Note 6 and 10)

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Cash Ratio* of at least 100%;
- *Debt to Equity Ratio* maximum 250%;
- *Current Ratio* at least 110%;
- *Leverage Ratio* maximum 400%; and
- *EBITDA Ratio to Interest Expense* at least minimum 200%.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied by the terms and conditions of the loans.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Saldo pada awal tahun 2020 Rp200.000.000.000. Pencairan pinjaman baru di tahun 2020 sebesar Rp949.718.620.588. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp950.084.469.398. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp199.634.151.190.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 4 Mei 2020, Perusahaan telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan nomor perjanjian No.081/BN/CBT-VI/V/2020. Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 4 Mei 2020 sampai dengan 4 Mei 2021.

Fasilitas yang diberikan berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK)-*Revolving* sebesar Rp15.000.000.000, Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK)-*Revolving* sebesar Rp250.000.000.000, Fasilitas Pinjaman Tetap (PT)-*Revolving* sebesar Rp250.000.000.000 dan *CC Lines-Revolving* untuk pembukaan LC/SKBDN sebesar Rp250.000.000.000 dan dikenakan bunga sesuai kesepakatan yaitu 9.00% p.a.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio* minimal sebesar 100%;
- Debt to Equity Ratio* maksimal 400% dan;
- Debt Service Coverage* minimal 100%

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang, persediaan, tanah, dan bangunan. (Catatan 6, 10 dan 18).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pada awal tahun 2020 Rp123.406.095.057. Pencairan pinjaman baru di tahun 2020 sebesar Rp212.637.483.854. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp262.687.823.603. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp73.355.755.308.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

The beginning balance of the year 2020 was Rp200,000,000,000. Total drawdown of loans in 2020 amounted to Rp949,718,620,588. Payment of the loan in the current year amounted to Rp950,084,469,398. The outstanding balance at December 31, 2020 amounted to Rp199,634,151,190.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

On May 4, 2020, the Company has obtained an approval for the extension of a credit facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a treaty number No.081/BN/CBT-VI/V/2020. The validity period of the extended agreement is from May 4, 2020 until May 4, 2021.

The facilities provided are in the form of a *Overdraft Revolving* of Rp15,000,000,000, a *Special Transaction Loan Facility (PTK)* of Rp250,000,000,000, *Fixed Loan Facility (PT) Revolving* in the amount of Rp250,000,000,000 and *CC Lines-Revolving* for opening LC/SKBDN in the amount of Rp250,000,000,000 and bear interest rate 9.00% p.a.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current Ratio* minimum of 100%;
- Debt to Equity Ratio* maximum of 400% and;
- Debt Service Coverage* minimum of 100%

The loan is collateralized with receivable, inventories, land and building. (Notes 6, 10 and 18).

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied by the terms and conditions of the loans.

The beginning balance of the year 2020 was Rp123,406,095,057. Total drawdown of loans in 2020 amounted to Rp212,637,483,854. Payment of the loan in the current year amounted to Rp262,687,823,603. The outstanding balance at December 31, 2020 amounted to Rp73,355,755,308.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 29 Juni 2020, Perusahaan telah melakukan persetujuan fasilitas kredit kepada PT Bank Permata Tbk dengan nomor perjanjian 198/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VI/2020.

Fasilitas yang diberikan berupa Omnibus LC Impor dan/atau SKBDN dengan limit masing-masing senilai Rp150.000.000.000 dan suku bunga berkisar 8,00% p.a untuk mata uang Rupiah dan 3,00% p.a untuk mata uang Dolar AS.

Masa berlaku perjanjian fasilitas sejak 19 Juli 2020 sampai dengan 19 Juli 2021.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio* minimal 100%;
- EBITDA/Interest Ratio* minimal 150%; dan
- Debt to Equity Ratio* maksimum 400%.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang (Catatan 6)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pada awal tahun 2020 Rp149.930.116.281. Pencairan pinjaman baru di tahun 2020 sebesar Rp188.596.548.541. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp221.150.236.602. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp117.376.428.220.

PT Bank Net Indonesia Syariah

Pada tanggal 1 September 2020, Perusahaan telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Net Indonesia Syariah d/h PT Bank Maybank Syariah Indonesia dengan nomor perjanjian No.S.2019.065/Dir Global – *Public Sector*

Fasilitas yang diberikan berupa *SKBDN Line / LC Line dan Trust Receipt (TR) Financing* dengan limit masing-masing senilai Rp300.000.000.000 dan tingkat nisbah berkisar 8,75% p.a.

PT Bank Permata Tbk

On June 29, 2020, the Company has obtained an approval for a credit facility from PT Bank Permata Tbk with a treaty number 198/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VI/2020.

The facilities provided are Omnibus LC Import and/or SKBDN with loan limit each consist of Rp150,000,000,000 and interest rate of 8.00% p.a. for Rupiah currency and 3.00% p.a for US Dollar currency.

The validity period of the facility agreement is from July 19, 2020 until July 19, 2021.

The Company is required to comply with several limitations to maintain the following financial ratios:

- Current Ratio* with minimum of 100%;
- EBITDA / Interest Ratio* with minimum of 150%; and
- Debt to Equity Ratio* with maximum of 400%.

The loan is guaranteed with the Company's receivables (Note 6).

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied by the terms and conditions of the loans.

The beginning balance of the year 2020 was Rp149,930,116,281. Total drawdown of loans in 2020 amounted to Rp188,596,548,541. Payment of the loan in the current year amounted to Rp221,150,236,602. The outstanding balance at December 31, 2020 amounted to Rp117,376,428,220.

PT Bank Net Indonesia Syariah

On September 1, 2020, the Company has to obtained an approval for the extension of a credit facility from PT Bank Net Indonesia Syariah formerly PT Maybank Syariah Indonesia with a treaty number No.S.2019.065/Dir Global – *Public Sector*.

The facilities provided are *SKBDN Line / LC Line and Trust Receipt (TR) Financing* with loan limit each consist of Rp300,000,000,000 each and rate of syariah loan of 8.75% p.a.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas sejak 9 Juli 2020 sampai dengan 9 Juli 2021.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
- b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 300%;
- c. *Debt Service Coverage* minimal 100%; dan
- d. *Earning Before Income Tax Depreciation and Amortization/Interest Ratio* minimal 200%.

Saldo pada awal tahun 2020 Rp20.181.710.015. Pembayaran selama tahun 2020 adalah sebesar Rp20.181.710.015. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar nihil.

Entitas Anak

PT Citra Lautan Teduh (CLT)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 18 Januari 2017 CLT telah melakukan persetujuan perjanjian kredit kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan nomor perjanjian No. 3 tahun 2017 dan telah diperpanjang dengan amandemen perjanjian kredit No: 269/AMD/CB/JKT/2017 yang akan berakhir pada Tanggal 14 Juli 2018 dan telah dilakukan perubahan kedua dan pernyataan kembali terhadap akta perjanjian kredit No. 3 tahun 2017 pada tanggal 31 Desember 2018 dengan jatuh tempo fasilitas kredit pada tanggal 14 Juli 2019 dan telah dilakukan perpanjangan sementara sampai dengan 14 Januari 2020. Perusahaan sudah mengajukan kembali persetujuan perpanjangan fasilitas kredit dengan No: KU.02.01/04.CLT.508/2020 pada tanggal 10 Juni 2020 menjadi sampai dengan 14 Juli 2021. Fasilitas yang diberikan berupa Pinjaman Rekening Koran dengan Plafon Rp10.000.000.000, dan Pinjaman Transaksi Khusus yang terdiri dari Kredit Modal Kerja dan *Non-Cash Loan* dengan nilai total sebesar Rp40.000.000.000. Adapun tingkat bunga berkisar antara 9% sampai dengan 10% per tahun.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

The validity period of the extended agreement is from July 9, 2020 until July 9, 2021.

The Company is required to comply with several limitations to maintain the following financial ratios:

- a. *Current Ratio* with minimum of 100%;
- b. *Debt to Equity Ratio* with maximum of 300%;
- c. *Debt Service Coverage* with minimum 100%; and
- d. *Earning Before Income Tax Depreciation and Amortization/ Interest Ratio* with minimum of 200%.

The beginning balance of the year 2020 was Rp20,181,710,015. Payment in 2020 amounting to Rp20,181,710,015. The outstanding balance at December 31, 2020 amounted to nil.

Subsidiaries

PT Citra Lautan Teduh (CLT)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

On January 18, 2017 CLT has entered into a loan agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk with an agreement number No. 3 of 2017 and has been extended with an amendment to credit agreement No. : 269 / AMD / CB / JKT / 2017 which will expire on July 14, 2018 and a second amendment has been made and a restatement of the credit agreement deed No. 3 of 2017 on December 31, 2018 with the maturity of the credit facility on July 14, 2019 and has been carried out until January 14, 2020. The company has submitted the approval for the extension of the credit facility again with No: KU.02.01 / 04.CLT.508 /2020 on June 10, 2020 until July 14, 2021. Facilities provided in the form of Overdraft Facility with plafon with a Ceiling of Rp10,000,000,000, and Special Transaction Loans consisting of Working Capital Loans and Non-Cash Loans with total value of Rp40,000,000,000. The annual interest rates range from 9% to 10%.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo pada awal tahun 2020 Rp7.944.406.503 dan saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.051.121.465.

The beginning balance of the year 2020 was Rp7,944,406,503 and the outstanding balance at December 31, 2020 amounted to Rp11,051,121,465.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Pada tanggal 8 Oktober 2019 PT Citra Lautan Teduh telah melakukan persetujuan perjanjian pemanfaatan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Perusahaan melalui PT Bank Negara Indonesia nomor perjanjian No. BIN/2.1/692/R dengan nilai sebesar Rp50.000.000.000. Per 31 Desember 2020 fasilitas Kredit Modal Kerja untuk pembayaran vendor terpakai sebesar Rp49.911.695.902.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
On October 8, 2019, PT Citra Lautan Teduh approved the agreement for the utilization of the Working Capital Credit facility from the Company through PT Bank Negara Indonesia agreement number No. BIN / 2.1 / 692 / R with a value of Rp50,000,000,000. As of December 31, 2020 the Working Capital Credit facility for used vendor payments of Rp49,911,695,902.

Tingkat bunga berkisar 9,00% per tahun.

The interest rate is around 9.00% per year.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 9 November 2020 sampai dengan 8 November 2021.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is from November 9, 2020 until November 8, 2021.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current Ratio minimal sebesar 100%;
- Debt to Equity Ratio maksimal 400% dan;
- Debt Service Coverage minimal 100%

- Current Ratio of at least 100%;
- Debt to Equity Ratio maximum of 400% and;
- Debt Service Coverage is 100%

21. Liabilitas Sewa

21. Lease Liabilities

Jadwal pembayaran sewa minimum berdasarkan perjanjian sewa Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The future minimum lease payments required under the company's outstanding lease agreements as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Kurang dari 1 tahun	46,093,887,369	85,259,547,661	Less Than 1 year
Antara 1-3 tahun	729,370,460	35,391,446,414	Between 1 - 3 years
Jumlah	46,823,257,829	120,650,994,075	Total
Dikurangi bagian bunga	(1,917,178,603)	(8,491,277,286)	Less amount applicable to interest
Nilai kini Pembayaran sewa minimum	44,906,079,226	112,159,716,789	Present value of minimum lease payment
Dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun	(44,193,711,079)	(77,947,654,987)	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang	712,368,147	34,212,061,802	Long-term maturities

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities are as follows:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Aset Sewa Pembiayaan / Lease Assets	Nomor Kontrak/ Contract Number	Tanggal Transaksi/ Transaction Date	Jangka Waktu/ Term	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jumlah Unit/ Total Unit	Pokok Pinjaman/ Principle Amount	Beban Bunga/ Interest Rate
Entitas Induk - PT Wijaya Karya Beton Tbk							Parent Entity - PT Wijaya Karya Beton Tbk	
1	Bas Bender (Takeda) TB 42,6, 6 (Six) Units Bar Cutter (Toyo) TK 42	00204-001	8-Jun-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	6	765,440	20,560
2	Structure Gantry Crane 1X20 Ton + Accessories Crane	00204-002	10-Jul-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	2	889,656	27,344
3	Struktur Gantry Crane 20x40 ton	00204-003	20-Aug-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	2	1,012,934	35,066
4	Used Concrete Pump IHI Truck Isuzu Model CVR17K	00204-004	28-Jun-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	1	765,439	20,561
5	Kaesar Compressor ASD-40 SIGMA, 1 Unit Kaeser Refrigerant TC-36, 1 Unit Eco Drain	00204-005	8-Jun-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	1	765,433	20,567
6	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34 KMX	00204-006	20-Aug-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	2	1,012,932	35,068
7	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34 KMX, 2 Unit Gentong Mixer True Max,	00204-007	20-Aug-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	2	1,012,934	35,066
8	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34 KMX, 1 unit Gentong Mixer True Max	00204-008	10-Jul-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	1	991,484	56,516
9	Monorail MISIA Wire Rope Hoist 40 Ton	00204-009	8-Jun-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	2	765,438	20,562
10	Used Generator Set Hartec HT-750 CN	00204-010	19-Jul-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	1	889,684	27,316
11	Crawler Crane 100T Sumitomo SC 1000, Tahun 1995	00204-011	27-Jul-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	1	889,658	27,342
12	Compression Testing Machine 3000 KN Matest Italy, 1 Pc Graphic printer C127N, 1 Pc Distance Pieces	00204-012	20-Aug-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	1	1,012,912	35,088
13	Lowbed Trailer Kap 6000 Kg Double Busneck Lebar 3-3,2 Meter	00204-013	20-Jul-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	1	997,529	50,471
14	Tower Crane Hammer Head Model MC 310	00204-015	20-Jul-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	1	889,682	27,338
15	Lowbed Trailer	00204-016	20-Dec-18	36 bulan	9,15 % p.a (effective)	1	1,496,775	75,225
16	Monorail MISIA Wire Rope Hoist 40 Ton	00204-017	20-Oct-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	2	1,256,686	53,314
17	ISUZU Concrete Pump	00204-018	20-Oct-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,263,218	56,782
18	Wheel Loader	00204-019	20-Oct-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,263,212	56,788
19	Water chiller 60pk second, 1 unit tangki 3000 liter, 2 unit pompa sirkulasi	00204-020	20-Oct-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,263,180	56,820
20	Batching plant	00204-021	20-Oct-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,263,219	56,781
21	Genset Set	00204-022	20-Dec-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,503,863	80,137
22	Jembatan Timbang 9m	00204-023	20-Nov-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,384,032	67,968
23	Crawler crane	00204-024	20-Oct-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,263,218	56,782
24	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34 KMX, 2 Unit Gentong Mixer True Max,	00204-025	20-Nov-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	2	1,384,042	67,958
25	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34 KMX, 2 Unit Gentong Mixer True Max,	00204-026	20-Nov-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	2	1,384,042	67,958
26	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34	00204-027	20-Nov-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,384,036	67,964
27	Generator set "silent type" 300 KVA	00204-028	20-Nov-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,384,009	67,991
28	ISUZU Concrete Pump	00204-029	20-Dec-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,503,892	80,108
29	Wheel Loader	00204-030	20-Nov-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,384,028	67,972
30	Batching Plant HZS240CS	00204-031	20-Jul-19	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,340,372,514	43,760,486
31	SDLG Wheel Loader	00204-032	20-Nov-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	1	1,384,028	67,972
32	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34	00204-033	20-Dec-18	36 bulan	9,69 % p.a (effective)	2	424,593,090	10,445,910
33	Fiat Bed Trailer	00204-034	20-Dec-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	1,503,349	80,651
34	Kyokuto mixer	00204-035	20-Dec-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	5	1,503,409	80,591
35	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34	00204-036	20-Nov-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	424,783,659	10,515,341
36	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34	00204-037	20-Nov-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	423,714,525	10,489,475
37	Wheel Loader	00204-038	20-Apr-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	282,715,142	5,864,858
38	Head Truck Hino FM 260 JM, year 2018 included Karoseri Dump	00204-039	20-Mar-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	5	706,582,186	11,605,814
39	Head Truck	00204-040	20-Dec-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	5	1,471,754	112,246
40	Batching Plant HZS240C8	00204-041	20-Aug-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	1,549,541,456	57,389,202
41	Wheel Loader	00204-042	20-Dec-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	1,480,998	103,002
42	Water chiller 60pk second, 1 unit tangki 3000 liter, 2 unit pompa sirkulasi	00204-043	20-Feb-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	28,651,501	436,499
43	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34	00204-044	20-May-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	423,714,525	10,489,475
44	Jembatan Timbangan	00204-046	20-Feb-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	19,084,821	337,179
45	Genset Set	00204-047	20-Apr-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	67,092,332	1,467,668
46	Wheel Loader	00204-048	20-May-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	351,607,238	8,721,762
47	Batching plant	00204-049	20-Apr-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	562,395,090	11,568,910
48	Batching Plant	00204-050	20-May-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	807,609,090	19,924,910
49	Genset Stamford	00204-051	20-May-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	165,135,973	4,173,027
50	Patria Concrete Mixer	00204-052	20-Aug-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	20	1,705,591,081	63,072,919
51	Head Truck HINO FM 260 JD 2019	00204-053	20-Jul-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	10	2,668,510,448	87,545,552
52	Head Truck HINO FM 260 JD 2019	00204-054	20-Jul-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	10	2,668,510,448	87,545,552
53	Head Truck HINO FM 260 JD 2019	00204-055	20-Jul-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	6	1,601,520,498	52,588,502
54	Quester Rigid Truck CWE28064R include Karoseri	00204-056	20-Jul-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	5	1,598,612,956	52,493,044
55	Quester Rigid Truck CWE28064R include Karoseri	00204-057	20-Jul-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	5	1,598,612,956	52,493,044
56	Head Truck Quester Rigid Truck CWE28064R	00204-058	20-Aug-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	10	2,785,671,339	102,936,661
57	Kyokuto Mixer Type EA 133-30W	00204-059	20-May-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	8	432,468,212	10,717,788
58	Kyokuto Mixer Type EA 133-30W	00204-060	20-May-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	8	432,468,212	10,717,788
59	Stamford Generator Set Type 590 KVA	00204-061	20-Aug-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	241,745,838	9,046,162
60	Stamford Generator Set Silent Type 575 KVA	00204-062	20-Aug-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	482,523,554	17,932,446
61	Wheel Loader Model SDLG 956F	00204-063	20-Aug-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	569,174,160	21,129,840
62	Wheel Loader SDLG 956F	00204-064	20-Jul-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	500,208,731	16,505,269
63	Batching Plant Zoomlion HZS 270	00204-065	20-Jul-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	1,461,128,401	47,989,603
64	Head Truck Quester GWE28064R	00204-066	20-May-19	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	252,182,524	8,380,476
65	Unit trailer sliding 1.0m3	00204-067	20-Mar-20	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	207,733,123	13,945,877
66	Hydraulic Excavator 1.0 m3.2016 Komatsu PC200-8 Used	00204-068	29-May-20	36 bulan	9,5 % p.a (effective)	1	2,099,651,750	143,034,970
67	Sewa Ruang dan Jasa Pengelolaan Gedung Wika Tower I	TP.01.03/A.SEKPER.6 4245/2019	1-Jan-19	36 bulan	8,5 % p.a (effective)	1	6,433,594,797	533,454,173
Entitas Anak - PT Citra Lautan Teduh							Subsidiary - PT Citra Lautan Teduh	
68	Peralatan Jalur Putar	00511-001	25-Oct-18	36 bulan	10,3 % p.a (effective)	1	5,395,080,000	241,258,443
Entitas Anak - PT Wijaya Karya Krakatau Beton							Subsidiary - PT Wijaya Karya Krakatau Beton	
69	Batching Plant, Truck Mixer	00449-001	9-Apr-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	1,164,559,616	21,795,418
70	Truck Mixer	00449-002	5-Jun-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	689,052,135	19,223,865
71	Diesel Genset 350Kva	00449-003	30-Apr-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	54,991,253	1,104,747
72	Wheel Loader	00449-004	30-Apr-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	62,188,332	1,235,688
73	Dump Truck	00449-005	5-Jun-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	602,833,919	16,818,081
74	Truck Mixer HINO	00449-006	9-Oct-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	2	1,032,591,664	49,138,336
75	Truck Mixer HINO	00449-007	30-Oct-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	516,294,804	24,565,196
76	Genset Stamford 20Kva	00449-008	9-Oct-18	36 bulan	9,75 % p.a (effective)	1	30,603,208	1,456,792
Jumlah/ Total							44,906,079,226	1,917,178,603

22. Utang Usaha

Utang subkontraktor merupakan utang kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang di subkontraktorkan, seperti pekerjaan *stressing*, pemasangan, biaya angkut, penurunan beam, biaya pematokan dan lain-lain.

22. Trade Payables

Subcontractor payables a third party for work at subcontractor, such as stressing, installation, freight costs, reduction in beam, and peg the cost of others.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Utang pemasok merupakan utang atas pembelian bahan baku untuk pelaksanaan pekerjaan/proyek, seperti pembelian semen, pasir, besi, plat sambung dan lain-lain.

Supplier payables is payable on the purchase of raw materials for the execution of the work / project, such as the purchase of cement, sand, iron, connecting plate etc.

Utang investasi digunakan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan dengan tujuan pengembangan atau pembangunan perusahaan.

Investment payables are used to purchase items that will be used with the purpose of development or construction company.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of account payables are as follows:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Utang Pemasok	461,405,474,563	410,088,444,264	Supplier Payables
Utang Subkontraktor	239,667,292,435	463,551,181,321	Subcontractors Payables
Utang Investasi	17,101,134,493	24,907,716,747	Investment Payables
Jumlah	718,173,901,491	898,547,342,332	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang asing:

Details of account payables based on foreign currency:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Pihak ketiga			Third Parties
Rupiah	621,979,443,508	854,545,689,259	Rupiah
USD	1,038,336,915	3,430,471,312	USD
Euro	285,082,510	--	Euro
SGD	--	1,117,675,662	SGD
Subjumlah	623,302,862,933	859,093,836,233	Subtotal
Pihak berelasi			Related Parties
Rupiah	94,871,038,558	39,453,506,099	Rupiah
Jumlah	718,173,901,491	898,547,342,332	Total

Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur diterima adalah sebagai berikut:

The aging accounts payable is calculated from the date of invoice have been received are as follows:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Belum Jatuh Tempo	172,560,845,206	427,895,488,775	Current Due
Lewat Jatuh Tempo :			Overdue :
> 1 - 60 hari	261,120,985,465	298,957,441,989	> 1 - 60 days
> 61 - 150 hari	207,831,581,089	96,377,247,290	> 61 - 150 days
> 151 - 360 hari	67,740,658,458	67,502,061,281	> 151 - 360 days
> Lebih dari 360 hari	8,919,831,273	7,815,102,997	> Over 360 days
Jumlah	718,173,901,491	898,547,342,332	Total

Rincian utang usaha kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Details of account payables to related and third parties are as follow:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Pihak Berelasi	94,871,038,558	39,453,506,099	Related Parties
Pihak Ketiga	623,302,862,933	859,093,836,233	Third Parties
Jumlah	718,173,901,491	898,547,342,332	Total

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok
atau *supplier* adalah sebagai berikut:

Details of account payables to supplier are
as follow:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Utang Pemasok/ Supplier Payable		
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	55,519,354,700	15,324,265,800
PT Semen Padang	16,458,538,950	--
PT Semen Indonesia Beton	4,926,143,950	2,660,861,000
PT Semen Tonasa	2,620,453,005	15,807,091,900
PT Bhanda Ghara Rekasa (Persero)	1,443,717,450	1,556,112,510
Lain-lain dibawah Rp3 Miliar/ Others below Rp3 Billion	612,141,862	973,069,576
Subjumlah/ Subtotal	81,580,349,917	36,321,400,786
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Utang Subkontraktor/ Subcontractors Payable		
PT Pindad (Persero)	12,788,036,500	--
Lain-lain dibawah Rp 3 Miliar/ Others below Rp3 Billion	502,652,141	3,132,105,313
Subjumlah/ Subtotal	13,290,688,641	3,132,105,313
Jumlah/ Total	94,871,038,558	39,453,506,099
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Utang Pemasok/ Supplier Payable		
PT Sinar Indah Jaya Kencana	25,176,022,273	11,135,447,500
PT Sumiden Serasi	16,209,558,550	12,760,880,870
PT Kingdom Indah	15,301,419,175	20,422,574,250
PT Kabatama Raya	15,093,118,075	21,511,204,770
PT Citra Baru Steel	14,745,926,452	5,895,114,295
PT Librindah Jaya	14,656,712,988	5,387,233,206
PT Intisumber Baja Sakti	13,420,443,531	13,029,424,306
PT Kopkar Beton Makmur Wijaya	12,826,981,794	14,674,550,814
PT Sino Persada	12,536,457,135	--
PT Intiroda Makmur	9,890,363,800	27,514,154,150
PT Inti Beton	9,198,271,400	--
PT Mitra Jasa Mineral	8,633,752,727	--
PT The Master Steel Manufactory	7,511,875,328	--
PT Karya Pandawa	7,181,123,810	--
PT Indocement	6,879,967,653	--
PT Surabaya Express	6,155,713,000	--
PT Mills & Mines	6,031,694,300	7,078,898,700
PT Garuda Mas	5,398,756,460	--
PT Sinar Indah Perkasa	5,331,440,000	5,854,176,000
PT Redja Abadi Persada	5,200,102,819	--
PT Kimia Kostruksi Indonesia	4,868,792,000	--
PT Muara Lancar Abadi	4,845,435,560	--
PT Girder Indonesia	4,843,786,849	5,496,728,500
PT Cahaya Mulia Indoperkasa	4,747,501,373	--
PT Karya Lampung Abadi	4,499,176,050	--

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2020 Rp	2019 Rp
PT Jaya Glassindo Abadi	4,496,644,636	--
PT Haromaian Prima	4,070,387,397	--
PT Mct Trading	3,943,964,596	--
PT Merah Putih / Cemindo Gemilang	7,496,233,580	--
PT Dana Raya Nusantara	3,798,889,300	--
PT Focon Indo Beton	3,720,376,950	15,371,240,162
PT Ekatama Putra Perkasa	3,500,736,090	--
PT Balikpapan Readymix	3,373,998,509	7,617,388,926
PT Dipo Karya Mandiri	3,300,244,950	--
PT Lintang Baru Perdana	3,292,029,400	5,099,385,900
CV Delta Mas	3,188,005,125	10,834,572,725
PT Lintas Bangun Jaya	3,086,389,794	--
Lain-lain dibawah Rp3 Miliar/ <i>Others below Rp3 Billion</i>	91,372,831,217	184,084,068,404
Subjumlah/ Subtotal	379,825,124,646	373,767,043,478
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Utang Investasi/ Investment Payable		
CV Delta Mas	4,354,235,000	3,890,912,568
CV Karunia Jaya	3,758,910,500	3,771,000,000
PT United Traktor Tbk	3,575,000,000	--
CV Lancar Jaya	1,879,305,500	--
Lain-lain dibawah Rp1 Miliar/ <i>Others below Rp1 Billion</i>	3,533,683,493	17,245,804,179
Subjumlah/ Subtotal	17,101,134,493	24,907,716,747
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Utang Subkontraktor/Subcontractors Payable		
PT Redja Abadi Persada	26,009,406,400	18,281,974,640
CV Erection Beton Tangguh	16,078,798,255	13,796,691,238
PT Wahana Anugerah Pratama	9,890,363,800	9,314,631,320
CV Atlanticoindo Jp	9,549,462,075	8,586,465,373
CV Budi Jaya	8,633,752,727	9,733,628,824
PT Sima Trans Indonesia	7,181,123,810	7,911,758,144
CV Bonk Transindo	4,843,786,849	11,753,038,830
PT Bintang Jaya Permana	4,412,577,169	3,741,544,073
PT Pandrol Indonesia	4,335,415,709	--
PT Mulia Abadi Sentosa Indonesia	4,299,270,500	11,615,313,330
CV Cahaya Mitra Sukses	4,130,563,516	--
PT Concrete Technology Indonesia	3,990,966,997	--
PT Indah Jaya Karya	3,943,964,596	5,629,352,190
Lain-lain dibawah Rp3 Miliar/ <i>Others below Rp3 Billion</i>	119,077,151,391	360,054,678,046
Subjumlah/ Subtotal	226,376,603,794	460,419,076,008
Jumlah/ Total	623,302,862,933	859,093,836,233

23. Perpajakan

23. Taxes

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2020 Rp	2019 Rp	
Perusahaan			The Company
PPh 28a	38,408,883,218	--	<i>Income Tax Article 28</i>
PPh Pasal 4(2)	117,618,217	3,409,991,187	<i>Income Tax Article 4(2)</i>
Pajak Pertambahan Nilai	350,524,973,491	373,534,774,575	<i>Value Added Tax</i>
Subjumlah	389,051,474,926	376,944,765,762	Subtotal

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Entitas Anak			Subsidiaries
PPh pasal 22	3,327,785,493	1,778,495,434	Income Tax Article 22
PPh pasal 23	4,690,265	3,719,250	Income Tax Article 23
PPh Pasal 28a	5,641,079,976	--	Income Tax Article 28
Pajak Pertambahan Nilai	24,739,852,098	29,847,070,341	Value Added Tax
Subjumlah	33,713,407,832	31,629,285,025	Subtotal
Jumlah	422,764,882,758	408,574,050,787	Total

b. Utang Pajak

	2020 Rp	2019 Rp	
Perusahaan			The Company
PPh Pasal 4(2)	5,936,867,142	16,757,178,950	Income Tax Article 4(2)
PPh pasal 21	6,740,214,987	10,902,132,542	Income Tax Article 21
PPh pasal 22	2,844,458,988	3,888,015,266	Income Tax Article 22
PPh pasal 23	1,921,946,195	2,706,013,593	Income Tax Article 23
PPh pasal 26	54,951,356	322,119,846	Income Tax Article 26
PPh pasal 29	--	29,663,986,815	Income Tax Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	32,379,425,604	45,899,592,205	Value Added Tax
Subjumlah	49,877,864,272	110,139,039,217	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
PPh Pasal 4(2)	26,740,655	18,833,927	Income Tax Article 4(2)
PPh pasal 15	--	4,272,000	Income Tax Article 15
PPh pasal 21	247,578,602	632,794,788	Income Tax Article 21
PPh pasal 22	13,259,037	50,274,328	Income Tax Article 22
PPh pasal 23	322,094,204	223,555,256	Income Tax Article 23
PPh pasal 29	--	1,475,563,000	Income Tax Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	130,107,977	2,617,852,608	Value Added Tax
Utang Pajak Lain-lain	--	1,067,777,175	Other Tax Payable
Subjumlah	739,780,475	6,090,923,082	Subtotal
Jumlah	50,617,644,747	116,229,962,299	Total

b. Tax Payable

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

	2019 Rp	Dampak Penerapan PSAK Baru/ Impact of Implementation of New PSAK Rp	Saldo s/d Januari 2020/ Balance up to January 2020 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba (Rugi)/ Credit (Expenses) to Profit or Loss Rp	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income Rp	2020 Rp	
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan							Deferred Tax Asset (Liabilities)
Perusahaan							The Company
Penyisihan Piutang	7,589,321,895	59,168,760,481	66,758,082,376	(23,039,558,687)	--	43,718,523,689	Allowance for Receivables
Imbalan Pascakerja	16,713,356,976	--	16,713,356,976	(13,201,286,248)	779,505,237	4,291,575,965	Post-employment Benefit
Penyusutan Aset Tetap	(53,970,315,529)	--	(53,970,315,529)	5,032,688,794	--	(48,937,626,735)	Depreciation of Fixed Assets
Aset Hak Guna-Bersih	--	--	--	(19,470,164,695)	--	(19,470,164,695)	Right-of-Use Assets-Net
Rugi Fiskal	--	--	--	40,959,301,095	--	40,959,301,095	Fiscal Loss
Aset Pajak Tangguhan Perusahaan	(29,667,636,658)	59,168,760,481	29,501,123,824	(9,719,019,741)	779,505,237	20,561,609,319	Deferred Tax Asset of The Company
Aset Pajak Tangguhan Entitas Anak	3,911,023,727	--	--	2,361,289,192	--	6,272,312,919	Deferred Tax Asset of Subsidiaries

c. Deferred Tax Asset (Liabilities)

	2018 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba (Rugi)/ Credit (Expenses) to Profit or Loss Rp	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income Rp	Penyesuaian/ Adjustment Rp	2019 Rp	
Aset Pajak Tangguhan (Liabilitas)						Deferred Tax Assets (Liabilities)
Penyisihan Piutang	12,318,268,291	(4,728,696,396)	--	(250,000)	7,589,321,895	Allowance for Receivables
Imbalan Pascakerja	22,088,019,646	(359,790,402)	(2,234,525,047)	(2,780,340,628)	16,713,356,976	Post-employment Benefit
Penyusutan Aset Tetap	(45,763,786,810)	(6,489,405,307)	--	(1,717,130,005)	(53,970,322,122)	Depreciation of Fixed Assets
Jumlah	(11,357,498,873)	(11,577,892,105)	(2,234,525,047)	(4,497,720,633)	(29,667,636,658)	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan Entitas Anak	(243,932,540)	243,932,540	--	--	--	Deferred Tax Liabilities of Subsidiaries
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	(11,601,431,413)	(11,333,959,565)	--	--	(29,667,636,658)	Total Deferred Tax Liabilities
Aset Pajak Tangguhan Entitas Anak	1,312,527,614	2,598,496,113	--	--	3,911,023,727	Deferred Tax Asset of Subsidiaries
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	1,312,527,614	2,598,496,113	--	--	3,911,023,727	Total Deferred Tax Assets

Manajemen berkeyakinan bahwa aset (liabilitas) pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan waktu dapat direalisasikan pada tahun-tahun mendatang.

The Management believes that the deferred tax assets (liabilities) that resulted from the temporary differences are realizable in future years.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

d. Beban Pajak Penghasilan

	2020 Rp	2019 Rp
Pajak Kini		
Perusahaan	--	100,153,107,979
Penyesuaian Tahun Lalu	--	(4,703,884,504)
Entitas Anak	--	6,876,403,749
Sub jumlah	--	102,325,627,224
Pajak Tanggungan		
Perusahaan	9,719,019,741	16,075,612,736
Entitas Anak	(2,361,289,192)	(2,842,428,653)
Sub jumlah	7,357,730,549	13,233,184,083
Jumlah	7,357,730,549	115,558,811,307

d. Income Tax Expense

Current Tax
The Company
Adjustment in respect of Prior Year
Subsidiaries
Sub total
Deferred Tax
The Company
Subsidiaries
Sub total
Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi Perusahaan dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax according to the Company's of profit or loss statement with taxable income as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Laba Konsolidasian Sebelum Pajak Penghasilan	130,504,809,969	626,270,544,710	Consolidated Income Before Income Tax
Dikurangi Rugi (Laba) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	3,306,769,316	(22,662,031,386)	Less Loss (Profit) Before Income Tax Subsidiaries
Laba sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	133,811,579,285	603,608,513,324	Income Before Income Tax Company
Ditambah :			Added :
Penyusutan - Akuntansi	205,912,631,244	211,598,912,410	Depreciation - Accounting
Imbalan Pascakerja	--	5,804,319,512	Post-employee Benefits
Beban yang Tidak dapat di Kurangkan Menurut Pajak	--	50,628,380,945	Nondeductable Expense
Denda Pajak	6,511,765,201	12,974,617,738	Tax Penalties
Jumlah	212,424,396,445	281,006,230,605	Total
Dikurangi :			Deduct :
Penyusutan - Fiskal	212,490,829,357	237,556,533,637	Depreciation - fiscal
Realisasi Imbalan Pascakerja	5,880,566,735	4,365,157,903	Contribution for Employee Benefits
Penyisihan (Pemulihan)			Allowance (Recovery)
Pencadangan Piutang	68,311,767,281	18,914,785,583	for Doubtfull Account
Imbalan Pascakerja	54,125,279,845	--	Post-employee Benefits
Beban yang Tidak dapat di Kurangkan Menurut Pajak	46,723,084,514	--	Nondeductable Expense
Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan	2,395,116,000	2,723,404,977	Land and building rent income
Pendapatan (Beban) Bunga	23,022,158,495	7,104,270,440	Interest Income
Beban Angsuran Leasing	74,740,104,744	59,894,542,804	Leasing Installment Expense
Penghasilan Yang Kena Pajak Final	44,725,710,102	153,443,616,668	Final Taxable Income
Jumlah	532,414,617,073	484,002,312,012	Total
Laba (Rugi) kena pajak	(186,178,641,343)	400,612,431,917	Taxable Income (Loss)
Pembayaran Pajak Dimuka Perusahaan :			Prepaid Income Tax The Company:
Pajak kini perusahaan	--	100,153,107,979	Current Tax
Dikurangi :			Deduct :
PPH pasal 22	(21,659,595,108)	(33,932,103,071)	Income Tax Article 22
PPH pasal 23	(606,705,473)	(1,390,012,961)	Income Tax Article 23
PPH pasal 25	(16,142,582,637)	(35,167,005,132)	Income Tax Article 25
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan	(38,408,883,218)	29,663,986,815	Income Tax Under (Over) Payment

Tidak terdapat perbedaan antara beban pajak penghasilan yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan Laporan Keuangan Auditan tahun 2019.

There is no difference between corporate income tax reported in the Annual Tax Return and Audited Financial Statements for the year 2019.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

In accordance with the article 5 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 concerning Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2020 are State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang. Menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2020 Pasal 2 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.

2019 (COVID-19) and / or in Framework for Dealing with Threats Harm National Economy and / or Financial System Stability into Laws. Establish Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 30 of 2020 article 2, regarding the reduction of the taxable income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments is 22% (twenty two percent) applicable to the tax year 2020 and 2021.

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax benefit (expense) and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Laba Sebelum Beban Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	130,504,809,969	626,270,544,710	<i>Profit before Tax per Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Dikurangi:			<i>Deduct:</i>
Laba Entitas Anak	3,306,769,316	(22,662,031,386)	<i>Income of Subsidiaries</i>
Laba Sebelum Beban Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perusahaan	133,811,579,285	603,608,513,324	<i>Profit before Tax as Presented in the Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income The Company</i>
Pajak Penghasilan Dihitung dengan Tarif efektif	--	150,902,128,331	<i>Income Tax at Effective Tax Rate</i>
Pengaruh Pajak atas (Penghasilan) Beban yang Tidak Dapat Diperhitungkan	17,769,517,070	(39,890,709,052)	<i>Tax Effect of Nontaxable (Income) Expenses-Net</i>
Penyesuaian Tahun Berjalan	(8,050,497,329)	5,217,301,436	<i>Adjustment in Respect of Current Year</i>
Jumlah Beban Pajak Perusahaan	9,719,019,741	116,228,720,715	<i>Total Tax Expense of the Company</i>

e. Pemeriksaan Pajak

Selama tahun berjalan, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

e. Tax Audits

For the year ended, the Company has received the Tax Assessment Letter, the detail as of follow:

Tahun Pajak 2017

Pada Maret 2020, Perusahaan memperoleh sisa dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN untuk tahun pajak 2017 sebesar Rp73.016.874.404. Perusahaan sudah menerima restitusi atas lebih bayar tersebut.

Tax Year 2017

In March 2020, The Company has received the rest of Tax Overpayment Assesment Letter of VAT for fiscal year 2017 amounted to Rp73,016,874,404 The Company has been received the tax refund.

No/ No.	Jenis Surat/ Tax Letter	Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Letter No.	Tanggal Surat/ Date Issued	Period/ Period	Jumlah/ Total
1	Lebih Bayar PPN/ Overpayment Tax Return VAT	00010/407/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Januari 2017/ January 2017	(33,159,735,146)
2	Lebih Bayar PPN/ Overpayment Tax Return VAT	00011/407/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Februari 2017/ February 2017	(4,975,730,722)
3	Lebih Bayar PPN/ Overpayment Tax Return VAT	00012/407/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Maret 2017/ March 2017	(6,678,142,053)
4	Lebih Bayar PPN/ Overpayment Tax Return VAT	00013/407/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	April 2017/ April 2017	(8,399,787,330)
5	Lebih Bayar PPN/ Overpayment Tax Return VAT	00014/407/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Juli 2017/ July 2017	(1,860,399,708)
6	Lebih Bayar PPN/ Overpayment Tax Return VAT	00015/407/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Agustus 2017/ August 2017	(15,598,312,191)
7	Lebih Bayar PPN/ Overpayment Tax Return VAT	00016/407/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	September 2017/ September 2017	(2,344,767,254)
Total					(73,016,874,404)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Pada Maret 2020, Perusahaan membayar sisa dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN untuk tahun pajak 2017 sebesar Rp2.857.047.814. Perusahaan sudah membayar atas kurang bayar tersebut.

In March 2020, The Company has paid the rest of Tax Underpayment Assessment Letter of VAT for fiscal year 2017 amounted to Rp2,857,047,814. The Company has been paid the underpayment.

No / No.	Jenis Surat / Tax Letter	Nomor Surat Ketetapan Pajak / Tax Assessment Letter No.	Tanggal Surat / Date Issued	Period / Period	Jumlah / Total
1	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	0001/227/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Mei 2017/ May 2017	45,996,920
2	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	00005/207/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	September 2017/ September 2017	79,550,052
3	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	00006/207/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Oktober 2017/ October 2017	225,324,176
4	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	00007/207/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	November 2017/ November 2017	370,241,834
5	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	00008/207/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Desember 2017/ December 2017	1,667,754,782
6	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	00001/287/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Januari 2017/ January 2017	25,695,538
7	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	00002/287/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Februari 2017/ February 2017	40,933,950
8	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	00003/287/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	April 2017/ April 2017	55,118,160
9	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	00004/287/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Mei 2017/ May 2017	15,230,384
10	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	00004/207/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Mei 2017/ May 2017	205,161,804
11	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	00005/287/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	November 2017/ November 2017	113,960,000
12	Kurang Bayar PPN/ Underpayment Tax Return VAT	00006/287/17/093/20	14 Februari 2020/ February 14, 2020	Desember 2017/ December 2017	12,080,214
Total					2,857,047,814

24. Uang Muka dari Pelanggan

Rincian uang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi/ Related Parties

High Speed Railway Contractor Consortium
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung
Lain-lain di bawah Rp1 Miliar/Others below Rp1 Billion

Subjumlah/ Subtotal

Pihak Ketiga/ Third Parties

Shimizu-Adhi Karya JV
PT Bosowa Marga Nusantara
Balai Perkeretaapian
KSO Calista Perkasa M- Mitra Sinergi V
JO RDMP-Balikpapan
PT Kalapa Satangkal Makmur
PT Ganesha Bangun
PT Triroyal Timurraya
PT Alfa Goldland Realty
PT Pusaka Abadi Mandiri
PT Dizamatra Powerindo
PT Taco Anugrah Corporindo
Lain-lain di bawah Rp1 Miliar/Others below Rp1 Billion

Subjumlah/ Subtotal

Jumlah/ Total

24. Advances From Customer

Details of advances received from customer:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
High Speed Railway Contractor Consortium	52,327,676,674	64,204,215,894
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	4,489,539,185	39,333,291,334
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	2,979,812,034	--
Lain-lain di bawah Rp1 Miliar/Others below Rp1 Billion	3,126,274,263	29,908,758,483
Subjumlah/ Subtotal	62,923,302,156	133,446,265,711
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Shimizu-Adhi Karya JV	38,311,836,436	--
PT Bosowa Marga Nusantara	32,476,296,429	224,754,759,127
Balai Perkeretaapian	6,359,593,292	--
KSO Calista Perkasa M- Mitra Sinergi V	5,602,584,390	--
JO RDMP-Balikpapan	2,609,510,124	--
PT Kalapa Satangkal Makmur	2,598,530,000	--
PT Ganesha Bangun	2,314,252,640	--
PT Triroyal Timurraya	1,446,361,200	--
PT Alfa Goldland Realty	1,400,000,000	--
PT Pusaka Abadi Mandiri	1,310,139,810	--
PT Dizamatra Powerindo	1,191,630,000	--
PT Taco Anugrah Corporindo	1,115,098,800	--
Lain-lain di bawah Rp1 Miliar/Others below Rp1 Billion	21,962,497,665	55,296,882,192
Subjumlah/ Subtotal	118,698,330,786	280,051,641,319
Jumlah/ Total	181,621,632,942	413,497,907,030

Jumlah tersebut merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan berdasarkan kontrak dan akan diperhitungkan secara periodik (proporsional) dengan tagihan progres.

The amount represents advances received from the customer under the contract and will be calculated on a periodic basis (proportionally) to the terms of its progress.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

25. Pendapatan Diterima di Muka

Rincian pendapatan diterima di muka per pelanggan adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Wijaya Karya - Andesmont, KSO	4,379,225,040	--
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3,048,494,605	56,437,092,791
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	--	719,780,158
PT Utama Karya (Persero)	--	5,548,585,995
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	--	3,606,409,544
Lain-lain di bawah Rp2 Miliar/ Others below Rp2 Billion	5,833,307,137	94,684,657,996
Subjumlah/Subtotal	13,261,026,782	160,996,526,484
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Samsung CT Corporation	6,448,817,690	--
PT Lati Inti Muara Asa	4,863,465,000	4,863,465,000
PT Alfa Joy	4,046,058,000	--
PT Yasapola Remaja	1,841,163,600	--
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.	3,992,580,108	3,889,894,331
ISTANA - MANDIRI, KSO	3,623,043,030	--
Mitra Andalan Sakti, PT	3,485,989,600	--
PT Giri Bangun Sentosa	3,434,838,000	--
China Railway Group Limited	3,120,000,000	--
PT Eka Surya Alam	1,962,507,200	--
PT Wira Jasa Persada	1,635,896,300	--
Balai Teknik Perkeretaapian	1,974,746,197	--
Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya	--	3,828,595,018
Bumi Karsa - Harfia Graha Perkasa, KSO	--	3,802,925,400
Lain-lain di bawah Rp2 Miliar/ Others below Rp2 Billion	36,503,084,865	119,323,966,990
Subjumlah/Subtotal	76,932,189,590	135,708,846,739
Jumlah/ Total	90,193,216,372	296,705,373,223

Jumlah tersebut merupakan kewajiban pengiriman pesanan yang harus dipenuhi sehubungan dengan tagihan kepada pelanggan telah dilaksanakan dan belum memenuhi kriteria pengakuan penjualan.

25. Unearned Revenue

Details of unearned revenue per customers are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Wijaya Karya - Andesmont, KSO	4,379,225,040	--
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3,048,494,605	56,437,092,791
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	--	719,780,158
PT Utama Karya (Persero)	--	5,548,585,995
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	--	3,606,409,544
Lain-lain di bawah Rp2 Miliar/ Others below Rp2 Billion	5,833,307,137	94,684,657,996
Subjumlah/Subtotal	13,261,026,782	160,996,526,484
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Samsung CT Corporation	6,448,817,690	--
PT Lati Inti Muara Asa	4,863,465,000	4,863,465,000
PT Alfa Joy	4,046,058,000	--
PT Yasapola Remaja	1,841,163,600	--
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.	3,992,580,108	3,889,894,331
ISTANA - MANDIRI, KSO	3,623,043,030	--
Mitra Andalan Sakti, PT	3,485,989,600	--
PT Giri Bangun Sentosa	3,434,838,000	--
China Railway Group Limited	3,120,000,000	--
PT Eka Surya Alam	1,962,507,200	--
PT Wira Jasa Persada	1,635,896,300	--
Balai Teknik Perkeretaapian	1,974,746,197	--
Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya	--	3,828,595,018
Bumi Karsa - Harfia Graha Perkasa, KSO	--	3,802,925,400
Lain-lain di bawah Rp2 Miliar/ Others below Rp2 Billion	36,503,084,865	119,323,966,990
Subjumlah/Subtotal	76,932,189,590	135,708,846,739
Jumlah/ Total	90,193,216,372	296,705,373,223

The amount represents the delivery order performance obligations in connection with bills to customers that has been implemented and has not yet met the criteria for recognition of sales.

26. Beban Akrua

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp	
Beban Pelaksanaan Proyek	914,491,851,955	1,465,229,517,916	Project Implementation Expenses
Utang dalam Proses	206,912,023,401	299,188,820,063	Liabilities in Process
Beban Usaha	58,733,429,675	131,033,805,603	Operating Expenses
Beban Produksi	59,075,999,624	24,658,107,083	Production Expenses
Beban Proyek	14,792,877,482	145,394,425,160	Project Expenses
Jumlah	1,254,006,182,137	2,065,504,675,825	Total

Details of accrued expenses are as follows:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Beban Pelaksanaan Proyek

Beban pelaksanaan proyek yang akan dibayar merupakan biaya atas distribusi, perawatan dan pemasangan produk dilapangan atau proyek, dengan perincian sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp	
Material	446,083,347,058	1,013,704,590,230	Materials
Subkontraktor	334,906,864,480	420,200,147,032	Subcontractors
Fasilitas Distribusi	130,096,662,204	26,693,624,335	Distribution Facilities
Upah	3,404,978,213	4,631,156,319	Labour
Jumlah	914,491,851,955	1,465,229,517,916	Total

Project Implementation Expenses

The project implementation expense to be paid is the cost of distribution, maintenance and installation in the product or field or project, with the following details:

Utang dalam Proses

Utang usaha dalam proses merupakan utang atas pesanan barang yang sudah diterima oleh Perusahaan berupa berita acara penerimaan barang, namun tagihannya belum diterima.

Liabilities in Process

Payables in the process of debt-to-order goods that have been accepted by the Company in the form of the minutes of receipt of goods, but the bill has not been received.

Beban Proyek

Beban proyek yang masih harus dibayar merupakan biaya yang harus diperhitungkan atas progres fisik proyek konstruksi.

Project Expenses

Accrued expenses of project are costs that must be accounted for the physical progress of construction projects.

Beban Usaha

Beban usaha yang masih harus dibayar merupakan biaya yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan aktivitas umum dan administrasi Perusahaan.

Operating Expenses

Accrued expenses of operating represents obligation which not yet been billed from third parties referring to company public activity and administration.

Beban Produksi

Beban produksi yang masih harus dibayar merupakan biaya yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Production Expenses

Accrued expenses of production represents outstanding expenses of production represents outstanding from expenditures that should be paid to third parties or project temporary worker.

27. Utang Lain-Lain

Rincian liabilitas lain-lain adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	--	14,432,448,262
Subjumlah	--	14,432,448,262
Pihak Ketiga		
Utang Pensiun Hari Tua	211,595,287	626,747,727
Utang Astek dan Askes	196,105,338	151,020,142
PT Wiratama Karya Usaha	--	13,701,052,481
Lain-lain	4,025,140,558	12,025,975,026
Subjumlah	4,432,841,183	26,504,795,376
Jumlah	4,432,841,183	40,937,243,638

27. Other Payables

Details of other liabilities are as follows:

Related Party
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Subtotal
Third Parties
Retirement payable
Astek and Askes payable
PT Wiratama Karya Usaha
Other
Subtotal
Total

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Utang pensiun hari tua merupakan utang kepada Dana Pensiun Wijaya Karya, sesuai dengan SK No.01.01/A.DIR.0053/98 tanggal 10 Juni 1998, iuran tersebut dibebankan sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan tetap, sedangkan sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan tetap ditanggung oleh Perusahaan.

Retirement payable is payable to the Pension Fund Wijaya Karya, in accordance with Decree No. SK.01.01/A.DIR.0053/98 dated June 10, 1998, the contribution will be charged at 5% of basic salary and fixed allowances, while 10% of basic salary and fixed allowances paid by the Company.

28. Imbalan Pascakerja

Program Pensiun Iuran Pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. S.408/MK.13/1988 tanggal 20 Mei 1988. Pendiri Dana Pensiun Wijaya Karya adalah Perusahaan.

Program Pensiun Imbalan Pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan lokal. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berkualitas tinggi; jika pengembalian asset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, deposito dan emas.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di *offset* oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

28. Post-Employment Benefits

Defined Contribution Pension Plan

The Group established defined contribution pension plan covering all the permanent employees.

The pension plan is managed by Dana Pensiun Wijaya Karya, the deed of establishment of which was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his decision letter No. S.408/MK.13/1988 dated May 20, 1988. Dana Pensiun Wijaya Karya was established by the Company.

Defined Benefit Pension Plan

The Group established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees.

The pension plan is managed by Dana Pensiun Wijaya Karya.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Investment Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality government bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, time deposit and gold.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Perhitungan atas imbalan pascakerja Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh konsultan PT Padma Radya Aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Asumsi dan metode aktuarial yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Umur Pensiun	55; 56; 58 tahun/	years	Pension age
Mortalita	100% TMI4	100% TMI4	Mortality
Tingkat Cacat	5% TMI4 p.a	5% TMI4 p.a	Disability rate
Tingkat Pensiun Dipercepat	0,05% p.a	0,05% p.a	Accelerated Retirement rate
Tingkat Pengunduran Diri	1,00% p.a	1,00% p.a	Resignation rate
Kenaikan Gaji Yang Diharapkan	6.50%	8.00%	Future Salary Increase
Tingkat Bunga atas Aset	8,00% p.a	8,00% p.a	Interest rate on Assets
Tingkat Diskonto	6,75% p.a	8,00% p.a	Discount Rate

Liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Nilai Kini Kewajiban	74,298,723,423	121,867,743,654	Present Value of Obligations
Nilai Wajar dari Aset Program	(50,661,778,390)	(51,353,255,692)	Fair Value of Plan Assets
Jumlah	23,636,945,033	70,514,487,962	Total

Biaya imbalan pascakerja yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Biaya Jasa Kini	8,489,475,324	12,643,344,886	Current Service Cost
Biaya Bunga	5,385,229,189	12,703,698,622	Interest Cost
Jumlah	13,874,704,513	25,347,043,508	Total

Longevity Risk

The present value of the defined benefit plan is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants during their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Calculation of post-employment benefit as of December 31, 2020 and 2019 by PT Padma Radya Aktuarial using the *Projected Unit Credit* method.

Assumption and method of the actuarial calculation:

The post-employee benefits obligation recognized in the consolidated statements of financial position is determined as follows:

Net expenses recognized in the profit or loss is as follows:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of obligations are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Pada Awal Tahun	121,867,743,654	148,260,845,267	At Beginning of the Year
Biaya Jasa Lalu	(51,207,052,518)	--	Past Service cost
Penyesuaian	(767,381,967)	(29,177,565,336)	Adjustment
Biaya Jasa Kini	8,489,475,324	12,643,344,886	Current Service Cost
Biaya Bunga	5,385,229,189	12,703,698,622	Interest Cost
Imbalan yang Dibayarkan	(12,436,819,491)	(11,934,184,383)	Benefits Paid
Keuntungan Aktuarial Bersih	2,967,529,232	(10,628,395,402)	Net Actuarial Gain
Pada Akhir Tahun	74,298,723,423	121,867,743,654	At End of The Year

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement fair value of aset program are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Pada Awal Tahun	51,353,255,692	52,737,350,728	At Beginning of the Year
Hasil Aset Program yang Diharapkan	4,193,703,967	4,475,053,871	Expected Return on Plan Assets
Iuran Pemberi Kerja	2,245,447,800	2,878,596,600	Employer's Contributions
Kerugian aktuarial bersih yang diakui selama tahun berjalan	(574,349,945)	(1,168,692,659)	Net actuarial losses recognized during the year
Imbalan yang Dibayarkan	(6,556,279,124)	(7,569,052,848)	Benefits Payment
Pada Akhir Tahun	50,661,778,390	51,353,255,692	At End of The Year
Aset program terdiri dari : Instrumen Pasar uang	100%	100%	Plan assets comprises the following : Money market instrument

Analisa sensitivitas adalah sebagai berikut:

Sensivity analysis is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti			Present Value Defined Benefits Obligations
Asumsi Tingkat Diskonto	74,298,723,423	121,867,743,654	Initial Discount Rate
-1,00%	78,621,379,300	132,548,126,842	-1,00%
+1,00%	70,441,001,421	112,655,600,287	+1,00%
Asumsi Kenaikan Gaji	74,298,723,423	121,867,743,654	Initial Salary Rate
-1,00%	69,180,827,541	109,974,016,805	-1,00%
+1,00%	80,060,812,155	131,072,290,981	+1,00%

29. Pinjaman Jangka Panjang

29. Long-Term Loan

Pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:

Long-Term Loan are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Pinjaman Bank Jangka Panjang			Long-Term Bank Loan
Bagian Jatuh Tempo < 1 Tahun	--	250,000,000,000	< 1 Year Due Date
Bagian Jatuh Tempo > 1 Tahun	380,000,000,000	500,000,000,000	> 1 Year Due Date
Jumlah	380,000,000,000	750,000,000,000	Total

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 15 Januari 2020, Perusahaan telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor perjanjian SE.01.01/WB-0A.0139/2020.

Fasilitas jangka panjang yang diberikan berupa:

- a. Kredit Investasi
Limit transaksi Rp 500.000.000.000, tingkat Bunga 9,00%. Jangka waktu perjanjian 3 tahun sejak 16 Oktober 2019 sampai dengan 16 Oktober 2022.
- b. Pinjaman Transaksi Khusus KMK Transaksional II
Limit Transaksi Rp 450.000.000.000. Jangka waktu perjanjian 2 tahun sejak tanggal sampai 10 Juli 2018 sampai dengan 2 Juni 2020. Tingkat Bunga 9.25% per tahun dan telah lunas tahun 2020.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa piutang, persediaan dan aset tetap (tanah dan bangunan) (Catatan 6, 10, dan 18).

Rasio keuangan yang harus diperhatikan adalah:

Current Ratio minimal sebesar 100% dan *Leverage Ratio* maksimal 400%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On January 15, 2020, the Company has obtained an approval on the extension of a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a treaty number SE.01.01/WB-0A.0139/2020.

The long-term facilities provided are:

- a. Investment Loan
Transaction limit is Rp500,000,000,000. The interest rate are 9.00% per year. The validity period of the agreement is 3 years, from October 16, 2019 to October 16, 2022.
- b. Special Transaction Loan Transactional KMK II
Transaction limit is Rp450,000,000,000. The validity period of the agreement is 2 years, from July 10, 2018 to June 2, 2020. The interest rate are 9.25% per annum and has paid off in 2020.

Collateral for the agreements are receivables, inventories and fixed assets (land and buildings) (Notes 6, 10 and 18).

Financial ratios that must be considered are:

Current Ratio minimum of 100% and *Leverage Ratio* maximum of 400%.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company is in compliance with the loan terms and conditions determined by the bank.

30. Kepentingan Nonpengendali

Kepentingan nonpengendali pada entitas anak adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo Awal Tahun	70,727,962,384	72,329,841,225
Laba (Rugi) Bersih Tahun	(4,905,412,804)	(1,634,987,272)
Pembayaran Dividen ke Entitas Non Pengendali	(27,514,216)	(17,394,918)
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(93,095,384)	--
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	157,274,759	50,503,349
Saldo Akhir Tahun	65,859,214,739	70,727,962,384

30. Non-Controlling Interest

The non-controlling interest in subsidiaries are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo Awal Tahun	70,727,962,384	72,329,841,225
Laba (Rugi) Bersih Tahun	(4,905,412,804)	(1,634,987,272)
Pembayaran Dividen ke Entitas Non Pengendali	(27,514,216)	(17,394,918)
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(93,095,384)	--
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	157,274,759	50,503,349
Saldo Akhir Tahun	65,859,214,739	70,727,962,384

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

31. Saham

31. Stock

Modal Saham

Capital Stock

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan
tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

*The composition of the Company's
shareholders as of December 31, 2020 is as
follows:*

2020			
Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham (Lembar)/ Total of Shares (Share)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5,229,280,000	60.00%	522,928,000,000
Koperasi Karya Mitra Satya	511,842,749	5.87%	51,184,274,900
Yayasan Wijaya Karya	86,043,000	0.99%	8,604,300,000
Ade Wahyu *)	2,000,000	0.02%	200,000,000
Herry Trisaputra Zuna *)	40,000	0.00%	4,000,000
Hadian Pramudita *)	16,460,000	0.19%	1,646,000,000
Imam Sudiyono *)	13,644,700	0.16%	1,364,470,000
Kuntjara *)	13,737,300	0.16%	1,373,730,000
I Ketut Pasek Senjaya Putra *)	13,256,000	0.15%	1,325,600,000
Sidiq Purnomo *)	15,440,000	0.18%	1,544,000,000
Masyarakat/ Public	2,813,722,851	32.28%	281,372,285,100
Jumlah/ Total	8,715,466,600	100.00%	871,546,660,000

*) Manajemen Kunci/ Key Management

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan
tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

*The composition of the shareholders of the
Company as of December 31, 2019 as
follows:*

2019			
Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham (Lembar)/ Total of Shares (Share)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total
PT Wijaya Karya Tbk	5,229,280,000	60.00%	522,928,000,000
Koperasi Karya Mitra Satya	523,666,549	6.01%	56,761,664,900
Yayasan Wijaya Karya	86,043,000	0.99%	8,604,300,000
Herry Trisaputra Zuna *)	40,000	0.00%	4,000,000
Kuntjara *)	577,300	0.01%	57,730,000
Mursyid *)	2,100,000	0.02%	210,000,000
Imam Sudiyono *)	484,700	0.01%	48,470,000
I Ketut Pasek Senjaya Putra *)	96,000	0.00%	9,600,000
Masyarakat/ Public	2,496,021,100	28.64%	245,207,100,000
Subjumlah/ Subtotal	8,338,308,649	95.67%	833,830,864,900
Treasury Stock	377,157,951	4.33%	37,715,795,100
Jumlah/ Total	8,715,466,600	100.00%	871,546,660,000

*) Manajemen Kunci/ Key Management

Saham Diperoleh Kembali

Perusahaan mencatat transaksi saham
diperoleh kembali dengan menggunakan
metode biaya perolehan.

Treasury Stock

*Company recorded treasury stock by using
the cost method.*

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan
Initial Public Offering (IPO) Perusahaan,
Para Pemegang Saham Perusahaan
menyetujui untuk mengambil keputusan
Pemegang Saham di luar Rapat Umum
Pemegang Saham yang diputuskan dengan
nomor MJ.01.01/WB-0A.134/2013 tanggal
20 Desember 2013 yang telah terdaftar di
Kementerian Hukum dan HAM dan Republik

*In connection with the implementation of the
plan of the Initial Public Offering (IPO) of the
Company, the shareholders of the Company
approved the shareholders to make a
decision outside the General Meeting of
shareholders to be decided by the number
MJ.01.01/WB- 0A.134/2013 dated December
20, 2013 has been registered Minister of Law
and Human Right of Republic Indonesia No:*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Indonesia No: AHU-AH.01.01-56091 tanggal 24 Desember 2013 diputuskan bahwa: Menyetujui penjualan saham milik Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS) sebanyak 65.027.233 lembar saham kepada PT Wijaya Karya Beton, Tbk dengan harga per lembar saham adalah PBV = 1,4 atas Rp639,80 yaitu sebesar Rp895,72 atau nilai harga saham seluruhnya sebesar Rp58.246.193.143.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat nomor MJ.01.01/WB-0A.136/2013 yang terdaftar di KEMENKUMHAM No: AHU-00972.AH.01.02 tanggal 8 Januari 2014 diputuskan bahwa:

- a. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan/ modal disetor Perusahaan dari Rp115.000.000.000 menjadi Rp667.000.000.000 yang berasal dari kapitalisasi cadangan/ laba/ *retained earning*/ deviden saham/ deviden interim sesuai dengan nilai Rp552.000.000.000 yang tercantum dalam Laporan Keuangan Auditan Per 31 Desember 2013.
- b. Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp460.000.000.000 menjadi Rp2.668.000.000.000.
- c. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan/ modal disetor Perusahaan yang dimaksud butir a dan peningkatan modal dasar Perusahaan yang dimaksud dalam butir b diberikan dengan ketentuan bahwa kapitalisasi laba bersih tersebut akan berlaku efektif apabila pada akhir tahun 2013 setelah penutupan buku, Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif yang ditunjukkan pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka disebutkan bahwa dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali oleh perusahaan terbuka selama jangka waktu 3 tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, perusahaan terbuka wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

AHU- AH.01.01-56091 dated December 24, 2013 it was decided that: Approved the sale of Shares owned by Koperasi Karya Mitra Satya (KKMS) of 65,027,233 Shares to PT Wijaya Karya Beton, Tbk. at a price per share is above PBV = 1.4 Rp639.80 in the amount of Rp895.72 or the value of Shares totaling Rp58,246,193,143.

Based on Decisions in Shareholders Meeting MJ.01.01/WB-0A.136/2013 which was registered in KEMENKUMHAM No: AHU-00972.AH.01.02 dated January 8, 2014 it was decided that:

- a. *Approved an increase in the issued/ paid-up capital of the Company of Rp115,000,000,000 to Rp667,000,000,000 from the capitalization of reserves/ profit/ retained earnings/ stock dividend/ interim dividend of Rp 552,000,000,000 according to the value stated in the Audited Financial Statements as of December 31, 2013.*
- b. *To approve an increasing in authorized capital of Rp460,000,000,000 to Rp2,668,000,000,000.*
- c. *Approval to increase the issued/ paid-up capital of the Company referred to in point a and an increase in the authorized capital of the Company referred to in point b is given with the stipulation that the capitalization of net income will be effective after the end of 2013 after the close of the book, the Company's retained earnings have shown positive on the financial statements for the year ended December 31, 2013.*

Based on the Financial Services Authority Regulation number 30/POJK.04/2017 regarding repurchases of shares issued by publicly listed companies, it is stated that if there are still shares that are repurchased by publicly-listed companies for 3 years from the completion of the share repurchase, the listed company must starts to shares transfer from the buyback within a maximum period of 2 years.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Perusahaan, sehingga Perusahaan mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat: SE01.01/WB-OA.0448/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 perihal Rencana Pengalihan Saham hasil pembelian kembali.

Berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-190/D.04/2019 tertanggal 9 Desember 2019 perihal tanggapan rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan jangka waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Juni 2020.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya Beton Tahun buku 2019 menyetujui pengalihan saham yang masih dalam simpanan atau *treasury*, baik sebagian maupun seluruhnya melalui mekanisme MESOP sebanyak-banyaknya 377.157.951 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham dengan harga sebesar Rp202 per saham.

Berdasarkan Surat Perusahaan Nomor SE.01.01/WB-OA.0330/2020 tentang Laporan Realisasi Pengalihan Saham *Treasury*, Perusahaan telah melaksanakan pengalihan saham *treasury* melalui PT BNI Sekuritas pada 17 Juni 2020 sejumlah 377.157.951 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) saham dengan harga sebesar Rp202 per saham.

The Financial Services Authority Regulation cannot be implemented by the Company, so the Company sent a letter to the Financial Services Authority with the letter number: SE01.01 / WB-OA.0448 / 2019 dated October 28, 2019, concerning the Share Transfer Plan from the repurchase proceeds.

Based on a letter from the Financial Services Authority Number: S-190 / D.04 / 2019 dated December 9, 2019, regarding the response to the plan to transfer shares resulting from the repurchase, the Financial Services Authority has provided a period of shares transfer repurchased proceeds extended to June 20, 2020.

Based on the results of the General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton for the fiscal year 2019, approve the transfer of treasury shares, partially or entire shares through the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) mechanism at the most 377,157,951 (three hundred seventy-seven million one hundred fifty-seven thousand nine hundred fifty-one) shares at a price of Rp202 per share.

Based on the Company Letter Number SE.01.01/WB-OA.0330/2020 regarding Laporan Realisasi Pengalihan Saham Treasury, the Company has performed treasury stock transfer through PT BNI Sekuritas on 17 June 2020 amounting to 377,157,951 (three hundred seventy-seven million one hundred fifty-seven thousand nine hundred fifty-one) shares at a price of Rp202 per share.

32. Tambahan Modal Disetor

Penambahan agio saham sebesar Rp15.439.712.959 berasal dari selisih atas pengalihan saham *treasury* sebanyak 377.157.951 lembar pada 17 Juni 2020 dengan harga pengalihan saham sebesar Rp76.185.906.102 (Rp202 per lembar) dan harga perolehan sebesar Rp58.246.193.143 (Rp154 per lembar).

Biaya emisi efek ekuitas merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas Emiten atau Perusahaan Publik. Biaya ini mencakup *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas

32. Additional Paid-In Capital

Additional paid-in capital amounting to Rp15,439,712,959 was a difference of treasury stock transfer for 377,157,951 shares on June 17, 2020 of which the transfer price amounting to Rp76,185,906,102 (Rp202 per share) and the acquisition price amounting to Rp58,246,193,143 (Rp154 per share).

Share Issuance Costs are cost related to the issuance of equity securities. These costs include fees and commissions paid to the underwriter, supporting institutions and professionals in capital markets, and the registration document printing costs, cost of equity securities listing on the stock exchange, as well as promotional cost in

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

dibursa efek, serta biaya promosi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pasar Modal No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Bab Ekuitas pasal Tambahan Modal Disetor. Biaya Emisi Efek Ekuitas berasal dari penawaran perdana tahun 2014 sebesar Rp29.084.927.397.

accordance with the Decision of the Chairman of the Capital Market Board No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012, regulation number VII.G.7 of Guidelines for the Preparation of Financial Statements Chapter Equity article Additional Paid-in Capital. Share Issuance Costs derived from the initial public offering in 2014 amounted to Rp29,084,927,397.

33. Saldo Laba

Akun ini terdiri dari:

	2020 Rp	2019 Rp
Ditetapkan Penggunaannya		
Saldo Awal Tahun	242,297,750,536	143,194,248,877
Penambahan	102,519,577,986	99,103,501,659
Saldo Akhir Tahun	344,817,328,522	242,297,750,536
Belum Ditetapkan Penggunaannya		
Saldo Awal Tahun	1,408,926,053,627	1,134,793,746,643
Dampak Penerapan SAK Baru		
PSAK 71 : Instrument Keuangan	(184,165,112,437)	--
PSAK 73 : Sewa	(187,001,429)	--
Sub-jumlah	(184,352,113,866)	--
Laba Tahun Berjalan	128,052,492,224	512,346,720,675
Penghasilan Komprehensif Lain	(2,314,056,849)	6,809,489,326
Cadangan Bertujuan	(102,519,577,986)	(99,103,501,659)
Dividen	(128,076,420,849)	(145,920,401,358)
Saldo Akhir Tahun	1,119,716,376,301	1,408,926,053,627

Dalam rangka memenuhi Undang - undang Perusahaan Terbatas No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, yang mengharuskan Perusahaan secara bertahap mencadangkan sekurang - kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan sebagai cadangan dana umum. Total saldo yang telah dicadangkan sebagai cadangan dana umum, setelah kapitalisasi dividen saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp344.817.328.522 dan Rp242.297.750.536.

Salinan Berita Acara Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Tanggal Tanggal 26 Maret 2020 No. 32 dan 27 Maret 2019 No.58 telah menetapkan pembagian dividen Perusahaan untuk tahun buku 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Tanggal Dideklarasikan/ Date Declared	Tanggal Pembayaran/ Date Paid	Dividen Per Lembar Saham (Nilai Penuh)/ Dividend Per Share (Full Amount) Rp	Jumlah/ Total Rp	The Company
Dividen akhir tahun 2019	26 Maret/ March 2020	29 April / April 2020	15.36	128,076,420,849	Year end dividend for year 2019
Dividen akhir tahun 2018	27 Maret/ March 2019	26 April /April 2019	17.50	145,920,401,358	Year end dividend for year 2018
Dividen akhir tahun 2017	19 Maret/ March 2018	20 April/ April 2018	12.13	101,143,683,915	Year end dividend for year 2017
Dividen akhir tahun 2016	13 Maret/ March 2017	12 April/ April 2017	9.80	81,715,425,760	Year end dividend for year 2016
Dividen akhir tahun 2015	30 Maret/ March 2016	27 April/ April 2016	6.26	52,197,812,142	Year end dividend for year 2015
Dividen akhir tahun 2014	01 April/ April 2015	04 Mei/ May 2015	11.82	98,558,808,231	Year end dividend for year 2014
Dividen akhir tahun 2013	20 Februari/ February 2014	19 Maret/ March 2014	29.72	20,000,000,000	Year end dividend for year 2013

33. Retained Earnings

This account consists of:

	2020 Rp	2019 Rp	
Appropriated Use			
Beginning Balance of the Year			
Addition			
Ending Balance of the Year			
Unappropriated Use			
Beginning Balance of the Year			
Impact of Implementation New SAK			
PSAK 71 : Financial Instruments			
PSAK 73 : Lease			
Subtotal			
Profit for the Year			
Other Comprehensive Income			
Aiming Reserves			
Dividend			
Ending Balance of the Year			

In compliance with Corporation Law No.40 of 2007 dated August 16 ,2007, which requires the Company to set aside, on a gradual basis, an amount equivalent to at least 20% of their subscribed capital as general reserve. Total appropriation of the Company's retained earnings as general reserve, after dividend capitalization as of December 31, 2020 and 2019 amounted Rp344,817,328,522 and Rp242,297,750,536, respectively.

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders date March 26, 2020 No. 32 and March 27, 2019 No.58 has declare the dividend distribution for the fiscal year December 31, 2019 and 2018 were as follows:

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

34. Laba Per Saham Dasar			34. Basic Earnings Per Share
Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.			<i>Basic earning per share calculated by dividing net profit by the average weighted general share amount circulated in the relevant year.</i>
	2020	2019	
	Rp	Rp	
Laba usaha Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	128,052,492,224	512,346,720,675	<i>Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity</i>
Rata-rata Tertimbang Saham untuk Perhitungan Laba per Saham Dasar	8,715,466,600	8,715,466,600	<i>Weighted Average Number Shares for the Computation of Basic Profit Per Share</i>
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	14.69	58.79	Basic Earnings per Share (in full amount of Rupiah)
	2020	2019	
	Rp	Rp	
Rincian penjualan berdasarkan Satuan Bisnis Unit (SBU) untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:			<i>Details of sales per Strategic Business Units (SBU) for the year progress are as follows:</i>
	2020	2019	
	Rp	Rp	
Produk putar	1,719,618,924,015	3,074,903,652,782	<i>Spun Concrete</i>
Produk non putar	2,163,760,416,051	3,017,840,051,566	<i>Precast Concrete</i>
Sub Jumlah	3,883,379,340,066	6,092,743,704,348	Sub Total
Jasa	282,356,426,256	261,084,275,265	<i>Service</i>
Konstruksi	637,623,525,396	729,556,487,974	<i>Construction</i>
Jumlah/ Total	4,803,359,291,718	7,083,384,467,587	Total
Rincian penjualan produk beton berdasarkan wilayah operasi untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:			<i>Details of precast product sales by region for the current year operations are as follows:</i>
	2020	2019	
	Rp	Rp	
Wilayah Penjualan I Sumatera Utara	312,331,314,686	717,927,499,395	<i>Sales Region I North Sumatra</i>
Wilayah Penjualan II Sumatera Selatan	238,418,539,996	341,026,476,281	<i>Sales Region II South Sumatra</i>
Wilayah Penjualan III DKI Jakarta	1,273,191,569,201	2,299,231,828,126	<i>Sales Region III Jakarta</i>
Wilayah Penjualan IV Jawa Tengah	385,220,672,925	453,622,798,017	<i>Sales Region IV Central Java</i>
Wilayah Penjualan V Jawa Timur	390,821,241,196	860,457,793,340	<i>Sales Region V East Java East Java</i>
Wilayah Penjualan VI Sulawesi Selatan	411,024,266,042	477,083,065,574	<i>Sales Region VI South Sulawesi</i>
Wilayah Penjualan VII Kalimantan	243,794,514,932	403,580,823,070	<i>Sales Region VII Kalimantan</i>
Divisi Operasi	3,491,420,000	--	<i>Operations Division</i>
Divisi Pengelolaan Material	317,863,039,509	35,853,395,725	<i>Material Management Division</i>
Jumlah Penjualan Perusahaan	3,576,156,578,487	5,588,783,679,528	Total Sales of the Company
PT Citra Lautan Teduh	244,001,510,540	406,849,126,700	<i>PT Citra Lautan Teduh</i>
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	36,634,145,212	63,648,044,672	<i>PT Wijaya Karya Krakatau Beton</i>
PT Wijaya Karya Komponen Beton	26,587,105,827	25,379,883,448	<i>PT Wijaya Karya Komponen Beton</i>
PT Wijaya Karya Beton - Wika Kraton KSO	--	8,082,970,000	<i>PT Wijaya Karya Beton - Wika Kraton KSO</i>
Jumlah Penjualan Entitas Anak	307,222,761,579	503,960,024,820	Total Sales of Subsidiaries
Jumlah	3,883,379,340,066	6,092,743,704,348	Total

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian penjualan produk beton berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of precast product sales per customers for current year as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	682,675,089,889	1,751,898,075,807
HRCC- TEAM WIKA	613,730,643,583	386,959,654,245
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	255,141,955,481	715,590,904,209
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	119,035,746,955	218,106,368,851
KSO PT Wege- Jakon- PP	107,291,167,500	
PT Utama Karya Infrastruktur	87,037,925,000	64,238,356,000
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	83,187,468,122	28,446,653,030
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	77,255,910,370	114,461,908,936
PT Utama Karya Aspal Beton	58,717,728,000	--
JO PT Wijaya Karya - PT Pembangunan Perumahan	50,100,941,364	--
KSO PT Wijaya Karya - Ragam	44,352,836,600	17,100,453,000
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	38,075,494,886	21,595,844,578
PT Utama Karya (Persero)	34,526,079,080	73,425,071,146
KSO PT Adhi Karya - PT Adi Esa	28,052,893,280	--
PENTA -TOA - RINKAI - PP - WIKA (RPW) CONSORTIUM	27,429,894,900	10,728,672,000
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	27,101,509,500	10,275,022,500
KSO PT Pembangunan Perumahan - PT Karya Pare Sejahtera	26,381,880,000	--
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	22,414,260,100	23,426,232,500
JO PT Pembangunan Perumahan - PT Wijaya Karya	21,073,560,000	--
KSO PT Brantas Abipraya - MKI	20,408,760,000	--
Lain-lain di bawah Rp10 Miliar/ Other below Rp10 Billion	565,030,732,321	827,785,021,841
Subjumlah/ Subtotal	2,989,022,476,931	4,264,038,238,643
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Departemen Perhubungan Balai Teknik Perkeretaapian	119,503,737,251	--
KSO PT Calista Perkasa Mulia - PT Mitra Sinergi Visitama	56,699,600,000	--
PT New Asia International	53,943,096,000	22,433,958,000
RDMP JO Balikpapan	35,608,869,900	--
PT Takenaka Indonesia	34,596,667,900	--
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prop Sulawesi Selatan	31,738,437,090	--
PT Guna Karya Nusantara	28,439,531,120	11,864,410,660
PT Kukuh Mandiri Lestari	19,504,972,196	36,878,567,584
PT Sinar Bintang Mulia	18,898,440,000	25,451,182,000
PT Jakarta Konsultindo	17,387,419,500	--
PT JGC Indonesia	16,284,728,000	--
PT Tarika Nirmana Hurun	15,652,088,800	--
PT Ganesha Bangun Riau Sarana	15,047,554,000	--
PT Kayan LNG Nusantara	14,732,249,400	--
Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya	12,965,085,945	--
SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah	12,730,119,570	--
PT Brahmakerta Adiwira	12,319,649,450	--
PT Paramita Multi Sarana	10,590,456,000	--
PT Tripatra Engineers and Constructors	10,463,781,438	--
PT Trans Kalla Makassar	10,213,650,000	--
Lain-lain di bawah Rp10 Miliar/ Other below Rp10 Billion	347,036,729,575	1,732,077,347,461
Subjumlah/ Subtotal	894,356,863,135	1,828,705,465,705
Jumlah / Total	3,883,379,340,066	6,092,743,704,348

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian penjualan jasa berdasarkan wilayah operasi untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of service sales by region for the current year operations are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Wilayah Penjualan I Sumatera Utara	54,211,073,880	12,095,698,800	Sales Region I North Sumatra
Wilayah Penjualan II Sumatera Selatan	11,857,796,881	13,051,216,100	Sales Region II South Sumatra
Wilayah Penjualan III DKI Jakarta	87,391,276,510	153,277,207,619	Sales Region III Jakarta
Wilayah Penjualan IV Jawa Tengah	21,899,552,997	31,184,705,968	Sales Region IV Central Java
Wilayah Penjualan V Jawa Timur	11,808,101,820	23,612,159,410	Sales Region V East Java
Wilayah Penjualan VI Sulawesi Selatan	58,981,422,045	20,472,890,168	Sales Region VI South Sulawesi
Wilayah Penjualan VII Kalimantan	714,000,000	6,823,897,200	Sales Region VII Kalimantan
Divisi Operasi	27,061,718,123	--	Operations Division
Divisi Pengelolaan Material	44,814,000	--	Material Management Division
Jumlah	273,969,756,256	260,517,775,265	Total
PT Citra Lautan Teduh	8,386,670,000	566,500,000	PT Citra Lautan Teduh
Jumlah Penjualan Entitas Anak	8,386,670,000	566,500,000	Total Sales Subsidiaries
Jumlah	282,356,426,256	261,084,275,265	Total

Rincian penjualan jasa berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of service sales per customers for the current year progress as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	37,273,442,430	14,486,907,000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	29,432,132,110	16,552,000,000
PT Utama Karya (Persero)	23,807,203,975	--
KSO PT Wege- Jakon- PP	5,293,247,500	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	5,198,250,000	1,122,300,864
KSO PT Wijaya Karya Beton - Emrail	2,322,645,000	19,845,228,176
KSO PT Wijaya Karya Tbk - Sendin Engineering	2,311,343,500	--
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	2,066,637,759	844,131,600
KSO PT Wijaya Karya Beton - PT Pandji Pratama Indonesia	1,835,820,000	4,113,880,000
PT Brantas Abipraya (Persero)	1,772,350,000	7,012,428,000
PT Barata Indonesia (Persero)	1,736,017,335	--
KSO PT Wijaya Karya Pracetak Gedung - PT Utama Karya Aspal Beton	1,026,389,856	--
Lain-lain di bawah Rp1 Miliar/ Other below Rp1 Billion	4,325,160,256	26,636,243,228
Subjumlah/ Subtotal	118,400,639,721	90,613,118,868
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bumi Sarana Beton	35,729,185,800	4,037,541,200
PT Kukuh Mandiri Lestari	20,399,722,584	74,543,885,030
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd	15,504,570,620	17,153,582,118
PT Takenaka Indonesia	8,444,258,000	--
PT Pembangunan Deltamas	6,684,212,000	--
PT Bumi Duta Persada	6,464,828,707	--
PT Guna Karya Nusantara	5,199,750,000	--
PT Jakarta Konsultindo	4,696,806,580	--
SK Engineering & Construction Co. Ltd - Hyundai Engineering & Construction - PT Rekayasa Industri - PT Pembangunan Perumahan	4,235,376,995	6,796,527,200
PT Aphasko Utamajaya	3,653,461,144	1,565,769,144
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	3,186,920,000	--
KSO Usaha - Perkasa	3,000,000,000	--
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	2,679,473,764	7,140,962,378
PT Rinenggo Ria Raya	2,400,000,000	--
Lain-lain di bawah Rp1 Miliar/ Other below Rp1 Billion	41,677,220,341	59,232,889,327
Subjumlah/ Subtotal	163,955,786,535	170,471,156,397
Jumlah/ Total	282,356,426,256	261,084,275,265

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian pendapatan konstruksi berdasarkan wilayah operasi untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Wilayah Penjualan VI Sulawesi Selatan
Jakarta Internasional Stadium
Jumlah/ Total

	2020 Rp	2019 Rp
	620,936,651,041	729,556,487,974
	16,686,874,355	--
	637,623,525,396	729,556,487,974

Details of construction sales by region for the current year operations are as follows:

Rincian pendapatan konstruksi berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Pihak Ketiga/ Third Parties
PT Bosowa Marga Nusantara
KSO PT Wege- Jakon- PP
Jumlah/ Total

	2020 Rp	2019 Rp
	620,936,651,041	729,556,487,974
	16,686,874,355	--
	637,623,525,396	729,556,487,974

Details of construction revenue per customers for the current year progress as follows:

Rincian pendapatan dengan nilai kontribusi pendapatan melebihi nilai 10% dari pendapatan usaha untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Bosowa Marga Nusantara
HRCC- TEAM WIKA
Jumlah/ Total

	2020 Rp	2019 Rp
	719,948,532,319	1,766,384,982,807
	620,936,651,041	729,556,487,974
	613,730,643,583	--
	1,954,615,826,943	2,495,941,470,781

Details of revenues with value of revenue contribution exceeds 10% of revenues for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

36. Beban Pokok Pendapatan

Rincian harga pokok pendapatan untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Persediaan Barang Jadi Awal
Produksi Barang Jadi
Persediaan Barang Jadi Akhir
Subjumlah

	2020 Rp	2019 Rp
	771,278,129,285	528,886,752,405
	2,215,959,669,389	3,422,401,267,769
	(523,887,043,836)	(771,278,129,285)
	2,463,350,754,838	3,180,009,890,889

36. Cost of Revenues

Details of cost of goods sold for the current year are as follows:

Biaya Langsung Produksi
Biaya Pelaksanaan Proyek
Biaya Material
Biaya Operasional Proyek
Biaya Upah Tenaga Kerja
Subjumlah

	2020 Rp	2019 Rp
	604,646,072,171	954,909,614,827
	484,555,421,436	898,779,059,145
	120,896,175,188	73,445,964,105
	16,536,209,897	12,027,262,363
	1,226,633,878,692	1,939,161,900,440

*Finished good at the Beginning
Finished Good Production
Finished Good at The Ending
Subtotal*

Direct Cost of Production
*Project Implementation Cost
Materials Cost
Operational Project Cost
Labour Cost
Subtotal*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2020 Rp	2019 Rp	
Biaya Tidak Langsung Produksi			Indirect Cost of Production
Biaya Penyusutan	236,728,811,462	248,650,731,541	Depreciation Cost
Biaya Administrasi dan Umum	116,990,223,544	140,755,200,537	Administrative and General Cost
Biaya Pemasaran dan Penjualan	1,300,713,637	1,173,056,899	Marketing and Sales Cost
Biaya Penelitian dan Pengembangan	1,284,211,596	1,073,840,487	Research and Development Cost
Subjumlah	356,303,960,239	391,652,829,464	Subtotal
Jumlah	4,046,288,593,769	5,510,824,620,793	Total
Jasa Konstruksi			Construction
Biaya Material	144,604,006,383	274,499,059,415	Materials Cost
Subkontraktor	194,684,382,824	181,144,769,887	Subcontractor
Biaya Upah	44,305,393,365	41,322,639,958	Labour Cost
Biaya Tidak Langsung	35,915,496,502	30,950,856,142	Overhead Cost
Biaya Peralatan	28,038,473,934	93,925,509,009	Equipment Cost
Subjumlah	447,547,753,008	621,842,834,411	Subtotal
Jumlah	4,493,836,346,777	6,132,667,455,204	Total

Beban Pelaksanaan Proyek merupakan realisasi biaya distribusi, perawatan dan pemasangan produk di lapangan.

Project implementation cost is the realization of the cost of distribution, maintenance, and installation of the product on the field.

Beban upah merupakan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk para pekerja langsung berkaitan dengan pelaksanaan proyek, baik upah harian, mingguan maupun upah borong.

Labour cost is the realization of the costs incurred for the workers directly related to the project process, both the daily wages, weekly wages and the entire stock.

Biaya material merupakan biaya - biaya yang timbul atas pekerjaan instalasi (penyerahan terpasang) dan pengadaan material yang pemanfaatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan tiap proyek.

Material cost are costs incurred on the installation work (submission is attached) and the procurement of material utilization is only to meet the needs of each project.

37. Beban Usaha

37. Operating Expenses

Rincian beban usaha untuk tahun tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of operating expenses for the current year are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Beban administrasi dan umum	120,347,903,640	145,368,001,304	General and administrative expenses
Beban pengembangan usaha	3,995,065,883	8,219,042,470	Business development expenses
Beban pemasaran	783,140,379	1,724,010,721	Marketing expenses
Jumlah	125,126,109,902	155,311,054,495	Total
Beban administrasi dan umum terdiri dari			General and administrative expenses consist of
Beban personalia	112,010,688,121	122,524,198,848	Personnel expenses
Beban keuangan	3,124,814,660	2,732,042,738	Financial expenses
Beban fasilitas kantor	2,732,298,836	17,532,432,608	Office facilities expenses
Beban informasi dan teknologi	2,480,102,023	2,579,327,110	Information and technology expenses
Jumlah	120,347,903,640	145,368,001,304	Total

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

38. Perjanjian Ventura Bersama

Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian, berupa penyerahan dana kepada Pengelola sesuai kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja sama menurut porsi yang ditetapkan. Pengelola proyek dibentuk dengan anggota yang berasal dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama.

Pengelola proyek yang berasal dari Pemberi Kerja (*Owner*) dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan dan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama.

Perjanjian ventura bersama antara lain, sebagai berikut:

No.	Nama Project/ Name of Project	Porsi Bagi Hasil/ Portion of share (%)	Status/ Status
1	Proyek Light Rail Transit (LRT) PT Wijaya Karya Beton Tbk - PT Wijaya Kraton	50% - 50%	Berjalan / in Progress
2	Ready Mix Apartement Podomoro View Cimanggis PT Wijaya Karya Beton Tbk - PT Semen Indogreen Sentosa	50% - 50%	Tutup / closed
3	Jakarta Light Rapid Transit koridor 1 Kelapa Gading - Velodrome PT Wijaya Karya Beton Tbk - Emrail Sdn Bhd	50% - 50%	Berjalan / in Progress
4	Pembangunan Pengaman Pantai Jakarta Tahap 3 Paket 2 PT Wijaya Karya Beton Tbk - PT Pandji Pratama Indonesia	60% - 40%	Berjalan / in Progress

39. Ikhtisar Saldo dan Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Sifat berelasi yang terjadi pada Grup adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh menteri negara BUMN merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan induk. Oleh karena itu secara tidak langsung Perusahaan memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.
2. Grup memiliki dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank pemerintah atau bank-bank yang dimiliki oleh BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana berlaku pada pihak ketiga.

38. Joint Venture Agreements

The Company entered into agreements with other parties, as specified in each agreement in the form of providing funds to Management in charge of the project based on the obligations set forth in the cooperative agreement according to the specified portion agreed percentage. Management in charge of the project was formed made up of the members each party to the cooperative agreement.

Management of the Project, who were coming from the Employer (Owner) takes full responsibility of the project activities, including preparing financial statements for each part to the cooperative agreement.

The joint venture agreements are as follows:

39. Summary of Related Parties Transactions and Balance

The nature of related parties of the Group are as follows:

1. *The Government of the Republic of Indonesia which was represented by Minister of State Owned Enterprise is the majority shareholder of the parent company. Therefore the Company has indirect affiliation with other stated owned companies through the inclusion of government capital of the Republic of Indonesia.*
2. *The Group has funds and loans in Government's Banks or state owned Banks with normal requirements and interest rate as applicable at any third party.*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

3. Grup mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perusahaan dengan BUMN-BUMN lain maupun anak perusahaan serta lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.

3. The Group held a Covenant in order of company business with other State Owned Enterprise and subsidiary and the institutions of government authorities.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of the nature and type of material transactions with related parties are as follows:

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Jenis Transaksi / Nature of Transaction
Bank		Bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening, dan Pinjaman/ Placement of Accounts and Loans
PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening, Pinjaman, dan Deposito/ Placement of Accounts, Loans, dan Deposits
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening, dan Pinjaman/ Placement of Accounts and Loans
PT BNI Syariah	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening/ Placement of Accounts
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening dan Pinjaman / Placement of Accounts and Loans
PT Bank Syariah Mandiri	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening dan Pinjaman/ Placement of Accounts and Loans
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Pinjaman/ Placement of Loans
Piutang/ Utang Usaha		Trade Receivables/ Payable
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pemegang saham/ Shareholders	Penjualan Produk Beton dan Utang Lain-lain/ Concrete Product Sales and Other payable
PT Wijaya Karya Komponen Beton	Kepemilikan saham/ Share ownership	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Kepemilikan saham/ Share ownership	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales
PT Citra Lautan Teduh	Kepemilikan saham/ Share ownership	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	Asosiasi/ Associate	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales
WIKA Beton - Emrail KSO	Ventura Bersama/ Joint Ventures	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales
PT Wijaya Karya Gedung Tbk	Entitas Sepengendali/ Entity Under Common Control	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales
PT Wijaya Karya Realty	Entitas Sepengendali/ Entity Under Common Control	Piutang Lain-Lain/ Other Receivables
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas Sepengendali/ Entity Under Common Control	Piutang Lain-Lain/ Other Receivables
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Entitas Sepengendali/ Entity Under Common Control	Piutang Lain-Lain/ Other Receivables
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Entitas Sepengendali/ Entity Under Common Control	Piutang Lain-Lain/ Other Receivables
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales
PT Perusahaan Listrik Negara	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales
PT Brantas Adipraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales
PT Utama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali/ Entity Under Common Control	Penjualan Produk Beton/ Concrete Product Sales

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Jenis Transaksi / Nature of Transaction
PT Wijaya Karya Tbk - Bahagia KSO	Pengendalian Tidak Langsung Pemegang Saham/ <i>Indirect Control Share Holder</i>	Penjualan Produk Beton/ <i>Concrete Product Sales</i>
PT Wijaya Karya Tbk - MCM KSO	Pengendalian Tidak Langsung Pemegang Saham/ <i>Indirect Control Shareholder</i>	Penjualan Produk Beton/ <i>Concrete Product Sales</i>
PT Wijaya Karya Tbk - Bahagia Bangun Nusa, KSO	Pengendalian Tidak Langsung Pemegang Saham/ <i>Indirect Control Shareholder</i>	Penjualan Produk Beton/ <i>Concrete Product Sales</i>
Piutang/ Utang Usaha		Trade Receivables/ Payable
PT HAKA Aston	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penjualan Produk Beton/ <i>Concrete Product Sales</i>
PT Utama Karya Infrastruktur	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penjualan Produk Beton/ <i>Concrete Product Sales</i>
PT Waskita Beton Precast Tbk	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penjualan Produk Beton/ <i>Concrete Product Sales</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Penjualan Produk Beton/ <i>Concrete Product Sales</i>
High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC)	Entitas Sepengendali/ <i>Entity Under Common Control</i>	Penjualan Produk Beton/ <i>Concrete Product Sales</i>
PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Subkontraktor/ <i>Subcontractor</i>
PT Pindad (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Subkontraktor/ <i>Subcontractor</i>
PT Semen Tonasa	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Pemasok Material/ <i>Material Supplier</i>
PT Semen Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Pemasok Material/ <i>Material Supplier</i>
PT Semen Indonesia Beton	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Pemasok Material/ <i>Material Supplier</i>
PT Semen Padang	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>	Pemasok Material/ <i>Material Supplier</i>

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of balances and transactions balances with parties are related as follows:

	2020		2019		
Aset					Assets
Kas dan Setara Kas	1,022,109,890,317	66.28%	1,154,102,597,716	72.03%	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha - bersih	413,057,690,355	65.28%	738,604,641,514	55.06%	Trade Receivables-net
Piutang Retensi- bersih	3,829,682,989	4.49%	--	0.00%	Retention Receivables-net
Piutang Lain-lain	13,502,908,306	72.05%	15,776,036,586	73.52%	Other Receivable
Pendapatan akan Diterima - bersih	1,021,594,171,264	78.16%	1,544,881,964,353	84.75%	Accrued Income - net
Tagihan Bruto - bersih	12,498,198,506	6.30%	--	0.00%	Gross Amount Due From Customer - net
Proyek Dalam Pelaksanaan	19,788,714,529	31.22%	17,674,595,486	33.98%	Project on Progress
Liabilitas					Liabilities
Utang Pemasok	81,580,349,917	17.68%	36,321,400,786	8.86%	Supplier Payable
Utang Subkontraktor	13,290,688,641	5.55%	3,132,105,313	0.68%	Subcontractor Payable
Utang Bank Jangka Pendek	1,489,912,482,633	63.04%	1,080,989,331,253	53.10%	Short-term Bank Loans
Uang muka Dari Pelanggan	62,923,302,156	34.65%	133,446,265,711	24.01%	Advances from customer
Pendapatan Diterima di Muka	13,261,026,782	14.70%	160,996,526,484	54.26%	Unearned Revenue
Utang Bank Jangka Panjang	380,000,000,000	100.00%	750,000,000,000	100.00%	Long-term Bank Loans
Utang Lain-lain	--	0%	14,432,448,262	35.26%	Other Payables
Pendapatan					Revenue
Pendapatan Usaha	3,107,423,116,652	64.69%	4,354,651,357,511	61.48%	Revenue

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

40. Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing

Informasi aset dan liabilitas dalam mata uang asing Grup adalah sebagai berikut:

	2020						
	USD	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	EURO	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	SGD	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Aset							Assets
Kas dan Setara Kas	171,548	2,419,690,551	--	--	10,032	106,778,955	Cash and Cash Equivalent
Liabilitas							Liabilities
Utang Usaha	(73,615)	(1,038,336,915)	(16,450)	(285,082,510)	--	--	Account Payables
Aset (Liabilitas)	97,933	1,381,353,636	(16,450)	(285,082,510)	10,032	106,778,955	Assets (Liabilities)
	2019						
	USD	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	EURO	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	SGD	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Aset							Assets
Kas dan Setara Kas	129,267	1,796,942,815	--	--	10,151	104,770,578	Cash and Cash Equivalent
Liabilitas							Liabilities
Utang Usaha	(246,779)	(3,430,471,312)	--	--	--	--	Account Payables
Aset (Liabilitas)	(117,512)	(1,633,528,497)	--	--	10,151	104,770,578	Assets (Liabilities)

41. Informasi Segmen

Informasi segmen operasi Grup adalah sebagai berikut:

	2020					
	Beton/ Concrete Rp	Quarry/ Quarry Rp	Jasa/ Service Rp	Kantor Pusat/ Head Office Rp	Jumlah/ Total Rp	
Penjualan Bersih	4,040,796,339,665	30,310,781,341	732,252,170,712	--	4,803,359,291,718	Net Sales
Beban Pokok Penjualan	(3,785,382,204,464)	(28,596,008,909)	(679,858,133,404)	--	(4,493,836,346,777)	Cost Of Revenues
Hasil Segmen	255,414,135,201	1,714,772,432	52,394,037,308	--	309,522,944,941	Segment Result
Beban Usaha	(103,796,895,384)	(675,948,135)	(20,653,266,383)	--	(125,126,109,902)	Operating Expense
Penghasilan bunga	19,857,487,086	130,673,367	3,992,661,152	--	23,980,821,605	Interest Income
Beban bunga	(93,846,218,323)	(613,229,683)	(18,736,934,591)	--	(113,196,382,597)	Interest Expenses
Penghasilan (beban) lain - lain bersih	28,094,962,826	229,082,065	6,999,491,031	--	35,323,535,922	Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak	105,723,471,406	785,350,046	23,995,988,517	--	130,504,809,969	Profit Before Tax
Beban Pajak	(3,643,508,947)	(117,708,093)	(3,596,513,509)	--	(7,357,730,549)	Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	102,079,962,459	667,641,954	20,399,475,007	--	123,147,079,420	Profit for the year
Informasi lainnya						Other information
Aset segmen	5,741,471,658,276	298,202,938,587	290,899,094,910	2,178,443,607,821	8,509,017,299,594	Segment assets
Liabilitas Segmen	1,656,781,077,087	274,756,124,723	214,776,065,427	2,972,131,033,233	5,118,444,300,470	Segment liabilities
Perolehan Aset Tetap	250,187,253,897	63,937,170,426	925,335,250	2,794,416,605	317,844,176,178	Capital expenditures
Penyusutan	182,467,184,586	17,479,486,542	38,694,068,185	11,789,567,796	250,430,307,109	Depreciation
	2019					
	Beton/ Concrete Rp	Quarry/ Quarry Rp	Jasa/ Service Rp	Kantor Pusat/ Head office Rp	Jumlah/ Total Rp	
Penjualan Bersih	6,015,554,407,013	75,346,406,789	992,483,653,785	--	7,083,384,467,587	Net Sales
Beban Pokok Penjualan	(5,206,283,353,324)	(62,609,989,388)	(863,774,112,492)	--	(6,132,667,455,204)	Cost Of Revenues
Hasil Segmen	809,271,053,689	12,736,417,401	128,709,541,293	--	950,717,012,383	Segment Result
Beban Usaha	(131,965,060,730)	(1,647,300,266)	(21,698,693,499)	--	(155,311,054,495)	Interest Expenses
Penghasilan bunga	6,815,791,559	106,794,534	1,406,727,062	--	8,329,313,155	Interest Income
Beban bunga	(123,723,706,465)	(1,572,840,115)	(20,717,883,847)	--	(146,014,430,427)	Interest Expenses
Penghasilan (beban) lain - lain bersih	(29,728,810,777)	(121,468,503)	(1,600,016,626)	--	(31,450,295,906)	Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak	530,669,267,276	9,501,603,051	86,099,674,383	--	626,270,544,711	Profit Before Tax
Beban Pajak	(92,367,044,044)	(1,636,417,998)	(21,555,349,264)	--	(115,558,811,307)	Tax Expenses
Laba Bersih Periode Berjalan	438,302,223,231	7,865,185,053	64,544,325,118	--	510,711,733,404	Net Income for the year
Informasi lainnya						Other information
Aset Segmen	7,350,242,922,405	244,548,217,212	785,268,206,312	1,957,835,741,278	10,337,895,087,207	Segment assets
Liabilitas Segmen	2,687,288,604,173	235,430,461,299	431,555,561,218	3,475,174,520,510	6,829,449,147,200	Segment liabilities
Perolehan Aset Tetap	345,531,829,150	--	3,210,455,940	15,849,671,665	364,591,956,755	Capital expenditures
Penyusutan	189,848,882,458	15,880,301,437	29,450,395,337	13,471,152,309	248,650,731,541	Depreciation

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Informasi segmen geografis Grup adalah
sebagai berikut:

The Group geographic segment information
is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Pendapatan			Revenue
Jawa	2,280,793,678,166	3,918,497,390,600	Java
Luar Jawa	2,522,565,613,552	3,164,887,076,987	Non - Java
Jumlah	4,803,359,291,718	7,083,384,467,587	Total
Laba Tahun Berjalan			Profit for the Year
Jawa	36,752,409,195	206,525,673,716	Java
Luar Jawa	86,394,670,225	304,186,059,687	Non - Java
Jumlah	123,147,079,420	510,711,733,403	Total
Total Aset			Assets Total
Jawa	4,969,220,433,556	6,199,942,427,244	Java
Luar Jawa	3,539,796,866,038	4,137,952,659,963	Non - Java
Jumlah	8,509,017,299,594	10,337,895,087,207	Total

42. Perikatan dan Perjanjian

42. Commitments and Agreements

No./ No.	Nama Proyek/ Name of Project	Nilai Kontrak/ Contract Value	Pemberi Kerja/ Owner	Masa Pelaksanaan/ Contract Period	Nomor Kontrak/ Contract Number
1	Kereta Cepat Jakarta-Bandung Section 4 (CK 118 Baros)	238,147,984,624	HIGH SPEED RAILWAY CONTRACTOR CONSORTIUM-TEAM WIKA	29 Mei 2020 sampai 21 Desember 2021/ May 29, 2020 until December 21, 2021	TP.02.01/HSRCC.WIKA.P/0993/VIII/2020
2	Pengadaan Slab Track Precast	221,950,000,000	HIGH SPEED RAILWAY CONTRACTOR CONSORTIUM-TEAM WIKA	22 April 2022 sampai selesai/ April 22, 2022 until finish	TP.02.01/HSRCC.WIKA.P/...XII/2020
3	High Speed Railway - BJR	194,735,000,000	HIGH SPEED RAILWAY CONTRACTOR CONSORTIUM-TEAM WIKA	Selesai 28 Februari 2022/ Finish on February 28, 2022	TP.02.01/HSRCC.WIKA.P/1515/X/2020
4	Dermaga Patimban (BR)	93,225,000,000	WIKA - PP, JO	Selesai 28 Juni 2021/ Finish on June 28, 2021	WP/PTBP3/KOMPPB/0010/VIII/2020
5	Pemancangan Proyek RDMP Balikpapan	54,737,975,750	JO SK E&C CO.,LTD , HEC LTD, PT REKIND AND PT PP (PERSERO), TBK.	20 Juli 2020 sampai 20 Juli 2021/ July 20, 2020 until July 20, 2021	RDMP-R-SC-PIL-007
6	Pabrik PT New Asia International	42,816,000,000	PT New Asia International	Selesai Juni 2021/ Finish on June 2021	NAI/WIKA-004P00
7	Jembatan Tahang 5,6,7,8,8A,10,11 - PIK2	31,755,894,000	PT Wijaya Karya Tbk.	Selesai Juni 2021/ Finish on June 2021	TP.01.03/WB-1C.098/2020
8	Terminal Multipurpose Teluk Lamong	21,264,749,000	Pelindo 3	Selesai Maret 2021/ Finish on March 2021	TP.02.03/B.FOT.366/XII/2020
9	Pembangunan Jalan Kendari - Toronipa II (BR)	18,994,800,000	PP-KPS KSO	Januari Sampai April 2021/ January until April 2021	015-ADD1/SPJB/STC/220323/PPKPS/XII/2020
10	Pembangunan Jalan Kendari - Toronipa II (PI)	17,165,760,000	PP-KPS KSO	Agustus 2020 Sampai Februari 2021/ August 2020 until February 2021	001-ADD1/SPJB/STC/220323/PPKPS/XII/2020
11	PLTU Sorong (Ex-Timika) 4x7 MW di Arar, Sorong	15,488,568,000	PT Rekadaya Elektrika	Januari Sampai Maret 2021/ January until March 2021	130.PO/RE/131808/XII/2020
12	UIN Serang- Banten	11,369,500,000	WIKA - WG, KSO	Selesai 28 Februari 2022/ Finish on February 28, 2022	TP.02.01/UINS/WIKA-WG/ADD/001/XII/2020
13	Dinding Penahan Longsor SWRC	3,904,056,000	PT WILMAR NABATI INDONESIA	Februari Sampai Maret 2021/ February until March 2021	NO PO: 8102369979
14	Pembangunan Pabrik PVC di Sayung - Demak	921,240,000	PT Pakubumi Semesta	8 Februari 2021	TP.01.03/WB.1D-0002/2021
15	Rekonstruksi Bendung Sungai Sulu di Pasangkayu	900,000,000	PT Putra Jaya	Januari Sampai Maret 2021/ January until March 2021	TP.02.01/WB-1F.0001/21

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

**43. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko
Keuangan dan Modal**

**43. Financial Instrument, Financial and
Capital Risk Management**

Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

**Categories and Classes Financial
Instruments**

	2020 Rp	2019 Rp	
<u>Aset Keuangan</u>			<u>Financial Assets</u>
Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi			Financial Assets Measured at Amortized Cost
Kas dan Setara Kas	1,542,217,223,256	1,602,280,750,520	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	632,738,063,839	1,270,048,955,458	Trade Receivables
Piutang Retensi	85,382,991,081	39,484,142,827	Retention Receivables
Pendapatan Akan Diterima	1,306,973,648,076	1,822,894,033,207	Accrued Income
Piutang Lain-lain	18,740,129,445	21,459,194,735	Other Receivable
Tagihan bruto pemberi kerja	198,458,567,760	461,166,732,495	Gross Amount Due From Customer
	3,784,510,623,457	5,217,333,809,242	
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)			Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Aset Tidak Lancar Lainnya	9,153,000,000	21,419,000,000	Other Non-current Assets
Jumlah	3,793,663,623,457	5,238,752,809,242	Total
<u>Liabilitas Keuangan</u>			<u>Financial Liabilities</u>
Liabilitas pada Biaya Perolehan Diamortisasi			Liabilities at Amortized Cost
Pinjaman Jangka Pendek	2,363,381,456,028	2,035,684,801,444	Short-Term Loans
Utang Usaha	718,173,901,491	898,547,342,332	Account Payables
Beban Akrua	1,254,006,182,137	2,065,504,675,825	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	4,432,841,183	40,937,243,638	Other Payables
Pinjaman Bank Jangka Panjang	380,000,000,000	750,000,000,000	Long - Term Payables
Liabilitas Sewa	44,906,079,226	112,159,716,789	Lease Liabilities
Jumlah	4,764,900,460,065	5,902,833,780,028	Total

**Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan**

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai risiko keuangan, termasuk dampak nilai tukar mata uang asing, tingkat harga komoditas dan tingkat suku bunga. Program manajemen risiko keseluruhan yang dimiliki Grup ditujukan untuk menghadapi ketidakpastian harga komoditas dan untuk meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko dijalankan oleh Dewan Direksi Grup. Dewan Direksi melakukan identifikasi, evaluasi dan lindung nilai terhadap risiko-risiko keuangan, apabila dianggap perlu. Komite menentukan prinsip manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk risiko pasar, kredit dan likuiditas.

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar mengandung 3 tipe risiko: risiko harga, risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai

**Financial Risk Management Policies and
Objectives**

Various activities undertaken to the Group's is exposed to various financial risks, including the impact of foreign currency exchange rates, commodity prices and the level of interest rates. Group's overall risk management programs aim to deal with the uncertain price of commodities and to minimize its adverse impact to Group's financial performance.

Risk management is run by Group's Board of Directors. Board of Directors perform identification, evaluation and hedging of financial risks, if deemed necessary. The Committee determines the overall risk management principles, including market risk, credit risk and liquidity risk.

1. Market Risk

Market risk is the risk of the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk contains three types of risk: price risk, interest rate risk and foreign currency

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

mata uang asing. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan setara kas, piutang usaha dan utang usaha.

a. Risiko suku bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Grup memiliki pinjaman jangka pendek dengan bunga mengambang. Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba Grup.

Pinjaman Grup yang dikenakan suku bunga mengambang untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp916.579.091.337 dan Rp1.678.846.345.146.

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba sebelum pajak dengan semua variabel lain tetap:

	2020 Rp
Naik 100 bps	(9,165,790,913)
Turun 100 bps	9,165,790,913

b. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas dimasa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perusahaan. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang pengadaan barang dan jasa dalam mata uang USD dan SGD.

Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 5% perubahan kurs nilai mata uang asing terhadap laba sebelum pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	2020 Rp
Kenaikan 5%	60,152,504
Penurunan 5%	(60,152,504)

risk. Financial instruments affected by market risk include cash and cash equivalents, accounts receivable and accounts payable.

a. Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in market interest rates. The Group has short-term loans with floating interest. The quite high interest rate that suddenly occurs will affect the decreasing Group's Income.

The Group loans which bear floating interest rates for the years ended December 31, 2020 and 2019, amounting to Rp916,579,091,337 and Rp1,678,846,345,146, respectively.

Effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to income before tax with all other variables constant:

	2019 Rp	
	(16,788,463,451)	Increase 100 bps
	16,788,463,451	Decrease 100 bps

b. Foreign currency risk

The risk of foreign currency exchange rate is the risk of changes in fair value of future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates used by the Company. The Company's exposure to exchange rate fluctuations primarily derived from procurement of debt denominated in USD and SGD.

Sensitivity analysis of the 5% fluctuation in the foreign exchange rates to profit before tax with other variance considered as constant is as follow:

	2019 Rp	
	(266,609,235)	Increase 5%
	266,609,235	Decrease 5%

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

2. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang dihadapi Grup sebagai akibat wanprestasi dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu pelanggan dan pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Kebijakan manajemen dalam mengantisipasi risiko kredit yang timbul dari pelanggan adalah sebagai berikut:

- a. Grup hanya akan melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga yang diakui, kredibel dan bankable.
- b. Mempunyai kebijakan untuk penjualan kredit dan semua pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

Grup meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti kas setara kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana. Eksposur maksimum risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana di ungkapkan pada Catatan 6, 7 dan 8. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan.

2. Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss from defaulted third parties. Third parties are referred to the customers and counter parties that fail to discharge their contractual obligations.

Management policies in anticipation of this credit risk arise from the customer are as follows:

- a. The Group will only do business relationship with third parties who are recognized, credible and bankable.*
- b. Have a policy for credit sales and all third parties who will make credit sales have to go through credit verification procedures.*

The Group minimise credit risks financial assets such as cash and cash equivalent by maintaining minimum cash balance and select qualified bank for the placement of funds. The maximum exposure to the credit risk is represented by the carrying amount as shown in Notes 6, 7 and 8. There is no significant concentration of credit risk.

	2020 Rp	2019 Rp	
Piutang Usaha	816,619,369,355	1,301,934,381,931	Trade Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(183,881,305,516)	(31,885,426,473)	Allowances for Impairment Losses
Piutang Retensi	92,641,196,925	39,484,142,827	Retention Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7,258,205,844)	--	Allowances for Impairment Losses
Pendapatan Akan Di terima	1,316,639,909,697	1,822,894,033,207	Accrued Income
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9,666,261,621)	--	Allowances for Impairment Losses
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	200,312,478,681	461,166,732,495	Gross Amount Due From Customer
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,853,910,921)	--	Allowances for Impairment Losses
Jumlah	2,223,553,270,756	3,593,593,863,987	Total

3. Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek - menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

3. Liquidity risk

The ultimate responsibility for liquidity risk is in board of directors, whom has established liquidity risk management framework suitable for the management of the Group's short - medium and long-term funding as well as and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Tabel berikut juga merinci ekspektasi jatuh tempo untuk aset keuangan non-derivatif Grup. Tabel disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak tak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut. Dicantumkannya informasi aset keuangan non-derivatif diperlukan dalam rangka untuk memahami manajemen risiko likuiditas Grup dimana likuiditas dikelola atas dasar aset dan liabilitas bersih.

The following table details the Group's expected maturity for its non-derivative financial assets. The table has been drawn up based on the undiscounted contractual maturities of the financial assets including interest that will be earned on those assets. The inclusion of information on non-derivative financial assets is necessary in order to understand the Group liquidity risk management as the liquidity is managed on a net asset and liability basis.

	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ Weighted average effective interest rate	< 1 Tahun/ < 1 Year	1 - 2 Tahun/ 1 - 2 Years	2 - 3 Tahun/ 2 - 3 Years	Jumlah/ Total	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
31 Desember 2020						December 31, 2020
Aset						Assets
Tanpa Bunga						Non-Interest Bearing
Kas		937,750,102	--	--	937,750,102	Cash
Piutang Usaha						Trade Receivables
Pihak Berelasi		413,057,690,355	--	--	413,057,690,355	Related Parties
Pihak Ketiga		219,680,373,484	--	--	219,680,373,484	Third Parties
Piutang Lain-lain		18,740,129,445	--	--	18,740,129,445	Other Receivable
Tagihan Bruto						Gross Amount Due
Pemberi Kerja		198,458,567,760	--	--	198,458,567,760	From Customer
Pendapatan Akan Diterima		1,306,973,648,076	--	--	1,306,973,648,076	Accrued Income
Instrumen Suku Bunga Variable						Variable Interest Rate Instrument
Kas di Bank	1,00% - 2,50%	1,009,279,473,154	--	--	1,009,279,473,154	Cash in Bank
Instrumen Suku Bunga Tetap						Fixed Interest Rate Instrument
Deposito	4,00% - 8,50%	532,000,000,000	--	--	532,000,000,000	Deposits
Jumlah		3,699,127,632,376	--	--	3,699,127,632,376	Total
31 Desember 2020						December 31, 2020
Liabilitas						Liabilities
Tanpa bunga						Non-interest Bearing
Utang Usaha						Trade Payables
Pihak Berelasi		94,871,038,558	--	--	94,871,038,558	Related Parties
Pihak Ketiga		611,854,895,806	11,447,967,127	--	623,302,862,933	Third Parties
Utang Lain-lain		4,432,841,183	--	--	4,432,841,183	Other Payables
Beban Akrua		1,254,006,182,137	--	--	1,254,006,182,137	Accrued Expense
Instrumen Suku Bunga Variable						Variable Interest Rate Interest
Utang Lain-lain	10,5%	--	--	--	--	Other Payables
Liabilitas Sewa	9,15-9,69%	44,193,711,079	698,911,323	13,456,824	44,906,079,226	Lease Liabilities
Pinjaman Jangka Pendek	8,5%-10,25%	2,363,381,456,028	--	--	2,363,381,456,028	Short-term Loan
Pinjaman Jangka Panjang	9,25%	--	380,000,000,000	--	380,000,000,000	Long-term Loan
Jumlah		4,372,740,124,791	392,146,878,450	13,456,824	4,764,900,460,065	Total
	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ Weighted average effective interest rate	< 1 Tahun/ < 1 Year	1 - 2 Tahun/ 1 - 2 Years	2 - 3 Tahun/ 2 - 3 Years	Jumlah/ Total	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
31 Desember 2019						December 31, 2019
Aset						Assets
Tanpa Bunga						Non-interest bearing
Kas		530,388,200	--	--	530,388,200	Cash
Piutang Usaha						Trade Receivables
Pihak Berelasi		738,604,641,514	--	--	738,604,641,514	Related Parties
Pihak Ketiga		570,928,456,771	--	--	570,928,456,771	Third Parties
Piutang Lain-lain		21,459,194,735	--	--	21,459,194,735	Other Receivable
Tagihan Bruto						Gross Amount Due
Pemberi Kerja		461,166,732,495	--	--	461,166,732,495	From Customer
Pendapatan Akan Diterima		1,822,894,033,207	--	--	1,822,894,033,207	Accrued Income
Instrumen Suku Bunga Variable						Variable Interest Rate Instrument
Kas di Bank	1,00% - 2,50%	606,748,241,087	--	--	606,748,241,087	Cash in Bank
Instrumen Suku Bunga Tetap						Fixed Interest Rate Instrument
Deposito	4,00% - 8,50%	995,002,121,233	--	--	995,002,121,233	Deposits
Jumlah		5,217,333,809,243	--	--	5,217,333,809,243	Total
31 Desember 2019						December 31, 2019
Liabilitas						Liabilities
Tanpa Bunga						Non-interest Bearing
Utang Usaha						Trade Payables
Pihak Berelasi		39,453,506,099	--	--	39,453,506,099	Related Parties
Pihak Ketiga		859,093,836,233	--	--	859,093,836,233	Third Parties
Utang Lain-lain		26,504,795,376	--	--	26,504,795,376	Other Payables
Beban Akrua		2,065,504,675,825	--	--	2,065,504,675,825	Accrued Expense
Instrumen suku bunga variable						Variable Interest Rate Interest
Utang Lain-lain	10,50%	14,432,448,262	--	--	14,432,448,262	Other Payables
Liabilitas Sewa	9,15-9,69%	77,947,654,987	34,189,160,956	22,900,846	112,159,716,789	Lease Liabilities
Pinjaman Jangka Pendek	8,5%-10,25%	2,035,684,801,444	--	--	2,035,684,801,444	Short-term Loan
Pinjaman Jangka Panjang	9,25%	250,000,000,000	--	500,000,000,000	750,000,000,000	Long-term Loan
Jumlah		5,368,621,718,226	34,189,160,956	500,022,900,846	5,902,833,780,028	Total

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk aset dan liabilitas keuangan non-derivatif akan berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam tingkat yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Tingkat 1));
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tingkat 2); atau
- Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Tingkat 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara tingkat hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both nonderivative financial assets and liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2); or*
- *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Berikut hirarki nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

Below is the fair value hierarchy for financial assets measured at fair value through profit and loss:

	2020 Rp	Tingkat I/ Level I Rp	Tingkat II/ Level II Rp	Tingkat III/ Level III Rp	
Aset Keuangan yang Diukur Dengan Laba dan Rugi					<i>Financial Assets Through Profit and Loss</i>
Aset Tidak Lancar Lainnya PT Istaka Karya	9,153,000,000	--	9,153,000,000	--	<i>Other Non-Current Assets PT Istaka Karya</i>

Manajemen Risiko Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Capital Risk Management

The primary objective of the Group capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Perusahaan disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas. Selain itu, Perusahaan juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipertimbangkan oleh Perusahaan serta telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The Company are required under their respective loan agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement has been complied with by the relevant entities. In addition, the Company are also required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities, effective August 16, 2007, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Company decided at the Annual General Meeting of shareholders (RUPS).

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The Company manages theirs capital structure and makes adjustments to it, if necessary, based on changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the years ended December 31, 2020 and 2019.

Perusahaan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi total pinjaman berdampak bunga dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran rasio pengungkit Perusahaan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses

The Company monitors its capital using gearing ratios, by dividing interest bearing loan to total equity attributable to equity holders of the parent entity. The Company's policy is to maintain its gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in Indonesia in order to secure access to financing at a reasonable cost. Including in interest

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Termasuk dalam total pinjaman berdampak bunga adalah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang, utang lain-lain dan utang sewa pembiayaan.

bearing loan are short-term bank loans and long-term bank loans, other payable and finance lease payable.

Rasio pengungkit pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The gearing ratios as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Pinjaman Jangka Pendek	492,236,042,243	894,634,283,344	Short Term Loans
Pinjaman Jangka Panjang	424,343,049,094	784,212,061,802	Long Term Loans
Jumlah	916,579,091,337	1,678,846,345,146	Total
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3,324,713,784,385	3,437,717,977,623	Total Equity Attribute to Owner of The Parent Entity
Gearing Ratio	27.57%	48.84%	Gearing ratio

*) Pada tahun 2020, diluar Pinjaman Kredit Mitra Usaha/ Exclude Supply-Chain Financing

*) Pada tahun 2019, termasuk Pinjaman Kredit Mitra Usaha / Include Supply-Chain Financing

44. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

44. Reconciliation of Liabilities Arising From Financing Activities

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	2020					
	Arus Kas (untuk) dari Aktifitas Pendanaan/ Financing Cash Flow			Perubahan Transaksi NonKas/ Non-Cash Changes		Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penerimaan/ Receipt Rp	Pembayaran/ Payment Rp	Pinjaman Non Kas / Non Cash Loan Rp	Penambahan Aset Hak-Guna/ Additional of Right-use-of-Assets Rp	
Pinjaman Jangka Pendek/ Short-term Loan	2,035,684,801,444	1,707,013,027,642	(1,667,710,445,688)	288,394,072,630	--	
Pinjaman Jangka Panjang/ Long-term Debt	750,000,000,000	--	(370,000,000,000)	--	--	380,000,000,000
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	112,159,716,789	--	(76,096,110,176)	--	8,842,472,613	44,906,079,226
Jumlah / Total	2,897,844,518,233	1,707,013,027,642	(2,113,806,555,864)	288,394,072,630	8,842,472,613	2,788,287,535,254

	2019					
	Arus Kas (untuk) dari Aktifitas Pendanaan/ Financing Cash Flow			Perubahan Transaksi NonKas/ Non-Cash Changes		Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penerimaan/ Receipt Rp	Pembayaran/ Payment Rp	Pinjaman Non Kas / Non Cash Loan Rp	Penambahan Aset Tetap/ Additional of Fixed Assets Rp	
Pinjaman Jangka Pendek/ Short-term Loan	1,455,222,308,428	2,549,709,785,729	(2,727,751,085,706)	758,503,792,993	--	
Pinjaman Jangka Panjang/ Long-term Debt	350,000,000,000	700,000,000,000	(300,000,000,000)	--	--	750,000,000,000
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	75,097,938,445	--	(55,398,283,223)	--	92,460,061,567	112,159,716,789
Jumlah / Total	1,880,320,246,873	3,249,709,785,729	(3,083,149,368,929)	758,503,792,993	92,460,061,567	2,897,844,518,233

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

45. Transaksi Non-Kas

Berikut aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:

- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, penambahan aset tetap melalui utang usaha dan sewa pembiayaan adalah masing-masing sebesar Rp21.930.232.690 dan Rp180.024.275.324.

46. Kejadian Penting Lainnya

Dampak Darurat Bencana Wabah Virus Corona

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, telah terjadi pandemik virus COVID-19 yang mengakibatkan kenaikan nilai tukar mata uang asing dan menurunnya kegiatan di sektor ekonomi.

Secara langsung dan tidak langsung, dampak ini tentunya juga akan mempengaruhi kegiatan operasional Grup pada beberapa bulan mendatang. Sehingga beberapa proyek/ penjualan baru mengalami penundaan untuk sementara waktu.

Dampak pandemik virus COVID-19 dari awal tahun 2020 sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi adalah signifikan terhadap kinerja perusahaan dan operasional.

Dampak signifikan terhadap kinerja operasional Perusahaan tahun 2020 dibandingkan dengan kinerja operasional Perusahaan tahun 2019 sebagai berikut:

1. Realisasi Kontrak baru 51,58% dari *Audited* Tahun 2019.
2. Realisasi Penjualan 67,81% dari *Audited* Tahun 2019.
3. Realisasi Laba bersih (sebelum minoritas) 23,96% dari *Audited* Tahun 2019.

Serta Perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dampak pandemic Covid-19, dengan cara:

1. Efisiensi biaya usaha sebesar minimal 20% dari rencana awal khususnya pada anggaran yang tidak mandatori, seperti misalnya pengurangan biaya perjalanan dinas, pengurangan biaya pelatihan, pemotongan gaji karyawan serta tidak ada karyawan baru.

45. Non-Cash Transaction

The following are investing activities and financing which do not affect cash flows:

- *For the year ended December 31, 2020 and 2019, additional fixed assets through accounts payable and lease liabilities amounted to Rp21,930,232,690 and Rp180,024,275,324, respectively.*

46. Other Important Event

Effect of Emergency Conditions Due to Corona Virus

As of the authorization date of the issuance of the consolidated financial statement, the COVID-19 virus pandemic has occurred, which has resulted in an increase in foreign exchange rates and declining economic activity.

Directly and indirectly, this impact will certainly also affect the Group's operations in the coming months. Therefore, several new projects/ sales have been temporarily delayed.

The impact of the COVID-19 pandemic virus from the beginning of 2020 until the date of the financial statements is significant for company performance and operations.

Significant impact on the Company's operational performance in 2020 compared to the Company's operational performance in 2019 as follows:

1. *Realization of new contracts 51.58% of Audited Year 2019.*
2. *Realization of Sales 67.81% of Audited Year 2019.*
3. *Realization of Net profit (before minority) 23.96% of Audited Year 2019.*

As well as the company issued a policy to deal with the impact of the Covid-19 pandemic, by:

1. *Efficiency of business costs of at least 20% of the initial plan, especially on non-mandatory budgets, such as reducing the cost of official travel, reducing training costs, cutting employee salaries and not accepting new employees.*

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

2. Efisiensi biaya bunga.
3. Mempercepat pencairan piutang, terutama piutang-piutang yang sudah lama. Setiap unit kerja harus mengupayakan percepatan pemulihan atas impairment.
4. Sangat selektif dalam melaksanakan investasi.

2. Efficiency of interest costs.
3. Accelerate the disbursement of accounts receivable, especially old receivables. Each work unit must strive to accelerate recovery for impairments.
4. Very selective in investing.

47. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan arus kas konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah di reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

47. Reclassification Account

Several accounts in the consolidated statements of cash flows as of and for the year ended 31 December 2019 have been reclassified to match the presentation of the consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2020.

Notes	2019			
	Sebelum Reklasifikasi Rp	Reklasifikasi Rp	Setelah Reklasifikasi Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran Beban Pinjaman	(148,626,425,566)	148,626,425,566	--	Interest Paid
Penerimaan Bunga	9,184,039,904	(9,184,039,904)	--	Interest Receipt
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan Bunga	--	9,184,039,904	9,184,039,904	Interest Receipt
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Beban Pinjaman	--	(148,626,425,566)	(148,626,425,566)	Payment of Loan Expenses

48. Kontinjensi

Pemerolehan Aset Tanah

Pada tahun 2020, atas Pelaporan Perusahaan terhadap dugaan penipuan dan/atau penggelapan oleh Pengurus (Direktur Utama atas nama Muhammad Ali dan Komisaris Utama atas nama Burhanuddin) PT Agrawisesa Widyatama telah tercatat perkara dengan nomor register 589/Pid-B/2020/PN.JktSel. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Perusahaan sebagai pembeli aset berupa tanah seluas 50 Ha untuk pengembangan Pabrik di Subang melaporkan dugaan penipuan dan/atau penggelapan sehubungan dengan perjanjian jual beli yang secara tegas telah disepakati bahwa pemecahan sertifikat serta peralihan haknya akan dilakukan setelah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 722 seluas 1.996.977 m² atas nama PT Agrawisesa Widyatama terbit, namun faktanya setelah SHGB terbit tidak dilakukan penyerahan guna memenuhi klausul yang tercantum dalam Akta Perjanjian Jual Beli tersebut, justru di ketahui telah diserahkan kepada pihak Lain.

48. Contingency

Acquisition of Land Assets

In 2020, the Company has reported a suspected fraud and / or embezzlement by President Director named Muhammad Ali and President Commissioner named Burhanuddin of PT Agrawisesa Widyatama as a case recorded with register number 589 / Pid-B / 2020 / PN.JktSel. Based on this, it is known that the Company as a buyer of assets in the form of land covering an area of 50 hectares for the development of a factory in Subang, has reported a suspected fraud and / or embezzlement in connection with a sale and purchase agreement which had been explicitly agreed that the certificate breaking and transfer of rights would be carried out after the Building Use Right Certificate. (SHGB) No 722 covering an area of 1,996,977 sqm registered under PT Agrawisesa Widyatama was issued, but the fact is that after the SHGB was issued no submission was made to comply with the clause stated in the Sale and Purchase Agreement, in fact it was known that it had been submitted to another party.

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Dalam Putusan No. 589/Pid-B/2020/PN.JktSel tanggal 16 September 2020, memutuskan bersalah saudara Muhammad Ali dengan pidana penjara 1 tahun. Atas putusan tersebut Muhammad Ali mengajukan proses banding di Pengadilan Tinggi di DKI Jakarta. Atas hal tersebut, Pengadilan Tinggi dalam putusan No 441/PID/2020/PT.DKI tanggal 14 Desember 2020 menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada saudara Muhammad Ali.

Selain itu Perusahaan juga telah melakukan upaya-upaya penyelesaian non litigasi dengan mengajukan pembatalan sebagian sertipikat dari SHGB 722 melalui Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan telah terbit surat rekomendasi pembatalan sertipikat tersebut oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat kepada Kementerian Agraria dan tata Ruang/BPN Pusat dengan nomor MP.01.01/1083-32.600/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.

Atas surat permohonan dan rekomendasi tersebut, telah terbit surat keterangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang menerangkan sampai dengan saat ini masih dalam proses penanganan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (Sebagaimana Surat Direktur Pencegahan dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tanggal 5 Februari 2021 Nomor SK. 06.03/28-800.38/11/2021).

Bahwa berdasarkan dokumen dan fakta - fakta serta tahapan proses yang telah perusahaan lakukan, perusahaan memiliki *legal standing* yang kuat dan proses pemecahan sertipikat akan dapat diselesaikan.

In Decision No. 589 / Pid-B / 2020 / PN.JktSel September 16, 2020, the South Jakarta District Court found Muhammad Ali guilty of 1 year imprisonment. Muhammad Ali filed an appeal against the decision at the High Court in DKI Jakarta. For this, the High Court in decision No 441/PID/2020/PT.DKI dated December 14, 2020 sentenced Muhammad Ali to a prison sentence of 3 years.

In addition, the Company has also made non-litigation resolution efforts by proposing the cancellation of the certificate from SHGB 722 partially through the West Java Provincial BPN Regional Office and a recommendation letter of for that certificate cancellation has been issued by the West Java Provincial BPN Regional Office to the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / Central BPN with number MP.01.01 / 1083-32.600 / VII / 2020 dated 20 July 2020.

On the request and recommendation letter, a statement letter from the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / BPN has been issued which states that until now it is still in the handling process at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / BPN. (Such as the Letter of the Director for Prevention and Handling of Land Disputes and Conflicts at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / BPN dated February 5, 2021 Number SK. 06.03 / 28-800.38 / 11/2021).

Whereas based on documents and facts as well as the stages of the process that the company has carried out, the company has a strong legal standing and the certificate breaking process will be completed.

49. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2021.

49. Management's Responsibility and Approval of The Consolidated Financial Statements

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors for issuance on February 18, 2021.



PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.



WIKA Tower I
Jl. D. I. Panjaitan Kav. 9, Lt. 2-4
DKI Jakarta - 13340
(021) 8067 9200
wbcc@wika-beton.co.id
www.wikabeton.co.id



LAPORAN TAHUNAN
2020
ANNUAL REPORT



PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Kantor Pusat

PT Wijaya Karya Beton Tbk
WIK Tower 1 Lt. 2-5
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta 13340

Online

Humas : sekper@wika-beton.co.id
Pemasaran : marketing@wika-beton.co.id
Website : www.wika-beton.co.id